

Editor:
Reza Amarta Prayoga,
Badrun Susantyo,
Ratna Rizki Amalia



Catatan Emik Sensus Pertanian Jilid 1 Sumatra

Catatan Emik Sensus Pertanian Jilid 1 Sumatra



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Editor:
Reza Amarta Prayoga,
Badrun Susantyo,
Ratna Rizki Amalia



Catatan Emik Sensus Pertanian Jilid 1 Sumatra

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2025 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Catatan Emik Sensus Pertanian Jilid 1: Sumatra/Reza Amarta Prayoga, Badrun Susantyo, & Ratna Rizki Amalia (Ed.)–Jakarta: Penerbit BRIN, 2025.

xxxiv + 516 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-6303-90-5 (*e-book*)

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pertanian Sumatra | 2. Narasi Emik |
| 3. Sensus Pertanian | 4. Sosial |

631.495981

Editor Akuisisi	: Prapti Sasiwi
<i>Copy editor</i>	: Martinus Helmiawan
<i>Proofreader</i>	: Rahma Luthfia Cahyani
Penata isi	: Meita Safitri
Desainer sampul	: Meita Safitri

Edisi pertama : Desember 2025




BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Diterbitkan oleh:


Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
WhatsApp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN

 @Penerbit_BRIN

 @penerbit.brin



BADAN PUSAT STATISTIK

Riset dan penerbitan buku ini atas dukungan:

Badan Pusat Statistik (Statistic Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6–8 Jakarta,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Website: www.bps.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	xv
Pengantar Penerbit.....	xvii
Kata Pengantar Sekretaris Utama BPS RI	xix
Kata Pengantar Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR-TKPEKM).....	xxi
Kata Pengantar Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas.....	xxv
Prakata	xxix
Ucapan Terima Kasih kepada Kepala BPS di 11 Lokus Kabupaten/Kota Amatan	xxxiii
Bab I Telisik Emik Sensus Pertanian: Memaknai Data Sebelas Lokus di Sumatra	1
Reza Amarta Prayoga & Badrun Susantyo	
Bab II Mengintip Pinang dalam Sensasi: Selintas Potret Pinang di Tanah Aceh	19
Eki Karsani Apriliyadi	

Bab III	Mengurai Persoalan Terpuruknya Jeruk Berastagi di Karo59	Herlina Tarigan
Bab IV	Hortikultura untuk Kemandirian Pangan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.....97	Abdul Mutholib
Bab V	Mengurai Data Sapi-Sawit di Kabupaten Pelalawan Riau..... 125	Khairiah
Bab VI	Karet Rakyat di Antara Impitan Sawit: Catatan dari Batang Hari, Jambi 149	Reza Amarta Prayoga
Bab VII	Menyoal Integrasi Peternakan dan Perkebunan di Bengkulu Utara 191	Siti Fatimah
Bab VIII	Mengungkapkan Potensi Agraria melalui Sensus Pertanian di Kabupaten Ogan Ilir 239	Tedi Gunawan
Bab IX	Kegagalan Petani pada <i>Food Estate</i> Padi Kabupaten Ogan Komerang Ilir..... 309	Yanter Hutapea
Bab X	Telisik Data Terong Belanda: Antara Potensi dan Fakta..... 367	Iwan Setiajie Anugrah
Bab XI	Ketidakberdayaan Petani: Menelisik Persoalan Hulu dan Hilir Pertanian Ubi Kayu..... 423	Tri Bastuti Purwantini
Bab XII	Pasang Surut Pertanian Lada Putih di Kabupaten Bangka Tengah 459	Husmiati

Bab XIII Penutup: Bukan Sebuah Kesimpulan	489
Badrun Susantyo & Reza Amarta Prayoga	
Glosarium.....	499
Indeks	501
Tentang Editor.....	507
Tentang Penulis	511

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Aceh Besar	24
Gambar 2.2	Jejeran Pohon Pinang di Kebun Penduduk.....	29
Gambar 2.3	Diskusi PPL, PML, Koseka, dan Penanggung Jawab Sensus	33
Gambar 2.4	Proses Pencacahan Keluarga Petani dengan Responden Suami sebagai Kepala Keluarga.....	36
Gambar 2.5	Proses Pengeringan Biji Pinang dan Penyimpanannya...53	
Gambar 2.6	Biji Pinang yang Dibiarkan di Pekarangan	54
Gambar 3.1	Peta Lokus Penelitian.....	63
Gambar 3.2	Festival Bunga dan Buah di Berastagi tahun 2023.....	65
Gambar 3.3	Petugas Sensus Pertanian 2023 tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Petugas Lapangan	71
Gambar 3.4	PPL sedang Mendata Didampingi PML di Desa Semangat (Barusjahe) dan Desa Barung Kersap (Munte).....	73
Gambar 3.5	Perangkap Lalat Buah Berbentuk Susunan Jeruk Rusak dan Es-esan.....	82

Gambar 4.1	Bentang Daratan Kabupaten Bintan.....	101
Gambar 4.2	Tanaman Hidroponik di Teluk Lobam	104
Gambar 4.3	Areal Persawahan Teluk Bintan	107
Gambar 4.4	Areal Perkebunan Duren di Teluk Bintan.....	108
Gambar 5.1	Peta Kabupaten Pelalawan.....	128
Gambar 5.2	Perjalanan Sapi di Dalam Kebun Kelapa Sawit.....	130
Gambar 6.1	Peta Kabupaten Batang Hari.....	154
Gambar 6.2	Peta Potensi Perkebunan di Kabupaten Batang Hari ...	154
Gambar 6.3	Logo Kabupaten Batang Hari	155
Gambar 6.4	Potret Kebun Karet yang Telah Direposisi Kebun Sawit di Bajubang, Batang Hari	158
Gambar 6.5	Potret Petani Kebun Karet Rakyat di Pelayung Batang Hari.....	159
Gambar 6.6	Proses Pendataan Sensus Pertanian oleh PPL (Prina) dan PML (Sugiman) di Rumah Petani Karet di Desa Penerokan.....	163
Gambar 6.7	Tetes Getah Karet Terhenti Tak Mengisi Batok Kelapa	167
Gambar 6.8	Tugirah, Perempuan Lansia yang Tetap Menyadap Demi Setetes Getah Karet.....	168
Gambar 6.9	Aktivitas Buruh Ganco Karet yang Memindahkan Karet Hasil Pelelangan di KUD BERDIKARI Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang.....	169
Gambar 6.10	Sirkulasi Relasional Dagang Tauke Besar, Tauke Lokal, dan Petani Karet	171
Gambar 6.11	Tawaran Skema Kerja Kolektif Pertanian Karet Berkelanjutan Berbasis Kelompok Tani	175
Gambar 6.12	Penyadap Getah Karet, Asmiyanti.....	181
Gambar 7.1	Peta Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu	193
Gambar 7.2	Luas Daerah Bengkulu Utara menurut Kecamatan.....	195
Gambar 7.3	Sebaran Penduduk di Bengkulu Utara.....	196
Gambar 7.4	Hutan Tropis Berjajar Sepanjang Jalan ke Bengkulu Utara	200
Gambar 7.5	Peta Infrastruktur Kabupaten Bengkulu Utara.....	201

Gambar 7.6	PPL dan PML sedang melakukan Sensus Pertanian 2023.....	207
Gambar 7.7	Kondisi Bentang Lahan Infrastruktur Jalan yang Rusak.....	209
Gambar 7.8	Jalan Sepanjang Jalan Bengkulu menuju Bengkulu Utara	210
Gambar 7.9	Kebun Sawit dan Karet Sepanjang Jalan ke Bengkulu Utara	211
Gambar 7.10	Hasil Panen Sawit di Pinggir Jalan yang Diambil Pengumpul	212
Gambar 7.11	Kebun Sawit tanpa Pengelolaan	213
Gambar 7.12	Kandang Sapi dengan Kotoran yang Belum Dikelola..	213
Gambar 7.13	Tanaman Sayuran di Pekarangan Rumah	214
Gambar 7.14	Pemeliharaan Ternak Dikandangan	215
Gambar 7.15	Pemeliharaan Ternak Sapi Diubar di Kebun Sawit atau Kebun Karet.....	215
Gambar 7.16	Mata Rantai Peternakan, Perkebunan, dan Pertanian..	228
Gambar 7.17	Petani dan Peternak Generasi Ketiga Eks-Trans di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur	230
Gambar 7.18	Keluarga Bapak Saidi di Desa Sido Urip Sudah Berharmoni dengan Lingkungannya.....	231
Gambar 8.1	Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir.....	246
Gambar 8.2	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Ilir	246
Gambar 8.3	Bersama PPL, PML, dan Koseka Kecamatan Palumutan Barat.....	253
Gambar 8.4	Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Ogan Ilir.	254
Gambar 8.5	Siskawati dan Seorang PPL yang Sedang Melakukan Pencacahan Sensus Pertanian 2023	262
Gambar 8.6	Lahan Sawah Rawa Milik Seorang Warga Desa Kamal	263
Gambar 8.8	Contoh Lahan Sawah Rawa Lebak yang akan Ditanami.....	270
Gambar 8.7	Wawancara dengan Salah Seorang Petani Sawah Rawa.....	270

Gambar 8.9	Pasangan Petani Sawah Rawa Lebak, Ahmad dan Sudar	295
Gambar 8.10	Seorang Petani yang sedang Mencari Ikan di Sebuah Rawa.....	298
Gambar 9.1	Peta Wilayah Kabupaten OKI	313
Gambar 9.2	Penggunaan Alsintan Mendukung Peningkatan IP Padi di Lahan Tadah Hujan.....	317
Gambar 9.3	Pengolahan Lahan Menggunakan Traktor Roda Dua..	318
Gambar 9.4	Wawancara Petani di Kec. Lempuing	322
Gambar 9.5	Wawancara Petani di Kec. Lempuing Jaya.....	322
Gambar 9.6	Wawancara Petani di Kec. Jejawu.....	323
Gambar 9.7	Koordinasi di BPS Kab. OKI	327
Gambar 9.8	Pengumpulan Data di BPS Kab. OKI	327
Gambar 9.9	Diskusi antara Koseka dengan PPM dan PPL di Kec. Lempuing Jaya.....	330
Gambar 9.10	Berbagai Upaya PPL Mencacah di Kec. Teluk Gelam .	330
Gambar 9.11	Penanaman Padi Sistem Legowo di Sawah Tadah Hujan	333
Gambar 9.12	Pertanaman Padi Berlatar Belakang Kebun Karet di Sawah Tadah Hujan.....	334
Gambar 9.13	Persemaian Terapung di Agroekosistem Lebak	337
Gambar 9.14	Pertanaman Padi di Lebak Tengahan	338
Gambar 9.15	Penjemuran Gabah untuk Konsumsi di Agroekosistem Lebak.....	350
Gambar 9.16	Penggilingan dengan Hasil Beras Medium di Kec. Lempuing Jaya.....	351
Gambar 9.17	Rantai Terpendek Distribusi Beras.....	352
Gambar 9.18	Rantai Terpanjang Distribusi Beras.....	352
Gambar 10.1	Peta Lokasi Administratif Kabupaten Solok	373
Gambar 10.2	Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Solok (mm/bulan), 2022.....	374
Gambar 10.3	Diagram Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Solok, 2022	374

Gambar 10.4	Sebagian produk komoditas pertanian potensial dari Kabupaten Solok.....	378
Gambar 10.5	Kegiatan diskusi substansi sensus dengan PPL, PML, dan Koseka.....	384
Gambar 10.6	Pelaksanaan Sensus dan wawancara petugas PPL dan Petani Terong Belanda.....	387
Gambar 10.7	Pelaksanaan Sensus dan wawancara petugas PPL dan PML dan Petani Terong Belanda.....	394
Gambar 10.8	Potensi pertanian sayuran dataran tinggi di sekitar Danau Kembar dan Perkebunan Teh.....	395
Gambar 10.9	Terong Belanda dan Markisa Solok.....	397
Gambar 10.10	Pengusahaan Komoditas Bawang Merah.....	400
Gambar 10.11	Produksi Komoditas Bawang Merah Kabupaten Solok	401
Gambar 10.12	Dinamika Harga beberapa Komoditas Sayuran Utama Kabupaten Solok, 2022.....	403
Gambar 10.13	Kebun Terong Belanda Responden 1.....	408
Gambar 10.14	Kebun Terong Belanda Responden 2.....	411
Gambar 10.15	Kebun Terong Belanda Responden 3.....	413
Gambar 11.1	Peta Wilayah Kabupaten Lampung Utara.....	428
Gambar 11.2	Proses Pendataan Sensus Pertanian oleh PPL (Ratih) di Desa Trimodadi dan PPL (Nurul) di Desa Abung Jayo	434
Gambar 11.3	Hamparan pertanaman jagung (kiri) dan pertanaman ubi kayu (kiri) di Desa Abung Rajo, Kecamatan Abung Selatan.....	437
Gambar 11.4	Somil, tempat penggergajian kayu di Desa Abung Jayo	439
Gambar 11.5	Pohon industri tanaman ubi kayu.....	444
Gambar 11.6	Perkembangan volume ekspor dan impor ubi kayu Indonesia, 2000–2020.....	445
Gambar 11.7	Perkembangan nilai ekspor dan impor ubi kayu Indonesia, 2000–2020.....	446
Gambar 11.8	Perkembangan luas areal panen ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara (2020–2022) dari data dasar Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara.....	449

Gambar 11.9	Rantai pemasaran ubi kayu di Kecamatan Abung Selatan.....	451
Gambar 12.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan	461
Gambar 12.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.....	464
Gambar 12.3	Perkebunan Lada Putih di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.....	466
Gambar 12.4	Proses PLS melakukan Wawancara dengan Responden.....	471
Gambar 12.5	Kegiatan Diskusi di Balai Desa Tanjung Gunung.....	474
Gambar 12.6	Contoh Lada yang Berbuah Tidak Sempurna.....	476
Gambar 12.7	Contoh Lada yang Berbuah Sempurna Siap Panen	476
Gambar 12.8	Petani Lada menunjukkan Pohon Lada yang Menguning.....	480

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Areal dan Produksi Komoditas Pinang Perkebunan Rakyat Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Angka Tetap Tahun 2021	25
Tabel 5.1	Luas Wilayah Desa pada Kecamatan Kerumutan dan Pangkalan Kuras	128
Tabel 5.2	Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kerumutan dan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.	128
Tabel 5.3	Daftar Perseroan Terbatas di Kabupaten Pelalawan	133
Tabel 7.1	Sebaran PPL dan PML per Kecamatan di Bengkulu Utara	205
Tabel 8.1	Potensi Lahan Sawah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022.	250
Tabel 8.2	Jumlah Petugas yang Lolos Seleksi (Sesuai Tahapan)	251
Tabel 9.1	Lokasi Supervisi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI.....	315
Tabel 10.1	Sebaran Luas Wilayah, Jumlah Nagari dan Jumlah Jorong di Kabupaten Solok (2022)	375

Tabel 10.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok (2018–2022) berdasarkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Total PDRB atas Harga Berlaku dan Konstan 2010.....	377
Tabel 10.3	Komoditas Utama Kabupaten Solok dan Persentase Kontribusi bagi Produksi Provinsi Sumatra Barat, 2022 (%).....	379
Tabel 10.4	Rata-rata harga Bulanan Beberapa Komoditas Sayuran per Kg di Tingkat Produsen di Kabupaten Solok 2022...	402
Tabel 11.1	Beberapa jenis varietas ubi kayu menurut umur optimal, potensi hasil, kandungan pati dan jarak tanam yang di terapkan.....	441
Tabel 12.1	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.....	463
Tabel 12.2	Sebaran petugas Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bangka Tengah.....	469

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ini menawarkan pendalaman kualitatif atas data kuantitatif Sensus Pertanian 2023. Melalui pendekatan emik, buku ini menyingkap realitas sosiokultural dan ekonomi masyarakat agraris di sebelas lokus di Sumatra yang kerap tidak terakomodasi dalam statistik makro. Sebagai hasil kolaborasi BPS dan BRIN, karya ini menjadi referensi krusial bagi pemangku kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian yang holistik, berbasis bukti, dan berorientasi pada kesejahteraan petani serta kedaulatan pangan nasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Sekretaris Utama BPS RI

Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan ketersediaan data sektor pertanian yang akurat dan terkini serta dapat digunakan sebagai acuan, baik bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan nasional.

Sensus Pertanian 2023 dilakukan dalam rangka mengakomodasi variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis dan menjawab kebutuhan data, baik di level nasional maupun internasional. Pada pendataan Sensus Pertanian 2023, BPS berusaha untuk memotret kondisi pertanian di Indonesia tidak hanya dari sisi kuantitatif, tetapi juga menyelami kondisi pertanian dari sisi kualitatif sehingga bisa memahami realitas pertanian secara lebih mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Buku *Catatan Emik Sensus Pertanian Jilid 1: Sumatra* merupakan salah satu karya hasil kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengulik sisi menarik sektor pertanian Indonesia secara kualitatif dari sudut pandang yang berbeda, seperti tantangan proses pendataan di lapangan, cerita kehidupan petani, dan kompleksitas usaha pertanian yang ditemui di lapangan, yang semakin memperkaya narasi hasil Sensus Pertanian 2023.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi landasan kuat bagi pengembangan pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani.

Jakarta, Januari 2024

Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR-TKPEKM)

Sensus Pertanian adalah sebuah upaya yang sistematis terencana yang dilakukan secara periodik oleh pemerintah untuk mengumpulkan data terkait pertanian. Dengan memiliki data yang akurat dan terperinci tentang sektor pertanian, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengembangan program pengembangan pertanian berkelanjutan. Berbasis pada data yang diperoleh dari Sensus Pertanian 2023, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melakukan analisis mendalam mengenai peran vital berbagai pihak dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelenggarakan tujuh kali Sensus Pertanian. Pelaksanaannya secara periodik setiap sepuluh tahun sekali pada tahun dengan akhiran “tiga”. Diawali Sensus Pertanian pada tahun 1963, kemudian tahun 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 dan yang baru saja usai adalah Sensus Pertanian Tahun 2023. Untuk penyelenggaraan Sensus Pertanian Tahun 2023, BPS menggandeng

Badan Riset dan Inovasi Basional, melalui Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (PR KSDK).

Perlu kami sampaikan bahwa PR KSDK merupakan salah satu dari tujuh pusat riset yang ada di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TK-PEKM), Badan Riset dan Inovasi Nasional. Salah satu tugas dan fungsi PR KSDK ini adalah melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi bidang kesejahteraan sosial, desa dan konektivitas. Kerja sama riset antara PR KSDK dengan BPS ini merupakan implementasi dari salah satu tugas dan fungsi PR KSDK. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya ini.

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam menyokong keberlanjutan hidup manusia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kondisi pertanian sangat diperlukan untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Terhadap kebutuhan inilah Sensus Pertanian Tahun 2023 memainkan peran kunci sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat tentang sektor pertanian. Melalui Sensus Pertanian 2023, kita dapat memetakan peran vital dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Juga dapat diketahui secara detail mengenai luas lahan pertanian, jumlah petani, jenis tanaman yang ditanam, produksi pertanian, teknologi yang digunakan, akses terhadap pasar, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor pertanian. Dengan memetakan peran vital dari pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, perusahaan agroindustri, petani, komunitas pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat memahami perspektif dan kontribusi yang berbeda dalam mencapai pertanian yang berkelanjutan.

Peran PR KSDK dalam Sensus Pertanian ini adalah membantu BPS dalam memberikan pemaknaan kualitatif atas sebuah aktivitas sensus. Pemaknaan kualitatif ini dilakukan dengan perekaman dan

pemotretan aktivitas Sensus Pertanian pada sekitar 42 kabupaten/kota di Indonesia. Penggalan makna kualitatif emik ini penting karena ia dapat memotret realitas “dunia pertanian” secara mendalam, yang kemudian dipadukan dengan interpretasi pendataan dalam sensus pertanian. Pemahaman yang lebih jauh tentang peran vital masing-masing pihak memungkinkan terciptanya sinergi dan kolaborasi serta dapat mengarahkan upaya pembangunan pertanian yang lebih efektif, komprehensif, dan berbasis data yang berkelanjutan.

Selaku kepala organisasi riset, saya sangat mendukung dan mengapresiasi kerja sama ini. Semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini akan selalu terbangun antara BRIN dan BPS, serta juga kementerian/ lembaga lain, sebagai perwujudan dari *knowledge production* yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya BRIN. Semoga semua upaya ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya petani dan iklim pertanian di Indonesia.

Jakarta, Januari 2024

Dr. Agus Eko Nugroho, M.Appl.Econ.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan,
Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas

Pada tahun 2023, BPS mengadakan Sensus Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Sensus Pertanian bukan sekadar kegiatan pendataan rutin sepuluh tahunan di bidang pertanian. Kegiatan ini melampaui fungsinya dari sekadar pengumpulan data, tetapi juga menjadi rujukan utama perumusan dan implementasi kebijakan serta program pemerintah. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, BUMN, dan lembaga lainnya memiliki kepentingan terhadap data valid dan obyektif untuk mengafirmasi pengembangan sektor pertanian yang berkorelasi kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keperluan di atas menjadi penting dikembangkan terlebih saat masyarakat pedesaan di Indonesia masih terikat kuat pada sektor pertanian sebagai *livelihood system*. Keadaan ekologis di sekitar wilayah hidupnya memungkinkan mereka dapat mengembangkan

pertanian sesuai sejarah emiknya. Tradisi turun-temurun di bidang pertanian telah dibuktikan dengan beragam produksi dan komoditas yang dihasilkan. Meskipun demikian, ada beberapa wilayah dan kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan sektor pertanian baru dengan “produksi dan komoditas baru” yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dalam kesejarahan komunitasnya.

Pelaku beserta jumlah hasil produksi dan komoditas pertanian menjadi indikator utama dalam pendataan untuk kepentingan pemetaan sektor pertanian. Namun, aspek aktor dan produksi pertanian ini bukan satu-satunya indikator yang diamati dalam Sensus Pertanian. Berbagai indikator terkait kepemilikan dan luasan lahan, sarana produksi, akses distribusi produksi, konektivitas, dan bahkan kredit pertanian menjadi bagian tidak terpisahkan dari indikator penting yang dikembangkan.

Pendataan yang komprehensif dan obyektif merupakan komitmen BPS dalam melaksanakan Sensus Pertanian di seluruh Indonesia. Komitmen ini dikembangkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Tata laksananya melibatkan puluhan ribu orang yang ditugaskan dalam mendata, baik sebagai Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) maupun Petugas Pemeriksa Data Lapangan (PML). Para petugas ini umumnya berasal dari masyarakat yang mengikuti seleksi terbuka calon petugas lapangan dan pemeriksa secara ketat. Mereka pun mendapatkan pelatihan tata laksana proses pendataan dan pemeriksaan. Pada setiap kabupaten/kota, pelaksanaan pendataan dikoordinasikan oleh Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Para koseka berasal dari personil organik pegawai BPS kabupaten/kota. Mereka bertugas mengarahkan seluruh aktivitas pendataan secara tepat, efektif, efisien, dan obyektif.

Seluruh proses pendataan Sensus Pertanian pada tahun 2023 telah berjalan baik. Sekitar 72.000 dari 74.000 desa di Indonesia telah didata secara maksimal. Berbagai hasil dari setiap indikator telah dihasilkan dan disajikan dalam data Hasil Sensus Pertanian 2023 yang diterbitkan dan dirilis oleh BPS pada akhir tahun 2023. Di dalam proses pendataan Sensus Pertanian 2023, ada sedikit perbedaan. Pada

sensus pertanian sebelumnya, aktivitas pendataan BPS berjalan tanpa ada proses perekaman secara ilmiah. Pada tahun 2023, PR KSDK-BRIN mendapatkan penugasan khusus dari BPS untuk melakukan perekaman dan pemotretan aktivitas Sensus Pertanian pada sekitar 42 kabupaten/kota. Proses perekaman ini tidak sekadar kunjungan dinas biasa yang menghasilkan laporan rutin. Tetapi, aktivitas perekaman ini mengangkat proses pendataan dan pemeriksaan Sensus Pertanian sebagai “fakta sosial” atau “fenomena sosial budaya” terkait aktor pemerintah dan masyarakat dalam mendorong sektor pertanian. Sebagai sebuah fakta sosial, ia tentu dapat dianalisis secara ilmiah dengan pendekatan sosial budaya, sehingga perekamannya dapat menjadi “khazanah ilmu pengetahuan” yang dipublikasikan secara umum.

Berdasarkan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, data perekaman aktivitas pendataan pada Sensus Pertanian dari berbagai lokus disusun dan dipublikasikan oleh para sivitas PR KSDK BRIN, yang termuat ke dalam empat jilid buku. Setiap jilid buku ini mewakili regional kepulauan besar, yaitu (i) wilayah Jawa; (ii) wilayah Sumatra dan Kalimantan; (iii) wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi; serta (iv) wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Setiap seri buku dijaga secara teknis dan substansi oleh para editor yang berasal dari BRIN dan BPS. Tujuannya agar seri buku tersebut tetap sesuai kaidah-kaidah ilmiah dengan pembahasan populer yang mudah dipahami masyarakat umum. Akhirnya, empat jilid buku hasil perekaman Sensus Pertanian 2023 ini telah diterbitkan oleh Penerbit BRIN sebagai lembaga publikasi nasional terakreditasi.

Kekayaan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada hasil kerja sama antara BPS dan PR KSDK-BRIN dalam perekaman Sensus Pertanian ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Dukungan pembiayaan dari BPS RI untuk perjalanan para peneliti PR KSDK menjadi sangat penting. Untuk hal ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BPS, khususnya kepada Bapak Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si., Sekretaris Utama BPS, dan Bapak M. Habibullah, S.Si, M.Si., Deputy Bidang Statistik Produksi BPS,

selaku penanggung jawab teknis Sensus Pertanian 2023. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala OR TKPEKM, Dr. Agus Eko Nugroho, yang selalu mendukung penuh kegiatan kerja sama ini. Demikian juga kepada Penerbit BRIN Press yang bersedia memublikasikan khazanah ilmu pengetahuan yang berasal dari para sivitas PR KSDK BRIN. Semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi tujuan negara dalam “pencerdasan kehidupan anak bangsa”.

Selaku kepala pusat riset, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas PR KSDK yang terlibat dalam penugasan khusus perekaman Sensus Pertanian BPS RI. Saya mengapresiasi hasil kerja para sivitas yang luar biasa dalam proses perekaman, penulisan, dan ikhtiar dalam publikasi pendataan Sensus Pertanian. Semoga publikasi ini menjadi ikhtiar kita bersama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai komunitas akademik untuk kepentingan pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di seluruh Indonesia.

Jakarta, Januari 2024

Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum.

Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial,
Desa dan Konektivitas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Prakata

Buku ini merupakan karya intelektual yang meneropong sisi berbeda dari Sensus Pertanian 2023. Narasi pendataan pertanian yang dikupas dari pembacaan survei sensus pertanian bukanlah perkara yang mudah. Pendata harus berjuang mengumpulkan rangkaian pendataan hingga pelosok pedalaman demi mencatat pertanian Indonesia. Rangkaian pendataan ini meliputi mengumpulkan data dari tiap lembaran kuesioner, berkomunikasi dengan responden petani melalui konversi hasil kuesioner ke bahasa yang sederhana, mencatat setiap angka dan detail pertanian, mencentang, serta memeriksa kembali lembaran jawaban dari responden. Perjumpaan dengan responden bagi pendata adalah ihwal dari perjuangan dalam melaksanakan Sensus Pertanian.

Akurasi kebijakan dan program pertanian memerlukan sumber pendataan akurat, sahih, dan berbasis empiris. Sensus Pertanian 2023 menjadi momentum pendataan dari BPS secara serentak dalam mencatat pertanian Indonesia untuk kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan pengembangan dan inovasi pertanian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tentu memerlukan data empiris mikro yang akurat. Oleh karena itu, setiap sepuluh tahun sekali BPS sebagai instansi yang memiliki rekam jejak dan kompetensi pendataan statistik menjadi “ujung tombak” penyelenggaraan Sensus Pertanian.

Buku ini merupakan manifestasi mozaik pengetahuan yang terekstraksi dari proses pendataan Sensus Pertanian 2023 di sebelas lokus amatan, mulai dari Aceh hingga Lampung. Kolaborasi BPS dan periset dari PR KSDK-BRIN ikut merasakan langsung dan bersama proses pendataan dari Sensus Pertanian 2023. Buku ini wujud pendataan statistik, tidak hanya sekedar angka kuantitatif, tetapi juga narasi kualitatif yang saling melengkapi dalam penyusunan kebijakan pertanian. Narasi berupa interpretasi atas pemaknaan membaca kondisi dan kemampuan daya lenting petani dalam dimensi sosial, kultur, ekonomi, dan lingkungan sebagai amatan utama emik. Selain itu, dalam ekstraksi data pada setiap lokus, seluruh proses rangkaian dokumentasi data, baik wawancara mendalam maupun pengambilan gambar, telah melalui persetujuan dari informan secara sukarela tanpa paksaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan data.

Tangkapan suara petani tidak hanya terdokumentasi dari lembaran survei sensus pertanian, tetapi juga dinarasikan dalam emik. Emik menjadi kekuatan dalam narasi buku ini, karena mengekstraksi sudut pandang dari petani sebagai subjek yang diamati dan menjelaskan realitas sosial dengan sudut pandang masyarakat petani dalam Sensus Pertanian 2023. Emik menjadi dokumentasi pengetahuan yang terekstraksi dari suara petani dalam buku ini. Emik dalam narasi buku ini kemudian dibalut dan dirangkai dari pelbagai perspektif penulis dalam mengekstraksi suara petani pada Sensus Pertanian 2023. Inilah kelebihanannya, ulasan narasi emik dan etik yang tertuang dalam penggalan bab dapat menggambarkan aktivitas pendataan sensus pertanian yang “kental” nuansa kuantitatif ke dalam amatan kualitatif mendalam. Terlebih buku ini dapat menyuguhkan pemaknaan mendalam dari sudut pandang, perilaku, serta interaksi antara subjek pendataan petani dan petugas lapangan serta interelasi sosial ekonomi yang melingkupinya.

Suara petani dari sebelas lokasi amatan yang disajikan dalam buku ini menjadi pelengkap dalam rangkaian proses pendataan Sensus Pertanian 2023. Dokumentasi pengetahuan emik dari sebelas lokus memotret berupa jejak bentang alam, pendataan penuh upaya para petugas sensus pertanian, kompleksitas masalah pertanian dari hulu hingga hilir, menyoal kegagalan petani dalam respons kebijakan dan program pertanian, mengurai jejak kejayaan dan limitasi petani, membaca kisah kehidupan petani di tanah leluhur, hingga refleksi kilas pendataan sensus pertanian. Dokumentasi sensus pertanian yang tertuang dalam buku narasi emik ini menjadi mozaik pengetahuan “suara petani” dari pelosok Sumatra.

Buku ini, selain berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, juga menggalakkan urgensi pendataan pertanian Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan program kedaulatan pangan, pertanian berkelanjutan, serta kesejahteraan petani. Penggalan emik pada sebelas provinsi dalam buku ini berperan sebagai pemantik kesadaran sebagai pembaca, bahwa sistem keberlanjutan dari lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi haruslah menjadi entitas berkelindan dalam pengembangan pertanian di era *kiwari*. Buku ini dapat menghantarkan pembaca sebagai referensi pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti kebijakan sosial, antropologi, sosiologi perdesaan dan pertanian, ekonomi pertanian, studi ilmu sosial, pembuat kebijakan, pemerhati pertanian dan lingkungan, LSM, sektor korporat, ilmuwan sosial, serta organisasi pemerintah yang secara aktif bekerja di bidang-bidang terkemuka dalam masalah ekonomi pertanian. Kompleksitas persoalan pertanian perlu segera mendapatkan perhatian untuk merekonstruksi kebijakan pertanian yang solutif, inovatif, dan berkelanjutan. Tantangan pertanian yang dihadapi oleh petani kita, yakni berpusing pada alih fungsi lahan, perubahan iklim, pembukaan tambang yang merusak lingkungan, pembukaan perkebunan yang destruktif, dan ancaman absennya generasi petani muda. Tantangan ini senyatanya dapat menjadi basis data dalam Sensus Pertanian 2023. Semoga buku ini dapat menyajikan alternatif sudut pandang dari perspektif petani sebagai

subjek utama dan partisipan-partisipan terkait untuk mengakselerasi produktivitas pertanian Indonesia menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Buku ini seakan mengompilasi suara-suara petani dan semangat memajukan pertanian Indonesia untuk dimaknai oleh kita, seluruh rakyat Indonesia. Selamat membaca dan selamat memaknai hidup petani.

Jakarta, Januari 2024

Tim Editor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ucapan Terima Kasih kepada Kepala BPS di 11 Lokus Kabupaten/Kota Amatan

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (PR KSDK) Badan Riset dan Inovasi Nasional mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan para kepala BPS kabupaten/kota yang menjadi lokasi kegiatan narasi emik Sensus Pertanian 2023.

-
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kepala BPS Kabupaten Aceh Besar | : Irnanto, ST, M.M |
| 2. Kepala BPS Kabupaten Karo | : Ratnauli Naibaho, SE, M. Si |
| 3. Kepala BPS Kabupaten Bintan | : Drs. Yan Safrizal |
| 4. Kepala BPS Kabupaten Pelalawan | : Hartono, S.SI |
| 5. Kepala BPS Kabupaten Batang Hari | : Hartono, S.Si., M.E |
-

6. Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Utara	: Iin Inayati, S.ST, M.M
7. Kepala BPS Kabupaten Ogan Ilir	: Ir. Suparindiyah
8. Kepala BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	: Anugrahani Prasetyowati, S.ST., M.Si
9. Kepala BPS Kabupaten Solok	: Mukhlis, SE., M.M
10. Kepala BPS Kabupaten Lampung Utara	: Sugaryadi, SE., M.M
11. Kepala BPS Kabupaten Bangka Tengah	: Ir. Rizanal Mahmudin

Bab I

Telisik Emik Sensus Pertanian: Memaknai Data Sebelas Lokus di Sumatra

Reza Amarta Prayoga & Badrun Susantyo

A. Merangkai Pendataan Emik Sensus Pertanian 2023

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Hampir tiap pulau di Indonesia mempunyai flora dan fauna yang beragam. Salah satunya adalah Pulau Sumatra. Pulau ini terdiri dari sepuluh provinsi, yang terbentang mulai dari Aceh hingga Lampung. Dalam penelusuran sejarah, Pulau Sumatra disebut juga sebagai *Suwarnadwipa* (dalam Bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas) atau *Suwarnabhumi* (dalam Bahasa Sanskerta berarti Tanah Emas). Istilah-istilah tersebut digunakan dalam naskah-naskah kuno dari India yang banyak ditulis pada era sebelum Masehi.

Pulau Sumatra juga terkenal akan kekayaan dan keanekaragaman hayatinya. Hampir setiap wilayah Pulau Sumatra memiliki kekhasan flora dan fauna yang beragam dengan ciri khusus tersendiri. Keaneka-

R. A. Prayoga & B. Susantyo

Universitas Indonesia & Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: reza010@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Prayoga, R. A. & Susantyo, B. (2025). Telisik emik sensus pertanian: Memaknai data sebelas lokus di Sumatra. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 1–17). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.934.c940 E-ISBN: 978-602-6303-90-5

ragaman ini terkait erat dengan jenis dan kondisi iklim serta bentang alam yang berbeda, yang mengakibatkan hadirnya kekhasan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena kekayaan alam dan letak geografis dari Pulau Sumatra yang strategis, banyak pihak asing untuk yang datang ke sana. Menurut catatan sejarah, Pulau Sumatra merupakan pintu masuk bagi kaum pendatang ke wilayah Nusantara. Mulanya, para pendatang ini singgah untuk urusan dagang dan penyebaran agama. Namun, kemudian berkembang menjadi persoalan kolonialisme wilayah.

Pulau Sumatra adalah pulau besar di sebelah barat Nusantara. Jajaran bentang dari pangkal Provinsi Aceh hingga ujung Provinsi Lampung menyiratkan pelbagai potensi pertanian yang luar biasa. Pulau Sumatra menjadi salah satu lumbung komoditas unggulan sektor pertanian, seperti perkebunan yang menjadi komoditas andalan, tanaman pangan, dan hortikultura, serta ditopang sokongan dari subsektor peternakan dan perikanan (Iyan, 2014). Tidak mengherankan, dengan potensi besar dari hasil pertanian, Pulau Sumatra ikut berperan dalam membantu ketahanan pangan dunia (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2017). Tidak hanya itu, dalam rilis Badan Pusat Statistik Jambi (BPS Jambi, 2022), tercatat bahwa Pulau Sumatra sangat terdepan dalam menyumbang hasil perkebunan secara nasional, yakni kelapa sawit sebesar 24,4 juta ton (53% produksi nasional), karet 2,2 juta (70% produksi nasional), kelapa 722 ribu ton (25% produksi nasional), dan kopi 374 ribu ton (48% produksi nasional). Tidak mengherankan jika dari dulu kala hingga saat ini, Pulau Sumatra layak disebut sebagai salah satu nirwana untuk hasil bumi di Nusantara.

Hasil produksi pertanian yang begitu besar dari Pulau Sumatra menjadi sebuah momentum pendataan bagi BPS. Pendataan melalui Sensus Pertanian oleh BPS menjadi agenda rutin dasawarsa pada setiap tahun yang berakhir angka tiga (Badan Pusat Statistik [BPS], 2012). Hal ini dilakukan untuk dapat mencatat pertanian Indonesia demi mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pendataan sensus pertanian yang berbasis survei kuantitatif dilakukan melalui

langkah kolektif dalam penyediaan data pertanian nasional. Sensus pertanian menjadi strategi implementasi kebijakan makro dalam perencanaan, perancangan kebijakan, dan evaluasi program pertanian nasional. Proses pencatatan data secara survei juga perlu didukung penyertaan data kualitatif untuk memberikan gambaran utuh atas realitas pertanian Indonesia sesungguhnya. Pencatatan sensus pertanian dengan pendekatan kualitatif yang digali dan dimaknai secara emik dapat menjadi suplemen penguat penyediaan data pertanian yang konstruktif dan komprehensif.

Proses pemaknaan data dari sudut pandang subjek yang diteliti (petani) ditambah cerita haling-rintang petugas pendata menjadi kekuatan untuk membongkar sudut emik dari pendataan Sensus Pertanian 2023. Sudut pandang subjek yang diteliti, yakni informan petani menjadi basis episentrum analisis emik sensus pertanian pada sebelas lokus di Pulau Sumatra. Sebelas lokus yang dijadikan basis pengumpulan data adalah Kabupaten Aceh Besar (Provinsi Aceh), Kabupaten Karo (Provinsi Sumatra Utara), Kabupaten Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau), Kabupaten Solok (Provinsi Sumatra Barat), Kabupaten Batang Hari (Provinsi Jambi), Kabupaten Bengkulu Utara (Provinsi Bengkulu), Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatra Selatan), Kabupaten Bangka Tengah (Provinsi Bangka Belitung), serta Kabupaten Lampung Utara (Provinsi Lampung). Kesebelas lokus ini ditentukan melalui beberapa pertimbangan secara *purposive*, yakni basis komoditas unggulan sektor pertanian (Iyan, 2014); masifnya peralihan fungsi lahan pertanian (Wulandari & Kemala, 2017); maraknya penyempitan lahan pertanian (Aprildahani et al., 2021); isu kemiskinan, kesejahteraan, dan marginalisasi akses modal pada petani (Fadhli, 2022; Rejeki, 2019); isu disparitas implementasi SDGs dan ketahanan pangan (Erwandari, 2017); konflik manusia dan satwa liar (Sukmantoro, 2019); serta konflik ekonomi petani dan agraria (Sauni, 2016; Sinaga & Adi, 2020). Pertimbangan tersebut menjadi penguat kontekstual dari kesebelas lokus, ditambah dengan kontekstual lokal permasalahan dari setiap lokus yang terurai dalam tiap bab di

buku ini. Selain itu, informan yang emiknya dicatat, tidak terbatas oleh gender, etnik, dan usia. Artinya, suara semua kalangan dapat terakomodasi lewat informan yang terdokumentasi dalam buku ini.

Para penulis menjadikan kesebelas lokus di Pulau Sumatra sebagai “ladang” data, yang terungkap dalam narasi setiap bab dalam buku ini. Tiap lokus memiliki fokus permasalahan dan kondisi yang unik, dan menjadi sumber penggalian data emik Sensus Pertanian 2023. Misalnya, Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu sentra pertanian rakyat komoditas Pinang; Kabupaten Karo merupakan sentra produksi komoditas jeruk dan menjadi pertanian rakyat jeruk dalam skala perkebunan besar; Kabupaten Bintan disesaki masifnya praktik model pertanian hortikultura yang menjadi basis ekonomi perdesaan; Kabupaten Pelalawan tersandung persoalan integrasi peternakan di tengah perkebunan sawit; Kabupaten Batang Hari dihadapkan pada isu sawitisasi dan nasib perkebunan karet rakyat yang kian nelangsa; Kabupaten Bengkulu Utara terkait polemik integrasi tata kelola peternakan dan perkebunan; Kabupaten Ogan Ilir menyoal daya dukung pertanian berkelanjutan; Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami isu pertanian di tengah gelanggang *Food Estate* (FE) padi; Kabupaten Solok berada pada situasi krisis sektor pertanian terong belanda; Kabupaten Lampung Utara terjebak di pusaran kerentanan dan ketidakberdayaan petani ubi kayu atas gempuran pasar pertanian; serta Kabupaten Bangka Tengah berada pada krisis pertanian lada putih sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan.

Penulis dari tiap lokus berusaha mengungkit dan membongkar realitas emik yang belum tertangkap dari perangkat kuesioner sensus pertanian yang dipegang oleh petugas pendata. Hal inilah yang menjadi tawaran kekuatan narasi emik dari proses pendataan Sensus Pertanian 2023. Penulis dengan pelbagai perspektifnya berusaha mengelaborasi konsep dan temuan realitas emik dari yang sudut berbeda dari kuesioner sensus pertanian. Tangkapan emik setiap penulis dari sensus pertanian ini dinarasikan sebagai data empiris. Temuan emik ini kemudian didekati dengan pelbagai konsep sebagai dasar “navigasi pikir” para penulis untuk membongkar realitas emik

dari sensus pertanian. Hasilnya, ada begitu banyak konsep yang terurai dalam narasi setiap bab dalam buku, yakni konsep perkebunan rakyat, ketimpangan dalam mata rantai produksi, revolusi hijau yang mendegradasi lingkungan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi, praktik pertanian berkelanjutan, transformasi pertanian, strategi sumber penghidupan petani, integrasi perkebunan dan kelapa sawit, sawitisasi, stressor relasi kuasa secara sosiologis antara tauke dan petani karet, kerja kolektif dalam pertanian berkelanjutan, strategi akomodasi komunikasi antara pendata dan responden, integrasi peternakan dan perkebunan, *food estate* dan optimalisasi sawah, adaptasi dan mitigasi, serta respon petani dalam perubahan iklim. Seluruh konsep tersebut tumpah dalam narasi yang teruntai dalam tiap bab.

Sebelas lokus ini ditransmisikan menjadi ekstraksi “buah pikir” dari setiap penulis yang dituangkan dalam narasi emik. Para penulis kemudian mencoba meneropong dan membongkar sisi yang tidak tertangkap dalam kuesioner sensus pertanian. Ulasan pemaknaan emik dari sebelas lokus ini meliputi, **pertama**, pemaknaan emik dari pangkal Sumatra yang melihat realitas pertanian dari potret pertanian buah pinang di tanah Aceh. Pinang dipandang oleh petani memiliki nilai kultur kerja yang begitu terlekat dengan sistem penghidupan dan potensi pinang sebagai “denyut nadi” penggerak ekonomi bagi keluarga petani. Persoalan yang mendera petani pinang di Kabupaten Aceh Besar yang coba dieksplorasi penulis yakni kebanyakan petani masih terperangkap dalam jerat pemodal. Jeratan ini begitu kuat karena ia telah menguasai jalur perniagaan, yang membuat daya tawar petani atas harga pinang menjadi inferior. Hal ini terjadi tidak lepas dari absen dan melemahnya lembaga petani yang tidak cukup kuat memproteksi harga pinang di tingkat petani. Akhirnya, petani tunduk pada penetapan harga pinang dari pemodal.

Kedua, turun sedikit ke Kabupaten Karo di Provinsi Sumatra Utara, penulis berhasil menangkap realitas terpuruknya petani jeruk. Komoditas jeruk yang menjadi unggulan dan strategis senyatanya tidak mampu mengangkat derajat hidup petani jeruk di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, dan Desa Barung Kersap, Kecamatan

Munte di Kabupaten Karo. Potret petani jeruk dalam agenda sensus pertanian mencoba memaknai dinamika dan esensi terpuruknya petani jeruk dalam sepuluh tahun terakhir. Serangan hama lalat buah juga membuat petani jeruk makin terpuruk tanpa kepastian. Jaminan pemerintah setempat atas keberlangsungan pertanian jeruk di Karo masih dirasa oleh petani belum optimal sebagai pengaman penghidupan bagi petani jeruk. Namun, di balik keterpurukan itu, masih terdapat harapan “masa depan cerah” bagi petani bahwa jeruk dirasa sebagai komoditas yang potensial dan menguntungkan.

Ketiga, beranjak ke timur Sumatra, tepatnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sensus pertanian dalam penangkapan empiris menarasikan realitas emik berupa pertanian hortikultura untuk kemandirian pangan. Sentra perkebunan sayur-mayur skala rumah tangga menjadi basis sumber penghidupan dan penggerak roda ekonomi di tingkat desa. Kemandirian pangan di tingkat desa menjadi basis sumber penghidupan berkelanjutan. Diversifikasi sumber penghidupan dengan pertanian hortikultura melalui penanaman hidroponik dirasa sebagai penyelamat dalam memenuhi kebutuhan subsisten di rumah tangga petani.

Keempat, tangkapan emik penulis juga dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menjadi basis dalam penggalian data sensus pertanian. Hal yang berhasil dipotret oleh penulis terkait sensus pertanian adalah kelapa sawit dan peternakan sapi. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu perkebunan sawit terbesar di Provinsi Riau perlu melakukan langkah integrasi pemeliharaan sapi dengan perkebunan sawit. Selain memperoleh hasil dari sawit, petani dapat mendongkrak potensi sumber penghidupannya dengan beternak sapi. Limbah kelapa sawit dapat menjadi sumber alternatif pakan sapi. Jika integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi diimplementasikan, Kabupaten Pelalawan dapat menjadi lumbung sapi nasional.

Kelima, pemaknaan emik sensus pertanian lainnya adalah nasib suram petani karet akibat impitan masif sawitisasi di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Penulis menyoroti nasib karet rakyat yang makin

tergerus lahannya akibat gerakan masif petani yang mengonversi karet ke sawit. Ekstraksi realitas emik yang disajikan penulis melalui pemaknaan mendalam dapat mengungkapkan fakta bahwa persoalan sawitisasi secara ekologis dan sosial ekonomi menjadi dua hal yang berkelindan dalam keterpurukan perkebunan karet rakyat. Kebun karet rakyat di Batang Hari saat ini berada pada titik “kulminasi” dari kelangkaan karet akibat sawitisasi. Hal ini tidak terlepas dari tekanan harga karet di titik termurah yang membuat petani karet berkonversi menjadi petani sawit. Persoalan kesejahteraan menjadi gerak masif bagi petani secara kolektif mengonversi lahan karet menjadi sawit. Rasionalitas ekonomi “untung-rugi” menjadi pemicu petani mendisfungsikan lahan karet. Lemahnya proteksi harga karet dan permainan harga yang dilakukan para tauke semakin menegaskan kelangkaan karet dan makin memburamkan masa depan karet rakyat di Kabupaten Batang Hari.

Keenam, bergeser sedikit ke Kabupaten Bengkulu Utara, pemaknaan emik sensus pertanian berupa persoalan integrasi peternakan dan perkebunan. Gerak petani yang menggabungkan pertanian dan peternakan menjadi potensi sebagai alternatif sumber penghidupan bagi petani. Perkebunan yang diletakkan dalam rasional ekonomi sebagai sumber pendapatan utama dan peternakan sebagai investasi jangka panjang dapat berkelindan dalam menunjang kehidupan rumah tangga petani. Rasional ekonomi yang menggabungkan perkebunan dan peternakan sebagai langkah tindakan rasional strategis untuk petani. Dukungan pranata struktural seperti pemerintah daerah hingga desa, dan kelompok pertanian dapat memfasilitasi upaya integrasi peternakan dan perkebunan melalui pelatihan bagi petani.

Ketujuh, potensi dan tantangan sensus pertanian juga terpotret di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan. Potret emik yang disajikan berupa persoalan kompleks pertanian, yakni kendala petani skala kecil, keterbatasan lahan, risiko gagal panen, alih fungsi, dan pola tanam yang tergantung pada cuaca. Elaborasi persoalan yang dihadapi oleh petani ini menawarkan pelbagai solusi, yaitu dukungan pembiayaan modal, proteksi pemerintah, asistensi pengetahuan perta-

nian, kepastian hukum untuk melindungi petani, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, sensus pertanian dianggap sebagai langkah tepat untuk penyediaan data dalam merancang, merencanakan, dan menerapkan program atau kebijakan untuk pengembangan pertanian. Tidak hanya itu, solusi dengan penguatan *human capital* petani berbasis teknologi juga diharapkan dapat tumbuh untuk pertanian berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Kedelapan, masih dalam provinsi yang sama, ditemukan isu situasi petani di tengah pengembangan *food estate* di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pengembangan *food estate* (FE) padi di Kabupaten OKI mengungkapkan bahwa program perencanaan FE masih belum dipahami oleh sebagian besar petani yang menjadi aktor utama program tersebut. Disfungsionalnya pranata kelompok tani sebagai “corong” komunikasi di tingkat petani menjadikan FE seolah istilah yang terdengar asing bagi para petani. Penerapan FE tanpa studi mendalam terkait kekuatan sumber daya alam, kapasitas sosial ekonomi petani, dan pranata pendukungnya, menjadikan FE akan menghadapi persoalan diskontinuitas FE. Tidak dapat dipungkiri, FE akan menjadi “artefak pembangunan” yang gagal diterapkan di masyarakat akibat tidak adanya pertimbangan kultur sosial, kapasitas sumber daya alam, dan pranata pendukung yang ada pada masyarakat tempatan.

Kesembilan, sedikit menanjak di Provinsi Sumatra Barat, tepatnya di Kabupaten Solok. Pemaknaan emik dari Sensus Pertanian 2023 ini secara khusus menyoroti pertanian hortikultura. Pendalaman emik ini mampu memotret potensi pertanian terong belanda dan agrowisata. Bentang geografis alam Kabupaten Solok sudah menjadi modal untuk pengembangan kawasan agrowisata. Pertanian hortikultura berbasis pengembangan pariwisata agro menjadi potensi pendapatan daerah. Selain itu, pengembangan pertanian hortikultura seperti terong belanda belum menjadi tanaman pokok dan komersial, padahal jika terong belanda menjadi tanaman yang dikomersialkan, tentunya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di

Kabupaten Solok. Di sisi lainnya, pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Solok menjadi data emik tersendiri, yakni belum ada pemahaman konteks lokal (sosial ekonomi, kultur, geografis, dan budaya tempatan) bagi pelaksana sensus pertanian di Kabupaten Solok. Hal ini mengakibatkan pertanyaan terkait isu-isu relevan terkait pertanian setempat belum terungkap akibat keterbatasan pertanyaan survei. Selanjutnya, pertanyaan pada kuesioner masih perlu diadaptasi dengan kebutuhan dan realitas lokal agar isu-isu spesifik pertanian dapat tergambar dalam konteks lokal. Terakhir, pentingnya kolaborasi dengan komunitas lokal dalam pendampingan petugas sensus terkait etika dan teknik pengumpulan data dalam menerjemahkan sensus pertanian ke tingkat lokal.

Kesepuluh, pemaknaan emik sensus pertanian dapat mengungkapkan ketidakberdayaan petani ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Adanya anggapan ubi kayu sebagai komoditas inferior menyebabkan program pemerintah terkait pengembangan ubi kayu kurang menjadi perhatian bagi petani. Selain itu, distribusi pupuk subsidi yang tidak merata pada petani ubi kayu membuat petani harus berkorban lebih dengan membeli pupuk non-subsidi yang harganya begitu tinggi. Temuan emik dari petani ubi kayu di lokus ini juga menyoroti ketidakberdayaan petani dalam menentukan harga akibat tekanan kuat dari pabrik. Harga dikendalikan oleh pabrik dan petani seakan tidak memiliki daya tawar untuk mengintervensi harga. Ditambah lagi, kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani ubi kayu, penyuluh pertanian dianggap “lepas tangan” dan kurang memperhatikan pengembangan komoditas ubi kayu di petani.

Kesebelas, sedikit menyeberang ke sebelah pantai timur pulau Sumatra. Tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Pendalaman emik yang berhasil diungkap dalam bab ini, yaitu kompleksitas pertanian lada putih. Berdasarkan pengungkapan emik dari sensus pertanian, ada dua persoalan yang melanda pertanian lada putih di Bangka Belitung. *Pertama* ialah hambatan struktural, yakni ketidakberpihakan pemerintah dalam memberikan akses pasar pada petani lada putih. Langkah proteksi pemerintah kepada petani

masih dirasa kurang akibat praktik monopoli jalur niaga dari pemodal besar. *Kedua*, hambatan sosiokultural, yakni keterbatasan *human capital* terkait penguasaan dan adopsi teknologi modern membuat petani terhambat dalam peningkatan daya saing usaha, ditambah akses pendidikan pertanian bagi rumah tangga petani masih sulit dijangkau. Sensus pertanian ini dirasakan sebagian petani lada putih sebagai pembuka wawasan untuk keberlanjutan pertanian. Sensus pertanian bagi petani dapat membuka data untuk implementasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada petani lada putih, sekaligus untuk memperkuat pertanian lada putih sebagai pilar ekonomi rumah tangga petani.

B. Pemaknaan Emik Sensus Pertanian: Menyusuri Paradoks Survei Kuantitatif

Operasional penggalian kualitatif emik sensus pertanian secara *verstehen* (Hitzler & Keller, 1989; Shields, 1996) senyatanya dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat memotret realitas secara mendalam, dipadukan dengan interpretasi dari suatu tafsiran pendataan survei sensus pertanian. Hal ini dilakukan sebagai data penguat berupa emik dari tafsiran realitas secara kualitatif yang *verstehen* (mendalam) dibalik pertanyaan atas jawaban survei yang cenderung kuantitatif (Berkovich, 2018; Seixas et al., 2018; Shields, 1996). Interpretasi ini kemudian menjadi postulat atas realitas emik yang ada pada pendataan survei sebagai penguat penggalian secara mendalam pada pendataan sensus pertanian. Selain itu, data jawaban survei sensus pertanian seolah dapat berdiskursif memadatkan penggalian interpretatif emik. Penggalian ini tidak hanya menangkap jawaban yang dibatasi oleh survei, tetapi mampu memotret konteks pelampauan tafsiran realitas sosial atas jawaban secara utuh dari survei sensus pertanian yang hanya berdasar angka ke sebuah narasi mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi pelengkap dalam survei kuantitatif sensus pertanian.

Agustini (2020) dan Chairuddin et al. (2021) menegaskan dalam temuannya bahwa masih terjadi paradoks pada polemik angka dalam

data, atau tidak adanya kesatuan data antar-lembaga pemerintah. Akibatnya, muncul perang data yang valid dan sah di pelbagai tingkatan perangkat pemerintah yang berujung pada penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Contohnya ialah pada kasus carut-marut dan tidak terintegrasinya penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih terjebak pada permasalahan ambiguitas dan validitas data di tiap kementerian (Rahmansyah et al., 2020). Eksistensi dan gebrakan dari sensus pertanian menjadi saluran kuratif dari tumpang tindih data, satu data program pertanian dan kesejahteraan petani. Penarasian emik sensus pertanian dengan mencatat pertanian Indonesia menawarkan solusi paripurna persoalan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

Sensus pertanian ini juga menjadi corong pemastian status rumah tangga petani dan penyaluran bantuan subsidi pertanian agar tepat sasaran. Seperti diketahui, ketika Covid-19 melanda, banyak sekali kendala penyaluran bantuan subsidi yang tidak tepat sasaran akibat data penerima bantuan yang tidak terintegrasi (Rahmansyah et al., 2020; Tuwu, 2020). Selain itu, kendala lainnya adalah banyak orang yang seharusnya berhak untuk menyandang status rumah tangga petani miskin malah di-*preteli* (dilucuti satu-persatu) oleh oknum-oknum perangkat desa yang memanipulasi. Atau lebih parah lagi, hanya lingkaran keluarganya saja yang dijadikan penadah bantuan, yang sejatinya tidak layak untuk mereka terima. Lingkaran elite kecil setingkat desa dengan secuil kuasa legitimasinya dapat bebas memanipulasi data bantuan bagi petani. Oleh karena itu, tak pelak transaksi data di tingkat terkecil seperti desa dapat memainkan narasi bantuan pemerintah hanya untuk keuntungan segelintir ikatan jaringan mereka.

Salah satu pemastian status rumah tangga petani ini dapat dilakukan melalui *geotagging* dalam aplikasi perangkat lunak Wilkerstat. Aplikasi ini menjadi saluran validasi data untuk mengetahui secara riil potret kondisi pertanian hingga “akar rumput” di masyarakat. Gambar-gambar yang diunggah oleh petugas PPL menjadi pembuka informasi sah atas realitas kondisi pertanian. Di samping itu, untuk

meminimalisasi paradoks data kuantitatif yang cenderung dapat dimanipulasi, dilakukan juga pencatatan secara emik dari sumber data, yaitu informan rumah tangga petani untuk memastikan kembali “status” mereka dari pendataan sensus pertanian yang dilakukan PPL. Penarasian emik ini yang menjadi data komplementer proses pendataan dari PPL, guna melengkapi realitas yang belum utuh tertangkap dan diungkapkan dari ekspose jawaban kuesioner sensus pertanian.

Perspektif emik menjadi kurasi ketidakpaduan dan anomali data yang diproduksi dalam proses pendataan sensus pertanian. Proses produksi data kesejahteraan petani dari pemerintah yang tidak terintegrasi memang selama ini rawan dan rentan akan manipulasi, ketidakpaduan bantuan sosial, penyelewengan, hingga distorsi data (Agustini, 2020; Chairuddin et al., 2021; Rahmansyah et al., 2020; Tuwu, 2020). Perspektif emik ini menjadi penengah yang dapat merefleksikan suatu tafsiran atas realitas secara mendalam dari penggalan interpretatif subjek data (Darling, 2016; Jackson & Niblo, 2003; Olive, 2014). Proses produksi data dengan pelibatan perspektif emik dapat mengungkapkan realitas mendalam pada kesejahteraan petani yang masih cukup jarang dalam riset-riset aksiologi. Sementara itu, pengungkapan makna eksplorasi mendalam dari suatu realitas sosial dalam riset kualitatif yang diekspose secara emik dapat menjadi produksi data komplementer (Fitrah, 2018; Setyawan, 2017).

Perspektif emik yang ditawarkan dalam pendampingan proses pendataan sensus pertanian dalam produksi data dapat menjadi penawar sekelumit kesahihan atas saling klaim data kesejahteraan petani. Emik dari sensus pertanian ini dapat juga sebagai “penangkis narasi data” atas klaim sepihak segelintir oknum yang hanya memanfaatkan informasi kurang valid atas orang-orang yang senyatanya tidak layak diberi bantuan subsidi pertanian dari pemerintah. Aspek pendokumentasian makna dari pembacaan mendalam kuesioner sensus pertanian dengan penggalan emik ini dapat memberikan pandangan dari sisi selisik yang berbeda, yaitu membedah realitas kesejahteraan masyarakat petani terkhusus di Pulau Sumatra. Meminjam pandangan Baudrillard (dalam Scott, 2007, 14–17), ia menyatakan bahwa angka

dapat dimanipulasi, dan angka hanya sederet nominal yang dapat terjebak dalam hiperealitas yang dapat dilebih-lebihkan dari gejala realitas kepalsuan gambar, angka, ataupun teks (Mantra, 2012; Piliang, 2015; Wardhana, 2022). Perspektif emik ini dapat memberikan penekanan dan pengungkapan atas kepalsuan dari produksi data dengan penjabaran makna kebenaran dari suatu realitas. Penggalan produksi data kesejahteraan petani dari proses emik sensus pertanian inilah yang menjadi solusi dari penawar kepalsuan. Senyatanya, kelemahan ketidakpaduan dan ketidaksatuan data dapat terkurasi dari program satu data yang mencatat pertanian Indonesia demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Akhirnya, kita sama berharap agar “pendampingan” dalam penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023 ini dapat memberikan angin segar dalam meningkatkan kesahihan data yang dihimpun dari masing-masing lokusnya, khususnya pada sebelas lokasi terpilih sebagaimana tersaji dalam setiap babnya dalam buku ini.

C. Penutup: Sebuah Pemaknaan Emik Sensus Pertanian

Pemaknaan emik Sensus Pertanian 2023 yang diangkat dari sudut pandang petani dan dinarasikan dengan benturan pelbagai perspektif dari setiap bab buku ini membuat temuan lapangan menjadi dinamis. Kedinamisan temuan ini menjadi corak setiap lokus di Pulau Sumatra yang membahas pelbagai komoditas pertanian ditambah sekelumit persoalan yang kontekstual lokal dihadapi para petani. Tidak hanya suara petani, para penulis juga menangkap cerita-cerita halang rintang pendata dalam mencatat pertanian Indonesia.

Perpaduan aspek kuantitatif yang dibawa oleh para pendata sensus pertanian dan aspek kualitatif yang digunakan oleh penulis dari setiap bab menjadi penguat produksi data dengan penjabaran makna kebenaran dari realitas sensus pertanian itu sendiri. Penggalan produksi data kesejahteraan petani dari proses olahan emik sensus pertanian menjadi penawar dan pelengkap pendataan. Kompilasi konseptual dari ulasan tiap bab buku ini menjadi navigasi pikir dalam

merangkai realitas yang disuarakan oleh petani di sebelas lokus Pulau Sumatra. Pelbagai komoditas yang dikontekstualkan dengan persoalan lokalitas petani juga menjadi penguatan narasi emik dalam buku ini. Selain itu, sebagian besar suara petani yang tertangkap dalam pendataan sensus pertanian belum mencerminkan situasional nyata di lapangan, dan emik menjadi penawar untuk memaknai sudut pandang riil petani atas situasional yang dialaminya. Temuan lapangan dari kontemplasi penulis setiap bab buku ini memberikan pengayaan perspektif bahwa melalui Sensus Pertanian 2023, petani di Pulau Sumatra menggantungkan sebuah harapan besar, yakni harapan keberpihakan pada mereka untuk penggapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Daftar Pustaka

- Agustini, P. (2020, January). *Peraturan Presiden Satu Data Indonesia (SDI)*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-satu-data-indonesia-sdi/>
- Aprildahani, B. R., Permana, C. T. H., & Utama, S. T. E. W. (2021). Kebutuhan lahan pertanian minimum untuk kesejahteraan petani di Pulau Sumatera. *Journal of Science and Applicative Technology*, 5(1), 116–125. <https://doi.org/10.35472/jsat.v5i1.409>
- Badan Pusat Statistik. (2012, 29 Mei). *Sensus pertanian 2013 (ST2013)*. <https://www.bps.go.id/news/2012/05/29/7/sensus-pertanian-2013--st2013-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2022, 10 Agustus). *Perkebunan masih jadi andalan*. <https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/10/237/perkebunan-masih-jadi-andalan.html>
- Berkovich, I. (2018). Beyond qualitative/quantitative structuralism: The positivist qualitative research and the paradigmatic disclaimer. *Quality & Quantity*, 52(5), 2063–2077. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0607-3>
- Chairuddin, C., Suryana, N., & Wicaksono, H. (2021). Dukungan sistem informasi geografis untuk pendataan bantuan sosial berbasis masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi (INOTEK)*, 1(1), 147–158. <https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/inotek/article/view/115>

- Darling, F. (2016). Outsider indigenous research: Dancing the tightrope between etic and emic perspectives. *Forum: Qualitative Social Research*, 17(3). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/2538/4016?inline=1>
- Erwandari, N. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau. *Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 875–888. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2320>
- Fadhli, P. D. (2022). *Peluang petani dan rumah tangga miskin terhadap penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Pulau Sumatera* [Unpublished thesis, Universitas Andalas]. Andalas University Scholar. <http://scholar.unand.ac.id/98947/>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Jejak Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (2017, 17 April). *Pulau Sumatera feeding the world dan reforestasi melalui kebun sawit*. <https://gapki.id/news/2017/04/17/pulau-sumatera-feeding-world-dan-reforestasi-melalui-kebun-sawit/>
- Hitzler, R., & Keller, R. (1989). On sociological and common-sense verstehen. *Current Sociology*, 37(1), 91–101. <https://doi.org/10.1177/001139289037001010>
- Iyan, R. (2014). Analisis komoditas unggulan sektor pertanian di wilayah Sumatera. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, 4(11), 215–235. <https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/2412>
- Jackson, M., & Niblo, D. (2003). The role of qualitative methodology in cross-cultural research. *Qualitative Research Journal*, 3(1), 18–27. <http://www.aqr.org.au/docs/journals/1AQR2003.pdf>
- Mantra, D. (2012, April 13). Hiper-realitas perekonomian nasional. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2012/04/13/02503211/hiper-realitas.perekonomian.nasional?page=all>
- Olive, J. L. (2014). Reflecting on the tensions between emic and etic perspectives in life history research: Lessons learned. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 15(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-15.2.2072>
- Piliang, Y. A. (2015). Uang dan hiper-realitas: Sirkulasi modal dan jagad raya moneter. *Extension Course Filsafat (ECF)*, 0(1), Article 1987. <https://doi.org/10.26593/ecf.v0i1.1987>

- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rejeki, S. (2019). Pilihan rasional petani miskin pada musim paceklik. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(2), 195–207. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/32128/27709>
- Sauni, H. (2016). Konflik penguasaan tanah perkebunan. *University of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 45–67. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.45-67>
- Scott, J. (Ed.). (2007). *Fifty key sociologists: The contemporary theorists*. Routledge
- Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2018). The qualitative descriptive approach in international comparative studies: using online qualitative surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778–781. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>
- Setyawan, F. E. B. (2017). *Pengantar metodologi penelitian: Statistika praktis*. Zifatama Jawa. <https://books.google.co.id/books?id=s5uWDwAAQBAJ>
- Shields, R. (1996). Meeting or mis-meeting? The dialogical challenge to verstehen. *The British Journal of Sociology*, 47(2), 275–294. <https://doi.org/10.2307/591727>
- Sinaga, R. P. K., & Adi, I. R. (2020). Kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria (Studi pada anggota Serikat Petani Indonesia). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), 72–83. <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1009>
- Sukmantoro, Y. W. (2019). *Optimalisasi ruang dan sumber daya bagi gajah sumatera dan manusia di lanskap sumatera bagian tengah* [Disertasi, IPB University]. IPB University Scientific Repository. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98235>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wardhana, A. A. N. A. S. (2022). Hiperrealitas dalam permainan video daring: Simulasi, simulakra, dan hiperrealitas Garena Free Fire. *PERSPEKTIF*, 11(2), 607–614. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6011>

Wulandari, S. A., & Kemala, N. (2017). Kajian komoditas unggulan sub-sektor perkebunan di provinsi jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 134–141. <https://repository.unja.ac.id/34929/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab II

Mengintip Pinang dalam Sensasi: Selintas Potret Pinang di Tanah Aceh

Eki Karsani Apriliyadi

Terhitung sejak 1 Juni 2023, BPS telah melakukan sensus pertanian secara serentak di seluruh Indonesia. Tahun 2023 merupakan sensus pertanian yang ketujuh terhitung sejak sensus pertama pada tahun 1963. Sensus pertanian dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran angka 3 dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Kominfo, 2023 dan BPS, 2023a). Standar Food and Agriculture Organization (FAO) yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 diyakini dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan berkualitas (Asih, 2023). Hal ini sesuai dengan tujuan utama sensus pertanian, yaitu untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di sektor pertanian (BPS, 2023b).

E. K. Apriliyadi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: ekik001@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Apriliyadi, E. K. (2025). Mengintip pinang dalam sensasi: Selintas potret pinang di tanah Aceh. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 19–58). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c937
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Sensus pertanian kali ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya mengeksplorasi sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor lainnya yang memiliki keterikatan dengan pertanian, mulai dari hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan, hingga jasa pertanian. Direktori pelaku usaha yang digali dalam Sensus Pertanian 2023 ini tidak hanya data dari petani, tetapi juga data-data dari perusahaan pertanian, usaha pertanian lainnya, struktur demografi petani, dan petani milenial (Putri, 2023). Data yang ingin dihasilkan sensus pertanian ini mencakup: (1) data pokok pertanian nasional dilengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian seperti *urban farming*, perhutanan sosial, dan petani milenial; (2) petani gurem; (3) indikator SDGs pertanian; (4) petani skala kecil (*small-scale food producer*) sesuai standar FAO, dan (5) statistik geo-spasial (BPS, 2023b).

Dalam hal ini, pinang sebagai komoditas komersial tentu menjadi bagian yang penting untuk digali mengingat potensi yang dimilikinya bisa berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga petani. Tanaman pinang ini sendiri adalah tanaman yang mudah dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Besar. Tanaman pinang dapat tumbuh subur di berbagai lahan, mulai lahan datar sampai lahan berbentuk lereng. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Aceh Besar menanam pinang di kebun atau pekarangan rumah sebagai tanaman pagar atau pembatas. Tanaman ini cukup potensial dikembangkan untuk pemenuhan permintaan pasar dunia yang lumayan besar untuk kebutuhan farmasi dan industri. Sayangnya, potensi pasar dunia yang tersedia belum berdampak positif terhadap peningkatan daya tawar petani pinang. Diperlukan upaya serius untuk memperkuat lembaga tani agar petani pinang lebih berdaya dalam mengelola kegiatan mereka sendiri.

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi secara emik data Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) yang berfokus pada perkebunan pinang di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil pendalaman sensus pertanian ini memotret bahwa pinang merupakan tanaman yang memiliki nilai

kultur tertentu yang sangat melekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Namun, potensi pinang belum menjadi pendongkrak utama perekonomian keluarga petani. Fenomena ini disebabkan oleh jalur-jalur perniagaan yang masih dikuasai oleh para pemodal, baik di tingkat lokal sampai tingkat di atasnya. Penguasaan jalur perniagaan menjadikan harga pinang sangat fluktuatif. Realitas ini mengesankan bahwa peran lembaga tani tidak berfungsi dengan baik dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan daya tawar petani pinang di Kabupaten Aceh Besar.

A. Menangkap Arti Sensus Pertanian 2023 di Tingkat Lokal: Sebuah Pengantar

Seperti yang diungkapkan Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, bahwa pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil sehingga data hasil sensus ini dapat digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan menjadi *benchmark* statistik pertanian yang ada saat ini. Beliau pun menyatakan bahwa “... yang terpenting data ST 2023 diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian, sehingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan” (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023). Tentu ini menjadi titik pijak strategis yang mesti diterjemahkan oleh seluruh perangkat pendataan Sensus Pertanian 2023 di seluruh Indonesia supaya tujuan sensus pertanian tahun ini tepat sasaran, tepat hasil, dan dapat menghasilkan tindakan yang tepat dalam membangun dunia pertanian di Indonesia.

Proses pendataan dilakukan secara serentak pada Juni–Juli 2023 di seluruh wilayah Indonesia. Selama proses Sensus Pertanian 2023, tidak ada wilayah yang luput dari kegiatan pendataan termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Seluruh perangkat pendataan dipersiapkan sedemikian rupa untuk diterjunkan ke lapangan setelah melewati proses perekrutan dan pelatihan yang dilakukan langsung oleh BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut penanggung jawab pelaksana Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Aceh Besar, pelaksanaan sensus kali ini dirancang secara lebih komprehensif dalam menangkap data dari semua variabel yang digali meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sekilas orang berpikir bila sensus pertanian hanya menyoal data-data numerik yang diperoleh dari rumah tangga petani. Tidaklah demikian, bukan hanya rumah tangga petani saja yang didata, tetapi termasuk juga seluruh unit usaha produktif yang bergerak di dalamnya, dari beragam sektor yang sudah disebutkan, yang memberikan kebermanfaatannya ekonomi bagi pelakunya. Pendataan dilakukan guna memperoleh gambaran secara komprehensif dan berkesesuaian dengan kondisi riil yang ada di level masyarakat. Itulah sebabnya cek dan ricek hasil di lapangan mesti selalu dilakukan oleh seluruh perangkat pelaksana sensus, mulai dari Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), sampai penanggung jawab sensus di tingkat kabupaten demi mendapatkan alur logis dari data yang diperoleh.

Menangkap arti sensus pertanian di tingkat lokal memberi banyak arti. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat membawa angin segar. Tujuannya yang mulia diharapkan dapat memotret realita secara akurat tanpa diboncengi embel-embel sebatas pelaksanaan kegiatan ritual sepuluh tahunan. Data yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan tradisi metodologis keilmuan semata. Lewat cucuran keringat dan air mata, mulai dari para konseptor di tingkat atas dan daerah sampai para eksekutor atau pelaksana kegiatan di lapangan, terselip harapan besar. Harapan agar pelaksanaan sensus pertanian kali ini dapat menghasilkan perubahan yang mendasar dengan memberikan efek terhadap adanya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat termasuk petani. Bagi petani, Sensus Pertanian 2023 menjadi momen penting dalam menitipkan harapan terhadap pemerintah bahwa mereka menginginkan adanya perubahan, keadilan, dan keberpihakan terhadap mereka dengan adanya kebijakan yang pro petani. Harapan mereka terdengar seder-

hana, mereka menginginkan kestabilan harga produk tani, ketersediaan sarana produksi, baik pupuk maupun obat-obatan (pestisida), dan bila ada bantuan maka bantuan itu harus tepat sasaran. Sekilas tertangkap momen haru ketika PPL mendengar seluruh keluh kesah petani. Suasana yang penuh emosi saat pendataan menjadi bekal bagi PPL untuk menyampaikan kembali setiap untaian harapan dari petani ke PML, Koseka, dan seterusnya meski tercatat hanya sebagai narasi. Data yang tertangkap secara numerik dapat ditafsir secara akurat supaya bisa menjadi jembatan dalam memahami peta usaha tani yang sesungguhnya dan mampu mendorong keberdayaan petani dalam ruang perumusan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Narasi yang tersampaikan menjadi roh setiap data yang tampil dalam angka. Sinergi keduanya memberi arti bahwa sensus pertanian kali ini penting ke depannya untuk ditindaklanjuti lewat aksi demi petani.

B. Bentang Alam Pertanian: Memotret Pinang (*Areca Catechu L.*) di Aceh Besar

Hamparan hijau yang membentang luas di Aceh Besar menyiratkan bahwa pertanian adalah sektor yang paling mendominasi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah Aceh Besar memiliki luas 2.969 km² yang terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong/desa (Pemkab Aceh Besar, 2021). Sebagian besar wilayah Aceh Besar adalah daratan, sebagian kecil lainnya adalah kepulauan. Penduduk yang tinggal di wilayah Aceh Besar sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak, sedangkan sebagian kecil lainnya sebagai pedagang. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir lebih banyak mengandalkan hidup dari berkebun, bertani sawah, nelayan, dan beternak (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, t.t). Kondisi alam Aceh Besar yang subur menjadikan wilayah ini cocok menjadi tempat tumbuh berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, seperti padi, sayuran, buah-buahan, kopi, kelapa, lada, pinang, dan lain-lain. Kelapa merupakan komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang dimiliki Aceh Besar dengan lahan seluas 12.575,78 hektar dan jumlah produksi 5.500 ton. Pada Gambar 2.1 memuat peta wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.1 Luas Areal dan Produksi Komoditas Pinang Perkebunan Rakyat Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Angka Tetap Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Pro- duksi (Ton)	Rata-Rata Produk- tivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Simeulue	742	706	675	2.123	245	347	2.927	Wujud Produksi
2.	Aceh Singkil	99	339	306	744	136	400	1.246	Biji Kering
3.	Aceh Selatan	874	1.883	154	2.911	763	405	7.199	
4.	Aceh Tenggara	300	819	111	1.230	342	418	3.875	
5.	Aceh Timur	231	2.475	136	2.841	1.683	680	12.578	
6.	Aceh Tengah	116	193	12	320	143	743	643	
7.	Aceh Barat	712	638	44	1.394	255	400	4.231	
8.	Aceh Besar	709	1.085	147	1.940	652	601	3.050	
9.	Pidie	783	1.808	206	2.797	1.837	1.016	4.338	
10.	Bireuen	1.003	6.986	226	8.215	5.379	770	10.308	
11.	Aceh Utara	816	11.032	510	12.358	4.291	389	18.332	
12.	Aceh Barat Daya	1.638	260	53	1.950	171	656	4.347	
13.	Gayo Lues	171	106	33	310	32	302	1.120	
14.	Aceh Tamiang	194	641	19	854	321	500	2.986	
15.	Nagan Raya	52	545	98	696	213	390	835	
16.	Aceh Jaya	137	547	271	955	224	410	1.014	
17.	Bener Meriah	44	121	57	222	18	149	230	
18.	Pidie Jaya	833	1.333	25	2.191	639	479	2.413	
19.	Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Sabang	143	132	-	275	58	439	297	

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Pro- duksi (Ton)	Rata-Rata Produk- tivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Langsa	1	9	2	11	11	1.256	67	
22	Lhokseumawe	68	139	-	207	137	986	253	
23	Subulussalam	105	325	70	500	129	397	1.125	

Keterangan : 1. TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
 2. TM : Tanaman Menghasilkan
 3. TR : Tanaman Rusak

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh T.A 2022
 (Angka Tetap dari Kabupaten/Kota, 2021)

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, terlihat bahwa wilayah terluas dan jumlah petani (KK) terbanyak untuk perkebunan pinang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Utara, produksi tertinggi berada di Kabupaten Bireun, dan rata-rata produktivitas (kg/ha) berada di Kabupaten Langsa. Meskipun Kabupaten Aceh Besar tidak berada di urutan teratas dari semua kategori di atas, wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang potensial dalam hal pengembangan komoditas pinang dengan lahan seluas 1.940 ha, jumlah produksi 652 ton, rata-rata produktivitas sebesar 601 kg/ha dengan jumlah petani sebanyak 3.050 KK.

Mengingat Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan budi daya tanaman pinang, beberapa kelompok tani yang tersebar di beberapa wilayah desa dan kecamatan telah menerima bantuan berupa bibit pinang lokal serta pupuk dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemerintah Aceh fokus terhadap program pengembangan kawasan tanaman pinang di Aceh Besar (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2022). Program pengembangan kawasan tanaman pinang menjadi langkah pemerintah Provinsi Aceh dalam menyikapi peluang ekspor yang ada. Memang tanaman ini memiliki

peluang yang besar dalam hal ekspor, tentunya kabar tersebut sangat menggembirakan, dan dapat dibayangkan betapa banyak petani yang makmur karena berbisnis pinang. Namun, informasi ini berkaitan dengan dunia usaha pinang sebelum tahun 2022. Menjelang lebaran tahun 2022, harga pinang mulai menurun, tetapi tidak turun secara drastis. Tahun 2023 adalah fase harga pinang terus anjlok. Menurut petani, tahun 2023 adalah tahun terparah.

Syukron dan Salim (2022) menyatakan bahwa tanaman pinang adalah tanaman asli dari kawasan Asia Selatan yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah sampai Asia Tenggara dan beberapa pulau di wilayah Laut Pasifik. Wilayah di semenanjung Malaya, Filipina, dan kepulauan di Hindia Timur adalah tempat spesies terbesarnya itu berada (Syukron & Salim, 2022). Tanaman pinang serumpun dengan tanaman kelapa, termasuk ke dalam keluarga tanaman berumah satu (*monoceus*) dan tergolong ke dalam kelas palem-paleman. Di Indonesia, tanaman pinang sudah menyebar secara merata di berbagai wilayah. Beberapa wilayah penghasil pinang di antaranya adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Jawa, Kalimantan Selatan, NTB, dan NTT (Kementerian Pertanian-Direktorat Jendral Perkebunan, t.t). Terdapat beberapa jenis pinang yang ada di Indonesia, yaitu pinang betara, pinang aceh, pinang bulawan, pinang biru, pinang hutan, pinang irian, pinang kelapa, pinang sirih, dan pinang merah (Asrar et al., 2018 dan Universitas Stekom, t.t). Setiap daerah di Indonesia memiliki penamaan sendiri untuk menyebut nama pinang: *pineung* (Aceh), *urai* (Komerling), *pining* (Batak Toba), *penang* (Madura), *jambe* (Sunda, Jawa), *bua*, *ua*, *wua*, *pua*, *fua* (aneka bahasa di Nusa Tenggara dan Maluku), *buah* (Bali), *rapo* (Makassar), *hena* (Ternate), dan berbagai penamaan lainnya (Universitas Stekom, t.t).

Tanaman ini dapat tumbuh subur di berbagai wilayah, mulai tepi pantai sampai dataran 1.000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang merata di sepanjang tahun (Pandini & Rompas 1994 dalam Andesmora, 2021). Nama *pinang* sangat melekat dengan nama *sirih*, karena pada umumnya masyarakat mengenal pinang sebagai te-

man makan sirih. Tidak banyak yang tahu manfaat lain dari tanaman ini; Lutony dalam Firmanda et al. (2022) menyebutkan bahwa pinang bermanfaat sebagai tanaman penghijau, bahan bangunan, bahan ramuan tradisional, bahan baku industri kosmetik, kesehatan, dan bahan pewarna pada industri tekstil.

Euforia ekspor pinang menggejala di berbagai wilayah Aceh pada era sebelum tahun 2022. Pun demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menempatkan pinang sebagai salah satu prioritas komoditas yang dikembangkan di sektor perkebunan dengan pertimbangan: (1) pasarnya sangat luas; (2) pemeliharaannya tidak merepotkan; dan (3) bisa langsung menghasilkan setelah tiga tahun ditanam (Herianto, 2021a). Di sisi lain, Provinsi Aceh telah berhasil mengeksport buah pinang ke luar negeri dengan nilai fantastis. Setiap bulan Provinsi Aceh mengeksport buah pinang sebesar 1.377 ton dengan rata-rata nilai nominal sebesar Rp31,35 miliar. Negara yang menjadi tujuan ekspornya adalah Iran, Thailand, dan Malaysia (Herianto., 2021b).

Pohon pinang yang tinggi langsing sekitar 25 meter telah menjadikan tanaman ini sering dijadikan penduduk sebagai tanaman pembatas di kebun-kebun atau di pekarangan rumah. Bagi penduduk Aceh Besar, pinang selain sebagai tanaman pembatas juga sebagai tanaman komoditas produktif yang dapat mendatangkan pendapatan ekonomi keluarga. Menurut Sihombing (2000), komoditas pinang berpotensi besar menjadi lahan usaha dengan alasan sebagai berikut: (1) bibit pinang mudah diperoleh; (2) tidak banyak hama pengganggu dan jarang terserang penyakit; (3) produktif walau ditanam di pekarangan; (4) berbuah kapan saja; (5) jarak tanam yang relatif dekat; serta (6) biaya investasi tidak perlu besar.

Secara umum, para petani hanya memanfaatkan bibit yang tumbuh sendiri di area kebun dalam budi daya tanaman pinang. Jadi, untuk masalah pembibitan mereka tidak merasa khawatir, selama ada tanaman pinang di pekarangan atau kebun, selama itu pula mereka bisa memiliki dan menambah tanaman ini. Kendala teknis yang mereka hadapi hanyalah pada saat fase pemeliharaan bibit yang baru

berkembang atau tanaman yang belum menjadi tanaman dewasa. Sapi peliharaan yang mencari makanan melewati kebun dianggap hama pengganggu karena dapat merusak tanaman pinang yang baru berkembang.

Desa Bathelee Kecamatan Seulimeum, Desa Aneuk Galong Baru Kecamatan Sukamekar, dan Desa Weu Bada Kecamatan Montasik dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi pinang cukup luar biasa (lihat Gambar 2.2). Pohon pinang banyak ditemukan di sepanjang jalan kami menuju lokasi petugas pendataan bertugas. Meskipun tanaman padi sawah tetap menjadi fokus utama budi daya



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.2 Jejeran Pohon Pinang di Kebun Penduduk

petani, pohon pinang tetap berdiri tegak di sepanjang jalan yang kami lewati. Selain di kebun, pohon pinang juga hadir di tengah-tengah kerumunan rumah penduduk di sekitar desa tersebut.

Alasan lain masyarakat menanam pinang adalah karena ia bisa tumbuh dengan subur tanpa pernah dipupuk. Biji pinang yang jatuh dari pohonnya dapat tumbuh menjadi tanaman baru tanpa perlu diberi perawatan khusus. Karakter pinang yang dianggap bandel dan berumur panjang serta berbuah tiada henti dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Berdasarkan hasil bincang-bincang dengan sejumlah penduduk yang tinggal di desa tersebut, diperoleh informasi bahwa pinang sering kali menjadi tanaman amanat dari para orang tua yang meminta anaknya menanam pohon tersebut. Hal ini menjadikan pohon pinang memiliki nilai kultural tersendiri untuk dikenang bagi sebagian dari mereka. Pinang mampu menjembatani cinta di antara anak dan orang tua walaupun mereka telah terpisah ruang dan waktu. Pada umumnya, kepemilikan lahan kebun atau sawah bersifat turun-temurun sehingga menciptakan ikatan yang sangat kental antara pemilik dan lahannya. Bagi sebagian orang, kepemilikan lahan menjadi simbol kebanggaan primordial yang menandakan identitasnya sebagai penghuni asli di wilayah tersebut. Selain itu, menurut mereka, jarang sekali penduduk yang merantau ke luar daerah. Hanya sebagian kecil saja penduduk yang pindah atau merantau karena berbagai alasan, misalnya karena pekerjaan (menginginkan kehidupan yang lebih baik) atau karena perkawinan yang mengharuskan mereka pindah ke tempat lain.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian Versi Lokal

Kegiatan sensus yang dilakukan secara serentak pada tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar memberikan kesan tersendiri bagi penulis. Demikian halnya dengan tenaga pencatat atau pendata yang mungkin memiliki lebih banyak kisah. Bisa jadi kesannya menarik, menggelikan, mengharukan, dan berbagai kesan lainnya. Tulisan ini menjadi salah satu bentuk perekaman sekilas bagaimana penggalan data

yang dilakukan para petugas sering menghadapi situasi yang belum terbayangkan pada saat pelatihan atau pembekalan. Ketika penulis terjun ke lapangan, penulis hadir bersama beberapa orang PPL, PML, Koseka, koordinator sensus, dan Kepala BPS Kabupaten.

Berdasarkan hasil perbincangan dengan beberapa elemen pelaku pencacahan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu kepala BPS Kabupaten, Koseka, beberapa PML, dan PPL serta beberapa hari ikut mendampingi kegiatan pendataan di lapangan dapat diperoleh gambaran secara umum bahwa kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Aceh Besar berjalan cukup lancar, meskipun terdapat kesulitan di awal. Menurut para PPL, daftar isian yang mereka pegang terkesan kaku karena formatnya memang bersifat formal dan berlaku secara nasional. Perlu dibuat format daftar isian yang mampu beradaptasi dan mengakomodasi fakta data yang diperoleh. Hal ini karena satuan ukuran yang dipakai petani dalam menggambarkan besaran hasil produksi mereka tidak selalu sama. Sering keluar kata sekarung atau dua karung, sepetak dua petak, dua kaleng atau empat kaleng ketika mereka merepresentasikan luas lahan yang dimiliki atau digarap, berapa banyak pupuk, atau obat-obatan yang digunakan.

Ukuran kepemilikan lahan yang bersifat turun-temurun juga sering kali tidak menjadi perhatian petani. Mereka hanya tahu luas lahan yang dimiliki atau digarap berdasarkan batas-batas tertentu, misalnya pohon pinang, pohon kelapa, dan sebagainya, atau sungai atau kali yang melewati kebun mereka. Petani jarang sekali membuat batas tegas seperti pagar. Mereka percaya bahwa lahan mereka tidak akan diserobot. Oleh karena itu, ukuran versi lokal ini mesti dikonversi ke dalam hitungan standar baku yang berlaku umum. Berbeda halnya ketika mereka melakukan pendataan terhadap unit usaha tani tertentu yang berbadan hukum seperti sebuah perusahaan yang lebih terorganisasi, hitungan matematis relatif mudah diperoleh karena unit usaha yang didata memiliki sistem perhitungan administratif yang lebih terinci.

Dalam kasus lain, ditemukan ketidaksesuaian antara pertanyaan dan pilihan jawaban, misalnya untuk isian komoditas musiman di-

beri pilihan satu tahun terakhir penanaman dan dipanen sekarang, sedangkan petani menanam cabai tersebut dua tahun ke belakang dan baru dipanen sekarang. Akhirnya, permasalahan-permasalahan tersebut dikonsultasikan ke pihak penanggung jawab sensus provinsi untuk dimintai solusinya.

Beberapa kondisi eksternal di lapangan kadang tidak terprediksi sebelumnya. *Pertama*, akses lokasi pendataan yang susah dilewati sepeda motor. *Kedua*, responden enggan didatangi sehingga PPL harus menjelaskan secara jernih maksud dan tujuan pendataan. *Ketiga*, waktu kunjungan yang kadang harus dilakukan pada malam hari mengingat para petani bekerja dari pagi sampai sore. *Keempat*, sikap resisten penduduk yang merasa *risih* ketika ditanya. PPL dan PML harus sigap menyikapi kondisi ini. Kesulitan lain yang dialami para PPL adalah ketika usaha tani dijalankan bersama oleh orang tua serta anak yang telah berkeluarga dan tinggal dalam satu atap. Siapa yang mesti mengisi datanya? Di dalam format isian, kepala keluarga dan kepala rumah tangga merupakan entitas yang berbeda, sedangkan isian usaha produktif mesti merepresentasikan satu unit rumah tangga ekonomi yang memiliki unit usaha tani, ternak, ataupun perikanan. Ditambah tidak adanya administrasi formal terkait pengelolaan uang usaha yang sering kali tidak bersekut dengan uang untuk konsumsi keluarga sehari-hari kian mempersulit kerja PPL. PPL dituntut untuk membuat alur logis dari sebaran informasi yang tidak terakomodasi secara baku dalam format isian supaya datanya kalkulatif dan masuk akal. Tindakan tersebut tetap disertai dengan adanya pendampingan dan konsultasi dengan PML yang menjadi petugas pemeriksanya (lihat Gambar 2.3).

Lama kelamaan, kendala-kendala yang dialami PPL bisa teratasi. Setiap hari PPL belajar dari setiap proses pendataan yang dilakukan. Awalnya proses pendataan bisa berlangsung lebih dari satu jam, terlebih bila si responden memiliki banyak unit usaha produksi dari berbagai sektor pertanian. Peribahasa *bisa karena biasa* lumrah dijumpai dalam kegiatan pendataan yang dilakukan PPL. Lama kelamaan proses pencernaan informasi yang diperoleh relatif lebih



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.3 Diskusi PPL, PML, Koseka, dan Penanggung Jawab Sensus

mudah diakomodasi, konversi hitungan lokal menjadi baku cepat ditanggapi, siapa yang mesti didata cepat disikapi oleh PPL.

Sikap resistensi penduduk terhadap pendataan yang dilakukan adalah sebagai ekspresi ketidakpercayaannya terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Para PPL harus memberikan penjelasan secara jelas kepada penduduk. Jika penjelasan petugas PPL belum memuaskan, biasanya petugas PML yang turun untuk memberikan penjelasan kepada penduduk. Citra petugas yang melakukan pendataan sering dilabeli sebagai bagian dari aparat pemerintah yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Secara sederhana, ada anggapan bahwa *pemerintah sama dengan pemberi bantuan*. Jadi, ada kesan kalau tidak ada bantuan, kami tidak berharap Anda datang ke sini hanya untuk bertanya-tanya saja. Kesan seperti ini membuat petani atau siapa pun yang didata merasa perlu menampilkan 'sisi lain' dari realita yang dihadapi petani. Kebanyakan petani berpikir bahwa sensus pertanian sebagai cara untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, petani kerap memanipulasi informasi dalam kalkulasi pengisian data sensus pertanian. Hal ini dilakukan

oleh petani agar dapat terkategori sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Akhirnya, mereka pun sangsi dengan hasil data yang akan diolah oleh PPL nantinya.

Apa pun jawaban yang diberikan penduduk kepada PPL, Sensus Pertanian 2023 ini menjadi momen penting yang strategis dalam menyampaikan berbagai permasalahan petani selama ini. Data numerik yang dicatat dalam formulir menjadi wakil nyata nasib para petani. Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dikatakan masih rendah, mereka masih menyisakan asa bahwa negara akan hadir ketika mereka menangis. Mereka mempertanyakan mengapa negara tidak hadir ketika harga-harga komoditas pertanian atau perkebunan turun, mereka mengeluhkan mengapa harga pupuk dan sarana produksi lainnya terus meningkat sementara harga jual produk pertanian tidaklah demikian, harganya terus terombang-ambing turun naik bak gelombang di tengah lautan. Mereka tetap berharap pemerintah memiliki kepekaan dan keberpihakan yang nyata terhadap nasib petani, minimal pemerintah hadir untuk memproteksi harga komoditas yang ditawarkan petani.

D. Menapaki Jejak Langkah Petugas Pendataan di Lapangan

Terdapat tiga petugas penting dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, yaitu PPL, PML, dan Koseka. Para PPL dan PML berada di garda terdepan dalam menggali informasi di lapangan. Sebelum menjadi bagian dari kegiatan Sensus Pertanian 2023, PPL dan PML sudah memahami rintangan yang akan dihadapi. Sebagian besar mereka pernah terlibat dalam Sensus Registrasi Sosial Ekonomi (Sensus Regsosek). Mereka dianggap sebagai mitra oleh BPS dan ditawarkan kembali untuk bergabung dalam Sensus Pertanian 2023, terutama untuk mereka yang memiliki kinerja baik. Selebihnya adalah petugas yang baru bergabung. Honor yang diterima menjadi salah satu daya tarik untuk bergabung. Mereka rata-rata berusia muda dan cekatan di lapangan. Terlihat perbedaan antara PPL yang telah menjadi mitra sebelumnya dengan PPL yang baru bergabung. PPL yang sebelumnya terlibat

dalam Sensus Regsosek relatif lebih mudah memahami daftar isian dan melakukan input data berdasarkan kode jawaban yang tersedia. Itu sebabnya supervisi PML sering dilakukan untuk memantau jalannya pendataan. Pemantauan dilakukan untuk menghindari kesalahan penginputan kode agar tetap sesuai dengan alur logis pertanyaan yang ada. PPL tidak hanya melakukan koordinasi dengan PML dan Koseka, tetapi juga dengan penanggung jawab sensus kabupaten (PIC).

Tangkapan indra penulis yang membawa tema narasi emik terkait pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 tentu akan berbeda dengan tangkapan indra para pelaksana pendataan di lapangan. Penulis mencoba menyelami vibrasi dalam proses pendataan PPL. Setiap ekspresi yang ditampilkan PPL atau responden menjadi pesan terselubung yang harus dibuka. Inilah saatnya hasil pelatihan di kelas pembekalan berhadapan dengan situasi nyata di lapangan.

Perekrutan PPL dan PML melalui media sosial dianggap sangat efektif karena pesan tersebar secara berantai. Mitra BPS yang sebelumnya terlibat dalam Sensus Regsosek ikut menyebarkan informasi ke para kerabat, teman dekat, tetangga, dan seterusnya. Untuk Kabupaten Aceh Besar terdapat 12 orang Koseka yang merupakan pegawai BPS Kabupaten Aceh Besar dan 43 orang PML (satu PML membawahi lima sampai enam PPL dari total 256 orang PPL). PPL mesti mengejar target kuota responden selama dua bulan. Rata-rata PPL menargetkan 200 responden yang memiliki unit usaha produktif berbasis pertanian, peternakan, dan perkebunan.

PPL tidak hanya menggali data ke unit usaha rumah tangga atau perseorangan, tetapi juga terhadap unit usaha yang berbadan hukum, seperti perusahaan perkebunan, perusahaan peternakan sapi atau ayam, dan lain-lain. PPL bertanggung jawab menghasilkan data akurat atau valid sesuai kriteria BPS. PPL harus mampu menerjemahkan informasi dan mengolahnya secara logis menjadi data yang representatif. Olahan data yang tertangkap di-input dan diperiksa oleh PML. PML sebagai petugas pemeriksa, harus mampu mengawal dan memberikan solusi demi kelancaran proses pendataan. Mereka menjadi konsultan langsung PPL di lapangan.

Pemanfaatan aplikasi pendataan BPS berbasis GPS telah memudahkan kegiatan pendataan. Namun, terkadang akurasi peta yang dijadikan acuan tidak dipahami secara tepat oleh PPL sehingga terjadi kesalahan pengambilan batas wilayah pencacahan. Solusi yang dipilih adalah PPL berkoordinasi dengan pihak desa dalam menyesuaikan penentuan batas-batas administrasi desa dengan peta yang dipegang PPL. Ketika jaringan internet di suatu lokasi pendataan kurang bagus, proses tersebut mereka lakukan setelah semuanya selesai.

PPL harus mampu menyampaikan daftar isian pertanyaan secara jelas dan mudah dipahami oleh responden yang sebagian besar adalah laki-laki sebagai kepala keluarga petani (lihat Gambar 2.4). Pertanyaan yang disampaikan PPL harus mengikuti ritme pengetahuan yang dimiliki responden, kebiasaan, dan pola budaya yang berlaku di lokasi pendataan. Kemampuan menerjemahkan bahasa nasional ke dalam bahasa lokal menjadi salah satu alat yang memudahkan penyampaian maksud pertanyaan PPL terhadap responden. Dengan catatan, PPL sudah memahami secara *kaffah* instrumen pertanyaan dalam daftar isian. Sepulang dari lapangan, PPL harus mengecek kembali hasil pendataan, jangan sampai terjadi kesalahan. Jika terdapat kesalahan penginputan data, mereka harus kembali ke responden.



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.4 Proses Pencacahan Keluarga Petani dengan Responden Suami sebagai Kepala Keluarga

Saat ini, tuntutan publik terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang betul-betul berbasis pada bukti (*evidence-based policy*) yang salah satu buktinya diperoleh dari kegiatan Sensus Pertanian 2023. Data yang terkumpul harus benar-benar akurat. Kesalahan PPL dalam mentransfer kalimat ke dalam bahasa lokal akan berakibat pada akurasi informasi yang diperoleh. Kesalahan tersebut akan berimbas pada kesalahan pencatatan informasi, pengambilan tindakan, bahkan berdampak luas terhadap perumusan kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya. Oleh karena itu, PPL dan PML sebaiknya berasal dari daerah yang sama dengan tempat pendataan dilakukan. Beda desa mungkin tidak masalah, asalkan latar belakang kulturnya tidak jauh berbeda dengan daerah asal responden.

E. Petani di Tengah Impitan Luasan Lahan: Menanam Pinang di mana pun Jadi Asal Harganya Tinggi

Ketika berbicara *petani*, berarti kita juga sekaligus berbicara tentang *lahan*. Lahan ibarat jati diri petani. Ketika jumlah penduduk belum begitu banyak, mungkin lahan tidak menjadi masalah. Semakin bertambah jumlah penduduk, makin banyak ruang hidup yang dibutuhkan dan makin banyak masalah yang ditimbulkan. Beberapa kasus konflik lahan yang disengketakan, konversi hutan atau lahan produktif lainnya menjadi potret dari sekian masalah yang muncul ke permukaan. Lahan produktif seperti sawah menjadi bahan perhatian ketika banyak yang dikonversi atas nama pembangunan, yang tentunya akan berdampak pada ketahanan pangan itu sendiri. Kondisi inilah yang terjadi di wilayah Aceh Besar. Lokasinya yang berdekatan dengan ibukota Provinsi Banda Aceh menyebabkan banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi permukiman baru, pertokoan, dan sejumlah fasilitas publik lainnya (Hanafiah, 2022).

Kemudahan tempat tumbuh tanaman pinang membuat petani tidak terlalu pusing dengan ketersediaan lahan. Pinang bisa tumbuh di mana saja, baik di kebun maupun di pekarangan rumah. Umumnya,

pinang ditanam di kebun bersama dengan komoditas lain, seperti tanaman buah, sayuran, kelapa, dan lain-lain. Bagi petani yang tidak memiliki lahan yang luas, mereka masih bisa menanam tanaman ini di pekarangan rumah. Selain mudah ditanam di mana saja, alasan petani menanam pinang karena potensi harga jualnya yang tinggi. Namun, mereka menyadari harga yang tinggi tidak akan berlangsung selamanya, sering pula harganya turun terlebih ketika menjelang lebaran. Pada momen ini, tidak hanya pinang, komoditas kebun lainnya pun ikut turun seperti sawit.

Dilihat dari luas lahan dan jumlah produksi pinang, Kabupaten Aceh Besar tidak berada di posisi pertama, tetapi juga tidak berada di posisi terakhir (lihat Tabel 2.1). Komoditas unggulan pertanian dari sektor perkebunan di Aceh Besar justru adalah kelapa yang memiliki lahan terluas sebesar 12.575,78 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023). Usaha pinang di Aceh Besar bisa dikatakan hanya sebagai bagian dari usaha perkebunan rakyat. Meskipun demikian, bukan berarti pinang tidak berarti. Pinang tetap ada di hati petani terlebih ketika harganya tinggi. Jejeran pohon pinang mudah kita temui sepanjang jalan yang dilewati. Tidak seperti tanaman padi yang membutuhkan area tanam khusus dengan perawatan yang sangat hati-hati.

Kebiasaan petani menanam berbagai tanaman produksi dalam satu lahan adalah hal yang lumrah. Menurut petani, kelumrahan ini di samping sebagai kebiasaan juga sebagai bentuk strategi adaptasi petani dalam menyikapi keterbatasan lahan yang dimiliki. Tanaman pinang, kelapa, tanaman buah, sayuran, dan lain-lain hidup berdampingan di area yang sama. Bahkan di beberapa lokasi yang disambangi penulis, tanaman pinang ditanam secara rapat. Sejatinya, untuk menanam pinang yang berbuah banyak dan masa produktif yang lebih lama dibutuhkan jarak tanam ideal sebesar 3 x 3 m (Panduan lengkap budidaya pinang betara, t.t.). Sebagai informasi, kegiatan bertani di kebun, ladang, atau sawah, sebagian besar didominasi oleh laki-laki; terutama mereka yang sudah berumah tangga dan menjadi pencari nafkah utama. Begitupun dalam melakukan kegiatan usaha berbasis budi daya pinang, laki-lakilah yang dominan. Dalam hal-hal tertentu

saja perempuan (istri) dan anak-anaknya ikut membantu, terutama dalam kegiatan yang tidak membutuhkan energi besar, seperti menjemur biji pinang, memungut pinang yang berjatuh di area sekitar kebun, dan sebagainya.

Berkurangnya luas lahan pertanian diakui petani sebagai dampak perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan bangunan dan permukiman akibat penambahan penduduk, baik yang terjadi secara alami maupun migrasi. Besaran luas lahan pertanian menurut mereka memang berpengaruh terhadap potensi hasil produksi yang akan diperoleh, tetapi kemampuan memaksimalkan potensi lahan, walaupun kecil, jauh lebih utama. Bagi mereka, meskipun lahan yang dimiliki kecil, yang terpenting adalah bagaimana lahan tersebut memberi arti dan memberikan dampak positif dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Secara rasional, mereka mengakui makin besar luasan lahan yang dimiliki, makin besar pula potensi ekonomi yang akan didapati. Namun, semua kembali ke bagaimana petani memperlakukan dan memanfaatkan lahannya. Dalam konteks ini, lahan dilihat dari sisi kegunaannya sebagai nilai personal yang diperoleh dari kegiatan yang berorientasi ekonomis yang sejatinya lahan pun memiliki manfaat lain yang lahir sebagai bawaan yang ada dengan sendirinya (Irawan B., dalam Husna et al., 2018).

Di Kecamatan Montasik, ketika penulis ikut mendampingi PPL, status lahan pada umumnya adalah milik pribadi petani yang lazim diperoleh secara turun-temurun. Di desa tersebut, jarang terdengar ada lahan yang disewakan. Kalaupun ada, sifatnya hanya memanfaatkan lahan milik sanak saudara atau kerabat. Lahan yang dimanfaatkan pada umumnya adalah tanaman padi sawah atau tanaman musiman. Modal berasal dari pengguna lahan, sifatnya bagi hasil setelah dikurangi modal yang telah dikeluarkan pengguna lahan.

F. Bergerak Tanpa Maju: Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Pertanian

Menurut hemat penulis, ketika membahas tentang para petani pinang di Aceh Besar, tidak bisa hanya berbicara tentang nasib petani pinang

itu sendiri yang terpisah dari ragam variabel lain yang saling terhubung dalam konstelasi usaha berbasis pertanian atau perkebunan lainnya. Sama halnya seperti gambaran tanaman pinang yang tumbuh di lahan pekarangan atau kebun dengan berbagi tempat dengan tanaman lainnya. Perkebunan pinang yang dikelola oleh penduduk di Aceh Besar bercirikan perkebunan rakyat. Sejak puluhan tahun yang lalu, Ertherington dalam Firmanda et al. (2022) menyatakan bahwa perkebunan rakyat memiliki ciri sebagai berikut: (1) luas areal yang diusahakan kecil dan bersifat perorangan; (2) teknologi yang digunakan masih sederhana dan tradisional; (3) lemah dalam permodalan dan pemasaran; serta (4) produktivas dan kualitas produk masih rendah. Masalah ini kerap dijumpai petani ketika berproduksi. Selain itu, kelembagaan tani yang ada tidak bergerak secara optimal dan rantai niaga yang tidak pro pada petani menjadi bagian dari masalah yang hadir mengiringi.

Beberapa ciri di atas terlihat ketika kita intip apa yang sedang terjadi di ruang usaha pinang saat ini. Sebagian besar petani pinang di Aceh Besar mengelola usaha tani secara konvensional, seperti kebiasaan menanam tanpa menggunakan jarak tanam ideal 3 m x 3 m (lihat Panduan lengkap budidaya pinang betara, t.t.) serta jarang melakukan pemupukan dan pembersihan lahan. Ketika melakukan penanganan pascapanen, teknologi yang digunakan masih sederhana, misalnya dalam proses pengupasan kulit pinang masih manual tanpa menggunakan alat pengupas dan pengeringan buah masih mengandalkan sinar matahari. Rangkaian proses, mulai dari budi daya hingga pascapanen masih bertumpu pada pengetahuan yang diperoleh dari para pendahulunya. Statusnya sebagai tanaman pekarangan atau kebun yang diwarisi dan bagian dari amanat keluarga yang perlu dilestarikan.

Mungkin kasusnya berbeda ketika berhadapan dengan petani besar atau mereka yang memiliki modal lebih yang mampu mengelola lahannya dengan baik dan sangat mudah pula melengkapi peralatan teknologi untuk mendukung dan mendayagunakan potensi lahan. Rendahnya tingkat pendidikan petani, keterbatasan dalam hal per-

modalan dan akses terhadap informasi terkini disinyalir sebagai sekian dari penyebab rendahnya pemanfaatan ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam membudidayakan tanamannya.

Berdasarkan permasalahan aktual yang terjadi pada usaha budi daya pinang saat ini diperoleh gambaran yang lumayan miris terutama pada saat kegiatan penarasian emik Sensus Pertanian 2023. Harga biji pinang mengalami penurunan yang sangat drastis. Pinang pernah dihargai Rp3.000/kg di tingkat petani. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pinang dapat mencapai kisaran harga Rp15.000/kg, sedangkan di tingkat pengumpul harganya Rp7.000-an/kg. Menurut seorang pengumpul, penurunan harga pinang di pasaran terjadi sejak Januari 2022 sampai sekarang, dan fenomena tersebut dianggap biasa terjadi terutama menjelang lebaran dan berlaku hampir untuk semua komoditas perkebunan lainnya seperti sawit. Bagi petani yang sebagian besar memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi secara utuh, mereka hanya memperoleh informasi penurunan harga tersebut dari para pengumpul atau dari sesama petani itu sendiri. Ketika ditanya penyebab penurunan harga pinang secara pasti mereka tidak bisa memberikan penjelasannya secara utuh. Mereka hanya bisa menduga penurunan harga pinang mungkin disebabkan oleh berkurangnya minat pembeli untuk membeli pinang dari wilayah Aceh. Dugaan ini diperkuat kembali oleh seorang pengumpul pinang lokal yang menyatakan kalau saat ini banyak pembeli yang mengalihkan lokasi beli produk ke daerah luar dan menyebabkan permintaan pinang dari Aceh menurun. Namun, alasan mengapa banyak pembeli yang mengalihkan sumber beli produknya tidak diketahui secara pasti. Sebagai tambahan, di dalam sebuah artikel yang dipublikasi di media *online* diperoleh informasi penting bahwa fenomena penurunan harga pinang disinyalir karena India sebagai salah satu negara tujuan ekspor pinang memberlakukan proteksi produk barang dari luar dengan meningkatkan pajak barang yang masuk ke negaranya hingga 108% dan Indonesia tidak memiliki kerja sama dagang dengan India (Juli, 2023). Tentunya kondisi ini menyebabkan produk pinang dari Indonesia sulit menembus pasar India. Bagi petani yang memiliki

sumber daya komoditas lain, penurunan harga produk tidak terlalu berpengaruh meski tetap menangis sambil optimis menunggu harga naik kembali. Mereka tidak terlalu khawatir karena buah pinang dapat disimpan selama satu tahun ke depan.

Dua tahun ke belakang, usaha budi daya pinang sangat menjanjikan, potensi pasar ekspor yang demikian tinggi mendorong pemerintah daerah Provinsi Aceh menempatkan pinang sebagai komoditas yang terus dikembangkan. Saat itu, pengembangan wilayah penanaman dan pemberian bibit unggul kepada petani kerap dilakukan oleh Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Aceh. Usaha tani berbasis pinang menggairahkan dan memberi penghasilan yang lumayan tinggi. Hal ini merupakan tindak responsif pemerintah dalam mendorong penanaman bibit unggul menjadi program peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. Keadaan menjadi berbalik ketika harga pinang anjlok di seluruh wilayah Aceh termasuk di Aceh Besar. Petani enggan menjual pinangnya. Jangankan menjual pinang, mengupas kulitnya pun mereka enggan.

Mekanisme penjualannya sebenarnya tidak sulit. Petani memasarkan atau menjual langsung ke para pedagang pengumpul atau *tauke* yang siap hadir membeli produk dari petani. Selama beberapa lama usaha tanam pinang ini sangat menjanjikan, harga biji pinang di tingkat petani lumayan tinggi, karena permintaan dari luar negeri cukup besar. Menurut petani, biji pinang ini berguna untuk industri tekstil dan bahan baku dasar pewarna, tetapi bagi para petani pinang, informasi peruntukannya untuk apa tidak terlalu banyak dipikirkan selama harga yang diberikan tetap tinggi. Para pedagang pengumpul, baik lokal maupun dari luar daerah—paling banyak dari Medan—sering datang membeli produk dari wilayah Aceh Besar ini. Harga biji pinang di tingkat petani memuaskan petani waktu itu ketika harga sedang tinggi, bahkan konon ada petani pinang yang berhasil naik haji gara-gara bertani pinang. Meskipun petani mengakui pihak yang paling diuntungkan dari bisnis pinang ini adalah mereka yang berperan sebagai pedagang pengumpul, *tauke*, atau *buyer* (apa pun istilahnya), tetapi minimal mereka dapat mencicipi buah hasil budi

daya tanaman pinang. Namun, di sektor hilir, ketidakberdayaan petani dalam bertransaksi untuk menentukan harga produksi menjadi potret umum yang kerap dijumpai (Utomo et al. dalam Firmanda et al. 2022). Tengkulak atau pedagang pengumpul lebih dominan dalam menentukan harga produksi. Terjadi ketimpangan dalam mata rantai produksi. Pembagian rezeki tidak sebanding dengan risiko yang dimiliki (Supriyadi, 2021). Tentunya hal ini menjadi masalah yang terus terjadi pada seluruh komunitas petani, termasuk petani pinang. Petani dan pengumpul seolah tidak dapat dipisahkan, kehadiran mereka tetap dinanti meski harga yang diberikan pengumpul tidak sesuai harapan petani. Kehadiran pengumpul pelan-pelan terlegitimasi tanpa harus menggunakan perjanjian khusus secara hukum.

Dalam berbagai artikel, tengkulak, pedagang pengumpul, pembeli dan berbagai penamaan lainnya disinyalir sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam menciptakan keterpurukan petani (Megasari, 2019). Namun, selama belum ada lembaga resmi yang nyata berpihak terhadap petani, selama itu pula petani akan tereliminasi dan tidak terlegitimasi dalam ruang kultur yang ada. Hubungan antara petani dan pengumpul lebih banyak berdasarkan sikap saling percaya. Patut diakui memang jika para pengumpul, tengkulak, atau *tauke* (dalam bahasa setempat) selalu cepat tanggap terhadap petani. Minimal mereka langsung membeli pinang petani tanpa menunggu esok hari. Bagi petani, terutama yang memiliki lahan di bawah 1 ha, hal paling penting adalah *ada uang ada barang*. Bagi petani, memperoleh bayaran langsung tunai tanpa harus menunggu lebih dipilih ketimbang sabar menunggu bayaran. Kasusny akan berbeda bila petani memiliki lahan yang luas, atau memiliki sumber penghasilan lain selain bertani. Mereka bisa lebih sabar menanti bayaran karena masih bisa memperoleh penghasilan dari komoditas lain yang dimiliki. Para tengkulak atau pedagang pengumpul yang memiliki modal besar bahkan berani memberi uang terlebih dulu ke petani sebagai bagian upaya mereka melanggengkan kepercayaan petani.

Masalah-masalah di atas saling jalin berkelindan secara kompleks dan akhirnya memosisikan para petani dalam keadaan inferior. Para

petani tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menempatkan diri secara proporsional dalam peta tata niaga perkebunan tanaman pinang. Potensi bisnis pinang yang kerap digadang-gadang dapat memberikan penghasilan yang menggiurkan nyatanya tidak dapat dinikmati hasilnya oleh para petani secara sempurna. Gairah usaha pinang yang baru merangkak berdiri belum menciptakan usaha yang stabil dan berkelanjutan, terlihat dari harganya yang liar tak terkendali hingga hari ini. Jaminan keberlangsungan usaha yang stabil sangat dinanti petani karena jelas usaha ini memberikan peluang baik untuk petani. Mereka yakin jika harga produksi stabil, pasti mereka akan menata diri, mulai dari perbaikan lahan produksi, menggunakan teknologi terkini, dan memperbaiki kualitas yang dihasilkan.

Banyak pakar, akademisi, maupun praktisi yang menyuarakan pentingnya kelembagaan yang kuat dan operasional dalam memperkuat daya tawar petani dalam peta tata niaga pertanian. Tema pemberdayaan menjadi kunci penting yang terus didengungkan demi tegaknya keadilan dalam dunia pertanian terkhusus untuk petani dengan jalan memperkuat kelompok masyarakat yang dianggap lemah (Riza et al. dalam Pradiana & Anantanyu, 2022). Menurut Parma (2014), kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan posisi tawar petani sehingga mereka lebih kompetitif. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi petani tidak muncul secara tunggal, tapi hadir secara kompleks berkelindan dengan beragam aspek, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Kegagalan Petani dalam Merespons Kebijakan dan Program Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai program pembangunan sudah banyak dilakukan pemerintah sejak republik ini berdiri. Revolusi hijau adalah hasil penancangan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan supaya dapat diterapkan dalam setiap gerak langkah kegiatan pertanian, sehingga kita mengenal istilah *intensifikasi pertanian*, *ekstensifikasi pertanian*, *swasembada*

pangan, dan istilah-istilah lainnya yang lahir bertepatan dengan pembangunan pertanian dilaksanakan. Program-program pembangunan demikian diakui telah membawa perubahan dalam tatanan pertanian di Indonesia, produktivitas dan tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan sampai pada masa-masa tertentu.

Lama-kelamaan, maraknya pelaksanaan pertanian modern melalui semangat revolusi hijau menunjukkan arah yang berbeda dari apa yang dimaksudkan dan ditujukan sedari awal. Intensifnya pemberian pupuk, obat-obatan, dan eksploitasi lahan secara masif dalam jangka panjang akhirnya berdampak besar pada penurunan kualitas lingkungan (degradasi lingkungan), mulai dari tanah, air, udara sampai makhluk hidup yang tinggal di dalamnya (Wulansari, 2019). Akhirnya, revolusi hijau mulai banyak ditentang beragam kalangan karena disinyalir menjadi salah satu faktor yang ikut mendegradasi lingkungan. Tidak sampai di situ saja, revolusi hijau pun telah melahirkan realita kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi akibat adanya praktik-praktik ekonomi yang tidak menguntungkan bagi sebagian pihak (Lagiman, 2020). Patut diakui, di satu sisi, modernisasi pertanian memang telah berperan dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi di sisi lain justru melahirkan kondisi yang sudah disebutkan di atas. Tak heran bila sekarang kita sering mendengar keluhan petani terkait kesuburan lahannya yang menurun dan selalu membandingkannya dengan kondisi dulu, serta bagaimana mereka harus dapat bertahan hidup dengan hanya mengandalkan hidup dari pertanian. Namun, menurut petani, praktik pertanian secara organik diperlukan modal yang relatif lebih besar dibanding penggunaan pupuk buatan (kimiawi), ditambah ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk buatan sudah sangat tinggi karena sifatnya instan dengan hasil panen yang lebih banyak. Mungkin bagi petani yang memiliki modal besar, lahan yang luas, dan punya jejaring yang kuat dalam peta usaha tani, praktik pertanian organik bisa menjadi pilihan yang diambil dengan pertimbangan harga jual produk lebih tinggi, dan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih lestari.

Berdasarkan kondisi tersebut, tercipta kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan keadilan hingga berlanjut dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Istilah *pertanian berkelanjutan* adalah pengejawantahan semangat dalam menjaga sistem pertanian yang dapat bertahan hingga masa depan. Ini artinya setiap praktik pertanian mesti diiringi dengan semangat menjaga sumber daya lahan agar tetap lestari dan terus memberikan manfaat sampai generasi berikutnya. Lebih lanjut, Lagiman (2020) menyebutkan pembangunan bisa disebut mengandung keberlanjutan bila:

1. secara ekonomi terdapat praktik-praktik yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan pemanfaatan sumber daya dan investasi secara efisien;
2. secara ekologis terdapat upaya pemeliharaan sumber daya alam termasuk dalam penjagaan keanekaragaman hayati dan;
3. secara sosial, terdapat praktik-praktik yang dapat mendorong terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial dan pengembangan kelembagaan.

Pembangunan pertanian berkelanjutan sudah pasti akan berlandaskan tiga aspek utama tersebut yang diimplementasikan secara komprehensif, pun demikian dalam penerapan kebijakan dan program-program pertaniannya. Praktik pertanian berkelanjutan membutuhkan upaya yang terus-menerus, tidak berhenti hanya sebatas respons terhadap isu-isu yang berkembang secara global.

Praktik di lapangan, sering kali petani menghadapi situasi yang *melelahkan*. Sistem pertanian organik merupakan salah satu dari sekian praktik pertanian berkelanjutan (Rachma dan Umam, 2020; Lagiman, 2020). Penerapannya di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengajak mereka untuk beralih ke sistem organik ibarat menghadapi tembok tebal. Situasi yang dihadapi adalah entitas yang sudah lama terdistorsi oleh intensifnya penerapan gagasan modernisasi pertanian selama puluhan tahun. Akumulasi pembiasaan dan kebiasaan yang sudah terbentuk selama puluhan

tahun dalam memodernkan praktik pertanian di Indonesia berujung pada keadaan di mana petani memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemanfaatan produk teknologi pertanian, seperti pupuk dan obat-obatan kimia buatan. Ketika petani diimbau, diajak, dan dikenalkan dengan praktik pertanian organik, sedikit banyak mereka akan resisten, menolak secara halus. Mereka berpikir berapa lama waktu dan modal yang harus dikeluarkan demi melakukan praktik pertanian secara organik ini. Praktik pertanian organik ini konon membutuhkan modal yang sangat tinggi, sedangkan petani sudah terbiasa melakukan praktik pertanian yang instan, cepat memperoleh hasil tanpa harus susah payah mengeluarkan energi lebih. Pun gagasan memaksimalkan peran kelompok tani dalam memobilisasi kekuatan supaya lebih mandiri dan kemampuan bertransaksi yang pada perjalanannya justru mengalami mati suri.

Gambaran di atas adalah salah satu rentetan peristiwa yang terpotret bagaimana kegagalan petani menyikapi isu-isu bernuansa keberlanjutan. Kegagalan ini bisa dikatakan sebagai buah hasil pembentukan persepsi yang sangat lama tentang bagaimana cara bertani melalui pemanfaatan teknologi yang berorientasi hanya dari sisi produksi. Komersialisasi berbasis produktivitas menjadi tujuan utama para petani tanpa memperhatikan bagaimana cara menjaga daya dukung lingkungannya supaya tetap lestari.

Kehadiran kelompok tani dan para petugas penyuluh belum mampu beroperasi sesuai tugas dan fungsinya yang mengatasnamakan keberlanjutan karena masih banyak kendala yang dihadapi. Di lokasi pendataan, penulis memperoleh informasi bahwa keberadaan kelompok tani beroperasi secara administrasi ketika ada program dari pemerintah, baik dalam hal pemberian bantuan maupun pelatihan teknis tertentu. Kehadiran tenaga penyuluh pertanian lapangan kurang memberikan pendampingan secara paripurna. Mereka hadir saat memberikan informasi tentang program-program pertanian dari pemerintah atau ketika melakukan pendataan. Jika ada pembinaan, mereka lebih fokus ke komoditas tanaman padi. Sementara itu, komoditas pinang sebagai tanaman perkebunan yang notabene dianggap sebagai tanaman kuat, tanpa perlu ada perawatan ekstra

pun kurang memperoleh pendampingan. Pemberian bantuan berupa pupuk bersubsidi lebih banyak diserap oleh pertanian tanaman padi, yang secara administrasi untuk memperoleh pupuk bersubsidi ini pun dianggap rumit oleh petani.

Tampaknya, perlu upaya serius untuk menghidupkan kembali ruh kelompok tani yang ada; perlu sinergitas antarpihak, baik dari pemerintah terkait, pihak swasta seperti penyedia sarana produksi pertanian atau lembaga keuangan, donatur/investor, maupun dengan kelompok masyarakat yang terlibat dalam usaha tani, baik dari kalangan petani maupun pedagang yang terhubung dalam rantai pasok usaha pertanian. Lembaga keuangan sebagai pemberi modal usaha bisa memberikan keleluasaan secara administrasi, tidak “ribet” berdasarkan kesepakatan tertentu ikut hadir mendukung dunia usaha tani supaya makin bergairah sehingga tidak terdengar lagi petani yang tidak punya modal akhirnya dia menggadaikan atau menjual lahannya kepada pihak lain, sedangkan mereka menjadi buruh di bekas lahannya sendiri. Tentu kejadian ini sangat lah miris dan tidak sesuai dengan cita-cita negeri ini, yaitu menyejahterakan petani dengan berbagai kebijakan dan program pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kelompok tani dapat berfungsi sebagai wadah penting dalam menjalankan dan menerjemahkan konsep hak petani ke dalam kebijakan, strategi, dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh serta sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional. Operasionalnya kelompok tani dan maksimalnya peran petugas penyuluh lapangan dalam mendampingi petani, menjadi pintu masuk yang dapat dimaksimalkan ketika akan membangun fondasi tentang pentingnya keberlanjutan dalam menjalankan praktik pertanian berkelanjutan ini.

H. Produk, Pengelolaan Pascapanen dan Mata Rantai: Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Bandel, mudah hidup dalam berbagai kondisi lahan, tidak manja adalah beberapa gambaran yang tepat untuk disematkan pada tanaman

pinang, minimal begitulah menurut mereka yang menanam pinang di Aceh Besar ini. Produktif, tidak tergantung pada pupuk itulah kata lanjutan lainnya. Oleh karena itu, tanaman ini amat disenangi petani, bahkan pegawai negeri yang tertarik untuk bertani. Pun demikian bagi para pemula yang akan memulai praktik bertani, pinang merupakan salah satu komoditas yang direkomendasi. Asalkan ada lahan yang bisa ditanami, sebisa mungkin orang akan menanam tanaman ini, tidak perlu lahan berupa kebun, pekarangan pun bisa ditanami asal memberi pendapatan yang pasti.

Pemanenan buah pinang dilakukan dalam dua cara; pertama, buah yang sudah matang atau setengah matang dipetik langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat pemetik (galah). Kematangan buah dilihat dari warna kulitnya, kuning kemerah-merahan adalah tanda kalau buah pinang sudah matang; kedua, mengumpulkan buah yang jatuh sendiri. Jika permintaan dan harga sedang tinggi, petani akan memetik buah tanpa menunggu jatuh sendiri. Pada umumnya praktik budi daya pinang di Aceh besar dilakukan secara konvensional mulai dari budi daya sampai penanganan pasca-panennya seperti yang sudah disebutkan di subbab sebelumnya.

Biji pinang yang sudah dikumpulkan kemudian dikupas kulitnya menggunakan pisau atau golok, dikeringkan di bawah sinar matahari, menggunakan alas tertentu seperti terpal. Penjemuran umum dilakukan di pekarangan rumah atau tempat tertentu yang sengaja dibuat sebagai tempat menjemur biji pinang. Biasanya petani jarang menggunakan alat pengering tertentu yang bisa digunakan kapan pun tanpa tergantung pada sinar matahari. Tanda buah pinang ini dianggap betul-betul bagus adalah ketika buahnya mengeluarkan suara dari dalam buahnya yang menandakan kalau bijinya telah terpisah dari kulitnya. Itulah momen ketika buahnya bisa dikupas, pengupasannya sebisa mungkin tidak sampai membuat bijinya rusak. Selain dengan cara dikupas, penanganan buahnya bisa dilakukan dengan cara dibelah menggunakan alat tertentu, lalu dijemur. Rata-rata proses penjemuran memakan waktu selama seminggu sampai dua minggu tergantung intensitas sinar matiharinya. Jika terik matahari-

nya tinggi, tidak ada hujan, pengeringannya bisa cepat dan tidak perlu menunggu sampai seminggu atau dua minggu. Setelah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam karung-karung, dikemas secara rapi lalu disimpan di tempat penyimpanan atau gudang yang kelembapannya terjaga agar buahnya tidak berjamur. Pengeringan menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan biji pinang yang berkualitas. Menurut para petani, pengeringan buah pinang ini harus maksimal, betul-betul kering yang memungkinkan produknya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama ketika disimpan.

Kegiatan di kebun (*on-farm*) biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, terutama suami sebagai pencari nafkah utama, mulai dari penanaman, pemupukan (walau jarang dilakukan), pembersihan gulma, hingga pemanenan. Kegiatan memanen utamanya dilakukan oleh suami selaku kepala rumah tangga, tetapi sering pula dibantu oleh istri dan anak-anaknya terutama ketika banyak biji pinang yang sudah jatuh ke tanah karena bijinya tinggal dipunguti saja. Kegiatan pascapanen (*off-farm*), seperti pengupasan dan pengeringan biji, umum dilakukan para istri, walaupun tidak jarang suami dan anak-anaknya pun ikut terlibat. Kadang keluarga petani akan membayar orang lain (tetangga atau kerabatnya) untuk melakukan pemanenan dan pengupasan dengan bayaran Rp2.000,-/kg ketika produktivitasnya sedang tinggi. Pengemasan dan penyimpanan biji pinang kembali dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan peran suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam pemasaran, suami yang lebih banyak berperan; biasanya suami sudah memiliki kenalan atau jaringan yang bisa mengakses penjualannya. Bagi keluarga petani, menjual biji pinang ke pedagang pengumpul adalah pilihan yang sangat mudah, mekanismenya bisa mereka jual ke pedagang penampung yang datang sendiri ke tempat di mana petani itu menyimpan biji pinangnya, atau mereka bawa langsung ke pasar untuk menjualnya. Namun, pilihan pertama adalah yang banyak dilakukan oleh petani.

Geliat usaha pinang yang makin bergairah pada saat itu (dua tahun sebelum harga anjlok) sampai-sampai pemerintah provinsi menempatkan pinang sebagai salah satu komoditas unggulannya.

Bantuan bibit pinang dan pupuk disebar oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh ke beberapa kelompok tani yang tersebar di kecamatan Provinsi Aceh besar ini tujuannya adalah untuk menggenjot produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani. Namun, terbatasnya lahan yang dimiliki petani, akses terhadap harga dan situasi pasar terkini, ditambah rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pasca panen menjadi sekian dari deretan permasalahan yang dihadapi petani saat ini. Prospek bisnis budi daya pinang memang menjanjikan, meskipun situasinya selalu turun-naik mengikuti harga dan permintaan yang ada. Kehadirannya akan selalu ada di hati para petani yang menempatkan pinang sebagai bagian dari elemen penting ekonomi keluarganya. Bagi petani yang memiliki sumber daya komoditas lain, turunnya harga produk tidak terlalu dirisaukan meski mereka tetap menangis sambil tetap optimis kalau harganya bisa segera naik kembali. Mereka tidak terlalu khawatir kalau buahnya disimpan lama selama satu tahun ke depan. Buah pinang ini termasuk awet bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama asal tidak di atas satu tahunan supaya tidak berjamur. Dapat dikatakan jika pohon pinang ini berperan sebagai tabungan atau cadangan demi menunjang perekonomian keluarga yang kapan pun bisa mereka jual meski harga sedang murah.

I. *Life Story*: Sepintas Kisah di Balik Praktik Usaha Budi Daya Pinang

Sudah disinggung sebelumnya bahwa kemudahan memelihara tanaman pinang, hasilnya yang menggiurkan, produktif setiap bulan, dan tidak repot dalam urusan lahan untuk menanam, menjadi beberapa dari sekian alasan penduduk di Aceh Besar ini untuk menanamnya. Alasan ini pulalah yang membuat beberapa keluarga petani tetap memeliharanya meski harga sedang tidak tinggi.

Cerita menarik dan mengharukan akan selalu hadir mengisi kehidupan petani. Kisah menggembirakan kita dengar ketika ada seorang petani pinang yang berhasil meraup rezeki yang lumayan tinggi dari usaha budi daya pinang yang dimiliki. Harga tinggi akan

selalu dinanti petani, Ketika harga tinggi mereka akan serius mengurus lahannya, minimal gulma dicabut-cabuti.

Tersebutlah ada satu keluarga petani yang bisa pergi menunaikan ibadah haji dengan menjual hasil panen dari pinang. Petani tersebut sangat serius menanam pinang sampai ribuan pohon di atas lahan tiga hektar di samping komoditas lain yang ditanam. Sudah lebih dari sepuluh tahun petani tersebut berbudi daya pinang, keluarga ini tidak memiliki lahan tanam padi. Mereka hanya memiliki lahan kebun, di mana pinang menjadi salah satu komoditas utama yang dapat membuat periuk nasi tetap berisi. Beberapa tanaman pinang tersebut, hasil yang diwarisi dari orang tuanya kemudian lanjut dipelihara. Di samping itu, menanam jenis tanaman lain seperti kelapa dan tanaman sayuran lainnya. Kisah sukses petani tersebut menjadi sebuah inspirasi bagi petani dan yang merasa bukan petani untuk terjun menggeluti usaha budi daya pinang. Terlebih di saat pinang menjadi satu komoditas primadona yang memiliki potensi ekspor berharga tinggi. Hal ini turut membuat para petani menjadi lebih bergairah dalam menjalankan usahanya. Memang kisah sukses dalam usaha budi daya pinang tidak semua dialami oleh banyak petani. Keberhasilan seorang petani pinang adalah ketika dilakukan dengan serius, tekun, dan konsisten. Tidak jarang pula banyak petani yang mengalami kerugian terlebih ketika harga biji pinang terjun bebas. Itulah sebabnya keluarga petani memilih melakukan penanaman komoditas tani secara beragam sebagai upaya memperbanyak sumber pemasukan ekonomi keluarga.

Ketika iklim usaha budi daya pinang mengalami kelesuan, ditandai dengan anjloknya harga produk di pasaran, tidak lantas keluarga petani pinang ini bermuram diri. Pemeliharaan lahan tumbuh, pemanenan, pengupasan, penjemuran, sampai penyimpanan tetap dilakukan. Sebagian dijual, sebagian lain mereka simpan di gudang sebagai cadangan sambil menunggu harganya kembali normal. Memang kalau dihitung, besarnya energi yang dikeluarkan untuk melakukan seluruh rangkaian budi daya dari hulu sampai pada proses perlakuan pascapanen tidaklah sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Butuh waktu lama sebelum biji pinang siap dipinang pembeli, minimal satu sampai dua minggu supaya biji pinang benar-benar kering (lihat Gambar 2.5). Pada tahap kegiatan pemanenan dan pengupasan, terlebih ketika produksi biji pinang dianggap tinggi, petani yang memiliki modal lebih biasanya akan membayar orang lain untuk melakukannya dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp2.000,-/ kg. Orang lain yang membantu petani dalam melakukan kegiatan tersebut umumnya berasal dari tempat di mana mereka tinggal, bisa kerabat atau tetangganya. Oleh karena itu, untuk memangkas biaya yang dianggap tinggi, untuk sementara mereka lakukan sendiri, hanya cukup memenuhi kebutuhan penjualannya saja.

Sementara itu, sebagian petani lain memilih tidak melakukan apa-apa dan membiarkan setiap biji pinang jatuh sendiri (lihat Gambar 2.6) dan memilih melakukan usaha lain, bisa dari usaha tani, atau melakukan usaha serabutan lainnya. Biasanya keluarga petani pun memiliki lebih dari satu profesi tidak hanya bertani. Ada yang membuka bengkel motor, menjadi sopir, bahkan ada yang bekerja sebagai PNS.



Foto: Eki (2023)

Gambar 2.5 Proses Pengeringan Biji Pinang dan Penyimpanannya

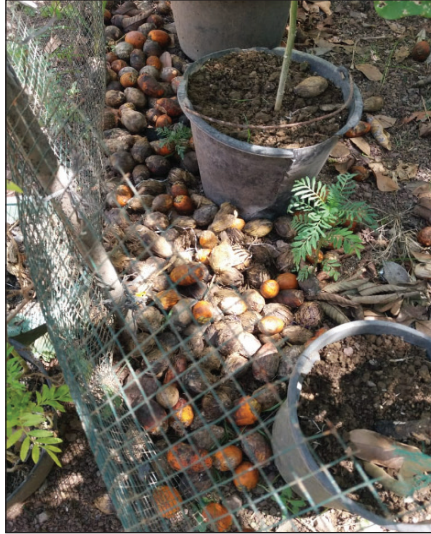


Foto: Eki (2023)

Gambar 2.6 Biji Pinang yang Dibiarkan di Pekarangan

Jatuhnya harga pinang memang bisa membuat petani harus memutar otak untuk mencari sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecuali bagi mereka yang memiliki lahan tani lain dan memiliki sumber penghasilan lain. Namun, semuanya berharap harganya akan segera naik kembali.

J. Penutup: Kilas Balik Pendataan Sensus Pertanian: Sebuah Refleksi dari Kabupaten Aceh Besar

Terbukanya pasar ekspor pinang menjadi peluang yang sangat menjanjikan dalam pengembangan potensi pinang di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Aceh ini. Semua berharap kalau gairah prospektif bisnis berbasis pinang ini akan terus lestari di berbagai macam situasi. Kehadirannya diharap tetap memberi janji yang pasti terutama bagi petani.

Dengan adanya pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, ini kita berharap akan membawa perubahan bagi terciptanya kondisi pertanian yang berkelanjutan. Mulai dari hal yang sangat simpel, data yang sudah dikoleksi mampu diterjemahkan secara jernih sesuai amanat tema-tema pertanian berkelanjutan dan mampu mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan petani mengatasnamakan keadilan. Penerapan program-program pertanian berkelanjutan mesti dapat menjadi landasan keuntungan dari berbagai sisi, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial.

Data numerik yang tertangkap dalam formulir pertanyaan sensus pertanian tahun ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam menghasilkan produk kebijakan pertanian yang berkeadilan dan pro petani terutama petani kecil yang tidak berdaya. Data yang tampil tidak hanya menyiratkan angka tanpa makna, mudah-mudahan angka tersebut dapat memberikan bobot dalam memperkuat tujuan melaksanakan pembangunan pertanian di Indonesia secara komprehensif termasuk di wilayah Aceh Besar ini, sehingga tidak salah jika Sensus Pertanian 2023 ini selain sebagai kegiatan formal tiap sepuluh tahun, tetapi juga sebagai media curhatan aspirasi rakyat dalam menyampaikan keluh kesah dan kendala yang dihadapinya kepada pemerintah. Sensus Pertanian 2023 harus menjadi momen penting dalam menciptakan ikatan sentimen yang kuat antara rakyat dan pemerintahannya, sehingga tidak lagi melahirkan adanya “ketidakpercayaan” pada masyarakat, tetapi berubah menjadi “keberdayaan” yang dimulai dari data-data yang terhimpun lewat pendataan demi tegaknya keadilan dalam pembangunan pertanian di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Andesmora, E. V. (2021). Potensi budidaya tanaman pinang (*Areca catechu* L.) di lahan gambut: Studi kasus di KHG Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 3(1), 219–227. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPT/article/view/11798/7508>
- Asih, S. N. (2023, 20 Juni). Sensus pertanian 2023: Pijakan untuk pertanian masa depan. *Detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-6782857/sensus-pertanian-2023-pijakan-untuk-pertanian-masa-depan>

- Asrar, K., Makmur, T., & Zakiah. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pinang di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(1), 59–66. <https://jim.usk.ac.id/JFP/article/view/6638>
- Badan Pusat Statistik. (2023a, 1 Juni). *BPS mulai melaksanakan Sensus Pertanian 2023*. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/06/01/532/bps-mulai-laksanakan-sensus-pertanian-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani*. Sensus Pertanian 2023. Diakses pada 18 Juni, 2025, dari <https://sensus.bps.go.id/st2023/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2023). *Kabupaten Aceh Besar dalam angka 2023*. <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/35162f080cf7f47e5a70a20e/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2023.html>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (t.t.). *Profil kawasan Aceh Besar*. UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Diakses pada 18 Juni, 2025, dari <https://uptdppkd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-besar>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. (2020). *Laporan tahunan tahun 2020*. <https://distanbun.acehprov.go.id/halaman/laporan-tahunan>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. (2022). *Statistik Perkebunan Aceh 2021*. https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/O87E/Statistik_Perkebunan_Aceh_2021.pdf
- Firmanda, N., Baga, L. M., & Purwono, J. (2022). Analisis pemasaran pinang di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(1), 126–141. <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.126-141>
- Hanafiah, J. (2022, November 20). Perlahan, luas sawah di Aceh berkurang. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2022/11/20/perlahan-luas-sawah-di-aceh-berkurang/>
- Herianto. (2021a, September 3). Pinang, komoditi mudah disukai petani, ini dilakukan Distanbun untuk kembangkan tanaman ini se-Aceh. *Serambinews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/03/pinang-komoditi-mudah-disukai-petani-ini-dilakukan-distanbun-untuk-kembangkan-tanaman-ini-se-aceh>

- Herianto. (2021b, September 3). Ekspor pinang Aceh ke Iran, Thailand & Malaysia, tiap bulan Rp 31 miliar, ini harga pinang di Aceh. *Serambinews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/03/ekspor-pinang-aceh-ke-iran-thailand-malaysia-tiap-bulan-rp-31-miliar-ini-harga-pinang-di-aceh>
- Husna, R., Azhar, & Marsudi, E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 525–533. <https://jim.usk.ac.id/JFP/article/view/9394>
- Juli, M. (2023, 16 Juni). *Harga iinang Aceh hancur-hancuran. Komparatif*. <https://komparatif.id/harga-pinang-aceh-hancur-hancuran/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023, June 1). *BPS mulai laksanakan Sensus Pertanian 2023*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49374/bps-mulai-laksanakan-sensus-pertanian-2023/0/artikel_gpr
- Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. (n.d.). *Budidaya tanaman pinang (Areca catetchu L.)*. <http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Budidaya%20Pinang.pdf>
- Lagiman. (2020). Pertanian berkelanjutan: Untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta*, 365–381. https://eprints.upnyk.ac.id/24326/1/b4%20FULL%20PAPER_LAGIMAN.pdf
- Megasari, L. A. (2019). *Ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai patron dalam kegiatan proses produksi pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)* [Undergraduate thesis, Universitas Airlangga]. Airlangga University Repository. <http://repository.unair.ac.id/87566/>
- Panduan lengkap budidaya pinang betara. (t.t.). Diakses pada 1 Oktober 2025. <https://www.kartani.co.id/panduan-budidaya-pinang-betara/?srsltid=AfmBOorHEasRs0egCFNIuM2s3HLVPD8D3B1vbzcIGzZqyKA4DW1HhE8S>
- Parma, P. G. (2014). Pengembangan model penguatan lembaga pertanian sebagai prime mover pembangunan kawasan daerah penyangga pembangunan (dpp) destinasi wisata Kintamani – Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 380–393. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/2928/2428>

- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2021). *Geografis*. <https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>
- Pradiana, W., & Anantanyu, S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Bendungan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor di Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 82–94. <https://prospectpublishing.id/ojs/index.php/jpm/article/view/21/23>
- Putri, I. (2023, June 12). Ini sederet data yang akan diambil dalam Sensus Pertanian 2023. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6767464/ini-sederet-data-yang-akan-diambil-dalam-sensus-pertanian-2023>
- Rachma, N., & Umam, A. S. (2020). Pertanian organik sebagai solusi pertanian berkelanjutan di era new normal. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 1(4), 328–338. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/jppm/article/view/4260>
- Sihombing, T. (2000). *Budidaya dan prospek bisnis pinang*. Penebar Swadaya.
- Supriyadi. (2021, July 2). *6 masalah menahun pertanian di Indonesia yang tak kunjung selesai*. Website Resmi Desa Tanjungmeru. <https://tanjungmeru.kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/547>
- Syukron, A., Sarman, S., & Salim, H. (2022). Respons pertumbuhan bibit pinang (*Areca catechu* L.) terhadap aplikasi limbah solid kelapa sawit. *Jurnal Agroecotania*, 5(1), 1–11. <https://online-journal.unja.ac.id/Agroecotania/article/view/22823>
- Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) GIS. (2021). *Katalog peta Kabupaten Aceh Besar*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Banda Aceh. <https://uptbgis.bandaacehkota.go.id/katalog/peta/detail/admin-aceh-besar>
- Universitas Stekom. (t.t.). Pinang. In *Ensiklopedia dunia*. Retrieved June 18, 2025, from <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pinang>
- Wulansari, I. (2019, 30 Mei). Pertanian berkelanjutan: Untuk keamanan pangan atau untuk ketahanan petani? *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/30/pertanian-berkelanjutan-untuk-keamanan-pangan-atau-untuk-ketahanan-petani/>

Bab III

Mengurai Persoalan Terpuruknya Jeruk Berastagi di Karo

Herlina Tarigan

Jeruk merupakan komoditas pertanian utama masyarakat dataran tinggi Karo, sekaligus simbol status kejayaan pertanian buah Sumatra Utara. Buah manis berukuran sedang dengan warna dan aroma yang khas ini telah mampu memosisikan Sumatra Utara sebagai sumber penghasil salah satu buah favorit yang menghiasi meja makan keluarga Indonesia. Namun, serangan hama lalat buah yang tidak terkendali dan menurunnya luas lahan menyebabkan menurunnya produksi jeruk. Usaha petani jeruk mengalami keterpurukan, yang berdampak buruk pada ekonomi keluarga. Berbagai upaya dan manuver dilakukan petani untuk mengembalikan kejayaan jeruk, tetapi tidak sedikit yang akhirnya beralih komoditas atau beralih usaha. Tulisan ini merupakan catatan emik yang dilakukan bersamaan dengan Sensus Pertanian 2023. Tujuannya untuk mengurai persoalan

H. Tarigan

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: herl009@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Tarigan, H. (2025). Mengurai persoalan terpuruknya jeruk Brastagi di Karo. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 59–96). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c938
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pertanian jeruk di Kabupaten Karo serta mencermati dinamika sosial-ekonomi-teknologi yang terjadi melalui analisis perilaku petani.

A. Menerjemahkan Sensus Pertanian di Tingkat Lokal

Cerita tentang buah primadona jeruk medan yang dikenal seantero Nusantara, bahkan diekspor sampai ke beberapa negara tetangga bukanlah cerita tentang kejayaan petani Karo di dataran tinggi Sumatra Utara semata. Buah manis berukuran sedang dengan warna dan aroma yang khas ini telah mampu memosisikan Sumatra Utara sebagai sumber penghasil salah satu buah favorit yang menghiasi meja makan keluarga Indonesia. Jeruk yang semula di Sumatra Utara dikenal sebagai jeruk Berastagi, kini dikenal sebagai jeruk medan, salah satu buah konsumsi masyarakat yang dijual, mulai dari pasar tradisional yang becek hingga pasar modern yang bersih dan tertata, dihidangkan di atas meja makan keluarga hingga meja makan hotel berbintang. Sampai hari ini, jeruk medan masih menduduki posisi istimewa di hati konsumen buah Indonesia.

Dinamika perkembangan pertanian dalam khazanah buah jeruk di Kabupaten Karo, tempat jeruk medan diproduksi, menjadi amatan yang menarik di antara data pertanian Indonesia yang dihimpun melalui kegiatan Sensus Pertanian 2023. Angka-angka yang dihasilkan sensus ini telah melalui proses pendataan yang penuh perjuangan dalam tantangan geografis, kesesuaian waktu wawancara, hingga upaya penggalan substansi yang komprehensif. Hasilnya menampilkan potret realitas pertanian di Indonesia. Potret ini akan menarik dan menjadi paripurna ketika angka-angka kuantitatif dijelaskan beserta gambaran emik yang menyampaikan fakta sosial dari sudut pandang subjek petani, karakter sosial budaya spesifik yang dicirikan oleh praktik-praktik sistem bertani lokal, beserta proses pengambilan keputusan terkait pengembangan usaha pertanian. Juga disampaikan cara-cara menghitung risiko dan memutuskan strategi yang ditempuh dalam menghadapi tantangan faktor alam dan non-alam, termasuk

kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pergulatan usaha pertanian jeruk. Narasi emik dari perspektif petani berfungsi mengungkap kedalaman data dari sisi pelaku pertanian yang bersifat lokal, tetapi perilaku tersebut terkait erat dengan ekonomi nasional dan global. Ketika penjelasan mengapa stagnasi atau dinamika data terjadi, apa yang menjadi persoalan kritis di balik angka-angka tersebut, dan bagaimana petani menyasiasi keterbatasannya dalam mengembangkan perekonomian keluarga, maupun strategi dan keputusan yang dibangun, akan menjadikan hasil Sensus Pertanian 2023 lebih komprehensif sebagai bahan baku para pihak untuk membuat kebijakan, berinvestasi, memperdalam riset, membangun jaringan pemasaran, hingga memastikan apakah petani lebih atau kurang sejahtera.

Tidak ternafikan, sampai saat ini, sektor pertanian masih merupakan tumpuan hidup sekitar 40,69 juta penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023), dan mayoritas hidup di pedesaan. Peran penting ini menjadikan pembangunan pertanian sampai hari ini menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perencanaan, kebijakan, hingga evaluasi pembangunan pertanian perlu didukung oleh ketersediaan data yang akurat dan terkalibrasi. Penguatan data statistik pertanian memiliki peranan penting sebagai langkah strategis untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan pertanian. Namun, apakah makna pendataan sensus bagi petani jeruk di Karo? Lebih sepuluh tahun persoalan lalat buah telah membuat petani “gagap” dalam menanti solusi yang belum kunjung usai. Secara lokal, aneka spekulasi pengendalian hama, pergeseran komoditas, dan teknik-teknik panen serta pemasaran adalah data yang dipandang penting untuk dicatat dalam sensus, lalu dianalisis dan dicarikan solusi. Kemudian, bagaimana Sensus Pertanian 2023 sebagai pendataan yang disusun dengan prosedural pendataan yang mengedepankan akurasi dan validasi atau kesahihan data, dilengkapi dengan produk basis data yang holistik, utuh, dan integral berdasarkan fakta dan realitas yang ada menjadi pendukung tercapainya Satu Data Indonesia?

B. Bentang Alam Pertanian: Mengenal Awal Lingkungan Sensus

Sumatra Utara merupakan provinsi terluas ketiga di Pulau Sumatra, membentang luas dengan daratan 72.981,23 km². Sebagian besar wilayahnya berada di daratan Pulau Sumatra, sedangkan sebagian kecil berada di Kepulauan Nias yang mengelompok di bagian barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah daratannya terbagi dalam tiga kelompok wilayah, yaitu pantai barat, dataran tinggi, dan pantai timur. Kabupaten Karo, bersama Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Samosir, dan Kota Pematangsiantar, termasuk dalam kelompok dataran tinggi. Sesuai letak geografis tersebut, pencaharian penduduk Karo dominan berbasis pertanian dengan komoditas utama hortikultura dan jagung.

Kabupaten Karo, dengan ibukota Kabanjahe, berjarak 76 km dari kota Medan. Jalan menuju lokasi cukup baik, menanjak terus-menerus dengan kelokan-kelokan yang cukup banyak dan tajam di beberapa kilometer, khususnya mulai Bandar Baru sampai kota Berastagi. Hal ini menyebabkan jarak tersebut membutuhkan waktu tempuh 2–3 jam perjalanan. Kondisi sepanjang jalan cukup padat dengan kendaraan-kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia berupa Mitsubishi L-300 Borneo, minibus Sutra dan minibus Sinabung Jaya. Berdasarkan pengalaman para pengemudi, meskipun jalan menanjak dan berliku, laju kecepatan kendaraan ini cukup tinggi. Sementara itu, kendaraan umum antarkota dan dari kota-kota besar, seperti Berastagi dan Kabanjahe, ke kecamatan setempat menggunakan angkot dengan nama-nama beragam tergantung jurusannya. Kendaraan roda empat dan roda dua sangat umum dimiliki oleh masyarakat, termasuk para petani jeruk.

Kabupaten Karo merupakan satu dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara. Kabupaten Karo sendiri terdiri dari 17 kecamatan. Lokus penelitian dilakukan pada tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Munte, dan Kecamatan Barus Jahe (Gambar 3.1). Secara geografis, letak Kabupaten Karo berada di 2°50'–3°19'



Sumber: Pemerintah Kabupaten Karo (2023)

Gambar 3.1 Peta Lokus Penelitian

Lintang Utara dan $97^{\circ}55' - 98^{\circ}38'$ Bujur Timur dengan luas 2.127,25 Km² atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten Karo terletak di atas 600 mdpl sehingga sebagian besar wilayahnya masuk kategori dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, secara umum tanahnya berundak; sulit menemukan dataran yang rata dan luas.

Karo dikenal dengan sebutan *Tanah Karo Simalem*, sebutan warganya yang mengartikan sebagai dataran tinggi yang sejuk dan selalu dirindukan. Letaknya di bawah kaki Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung, dan salah satu sisinya berbayang deretan Bukit Barisan. Tanahnya yang subur dengan udara sejuk (suhu $16^{\circ} - 26^{\circ}$ C), berada pada ketinggian 600–1.400 mdpl. Jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 414.429 jiwa, terbanyak berada di Kecamatan Kabanjaha 75.387 jiwa dan Kecamatan Berastagi 49.197 jiwa. Keduanya merupakan kota terbesar di kabupaten tersebut. Kabupaten ini menjadi sentra tanaman jagung dan hortikultura terbesar di Sumatra Utara. Jagung banyak ditanami di wilayah barat dan barat daya, khususnya di empat kecamatan (Tiga Binanga, Lau Baleng, Mardinding dan Munthe). Produktivitas jagung rata-rata mencapai tujuh ton per ha. Hortikultura meliputi tanaman sayuran, bunga,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan buah. Sayuran utamanya adalah tomat (3.387 ha), wortel (5.210 ha), kentang (4.568 ha), dan kubis (4.627 ha). Selain itu, petani juga menanam sayuran, seperti sawi, daun bawang, daun seledri, kacang koro, dan terung.

Terdapat pula beberapa desa penghasil aneka bunga yang pemasaran lokalnya terlihat sepanjang jalan Berastagi–Kabanjahe dan pasar-pasar setempat, sekaligus menjadi pemasok bunga kota-kota lain di Sumatra Utara. Tanaman bunga hampir 90% terkonsentrasi di Kecamatan Berastagi dengan jenis bunga krisan (198.500 m²), sedap malam (47.500 m²), dan mawar (71.900 m²). Kabupaten Karo juga merupakan produsen buah jeruk, markisa, dan terung belanda. Jeruk merupakan komoditas yang melegenda dan menjadi ikon Kabupaten Karo yang populer dengan nama jeruk berastagi atau jeruk medan. Jeruk dijual segar dengan jaring pemasaran hingga keluar Pulau Sumatra, bahkan sampai ekspor. Khusus tanaman markisa dan terung belanda sudah diolah pabrikan berupa sirup yang pemasarannya menjangkau seluruh Nusantara.

Setiap tahun, Kabupaten Karo menyelenggarakan Pesta Bunga dan Buah dengan aneka festival, seperti tarian, *marching band*, menghias kendaraan, dan pakaian adat yang memanfaatkan *uis nipes* (tenun selendang karo) serta bunga-buah sebagai kreativitas yang menarik dan semarak. Pesta ini merupakan ungkapan kebanggaan terhadap hasil bumi berupa buah, sayuran, bunga, dan jagung. Momentum ini sekaligus untuk membangkitkan semangat petani dan memikat turis untuk meningkatkan pariwisata. Festival ini juga menjadi pertunjukan massal; setiap kecamatan menampilkan kreativitas transportasi, fesyen, atau rangkaian bunga-buah sebagai bahan utamanya. Diadakan pula kegiatan makan buah produksi Karo secara gratis kepada semua pengunjung. Peserta festival dan pendukung lainnya melakukan arakan karnaval di sepanjang jalan Berastagi. Acara ini selalu dilaksanakan pada awal hingga pertengahan bulan Juli selama 3 hari. Kreativitas masyarakat dalam festival Bunga dan Buah tahun 2023 seperti terlihat pada Gambar 3.2.



Sumber: Jelajah News (2023)

Gambar 3.2 Festival Bunga dan Buah di Berastagi tahun 2023

Pada tahun 1980-an hingga 2010, perekonomian petani Karo pernah berjaya dari hasil usaha tani jeruk. Jeruk menjadi komoditas primadona dan mengukir rantai pemasaran di dalam negeri hingga pasar ekspor. Peluang pasar jeruk karo atau jeruk berastagi yang luas mampu menyaingi jeruk-jeruk lokal maupun jeruk impor. Hal ini tidak lepas dari hasil perjuangan petani dalam usaha tani jeruk. Kompetensi dan motivasi bertani dinyatakan 83,6% menjadi variabel keberhasilan petani jeruk di Karo (Ashari, 2018). Tiga kecamatan sentra jeruk terluas di Karo adalah Kecamatan Munte, Tiga Panah, dan Merek. Luas lahan jeruk selama 10–15 tahun terakhir sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai akibat munculnya serangan lalat buah yang hingga hari ini belum berhasil ditanggulangi secara baik.

Pasca kejayaan tanaman jeruk, petani Karo mengalihkan tanaman menjadi tanaman kopi. Secara geografis, khususnya faktor ketinggian, tanaman kopi, baik robusta maupun arabika bisa tumbuh baik di Karo. Namun secara historis, penanaman kopi oleh petani berkembang karena dua hal: (1) usaha tani jeruk membutuhkan biaya yang tinggi dan memberatkan bagi petani serta (2) tanaman jeruk sudah mulai

kurang menguntungkan. Realitas ini menunjukkan bahwa, jika petani memiliki modal, penanaman komoditas jeruk lebih menjadi prioritas pilihan. Satu dasawarsa terakhir, Kabupaten Karo merupakan salah satu penyuplai kopi untuk perusahaan kopi seduh Starbucks yang gerainya tersebar di seluruh dunia. Saat ini, Starbucks mempunyai kebun dan penampungan produksi kopi di Tongkeh, Berastagi.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian Versi Lokal

Target kebijakan hasil sensus bermuara pada petani sebagai aktor utama dalam pertanian. Penggalan dimensi latar belakang, historis, dan perspektif sosial budaya masyarakat petani terhadap proses pendataan tidak hanya memperkaya pemaknaan atas data yang ada, tetapi sekaligus menjadi alat kalibrasi terhadap metodologi dan akurasi data yang terkumpul. Fenomena ekonomi dan sosial budaya masyarakat petani yang berada di balik proses pendataan adalah narasi penting untuk memperkuat hasil pendataan. Menilik substansi sensus dari sisi masyarakat petani sekaligus mengamati proses pendataan oleh para petugas pencatat lapangan (PPL) ataupun petugas monitoring data lapangan (PML) berfungsi memberi gambaran holistik sensus dan menyempurnakan teknik pendataan.

Dari hasil analisis terhadap data dan informasi petani yang ber-singgungan dengan variabel sensus dalam kuesioner yang disusun BPS, setidaknya ada 5 (lima) variabel yang memengaruhi perkembangan pertanian jeruk di Karo, meliputi:

- 1) **Lahan.** Bagi masyarakat Karo, lahan adalah sumber daya penting dan strategis, sebagai sumber daya ekonomi sekaligus jati diri keluarga dan marga. Menurut sejarahnya, tanah pada setiap desa adalah milik *si mantek kuta* (pendiri desa) yang kemudian membagikannya kepada setiap pendatang dengan memanfaatkan hutan di sekitarnya. Oleh karena itu, potret letak atau posisi lahan terhubung erat dengan struktur sosial yang berlaku dalam sistem kekerabatan masyarakat desa (Simanjuntak, 2015). Sejalan dengan semakin padatnya penduduk, persoalan lahan pun menjadi se-

makin kompleks. Jual beli lahan, sistem sewa, sistem bagi hasil, sampai sistem pinjam pakai berkembang di masyarakat. Lahan juga menjadi aset berharga yang menjadi lambang status sosial masyarakat yang umumnya hanya dilepas atau dijual melalui pertimbangan kesetaraan kepentingannya, misalnya butuh biaya untuk pendidikan anak, biaya untuk mendapatkan pekerjaan atau membayar hutang yang melilit. Selain perpindahan pemilikan dan penguasaan lahan, tantangan lain adalah makin menyempitnya lahan garapan karena fragmentasi yang disebabkan berlakunya sistem pewarisan. Terdapat satuan ukur lahan yang dipakai secara lokal seperti *rante* yang setara dengan 20x20 m atau 400 m².

- 2) **Tenaga kerja.** Terdapat indikasi kuat, kaum muda setempat semakin kurang tertarik pada dunia pertanian. Semangat menyekolahkan anak ke kota akhirnya menjadi faktor pendorong banyak tenaga kerja muda berpendidikan yang tidak kembali ke daerahnya dalam berkarier. Sebagai wilayah sentra hortikultura salah satu tantangan terberat petani Karo adalah tenaga kerja pertanian. Usaha tani hortikultura membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar dalam waktu yang cepat. Kelangkaan tenaga kerja setempat telah mengundang munculnya kelompok-kelompok kerja dari luar daerah meramaikan pasar tenaga kerja di Karo. Beberapa indikasi sosial yang teramati di antaranya sebagai berikut.
- a) Setiap pagi hari, salah satu sisi Kota Kabanjahe dipenuhi para buruh tani yang secara bertahap akan membagi diri menurut wilayah kerjanya masing-masing. Masyarakat menyebutnya *si raron* (buruh tani).
 - b) Sulit menemukan grup aron dari etnis Karo. Grup pekerja ini umumnya adalah etnis Nias, Toba, Pakpak, Mandailing, dan Jawa.
 - c) Posisi tawar tenaga kerja dalam menetapkan upah cukup kuat dengan hitungan upah harian tetapi teknik borongan. Jika dihitung, upah tenaga kerja rata-rata per hari mencapai Rp150.000.

- d) Masyarakat mengklasifikasi tenaga kerja dengan spesialisasinya. Misalnya, pekerja Nias biasanya lebih banyak mengerjakan usaha tani wortel, Toba bekerja dalam usaha tani jagung dan jeruk, dsb.
- e) Mulai berkembang usaha kontrakan/penyewaan rumah bagi para pekerja/buruh tani. Muncul pula para *broker* atau calo tenaga kerja yang mempunyai hubungan ke sumber-sumber tenaga kerja. Petani bisa memesan tenaga kerja apabila membutuhkan pekerja melalui jasa para calo dengan tingkat upah yang berlaku.

3) **Modal.** Usaha tani hortikultura termasuk dalam usaha tani berbiaya tinggi dan menjadi ajang spekulasi yang membutuhkan keberanian dalam berinvestasi. Petani Karo umumnya sudah memiliki akses terhadap dunia perbankan, seperti bank formal, Bank Perkreditan Rakyat, ataupun lembaga keuangan lain, seperti *credit union* dan pelepas uang. Kasus yang banyak ditemukan ialah petani meminjam modal dari pedagang sarana produksi pertanian (saprodi) dengan mekanisme bayar panen. Hampir di setiap desa terdapat kios penjualan saprodi, dan pada beberapa desa ditemukan pedagang grosir saprodi pertanian yang melayani petani dengan berbagai mekanisme penjualan, seperti penjualan bayar langsung (*cash*), sistem menabung atau bayar setelah panen, bahkan ada pedagang saprodi yang berani memberi garansi keberhasilan penanaman komoditas tertentu dan membebaskan pembayaran saprodi jika usaha tani tidak berhasil.

4) **Harga.** Salah satu faktor pendorong usaha tani yang menjadi harapan setiap petani adalah tingkat harga yang tinggi saat hasil pertanian di panen dan dijual. Petani umumnya memperoleh informasi harga dari pedagang pengumpul atau sesama petani yang sudah lebih dahulu menjual hasil produksinya. Pada satu dasawarsa yang lalu petani harus menjual hasil panennya ke pasar yang terdapat di tingkat kecamatan atau ke ibukota kabupaten. Apabila harga jual produksi sangat rendah, dan dalam kalkulasi

petani biaya panen, *packing* dan transportasi lebih tinggi dari harga jual, tidak jarang petani membiarkan produksi pertaniannya membusuk di lahan. Namun, saat ini penjualan hasil produksi pertanian yang *bulky* dan mudah busuk, sudah lebih mudah karena banyak pedagang yang datang ke desa bahkan berkeliling ke lahan-lahan pertanian untuk menampung hasil panen petani dengan tingkat harga bersaing. Dengan kata lain, informasi harga dan pemasaran pertanian sudah lebih cepat dan terbuka, sebagai konsekuensi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

5) **Pasar.** Produksi pertanian hortikultura, khususnya jeruk, bisa dijual dalam bentuk *sam-sam* (campuran) yang dikemas dalam keranjang dengan kapasitas rata-rata 50 kg. Proses *sorting* dan *grading* dilakukan oleh pedagang. Saluran pemasaran jeruk dari Kecamatan Barus Jahe, Tiga Panah, maupun Kecamatan Munte setidaknya terbentuk dalam tiga saluran (Sari et al., 2021):

- a) petani-pedagang pengecer;
- b) petani-pedagang pengumpul desa-pengecer; dan
- c) petani-pedagang pengumpul desa/kecamatan-pedagang pasar induk-pengecer (pasar tradisional dan pasar modern).

Fluktuasi harga di tingkat petani bersifat asimetris dengan harga di tingkat konsumen. Artinya, jatuhnya harga jeruk di tingkat produsen/petani tidak selalu membuat harga di tingkat konsumen turun dengan proporsi seperti di petani. Berdasarkan kasus ini, dapat diperkirakan bahwa proses perjalanan jeruk dari produsen hingga ke konsumen melalui banyak faktor yang memengaruhi harga, seperti penyusutan, pembusukan, transportasi hingga adanya pungli-pungli di perjalanan.

D. Dinamika dan Tantangan Pendataan

Sensus Pertanian merupakan salah satu kegiatan besar BPS yang dilaksanakan secara rutin dalam periode sepuluh tahunan. Tujuannya untuk mendapatkan statistik pertanian yang lengkap dan akurat

sehingga mampu memberi gambaran mengenai struktur pertanian Indonesia dalam arti luas dan potret dinamika yang terjadi. Hasil sensus akan dimanfaatkan oleh pemerintah dan berbagai *stakeholder* yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dalam khazanah pembangunan pertanian. Oleh karena itu, penyiapan substansi pendataan, prosesi pendataan, dan peran petugas pendataan menjadi kunci perolehan data yang meyakinkan mendekati fakta sebenarnya.

Rekrutmen petugas sensus dilaksanakan secara terbuka (*open recruitment*) yang diumumkan melalui berbagai media yang tersedia. Rekrutmen ini menyasar pada dua kelompok, yaitu petugas baru yang direkrut sebagai pendata dan petugas mitra—petugas yang sebelumnya sudah pernah terlibat dalam pendataan-pendataan lain yang diselenggarakan oleh BPS sebelumnya. Seleksi bersifat umum melalui tes dasar menyangkut karakteristik petugas dan diperkuat dengan pelatihan berupa pembekalan materi dan uji coba pendataan dalam ruangan berupa *roleplay*, tanpa uji coba dengan petani langsung. Petugas yang lolos seleksi kemudian akan ditugaskan sebagai petugas pencacah lapang (PPL) atau petugas monitoring lapang (PML). Mereka mulai bekerja setelah melalui pembekalan yang mencakup teknik-teknik pencacahan dan penguasaan materi pendataan yang disiapkan secara komprehensif. Petugas perlu fokus melaksanakan pendataan karena terikat pada tenggat waktu dua bulan yang ditetapkan. Kuota hasil pendataan berkisar antara 6–7 petani per hari. Petugas Sensus Pertanian di Kabupaten Karo melibatkan 355 orang PPL dan 67 orang PML yang dikoordinir oleh 17 orang koseka.

Secara struktur, penanggung jawab pelaksana Sensus Pertanian 2023 di Sumatra Utara terdapat pada beberapa tingkatan. Ada penanggung jawab di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Seluruh penanggung jawab ini merupakan petugas organik BPS. Khusus di tingkat kecamatan, koordinator sensus kecamatan (koseka) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sensus masing-masing kecamatan. Sementara itu, untuk kegiatan di lapangan akan dijalankan oleh PPL dan PML.

PPL bertugas melaksanakan wawancara dan pencacahan di tingkat rumah tangga. Karakteristik yang diperlukan bagi petugas PPL adalah: (1) mampu memahami materi wawancara dengan baik dan benar; (2) jarak tinggal berdekatan dengan wilayah kerja; (3) mengenal dengan baik lingkungan geografis, aparat desa, penduduk, dan kebiasaan setempat; serta (4) dapat berkomunikasi dalam bahasa setempat sehingga komunikasi dalam pencacahan berjalan lancar. Realitasnya, petugas sebagian besar adalah para sarjana baru (*fresh graduate*) yang belum bekerja tetap. Sebagian lainnya adalah mitra BPS yang sudah berpengalaman mendata sebelumnya.

PML berperan sebagai pendamping PPL yang memiliki tugas membantu memperlancar proses pencacahan, baik dari segi teknik wawancara maupun substansi pendataan. PML membawahi beberapa PPL dengan wilayah kerja dalam satu desa atau lintas desa. Gambar 3.3 memperlihatkan para petugas tersebut.



Foto: Herlina (2023)

Gambar 3.3 Petugas Sensus Pertanian 2023 tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Petugas Lapangan

Sasaran pendataan Sensus Pertanian mencakup tiga kelompok: petani, perusahaan pertanian, dan usaha tani lainnya. Pembahasan terbesar dalam tulisan adalah pendataan terhadap rumah tangga petani yang diperhadapkan pada berbagai tantangan di lapangan, baik tantangan geografis, tantangan iklim dan waktu komunikasi, serta persepsi terhadap makna pendataan maupun makna pertanyaan yang disampaikan.

Pendataan kelompok perusahaan pertanian terdapat lima perusahaan: 1) PT Horti Jaya Lestari (pengolahan hasil pertanian dan ekspor sayuran segar); 2) PT Indojoya Agrinusa Breeding Farm (peternakan unggas); 3) CV Karya Saginta (pembibitan kayu); 4) PT Putra Indo Mandiri Sejahtera (peternakan dan pengolahan susu); dan 5) PT Pontjan (perkebunan sawit). Sementara itu, bagi kelompok usaha tani lainnya ada tiga gapoktan yang aktif menjalankan usahanya.

Petugas sensus terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang seimbang. Secara operasional, tidak terdapat pembagian tugas berdasarkan gender, sekalipun ada tantangan dan keterbatasan tertentu bagi petugas perempuan dalam melaksanakan tugas, terutama terkait hambatan geografis, hambatan ketersediaan waktu petani untuk diwawancarai, maupun responden yang menguasai data usaha tani. Potret pemukiman antardesa relatif sama, umumnya pemukiman terpisah dari lahan pertanian. Hanya beberapa kasus saja ditemukan petani tinggal di lokasi lahan pertanian.

Desa Semangat di Kecamatan Barusjahe, Desa Kuta Kepar di Kecamatan Tigapanah dan Desa Barung Kersap di Kecamatan Munte adalah desa pertanian penghasil aneka sayuran dan buah, termasuk jeruk. Karakteristik pertanian hortikultura membutuhkan penanganan secara intensif sehingga sebagian besar waktu petani berada di lahan pertanian. Hal ini menyebabkan wawancara hanya bisa dilakukan pada pagi hari sebelum petani berangkat ke kebun atau malam hari setelah pulang dari kebun. Pagi hari setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, kaum ibu berangkat ke ladang, sedangkan kaum bapak ke kedai kopi. Kaum bapak akan menyusul ke ladang sekitar pukul 9–10. Akibatnya, pendataan pada pagi hari lebih banyak dilakukan terhadap

responden laki-laki, meskipun informasi proses produksi, pemasaran, dan aset lahan, lebih banyak dikuasai oleh petani perempuan. Hal ini membuat pendataan yang lengkap harus dilakukan dua kali. Wawancara responden perempuan biasa dilakukan pada saat istirahat bekerja siang hari, atau dengan membuat perjanjian terlebih dahulu. Artinya, penentuan waktu wawancara yang tepat agar penggalan data bisa dilakukan dengan cermat merupakan tantangan tersendiri dalam proses pendataan.

Mendata di tengah jalan desa yang berundak-undak, jalan usaha tani yang sempit, belum lagi beraspal, berlubang, dan berlumpur, merupakan realitas tantangan geografis bagi petugas dalam melakukan proses pendataan. Wawancara yang harus dilaksanakan pada malam hari di wilayah permukiman yang jarak satu rumah dengan rumah lainnya berjauhan, merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi petugas perempuan. Oleh karena itu, pada kasus khusus seperti ini, petugas laki-laki dan perempuan bekerja sama melakukan wawancara pada wilayah yang berdampingan.

Substansi Sensus Pertanian menghimpun data terkait karakteristik rumah tangga petani, identitas unit usaha, kepemilikan lahan, irigasi, dan tradisi bertani terkait struktur ongkos usaha tani yang membutuhkan penggalan data dengan perhitungan-perhitungan tersendiri. Perhitungan usaha tani dengan jumlah dan satuan-satuan



Foto: Herlina (2023)

Gambar 3.4 PPL sedang Mendata Didampingi PML di Desa Semangat (Barusjahe) dan Desa Barung Kersap (Munte)

setempat memerlukan waktu dan kecermatan dalam menerjemahkannya kepada satuan standar yang digunakan dalam input data ke dalam kuesioner. Perhitungan ini membutuhkan waktu tersendiri pasca-wawancara dan diteruskan kepada PML untuk diperiksa sehingga kesalahan hasil pendataan bisa diperkecil.

Kerja sama BPS dengan aparat desa dilakukan melalui koseka. Aparat yang ikut berperan dalam menyosialisasikan pelaksanaan sensus akan membantu kelancaran pendataan yang dilakukan oleh petugas. Mengatur waktu dan irama wawancara sesuai irama kegiatan dan tradisi masyarakat setempat yakni pagi atau malam hari berpotensi memudahkan pendataan lebih cepat dan sesuai fakta. Wawancara siang hari umumnya dilaksanakan di ladang pada saat petani beristirahat bekerja atau dengan perjanjian terlebih dahulu. Secara teknis, pendataan oleh petugas sensus Karo membutuhkan strategi-strategi tersendiri menurut wilayah atau desanya. Hasil diskusi dan pengamatan langsung menemukan ada lima persoalan penting yang diduga berpengaruh terhadap hasil pencacahan.

1. Petani umumnya berangkat ke ladang pagi hari dan kembali sore hari. Cepat dan padatnya aktivitas petani di Karo menyebabkan pentingnya pengaturan waktu pendataan agar suasana wawancara lebih nyaman bagi petani dan perolehan data akan lebih akurat. Waktu wawancara petani umumnya bisa sebelum pukul 9 pagi dan setelah pukul 7 malam menyebabkan target 5–7 petani per hari merupakan perjuangan tersendiri, khususnya bagi PPL dan PML desa-desa tertentu.
2. Terdapat perbedaan kemampuan wawancara antara PPL hasil *open recruitment* dengan mitra BPS yang mendapat pembelajaran dengan waktu dan materi yang sama, dengan pengalaman mendata yang berbeda.
3. Pada tahap awal, PPL menghadapi kesulitan melakukan wawancara sesuai substansi yang terdapat dalam kuesioner. Kesulitan pada *recall* input dan produksi pertanian terjadi karena petani umumnya tidak mencatat proses usaha tani dengan teratur. Jumlah dan jenis input maupun output yang

tidak tercatat berpeluang menjadi salah. Beberapa pendataan juga harus dihitung sebelum dilakukan pencatatan. Ini kerap membutuhkan perhitungan yang cerdas dan aman. Petugas membutuhkan waktu tambahan yang dilakukan pasca-wawancara.

4. Akibat poin 3, sistem pelaporan harian jumlah hasil pencacahan menjadi terlambat, baik karena hambatan *signal* atau keterlambatan wawancara/edit.
5. Pengertian yang selama ini tertanam di hati masyarakat bahwa pendataan akan diikuti turunnya bantuan dari pemerintah. Pada kasus ini penting adanya sosialisasi pelaksanaan sensus pada masyarakat.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi petugas lapangan maupun BPS Karo sebagai institusi yang bertanggungjawab melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023 di wilayahnya. **Pertama**, adanya kesan di masyarakat bahwa pendataan selalu terkait dengan adanya bantuan. Beberapa responden mempertanyakan mengapa mereka sudah beberapa kali didata tetapi tidak memperoleh bantuan. Pengalaman pemikiran tersebut membuat adanya keengganan untuk diwawancara. Keadaan ini merupakan tantangan psikologis bagi petugas dalam memulai pendataan. Melalui penjelasan dan kedekatan relasional (*rapport*), proses pendataan berhasil dilanjutkan, tetapi memerlukan waktu yang lebih panjang dalam memperoleh data.

Kedua, adanya sebagian petani yang tinggal di *sapo juma* (saung) di lokasi lahan pertanian. Petani memilih tinggal atau bermalam di saung karena mempertimbangkan efisiensi waktu pulang-pergi dari rumah ke ladang dan pertimbangan keamanan terhadap buah jeruk yang sudah siap dipanen. Kondisi ini mengharuskan petugas sensus untuk melakukan wawancara di ladang yang terpisah dari pemukiman.

Ketiga, bagi BPS, kegiatan pendataan Sensus Pertanian 2023 berperan menambah jaringan mitra baru BPS. Mitra sebagian besar adalah anak muda yang masih energik dan bersemangat, profesinya

beragam, seperti honorer kantor desa, guru honorer, dan berbagai macam profesi yang waktunya memungkinkan membantu melakukan pendataan secara intensif selama periode dua bulan. Mitra tidak seratus persen terikat dengan BPS. Petugas yang mempunyai kinerja baik, berpotensi menjadi pihak pertama yang mendapat tawaran dalam pendataan-pendataan BPS selanjutnya. Sekalipun pekerjaan pendataan dinilai cukup berat dengan tantangan waktu, teknik dan keluasan materi wawancara untuk kuota yang ditetapkan per satuan waktu, tetapi petugas merasakan tantangan tersebut sebagai proses pembelajaran yang menarik dan menantang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, sebagian petugas adalah mitra lama yang berkomitmen dan solid bekerja, setiap kegiatan pendataan mendaftarkan diri membantu BPS. Mitra BPS yang dianggap bekerja bagus dan mumpuni, diharapkan bisa menyebarkan pengetahuan dan pengalamannya kepada petugas yang baru bergabung.

E. Petani di Tengah Impitan Luasan Lahan

Masyarakat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal, garis keturunan menurut garis ayah yang teridentifikasi lewat marga. Terdapat lima induk marga dalam masyarakat Karo, yaitu Karo-karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, dan Perangin-angin. Setiap desa di Karo memiliki sejarah pendiri dengan marga sendiri. Pada acara seremonial tertentu yang bersifat pengambilan keputusan terkait aktivitas sosial budaya setempat, marga pendiri desa akan disebut dan ditempatkan pada tempat kehormatan. Misalnya, Desa Bunuraya, pendirinya adalah marga Sinuraya (masuk dalam kelompok induk marga Karo-karo). Saat pesta panen tahunan yang dikenal dengan *Kerja Tahun*, kelompok marga Sinuraya diberi kehormatan menentukan tanggal, tempat, dan besaran acara pesta sebagai penghormatan sebagai pendiri desa (*si mantek kuta*). Konon marga tersebut yang pertama sekali menemukan dan bermukim di desa tersebut. Setiap pendatang wajib melapor kepada marga Sinuraya yang akan menerima pendatang secara legal di desa tersebut. Pendatang diberi lahan garapan yang terletak di sekitar desa dengan membuka hutan desa. Pendatang diberi sumber kehidupan.

dengan mengusahakan lahan yang sudah diberikan secara resmi oleh *si mantek kuta*. Harapannya, pendatang bisa hidup layak dan tidak mengganggu pihak lain. Sebagian hutan desa tetap dipertahankan menjadi peneduh dan paru-paru desa sekaligus sumber kehidupan kolektif. Posisi lahan yang diberikan kepada pendatang biasanya menentukan koloni rumah tinggal di dalam desa. Selanjutnya sistem patrilineal menjadi aturan tradisi dalam sistem pewarisan lahan, khususnya lahan pertanian.

Pertambahan penduduk, pesatnya pembangunan, dan kebijakan penguasa merupakan faktor utama pendorong perluasan pemanfaatan lahan. Lahan merupakan aset yang paling umum dibagikan sebagai warisan, khususnya kepada anak laki-laki. Beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan mengenai adanya istilah bentuk kasih sayang kepada anak perempuan. Di dalam keluarga yang sudah berpendidikan, terakulturasi dengan lingkungan dan hukum positif yang berlaku, orang tua memutuskan untuk memberikan hak waris kepada anak perempuan dengan kuantitas lebih kecil dari anak laki-laki (Sitepu & Susilowati, 2018). Sistem pewarisan yang menempatkan lahan sebagai simbol penting dan legal dalam budaya masyarakat Karo terbukti turut mempercepat fragmentasi lahan; akibatnya, pemilikan lahan per rumah tangga terus menyempit. Pada luasan tertentu yang dinilai kurang efisien, lahan dijual. Selain terkait luas lahan, intensitas pengusahaan lahan menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara intensif, telah menekan kualitas lahan semakin rendah.

Desakan kebutuhan lahan pada masyarakat desa di Kabupaten Karo telah melahirkan beberapa perilaku dalam konteks upaya mencukupi kebutuhan hidup manusia. Desakan tersebut lalai mempertimbangkan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Pesatnya perkembangan proses transaksi penjualan lahan, penyewaan lahan atau pinjam pakai lahan, serta penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil adalah solusi rasionalitas petani dalam mengatur sumber daya, agar kebutuhan hidup tercukupi. Kondisi ini telah mendorong hampir semua pemerintah desa membuka dan membagi-bagikan lahan hutan desa. Lahan tersebut semula dipertahankan untuk kepentingan

kolektif, kini beralih menjadi hak pribadi untuk diolah menjadi lahan pertanian. Terganggunya hutan sebagai wilayah konservasi menyebabkan hilangnya resapan air dan mengecilnya sumber air serta menyebabkan persawahan dan irigasi mengering. Keadaan ini mendorong percepatan terjadinya konversi lahan sawah menjadi lahan kering. Realitas ini menjadi penyebab menyempit bahkan hilangnya sawah di beberapa desa. Pada beberapa desa, yang tercatat sebagai lahan sawah irigasi pada data statistik, faktanya telah berubah menjadi lahan sulit air atau lahan kering. Irigasi pedesaan dengan sumber air dari sungai atau parit, sudah mengering. Percepatan ini didorong oleh rasionalitas petani terhadap perolehan keuntungan usaha tani, khususnya pertanian hortikultura.

Beberapa dampak tingginya fragmentasi dan konversi lahan adalah makin sempitnya penguasaan lahan per rumah tangga, meningkatnya petani tanpa lahan, makin menghilangnya sawah sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan. Pada berbagai kasus di Karo, kondisi ini diikuti semakin meningkatnya usaha tani jeruk, semakin hilangnya kesempatan berusaha dan bekerja di pertanian, hingga ancaman terhadap lingkungan (Nurpita et al., 2018; Ridwan, 2009; Irawan, 2005).

Selain fragmentasi dan konversi lahan, persoalan lahan pertanian juga menunjukkan gejala terjadinya ketimpangan penguasaan lahan. Ada segelintir petani yang memiliki lahan sangat luas, sebaliknya ada banyak petani yang menguasai lahan sedikit. Banyak ditemukan kasus lahan dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di kota, lahan yang disewakan atau dibagihasilkan dengan sanak keluarga yang masih tinggal di desa. Fakta lain, ada lahan ditanami jeruk oleh pemilik yang tinggal di luar wilayah, tetapi pengelolaannya dipercayakan kepada penduduk setempat dengan mekanisme bagi hasil atau sistem upah. Pendataan emik lebih jauh diduga bisa menunjukkan persentase lahan yang pemiliknya tidak berada di wilayah Kabupaten Karo, tetapi tetap tidak dijual sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua yang telah mewariskan lahan tersebut. Tidak jarang, orang Karo yang merantau ke luar Sumatra Utara, memilih tempat menikmati

masa purna bakti di kampung asalnya dengan membangun rumah di atas lahan hak warisnya. Sedemikian penting posisi lahan dalam inti budaya masyarakat Karo yang menimbulkan banyak persoalan lahan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

F. Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Pertanian Jeruk: Penantian yang Belum Berakhir

1. Permasalahan Produsen

Permasalahan usaha tani jeruk di hulu adalah persoalan produksi yang terkait lahan, tenaga kerja, teknologi, dan permodalan. Masalah ini telah banyak dibahas pada bagian sebelumnya. Menarik untuk dicermati perkembangan jeruk dalam tenggat waktu yang panjang untuk mengetahui seberapa penting kasus jeruk dalam memengaruhi perekonomian keluarga petani dan ekonomi wilayah. Sementara itu, permasalahan di hilir akan terkait dengan persoalan pemasaran, pengolahan dan tata niaga, untuk menghantar jeruk sampai ke tangan konsumen.

Penuturan masyarakat dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa kejayaan petani jeruk di Kabupaten Karo adalah pada tiga dasawarsa mulai tahun 90-an, 2000-an, hingga 2010. Kasus dua petani masing-masing di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, dan Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte adalah potret representasi petani jeruk di Karo saat ini, sekalipun Karo pernah menjadi penyumbang terbesar produksi jeruk siam (*Citrus sinensis*) dengan rasa, aroma, dan warna yang khas di masa lalu. Ketertarikan konsumen terhadap jeruk medan telah menghantar posisi pasar jeruk ini terhormat di antara pesaing jeruk siam lain, seperti jeruk pontianak, jeruk kintamani, jeruk kampar, dan jeruk-jeruk sejenis lainnya di Indonesia.

Komoditas jeruk dikenal petani sebagai komoditas yang membutuhkan perawatan yang intensif. Selain pemupukan dengan pupuk organik, pemakaian pupuk kimia, seperti urea, ponska, dan lainnya masih sangat diperlukan. Jeruk juga sangat membutuhkan pemeliharaan, seperti pembersihan gulma, pemangkasan, serta men-

jaga serangan dari hama dan penyakit tanaman. Bagi petani jeruk, kebutuhan terhadap herbisida dan pestisida sangat tinggi, baik untuk mencegah jamur, karat daun, layu daun, hingga lalat buah. Demi keamanan, tanaman jeruk biasanya disemprot 1–2 kali seminggu. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah modal untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman. Karo-karo (2020) dalam bukunya *Sukses Budi-daya Jeruk Medan Dengan Pupuk dan Pestisida Organik* menyebutkan sekitar 75% modal usaha tani jeruk medan adalah komponen pupuk dan pestisida.

Tata niaga jeruk medan yang melegenda dan menjadi ikon *Tanah Karo Simalem* pernah menembus pasar nasional dan global, lahir dari tangan terampil dan kerja keras petani yang melakukan riset sendiri dari pekerjaan dan pengalamannya. Pada saat gangguan lalat buah melanda sistem produksi jeruk di sentranya, petani sangat berharap ada pihak luar seperti lembaga penelitian swasta ataupun pemerintah yang mampu memberi solusi atas persoalan yang sedang melanda. Penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian mengalami kegagalan menghadapi petani dengan berbagai pertanyaan yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lalat buah. Upaya petani mencari jawaban dari pedagang saprodi di desa, kecamatan hingga ke kabupaten tidak berhasil. Akhirnya secara bertahap, sebagian besar petani menyerah dan mengakhiri pertanian jeruk karena tidak sanggup memelihara tanaman jeruk dan mengalihkannya dengan tanaman lain. Beberapa tanah guntai, lahan pertanian yang dimiliki oleh orang kota, secara perlahan undur dari meja permainan usaha jeruk. Ada yang membiarkan jeruknya mati dengan sendirinya, ada yang memusnahkan dan mengganti dengan tanaman lain (banyak petani beralih ke komoditas kopi dan alpukat), ada yang menyewakan lahan kepada petani setempat dan ada yang mempersilakan keluarga yang tinggal di desa untuk memanfaatkan atau meneruskan lahan usaha taninya.

Berdasarkan pengalaman menghadapi serangan lalat buah, petani secara otodidak ataupun diskusi dengan petugas pertanian (datang

dalam frekuensi yang sangat rendah), menciptakan teknik-teknik pengendalian hama penyakit dengan beberapa cara (lihat Gambar 3.5).

- a) Memasang perangkat berupa bola-bola kuning atau *es-esan* (plastik kecil berisi cairan minyak) yang dilumuri minyak lem dan digantungkan pada tanaman. Bola-bola kuning tersebut menjebak lalat buah dengan mengira sebagai buah jeruk yang menjelang matang. Pada saat menyentuh bola-bola, lalat akan melekat ke bola dan mati. Melalui teknik yang hampir mirip, petani menggantungkan *es-esan*, atau tumpukan jeruk yang sudah terserang lalat, digantungkan dengan lumuran minyak lem.
- b) Pemasangan kelambu pada kebun jeruk dengan ketinggian 2–3 kali ukuran tinggi pohon jeruk. Kelambu/jaring ini melindungi jeruk dari serangan lalat buah atau hama lainnya. Kelambu atau jaring mengelilingi kebun, bahkan ada yang menutup kebun dari samping maupun dari atas tanaman. Teknik ini cukup mahal, tetapi besarnya harapan petani agar usaha tani jeruk masih tetap menghasilkan, petani bersedia mengeluarkan biaya tersebut.

Menurut petani, saat ini jumlah petani yang menanam jeruk turun 60–70%. Sebagian mengalihkan pertanamannya dengan tanaman lain. Petani jeruk yang bertahan adalah petani yang memiliki modal yang cukup dan konsisten memelihara tanaman secara disiplin dengan penyemprotan secara teratur, memupuk teratur (organik dan kimia), memasang jaring, dan merawat tanaman dengan tekun. Persoalan seriusnya adalah, 13 tahun serangan hama ini memporandakan usaha dan perekonomian petani jeruk, belum ada pihak yang mampu menemukan obat atau cara pencegahan yang efisien dan efektif. Ini menjadi tugas pihak terkait yang hasilnya masih ditunggu petani jeruk di Karo.



Foto: Herlina (2023)

Gambar 3.5 Perangkap Lalat Buah Berbentuk Susunan Jeruk Rusak dan Es-esan

2. Persoalan Tata Niaga

Kegiatan menghantar jeruk medan dari produsen sampai ke tangan konsumen memiliki liku-liku tersendiri. Pada saat panen raya, produksi jeruk tidak hanya dipasarkan di pasar lokal dalam provinsi Sumatra Utara, melainkan sebagian besar dipasarkan di luar, seperti provinsi-provinsi di Pulau Sumatra, Jakarta, Bandung, dan wilayah lainnya. Proses pemasaran jeruk dapat dibedakan menjadi tiga.

- a) Petani jeruk yang menjual produksinya kepada pedagang pengumpul secara sendiri-sendiri, selanjutnya pedagang pengumpul menjual ke pedagang penampung (pedagang antar-kabupaten/provinsi).
- b) Petani jeruk yang menjual produksinya langsung ke pedagang pengecer (ini biasanya petani berlahan sempit).
- c) Petani jeruk yang menjual produksinya secara sendiri-sendiri langsung kepada pedagang pengumpul penampung (pedagang antarkabupaten/provinsi/antarpulau).

Petani umumnya menjual jeruk dalam kualitas campuran, dikemas dalam keranjang dengan berat rata-rata 30–50 kg. Pedagang pengumpul langsung membawa jeruk kepada penampung. Proses sortir dan pengemasan dilakukan oleh penampung sebelum dikirim ke pasar tiap kota provinsi atau langsung ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.

Proses sortir bertujuan untuk (1) memilah jeruk yang busuk, pecah, terkena hama, atau membuang kotoran lain yang terikut dalam packing jeruk; dan (2) mengelompokkan buah jeruk pada beberapa klasifikasi berdasarkan ukuran. Pengklasifikasian yang paling umum adalah kelas super (besar), standar (sedang), dan unyil (kecil). Masing-masing kelas yang tadinya beli tercampur dengan harga yang sama, akan dijual dengan harga berbeda menurut kelasnya.

Memotret rantai tata niaga jeruk medan, dari petani (produsen) hingga ke konsumen memiliki beberapa bentuk alur, yaitu:

- a) Petani - pedagang pengecer – konsumen
- b) Petani – pedagang pengumpul desa – pedagang pengumpul kabupaten-pengecer (pasar tradisional/pasar modern/horeka)
- c) Petani - pedagang pengumpul – penampung - pedagang antarprovinsi -pengecer – konsumen
- d) Petani - pedagang pengumpul – penampung – pasar induk – pengecer (pasar tradisional/pasar modern/horeka) - konsumen

Tingkat harga konsumen sangat dipengaruhi oleh panjang-pendek rantai tata niaga. Pengaruh ini lebih besar dari fluktuasi harga di tingkat produsen. Ini mengindikasikan perubahan harga di tingkat produsen bersifat asimetris terhadap harga ditingkat konsumen. Dengan kata lain, turunnya harga pembelian jeruk ditingkat produsen tidak secara cepat menurunkan harga di tingkat konsumen.

G. Kegagalan Petani dalam Merespons Kebijakan dan Program Pertanian Berkelanjutan

Salah satu tujuan manusia memproduksi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Jenis pekerjaan dan usaha

sangat ditentukan oleh sumber daya yang tersedia dan memungkinkan untuk diolah. Kesadaran hidup di tanah surga yang sejuk dan subur, dikenal dengan ungkapan *Tanah Karo Simalem*. Masyarakat Karo mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian. Seakan lirik lagu grup Koes Plus "... orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman ..." adalah lagu yang tepat menggambarkan pertanian di wilayah ini.

Orientasi utama bertani adalah memanfaatkan sumber daya alam yang sesuai untuk tanaman pangan maupun hortikultura dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Perkembangannya kemudian memanfaatkan peluang pasar yang terbuka untuk komoditas yang dihasilkan. Melalui pengalaman yang berulang dan dukungan kebijakan dari pemerintah, perkembangan sektor pertanian di Karo mampu menempatkan daerah ini sebagai salah satu sentra sayur dan buah (khususnya jeruk) dalam kancah perdagangan nasional serta mandiri secara pangan. Keindahan alam dan kuatnya potensi pertanian mengarahkan pengembangan pariwisata pada jenis ekowisata dan agrowisata.

Lebih dari setengah abad yang lalu, lahan pertanian masih didominasi persawahan, baik yang dilengkapi irigasi pedesaan maupun lahan sawah tadah hujan. Masyarakat Karo menanam padi untuk kepentingan konsumsi keluarga, kebutuhan sosial, dan sisanya dijual ke pasar. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman penting karena selain mengandung makna ekonomi, juga memiliki keterkaitan terhadap unsur religi dan sosial. Beras dipakai sebagai simbol kemakmuran sehingga setiap keluarga terdorong kewajiban menanam padi sendiri. Jika di tempat lain padi dikenal dengan panggilan Dewi Sri, di Karo padi memiliki panggilan *Siberu Dayang*. Agar hasil panen padi memuaskan, masyarakat Karo memberi penghargaan pada semua proses budi daya melalui seremonial tertentu serta disyukuri dengan seremonial khusus dan akhirnya saat panen diwujudkan dalam bentuk *pesta guro-guro aron* (pesta panen). Menurut Bangun (1986, 149), istilah aron berasal dari kata *sisaron-saron* (saling bantu) yang diimplementasikan dalam bentuk kelompok kerja. Sebelum

ekonomi uang berkembang, aron berbentuk proses tukar tenaga atau mengerjakan pertanian secara bergiliran. Sistem kerja aron merupakan kasus umum di tiap daerah di Indonesia saat ekonomi uang belum berkembang. Pada daerah Batak Toba, aron dikenal dengan sebutan *marsiadapari*, di Jawa dikenal dengan *sambatan*, di Sulawesi Utara dikenal dengan *mapalus*, di Sulawesi Selatan dikenal dengan *tudang sipulung* (Tarigan, 2017). Perkembangan ekonomi uang bersamaan dengan kian kompleksnya sistem ekonomi dan sistem produksi, aron kini menjadi pasar tenaga kerja pertanian dan para aron lebih mirip dengan buruh tani.

1. Kegagalan Transformasi Komoditas

Akibat luasnya penanaman padi semenjak era Orde Baru, petani Karo juga aktif membentuk kelompok-kelompok tani sebagai wadah belajar, berlatih, dan berorganisasi bersama, sekaligus sebagai media menerima program bantuan dan pembinaan dari pemerintah. Gerakan revolusi hijau memperkenalkan petani Karo dengan berbagai teknologi pertanian modern dengan fungsi meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pertemuan kelompok tani tanaman pangan (padi dan jagung) menjadikan wadah ini tempat berembuk tentang praktik pertanian yang dikembangkan, teknologi yang diadopsi dan melaksanakan program pertanian yang umumnya bersifat *top-down*.

Perkembangan ilmu dan teknologi pertanian bersamaan dengan meningkatnya informasi pasar pada tanaman hortikultura secara bertahap mendorong terjadinya perubahan komoditas dari padi dan palawija menjadi hortikultura. Bagi petani di dataran tinggi Karo, tanaman sayuran, seperti kentang, wortel, kubis, dan pertanian buah jeruk merupakan produksi pertanian yang memiliki pangsa pasar luas dalam konsumen sayur Indonesia, khususnya di Sumatra Utara. Namun, di antara berbagai komoditas yang ada, jeruk memiliki daya tarik lebih dibanding komoditas lainnya. Daya tarik komoditas-komoditas tersebut mendorong hamparan lahan pertanian sawah beririgasi berangsur mengalami konversi menjadi lahan kering yang

ditanami hortikultura dan yang akhirnya mengalihkan sebagian lahan peruntukan padi.

Program pertanian hortikultura terkait jeruk, seperti pembibitan dengan cara sambung, teknik pemangkasan, teknik pemupukan, teknik penyemprotan, dan teknik panen yang diintroduksikan pemerintah ataupun swasta, merupakan iptek yang diadopsi oleh para petani. Di satu sisi, mereka berharap produksi jeruknya meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Di sisi lain, para pengusaha pupuk, pengusaha pestisida, dan pedagang saprodi lainnya secara gencar (sebagai strategi pemasaran) menawarkan kerja sama dengan petani sebagai individu, bukan pada kelompok tani. Sampai hari ini, petani hortikultura tetap menjadi anggota kelompok tani berbasis pangan dengan tujuan agar tetap berhak memperoleh bantuan pupuk subsidi.

Pengalaman petani di tiga kecamatan yang di supervisi menunjukkan perkembangan kelompok tani yang hampir sama. Pertemuan kelompok hanya saat hendak mengajukan proposal atau menerima program bantuan. Petugas pertanian atau PPL menjadi sumber informasi adanya bantuan-bantuan pupuk, obat-obatan, bibit/benih, dan sebagainya. Tidak ada penyuluhan yang bersifat rutin atau diskusi terkait strategi usaha tani dan tindakan kolektif. Kelompok tani belum berfungsi sesuai tupoksinya. Oleh karena itu, petani jeruk menanam jagung di persil lahan lain sebagai sumber pangan sekaligus mengikatkan petani pada hak sebagai anggota kelompok tani.

Secara bisnis, pertanian hortikultura lebih mampu memberikan keuntungan yang besar kepada petani. Namun, usaha tani ini membutuhkan modal yang lebih besar dibanding usaha tani padi dan jagung. Pertanian hortikultura memiliki risiko dan spekulasi lebih tinggi. Dalam kurun setengah abad terakhir, lahan pertanaman padi dan jagung di karo semakin terdesak, kecuali di wilayah barat daya (Kecamatan Tigabinanga, Mardinding) yang menjadi sentra jagung dan kurang sesuai untuk tanaman jeruk. Masyarakat menanam padi atau jagung pada lahan kering ditujukan sebatas untuk keperluan pangan keluarga.

2. Kegagalan Antara Teknologi dan Keberlanjutan

Salah satu ciri usaha tani komoditas hortikultura adalah sarat input, baik tenaga kerja maupun sarana produksi lainnya. Praktik pertanian yang tidak mempertimbangkan keseimbangan alam dari sisi sosial dan lingkungan, setidaknya berdampak pada tiga risiko besar yang terhadap keberlanjutan.

- a) Kelangkaan tenaga kerja pertanian mengundang masuknya pekerja dari luar yang secara evolusi telah menggeser pelaku pertanian kepada pendatang. Saat ini, banyak pekerja dari Toba, Mandailing, Pakpak, dan Nias yang memasuki pasar tenaga kerja pertanian di Karo. Untuk merespons permintaan tenaga kerja yang tinggi dan cepat, para pekerja membutuhkan tempat tinggal di sekitar kawasan lahan pertanian. Secara bertahap, para pekerja menabung dan mulai membeli aset lahan pertanian. Sementara itu, angkatan kerja muda setempat banyak yang tidak memiliki lahan pertanian. Dalam jangka panjang, situasi ini mengarahkan masyarakat setempat pada peningkatan kemiskinan khususnya pekerja setempat yang kalah bersaing dengan pekerja pendatang yang kuat secara kolektif sebagai kelompok pekerja.
- b) Proses produksi dengan input (pupuk dan pestisida kimia) tinggi menyebabkan terjadinya kejenuhan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas lahan serta berakibat pada rendahnya produksi dan produktivitas lahan. Agar produksi yang diharapkan bisa tercapai secara berkelanjutan, perlu dilakukan pemulihan lahan yang biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, pemupukan organik dan mengedepankan pengendalian hama secara nabati adalah praktik pertanian yang perlu dilakukan petani.
- c) Penyemprotan menggunakan obat-obatan dalam rangka mengamankan jeruk dari berbagai hama yang bersentuhan langsung dengan buah jeruk menyebabkan produksi jeruk karo dikenal sarat dengan bahan kimia. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat hambatan ekspor jeruk medan.

Pemerintah, melalui petugas pertanian dan media-media yang tersedia dan bisa diakses petani perlu secara rutin memberikan pembelajaran efektif teknik-teknik pertanian yang pro lingkungan dengan *good farming practices* (GFP) dan *good handling practice* (GHP).

H. Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Berpuluh tahun mengelola pertanian jeruk telah membangun ekonomi keluarga para petani di Karo. Berbagai aset berharga berupa pembangunan rumah-rumah tinggal dengan gaya modern, meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), meningkatnya jumlah pemakaian kendaraan bermotor, baik beroda dua maupun beroda empat, serta makin semaraknya aksesibilitas petani jeruk ke dunia perbankan, adalah beberapa contoh hasil yang didapat dari bertani jeruk. Dampak membaiknya perekonomian petani jeruk tampak juga pada meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah yang meneruskan pendidikan ke ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi bahkan ke ibu kota negara. Hal yang sama terjadi gerak penduduk dari desa ke kota, baik bersifat sirkuler maupun melaju ke perkotaan, baik untuk kepentingan bekerja atau berbelanja.

Pada sepuluh tahun terakhir, serangan lalat buah telah mengguncangkan usaha petani jeruk. Petani Karo menyebutnya dengan *cit-cit*, yang menyerang jeruk saat menuju matang. Serangannya merata pada seluruh tanaman yang telah berbuah dan biasanya buah yang telah ditusuk akan menguning dan rontok. Akibatnya, harapan yang telah mekar saat melihat pertumbuhan vegetatif yang baik, serta tanaman yang mengeluarkan bunga dan calon-calon buah, harus rontok menjelang matang. Kejadian ini membuat guncangan-guncangan psikologis yang sangat mengecewakan. Petani terkejut saat kalkulasi-kalkulasi keuntungan kandas menjelang hasil bisa dipetik dan dijual. Pasca-rontok, dengan beragam kemampuan yang ada, petani mencoba merawat kembali tanaman jeruknya dan berusaha mengatasi serangan lalat buah dengan introduksi teknologi kelambu. Ada petani yang memagari seluruh lahan pertanaman dengan jaring

setinggi 3–4 meter agar serangan lalat buah terhambat dan terjerat di jaring kelambu. Teknologi ini cukup mahal, dengan luasan lahan 0,4 ha memerlukan biaya pemasangan jaring kelambu sekitar 20 juta rupiah. Namun, kegagalan panen terus berulang membuat banyak petani kehabisan modal untuk memelihara tanaman. Akhirnya, kasus berulang ini membuat terkurasnya tabungan dan mendorong petani melepas aset yang telah dikumpulkan bertahap demi mempertahankan usaha tani jeruk.

Awalnya, banyak petani yang memandang kejadian ini ibarat penjudi yang pernah menang berulang kali saat bermain di meja judi, kini memasuki masa-masa kekalahan, sehingga masih terus berusaha mempertahankan usaha tani dengan mengusahakan modal, baik pinjam atau menjual aset. Kalkulasi petani tentang manisnya usaha tani jeruk terus menerus gugur, dan akhirnya mengancam aktivitas dapur serta memberi trauma tersendiri. Spekulasi usaha tani berbiaya tinggi menciutkan sebagian besar keluarga petani.

Secara kuantitatif, dinamika pertanian jeruk di Karo bisa dilihat dari luasan lahan panen dan produksi jeruk yang dihasilkan. Wawancara data emik ini menemukan bahwa terjadi penurunan jumlah petani yang menanam jeruk sampai 70%. Setidaknya, Saptana et al. (2014) mencatat terjadi penurunan produksi jeruk sekitar 6–7 persen per tahun dan penurunan luas tanaman sekitar 9.000 ha dari 14.000 hektar selama periode 2008–2013, akibat adanya serangan lalat buah, dan sampai saat ini belum mendapatkan solusi pengendaliannya.

Upaya pemerintah membantu petani memberi solusi mengatasi hama lalat buah dengan beberapa introduksi teknologi maupun kebijakan, di antaranya sebagai berikut.

1. Membuat perangkat lalat buah yang sederhana dengan menggunakan botol air mineral/wadah bekas air minum yang lehernya berbentuk kerucut. Bagian tabung yang berbentuk kerucut dipotong, kemudian dipasang kembali secara terbalik, bagian mulut tabung menghadap ke dalam tabung kemudian bagian sambungan direkatkan dengan lem/selotip. Bahan perangkat dipasang pada medium kapas yang dipilin sampai sebesar ibu jari kemudian

diikat dengan kawat kecil sedemikian rupa sehingga menggantung pada bagian tengah tabung perangkap. Bahan atraktan diteteskan pada kapas sampai basah lalu digantungkan pada cabang atau ranting tanaman di bagian tajuk pohon. Pemasangan perangkap dilakukan sejak buah muda (umur 1,5 bulan) sampai buah panen. Pemberian atraktan diulang setiap satu bulan.

2. Pemerintah melalui PPL menganjurkan penyemprotan hama tanaman jeruk secara serentak dalam satu kawasan. Anjuran ini sulit diterima petani dengan pertimbangan: perbedaan umur buah, perbedaan waktu pemilikan uang untuk membeli saprodi, perbedaan waktu untuk memasarkan hasil, dan lain-lain.
3. Menganjurkan pemusnahan tanaman jeruk dan menukarnya dengan tanaman lain agar untuk sementara waktu rantai hama dapat diputuskan. Bagi petani jeruk di Karo, teknik pemutusan rantai hama dengan pemusnahan tanaman bukan solusi yang diharapkan, mengingat besarnya modal yang sudah diinvestasikan. Akhirnya, tanpa saran atau perintah dari petugas, dengan sendirinya petani mengalihkan komoditas yang ditanam ke tanaman kopi atau tanaman semusim. Hanya sebagian kecil petani yang masih terus bertahan walaupun kerugian yang ditimbulkan cukup besar, dengan kata lain usaha tani jeruk di Karo menjadi usaha tani yang sangat berisiko.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Tanah Leluhur

Adalah dua kisah menarik tentang jatuh bangunnya perjalanan keluarga petani jeruk sebagai representasi dari dramatisnya perjerukan di Kabupaten Karo. Kisah tersebut adalah perjuangan GM, petani jeruk di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tiga Panah, dan KT yang tinggal dan berusaha tani di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte.

1. Kisah GM Petani Jeruk

GM adalah petani yang sudah memiliki pengalaman bertani jeruk sejak tahun 1998 atau sekitar 25 tahun. Tanaman jeruk sudah mulai

berbuah saat usia tiga tahun dan berbuah merata setelah berumur empat tahun. Jeruk lebih cepat berbuah jika di sela pohon ditanami tanaman muda (sayuran) sehingga pada satu lahan bisa memberi hasil lebih dari satu komoditas. Pemupukan yang cukup dan penyemprotan dua minggu sekali sudah aman bagi pertumbuhan jeruk. Keterlambatan penyemprotan 1–3 hari tidak menyebabkan risiko yang berarti bagi produksi jeruk. Berdasarkan pengalamannya, pada saat panen raya, tanaman jeruk bisa berproduksi 100–180 kg per pohon. Oleh karena itu, jeruk memberi keuntungan besar bagi petani yang memungkinkan petani membeli berbagai aset bergerak maupun tidak bergerak saat panen. Pada masa kejayaan jeruk, GM sempat membeli lahan, mobil, motor, dan perbaikan rumah. Namun, serangan lalat buah telah membuat semuanya berubah. Pemeliharaan tanaman jeruk harus ditingkatkan dengan menyemprot sekali seminggu dan secara intensif memasang perangkat, baik jaring kelambu dan bola-bola serta mengganti bola-bola setiap tiga minggu. Petani juga setiap hari wajib membuang buah jeruk yang rontok karena serangan lalat buah dan memasukkannya ke dalam plastik yang tertutup rapat.

Pestisida yang tersedia di pasar saat ini mampu membunuh hama jeruk berupa ulat, kutu babi, jamur merah, maupun layu daun, tetapi sejauh ini belum mampu membasmi hama lalat buah. Oleh karena itu, bertahan usaha tani jeruk didukung kerja sama dengan istri dan anggota keluarga lain agar secara intensif dan disiplin melakukan perawatan terhadap tanaman jeruk. Saat ini diperlukan modal yang cukup besar untuk bisa meneruskan usaha jeruk. Aneka usaha tani pada beberapa lahan yang ada, saling dukung mendukung atas komoditas dan antarlahan membuat jeruk masih dirasakan menguntungkan. Sebagai salah satu dari sedikit petani yang masih bertahan menanam jeruk di desanya, GM mengaku sempat menjual beberapa aset berupa mobil dan perhiasan untuk keberlanjutan tanaman jeruknya. Secara gamblang responden menuturkan bahwa usaha tani jeruk saat ini tidak menguntungkan seperti masa lalu, tetapi jika ditekuni, dirawat dengan baik, dan dicukupi kebutuhan input pemeliharannya, usaha tani jeruk masih menguntungkan. Kunci utama adalah rajin dan

disiplin, kreatif mendapatkan modal operasional yang dilakukan melalui usaha tani tumpang sari di lahan jeruk, dan hasil usaha tani sayuran pada persil lahan pertanian lainnya. Hitungan detail input-output dan keterlibatan semua anggota keluarga untuk menangani usaha tani jeruk merupakan alasan responden memutuskan untuk meneruskan usaha jeruk. Petani tidak terbiasa mencatat proses usaha taninya sehingga sulit mengetahui struktur ongkos yang memastikan usaha tani jeruk masih menguntungkan. Secara operasional dilakukan silang saling modal.

2. Kisah KT, Guru yang menjadi Petani

KT seorang guru yang menekuni pertanian setelah pulang bekerja. Dibantu istri yang sepenuh waktu bekerja sebagai petani. Menggarap dua lahan pertanian berupa lahan kering yang terletak sekitar satu kilometer dari rumah. Letak kedua lahan berdekatan, hanya dipisahkan oleh 24 persil lahan lain. Satu lahan milik seluas 0,5 ha ditanami jagung dua kali setahun. Seluruh pinggiran lahan ditanami kopi yang hasilnya bisa dipanen sepanjang tahun. Lahan lain dengan luas yang sama adalah lahan sewa per-10 tahunan, pemiliknya orang setempat yang tinggal di Medan. Lahan tersebut ditanami jeruk dengan jarak 3x4 meter. Di sela antarbaris ditanami terung ungu yang bisa dipanen gilir sepanjang tahun dan hasilnya berfungsi menjadi tambahan modal pembelian input tanaman jeruk.

Lahan di sewa, dalam kondisi sudah ditanami jeruk. Semula kebun ini dikelola oleh pemiliknya yang secara rutin setiap minggu datang dari Medan. Sejak jeruk mendapat serangan lalat buah, hasil jeruk menurun, akhirnya pemilik lahan menawarkan lahan kebunnya untuk disewakan dengan harga di bawah pasar. KT dan istri sepakat menyewa dan mengelola tanaman jeruk tersebut secara intensif. Pasangan suami istri ini bertekad melakukan perawatan dengan rutin menyemprot tanaman jeruk minimal dua minggu sekali. Secara cermat memetik buah yang sudah diisap lalat buah dan membuangnya jauh dari lahan agar tidak menyerang buah jeruk yang lain.

KT memperbanyak pemupukan tanaman jeruk dengan penggunaan pupuk organik. Biaya usaha tani jeruk sebesar Rp500.000 per minggu untuk penyemprotan dan Rp1.000.000 per bulan untuk pemupukan, atau total sekitar Rp3.000.000 per bulan. Biaya ini meningkat pasca-panen raya. Perlakuan seperti dimaksud, petani tidak memerlukan biaya pupuk dan obat untuk tanaman terung.

Untuk menekan biaya tenaga kerja, suami-istri ini hampir setiap hari ke kebun melakukan pemeliharaan berupa pembersihan lahan, memangkas pohon jeruk, membersihkan buah jeruk yang sudah terinfeksi lalat buah, serta mengatur perangkap berupa *es-esan* cairan warna-warni dan susunan jeruk busuk sebagai jebakan untuk lalat buah. Sejauh ini dalam perhitungan KT, usaha tani jeruk masih menguntungkan, tetapi tidak sebesar saat sebelum ada serangan hama lalat buah. Hal ini dibuktikan dengan perpanjangan kontrak sepuluh tahun kedua dan penambahan aset alat-alat mesin pertanian untuk menunjang keberhasilan usaha tani yang dikelola.

KT bersemangat menggerakkan petani di kelompoknya untuk melaksanakan sistem usaha tani yang lebih modern. Meskipun sampai hari ini belum ditemukan obat-obatan atau cara penanggulangan yang ampuh mengatasi lalat buah, tetapi pemeliharaan yang intensif dan disiplin masih membuka peluang usaha tani jeruk yang menguntungkan. Sensus Pertanian dinilai merupakan momen pendataan yang penting untuk menangkap transformasi pertanian yang terjadi di masyarakat dibanding 10 tahun lalu.

Berdasarkan analisis terhadap kedua kasus petani jeruk yang masih bertahan dan mendapat untung dari usaha taninya di era serangan lalat buah, ketika sekitar 60–70% petani jeruk telah menghentikan dan mengganti komoditas jeruk dengan komoditas lain, setidaknya ada 3 poin kunci keberhasilan yang dapat dipelajari.

- 1) Agar dapat bertahan dalam bisnis pertanian jeruk, petani perlu meningkatkan disiplin dan intensitas perawatan tanaman.
- 2) Memperkuat modal usaha tani jeruk dengan sistem pertanian tumpang sari sehingga ada saling silang dukung modal antarlahan maupun antarkomoditas dapat dilakukan.

- 3) Produksi jeruk medan yang menurun drastis, secara ekonomi menempatkan harga jeruk stabil tinggi di pasar. Hal ini menjadi orientasi usaha tani yang menggairahkan untuk bertahan dan menekuni usaha tani jeruk.

J. Penutup: Kilas Balik Pendataan dalam Sensus Pertanian

Sensus Pertanian yang dilaksanakan secara berkala di Kabupaten Karo dengan petugas yang andal dan metodologi yang sah sangat membantu menggambarkan potret pertanian hortikultura khususnya dinamika komoditas jeruk yang dikenal sebagai jeruk berastagi atau jeruk medan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada selang waktu sensus menunjukkan dinamika pemilikan dan penguasaan lahan pertanian, persoalan ketenagakerjaan, peralihan komoditas unggulan, dan persoalan modal. Variabel ini sekaligus memperlihatkan identitas usaha dengan kontribusinya pada pendapatan petani. Namun, persoalan agribisnis jeruk berpengaruh terhadap pendapatan, kesejahteraan, dan gear budaya tani masyarakat Karo dalam jatuh bangunnya usaha tani komoditas ini. Secara lokal terpuruknya usaha tani jeruk berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan kejayaan *icon* Karo dengan jeruk berastagi atau jeruk medan. Jawaban lebih jauh dari angka-angka statistik yang diperoleh menjadi lebih jelas dengan narasi emik yang digali berdasarkan pendalaman makna angka-angka statistik yang disampaikan secara rasional menurut petani. Pendalaman penggalian informasi menunjukkan masih ada fakta serta potensial petani untuk mengembangkan usaha tani jeruk kembali.

Daftar Pustaka

- Ashari, M. R. (2018). *Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap keberhasilan usaha pada petani jeruk di Kabupaten Karo, Kecamatan Berastagi* [Skripsi]. Repositori Institusi USU. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1846>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sumatera Utara dalam angka*. <https://sumut.bps.go.id/publication/2023/02/28/ee319bd16e8eae7599bfaa7/provinsi-sumatera-utara-dalam-angka-2023.html>

- Bangun, T. (1986). *Manusia Batak Karo*. Inti Idayu Press.
- Irawan, B. (2005). Konversi lahan sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan factor determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(1), 1–18. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1431>
- Jelajah News. (2023). *Festival buah dan bunga Tanah Karo 2023 momentum tingkatkan potensi wisata*. JelajahNews.Id. <https://www.jelajahnews.id/festival-buah-dan-bunga-tanah-karo-2023-momentum-tingkatkan-potensi-wisata/>
- Karo-karo, R., & Karo-karo, I. M. (2020). *Sukses budidaya jeruk Medan dengan pupuk dan pestisida organic*. Universitas Telkom.
- Nurpita, A., Widhastuti, L., & Andjani, I. Y. (2018). Dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan rumah tangga tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 103–110.
- Pemerintah Kabupaten Karo. (2023). *Peta Kabupaten Karo*. <https://karokab.go.id/id/peta-daerah>
- Ridwan, I. R. (2009). Faktor-faktor penyebab dan dampak konversi lahan pertanian. *Jurnal Geografi GEA*, 9(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i2.2448.g1673>
- Saptana, Wahyuni, & Pasaribu, M. (2014). Strategi percepatan transformasi kelembagaan gapoktan dan lembaga keuangan mikro agribisnis dalam memperkuat ekonomi di perdesaan. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 10(1), 60–70. <https://doi.org/10.17358/jma.10.1.60-70>
- Sari, W. P., Anindya, D. A., & Laili, I. (2021). Efisiensi saluran pemasaran jeruk di Desa Lau Riman Kabupaten Tanah Karo. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/1006/1011>
- Simanjuntak, B. A. (2015). *Arti dan fungsi tanah bagi masyarakat Toba, Karo dan Simalungun* (Edisi Pembaruan). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sitepu, R. A., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi ahli waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya. *Jurnal Novum*, 5(3), 120–128.
- Tarigan, H., Suhaeti, R.N., Sunarja, R.R., Darwis, V., & Hastuti, S. (2017). *Analisis tipologi dan penguatan kelembagaan petani kecil dalam rangka transformasi menuju petani komersial*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab IV

Hortikultura untuk Kemandirian Pangan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau

Abdul Mutholib

Secara sederhana, pengertian hortikultura adalah budi daya tanaman kebun dengan teknik yang modern dan meliputi beberapa cakupan kerja. Budi daya hortikultura biasanya dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Di samping itu, jenis tanamannya juga memiliki peluang atau potensi pasar cukup besar sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi yang bersifat komersial. Selain untuk kebutuhan produksi komersial, tidak sedikit masyarakat yang melakukan budi daya komoditas hortikultura dalam skala lebih kecil, misalnya skala rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk membudidayakan tanaman berupa sayuran dan buah yang nantinya dapat dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, hortikultura memberikan manfaat lebih bagi pembudidayanya.

A. Mutholib

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: abdu072@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Mutholib, A. (2025). Hortikultura untuk kemandirian pangan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.

Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 97–124). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c939

E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Kabupaten Bintan merupakan sentra perkebunan dan sayur-mayur dengan komoditas yang beragam serta memiliki keunggulan masing-masing. Pada Sensus Pertanian 2023, PR KSDK, OR TKPEKM, BRIN bermitra dengan BPS yang menyupervisi beberapa kabupaten di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Bintan. Tujuh subsektor yang tercakup dalam Sensus Pertanian 2023 adalah industri tanaman pangan, ragam jenis hortikultura, industri perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, produk kehutanan, dan usaha jasa pertanian.

A. Sensus Pertanian di Kabupaten Bintan

Sensus Pertanian 2023 dilaksanakan selama dua bulan, dari bulan Juni 2023 hingga akhir Juli 2023. Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bintan melibatkan 110 orang tenaga lapangan atau pencacah yang berasal dari penduduk setempat dan tenaga organik BPS Kabupaten Bintan. Tenaga lapangan yang tersebar luas di kecamatan Kabupaten Bintan merupakan petugas yang berpengalaman dan pernah terlibat dalam pelbagai kegiatan sensus sebelumnya.

Untuk menginformasikan Sensus Pertanian 2023 kepada masyarakat, dilaksanakan sosialisasi melalui media elektronik RRI Kota Tanjung Pinang dan RRI Kabupaten Bintan pada tanggal 30 Mei 2023. Sosialisasi ini merupakan bagian untuk membumikan Sensus Pertanian 2023 kepada masyarakat sehingga mereka dapat terbuka dan menerima kedatangan petugas pencacahan pada saat pendataan.

Selain itu, diadakan juga pembekalan kepada tenaga pencacah. Hal ini dilakukan melalui pelatihan untuk penyegaran pengetahuan dan tata cara pelaksanaan wawancara kepada responden walaupun sebagian besar sudah memiliki pengalaman pada sensus sebelumnya. Pelatihan tersebut diselenggarakan di Hotel Aston, Tanjung Pinang. Kegiatannya terdiri atas dua gelombang (gelombang I tanggal 24–26 Mei 2023 dan gelombang II tanggal 29–31 Mei 2023).

Sensus Pertanian, sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, mengamanatkan untuk produksi data pertanian sebagai landasan

dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian. Pelaksanaannya dilakukan secara *door-to-door* di satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil, yakni rukun tetangga (RT). SLS untuk rumah tangga tani yang banyak adalah SLS Konsentrasi, sedangkan SLS Nonkonsentrasi didata melalui metode *snow ball* atau mencari informasi di lingkungan setempat, yang dalam hal ini banyak melibatkan kelompok masyarakat dari kaum wanita.

Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Kabupaten Bintan didahului dengan rapat koordinasi di tingkat provinsi. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan rencana, target capaian, koordinasi lapangan, variabel, dan jenis komoditas yang akan disensus. Selain itu, rapat tersebut juga merinci lokasi dan petugas lapangan.

Kabupaten Bintan merupakan sentra perkebunan dan sayur-mayur. Komoditas hasil perkebunan di Kabupaten Bintan menjadi sektor unggulan untuk mendukung perekonomian daerah. Untuk mendukung lancarnya mobilitas distribusi hasil perkebunan, penataan dan jaringan infrastruktur jalan merupakan hal yang sangat penting. Jaringan jalan, baik jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan desa, sudah terintegrasi dengan baik untuk mobilisasi masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama jaringan antardesa dalam mendukung konektivitas. Dukungan infrastruktur seperti ruas jalan Tanjung Uban Lintas Barat sepanjang 60 km yang membentang hingga pusat Tanjung Bintan menjadikan infrastruktur jalan sebagai pengintegrasian jalan–jalan desa dan kecamatan. Integrasi infrastruktur jalan menjadi urat nadi ekonomi masyarakat dalam distribusi komoditas dari industri perkebunan untuk meningkatkan intensitas ekspor.

Kegiatan supervisi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bintan dilakukan dengan kunjungan ke beberapa lokasi sentra perkebunan dan tanaman sayur-mayur, seperti yang ada di Kecamatan Teluk Lobam dan Kecamatan Toapaya. Kunjungan ke lokasi sangat mudah, lancar, dan nyaman karena melewati jalan desa dengan kondisi yang baik. Selain itu, suasana dan keramahan penduduk dengan pemandangan hijau pepohonan dan bangunan permukiman kokoh yang tersebar

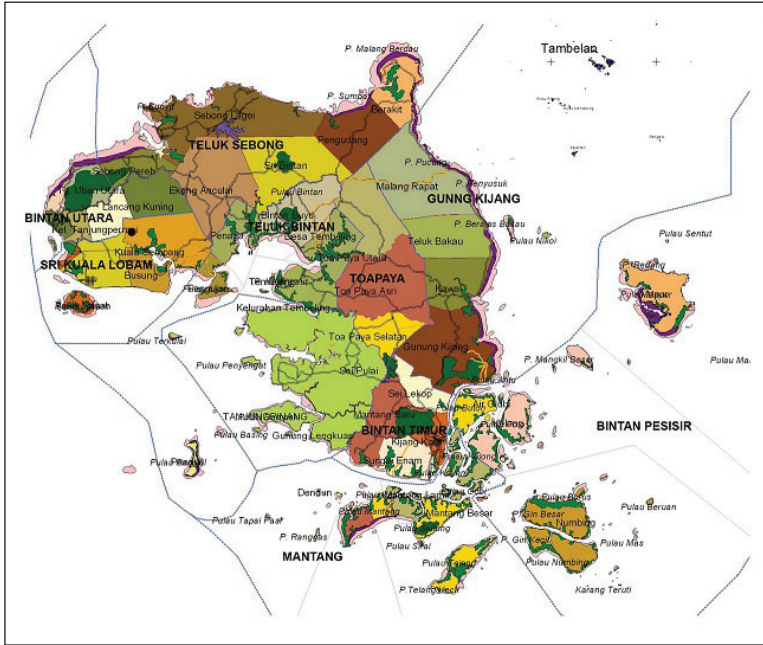
di beberapa desa menggambarkan perekonomian di desa yang mulai menggeliat sejak penyebaran wabah virus Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa daerah, tak kecuali di pedesaan. Kerja sama yang baik dari masyarakat, terutama responden dalam sensus ini, tampak pada kemudahan para petugas lapangan dalam menggali informasi sehingga semua berjalan dengan baik dan diharapkan memperoleh data yang akurat dari responden.

Walaupun demikian, masih ada beberapa hal yang mungkin layak menjadi perhatian, seperti yang dialami oleh Bapak Supriadi, salah satu petani di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya. Di lokasi perkebunan cabai miliknya, tampak perkebunan cabai yang tumbuh kurang optimal karena tingginya biaya produksi yang tidak didukung dengan harga penjualan. Tingginya biaya produksi salah satunya disebabkan oleh penggunaan pompa air yang ditenagai bahan bakar diesel untuk memenuhi kebutuhan debit air lahan perkebunan. Hal ini berarti ada biaya tambahan yang cukup tinggi, apalagi ketika terjadi kelangkaan BBM.

Selain itu, banyak pesaing yang menjual komoditas dengan harga yang lebih murah dan volume penjualan yang lebih banyak. Di pasar Kabupaten Bintan, terutama di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Uban, banyak berdatangan para pedagang dari luar Bintan, misalnya dari Sumatra Utara. Para pedagang ini mematok harga lebih rendah dari harga jual petani lokal. Akibatnya, para petani lokal tidak mampu untuk bersaing harga, apalagi untuk menutupi biaya produksinya. Pada akhirnya, mereka merugi sehingga banyak perkebunan, terutama cabai, dibiarkan tanpa diurus.

B. Bentang Alam Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Bintan dengan luas wilayah 74.200,94 km² terdiri atas daratan seluas 2.418,79 km² dan lautan seluas 71.782 km². Luas daratan di Kabupaten Bintan dengan lahan yang subur memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat baik. Sektor pertanian dan perkebunan berkontribusi cukup baik terhadap perekonomian Kabupaten Bintan, yaitu sebesar 7,12% terhadap PDRB pada tahun



Sumber: Pemerintah Kabupaten Bintan (2022)

Gambar 4.1 Bentang Daratan Kabupaten Bintan

2021 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 6,9% (BPS Kabupaten Bintan, 2023). Bentang daratan Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Produk unggulan perkebunan di Kabupaten Bintan adalah salak, durian, mangga, pisang, nanas, dan pepaya. Saat ini, produksi buah-buahan mencapai 29 hektar atau 31.900 batang yang digarap oleh 145 petani dengan produksi bulanan mencapai 1 ton per hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2023a).

Selain buah-buahan, produksi sayuran di Kabupaten Bintan juga cukup diandalkan untuk komoditas ekspor. Dengan kapasitas produksi 20 hingga 25 ton per hari, kawasan perkebunan sayur saat ini masih didominasi Kecamatan Toapaya serta sebagian di Gunung Kijang dan Teluk Sebong. Sebagai daerah dengan tanah yang subur,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapat dikatakan bahwa pengembangan sektor pertanian cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sebelumnya, Bintan merupakan daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Namun, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam hal pelaksanaan administrasi dan korespondensi, nama Kabupaten Kepulauan Riau berubah menjadi Kabupaten Bintan.

Selain di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan juga memiliki wilayah lain yang unggul dalam sektor pertanian dan perkebunan, serta memiliki potensi sumber daya alam, salah satunya ialah Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Lobam. Kelurahan tersebut merupakan daerah produksi hortikultura, terutama jenis tanaman sayur-mayur, seperti daun selada, sawi, dan ketimun. Namun, sebagian besar merupakan pertanian skala kecil dengan sistem hidroponik yang dilakukan sebagai usaha sampingan untuk kebutuhan rumah tangga. Rata-rata luas lahan di daerah tersebut adalah 300 meter persegi, dan umumnya terletak di halaman rumah masyarakat.

Mengingat manfaat tanaman hortikultura dalam kehidupan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari, perlu penyediaan data yang akurat guna memantau kemajuan pengelolaan tanaman tersebut, baik produksi, jumlah, dan luas lahan, maupun kapasitas produksinya. Data yang akurat diharapkan dapat menjadikan dasar untuk dilakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar dapat memenuhi peningkatan permintaan pasar.

Perbaikan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik pembudidayaan, pengelolaan, perawatan lahan, dan peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pengenalan teknologi pertanian maupun strategi dan teknik pemasaran, dengan penerapan kebijakan yang diharapkan akan memotivasi dan meningkatkan kinerja petani.

C. Hidroponik untuk Hortikultura

Metode penanaman dengan sistem hidroponik merupakan metode yang cukup populer di masyarakat, terutama di kota-kota besar yang

minim lahan. Alih-alih menggunakan tanah sebagai media tanam, sistem hidroponik memanfaatkan air dan pupuk cair untuk mengakali sempitnya lahan yang tersedia. Seiring dengan meningkatnya teknologi komunikasi, seperti telepon pintar dan internet, hidroponik berkembang menjadi hobi bagi masyarakat perkotaan.

Sebenarnya, bercocok tanam dengan sistem hidroponik bukan hanya sekadar hobi atau kegiatan untuk mengisi waktu luang, seperti yang digandrungi masyarakat di kota-kota besar. Jika ditekuni, kegiatan ini dapat menjadi peluang bisnis untuk menambah penghasilan. Budi daya penanaman sayur-mayur melalui sistem hidroponik sangat mudah dari segi perawatan dibandingkan pertanian konvensional yang menggunakan tanah sebagai media tanam. Selain tidak menggunakan tanah, air yang diperlukan tidak banyak. Waktu panen juga relatif cepat, kurang lebih hanya 40 hari saja sampai siap panen dan dipasarkan, sehingga siklus perputaran modal relatif kecil dan cepat.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Loba, telah menjadikan kegiatan penanaman hidroponik sebagai mata pencaharian untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dinpertan Pangan, 2022). Sebagian kaum prianya bekerja pada sektor industri dan perikanan. Di sana sudah terbentuk kelompok wanita tani (KWT) yang total anggotanya berjumlah 60 orang. Hal ini berdasarkan informasi dari Ibu Siti Zasiroh sebagai penyuluh pertanian Kecamatan Sri Kuala Lobam yang juga merupakan petani perkebunan sayur-mayur. Kami menemui beliau di sela-sela kunjungan Sensus Pertanian di Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan.

KWT yang ada dibagi menjadi dua kelompok, yaitu KWT Maju Bersama dan KWT Delima Merah; tiap KWT beranggotakan 30 orang. Selain budi daya sayur-mayur dengan sistem hidroponik, KWT ini juga bercocok tanam sayur-mayur lainnya, seperti timun, jagung, kacang panjang, dan sawi. Ibu Tri Lestari, seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak dan suami yang bekerja di perusahaan industri, merupakan salah seorang petani hidroponik yang sudah beberapa tahun menekuni penanaman sayur-mayur, khususnya daun selada

yang merupakan konsumsi masyarakat. Keunggulan bercocok tanam dengan sistem hidroponik adalah kemudahan mendapatkan bibit dan pupuk, serta kemudahan dalam pengelolaan pemasaran karena semua di lakukan secara daring (*online*). Selain itu, bercocok tanam dengan sistem hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas; Ibu Tri Lestari memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumahnya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dengan modal awal Rp5.000.000 (untuk bibit, pupuk, dan peralatan), hasil panen sayur-mayur skala rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Tri Lestari dapat membantu perekonomian keluarga dan membantu pendapatan suami dari hasil bekerja sebagai buruh pada perusahaan, serta untuk membantu biaya sekolah kedua putranya.

Saat ini, tanaman selada merupakan bagian dari jenis tanaman hortikultura yang hingga saat ini belum cukup dikenal dan terdaftar sebagai produksi komoditas sayur-mayur nasional. Tanaman selada



Foto: Abdul (2023)

Gambar 4.2 Tanaman Hidroponik di Teluk Lobam

belum termasuk dalam daftar komoditas utama, baik pada prioritas maupun komoditas utama jenis sayur-mayur. Padahal, tanaman jenis selada memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di Indonesia karena selada memiliki prospek dengan nilai ekonomi cukup cerah. Selada hidroponik merupakan jenis tanaman sayur-mayur yang saat ini mulai dikenal dan banyak berkembang di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan petani sayur-mayur konvensional. Bukan hanya mudah dalam perawatan, tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi yang cukup lumayan dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal sebagai produk ketahanan pangan yang dapat dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data bahwa panen dapat dilakukan 40 hari setelah tanam; dari lahan seluas 300 meter persegi dapat diperoleh sebanyak 84 kg dengan masa panen sebanyak 9 kali dalam setahun dan hasil produksinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Saat ini, pemenuhan kebutuhan lokal sayur-mayur masih didatangkan dari Batam dan daerah sekitarnya karena produksi lokal masih belum dapat memenuhi permintaan.

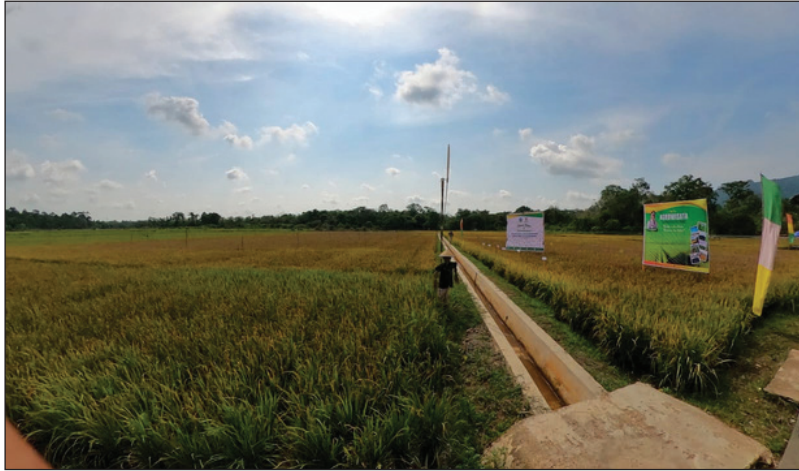
Sensus kemudian berpindah ke lokasi lain, yaitu Desa Teluk Sasah, RT 02/RW 02, Kecamatan Sri Kuala Lobam, untuk menemui Bapak Janter Simanjuntak pendatang dari Sumatra Utara. Bapak Janter dan istrinya mengelola perkebunan seluas kurang lebih 1.000 m² yang ditanami aneka tanaman, seperti gambas, kacang panjang, dan cabai. Tanah garapan tersebut merupakan milik perusahaan tanah darat yang berupa perkebunan dengan aneka macam tanaman dengan pola tanam secara bergantian. Untuk aneka macam tanaman, Bapak Janter mengeluarkan biaya Rp2.000.000 untuk pupuk organik dan racun hama, serta panen dilakukan 1,5 bulan setelah tanam. Pengolahan tanah pada perkebunan dilakukan melalui pencangkulan secara manual, tetapi untuk penyiraman sebagian besar dilakukan secara modern dengan menggunakan *sprinkler*. Sistem irigasi atau penyiraman dengan alat *sprinkler* dapat dipergunakan untuk penyiraman berbagai jenis tanaman buah-buahan dan sayuran untuk lahan dengan kondisi debit air dengan kapasitas rendah. Penyiraman dengan sistem

sprinkler dapat dilakukan antara 2–3 hari sekali per minggu, disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kelembapan tanah. Penggunaan *sprinkler* untuk menjaga produktivitas lahan agar petani masih tetap dapat melakukan penanaman walaupun pada kondisi iklim yang kurang mendukung (Sirait et al., 2022).

Kondisi keluarga ini serupa kondisi petani pada umumnya, yakni sebagian besar kegiatan pertanian dikelola oleh kaum wanita sebagai istri yang membantu perekonomian keluarga, sedangkan suami bekerja sebagai buruh di perusahaan. Secara ekonomi, penjualan dari hasil perkebunan, yang dilakukan melalui tengkulak, dapat dimanfaatkan sebesar 30% untuk biaya pendidikan.

Pada kunjungan hari ketiga bersama PIC dan petugas Pengawas Sensus Pertanian Kabupaten Bintan, kami hanya mendapatkan pemandangan areal persawahan dengan tanaman padi yang kurang subur. Selain itu, ada beberapa bekas bangunan kayu yang sudah tidak dimanfaatkan dengan kondisi yang tidak terurus. Padahal pada tahun 2018, area persawahan di Kelurahan Sri Bintan ditata rapi dan dibuat beberapa tempat wisata yang dinamai Agrowisata Persawahan Poyotomo. Tempat wisata ini menyajikan hamparan area persawahan, bangunan dengan gaya pendopo, dan olahan makanan dari hasil panen pertanian. Saat itu, area lahan baku persawahannya mencapai 67,5 hektare, dengan 25 hektare di antaranya menghasilkan padi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, 2023). Di samping itu, ada lokasi waduk pada area wisata yang difungsikan sebagai tempat rekreasi memancing. Di lokasi tersebut juga disediakan perahu yang bisa digunakan oleh pengunjung.

Saat ini, kondisi Agrowisata Persawahan Poyotomo sudah tidak terurus karena kurangnya perawatan dengan kondisi padi yang tidak subur dan banyak bangunan yang sudah lapuk. Begitu juga sarana wisata yang lainnya, hal ini karena kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan. Diharapkan pada masa mendatang, Agrowisata Persawahan Poyotomo dapat dibangun kembali karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus memperkenalkan produksi hasil pertanian berupa



Sumber: Milyawati (2021)

Gambar 4.3 Areal Persawahan Teluk Bintan

beras merek Padimas Bintang. Hal ini juga dapat meningkatkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (seperti dilihat pada Gambar 4.3).

Menelusuri jalan desa di Kecamatan Teluk Bintan, kita akan melihat pemandangan perkebunan durian di sepanjang jalan seperti yang dilihat pada Gambar 4.4. Terdapat beberapa pohon durian yang sudah produktif dengan umur tanaman yang bervariasi. Kecamatan Teluk Bintan merupakan sentra perkebunan durian. Menurut data statistik pada tahun 2021, produksi perkebunan durian Kecamatan Teluk Bintan mencapai 10.276 kuintal, yang merupakan penghasil terbesar kedua setelah Kecamatan Gunung Kijang. Kecamatan Teluk Bintan juga merupakan penghasil buah nanas di Kabupaten Bintan, dengan total produksi mencapai 18.500 kuintal pada tahun 2021. Dengan kondisi lahan perkebunan yang menyebar di beberapa kecamatan, Kabupaten Bintan menjadi sentra perkebunan dan sayur-mayur di Provinsi Kepulauan Riau, dengan setiap kecamatan memiliki keunggulan produksi hasil perkebunannya. Misalnya, Kecamatan Teluk Bintan unggul dengan perkebunan nanas dan durian,

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Abdul (2023)

Gambar 4.4 Areal Perkebunan Duren di Teluk Bintan

Kecamatan Bintan Utara unggul dengan perkebunan salak (produksi 27.150 kuintal pada tahun 2021), dan Kecamatan Gunung Kijang yang merupakan daerah penghasil durian terbesar di Kabupaten Bintan (produksi 13.730 kuintal pada tahun 2021).

D. Ragam Variabel Sensus Pertanian di Bintan

Sensus Pertanian 2023 dilaksanakan selama dua bulan, yaitu awal Juni 2023 sampai dengan akhir Juli 2023. Kegiatan sensus melibatkan 110 orang tenaga lapangan atau pencacah yang berasal dari penduduk setempat dan tenaga organik dari kantor BPS untuk Kabupaten Bintan.

Sebelum pelaksanaan sensus, dilakukan sosialisasi melalui media elektronik RRI Kota Tanjung Pinang dan RRI Kabupaten Bintan pada tanggal 30 Mei 2023. Pembekalan pada tenaga pencacah dilakukan dengan pelatihan untuk memberi pengetahuan dan tata cara pelaksanaan yang baik pada waktu melakukan wawancara pada responden. Kampanye dan sosialisasi mengenai variabel-variabel pokok yang akan ditanyakan petugas sensus sebagai bentuk kemudahan pengumpulan data menjadi sangat penting.

Variabel pokok merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat produksi pertanian di suatu daerah atau wilayah. Variabel-variabel pokok inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya sensus pertanian mencatat data secara akurat. Terkait dengan variabel pokok, sejak tahun 1963, Sensus Pertanian yang diselenggarakan secara berkala setiap 10 tahun menggali informasi yang hampir sama, yaitu mencakup variabel profil rumah tangga petani dan kegiatan usaha tani. Pada Sensus Pertanian 2023, variabel pokok sebagai penggalian informasi meliputi ragam dan jenis tanaman, luas areal lahan, teknik pembudidayaan, dan gambaran tentang profil petani yang berbasis nama dan alamat.

Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bintan meliputi tujuh subsektor pertanian dan perkebunan, di antaranya industri tanaman pangan, tanaman hortikultura, industri perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, industri kehutanan, dan bidang jasa pertanian. Keberagaman dari subsektor pertanian dan perkebunan bergantung pada kondisi kesuburan tanahnya walaupun pada umumnya kondisi lahan pertanian dan perkebunan sangat baik untuk aneka ragam tanaman. Masing-masing desa memiliki keunggulan sendiri untuk jenis tanaman, ada desa yang merupakan sentra untuk perkebunan dan ada desa yang menjadi sentra tanaman hortikultura, seperti Teluk Bintan yang unggul dengan perkebunan nanas yang mencapai produksi 18.500 kuintal pada tahun 2021, sedangkan untuk perkebunan durian produksi terbanyak ada di Kecamatan Gunung Kijang dengan produksi 13.730 kuintal, dan Kecamatan Teluk Bintan dengan produksi 10.275 kuintal (BPS Kabupaten Bintan, 2023a).

E. Potret Jejak Langkah PPL Dan PML di Kabupaten Bintan

Petugas Pendataan Lapangan (PPL) atau biasa disebut petugas pencacah dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) melaksanakan Sensus Pertanian 2023 pada awal Juni hingga akhir Juli 2023 di beberapa wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bintan. Di Kabupaten Bintan, pelaksanaan kegiatan sensus melibatkan

110 orang tenaga lapangan atau pencacah yang berasal dari penduduk setempat dan tenaga organik dari kantor BPS yang telah berpengalaman pada sensus sebelumnya dan menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan. Pembekalan pada tenaga pencacah dilakukan dengan pelatihan selama tiga hari di Hotel Aston Tanjung Pinang untuk memberi pengetahuan dan tata cara pelaksanaan yang baik pada waktu melakukan wawancara pada responden walaupun sebagian besar sudah memiliki pengalaman pada sensus sebelumnya. Petugas di lapangan yang terlibat dalam pengumpulan dan pencacahan selama periode 1 Juni hingga 30 Juli 2023 diberikan jaminan berupa jaminan keamanan dan jaminan kesehatan; jaminan kesehatan diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk bisa bersinergi mengamankan proses jalannya Sensus Pertanian 2023.

Petugas Pendataan Lapangan (PML) untuk Kecamatan Sri Kuala Lobam banyak melibatkan kaum perempuan, yang sebagian merupakan anggota Himpunan Wanita Tani dari desa setempat sehingga sangat memudahkan komunikasi pada para petani yang merupakan anggota masyarakat setempat. Sebagian PML adalah wanita dengan usia di atas 50 tahun, tetapi gigih dan semangat untuk membangun desa dan melaksanakan program pemerintah serta menggali informasi seputar pertanian di daerah tersebut. Petugas merasa kelelahan walaupun rumah penduduk tersebar dengan jarak yang relatif jauh. Kepala BPS Kabupaten Bintan senantiasa memberi motivasi kepada para PML, bahkan beliau ikut mendampingi pada kunjungan supervisi di beberapa desa di Kecamatan Sri Kuala Lobam.

F. Petani di Tengah Impitan Luas Lahan

Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan persawahan yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, dengan didukung oleh kondisi cuaca panas dan hujan serta iklim tropis sehingga membuat tanah di Indonesia sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman. Akan tetapi, dengan peluang yang dimiliki, negara ini masih belum memaksimalkan kesempatan keuntungan di sektor pertanian karena

pada dasarnya banyak stigma negatif yang timbul dan beranggapan bahwa kehidupan sebagai seorang petani selalu menghadapi masalah pertanian.

Jika dilihat kontribusi hasil pertanian terhadap PDRB, khususnya di Kabupaten Bintan, petani sebagai penghasil devisa berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum, Kabupaten Bintan, berdasarkan data statistik pertanian pada tahun 2022, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan mencapai 1.654.688,20 juta atau 7,1% dari PDRB Kabupaten Bintan sebesar 22.995.777,49 pada tahun 2022 .

Kecamatan yang memberikan kontribusi PDRB paling besar terhadap PDRB Kabupaten Bintan adalah Kecamatan Sri Kuala Lobam dengan rata-rata kontribusi sekitar 40%. Kemudian, disusul oleh Kecamatan Bintan Timur, Teluk Bintan Sebung, Bintan Utara, Gunung Kijang, Bintan Pesisir, Teluk Bintan, Mantang, Tambelan, dan Toapaya.

Sebagian besar sentra perkebunan di Kecamatan Sri Koala Lobam masuk dalam kategori pertanian skala rumah tangga atau perkebunan rakyat berupa subsektor tanaman pangan sayur-mayur. Perkebunan rakyat yang merupakan perkebunan yang diolah rakyat atau perkebunan yang dikelompokkan dalam usaha kecil dan merupakan usaha rumah tangga (Silaban & Saharuddin, 2015).

Hal yang menjadi masalah cukup besar bagi petani adalah sistem penjualan yang terkadang merugikan petani, tetapi menguntungkan para distributor. Padahal, hampir sebagian besar hasil pertanian dirawat dan dipanen oleh petani dengan berbagai risikonya seperti wabah penyakit tanaman, cuaca, dan masih banyak lagi.

Hal ini yang semakin mendorong banyak orang untuk tidak memilih pekerjaan sebagai petani. Oleh sebab itu, perlu adanya pemotongan rantai sistem penjualan yang menjatuhkan harga panen. Mulai dengan membelinya dengan harga yang wajar dan menjualnya dengan total keuntungan yang wajar pula. Jadi, tidak ada lagi pihak yang akan dirugikan karena seluruhnya memiliki bagian keuntungan yang hampir setara.

Kecilnya pendapatan yang diterima petani tetapi diikuti dengan peningkatan biaya hidup sehari-hari membuat banyak petani lebih memilih untuk menjual sawahnya. Umumnya lahan sawah yang dijual akan dialihfungsikan menjadi bangunan yang bisa berupa rumah, ruko, gedung, atau bangunan lainnya.

Produktivitas yang tidak terlalu besar dengan lahan yang semakin lama semakin sempit menyebabkan perekonomian para pelaku usaha tani semakin menipis. Hal ini tentunya memengaruhi jumlah panen yang didapatkan sebab jika umumnya petani dapat menghasilkan produk panennya dalam jumlah besar, menyempitnya lahan membuat hasil panen menjadi lebih sedikit.

Lain halnya dengan Bapak Supriadi, salah satu petani di Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya. Pada lokasi perkebunan cabai milik Bapak Supriadi, tampak perkebunan cabai seluas 1 ha yang sudah beberapa kali panen. Harga pasaran cabai memang merupakan salah satu kendala untuk kelangsungan hidup pertanian. Bapak Supriadi merupakan salah satu petani sukses di Kabupaten Bintan karena beliau tidak pernah mau terpengaruh fluktuasi harga. Untuk menanggulangi kerugian di usaha penanaman cabai, Bapak Supriadi juga menanam pepaya dan pisang. Bapak Supriadi berprinsip bahwa petani harus punya simpanan berupa tanaman jangka pendek yang dapat menghasilkan uang pada saat tertentu sebagai simpanan, contohnya pisang selalu berbuah dan hasilnya bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu pada saat-saat pertanian merugi atau menunggu hasil panen, begitu juga pepaya yang terus berbuah tanpa ada musim.

Pada masa tertentu harga cabai sangat murah sehingga banyak para petani kecil yang enggan untuk merawat dan memupuk tanaman karena mengeluarkan biaya tidak sedikit. Fenomena ini terjadi karena persaingan harga cabai di pasaran yang tidak sesuai dengan biaya produksi sehingga para petani merugi. Seperti diketahui bahwa pelaku pasar di Kabupaten Bintan, terutama untuk pintu masuk Pelabuhan Tanjung Uban, banyak berdatangan para pedagang dari luar Bintan, seperti dari Sumatra Utara. Para pedagang ini mematok harga lebih rendah dari harga jual petani lokal sehingga para petani

lokal tidak mampu untuk bersaing harga, apalagi untuk menutupi biaya produksinya saja sehingga akhirnya banyak perkebunan cabai dibiarkan tanpa diurus.

Peran petani dalam proses pembangunan sangat penting dalam hal pengadaan pangan, tetapi dalam peranannya, petani banyak sekali mengalami hambatan, seperti kesulitan untuk mengembangkan usaha karena permodalan dan kesulitan berinteraksi dengan pasar karena kuatnya jaringan mata rantai perdagangan sampai ke pelosok desa. Dalam hal ini, diperlukan pengetahuan dan strategi untuk mengelola hasil perkebunan dan pengetahuan tentang hal-hal yang dapat dikerjakan setelah panen, yaitu penjualan hasil pertanian.

Fungsi dan peran manajemen dalam suatu struktur kegiatan atau pekerjaan merupakan suatu hal yang erat bila dikaitkan dengan masalah efisiensi. Artinya, walaupun produksi lahan cukup baik, pupuk tersedia, tenaga kerja memadai, modal sangat menunjang, apabila tata cara pengelolaannya kurang baik, harapan untuk mendapatkan produksi yang baik dengan jumlah yang banyak tidak akan tercapai. Manajemen pertanian merupakan suatu perencanaan tentang tata cara usaha tani yang baik dan terencana, kemudian cara mengorganisasikan tenaga kerja yang akan dibutuhkan, lalu memberikan arahan kepada tenaga kerja, melakukan kontrol atau pengawasan terhadap para pekerja, serta melakukan pengawasan terhadap produksi sesuai dengan target sasaran sehingga tercapai apa yang direncanakan, yaitu perolehan laba bagi usaha tani tersebut (Nur Fitri, 2017).

Petani pada skala rumah tangga dengan modal kecil dan lahan sempit sehingga hasil yang diperoleh hanya cukup untuk tambahan biaya konsumsi harian enggan untuk berspekulasi walaupun terdapat kesempatan untuk memperoleh pinjaman dari para tengkulak, dengan alasan pasang surutnya usaha di bidang pertanian, kadang memperoleh untung yang cukup kadang merugi. Banyak yang dilakukan oleh petani, seperti mengolah lahan untuk penanaman, menyiapkan persemaian, menyiapkan bibit, serta melakukan penanaman sampai pemeliharaan dan pencegahan hama. Semua tahap kegiatan dilakukan dengan menyiapkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup sehingga

diharapkan penjualan dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan dan kelebihannya untuk konsumsi rumah tangga, demikian seterusnya untuk kemudian diawali dengan penanaman berikutnya.

G. Bergerak Tanpa Maju, Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Pertanian

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sepuluh wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, maupun pemerintahan. Dalam bidang perekonomian, Kabupaten Bintan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan perikanan, serta pertambangan, yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Masyarakat Kabupaten Bintan yang merupakan masyarakat Melayu memiliki sebagian aktivitas kehidupan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu, misalnya secara tradisional masyarakat melayu umumnya bermatapencaharian sebagai petani, berkebun, nelayan, dan berdagang yang merupakan pekerjaan pekerjaan pokok masyarakat Bintan (Yosi Rahmadeni & Septian, 2022). Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Masyarakat Kecamatan Sri Kuala Lobam, khususnya ibu rumah tangga, banyak yang beraktivitas sebagai petani dalam rangka membantu perekonomian keluarga, sedangkan para suami bekerja pada sektor industri dan perikanan yang dikatakan lebih menjanjikan; usaha pertanian dan perkebunan dengan skala rumah tangga dengan penghasilan kecil membuat kebanyakan kaum pria untuk beralih profesi menjadi buruh industri atau nelayan. Sebagai buruh industri, kaum pria menerima upah bulanan yang merupakan penghasilan rutin dengan jumlahnya relatif lebih besar dari penghasilan pertanian dengan luas lahan yang terbatas.

Dari jumlah penduduk di Kecamatan Lobam, terutama laki-laki yang bekerja pada buruh perkebunan, didominasi oleh penduduk

dari etnis Jawa yang terkenal pekerja keras dan ramah. Sementara itu, penduduk asli kebanyakan enggan untuk bertani; kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan dengan alasan bahwa untuk pekerjaan menjadi buruh tani atau buruh perkebunan butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil atau upah, sedangkan untuk nelayan skala kecil mereka mendapatkan upah atau hasil setiap hari.

H. Kegagalan Petani dalam Merespons Kebijakan dan Program Pertanian Berkelanjutan

Pentingnya pengetahuan petani tentang kebijakan dalam rangka menghindari praktik tindakan untuk mengubah fungsi lahan sehingga keinginan petani untuk beralih ke profesi lain bisa berkurang. Kesejahteraan para petani masih dapat dikatakan belum tercapai karena masih banyak angka kemiskinan di kalangan petani dengan angka yang relatif tinggi, walaupun sumbangan sektor pertanian di tingkat nasional cukup besar, tingkat kesejahteraan bagi para petani tidak mengalami perubahan. Menurut catatan, ada sekitar 50–60 persen penduduk Indonesia yang masih tinggal atau menetap di perdesaan, tetapi 70–80% masih masuk dalam masyarakat golongan miskin yang hidup dari usaha pertanian tradisional.

Saat ini, banyak ditemukan adanya konversi lahan yang menyebabkan beralihnya fungsi lahan dari pertanian atau perkebunan menjadi lahan perindustrian dengan cara menjual atau dikontrakkan sehingga produksi lahan pertanian menurun dan berakibat menurunnya produksi bahan pangan sehingga berpengaruh pada merosotnya ketahanan pangan. Oleh karena itu, kebutuhan pangan di dalam negeri pun dilakukan dengan cara mengimpor dan berakibat semakin menyempitnya lahan pertanian di Indonesia.

Sebaliknya, pengetahuan dan pemahaman tentang program pembangunan di bidang pertanian yang berkelanjutan harus betul-betul dipahami dan disampaikan secara transparan kepada para pelaku industri pertanian. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan terkait dengan kebijakan pertanian adalah adanya aturan tentang pengalihan fungsi lahan, kebijakan penghapusan pajak lahan bagi

sektor pertanian, dan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian (I Gusti Agung Lies Angraeni, 2016).

Kurangnya kesempatan dalam memperoleh informasi tentang sumber permodalan merupakan salah satu kegagalan petani untuk melakukan pengembangan usaha sehingga para petani sulit untuk memperoleh dan menikmati kehidupan yang layak. Kebijakan yang berbasis pada pertanian hendaknya berorientasi pada pembangunan perdesaan serta penyediaan kebutuhan pangan masyarakat dan bermuara pada kesejahteraan petani. Namun, proses pada penerapan kebijakan dimaksud belum dapat menjawab permasalahan. Rendahnya lahan kepemilikan pertanian setiap petani disinyalir turut berkontribusi pada laju konversi lahan. Data hasil dari Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa 55,33% rumah tangga pertanian pemanfaat tanah merupakan petani skala rumah tangga yang memiliki lahan dibawah 0,5 hektare. Pada kondisi luasan lahan petani teramat kecil yang dimanfaatkan untuk menghasilkan dan memproduksi komoditas pangan, ada kecenderungan petani untuk mengubah jenis dan komoditas pertanian serta tata guna lahan menjadi lahan terbangun. Konversi dari lahan pertanian dan perkebunan seperti yang dimaksud tentunya akan digunakan sebagai dasar untuk mengontrol alih fungsi lahan ini. Sayangnya, kebijakan Penetapan *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (LP2B) ini justru berdampak pada petani dengan kepemilikan lahan yang sempit untuk masuk dalam strategi survival karena keterbatasan portofolio mata pencahariannya akibat lahan yang diolah tidak memiliki nilai ekonomi (Rizqihandari et al., 2022).

K. Produk Mata Rantai dan Pengelolaan Pasca Panen

Banyak faktor yang berperan dalam rantai pasokan distribusi hasil pertanian dari petani sampai ke konsumen karena kurangnya sistem kolektif langsung dari petani kecil sehingga banyak proses transaksi yang harus dilalui yang berdampak pada harga pasar yang tinggi (Perdana, Tomy. 2015).

Semakin tingginya pengeluaran untuk biaya logistik menjadi tantangan dalam proses mata rantai distribusi pertanian di Indonesia. Hal ini disebabkan panjangnya proses mata rantai pasokan hasil produksi pertanian dari para petani kecil menuju para pelaku pasar yang disebabkan banyaknya para pengecer yang berperan sebagai pemegang kekuasaan dan pelaku dalam mata rantai pasokan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama beberapa pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha agar tingginya biaya logistik di Indonesia dapat ditanggulangi sehingga tidak menjadi beban bagi para petani. Dengan demikian, ada beberapa hal yang dapat diupayakan, di antaranya meningkatkan pembangunan infrastruktur, perbaikan sejumlah instrumen kebijakan, serta pembangunan prasarana lainnya sebagai pendukung.

Permasalahan yang muncul pada distribusi hasil pertanian dan perkebunan disebabkan beberapa hal, di antaranya kurangnya koordinasi antarpetani sebagai produsen dan pelaku pasar yang menyangkut permasalahan tentang tata cara pengiriman produk hasil pertanian, jauhnya jarak tempuh dari lokasi pertanian menuju pasar sebagai pusat perdagangan, proses pendinginan pada saat pascapanen, dan masalah pergudangan.

Untuk mendukung konektivitas dengan wilayah sekitarnya dalam rangka meningkatkan arus distribusi barang terutama hasil perkebunan, saat ini telah dibangun jalan Tanjung Uban Lintas Barat yang membentang sepanjang 60 km, yang merupakan jaringan prasarana jalan dari daerah industri perkebunan di beberapa kecamatan menuju pusat perekonomian antarpulau maupun negara tetangga, seperti Singapura melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban. Kabupaten Bintan pada tahun 2023 memiliki panjang seluruh ruas jalan 982.100 km, yang terdiri atas jalan nasional sepanjang 137.100 km, jalan provinsi sepanjang 139.100 km, dan jalan kabupaten sepanjang 706.081 km dengan lebar bervariasi antara 4,5–9,5 meter (BPS Kabupaten Bintan, 2023b).

Berdasarkan data Statistik Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Bintan tahun 2021, ekspor ikan, udang, dan buah-buahan tujuan Singapura, dengan rincian buah-buahan sebesar 470 ton dengan nilai ekspor 6,1 juta US dollar serta ikan dan udang sebesar 5,546 ton dengan nilai ekspor 6,1 juta US dollar (BPS, 2021).

Untuk mendistribusikan hasil pertanian, seharusnya dilakukan koordinasi dengan DISHUB dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan dan mempertahankan hasil pertanian agar tetap dapat terjual tanpa harus memberatkan terhadap petani. Selain ini, pemerintah juga sebaiknya melakukan pemetaan terhadap stok produksi hasil panen yang siap dipasarkan.

J. *Life Story*: Kisah Sukses Seorang Petani Meraih Pasar

Bapak Slamet Supriadi adalah seorang petani sukses dari Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, kelahiran Jogja, yang sudah tinggal di Bintan dan menekuni pertanian selama enam tahun. Sejak kecil, Bapak Slamet Supriadi sudah mengenal pertanian karena memang berasal dari keluarga petani, sehingga kini beliau sudah dikatakan sebagai petani sukses karena berkat ketekunannya apa yang dikerjakan sebagai seorang petani semua membuahkan hasil. Bapak Slamet Supriadi menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan saat ini telah dikaruniai seorang anak berusia satu tahun. Keluarga kecil Bapak Slamet Supriyadi bertempat tinggal dan memiliki rumah pribadi di Kota Tanjung Pinang, sementara lokasi perkebunannya ada di Kecamatan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, yang berdekatan dengan lokasi pusat pemerintahan kabupaten. Berbekal pengalaman dan kemauan, Supriadi mencoba bercocok tanam pepaya dan pisang dengan penjualan ke pasar dan hotel-hotel di Bintan, mengingat harga buah-buahan dan sayur-mayur untuk ke hotel relatif lebih tinggi. Semua usaha yang dilakukan Supriadi membuahkan hasil; saat ini Bapak Supriadi memiliki lahan lima hektare di kelurahan Toapaya Asri dengan berbagai macam jenis

komoditas, seperti cabai, pepaya, dan tomat, serta di sela-sela tanaman tersebut ditanami beberapa pohon pisang. Lahan perkebunan milik Bapak Supriadi dikelola secara modern dengan sistem penyiraman menggunakan *sprinkler* dengan sumber air berasal dari tiga buah kolam. Biaya perlengkapan yang dikeluarkan meliputi bahan bakar untuk penggerak pompa air yang menggunakan diesel dengan bahan bakar solar 300 liter per bulan. Perkebunan cabai milik Bapak Supriadi kerap dikunjungi oleh gubernur, kepala dinas pertanian, Bupati Bintan, serta lembaga penelitian dari beberapa perguruan tinggi karena perkebunan milik Bapak Supriadi dianggap sebagai salah satu bentuk dari usaha tani yang berhasil. Di lahan empat hektare tersebut, Bapak Supriadi mempekerjakan tiga orang pegawai perkebunan yang merawat perkebunan cabai, pepaya, dan tomat. Slamet Supriadi, yang merupakan Sekretaris Poktan Horti Utama Desa Toapay Asri, baru-baru ini berhasil mengembangkan budi daya pepaya dan memiliki pasar sendiri, yaitu ke hotel-hotel dan tempat wisata yang ada di Kabupaten Bintan. Supriyadi menjelaskan bahwa dengan lahan satu hektare, petani bisa menanam 2000 pohon pepaya, dengan jarak 2 x 2 meter. Untuk lebih memotivasi para petani untuk membudidayakan pepaya, Slamet Supriadi mengatakan,

“Dalam satu minggu saya panen dua kali, sekali panen 500 kg sehingga menghasilkan Rp4 juta/minggu, atau dalam satu bulan bisa menembus Rp16 juta. Kita tidak perlu ragu untuk pasar buah pepaya. Permintaan pepaya di hotel-hotel juga menjanjikan.”

Sebagai seorang petani yang sukses, sejak tahun 2018 beliau telah mengembangkan budi daya pepaya dengan pendampingan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Kepulauan Riau. Pada tahun 2023, Bapak Slamet Supriyadi akan menerima bantuan sebesar Rp500.000.000 dari Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian untuk pembuatan *green house* untuk tanaman hortikultura utama. Selain itu, untuk bidang peternakan dalam waktu dekat juga akan diterima bantuan berupa 20 ekor kambing (hasil wawancara).

K. Kemitraan dalam Mendukung Sensus Pertanian 2023

Pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian telah berjalan dengan baik sejak awal Juni 2023, yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bintan. Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas (PR KSDK) yang bermitra dengan BPS sebagai supervisi melaksanakan survei selama empat hari, dengan pada hari pertama dilakukan koordinasi dengan BPS provinsi dan dilanjutkan kemudian koordinasi dengan BPS Kabupaten. Supervisi dilaksanakan di lokasi sesuai petunjuk dari Kepala BPS kabupaten, yaitu di tiga kecamatan, di antaranya Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Teluk Bintan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, semua berjalan dengan baik sesuai dengan instruksi dan petunjuk; semua komunikasi berjalan lancar sehingga data yang dibutuhkan dari hasil wawancara diperoleh dengan mudah.

Kerja sama dan dukungan dari lembaga yang dibangun oleh BPS, seperti organisasi kemasyarakatan Himpunan Wanita Tani, Gapoktan, dan kelompok kemasyarakatan lainnya sangat membantu terlaksananya kegiatan SP 23. Demikian halnya dengan petugas organik BPS, baik kabupaten maupun provinsi, terjalin kerja sama yang harmonis sehingga setidaknya mampu mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

L. Penutup: Kilas Balik Pendataan

Kabupaten Bintan unggul dalam sektor pertanian dan perkebunan, yang memiliki potensi sumber daya alam berupa tanaman Hortikultura yang tersebar di beberapa Kecamatan, di antaranya Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan merupakan daerah produksi Holtikultura, terutama jenis tanaman sayur-mayur, seperti daun selada, sawi, dan ketimun. Sebagian besar merupakan pertanian skala kecil dengan sistem hidroponik yang dilakukan sebagai usaha sampingan untuk kebutuhan rumah tangga dengan luas lahan rata-rata 300 meter persegi yang terletak di halaman rumah.

Metode penanaman dengan sistem hidroponik banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sri Kuala Lobam, khususnya ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga. Sebagian kaum pria bekerja pada sektor industri dan perikanan. Budi daya penanaman sayur-mayur melalui sistem hidroponik merupakan hal yang sangat mudah untuk perawatan dan pemanenan. Selain itu, siklus perputaran modal relatif kecil dan cepat karena dalam waktu 40 hari sudah dapat dipanen dan dipasarkan. Sebagai contoh, di Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Lobam sudah terbentuk KWT yang anggotanya berjumlah 60 orang. KWT dibagi menjadi dua kelompok, yaitu KWT Maju Bersama dan KWT Delima Merah.

Usaha pertanian dengan sistem hidroponik memiliki nilai ekonomi yang cukup lumayan dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal sebagai produk ketahanan pangan yang dapat dilakukan secara mandiri.

Dengan dilaksanakannya Sensus Pertanian di Kabupaten Bintan membantu Badan Pusat Statistik dalam memberikan pemaknaan kualitatif dengan pemotretan realitas dunia pertanian khususnya untuk industri tanaman hortikultura yang dikembangkan secara hidroponik, diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Bintan khususnya untuk tanaman hortikultura.

Daftar Pustaka

- Angraeni, I. G. A. L. (2016). *“Kebijakan pertanian untuk mensejahterakan petani”*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ab905ce67abe25f352f411e8f5839997.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2021). *Statistik perdagangan luar negeri Kabupaten Bintan 2021*. <https://bintankab.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2023a, 16 Januari). *Produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman (ton), 2019–2021*. <https://bintankab.bps.go.id/indicator/54/283/1/produksi-perkebunan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman.html>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2023b). *Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 - Tahap II: Usaha pertanian perorangan (UTP) hortikultura Kabupaten Bintan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. <https://bintankab.bps.go.id/id/publication/2024/08/16/82ac0abe310781ee489921af/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-ii--usaha-pertanian-perorangan--utp--hortikultura-kabupaten-bintan.html>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. (2023). *Daftar 5 rekomendasi tempat wisata di Pulau Bintan Kepulauan Riau, no 2 bahkan populer hingga ke luar negeri!* Bintan Tourism. <https://bintantourism.com/2023/07/24/daftar-5-rekomendasi-tempat-wisata-di-pulau-bintan-kepulauan-riau-no-2-bahkan-populer-hingga-ke-luar-negeri/>
- Dinperta Pangan. (2022). *Hidroponik, cara budidaya tanaman yang menguntungkan*. Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak. <https://dinperta pangan.demakkab.go.id/?p=4201>
- Milyawati. (2021). *Manjakan mata dengan hijaunya persawahan di Agrowisata Poyotomo Bintan*. Kepripedia.Com. <https://kumparan.com/kepriedia/manjakan-mata-dengan-hijaunya-persawahan-di-agrowisata-poyotomo-bintan-1wiaq9MXduW/2>
- Nur Fitri. (2017). *Manajemen pertanian dalam usaha agri bisnis*. <https://medium.com/@nuryullyanasafitri24/manajemen-pertanian-dalam-usaha-agribisnis>
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (2022). *Peta Kabupaten Bintan*. <https://bintankab.go.id/upload/geografis/1593884430023.jpg>
- Perdana, T. (2015). *Perkembangan rantai pasok pertanian di Indonesia*. Supply Chain Indonesia. <https://supplychainindonesia.com/perkembangan-rantai-pasok-pertanian-di-indonesia/>
- Rahmadeni, Y., & Septian, D. (2022). *Perubahan sosial ekonomi petani hortikultura*. STAIN Sultan Abdurrahman Press. Diakses dari https://stainsarpress.stainkepri.ac.id/assets/admin/bower_components/kcfinder/upload/files/2022%20YOZI%20DAN%20DONI/PERUBAHAN%20SOSIAL%20EKONOMI%20PETANI%20HOLTIKULTURA.pdf
- Rizqihandari, N., Rijanta, R., Sudrajat, Harini, R., & Setiadi, H. (2022). Dilema petani di tengah dualisme kebijakan pertanian: Studi kasus strategi penghidupan berkelanjutan petani sawah di kawasan agropolitan Ciwidey, Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(2), 193–218. <https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/10570>

- Silaban, D. S., & Saharuddin. (2015). Pengaruh pengembangan perkebunan rakyat terhadap keberdayaan dan investasi masyarakat desa hutan. *Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor*. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjD7JXb1LOOAxVLzjgGHV2iKhcQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.ipb.ac.id%2Findex.php%2Fso-dality%2Farticle%2Fdownload%2F11338%2F8827&usg=AOvVaw1lcPzkmwMDfphbZm6C xv-M&opi=89978449>
- Sirait, S., Santoso, D., Sari, N., Hatta, S., & Hendris, H. (2022). Efisiensi teknologi irigasi sprinkler di lahan kelompok tani Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. *Rona Teknik Pertanian*, 15(1), 13–24. <https://doi.org/10.17969/rtp.v15i1.23360>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab V

Mengurai Data Sapi-Sawit di Kabupaten Pelalawan Riau

Khairiah

Akhir-akhir ini, berita tentang kenaikan harga daging sapi telah menyebabkan banyak pedagang daging sapi berhenti melakukan penjualan. Permintaan sapi domestik sangat tinggi—konsumsi daging dan susu sapi terus meningkat setiap tahunnya—sedangkan industri peternakan sapi masih dianggap lamban. Meskipun ada banyak bisnis peternakan sapi, sebagian besar adalah peternak tradisional yang hanya memiliki beberapa sapi saja. Sapi-sapi tersebut pun umumnya dipelihara sebagai tenaga kerja untuk mengolah lahan atau sebagai tabungan untuk perayaan, bukan untuk sapi pedaging. Selain itu, banyak peternak hanya mengembangkan ternak seadanya. Pakan yang menjadi kebutuhan utama sapi sering mengalami masalah, padahal di lahan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit banyak tersedia pakan yang belum dimanfaatkan. Jika peternak dapat

Khairiah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: khai017@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Khairiah. (2025). Mengurai data sapi-sawit di Kabupaten Pelalawan Riau. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 125–148). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c941
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengambil pakan dari PKS, maka akan sangat menguntungkan bagi keduanya dikenal. Dari hasil Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Pelalawan, jumlah perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit terus bertambah setiap tahunnya. Jika integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi dapat diimplementasikan, Kabupaten Pelalawan dapat menjadi lumbung sapi nasional.

A. Telisik Sensus Pertanian yang Dilaksanakan BPS Kabupaten Pelalawan

Pelaksanaan sensus pertanian di Indonesia dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Pertanian 2023 dimulai sejak 1 Juni hingga 31 Juli 2023, termasuk di Kabupaten Pelalawan. Jumlah petugas pendata lapangan (PPL) di Kabupaten Pelalawan adalah 241 orang. Setiap PPL mendapatkan tugas yang disebut dengan satuan lingkungan setempat (SLS). Perkiraan target mereka dalam satu hari adalah menyelesaikan pengambilan data untuk 8–10 responden. Petugas pemeriksa lapangan (PML) berjumlah 41 orang, sedangkan koordinator sensus kecamatan (Koseka) berjumlah 12 orang. Satu koseka bertanggung jawab mengawasi sekitar sepuluh PML, dan satu PML bertanggung jawab mengawasi sekitar enam PPL.

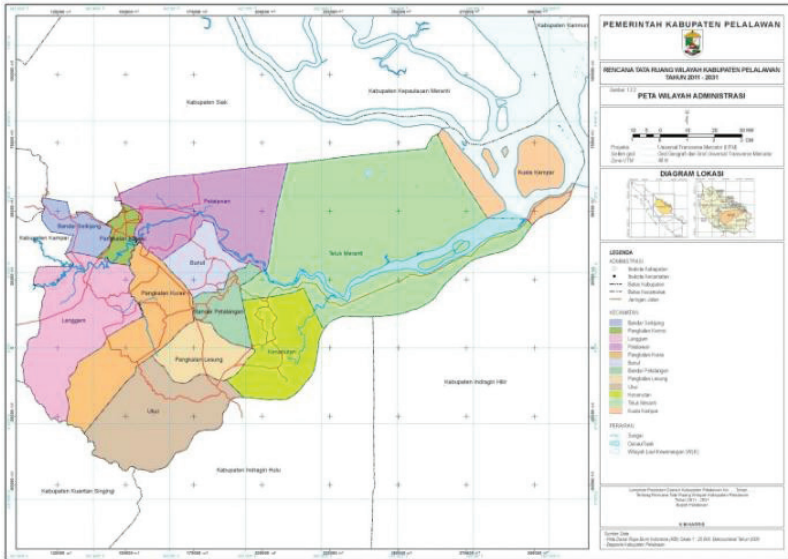
Secara keseluruhan, manajemen pelaksanaan, proses pencacahan, dan monitoring Sensus Pertanian di Kabupaten Pelalawan, Riau tergolong cukup baik. Ada empat koordinasi di antara koseka dengan PPL dan PML di wilayah kerja masing-masing. Pada hari ke-14, rating pelaksanaan di lapangan sudah mencapai 15% dari target. Kabupaten Pelalawan menempati peringkat 4 dari 12 kabupaten. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah banyaknya pulau-pulau kecil dan juga rumah yang terpencil di tengah kebun. Jika cuaca kurang baik atau turun hujan, lahan gambut susah dilalui dengan sepeda motor. Hal tersebut membuat pencapaian target terkendala. Selain itu, dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk menuju lokasi.

B. Bentang Alam Pertanian Kabupaten Pelalawan

Kota Pangkalan Kerinci terletak pada koordinat 1°25' 00"46,24" lintang utara dan 103°21,36" bujur timur. Pesona alam darat dan bahari terbentang luas berdekatan dengan Selat Malaka, perairan Johor, dan Singapura. Banyak pulau-pulau kecil di sepanjang hilir Sungai Kampar, misalnya Pulau Mendul/Penyalai, Muda, Serapung, Lebu, Ketam, Tungau, Labu, dan sebagainya. Wilayah-wilayah ini sangat strategis karena dekat dengan jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia.

Total penduduk Pangkalan Kerinci berjumlah 411.926 jiwa. Etnis aslinya disebut dengan Melayu Daratan, sedangkan etnis pendatang berasal dari Minang, Jawa, Batak, Nias, Aceh, Sunda, Banjar, dan Bugis. Suku Mamak, Laut, dan Sakai hidup di daerah pedalaman hutan-hutan. Saat ini, hutan-hutan tersebut sudah banyak dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Kota Pangkalan Kerinci memiliki luas 13.924,94 km². Kota Pangkalan Kerinci dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Daerah Kota Batam. Di wilayah Kota Pangkalan Kerinci terdapat 12 kecamatan, 106 desa, dan 12 kelurahan. Secara keseluruhan, wilayah Kota Pangkalan Kerinci berada pada dataran rendah, dengan jenis tanah orgosol. Gambaran umum letak geografis Kabupaten Pelalawan dapat dilihat melalui peta pada Gambar 5.1. Data terkait luas Desa Bukit Lembah Subur, Bringin Makmur, Kecamatan Kerumutan dan Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan untuk perkembangan Kecamatan Kerumutan dan Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat pada Tabel 5.2.



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pelalawan (2023)

Gambar 5.1 Peta Kabupaten Pelalawan

Tabel 5.1 Luas Wilayah Desa pada Kecamatan Kerumutan dan Pangkalan Kuras

Desa	Luas (Km ²)	%
Bukit Lembah Subur	13.69	5.91
Beringin Makmur	34	14.69
Sidomukti	6.78	0.5

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, (2019)

Tabel 5.2 Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kerumutan dan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Kecamatan	Luas Perkebunan Kelapa Sawit/Tahun			Populasi Sapi/Ekor		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kerumutan	44.612.00	16.776.00	16.999.00	1.500	1.080	701
Pangkalan Kuras	73.516.00	20.432.49	20.405.00	1.820	1.933	1.970
Kab. Pelalawan	356.877.00	187.549.88	188.195.00	12.248	12.845	11.961

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan (2022)

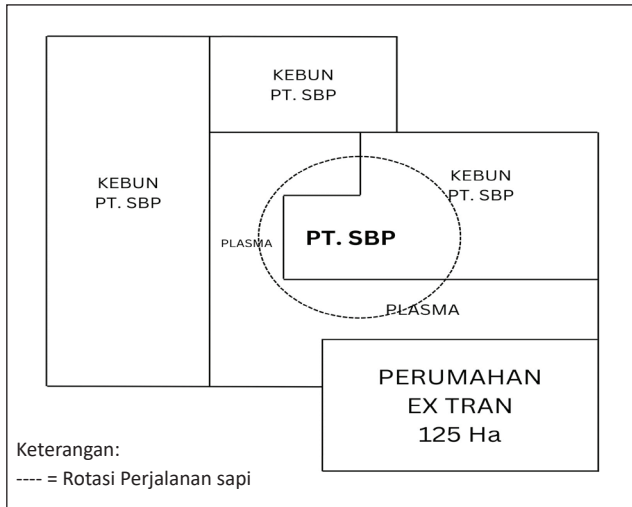
Berdasarkan data pada Tabel 5.2, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun di Kabupaten Pelalawan terjadi penambahan luas lahan penanaman kelapa sawit yang masih belum memanfaatkan hasil ikutannya (Putri et al., 2015). Limbah hasil ikutan kelapa sawit baik untuk tumbuh dan kembang sapi. Jika limbah hasil ikutannya dimanfaatkan, sapi yang akan dipelihara setiap tahunnya sejumlah 2.5 unit ternak/hektare/tahun memerlukan lahan \pm 15 ha. Luas lahan 188.195.00 dapat menampung 250.926 unit ternak. Sapi yang ada di perkebunan sawit pada saat ini 11.961 ekor (4.7%) . Dengan demikian, potensi pengembangan sapi sangat tinggi.

C. Menelisik Ragam Keberhasilan Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit

Suprpto adalah seorang etnis Jawa yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Pada Agustus 1995, ia datang ke Pelalawan dan tinggal di Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, untuk bekerja di PT Surya Bratasena. Sejak tahun 2002, Suprpto tidak lagi bekerja untuk PT tersebut dan memilih untuk memelihara sapi bali sebanyak 18 ekor. Sapi bali berasal dari bangsa Bibovine (*Bos sondaicus*, *Bos javanicus*, *Bibos banteng*), rumpun asli Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan kerjanya baik, mampu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang tidak kondusif, serta memiliki fertilitas dan karkas tinggi. Angka kematian sapi bali sebagai sapi potong relatif rendah, hanya 3% di Indonesia. Ciri-ciri pejantan bali ditetapkan berdasarkan SNI sapi bali 2017.

Sistem pemeliharaan *Bos sondaicus* dilakukan Suprpto dengan cara ekstensif, yakni digembalakan secara terus-menerus di dalam perkebunan kelapa sawit tanpa kandang. Sapi menginjak-injak dan juga memakan gulma serta membuang kotoran di sekitarnya sehingga dapat menekan biaya pemberantasan gulma dan pemberian pupuk ke tanaman sawit (Matondang & Talib, 2015).

Tempat penggembalaan sapi terletak pada lahan perkebunan kelapa sawit plasma milik masyarakat transmigrasi seluas 125 ha. Perkebunan sawit plasma bersebelahan dengan perkebunan sawit



Gambar 5.2 Perjalanan Sapi di Dalam Kebun Kelapa Sawit

PT Surya Bratasena yang luasnya 8.000 ha. Sapi sampai juga ke perkebunan tersebut. Luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Suprpto seluas 4 ha terdiri atas dua persil. Persil pertama seluas 2 ha di Sidomukti dan persil kedua seluas 2 ha di Salak. Selain itu, di belakang rumah seluas 4.000 m² juga ditanami sawit sebanyak 40 pohon. Wilayah penggembalaan sapi dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Sapi tidak pernah melewati jalan yang lain. Rotasi jalannya berputar normal. Seminggu kemudian, sapi sudah sampai ke titik awal lagi sehingga memudahkan peternak dalam mengontrol. Walaupun sapi terus-menerus di bawah pohon sawit, sapi tersebut tetap dikontrol tiga kali dalam sehari pada pukul 10.00, 17.00, dan 22.00 WIB. Jarak tempat penggembalaan sapi dari rumah kurang lebih 1 km. Kebiasaan sapi bali adalah berjemur pada pukul 9.00–10.00 WIB. Perkawinan sapi dilakukan dengan kawin alam. Sapi jantan yang dimiliki Suprpto tidak terus bersama dengan gerombolan sapi betinanya. Sapi jantan kadang-kadang pindah bersama gerombolan sapi lainnya yang ada di perkebunan kelapa sawit. Sapi jantan inilah yang mengawini sapi-sapi betina lainnya yang ada di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut.

Ada lima orang penggembala sapi yang menggembalakan ternaknya di bawah pohon kelapa sawit tanpa kandang dengan jumlah sapi ± 100 ekor. Mereka saling bertukar informasi dengan Suprpto. Bobot sapi Suprpto yang digembalakan di lahan sawit berkisar 250–350 kg.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 mengatur Sensus Pertanian yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Pertanian pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963 dan pada tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan Sensus Pertanian yang ketujuh. Sensus Pertanian 2023 mencakup tiga jenis usaha pertanian: usaha pertanian perorangan (UTP), usaha pertanian lainnya (UTL), dan usaha perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB). Ketiganya merupakan representasi pelaku usaha pertanian Indonesia, mulai dari skala kecil hingga besar dan mulai dari yang mengusahakan tanaman pangan hingga jasa pertanian.

Pada bulan Juni–Juli 2023, petugas pendata lapangan (PPL) dan petugas pemeriksa lapangan (PML) sebagai mitra Badan Pusat Statistik (BPS) non-PNS mendata di satuan lingkungan setempat (PLS) dengan responden yang memiliki usaha di bidang pertanian dan juga responden perusahaan pertanian yang ada di Kabupaten Pelalawan. Melalui PPL dan MPL tersebut, data pertanian ini dihasilkan.

PPL, MPL, dan koseka mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam. Dengan proses seleksi yang baik, hasil rekrutmen ditindaklanjuti dengan pelaksanaan bimtek. Materi tutorial berbentuk modul, buku, video, dan brosur yang mudah dipelajari serta sangat membantu para petugas yang tidak memiliki latar belakang pertanian untuk dapat memahami substansi pertanian secara cepat.

PPL melakukan wawancara langsung dengan mendatangi responden dari pintu ke pintu menggunakan metode manual (*paper-and-pencil interviewing* atau PAPI) karena jika menggunakan metode komputer (*computer-assisted personal interview* atau CAPI) akan terkendala jaringan internet. Data *prelist* diperoleh dari BPS setempat

dan dikonfirmasi pada ketua RT untuk memastikan pekerjaan utama responden adalah petani. Proses tersebut juga mempermudah PPL dalam rangka pencarian rumah tangga sensus. Penetapan rumah tangga tani dilakukan berdasarkan peta lokasi petani dalam *wilkerstat* dan sistem *tagging* untuk penetapan rumah tangga petani yang akan menjadi responden pencacahan.

Dalam proses wawancara, banyak variabel yang harus diisi oleh responden dan memerlukan penggalian pemahaman yang dalam oleh PPL. Pewawancara harus jeli dalam memastikan luas lahan yang dimiliki dan juga produksi yang dihasilkan karena keakuratan data penting dalam proses pencatatan ini. Dalam melakukan penyelidikan (*probing*) dan pendalaman data pada saat wawancara, PPL yang terlibat di Kabupaten Pelalawan sangat beragam sesuai dengan kemampuan PPL masing-masing. Wilayah dalam satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan sangat luas. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecepatan PPL dan MPL dalam melakukan proses wawancara ke rumah responden, yaitu jarak tempuh, cuaca, dan kondisi fisik jalan menuju rumah responden: lahan bergambut, berlumpur, licin, sering kali terdapat genangan air, dan harus menyeberangi sungai.

PPL dan MPL berupaya untuk bekerja sesuai atau lebih dari target yang diberikan. Akan tetapi, sering kali ditemui permasalahan di lapangan terkait dengan proses unggah data karena gangguan sinyal. Sementara itu, Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) bertugas membagi wilayah PPL, melakukan penelusuran wilayah, melakukan pendampingan PPL dalam kegiatan wawancara, memverifikasi *dataform*/modul L1 dan L2 hasil wawancara yang dilakukan PPL yang berada di wilayahnya, serta melakukan input data melalui aplikasi. Hasil verifikasi dilaporkan kepada koseka. Secara umum, BPS menetapkan SOP secara berjenjang, secara berurutan mulai dari:

1. PPL,
2. MPL,
3. koseka,
4. tata usaha,
5. tim *resifil bassing*,

6. tim teknis,
7. tim *coding*,
8. tim entri data, dan
9. tim pengolahan/input data.

Jika sudah terinput, maka data akan dilaporkan ke pusat dan *database* sebagai outputnya.

E. Peternak Sapi di Tengah Impitan Luasan Lahan Kelapa Sawit

Sumber daya alam yang melimpah terbentang luas dengan pemandangan kelapa sawit di Provinsi Riau. Begitu juga dengan Kabupaten Pelalawan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perseroan terbatas yang bergerak di bidang kelapa sawit di kabupaten tersebut dengan modal triliunan rupiah. Daftar perseroan terbatas yang mempunyai pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Daftar Perseroan Terbatas di Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	PT Sari Lembah Subur 1	17.	PT Adei Plantation and Industry
2.	PT Sari Lembah Subur 2	18.	PT Guna Setia Pratama
3.	PT Sawit Mas Nusantara	19.	PT Inti Indo Sawit Subur/Mill
4.	PT Bratasena Plantation	20.	PT Alam Sejati
5.	PT Tunas Baru Lampung	21.	PT Cipta Daya Sejati Luhur
6.	PT Pesawon Raya	22.	PT Gandaerah Hendana
7.	PT Indosawit Subur	23.	PT Sumber Sawit Sejahtra
8.	PT Sinar Agro Raya	24.	PT Sumber Budi Agung
9.	PT Serikat Putra	25.	PT Sinar Siak Dian Permai
10.	PT Peputra Supra Jaya	26.	PT Sarimas Nusantara
11.	PT Musim Mas Batang Kulim POM	27.	PT Pesawon Raya
12.	PT Multi Palma Sejahtra	28.	PT Musim Mas Pangkatan Lesung
13.	PT Makmur Andalan Sawit	29.	PT Mitra Unggul Pusaka
14.	PT Langgam Inti Hibrido	30.	PT Mitra Sari Prima
15.	PT Karya Panen Terus	31.	PT Mekar Sari Alam Lestari
16.	PT Jalur Pusaka Kumula Sakti		

Sumber: (Direktori Bisnis, 2023)

Produksi hasil bumi komoditas kelapa sawit yang dihasilkan berton-ton setiap harinya, begitu juga hasil dari olahan biji sawit yang dijadikan CPO, minyak, dan sebagainya untuk diekspor ke luar negeri.

Jumlah limbah yang dihasilkan terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Limbah perkebunan sawit di antaranya adalah pelepah dan daun sawit, sedangkan limbah pabrik kelapa sawit dapat berupa limbah padat dan cair, seperti bungkil inti sawit, janjang kosong sawit, serabut, cangkang, *sludge* limbah cair, dan solid. Semua limbah ini sangat baik untuk pakan ternak ruminansia seperti sapi. PT Indo Sawit Subur yang membina peternak Desa Makmur. Salah satu peternak yang mendapatkan pembinaan itu ialah Beni Manggolo, yang juga menjadi informan dalam tulisan ini. Tidak banyak peternak yang mengikuti jejak Beni untuk ikut program pembinaan yang dibuat PT Indo Sawit Subur.

Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan setempat merupakan satu kesatuan sosial ekonomi. Filosofi yang diyakini dalam setiap usaha adalah akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, sering kali usaha tersebut merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang terdekat dengan lokasi perusahaan. Selain itu, masyarakat sangat buta perihal tanggung jawab sosial perseroan terbatas dari segi hukum. Realitas yang dihadapi adalah walaupun perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya, tidak ada sanksi yang tegas untuk perseroan terbatas tersebut. Tidak semua perusahaan terbatas di atas mau memberi/kerja sama dengan peternak, mereka justru melarang karena khawatir takut akan merusak tanaman kelapa sawitnya.

F. Bergerak Tanpa Maju: Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Sapi-Kelapa Sawit

Sapi merupakan ternak penghasil daging dan menjadi salah satu sumber protein hewani yang masih menjadi pilihan utama dalam memenuhi protein masyarakat. Produksi daging sapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh populasi dan produktivitasnya yang masih rendah.

Produktivitas sapi yang dipelihara peternak rendah karena efisiensi reproduksi yang rendah dan pengetahuan peternak tentang sapi masih rendah. Sapi dipelihara dengan cara tradisional, yaitu hanya sekadar diberi makan rumput tanpa konsentrat atau mineral blok. Dalam rangka pengembangan populasi sapi, peternak masih ke-walahan dalam menyediakan pakan hijauan. Apalagi pada saat musim kemarau, pemberian makan terbatas hanya pakan yang tidak kontinu dan kualitasnya rendah. Di samping itu, padang penggembalaan semakin terbatas. Dalam rangka mengatasi ketersediaan pakan, peternak mencari pakan dengan cara *cut and carry* sejauh 2–5 km setiap hari.

Faktor lain ialah terkait motivasi peternak. Tidak semua peternak sapi berfokus dan berorientasi mengembangkan bisnisnya, sebagian besar memelihara sapi hanya sebagai tabungan. Hal ini menyebabkan peternak hanya menjalankan usaha ternak seadanya. Padahal, ada banyak jenis sapi di Indonesia yang jika dipelihara dengan baik dan benar akan dapat meningkatkan pendapatan peternak. Jenis sapi tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Bos indicus* (Zebu), adalah jenis sapi ongol serta brahman. Terdapat dua jenis persilangan sapi ongol di Indonesia, yaitu pejantan sumba ongol (SO) dan sapi betina jawa berwarna putih peranakan ongol (PO). Berat badan sapi jantan dapat mencapai 600 kg, sedangkan sapi betina 450 kg. Pertumbuhannya relatif cepat walaupun adaptasi terhadap pakan kurang. Brahman berasal dari Amerika. Berat sapi jantannya mencapai 1,1 ton, sedangkan sapi betina 700 kg. Sapi ini layak untuk dijadikan persilangan atau sapi *cross*.
2. *Bos taurus*, adalah jenis simental dan limausin. Sapi simental berasal dari wilayah beriklim dingin. Sapi tersebut merupakan sapi tipe besar dengan berat sapi jantan mencapai 1.150 kg dan betina 800 kg. Sapi jenis simental dan limausin memiliki tingkat metabolisme yang tinggi sehingga menuntut tata pemeliharaan yang teratur. Sapi limausin berasal dari daerah yang beriklim

dingin dan merupakan sapi tipe besar. Berat sapi limausin jantan mencapai 1.100 kg, sedangkan sapi betina mencapai 575 kg.

3. *Bos sondaicus*, merupakan bangsa sapi asli Indonesia dengan jenis sapi bali, madura, jawa, sumatra, dan sapi lokal lainnya.
4. *Friesian holstein* (FH), berasal dari daerah yang beriklim dingin. Berat sapi jantan mencapai 1.000 kg, sedangkan betina mencapai 628 kg. Tingkat metabolisme sapi tersebut tinggi sehingga menuntut tata cara pemeliharaan yang teratur. Frisian holstein sudah dipelihara secara intensif di Kabupaten Pelalawan dan berhasil. Pada aspek non-zooteknis, permasalahan yang dihadapi oleh peternak terkait dengan hal sosiologis, berupa ketahanan sosial (*sosial sustainability*), lemahnya posisi tawar, politik ekonomi yang tidak mendukung peternak, serta kelembagaan peternakan yang bias (Sulaeman, 2013).

Permasalahan yang terjadi pada perkebunan sawit rakyat adalah sebagian besar perseroan terbatas di bidang kelapa sawit berada pada kawasan yang sesuai dengan kelapa sawit, sehingga perusahaan menengah dan kecil membangun kebun-kebun barunya di lahan gambut. Namun, ekspansi kebun-kebun baru ini ilegal dan tidak diawasi pemerintah. Pengembangan kebun kelapa sawit merambah ke lahan hutan dan lahan bukan hanya di wilayah yang direncanakan untuk budi daya kelapa sawit. Tingkat deforestasi hutan dan degradasi lahan gambut yang sangat tinggi merupakan masalah yang signifikan bagi pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.

Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah menyebabkan peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dirasakan lebih sulit dibandingkan dengan membangun kebun baru. Sementara itu, sebagian besar pekebun kelapa sawit masih melakukan produksi secara swadaya, tradisional, dan tanpa bantuan dari pihak mana pun. Sebagian besar pendidikan masyarakat yang menanam kelapa sawit masih rendah sehingga memiliki pengetahuan yang terbatas.

Pelaksanaan pertanian kelapa sawit yang dilakukan jauh dari standar sertifikasi yang ada. Bibit kelapa sawit tidak memiliki sertifikasi penangkar, pemeliharaan tanaman dilakukan seadanya, dan gulmanya juga menyulitkan pemanen yang memungut brondolan yang berakibat pada rendahnya kuantitas dan kualitas buah sawit. Pemanenan dilakukan dua kali dalam sebulan. Permasalahan dalam kegiatan panen adalah penggunaan alat pelindung diri yang rendah, sedangkan kapasitas panen masih di bawah standar perusahaan kelapa sawit (Harahap & Hariyadi, 2018). Pengetahuan tentang tandan buah segar dipengaruhi oleh rendemen. Banyak pekebun yang belum mengetahui hal tersebut. Selain itu, faktor produksi belum memenuhi standar seharusnya. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya finansial para pekebun. Pemasaran tandan buah segar yang dihasilkan kebun swadaya ditetapkan dengan harga yang lebih rendah oleh perusahaan. Dengan demikian, pekebun sangat kesulitan dalam proses sertifikasi menjadi rantai pasok pasar global. Kultur teknis mempergunakan bibit tidak berkualitas, input pupuk minim; hanya mengandalkan potensi alam sehingga produktivitasnya rendah. Pemberdayaan petani perlu disertai dengan perubahan pola pikir sehingga mampu mengelola tanaman dengan orientasi bisnis.

G. Kegagalan Peternak dalam Merespons Program Pemerintah

Indonesia memang pernah menjadi eksportir daging sapi dalam sejarah. Dari tahun 1968 hingga 1973, ekspor daging Indonesia rata-rata mencapai 20.000 ton per tahun. Apa yang terjadi sehingga Indonesia dapat mengekspor daging? Sangat penting untuk mempelajari sejarah keberhasilan ini. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan sapi pada saat itu, pasti ada komponen penting yang harus dicari dan ditemukan. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah bahwa populasi Indonesia masih setengah dari saat ini dan padang penggembalaan sapi masih cukup besar. Akibatnya, peternakan sapi secara alami berkembang di setiap wilayah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi

Selatan, Lampung, dan daerah lainnya di Indonesia. Perdagangan antarpulau memasok kebutuhan sapi wilayah lain, dan selebihnya diekspor ke negara tetangga.

Selanjutnya, kinerja peternakan sapi yang rendah menyebabkan tidak terpenuhinya perkembangan permintaan konsumsi daging. Beberapa masalah menjadi kendala pengembangannya. Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS), Upsus Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab), Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan). Program pembangunan peternakan sapi tidak banyak menyentuh dan membuat terobosan untuk meningkatkan populasi, karena masih menghadapi banyak tantangan. Untuk mencapai swasembada daging sapi, pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia peternak sapi, meningkatkan kemampuan usaha peternak pembibitan sapi, meningkatkan infrastruktur dan tenaga inseminasi buatan (IB), memperbaiki sistem distribusi, modernisasi rumah potong hewan (RPH), dan mengoptimalkan lahan tidur untuk usaha peternakan sapi yang terintegrasi, baik pembibitan maupun penggemukan.

Pengalaman yang diperoleh peternak selama setiap tahap perkembangan ternaknya adalah pengetahuan berharga yang seharusnya membuat peternak lebih baik dalam mengelola usaha ternaknya. Meskipun pertanian dan peternakan menghadapi banyak perubahan, pengalaman peternak tidak akan memengaruhi perubahan tersebut. Pengalaman peternak terkait adopsi, inovasi metode dan alat produksi, serta proses yang rumit dan tidak sederhana membuat peternak kehilangan motivasi, yang menyebabkan mereka memilih teknologi yang lebih rendah.

H. Pola Integrasi Sapi-Sawit

Pola integrasi sapi-kelapa sawit dilakukan dengan memanfaatkan hijauan rumput yang ada di bawah tegakan kelapa sawit dan legum penutup tanah. Pemanfaatan limbah dari pelepah dan daun sawit serta limbah pengolahan *crude palm oil* (CPO) digunakan sebagai sumber pakan.

Untuk meningkatkan nilai nutrisi dan daya simpan pengolahan pakan berbasis kelapa sawit berupa pelepah sawit, tandan kosong sawit, serat sawit, dan bungkil sawit, dilakukan pencacahan dengan *chopper*, pengeringan, fermentasi, silase, dan pembuatan pakan lengkap (Harahap, 2019; Sarjani et al., 2022). Pemanfaatan pelepah dan daun sawit dapat meningkatkan bobot badan harian sapi, bobot anakan, dan waktu birahi. Produksi tanaman kelapa sawit diberikan pupuk cair dari urine sapi (Fina, 2019).

Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai biogas (Sulistiyanto et al., 2016) serta pupuk organik padat dan cair untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga produksi kelapa sawit meningkat (Fuad & Winarsih, 2021). Dalam rangka perbaikan manajemen sapi yang meliputi pemilihan bibit, perkandangan, pemberian pakan yang berkualitas, sistem perkawinan, pemeliharaan pedet dan bakalan, serta pengendalian penyakit dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani/ternak atau gabungan kelompok tani/ternak (gapoktan/nak). Dalam setiap pertemuan, dilakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada serta diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

I. Sistem Rantai Produk: Mengurai Keterbatasan Peternak Sapi-Kelapa Sawit.

Daging sapi saat ini dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga, restoran, hotel, industri makanan yang berbahan baku daging, seperti bakso, sate, nugget, dan sebagainya. Permintaan daging sapi cenderung meningkat dengan berkembangnya industri makanan berbahan dasar daging. Keterbatasan peternak dalam pemeliharaan ternak sapi adalah masih bersifat tradisional. Peternak mengalami keterbatasan modal dan bergantung pada kondisi alam, seperti urusan pakan. Hal itu yang menjadikan usaha ternak sapi menjadi usaha sampingan sehingga usaha sapi berjalan lambat. Sistem pemeliharaan tradisional tidak dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan budi daya sapi. Produk sapi adalah makhluk hidup yang jika sudah mencapai berat maksimum harus dipasarkan segera. Akan tetapi, justru banyak peternak yang

menahan pemasaran sapi dengan alasan menunggu Idul Adha sehingga peternak akan rugi.

1. Sistem Rantai Pasok Sapi

Aliran saluran distribusi daging sapi yang terjadi adalah aliran material, informasi, dan finansial. Di mana ketiga aliran ini saling berhubungan dan memengaruhi. Aliran material mengalir dari hulu ke hilir, yaitu dari peternak sapi, pedagang sapi hidup, tukang jagal, hingga sampai ke konsumen daging sapi. Aliran keuangan dari hilir ke hulu, yaitu dari konsumen akhir ke jagal pedagang sapi hidup dan ke peternak. Aliran informasi mengalir pada mata rantai secara timbal balik. Pemasaran sapi terdiri atas empat aspek, yaitu peternak sapi, pedagang sapi hidup, pedagang pengecer, dan konsumen. Kegiatan distribusi ternak sapi dari peternak kepada pedagang sapi hidup di kecamatan kajian, pedagang langsung datang ke peternak, tawar menawar pun terjadi antara peternak dan pedagang sapi hidup untuk menetapkan harga jual sapi yang disepakati. Jumlah sapi yang akan dibeli pedagang sapi hidup tergantung pada stok sapi yang ada dan permintaan pasar yang harus dipenuhi. Risiko peternak sapi adalah harga sapi selalu berfluktuasi, kematian sapi karena terserang penyakit, dan susah mencari pakan jika pemeliharannya semi intensif. Rantai pasok sapi di Kecamatan Kerumutan termasuk efisien. Bagian yang diterima peternak, yaitu 76,9% (Heldonny & Elida, 2022).

2. Sistem Rantai Pasok Kelapa Sawit

Determinan teknologi informasi dan sosial media serta hasil produksi kelapa sawit menunjukkan bahwa rantai pasok perkebunan kelapa sawit swadaya sangat tidak stabil. Faktor kesesuaian lahan menjadi determinan strategis di tingkat kabupaten untuk mencapai rantai pasok yang kredibel bagi keberlanjutan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Terdapat tiga aliran pasokan tandan buah sawit segar ke agro industri, yaitu aliran dari petani swadaya, petani plasma, dan tandan buah segar dari kebun inti. Aliran saluran distribusi tandan buah sawit yang terjadi adalah aliran material, informasi, dan finansial. Aliran informasi mengalir pada mata rantai secara timbal balik. Aliran

Informasi harga merupakan hal yang sangat penting dalam rantai pasok kelapa sawit rakyat. Harga TBS cenderung fluktuatif setiap hari. Para anggota rantai pasok harus terus mencari informasi terkait harga TBS untuk menghindari adanya kesalahan dalam menentukan harga jual maupun harga beli TBS.

Aliran finansial ditentukan oleh pedagang besar. Transaksi dilaksanakan secara tunai dan mengalir hilir ke hulu, mulai dari tengkulak kepada petani dan pedagang besar kepada tengkulak. Pedagang pengumpul kelapa sawit membeli tandan buah segar (TBS) dari para petani dengan membayar langsung secara tunai karena petani membutuhkan uang tunai sebagai modal dan kebutuhan sehari-hari. Sistem pembayaran tersebut sudah berlangsung lama karena adanya saling percaya antara petani dan pengumpul. Harga yang ditetapkan sesuai dengan harga dari kesepakatan jual beli komoditas dalam rantai pasok tersebut.

Sistem manajemen rantai pasok agro industri pada era globalisasi ekonomi harus dicermati dengan kritis dalam pengelolaan aliran produk sepanjang jasa rantai nilai tambah produk kelapa sawit dalam upaya mewujudkan nilai konsumen yang unggul pada tingkat harga yang terjangkau. Aliran pasokan tandan buah sawit segar ke agro industri yang dibicarakan di sini berbentuk aliran dari petani swadaya. Yang terjadi adalah aliran material, informasi, dan finansial. Dengan banyaknya PKS yang ada di Kabupaten Pelalawan, aliran material pasokan tandan buah sawit adalah petani-pekebun-pedagang pengumpul-pedagang besar (PKS).

J. *Life Story*: Perjalanan Keluarga Petani Sapi-Kelapa Sawit

Cerita resiliensi keluarga petani menjadi kilas balik refleksi yang dapat menjadi pembelajaran. Kisah perjuangan di tengah keterbatasan petani yang masih tradisional dan subsisten. Uraian kisah ternarasi dari setiap lokus desa yang dijelaskan secara emik menjadi rentetan kisah kehidupan petani yang berjuang di tengah pelbagai kesulitan dan

impitan ekonomi. Seperti yang dikisahkan dari para petani berikut: Beni Manggolo, Poniyo, dan Ismail.

1. Beni Manggolo dari Desa Beringin Makmur

Perjalanan menuju ke Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ditempuh selama empat jam dari ibu kota Kabupaten Kerinci. Beni Manggolo (etnis Jawa) berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Beni Manggolo datang ke Desa Beringin Makmur pada tahun 1999 mengikuti keluarga yang ikut dalam program Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (Transpir) pada tahun 1987.

Pada mulanya, Beni Manggolo mengelola 100 ha perkebunan sawit milik 12 kepala keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Pada tahun 2023, Beni Manggolo sudah mengelola 150 ha milik 23 keluarga. Lahan kebun sawit miliknya sendiri seluas 10 hektare terdiri atas 3 persil. Manajemen usaha yang diterapkan dalam mengelola usahanya adalah menggunakan karyawan. Pada saat ini, Beni Manggolo memiliki 7 orang karyawan yang profesional.

Beni Manggolo diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Lestari. Pada tahun 2011, kelompok taninya mendapatkan bantuan ternak sapi sebanyak 30 ekor dalam rangka pengembangan pola sistem integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA). Pada tahun 2023, jumlah sapi menjadi ± 100 ekor. Pelepah dan daun sawit di-*chopper* (mesin penghancur pelepah) sampai menjadi seperti abon. Abon tersebut lalu difermentasi dengan bahan yang tersedia di lokasi yang dipilih, seperti tepung galek, bekatul, *molases*, tebon jagung, atau *pollard* yang dipadatkan sehingga tanpa udara. Pakan jenis itu tahan sampai bertahun kalau tidak dibuka (Mustika & Hartutik, 2021; Nurhaita et al., 2019).

Selain itu, juga diperkenalkan pemanfaatan solid, bungkil inti sawit (BIS), dan pembuatan mineral blok lalu disosialisasikan ke kelompok tani lainnya. Sistem ini sangat dirasakan manfaat dan kegunaannya. Semua kelompok melaksanakannya sehingga petani sangat inovatif sesuai dengan sistem sosial yang ada (Edwina & Maharani, 2017).

Sapi bali (*Bos sondaicus*) secara semi intensif dalam kandang koloni milik kelompok setiap hari dikeluarkan dari kandang selama tiga jam. Sapi tersebut akan memakan rumput yang ada di bawah tegakan pohon kelapa sawit. Soedjana (2007) menyatakan kebiasaan petani memelihara sapi dengan pakan yang ada di alam sekitar usaha pertanian. *Mix farming system* merupakan dasar pelaksanaan SISKAS.

Pada saat ini, kelompok tani karya lestari sudah memproduksi bibit sapi, pakan konsentrat, dan pupuk organik cair (POC) serta bokasi. Dalam rangka pengembangan usaha selain sapi potong, Pak Beni Manggolo juga mengembangkan sapi perah bangsa Friesian Holstein (FH). Saat ini, jumlah sapi perahnya mencapai 40 ekor. Sistem pemeliharaannya dilakukan secara intensif. Sapi perah di Indonesia didatangkan dari Eropa dengan temperatur sedang, yaitu kisaran suhu rendah 5–25°C (Jones & Stallings, 1999).

Untuk mengatasi udara panas, bangunan kandang dibuat tinggi dan menggunakan ventilasi udara yang baik, serta diberi fasilitas kipas angin. Sekitar kandang sapi juga ditanami rumput gajah (Suherman, 2021). Sapi perah Beni Manggolo diberi pakan berupa rumput gajah segar di-*chopper* dan juga konsentrat dari bungkil inti sawit (BIS) dari PT Sari Lembah Subur (sudah memiliki DO dari perkebunan) dan solid dari PT MAS Pangkalan Lesung. Solid sawit sangat baik untuk perkembangan ternak sapi (Utomo & Widjaja, 2012). Selain Beni Manggolo, ada empat peternak sapi perah lainnya di Kecamatan Kerumutan. Sapi perah saat ini sudah menghasilkan susu yang dikemas dengan baik. Pemasarannya sekitar Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, dan Siak.

2. Poniyo dari Desa Lembah Subur Kecamatan Kerumutan

Poniyo saat ini menempati rumah transmigrasi yang dibelinya dari orang yang bertransmigrasi ke Desa Lembah subur. Poniyo memiliki 4 ha lahan sawit dan 5.000 m rumah dikelilingi pohon sawit. Poniyo juga memiliki lima ekor sapi berjenis sapi bali (*Bos sondaicus*). Sistem pemeliharaan dilakukan secara intensif, yaitu dikandangkan secara terus menerus (Azizah et al., 2023). Sapi *Bos sondaicus* dimanfaatkan

sebagai usaha tambahan keluarga. Meskipun bersifat usaha sampingan, setiap hari rumput diambil berupa hijauan rumput di lapangan. Jika pada hari sibuk tidak sempat mengambil rumput untuk sapi, rumput dibeli dengan harga Rp50.000/ikat dan tidak ada pemberian pakan tambahan berupa konsentrat ataupun mineral.

3. Ismail dari Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras

Ismail berasal dari Binjai, Sumatra Utara. Ismail mengikuti transmigrasi umum ke Pasir Pangaraian pada tahun 1984. Di sana, Ismail mendapatkan lahan plasma dan lahan perumahan. Proses pengembalian oleh PT Merangkai Arlan Nusantara cukup lama. Pada tahun 2000, lahan tersebut dijual lalu Ismail pindah ke Desa Sidomukti. Saat ini, Pak Ismail sudah memiliki lahan kelapa sawit seluas 2 ha di Desa Dundangan. Pada tahun 2014, kelompok tani Abimanyu mendapatkan bantuan sapi. Akan tetapi, karena kelompok tersebut tidak memiliki kandang, bantuan dialihkan kepada kelompok tani Sumber Rezeki yang diketuai oleh Pak Ismail. Pak Ismail memiliki kandang berukuran 4x10 m dengan jumlah sapi hanya satu ekor. Bantuan ternak berjumlah 19 ekor pada saat itu statusnya adalah gaduh. Sejak itu, pak Ismail mulai memelihara ternak sapi. Jumlah sapi yang dimilikinya saat ini adalah 12 ekor dengan jenis sapi bali 8 ekor, PO 1 ekor, brahman 2 ekor, dan simental 1 ekor. Sapi-sapi tersebut sudah diasuransikan ke Jasindo. Pemeliharaan sapihnya dilakukan secara semi intensif, yaitu pada malam hari dikandangkan lalu dilapas pada pukul 02.00 di lahan kelapa sawit plasma. Pak Ismail menerapkan pola SISKKA sehingga mendapatkan bantuan. Selain itu, Pak Ismail memproduksi silase. Pak Ismail juga memproduksi kompos dan urine sapi, dan sudah diproduksi menjadi pupuk cair untuk memupuk tanaman kelapa sawit (Komalasari et al., 2019).

K. Penutup: Kilas Balik Pendataan

Pendataan dalam Sensus Pertanian dilakukan secara berkala, biasanya setiap beberapa tahun, untuk mengumpulkan data tentang berbagai

aspek pertanian, seperti jumlah petani, teknik pertanian, produksi tanaman dan ternak, penggunaan pestisida dan pupuk, serta data sosial ekonomi. Pendataan dalam Sensus Pertanian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan pertanian negara tersebut.

Proses penting untuk memahami dan mengelola sektor pertanian dengan lebih baik adalah pengumpulan data dalam Sensus Pertanian. Dengan pembaruan data yang teratur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak perubahan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

Angka statistik dari sensus pertanian dapat diperjelas dengan cerita emik yang didasarkan pada data dan informasi yang didasarkan pada fakta dan makna dari angka statistik yang dikemukakan secara rasional menurut petani. Secara keseluruhan, manajemen pelaksanaan dan proses pencacahan dan monitoring di Kabupaten Pelalawan berjalan cukup baik.

Daftar Pustaka

- Azizah, S., Djunaidi, I. H., Rachmawati, A., & Titisari, E. Y. (2023). Inisiasi usaha ternak sapi potong intensif melalui kandang komunal dan bank pakan Taman Nasional Baluran. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 103–110. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v7i1.5427>
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2019). *Luas wilayah dan persentase luas wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Kerumutan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. <https://pelalawankab.bps.go.id/statictable/2019/12/31/63/luas-wilayah-dan-persentase-luas-wilayah-desa-kelurahan-di-kecamatan-kerumutan.html>
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2022). *Luas areal tanaman perkebunan (hektar), 2020–2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. <https://pelalawankab.bps.go.id/indicator/54/116/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>
- Direktori Bisnis. (2023). *Daftar perusahaan di Kabupaten Pelalawan*. Daftarperusahaan.Com. <https://www.daftarperusahaan.com/bisnis/area/pelalawan?page=1>

- Edwina, S., & Maharani, E. (2017). Kajian keragaan karakteristik dan tingkat pengetahuan petani tentang sistem integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 11(1), 110. <https://doi.org/10.20961/sepa.v11i1.14160>
- Fina, S. (2019). Pengaruh integrasi ternak sapi dengan kelapa sawit terhadap produktivitas sapi dan kelapa sawit. *Jurnal Peternakan Nusantara*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.30997/jpnu.v5i1.1625>
- Fuad, K., & Winarsih. (2021). Pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik. *Jurnal Abdimas*, 07(4), 293–297.
- Harahap, L. R. (2019). Rancang bangun mesin smart capsule (kaplet sapi unggul) limbah sawit. *Jurnal Mesin Nusantara*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29407/jmn.v2i1.13040>
- Harahap, Z. A., & Hariyadi. (2018). Manajemen panen kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Kebun Sei Lukut, Siak, Riau. *Buletin Agrohorti*, 6(1), 131–139. <https://doi.org/10.29244/agrob.v6i1.17494>
- Heldonny, A., & Elida, S. (2022). Analisis rantai pasok daging sapi di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Dinamika Pertanian*, 38(1), 111–118. [https://doi.org/10.25299/dp.2022.vol38\(1\).10440](https://doi.org/10.25299/dp.2022.vol38(1).10440)
- Jones, G., & Stallings, C. C. (1999). *Reducing heat stress for dairy cattle*. Virginia Cooperative Extension.
- Komalasari, K., Evelyn, E., Saputra, E., & Utami, S. P. (2019). Pembuatan pupuk organik dari limbah agro industri sebagai alternatif pengganti pupuk sintetis. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 506–510. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.506-510>
- Matondang, R. H., & Talib, C. (2015). Integrated Bali cattle development model under oil palm plantation. *Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences*, 25(3), 147–157. <https://doi.org/10.14334/wartazoa.v25i3.1159>
- Mustika, L. M., & Hartutik, H. (2021). Kualitas silase tebon jagung (*Zea mays* L.) dengan penambahan berbagai bahan aditif ditinjau dari kandungan nutrisi. *Jurnal Nutrisi Ternak Tropis*, 4(1), 55–59. <https://doi.org/10.21776/ub.jnt.2021.004.01.7>

- Nurhaita, N., Definiati, N., & Feni, R. (2019). Pemanfaatan pakan komplit berbasis limbah sawit untuk usaha penggemukan sapi kurban di kelompok tani ternak sumber rezeki. *Sinar Sang Surya: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24127/sss.v3i2.1061>
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2023). *Peta skala lingkungan*. <https://pelalawankab.go.id/web/peta-skala-lingkungan/>
- Putri, M., Nuswantara, L., & Subrata, A. (2015). Undegraded protein dan pencernaan protein pakan lengkap berbasis limbah perkebunan sawit dengan rasio energi protein berbeda secara in vitro. *Animal Agriculture Journal*, 4(2), 239–243.
- Sarjani, T. M., Mahyuni, S. R., M, R. D., & Nova, A. (2022). Pemanfaatan limbah sawit sebagai pakan produksi ruminansia. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 987. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i3.6070>
- Soedjana, T. D. (2007). Sistem usaha tani terintegrasi tanaman-ternak sebagai respons petani terhadap faktor risiko. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(6), 82–87.
- Suherman, D. (2021). Karakteristik, produktivitas dan pemanfaatan rumput gajah hibrida (Pennisetum purpureum cv Thailand) sebagai hijauan pakan ternak. *Maduranch: Jurnal Ilmu Peternakan*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.53712/maduranch.v6i1.1071>
- Sulaeman, M. M. (2013). Permasalahan usaha sapi potong kaitannya dengan potensi sumber daya lokal modal sosial dan posisi tawar peternak dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 18(2), 115–121.
- Sulistiyanto Y., Sustiyah, Zubaidah S., & Satata B. (2016). Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber biogas rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Udayana Mengabdi*, 15(2), 150–158.
- Utomo, B. N., & Widjaja, D. E. (2012). Pengembangan sapi potong berbasis industri perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Litbang Pertanian*, 31(4), 145–152.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab VI

Karet Rakyat di Antara Impitan Sawit: Catatan dari Batang Hari, Jambi

Reza Amarta Prayoga

Realitas degradasi produksi karet petani di perkebunan rakyat menimbulkan pelbagai gejala. Salah satu penyebabnya adalah gerakan masif petani yang mengonversi komoditas dari karet menjadi sawit, sampai muncul istilah ‘sawitisasi’. Persoalan sawitisasi dari sisi ekologi dan sosial ekonomi menjadi dua sisi kausalitas yang berkelindan dalam kesenjakaan karet rakyat di Kabupaten Batang Hari. Tulisan ini mencoba mengekstraksi realitas emik berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) yang berfokus pada pertanian karet di Kabupaten Batang Hari. Petani yang bertahan dengan karet dan petani karet yang telah berpindah ke sawit menjadi dua sumber data dalam penggalian emik ini.

Hasil pendalaman emik dari sensus pertanian ini mengungkap-
kan fenomena karet di tengah impitan sawit menjadi penyebab

R. A. Prayoga

Universitas Indonesia & Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: reza010@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Prayoga, R. A. (2025). Karet rakyat di antara impitan sawit: Catatan dari Batang Hari, Jambi. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 149–190). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c942
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

kelangkaan produksi karet di perkebunan rakyat. Stresor (tekanan) tauke sebagai pengendali harga karet di tingkat petani disinyalir turut serta terhadap anjloknya harga. Selain itu, kelompok tani yang tidak fungsional dalam memproteksi harga juga diduga sebagai penyulut kesuraman karet rakyat di Kabupaten Batang Hari.

A. Sekelebat Praksis Sensus Pertanian di Batang Hari

Sensus pertanian menjadi agenda rutin tiap dasawarsa yang diprakarsai oleh BPS dan dilaksanakan pada setiap tahun yang berakhir angka tiga. BPS telah melaksanakan enam kali Sensus Pertanian, yakni pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, dan 2013 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2013), serta sensus ketujuh pada tahun 2023. Sensus pertanian sendiri secara makro berguna untuk perencanaan, penerapan kebijakan, dan evaluasi program pertanian. Sensus Pertanian 2023 ini menjadi momentum penyediaan data melalui pencatatan pertanian seluruh pelosok Indonesia dalam rangka memmanifestasikan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023). Ada lima jenis penyediaan data yang ditangkap melalui praksis survei sensus pertanian tahun ini, yakni data pokok pertanian nasional, petani gurem, indikator SDGs pertanian, produsen pangan skala kecil, dan data geospasial. Standar Food and Agriculture Organization (FAO, 2020) melalui *World Programme for the Census of Agriculture* (WCA) menjadi pedoman dalam sensus pertanian. Ekosistem basis data pertanian yang akurat dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyokong kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia (Qosim, 2023; Supendi & Purwoko, 2022).

Bulan Juni–Juli 2023 menjadi periode pencatatan serentak dan masif pertanian Indonesia. Pencatatan ini dilakukan hingga pelosok provinsi dan kabupaten demi ekosistem basis data pertanian Indonesia. Tidak terkecuali Provinsi Jambi, tepatnya Kabupaten Batang Hari menjadi potret kecil dari masifnya praksis pencatatan

pertanian Indonesia. Bumi *Serentak Bak Regam* menjadi landasan filosofis Kabupaten Batang Hari berarti watak dan adat beriringan dalam manifesto seiya sekata (musyawarah dan mufakat), kabupaten ini adalah satu yang tertua di Provinsi Jambi (Diskominfo Kabupaten Batang Hari, 2012). Menariknya, label kabupaten Batang Hari tersurat pohon karet yang menandakan kesuburan tanah dan alamnya. Karet menjadi salah satu komoditas unggulan primadona Kabupaten Batang Hari (Tambunan, 2022, 2023b). Sejak era kolonial, Kabupaten Batang Hari telah menjadi sentra perkebunan karet. Produksi karet yang melimpah menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok ekspor karet terbesar dari tanah Andalas (Hidayat & Seprina, 2022).

Komoditas pertanian karet menjadi salah satu variabel tangkapan data dari survei Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Batang Hari. Sensus telah memotret secara utuh kondisi rumah tangga pertanian dan usaha pertanian dalam rangka basis data dan informasi penyokong ketahanan pangan nasional. Basis ketahanan pangan memang perlu dimulai dari skop mikro, seperti kesejahteraan rumah tangga petani kecil. Petani kecil dalam tangkapan Sensus Pertanian 2023 memang hanya tersaji dalam data angka sehingga belum memberikan corong solusi daya lenting petani kecil dalam menentukan dan mengendalikan rantai pasok harga produksi. Terlebih, karena rantai pasok harga di tingkat lokal sudah dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir pembeli; hal ini membuat petani kecil semakin inferior (Tambunan, 2023b).

Selain itu, pandangan kritis sekaligus pesimis dari Simanjuntak dan Erwinsyah (2020), menyatakan bahwa wacana ketahanan pangan yang berorientasi pada pasar perusahaan agrobisnis dan bertumpu pada produksi ekonomi kapitalis sebagai roda bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan proses reproduksi sosial yang dibutuhkan tenaga kerja justru akan melindas kesejahteraan petani kecil. Terlebih, ketergantungan impor komoditas pangan dan reformasi agraria yang semrawut dalam distribusi kepemilikan tanah, disinyalir menjadi jerat patologi kemiskinan bagi petani kecil.

Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Batang Hari ditujukan sebagai solusi paripurna dalam situasi ketidakpaduan data dan ketidak-

berpihakan yang secara riil dihadapi petani kecil. Potret yang dapat menjadi ekosistem basis data akurat dalam menentukan langkah penyelesaian masalah pertanian dari level mikro, menengah, dan makro. Keberpihakan secara data menjadi jalan untuk dapat memahami daya lenting petani kecil menghadapi gejolak dalam rantai produksi pertanian. Petani diharapkan tidak hanya dijadikan basis sumber produksi, tetapi juga dapat berkekuatan mandiri untuk bisa bersaing dalam pengelolaan hasil komoditas pertaniannya. Nasib petani tidak lagi dipandang hanya sebagai produsen komoditas, tetapi perlu diperhatikan keberlangsungannya sebagai petani. Profesi petani yang tidak sekadar dipandang sebagai pemasok kebutuhan masyarakat semata, tetapi memuliakan derajat profesi petani untuk meruntuhkan kesan profesi yang miskin, suram, dan nihil masa depan penghidupannya dengan bertani (Herwibawa, 2020). Konstruksi produktivitas usaha pertanian berkelanjutan, dan penguatan agroindustri nilai tambah hasil pengolahan pertanian dipandang sebagai langkah realistis peningkatan pendapatan sekaligus mengangkat derajat penghidupan petani (Shodiq, 2022). Hal ini untuk mereduksi proyeksi kehilangan regenerasi petani (petani muda) yang tergerus oleh praktik korporasi agraris yang tidak melihat penopang keberlangsungan tenaga kerja di sektor pertanian (Arvianti et al., 2019; Oktafiani et al., 2021).

Di lain pandangan, Supendi dan Purwoko (2022) menegaskan sensus pertanian sebagai basis data pertanian yang akurat merupakan proses transformasi struktural bagi kebijakan pembangunan pertanian. Penyediaan data akurat pertanian juga menjadi landasan kuat pengembangan rumah tangga usaha pertanian, non-rumah tangga pertanian, dan korporasi pertanian yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat luas (Qosim, 2023). Peningkatan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian berkelanjutan menjadi salah satu indikator transformasi pertumbuhan ekonomi daerah atau nasional. Hal ini diperkuat oleh temuan Lestari (2022) dan Damayanti et al. (2021) yang menjabarkan bahwa pertumbuhan produktivitas usaha tani, ekonomi pertanian, dan belanja daerah mempunyai dampak langsung reduksi kemiskinan di pedesaan. Perbaikan infrastruktur

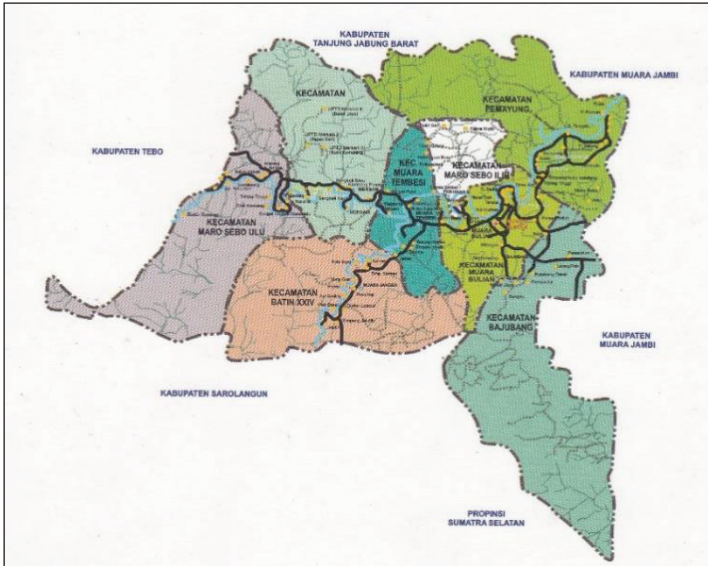
penopang pertanian, peningkatan kapasitas petani, daya dukung akses penyediaan bibit unggul, pupuk, dan kemudahan permodalan hingga perluasan jaringan pasar dapat menjaga kontinuitas permintaan produk pertanian. Seluruh faktor tadi dapat menjamin keberlangsungan produksi yang sejalan dengan permintaan pasar pertanian.

Oleh karena itu, Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Batang Hari menjadi momentum untuk memperkuat langkah kepaduan basis ekosistem data dan informasi akurat dalam memperkuat kebijakan pertanian yang terintegrasi. Data yang disajikan dalam sensus pertanian ini dapat menjadi masukan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkhusus Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dalam proteksi petani karet, khususnya petani kecil.

B. Jejak Rentang Karet di Alam Batang Hari

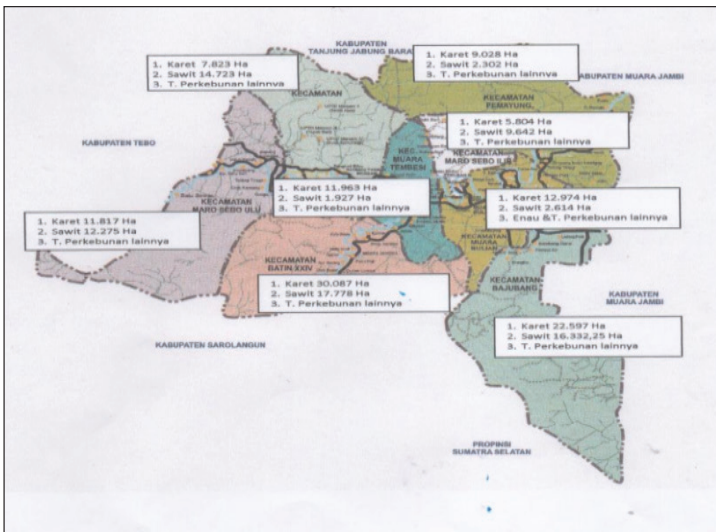
Provinsi Jambi, yang ikonik dengan sebutan “*Bumi Sepucuk Sembilan Lurah*”, terletak di jantung Pulau Sumatra. Provinsi ini terdiri atas dua kota dan sembilan kabupaten. Kabupaten Batang Hari menjadi salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi (Nadia, 2022). Wilayah kabupaten ini terbentang luas mencapai 5.804,83 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari, 2017b). Posisi Kabupaten Batang Hari (Gambar 6.1) yang terletak di peri-urban Kota Jambi memiliki posisi yang strategis, yakni sebagai konektor kabupaten lain di Provinsi Jambi dan terusan ke Provinsi Sumatra Barat serta Provinsi Sumatra Selatan (Gambar 6.1).

Jajaran perkebunan menjadi pemandangan hijau terhampar di Kabupaten Batang Hari. Karet dan sawit (lihat Gambar 6.2) mendominasi tanaman komoditas yang terbentang luas di kabupaten ini, dengan proporsi luas tanaman karet mencapai 113.566 ha dan sawit seluas 96.153,30 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari, 2017a). Karet dan sawit menjadi komoditas primadona di Kabupaten Batang Hari, terlebih karet Batang Hari sangat tersohor sejak era kolonial Belanda (Hidayat & Seprina, 2022). Senyatanya pilihan kebijakan sampai detik ini, perkebunan karet dan sawit menjadi sektor andalan dan penopang sumber penghidupan masyarakat pe-



Sumber: Pemerintah Kabupaten Batang Hari (2017)

Gambar 6.1 Peta Kabupaten Batang Hari



Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Hari (2013)

Gambar 6.2 Peta Potensi Perkebunan di Kabupaten Batang Hari



Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Hari (2012)

Gambar 6.3 Logo Kabupaten Batang Hari

tani di Kabupaten Batang Hari. Penopang sumber penghidupan ini terekam secara riil dalam rilis data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari (2021) yang menyatakan bahwa mayoritas sekitar 52% masyarakat di Kabupaten Batang Hari menekuni pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Interaksional yang menjadi ciri khas masyarakat agraris dan perdesaan yang lekat akan habitus dan corak sumber penghidupan tidak dapat jauh dari sektor pertanian dan kuatnya kepentingan kolektif berbasis solidaritas sosial (Afra & Salemuddin, 2022; Sitompul, 2023).

Senyatanya, pengambilan data pencatatan narasi emik pertanian di Kabupaten Batang Hari akan lebih terfokus pada petani karet. Tiga lokasi menjadi lokus untuk memotret emik Sensus Pertanian 2023 di di Kabupaten Batang Hari, yakni Desa Penerokan dan Desa Petajen di Kecamatan Bajubang, serta Kelurahan Sridadi di Kecamatan Muara Bulian. Penentuan dua desa dan satu kelurahan sebagai tempat penggalan sumber data dilakukan secara *purposive*, disertai eksplorasi kepustakaan hasil kajian. Lima poin berikut ini menjadi pertimbangan pemilihan ketiga lokasi tersebut.

1. Terdapat banyak perkebunan karet rakyat di sana (Yuvanda & Rosita, 2018).

2. Terjadi peralihan komoditas dari karet menjadi sawit secara masif (sawitisasi) sebagai akibat dari anjloknya harga jual yang membuat petani bernasib suram (Tambunan, 2022).
3. Sawitisasi pada kebun karet telah menurunkan produktivitas karet di perkebunan rakyat (Putri, 2023; Rachmawan, 2023).
4. Darurat penyelamatan karet Jambi khususnya di Kabupaten Batang Hari akibat anjloknya harga komoditas karet yang berkepanjangan (Tambunan, 2023a).
5. Banyak terjadi peralihan fungsi kebun karet menjadi lahan sawit dan pemukiman (Wulandari & Kemala, 2017).

Kelima indikasi tersebut menjadi ancaman bagi nasib petani dan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Batang Hari. Kabupaten yang tersohor dengan karetnya akan tenggelam dalam catatan historis saja, karena karet tidak lagi menjadi komoditas pilihan untuk ditanam oleh petani. Selain itu, lambang Kabupaten Batang Hari yang tersemat pada perisai bergambar pohon karet yang disadap hanya jadi kenangan tanpa ada lagi jejak tanam karet di tanah pusaka “*Serentak Bak Regam*” (Gambar 6.3).

C. Inferioritas Komoditas Getah Karet: Nasib Suram Karet Rakyat

Dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini, jejak euforia karet sebagai komoditas unggulan mulai menurun seiring dengan terjadinya kejatuhan harga. Isu harga anjlok ini disinyalir akibat mutu kualitas karet yang dihasilkan petani tidak sesuai dengan standar mutu bahan baku untuk pabrik pengolahan karet. Situasi ini membuat karet tidak lagi menjadi komoditas tanam yang menguntungkan bagi petani dan memengaruhi rasionalitas mereka untuk beralih ke komoditas tanam yang lebih menguntungkan. Petani secara perlahan sudah beralih ke tanaman sawit yang secara kalkulasi ekonomi lebih menguntungkan dan mudah pengerjaannya.

Nasib karet seakan terhempas akibat anjloknya harga dan permainan harga di tingkat pembeli (Tambunan, 2022). Permainan harga ini biasanya dikendalikan oleh struktur besar di luar kendali pemerintah, yakni “pembeli utama” yang mengontrol harga karet di tingkat ekspor—untuk melemahkan harga ekspor komoditas (Sumarny, 2023). Selain itu, indikasi pelemahan karet dapat juga terlihat dari penyerapan karet rakyat di dalam negeri yang kurang akibat fluktuasi harga pada tingkat petani/rakyat, dan minimnya gerakan masif peremajaan kebun karet rakyat.

Terkait penguatan harga karet rakyat, pemerintah telah melakukan beberapa penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi permasalahan anjloknya harga karet rakyat. Salah satunya yakni penguatan kerja sama International Tripartite Rubber Council (ITRC) beserta negara-negara pengeksport karet untuk mendorong peningkatan harga ekspor karet yang adil dan *remunerative*. Beberapa langkah yang dilakukan ITRC di antaranya menerapkan *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS), *Demand Promotion Scheme* (DPS), dan *Supply Management Scheme* (SMS) serta membentuk Regional Rubber Market (RRM) dan ASEAN Rubber Council (ARC) (Dirjen Perkebunan, 2019). Sementara itu, solusi untuk mengatasi anjloknya harga karet di tingkat petani rakyat adalah melalui intervensi pemerintah dalam memperluas akses pasar ekspor melalui kerja sama internasional yang diharapkan dapat memperkuat dan mengangkat harga karet nasional.

Terlepas dari usaha-usaha tersebut, pamor getah karet sudah terlanjur meredup, dan lahan karet telah masif tergantikan dengan sawit. Hamparan kebun karet di Kabupaten Batang Hari mulai berganti “wajah”, banyak kebun karet dibiarkan mati dan tertindih dengan tanaman sawit (Gambar 6.4). Terselip bibit sawit sebagai tanaman penyerta di kebun karet. Hal ini dilakukan petani secara terpaksa, tidak lain atas dorongan motif ekonomi. Demi bertahan hidup, diselipkan bibit sawit di antara sela tanaman karet sebagai langkah terakhir penyelamatan hidup petani (Tambunan, 2022).



Foto: Reza (2023)

Gambar 6.4 Potret Kebun Karet yang Telah Direposisi Kebun Sawit di Bajubang, Batang Hari

Napitupulu et al. (2014) menyuratkan bahwa hilirisasi karet di Provinsi Jambi memiliki prospek cerah untuk petani karet rakyat. Pemajuan hilirisasi karet seharusnya tidak boleh menyampingkan faktor lingkungan strategis (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman) yang dapat memengaruhi pengembangan industri hilir pengolahan karet. Resiliensi petani karet untuk tidak mengganti karet ke sawit perlu ditunjang produksi dan produktivitas yang diakomodasi dan diproteksi oleh pemangku kepentingan sebagai upaya penyelamatan tanaman karet. Beberapa langkah dapat dilakukan sebagai 'sekoci penyelamat karet' dari keterpurukan, di antaranya penyediaan bibit unggul tanaman karet yang resistan hama dan penyakit tanaman sebagai akselerasi produksi karet dengan peremajaan karet rakyat dan jaminan keringanan pembiayaan modal serta keterbukaan akses harga oleh petani (Syarifa et al., 2023). Potret petani yang masih bertahan dan optimis dengan karet di tengah gempuran konversi perkebunan karet ke sawit (lihat Gambar 6.5.a dan 6.5.b) adalah asa untuk mengembalikan kejayaan karet di Kabupaten Batang Hari.



Keterangan: (a) Asmiyanti yang masih bertahan dengan karet di tengah gerakan masif peralihan petani ke sawit; (b) Waris Sugiri di Penerokan, Batang Hari, penyadap karet yang tetap optimis walaupun harga menukik tajam

Foto: Reza (2023)

Gambar 6.5 Potret Petani Kebun Karet Rakyat di Pemayang Batang Hari

Bangkrutnya korporasi pengolahan karet di Jambi disinyalir juga memperburuk sirkulasi harga getah karet di petani. Pasokan bahan baku karet yang terbatas, membuat pabrik-pabrik pengolahan karet melakukan penutupan yang berujung PHK massal pekerja. Setidaknya ada empat pabrik besar di Jambi yang terancam gulung tikar, yakni PT Angkasa Raya, PT Djambi Waras, PT Remco, PT Batanghari Tembesi, dan PT Hoktong (Suratno, 2023). Kekurangan bahan baku dan anjloknya harga karet membuat petani enggan untuk menyadap karet. Kejayaan karet di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batang Hari akan tenggelam dan mengendur seiring tidak ada jaminan kestabilan harga karet untuk petani. Petani yang menjadi pucuk hulu menangis dan menderita, sedangkan pabrik pengolahan karet yang menjadi ujung hilir juga menjerit karena ketiadaan bahan baku. Penderitaan petani karet atas keanjlokan harga ini juga diperparah adanya indikasi praktik permainan tengkulak atau tauke yang melakukan monopoli sirkulasi dan relasional harga dengan korporasi di tingkat petani (Muksit, 2017; Riyadi, 2021).

Waris Sugiri merasakan kejatuhan harga karet saat ini. Dulu, ia sempat merasakan karet dihargai Rp30.000,-/kg. Sekarang, karet dihargai tidak lebih dari Rp4.000–6.000/kg. Jika disandingkan dengan nilai tukar beras, harga satu kilogram sudah tidak dapat dengan harga karet yang saat ini. Apalagi, proses penyadapan karet hingga pengolahan dengan *cuko* tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh petani. Ditambah lagi ketika hujan, petani tidak dapat menyadap karet. Nasib petani makin suram dengan kejatuhan harga karet. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sawit dapat menjadi penyelamat petani untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Tidak hanya itu, kesuraman akan masa depan karet semakin menegaskan inferioritas getah karet di Jambi. Hal ini diperparah pada praktik pengolahan karet oleh petani dengan pemberatan yang tidak wajar. Artinya petani lebih senang mengejar berat ketimbang kualitas. Berat diakali melalui praktik culas. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengakuan Waris Sugiri berikut ini.

“... sudah biasa di petani ngakali berat karet dewek dengan sampah kulit kayu (karet kotor), biak beratnyo besak pas nimbang. Sudah caro dari jaman belando kek gini, petani disiko lebih senang kejar berat biak untung besak”

“... sudah biasa di petani akali berat karet sendiri dengan sampah kulit kayu (karet kotor), biar karet berat ketika ditimbang. Dari zaman Belanda sudah seperti ini, petani di sini lebih senang kejar berat biar dapat untung besar” (wawancara personal, 14 Juni 2023).

Harga karet yang makin merosot tajam disinyalir membuat petani tidak semangat untuk bertumpu pada karet. Penurunan kualitas dan kuantitas karet diduga sebagai penyebab kemerosotan harga di tingkat petani sehingga karet dihargai murah oleh pembeli. Belum lagi ketika sudah memasuki standar pabrik, karet-karet kotor hasil produksi petani tidak sepenuhnya dapat diolah. Alhasil, karet kotor

hasil praktik lazim yang culas membuat harga karet di tingkat petani cenderung anjlok dan tidak dapat dipakai pabrik. Proyeksi imajiner longitudinal sudah dapat memperkirakan bahwa akan semakin sedikit petani yang bertahan di karet. Bisa jadi, petani karet yang beralih ke sawit makin masif sehingga karet Batang Hari tenggelam suram tinggal memori kejayaan yang tersurat tinggal dalam catatan sejarah. Inferioritas getah karet di Kabupaten Batang Hari semakin menegasakan nasib suram petani yang pada akhirnya tercekik harga jual yang tak sebanding lagi dengan biaya produksi.

D. Upaya Pendataan Sensus Pertanian

Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Batang Hari menyisipkan cerita menarik, termasuk cerita perjuangan para punggawa garis depan BPS untuk mendapatkan data sah di lapangan. Tidak hanya berbekal kuesioner untuk mendata, pengalaman dan strategi komunikasi perlu menjadi kekuatan dari petugas pencacah lapangan (PPL) ataupun petugas pemeriksa lapangan (PML). Cerita-cerita seperti, misalnya harus membelah semak belukar dan menapaki rentang hutan menjadi tantangan tersendiri bagi PPL dan PML dalam pendataan. Risiko diterkam hewan buas ataupun sakit, bagi PPL dan PML adalah spirit perjuangan untuk mendapatkan data. Belum lagi, mereka harus berhadapan dengan keengganan masyarakat untuk didata adalah sederet kisah pilu yang ditanggung PPL dan PML di lapangan.

Bagi PPL dan PML, Sensus Pertanian 2023 ini tidak sekadar hanya mengumpulkan dan mencatat data pertanian. Ada titipan harapan dari pendataan dari para petani untuk dapat terakses mudah dalam seluruh program pertanian dari pemerintah. Keterbukaan data akan kondisi rumah tangga pertanian menjadi celah untuk mengetahui kondisi riil pertanian di Bumi *Serentak Bak Regam* Kabupaten Batang Hari. Tidak hanya cerita pilu, cerita-cerita sukacita juga terpatri dalam transkrip catatan emik perjuangan pendata sensus pertanian. Catatan emik dari proses pendataan Sensus Pertanian 2023 mengemukakan sukacita para PPL dan PML di Kabupaten Batang Hari. Selain bangga dapat mengambil bagian dalam pendataan nasional, mereka juga men-

dapatkan apresiasi kesejahteraan (insentif) yang bagi mereka cukup untuk penghidupannya. Kebanggaan ambil bagian dalam pendataan juga menjadi “ruang pengabdian” bagi PPL dan PML untuk dapat terukir sebagai garda depan yang mencatat pertanian Indonesia demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Upaya keras sebagai garda depan pejuang pendata bagi BPS, memang menempatkan PPL dan PML sebagai mitra kerja kolaboratif. Mitra kerja ini terikat dalam *mutual benefit*, yaitu BPS mendapatkan data sensus, dan PPL serta PML memperoleh apresiasi berupa insentif.

Pendataan di lapangan memang banyak menimbulkan pelbagai gejala penolakan dari masyarakat. Antisipasi dari BPS untuk meredam gejala tersebut dan melakukan “infiltrasi” untuk mengungkapkan data sebenarnya adalah dengan merekrut para PPL dan PML yang asli atau berdomisili dari lokus sumber data. Hal ini dilakukan agar komunikasi dan interaksi dalam proses pendataan dapat lebih mudah dijalankan. PPL dan PML yang terpilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait karakter sosial budaya dari masyarakat yang menjadi sumber data. Selain itu, gerak gestur dan cara berkomunikasi menjadi kapasitas tambahan yang harus dimiliki oleh PPL dan PML. Komunikasi dan interaksi antara PPL dan PML dengan masyarakat menjadi poin penting untuk dapat infiltrasi menangkap data.

Insting menangkap data tidak hanya terpatri pada kuesioner saja, tetapi bagaimana PPL dan PML mampu menerjemahkan kuesioner ke bahasa yang lebih diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Kemampuan komunikasi dalam proses pendataan adalah bagian vital untuk dapat menangkap realitas pendataan dari sumber data, yakni masyarakat. Cara observasi atau pengamatan langsung juga menjadi insting bagi PPL dan PML untuk mendapatkan validasi data. Misalnya, ketika PPL atau PML menanyakan salah satu butir luas lahan pada kuesioner, dengan pembawaan bahasa yang lebih ringan dan tidak langsung kepada responden seperti “Sepertinya kebun kita luas ya, Bapak”. Bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Batang Hari, pengungkapan aset terutama luas lahan cenderung sensitif dan tidak

terbuka. Oleh karena itu, perlu cara berkomunikasi yang tidak langsung menanyakan luas lahan tetapi digiring dahulu pada pertanyaan yang bersifat personal, seperti menanyakan kabar keluarga, atau bagaimana harga komoditas pertanian terkini. Pertanyaan personal terkait kehidupan petani cenderung akan lebih lantang disuarakan oleh petani ketika ditanya sesuai butir di kuesioner sensus pertanian. Pertanyaan personal ini juga tidak sembarang PPL dan PML untuk ditanyakan kepada responden petani, perlu kedekatan emosional PPL dan PML dengan petani yang menjadi sumber data.

Tantangan lainnya adalah banyak responden yang takut untuk diwawancarai. Hal ini berkaitan dengan ketidakterbukaan petani dalam Sensus Pertanian. Ketidakterbukaan ini lebih kepada adanya rasa malu, takut, atau minder, terlebih yang ditanyakan terkait aset kepemilikan pertanian dan peternakan dari petani. Oleh karena itu, PPL dan PML memerlukan pendekatan personal untuk mendapatkan data. Pendekatan personal ini dibangun dari proses interaksi yang lama, terlebih yang menjadi PPL dan PML sudah dikenal banyak oleh warga setempat. Proses pencatatan data juga memerlukan kejelian dan konsentrasi penuh dari PPL dan PML dalam menangkap realitas angka yang disampaikan oleh responden (lihat Gambar 6.6). Realitas



Foto: Reza (2023)

Gambar 6.6 Proses Pendataan Sensus Pertanian oleh PPL (Prina) dan PML (Sugiman) di Rumah Petani Karet di Desa Penerokan

yang ditangkap tidak hanya sekedar numerik belaka, tetapi realitas di balik numerik dengan pengamatan langsung juga menjadi validitas dan reliabilitas data. Misalnya, pertanyaan terkait hewan ternak ataupun luas lahan yang dimiliki, petani biasanya tidak terbuka terkait luas lahan dan jumlah hewan ternak, PPL dan PML biasanya dapat mengamati langsung atau mendapatkan informasi dari kerabat atau tetangga responden terkait hal yang ditanyakan.

Penguasaan bahasa lokal (bahasa Melayu Jambi dan bahasa Jawa) menjadi salah satu kemampuan komunikasi yang perlu dimiliki oleh PPL dan PML. Strategi akomodasi komunikasi menjadi cara jitu untuk memperoleh keterbukaan data dari responden. Responden adalah mitra tutur yang dalam proses komunikasinya memerlukan pendekatan secara emosional. Strategi akomodasi komunikasi dalam pengamatan emik pada Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Batang Hari dipraktikkan oleh PPL dan PML. Strategi akomodasi komunikasi ekspresi emosional secara tampak dan gamblang dilakukan oleh PPL dan PML. Perlu diketahui bahwa strategi akomodasi komunikasi ekspresi emosional yang digaungkan oleh Giles (2016) serta Giles dan Marco (2016) sebagai teknik komunikasi dan negosiasi personal, yaitu strategi ini berfokus pada kebutuhan penutur, atau dalam hal ini adalah responden. Ada pertimbangan perasaan antara penutur (PPL atau PML) dan mitra tutur (responden), PPL atau PML biasanya akan terlibat memunculkan perasaan yang sama dirasakan dengan responden, dengan ekspresi emosi, memberikan rasa kenyamanan bercerita, dan menyederhanakan penjelasan. Komunikasi dengan pendekatan ini sebagai upaya cepat untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial mitra tutur (responden). Gesekan atau kesalahpahaman cenderung dapat muncul ketika peserta tutur tidak memperhatikan cara strategi komunikasi yang tepat.

Praktik komunikasi akomodasi dengan strategi ekspresi emosional dirasakan efektif untuk penggalian data Sensus Pertanian. Jika dikaitkan dengan temuan emik dari proses PPL dan PML melakukan pencatatan sensus pertanian, bahwa ruang interaksi (rumah ataupun kebun) yang menjadi lokus pengambilan data perlu dipilinkan dalam pengetahuan PPL dan PML, termasuk membuka wacana interaksi.

Tidak perlu menampakkan kekakuan gerak ataupun gestur ketika menyampaikan maksud sensus pertanian. Cukup dengan bahasa sederhana dan merasakan apa yang dipendam oleh responden (petani), PPL dan PML sudah dapat menembus ketidakterbukaan responden dalam menyampaikan informasi terkait pertanian. Adaptasi PPL dan PML dalam merasakan langsung pada situasional yang sama dengan kekhawatiran petani menjadi langkah jitu untuk mendapatkan data selama sensus pertanian.

E. Jerit Nelangsa Impitan Petani Karet Batang Hari: “Lesu Nian Hargo Getah Karet”

Pemandangan perjalanan dari Kota Jambi ke Kabupaten Batang Hari menampakkan corak keramaian dan kepadatan, baik penduduk, hutan, maupun mobilitas moda transportasi. Sisi kanan kiri penuh dengan hamparan kebun sawit seluas mata memandang. Keramaian dan kepadatan tadi juga berhilir mudik truk bertonase besar membawa batu bara dari Batang Hari dan sekitarnya. Menariknya, jalan berlubang menjadi sentuhan bergelombang dalam perjalanan ke Bulian Kabupaten Batang Hari. Celetuk para penumpang di kendaraan, seakan dapat memproyeksikan antrean mengular truk batu bara dan galiannya yang akan menghilangkan mata pencaharian petani:

“...Gilo nean eksploitasi batu bara ni, dak lamo lagi galian—galian batu bara menggantikan kebun—kebun karet dan sawit, dak tahu lagi nasib petani kek mano limo tahun lagi..”

“...gila benar eksploitasi batu bara ini, tidak lama lagi galian—galian batu bara menggantikan kebun—kebun karet dan sawit, tidak tahu lagi nasib petani seperti apa lima tahun lagi...” (Sekehumit pengalaman empiris dalam perjalanan ke Muara Bulian, Batang Hari tanggal 13 Juni 2023).

Keserampangan truk batu bara bertonase besar menjadi penguasa jalanan yang mengerdilkan kendaraan pribadi, sehingga tak berdaya ketika berhadapan dan terhimpit pada ruang jalanan yang mema-

cetkan. Persoalan lain muncul menerima cerita-cerita pilu dari para petani karet di Kabupaten Batang Hari. Batang Hari dengan simbol filosofis pohon getah karet yang tersadap seolah tertelan hanya sebagai romantisme masa lalu. Banyak para pesohor masyarakat di Batang Hari begitu mengelu-elukan bahwa kabupaten ini menjadi sentra kejayaan karet sejak era kolonial.

Kesepian dan kesunyian kebun karet hanya menjadi hutan tak bertuan tani. Kebanyakan tani dari kelakar mereka bahwa “buat apa lagi nyadap getah, perbandingan harga tidak lagi menggapai 1 kg beras”. Lebih lanjut, petani dengan sepelanya telah meninggalkan habituasi “menyadap getah karet” (mengupas kulit pohon karet) untuk setetes getah akibat getah tak lagi bernilai ekonomi tinggi. Putihnya getah karet ternyata meninggalkan ketakutan bagi para petani untuk melanjutkan fokus pada pemeliharaan. Hal ini tidak terlepas dari jatuhnya harga dan tidak bisa dijadikan pengharapan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“...dulu bae hargo karet tu biso sekilo beras perumpamaannya, sekarang 1 kg getah dak dapat lagi beras, kebutuhan sudah tinggi, mau dak mau kami mending ke sawitlah. Mungkin sepuluh tahun kedepan getah Batang Hari khusus Penerokan tinggal cerita bae...”

“...dulu harga karet itu bisa sekilo beras perumpamannya, sekarang 1 kg getah tidak dapat lagi beli beras, kebutuhan sudah tinggi, mau tidak mau kami lebih baik ke sawit saja, mungkin sepuluh tahun ke depan getah Batang Hari khusus Penerokan tinggal cerita saja...”
(Komunikasi personal, Ahmadi, 14 Juni 2023).

Karet tidak lagi menjadi komoditas yang dapat jadi tumpuan pengharapan hidup bagi petani. Petani dengan lantang berani menyampaikan bahwa karet tidak lagi ada harga yang pantas untuk membuat dapur tetap mengepul. Ini adalah perumpamaan harga karet yang 1 kg hanya seharga Rp6.000 dirasa tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Tidak hanya itu, karet saat ini hanya menjadi tanaman penyerta di antara sawit, menunggu layu dan mati dimakan sawit dan umur.



Foto: Reza (2023)

Gambar 6.7 Tetesan Getah Karet Terhenti Tak Mengisi Batok Kelapa

Butuh proses panjang dan usaha yang telaten dalam penantian setetes getah karet tergumul dalam balutan bobot ons (lihat Gambar 6.7). Butuh puluhan bahkan ratusan pohon karet yang disadap untuk mendapatkan bobot kiloan dari getah. Proses produksi yang panjang dan kerja keras petani tidak terbayarkan dengan harga jual getah karet. Penurunan drastis harga getah tidak sebanding dengan pengorbanan waktu dan tenaga dalam proses produksi karet di kebun. Petani seakan terpaksa memanen getah karet yang harganya saja tidak lagi melampaui sekilo beras. Kebutuhan hidup yang tinggi tidak berimbang dengan pendapatan yang diperoleh petani karet. Kerja keras petani mengolah karet dari pohon hingga menjadi lateks tidak terbayarkan sesuai harga, apalagi proses pemerolehan lateks memakan waktu berminggu-minggu. Nominal rupiah yang diperoleh dari harga karet tidak menentu, antara Rp400.000–600.000 dalam dua minggu dirasakan tidak dapat memenuhi bakul nasi keluarga dan kebutuhan vital hidup lainnya. Biaya hidup yang tinggi membuat kebanyakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

petani menahan asanya untuk bermimpi menyekolahkan anak hingga ke jenjang lebih tinggi. Hal ini terurai lantang dalam lisan seorang petani karet perempuan yang lansia, Tugirah (lihat Gambar 6.8):

“...cuman dari karet ikolah hidup aku bergantung. Alhamdulillah dari karet biso hidup, tapi untuk memenuhi kebutuhan yo dak cukup lah kalo cuman dari karet ko. Apalagi nasib aku ni biso dikato sangat prihatin lah, kerjo di kebun orang, hasilnya pun dak seberapa...”

“...cuman dari karet ini hidup saya bergantung. Alhamdulillah dari karet bisa hidup, tapi untuk memenuhi kebutuhan sepertinya tidak cukup kalau hanya dari karet ini. Apalagi nasib saya ini bisa dikatakan sangat prihatin, kerja di kebun orang, hasilnya tidak seberapa...” (Komunikasi personal, Tugirah, 14 Juni 2023).



Foto: Reza (2023)

Gambar 6.8 Tugirah, Perempuan Lansia yang Tetap Menyadap Demi Setetes Getah Karet



Foto: Reza (2023)

Gambar 6.9 Aktivitas Buruh Ganco Karet yang Memindahkan Karet Hasil Pelelangan di KUD BERDIKARI Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang

Jerit nelangsa tidak hanya dirasakan oleh petani karet semata. Buruh ganco karet yang beroperasi di pasar lelang karet KUD Berdikari di Desa Penerokan (lihat Gambar 6.9) merasakan penurunan tonase karet dari desanya. Biasanya, petani karet rutin per 1–2 minggu ramai ke pasar lelang untuk menjual karetnya. Semakin hari, petani karet merasa tempat pelelangan semakin sepi; sudah banyak petani karet yang beralih ke sawit. Hal ini sejalan dengan temuan Muksit (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan petani sawit lebih baik dari petani karet di Kabupaten Batang Hari. Buruh ganco yang bekerja ketika pasar lelang dibuka juga berharap pasokan karet Penerokan bisa kembali banyak dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi buruh angkut. Di samping itu, sektor pertanian dirasa memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja (Ruchba, 2020).

F. Stagnasi Hulu ke Hilir Pertanian Karet: Petani Karet di *Stresor* Tauke

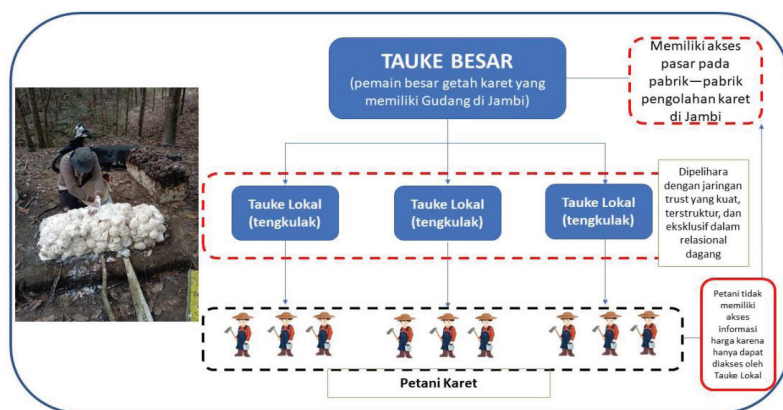
Karet tidak lagi menjadi komoditas yang dapat jadi tumpuan pengharapan hidup bagi petani. Kondisi karet di Kabupaten Batang Hari Jambi sudah tidak lagi menjadi rantai pasok yang dapat menyambungkan

dari sektor hulu ke sektor hilir dalam pertanian. Kinerja produksi karet perlu diutamakan dalam pengembangan dan peningkatan aktivitas budi daya karet dari sektor hulu (di petani penyadap karet) ke sektor hilir (pabrik pengolahan karet atau agroindustri) untukantisipasi dan penanggulangan kelangkaan karet (Pane et al., 2017). Terlebih, penguatan sektor hulu ke hilir di pertanian sebagai pemantik sumber perekonomian dapat menjadi roda distribusi pendapatan rumah tangga pertanian dan nonpertanian (Pratiwi et al., 2017).

Pilu petani tidak hanya pada harga yang jatuh. *Stresor* (tekanan) dari ulah tengkulak lokal atau tauke lokal dengan serampangan dapat memonopoli harga. Petani seakan tidak memiliki daya tawar untuk harga hasil getah karet mereka. Mereka seakan dapat ditekan dan diatur oleh ulah tauke lokal. Tauke lokal bertindak sebagai penghubung dalam rantai pasar komoditas karet di tingkatan petani. Mereka menjadi penyuplai kebutuhan karet untuk memenuhi gudang tauke besar di Jambi. Perlu diketahui, sebagian besar tauke adalah mereka yang beretnis minoritas dan biasanya berhasil dalam aktivitas ekonomi sebagai penguasa pasar di Jambi (Ginting & Yusnaini, 2020; Hidayat, 2012). Tauke besar ini memainkan peran penting dalam menguasai dan mengatur harga pasaran karet di tingkat petani. Jaringan mereka begitu kuat dalam memastikan rantai pasokan karet dari petani kecil di Batang Hari.

Tauke lokal bertindak ibarat “kompeni” di mata petani, mereka dapat dengan leluasa menentukan harga getah di petani, dan petani yang inferior dalam posisi tawar tertekan dan mau tidak mau harus menjual getah karet mereka ke tauke lokal ini. Relasi tauke dan petani biasanya berbentuk patron-klien yang terdapat mekanisme interaksional berlandaskan loyalitas, saling percaya, dan solidaritas (Anita et al., 2014). Walaupun dari sisi positifnya, relasi patron (juragan/tauke)-klien (petani karet) sebagai lingkaran partisipasi kolektif (pelibatan banyak pihak sumber pundi rupiah) yang menciptakan relasi pekerjaan dapat menjadi sumber pundi rupiah bagi yang terlibat dalam lingkaran partisipasi tersebut. Namun, sisi negatif dari patron-klien, yakni sebagian besar petani yang terjebak utang

tanpa agunan menjadi sasaran tauke lokal, yang dengan kuasanya seakan memaksa para petani tersebut harus menjual getah kepada mereka. Keterpaksaan ini menjadi realitas yang berkelindan dalam lingkaran yang membuat petani tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Sirkulasi relasional dagang antara petani, tauke lokal, dan tauke besar hanya sebatas pada jual beli. Petani tidak memiliki akses informasi pada harga pasaran, akibatnya tauke lokal sebagai perantara informasi harga dapat memainkan kehendak penentuan harga bersama segelintir tauke besar dalam menekan harga pada petani (lihat Gambar 6.10).



Sumber: Reza (2023)

Gambar 6.10 Sirkulasi Relasional Dagang Tauke Besar, Tauke Lokal, dan Petani Karet

Dalam struktur agensi menyadur penjelasan Kinseng (2017) yang dihubungkan dengan gambar di atas, pengaruh posisi agensi ter-bawah dan inferior dalam relasional aktivitas ekonomi adalah petani (Seruni & Somantri, 2018), sedangkan struktur didominasi oleh tauke sebagai reproduksi *rules* (aturan) dalam dialektika kontrol ekonomi. Relasi dagang petani seolah lemah dengan praktik kontrol atas struktur kuasa pemilik kapital terutama penguasa korporasi (Manzilati, 2011). Dalam konteks ini, penguasa struktur korporasi bisa bermetamorfosis menjadi tauke. Petani tidak memiliki pengaruh kuasa atas produksi

getah yang dihasilkannya. Petani seakan tergantung pada pembelian tauke-tauke lokal yang memang secara simultan keliling untuk mengangkut getah yang siap produksi. Realitasnya, memang petani tidak lagi menanggung biaya pengangkutan dan buruh ganco, tetapi harga menjadi kendali penuh dari tauke lokal. Terlebih ada indikasi praktik tani “nakal” yang menyiasati bobot karet (diisi air dan sampah) sebagai pemberat menjadikan harga karet semakin rendah. Tidak hanya itu, tauke menyadari bahwa petani adalah sumber uang bagi mereka karena posisinya sebagai pemasok getah karet.

Beberapa temuan riset sebelumnya menjelaskan bahwa juragan atau tauke (patron) dikonstruksikan dalam relasi patron-klien, selalu memosisikan petani (klien) dilemahkan untuk ditindas dalam belunggu struktur kuasa ekonomi akibat perbedaan kedudukan dan akumulasi penguasaan kepemilikan modal (Budiyanti & Dharmawan, 2018; Ubaidillah & Kusairi, 2017). Tidak jarang, dampak relasi patron-klien dalam praktik kehidupan petani menguak realitas yang harmonis saling tolong menolong serta menghargai antara petani dan tauke (juragan) (Imaniar & Brata, 2020). Di sisi lain, berdasarkan temuan lapangan, keterlekatan tauke dan petani dalam relasi patron-klien dikonstruksikan dalam relasi pinjaman modal. Pinjaman modal tanpa jaminan dan bunga disinyalir sebagai perekat yang menekan petani oleh kuasa tauke. Bagaimanapun, petani sangat bergantung pada tauke sebagai pembeli dalam rantai penjualan getah karet. Praktik inilah yang membuat petani semakin teralienasi, ‘terasing dari hasil produksinya’, tidak berdaya, dan tidak memiliki kuasa atas hasil produksi yang mereka miliki dalam penentuan harga. Penekanan pentingnya relasional patron-klien berdaya sebagai kuratif untuk mengurangi ketidakberdayaan petani (klien) menjadi “kuat” dalam posisi daya tawar yang sama di hadapan patron (tauke). Relasional patron-klien berdaya dengan landasan interaksi sosial yang egaliter, asertif, dan perimbangan akses informasi dalam keterbukaan pembentukan harga karet sehingga petani tidak lagi inferior dalam daya tawar penentuan harga.

Persoalan lainnya terjadi saat harga tidak sesuai harapan petani. Petani di Kabupaten Batang Hari secara masif menebang dan mengonversikan tanaman karet menjadi sawit. Ratusan bahkan ribuan batang karet dibabat habis untuk digantikan dengan sawit. Sesuai takdir hukum ekonomi, bagi petani sendiri, praktik mengejar untung sebesar-besarnya dan mengurangi risiko kerugian adalah jalan keluar dari keterpurukan tenggelamnya pamor getah karet sebagai komoditas yang bernilai ekonomi. Padahal, dalam memori kolektif petani, harga karet sempat menyentuh nominal tertinggi menembus harga Rp30.000/kg. Berbanding terbalik dengan sekarang, harga karet terjun bebas hanya menjadi Rp6.000/kg. Lebih lanjut, harga tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan keras petani karet.

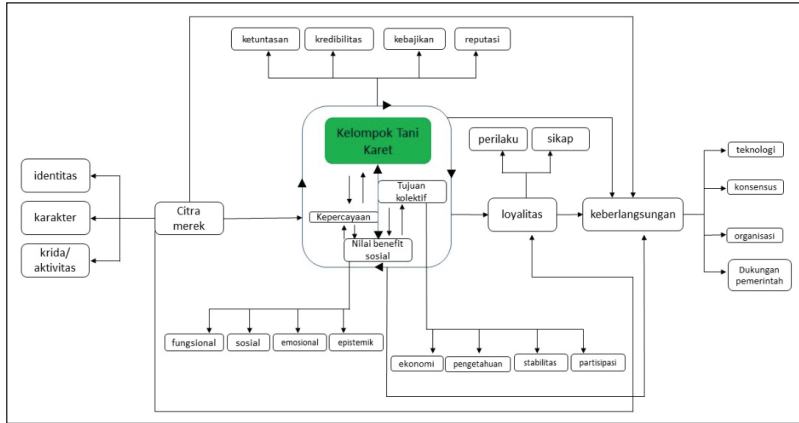
Penguatan hulu dan hilir sebagai nilai tambah agroindustri karet menjadi prioritas dalam jaminan kontinuitas mesin ekonomi nasional. Stagnasi sektor hulu dan sektor hilir pada agroindustri karet (penjembatan pengolahan hasil pertanian) sebagai rantai pasok produk dapat mengalami turbulensi penyediaan produk. Jika penyediaan produk siap pakai dan setengah jadi mengalami kelangkaan akibat terputus dari pasokan sektor hulu, sektor hilir dapat terdestruktif. Di samping itu, Syafruddin dan Darwis (2021) turut menyatakan penguatan agroindustri dan agrobisnis sebagai penggerak mesin ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan penyerapan bahan baku dari petani yang bermuara pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Sementara itu, sawitisasi menjadi ancaman eksistensi karet di Kabupaten Batang Hari. Pembukaan lahan dan deforestasi secara masif oleh petani diganti dengan tanaman sawit (sawitisasi) menjadi jeratan yang merusak keseimbangan lingkungan (kiamat ekologis) serta mendiskontinuitas produksi tanaman komoditas pertanian lainnya (Ade, 2020; Fasya et al., 2022). Realitas sawitisasi di Kabupaten Batang Hari menegaskan sebuah ancaman karet sebagai komoditas pertanian andalan. Kejatuhan harga dan rasionalitas petani yang mengalkulasikan untung rugi bagaikan penyulut semakin terhimpitnya perkebunan karet rakyat di tengah gerakan masif sawitisasi.

G. Pentingnya Keberpihakan pada Petani Karet: Eliminasi Kegagalan Petani dan Tawaran Terobosan Skema Kerja Kolektif Pertanian Karet Berkelanjutan

Solusi kelangkaan bahan baku hanya dapat dijaminakan melalui keberlanjutan pasokan bahan baku sebagai strategi daya saing usaha (Bismala et al., 2018). Logika ekonomi menasbihkan bahwa keseimbangan harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran (Muflihin, 2019). Kelangkaan pasokan karet di tingkat petani lokal akibat dari ketidakstabilan harga jual. Relasional sosial petani dan entitas tanaman yang dibalut rasionalitas ekonomi, memosisikan petani sebagai pelaku yang akan mencari keuntungan dari setiap komoditas yang ditanamnya (Pamungkas, 2020; Yuwono et al., 2017). Komoditas tanam yang menguntungkan secara ekonomi selayaknya tidak melemahkan kesejahteraan rumah tangga petani. Posisi petani kecil yang inferior acapkali dalam relasional ekonomi dapat selalu di-*stresor* oleh pemilik modal atau juragan.

Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat menjadi wadah penjamin dalam pemberdayaan program pertanian yang berkelanjutan (Sahidin, 2021). Partisipasi petani dalam relasi kolektif akan kuat ketimbang hanya mengandalkan kekuatan personal petani itu sendiri. Daya tawar petani juga semakin kuat terhadap struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika tergabung dalam kelompok petani (Iryana, 2018). Kegagalan petani dapat tereliminasi dalam struktur kolektif kelompok petani yang memiliki akumulasi modal dan kekuatan sosial yang terikat serta dapat dimobilisasi petani untuk peningkatan kualitas hidup (Prasetyono et al., 2017; Purwandari, 2011). Petani yang tergabung dalam kelompok tani cenderung memiliki kekuatan yang superior dalam menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Selain itu, petani yang tergabung dalam kelompok petani cenderung lebih kuat untuk daya tawar ekonomi.



Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi Nuanphromsakul et al. (2022)

Gambar 6.11 Tawaran Skema Kerja Kolektif Pertanian Karet Berkelanjutan Berbasis Kelompok Tani

Keberpikahan pada petani menjadi kunci dalam pertanian berkelanjutan. Tawaran skema pertanian karet berkelanjutan berbasis kelompok tani menjadi eliminasi kegagalan petani. model kerja kolektif yang termanifestasikan dalam wadah kelompok tani dapat menjadi daya tawar kuat petani dalam menghadapi situasional yang kontingensi terutama fluktuasi harga komoditas pertanian. Adopsi dan modifikasi kerangka kerja dari Nuanphromsakul et al. (2022) sebagai inisiasi basis tawaran model pertanian karet berkelanjutan yang dibenturkan dengan temuan lapangan, senyatanya perlu dimotori kekuatan kolektif, yakni kelompok tani karet (lihat Gambar 6.11). Kelompok tani ini sebagai wadah kolektif berlandaskan pada tiga prinsip, yakni adanya kepercayaan, tujuan kolektif yang jelas dan nilai benefit sosial. Kelindan ketiga prinsip ini dapat menjadi pelumas interaksi sosial kolektif petani untuk dapat memperkuat daya resiliensi dan penjaminan keberlangsungan pertanian. Praksis dari tawaran model ini lebih berorientasi pada kerja kolektif dan interaksional dalam kelompok pertanian.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nilai benefit sosial sebagai penyangga digawangi oleh empat nilai dasar. *Pertama*, fungsionalitas sosial yang berarti ada aktivasi modal pertanian yang fungsional terhadap kesejahteraan petani. *Kedua*, sosial kolektif yang berarti kegotong-royongan dan kerja sama. *Ketiga*, nilai dasar ini kemudian bertransformasi menjadi ikatan emosional bersama (keinginan sejahtera bersama-sama dan terikat perasaan senasib sepenanggungan). *Keempat*, epistemik yang berarti akumulasi keyakinan dan pengetahuan kolektif yang prinsipal dan normatif sebagai dasar kontrol perilaku anggota dalam kelompok tani.

Lewat skema di atas (lihat Gambar 6.11), kelompok tani perlu penegasan tujuan kolektif yang jelas. Tujuan kolektif ini setidaknya didasari dari empat basis, yakni *pertama*, adanya tujuan ekonomi yang dapat secara bersama mengangkat kesejahteraan anggota yang tergabung dalam kelompok tani. *Kedua*, pengetahuan akan sirkulasi pasar terkait harga dan rantai pasok menjadi pengetahuan bersama. *Ketiga*, adanya stabilitas struktur kelompok tani dalam peralihan kuasa didasari pada konsensus bersama, dan *keempat*, partisipasi aktif dari seluruh anggota menjadi roda penggerak kelompok tani. Prinsip kerja kelompok tani yang berlandaskan kepercayaan, tujuan kolektif, dan nilai benefit sosial akan bermuara pada daya ungkit dan daya tawar kelompok tersebut yang bermuara pada ketuntasan, kredibilitas, kebajikan, dan reputasi.

Selain itu, penunjang keberlangsungan kelompok tani akan mengonstruksikan citra merek dari produk pertanian yang dihasilkan oleh kelompok tani. Citra merek dari produk pertanian yang dihasilkan oleh kekuatan kolektif kelompok tani akan memperkuat identitas, karakter, dan aktivitas produktif dari produk pertanian tersebut. Citra merek produk pertanian hasil kerja kolektif kelompok pertanian akan melahirkan loyalitas dari pengguna (perekat citra merek produk). Loyalitas terhadap produk pertanian ini akan menjadi perekat citra merek pada pemikiran pengguna (pembeli, tengkulak, tauke, dan perantara pedagang lainnya) untuk tetap loyal pada produk pertanian yang dihasilkan kelompok tani. Loyalitas yang termanifestasi pada perilaku dan sikap dari pengguna pada produk pertanian yang dihasil-

kan pada kelompok tani ini turut menjaga keberlangsungan pasokan pasar pertanian. Lebih dari itu, loyalitas anggota kelompok terhadap kebijakan kelompok tani karet dapat berpengaruh positif terhadap adopsi praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, keberlangsungan produk pertanian yang dihasilkan kelompok tani perlu menguatkan sisi penguasaan teknologi tepat guna, konsensus daya tawar harga produk pertanian, penguatan sistem organisasi (kelompok tani), dan perlu ditunjang serta difasilitasi dukungan pemerintah. Eliminasi kegagapan petani dapat direduksi dengan implementasi skema kerja Pertanian Karet Berkelanjutan berbasis Kelompok Tani kolaboratif.

H. Paradoks Euforia Karet di Tengah Sawitisasi

Kelatahan petani dalam melihat sawit sebagai penghasil uang yang cepat dan besar membuat petani karet di Batang Hari seakan gelap mata dan tidak berkalkulasi secara sosial dari dampak hilangnya karet di Batang Hari. Kalkulasi sosial dan lingkungan yang tidak diperhitungkan secara tidak sadar akan menjadi “bom waktu” bagi petani itu sendiri. Tanaman sawit bersifat destruktif terhadap unsur hara tanah dan penyedot habis air tanah. Akibatnya, bekas lahan sawit belum tentu dapat ditanami atau ditumbuhi tanaman komoditas lainnya. Artinya, demikianlah risiko kehilangan sumber pundi rupiah jika hanya berpangku pada satu jenis tanaman komoditas, dalam hal ini sawit. Sawitisasi juga menimbulkan bencana ekologis yang buruk, akibatnya tanah menjadi kurang subur dan kering, demi lingkungan tetap terjaga bertahan di karet dan menolak sawit adalah rasionalitas tindakan yang perlu dipertahankan (Dewi et al., 2022).

Sawitisasi menjadi gerakan masif petani untuk menghilangkan karet. Karet sengaja “disuntik mati” akibat harga yang jatuh. Pengorbanan petani tidak sebanding jika tetap bertahan dengan karet. Selain usia panen karet yang cukup lama (> 6 tahun), karet juga membutuhkan tenaga besar untuk pemeliharannya. Butuh waktu yang lama serta ketekunan sehingga perbandingan usaha dan hasil yang diperoleh dari karet tidak berimbang, justru sering kali para petani tidak balik modal. Sebaliknya, sawit cenderung hanya butuh

waktu panen tiga tahun dan sudah berbuah. Setiap dua minggu dapat menghasilkan tonase yang besar dari biji sawit. Walaupun butuh biaya besar dalam perawatan di awal, setidaknya sawit tidak perlu tenaga besar dalam pemeliharanya. Tuntutan ekonomi menjadi motif petani perlahan meninggalkan karet dan beralih ke sawit. Keuntungan yang diperoleh petani karet dirasa tidak lagi mencukupi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.

Ada beberapa hal yang menjadi titik tekan dalam narasi temuan emik ini, yaitu *pertama*, isu sawitisasi menjadi hal yang lumrah dan biasa bagi petani karena petani menganggap bahwa peralihan dari karet ke sawit semata hanya bagian untuk bertahan hidup tanpa mengalkulasikan kelangsungan hidup petani. Dampak risiko kalkulasi sosial akibat hilangnya karet tidak menjadi masalah bagi petani di Batang Hari. Akibatnya, kejayaan karet hanya akan menjadi romantisme yang didengar oleh generasi selanjutnya. Tidak ada lagi karet yang menjadi produk unggulan dalam pertanian di Batang Hari. Jika petani hanya bertumpu pada sawit sebagai mono-komoditas, maka saat harga sawit anjlok akan ada efek buruk domino yang menysar petani. Salah satu efeknya adalah petani rentan menjadi miskin. *Kedua*, perlu kebijakan yang tepat dalam segmentasi komoditas yang memadukan multi-tanaman kebun. Perlu dilakukan pembagian porsi sawit, karet, dan tanaman komoditas lainnya secara berimbang. Hal ini sebagai cara untuk menstabilkan sumber pundi rupiah petani untuk kelangsungan hidupnya. *Ketiga*, perlu regulasi tegas dalam menetapkan harga satuan kilo dari karet dan komoditas lainnya untuk menghindari praktik culas penentuan harga sepihak dari segelintir tauke. *Keempat*, sawitisasi dan eliminasi masif karet perlu menjadi evaluasi bersama bagi para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak buruk jangka panjang bagi petani.

Euforia karet semakin hilang karena gerakan masif mono-komoditas yang dilakukan secara serentak oleh petani. Petani dalam rasional kalkulasi ekonominya menganggap bahwa sawit lebih menjanjikan sebagai lumbung rupiah. Sementara itu, karet dianggap tanaman yang penerimaan keuntungannya tidak lagi dapat sebagai

sumber gantungan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karet di tengah sawitisasi menjadi ancaman nyata, bahwa ketika terjadi hantaman anjlok harga sawit, maka petani secara “berjamaah” akan mengalami kerentanan ekonomi rumah tangga. Kerentanan ekonomi rumah tangga petani terjadi akibat hanya bergantung pada tanaman sawit. Di sisi lain, kombinasi variasi komoditas tanaman menjadi nilai sumber kekuatan ekonomi yang dapat menjaga kelangsungan rumah tangga petani dari hantaman anjloknnya harga komoditas (Nora, 2020; Suryandari & Rahayuningsih, 2020).

Kejayaan karet seakan tenggelam. Primadona karet sebagai komoditas unggulan Provinsi Jambi menjadi sirna seiring konversi karet ke komoditas sawit secara masif oleh petani. Getah karet di kebun rakyat tidaklah menjadi pengikat rezeki yang menguntungkan bagi petani. Harga karet yang anjlok di tingkat petani seakan membuat petani tidak lagi menggantungkan penghidupannya pada karet. Paradoks euforia karet tenggelam bersama sejarah kejayaan karet di Kabupaten Batang Hari. Tidak ada yang salah dengan konversi karet ke sawit, tetapi ancaman mono-komoditas disinyalir menjadi penyebab kehancuran *berjamaah* petani ketika harga sawit anjlok. Penurunan harga karet secara drastis, peralihan massal petani ke komoditas sawit, dan kekurangan pasokan bahan getah karet menjadi rentetan masalah yang semakin menenggelamkan karet hingga berlanjut ke penutupan massal pabrik karet (Nababan, 2023). Sawitisasi menjadi biang pemicu penurunan pasokan bahan baku karet. Petani karet masif beralih ke petani kelapa sawit (peralihan komoditas) yang membuat harga karet sangat rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan nasional. Kekhawatiran industri karet nasional terpuruk akibat 45 pabrik karet ditutup (berhenti operasi) karena kelangkaan bahan baku karet lokal dan masifnya petani karet yang melakukan konversi komoditas ke sawit (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, 2023; Nababan, 2023). Oleh karena itu, perlu langkah strategis mengatasi krisis karet nasional melalui intervensi kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga karet dalam menjaga keberlanjutan pasokan karet rakyat.

I. *Life Story*: Berjuang Mengangkat Derajat Petani

Kisah perjuangan petani karet juga tertangkap dalam catatan emik selama pendataan Sensus Pertanian 2023. Kisah petani yang termarginalkan dari gemerlap pembangunan fisik pertanian, kisah petani yang tidak pernah terekspos bahkan tertangkap lensa *kaca mata pemerintah* akan keluh derita dan suka citanya. Di tengah ketidakpastian harga karet, petani karet berjuang untuk menafkahi keluarga. Karet menjadi sumber penghidupan bagi keluarga petani. Petani dengan lahan kecil dan sedikit modal setidaknya masih optimis untuk bergantung hidup dari elastisnya harga karet. Berbeda jauh dengan petani yang bermodal besar, lewat segala upaya dan kekuatan modalnya dapat melakukan konversi ke komoditas untung lainnya. Fakta terbalik dan menyakitkan tentu dialami oleh petani-petani kecil yang nihil modal. Ketidakberdayaan petani kecil untuk melakukan konversi ke sawit bukanlah solusi. Bukan tidak ingin ikut dan latah dengan gerakan masif petani karet yang melakukan konversi ke sawit, terlebih masih ada secercah harapan bahwa harga karet dapat stabil. Petani tahu risiko bertahan di karet adalah pilihan rasional yang tidak menguntungkan saat ini di Kabupaten Batang Hari.

Hasil produksi getah karet yang tidak bertonase besar membuat petani kecil makin terpuruk kalah dengan berat dan harga yang ditawarkannya. Harga yang jatuh dan tekanan harga tauke membuat petani hanya dapat berpasrah. Sementara itu, kebutuhan hidup makin melambung tinggi, terbesit dari benak petani karet bahwa kehidupan masa depan dengan bertani tidaklah tepat untuk generasi lanjutan dalam keluarganya. Bertani dalam realitas modern dianggap pekerjaan kelas “dua”, miskin, dan kotor, serta dianggap pekerja rendahan di mata masyarakat (Do, 2021). Tidak heran, anak-anak petani lebih diarahkan untuk bekerja di luar lingkup pertanian. Padahal, petani adalah pekerjaan mulia (Astuti, 2016) dan vital sebagai penjaga stabilitas pangan sumber kehidupan masyarakat (Imanullah, 2017; Kusumaningrum, 2019).

Kisah nelangsa petani karet di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pemyung, Kabupaten Batang Hari terpotret dari kehidupan seorang



Foto: Reza, (2023)

Gambar 6.12 Penyadap Getah Karet, Asmiyanti

janda berprofesi sebagai petani karet. Asmiyanti (49 tahun) (lihat Gambar 6.12) berjuang seorang diri menghidupi ketiga putrinya. Selepas kepergian suaminya, hidup Asmiyanti hanya bertumpu pada kebun karet peninggalan mending suaminya. Namun, hasil dari bertani karet tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Asmiyanti bertekad anak-anaknya harus bisa bersekolah tinggi agar tidak menderita seperti dirinya. Asmiyanti merasa bahwa lulusan SMP tidak akan dapat berkontestasi dalam lapangan pekerjaan. Petani adalah jalur bekerja paling *aman* dan *ramah* bagi lulusan SMP seperti dirinya.

Kesuraman nasib petani karet tidak hanya berpusar pada persoalan anjloknya harga karet, tetapi juga konversi masif lahan karet ke sawit turut. Impitan karet atas gerakan sawitisasi semakin mempertegas nasib buram petani dan turunannya yang semakin tersisihkan dalam krisis sumber penghidupan (*livelihood crisis*). Lebih buruk lagi, petani beranggapan bahwa profesi yang dijalankannya tidak boleh diwariskan ke anak dan cucunya. Harapan pekerjaan yang lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terhormat, seperti guru, Aparatur Sipil Negara, dan Pekerja Industri menjadi pilihan petani untuk generasi selanjutnya. Saat regenerasi petani mengalami “resesi”, maka ancaman krisis pangan di masa datang tidak terhindarkan. Sedikitnya generasi muda berprofesi petani dan makin banyaknya petani berusia lanjut maka 50 tahun mendatang Indonesia diproyeksikan kehilangan profesi petani akibat krisis regenerasi petani (Nashrullah, 2021). Selama derajat petani masih terpuruk dalam situasional kemiskinan, kesenjakaan petani tetap menjadi nelangsa di negeri agraris.

J. Penutup: Sebuah Catatan Refleksi, Sensus Pertanian Berpihak untuk Siapa?

Persoalan sawitisasi menjadi ancaman nyata pertanian karet di Kabupaten Batang Hari. Karet di antara impitan sawit membuat komoditas getah karet tidak lagi menjadi primadona dan pilihan tanam petani. Persoalan tersebut muncul dari ikhtisar data yang dipotret realitasnya melalui sensus pertanian. Sensus pertanian melalui penggalian kualitatif emik secara *verstehen* senyatanya dilakukan dalam narasi ini untuk dapat memotret realitas secara mendalam. Penggalian emik yang dipadukan dengan interpretatif dari suatu tafsiran pendataan sensus pertanian dapat menjadi data penguat dan pelengkap tafsiran realitas di balik pertanyaan atas jawaban survei yang cenderung numerik. Hal inilah menjadi titik kelemahan pendataan kuantitatif Sensus Pertanian yang dapat ditutupi melalui kelebihan kualitatif dengan kekuatan emik secara *verstehen*. Selain itu, data jawaban sensus pertanian dapat memadatkan penggalian interpretatif emik ini dalam memotret sensus pertanian berdasar dari angka ke sebuah narasi mendalam. Realitas emik ini menguak suatu persoalan sawitisasi. Permasalahan sawitisasi dalam dunia pertanian telah membuat stagnasi pada hulu pertanian karet hingga hilir agroindustri yang tergulung akibat kelangkaan bahan baku.

Penggalian emik ini sejatinya dapat memotret postulat kunci dari sensus pertanian, yakni *pertama*, tekanan tauke dalam mengendalikan harga karet hingga inferioritas komoditas getah karet. *Kedua*, isu

sawitisasi yang menggilas eksistensi hulu hingga hilir petani karet. *Ketiga*, jerit nelangsa petani akibat harga karet anjlok; dan *keempat*, pentingnya keberpihakan pada petani dalam eliminasi kegagalan melalui skema Kerja Kolektif Pertanian Karet Berkelanjutan. Keempat postulat kunci ini terbentuk melalui pendalaman emik yang menjadi kekuatan dan kelebihan dalam melengkapi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Batang Hari. Penggalan emik dalam sensus pertanian menjadi kelebihan untuk melihat lebih dalam serta pengisi kerumpangan dari kelemahan Sensus Pertanian yang hanya mencatat secara prosedural tanpa melihat aspek emik secara kualitatif.

Sensus pertanian yang dibalut dalam jargon *mencatat pertanian Indonesia untuk kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan* harus menjadi ekosistem pangkalan data yang sah. Ekosistem pangkalan data yang dihimpun melalui sensus pertanian dapat menjadi basis data yang padu dan informasi yang akurat dalam memperkuat kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi input dalam memproteksi petani. Hal inilah yang menjadi kekuatan sensus pertanian yang tidak hanya dipotret dari sekedar angka, tetapi juga menarasikan emik dari pencatatan sensus pertanian di masyarakat. Kesuraman nasib petani akibat anjloknya harga karet dapat diselesaikan dengan data—data akurat yang terangkum dalam sensus pertanian. Sekali lagi, pertanyaan kritis tertuju untuk sensus pertanian ini. Apakah sensus pertanian hanya ajang pemenuhan ambisi pemerintah untuk menjalankan rutinitas pencatatan satu dekade pertanian? Atau sebagai penyediaan data untuk masukan kebijakan komprehensif bagi petani dan pertanian.

Daftar Pustaka

- Ade, A. M. (2020). *Narasi ekologi: Kiamat serangga dan masa depan bumi*. Samudra Biru.
- Afra, M., & Salemuudin, M. R. (2022). Solidaritas sosial masyarakat petani di Desa Golo Lalong Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1723–1736. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/1789>

- Anita, S., Maharani, E., & Yusmini, Y. (2014). Hubungan petani karet dengan tauke (patron-client) di Desa Sungai Jalu Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. *Jom Faperta*, 1(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERTA/article/view/3540/0>
- Arvianti, E. Y., Masyhuri, M., Waluyati, L. R., & Darwanto, D. H. (2019). Gambaran krisis petani muda Indonesia. *Agriekonomika*, 8(2), 168–180. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.5429>
- Astuti, N. B. (2016). Sikap petani terhadap profesi petani: upaya untuk memahami petani melalui pendekatan psikologi sosial (kasus petani di Kecamatan Pauh, Kota Padang). *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 15(1), 59–66. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.15.1.59-66>
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Sensus Pertanian 2013 (ST2013)*. <https://www.bps.go.id/news/2012/05/29/7/sensus-pertanian-2013--st2013-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Mencatat pertanian Indonesia*. <https://sensus.bps.go.id/st2023/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. (2017a). *Luas perkebunan menurut jenis tanaman per kecamatan di Kabupaten Batang Hari tahun 2017 (Ha)*. <https://batangharikab.bps.go.id/statictable/2018/10/31/334/luas-perkebunan-menurut-jenis-tanaman-per-kecamatan-di-kabupaten-batang-hari-tahun-2017-ha-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. (2017b). *Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Batang Hari tahun 2017*. <https://batangharikab.bps.go.id/statictable/2018/08/31/161/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-batang-hari-tahun-2017.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. (2021). *Statistik ketenagakerjaan Kabupaten Batang Hari*. <https://batangharikab.bps.go.id/publication/2022/11/14/ffde6abfc71e474be512813c/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-batang-hari-2021.html>
- Bismala, L., Handayani, S., & Andriany, D. (2018). *Strategi peningkatan daya saing usaha kecil menengah*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Budiyanti, I., & Dharmawan, A. H. (2018). Strategi nafkah dan relasi sosial rumahtangga petani tebu (studi kasus: Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Sragen). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 105–122. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.105-122>

- Damayanti, K., Hendrianto, H., & Ilhamiwati, M. (2021). *Kontribusi usaha tani lada dalam penanggulangan tingkat kemiskinan keluarga (studi kasus Desa Lawang Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang)* [IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1637>
- Dewi, M. M., Sukapti, S., & Abdullah, Z. (2022). Mempertahankan karet, menolak sawit: Rasionalitas tindakan masyarakat Kampung Linggang Melapeh menolak adopsi tanaman komoditas baru. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 106–115. <https://doi.org/10.30872/lv.v3i2.1999>
- Dirtjen Perkebunan. (2019). *Kementan: Pemerintah Terus Berupaya Dongkrak Harga Karet Rakyat*. Kementerian Pertanian. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-pemerintah-terus-berupaya-dongkrak-harga-karet-rakyat/>
- Diskominfo Kabupaten Batang Hari. (2012). *Lambang*. Pemerintah Kabupaten Batang Hari. <https://batangharikab.go.id/bat/statis-8-lambang.html>
- Diskominfo Kabupaten Batang Hari. (2013). *Peta potensi investasi*. Pemerintah Kabupaten Batang Hari. <https://batangharikab.go.id/bat/statis-48-peta-potensi-investasi.html>
- Do, E. (2021). *Kenapa petani sering dianggap sebagai pekerja rendahan?* Geotimes.Id. <https://geotimes.id/opini/kenapa-petani-sering-dianggap-sebagai-pekerja-rendahan/>
- Fasya, T. K., Praza, R., & Fariadi, D. (2022). Dampak sawitisasi terhadap lingkungan di Aceh Utara. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 7(1). <https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/8357>
- Food and Agriculture Organization. (2020). *World Programme for the Census of Agriculture 2020*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/world-census-agriculture/en/>
- Gabungan Perusahaan Karet Indonesia. (2023). *Suramnya kondisi karet alam Indonesia, pabrik karet runtuh akibat konversi lahan*. Gapkindo. Org. <https://gapkindo.org/2023/03/09/ministry-of-industry-rubber-commodity-contributes-idr-110-trillion-in-foreign-exchange-and-absorbs-60000-workers-2-2-2-2/>
- Giles, H. (2016). *Communication accomodation theory negotiating personal relationships and social identities across contexts* (H. Giles (ed.)). Cambridge University Press.

- Giles, H., & Marco, C. (2016). Accomodation strategies as core of the theory. Dalam H. Giles (Ed.), *Coomunication accomodation theory* (p. 37). Cambridge University Press.
- Ginting, E., & Yumnaini, Y. (2020). Social inequality among the female merchants of ethnic Malay and Chinese. *Society*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.126>
- Herwibawa, B. (2020). *Kebangkitan neo-pertanian*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/28/kebangkitan-neo-pertanian>
- Hidayat, M., & Seprina, R. (2022). Jambi masa kolonialisme dan imperialisme sebagai sumber pembelajaran sejarah: Study kasus perkebunan karet di Batanghari. *KRINOK | Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 1(3), 53–64. <https://doi.org/10.22347/krinok.v1i3.18331>
- Hidayat, R. (2012). *Membangkitkan batang terendam*. Yayasan Setara Jambi. https://www.setarajambi.org/download/file/BUKU_BATIN_9.pdf
- Imaniar, A., & Brata, N. T. (2020). Relasi patron-klien di antara tengkulak dan petani salak dengan dampak sosialnya di Banjarnegara. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1), 837–847. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/39897>
- Imanullah, M. N. (2017). *Petani dalam perdagangan pangan internasional*. ASA GRAFIKA.
- Iryana, A. B. (2018). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di Kecamatan Comprang Kabupaten Subang. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 1(02), 125–140. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.69>
- Kinseng, R. A. (2017). Structugency: A theory of action. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17972>
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan sektor pertanian sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian indonesia. *Transaksi*, 11(1), 80–89. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477>
- Lestari, M. (2022). Studi perkembangan kesejahteraan petani di Provinsi Jambi. *Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (MEDIAN)*, 5(01), 1–9. <https://bpsjambi.id/median/index.php/median/article/view/53>
- Manzilati, A. (2011). *Kontrak yang melemahkan relasi petani dan korporasi*. Universitas Brawijaya Press.

- Muflihini, M. D. (2019). Permintaan, penawaran dan keseimbangan harga dalam perspektif ekonomi mikro Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>
- Muksit, A. (2017). *Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/1119/>
- Nababan, W. M. C. (2023). *Penutupan pabrik karet bisa berlanjut*. Kompas. Id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/07/penutupan-pabrik-karet-bisa-berlanjut?open_from=Search_Result_Page
- Nadia, Y. (2022). *Nama-nama kabupaten/kota di Provinsi Jambi*. Kompas. Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/30/210000569/nama-nama-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi?page=all>
- Napitupulu, D. M. T., Alamsyah, Z., & Elwamendri, E. (2014). Prospek pengembangan industri hilir pengolahan karet di Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Karet*, 139–147. <http://ejournal.puslitkaret.co.id/index.php/jpk/article/view/160>
- Nashrullah, N. (2021). *Indonesia krisis regenerasi petani, ini saran GMNI*. Republika.Co.Id. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qzzuv2320/indonesia-krisis-regenerasi-petani-ini-saran-gmni>
- Nora, D. (2020). Konseptual mapping sumber daya di Provinsi Jambi. *STOCK Peternakan*, 2(1). <https://doi.org/10.36355/sptr.v2i1.369>
- Nuanphromsakul, K., Cioca, L. I., Chaveesuk, S., & Chaiyasoonthorn, W. (2022). Exploring the social sustainability of rubber farmers – individual farmers perspective. *INMATEH - Agricultural Engineering*, 68(3), 295–304. <https://doi.org/10.35633/inmateh-68-29>
- Oktafiani, I., Sitohang, M. Y., & Saleh, R. (2021). Sulitnya regenerasi petani pada kelompok generasi muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.62533>
- Pamungkas, B. D. (2020). *Modal sosial dan kesejahteraan petani perdesaan*. Literasi Nusantara.
- Pane, E., Siregar, T. H., & Rahman, A. (2017). Model penanggulangan kelangkaan penyadap di perkebunan karet. *Jurnal Agrica*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i1.878>
- Pemerintah Kabupaten Batang Hari. (2017). *Peta Kabupaten Batang Hari*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Batang Hari. https://batangharikab.go.id/bat/Gambar_profil/peta%20batang%20hari.jpg

- Prasetyono, D. W., Astuti, S. J. W., Supriyanto, S., & Syahrial, R. (2017). Pemberdayaan petani berbasis modal sosial dan kelembagaan. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 2(3), 231–238. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/552/>
- Pratiwi, N. A., Harianto, H., & Daryanto, A. (2017). Peran agroindustri hulu dan hilir dalam perekonomian dan distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 14(2), 127. <https://doi.org/10.17358/jma.14.2.127>
- Purwandari, H. (2011). Respon petani atas kemiskinan struktural (kasus Desa Perkebunan dan Desa Hutan). *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 5(2), 24–37. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/364>
- Putri, S. A. (2023). *Harga karet rendah, banyak petani karet di Batanghari Jambi yang beralih ke sawit*. *TribunBatanghari.Com*. <https://jambi.tribunnews.com/2023/06/19/harga-karet-rendah-banyak-petani-karet-di-batanghari-jambi-yang-beralih-ke-sawit>
- Tambunan, I. (2022). Menanti Terobosan bagi Nasib Karet Rakyat yang Kini Suram. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/06/masa-depan-karet-rakyat-suram-menanti-terobosan>
- Qosim, N. (2023). *Mewujudkan Sensus Pertanian 2023 yang berkualitas untuk Indonesia*. Mata Benua. <https://osf.io/download/646cbe81e33ee105e59a109e/>
- Rachmawan, D. (2023). *Luas perkebunan karet rakyat di Jambi terus berkurang, ini datanya*. *Tribunjambi.Com*. <https://jambi.tribunnews.com/2023/06/18/luas-perkebunan-karet-rakyat-di-jambi-terus-berkurang-ini-datanya>
- Riyadi, S. (2021). Milestone Sistem Perniagaan Karet di Rimbo Bujang Rentang Tahun 1980-2020. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 128–145. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5672>
- Ruchba, S. M. (2020). *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di perkebunan karet milik rakyat tahun 2012–2019* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/28094>
- Sahidin, H. (2021). *Lembaga komunitas petani dalam pemberdayaan petani (studi terhadap kelompok tani Mekar Jaya di Pekon Sumbermula Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus)* [UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/14634/>

- Seruni, M. P., & Somantri, R. (2018). Relasi kekuasaan dalam sektor ekonomi informal: Suatu dialektika kontrol. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 5(2), 75–89. <https://doi.org/10.24036/scs.v5i2.126>
- Shodiq, W. M. (2022). Model CPRV (cost, productivity, risk dan value-added) dalam upaya meningkatkan pendapatan petani Indonesia: A review. *Jurnal Hexagro*, 6(2), 115–127. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v6i2.657>
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19: Telaah kritis terhadap rencana megaprojek lumbung pangan nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 184–204. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>
- Sitompul, A. E. (2023). *Perubahan interaksional masyarakat Desa Wisata Tembi Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul [UPN" Veteran" Yogyakarta]*. <http://eprints.upnyk.ac.id/35028/3/Abstrak.pdf>
- Sumarny, U. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet Di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan (JPP)*, 12(2), 1–24. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/66108>
- Supendi, S., & Purwoko, D. (2022). Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan pertanian nasional melalui Sensus Pertanian 2023 menjawab tantangan global. *Lensa*, 16(2). <https://doi.org/10.58872/lensa.v16i2.93>
- Suratno, T. (2023). *Tragis! Petani menolak panen getah karet, pabrik karet besar di Jambi tutup*. Metrojambi.Com. <https://www.metrojambi.com/metro/131047409/tragis-petani-menolak-panen-getah-karet-pabrik-karet-besar-di-jambi-tutup>
- Suryandari, A., & Rahayuningsih, E. S. (2020). Strategi bertahan hidup ekonomi rumah tangga petani padi aspek pendapatan, konsumsi, dan tabungan studi kasus di DesaTonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(2), 176–182. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i2.8525>
- Syafruddin, R. F., & Darwis, K. (2021). *Ekonomi agroindustri*. Penerbit NEM.
- Syarifa, L. F., Agustina, D. S., Alamsyah, A., Nugraha, I. S., & Asywadi, H. (2023). Outlook komoditas karet alam Indonesia 2023. *Jurnal Penelitian Karet*, 41(1), 47–58. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v41i1.841>

- Tambunan, I. (2022). *Menanti terobosan bagi nasib karet rakyat yang kini suram*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/06/masa-depan-karet-rakyat-suram-menanti-terobosan>
- Tambunan, I. (2023a). *Buruh dan petani desak kebijakan penyelamatan karet Jambi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/03/buruh-dan-petani-desak-kebijakan-penyelamatan-karet-jambi>
- Tambunan, I. (2023b). *Penantian rakyat Jambi untuk pulihnya sang primadona*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/05/penantian-rakyat-jambi-untuk-pulihnya-sang-primadona>
- Ubaidillah, K., & Kusairi, L. (2017). Tauke, juragan, bandol: Relasi patron-klien dan transformasi sosial dalam organisasi perdagangan tembakau di Madura. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan*, 4(1), 22–40. <https://doi.org/10.33387/jeh.v4i1.918>
- Wulandari, S. A., & Kemala, N. (2017). Kajian komoditas unggulan sub-sektor perkebunan di provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 134–141. <https://doi.org/https://repository.unja.ac.id/34929/>
- Yuvanda, S., & Rosita, R. (2018). Analisis produk perkebunan rakyat unggulan dan dampaknya terhadap daya serap tenaga kerja untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten batanghari. *Journal Development*, 6(2), 105–115. <https://doi.org/10.53978/jd.v6i2.110>
- Yuwono, M., Suharjo, B., Sanim, B., & Nurmalina, R. (2017). Analisis deskriptif atas literasi keuangan pada kelompok tani. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 408–428. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2400>

Bab VII

Menyoal Integrasi Peternakan dan Perkebunan di Bengkulu Utara

Siti Fatimah

Sensus Pertanian bertujuan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian Indonesia dan untuk mendapatkan kerangka sampling yang dapat digunakan sebagai dasar survei sampel pertanian secara rutin. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan Sensus Pertanian 2023 di seluruh Indonesia. Sensus pertanian ini berlangsung dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Sensus Pertanian berlangsung setiap 10 tahun sekali, tahun 2023 merupakan tahun ketujuh, pertama kali pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, dan 2023.

Tujuan dari Sensus Pertanian 2023 adalah untuk mendapatkan informasi tentang struktur pertanian, khususnya dari unit administrasi terkecil. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi

S. Fatimah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: siti080@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Fatimah, S. (2025). Menyoal integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 191–238). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c943
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

statistik pertanian saat ini, untuk memberikan kerangka sampling studi pemantauan pertanian. Pendataan Sensus Pertanian 2023 meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, hortikultura, dan jasa pertanian.

Responden Sensus Pertanian 2023 adalah seluruh petani di Indonesia, yang terdiri dari petani rumah tangga atau biasa, usaha pertanian, dan penyedia jasa pertanian. Informasi yang diperoleh dari Sensus Pertanian 2023 meliputi luas penggunaan lahan pertanian, produksi barang pertanian, serta jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian.

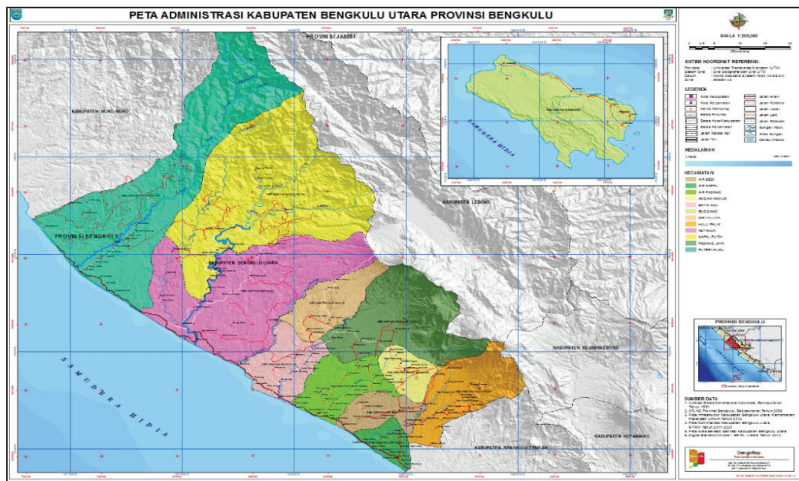
Bengkulu Utara memiliki potensi alam yang subur dan beragam sehingga cocok untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Berkat potensi alam yang subur dan kondisi iklim yang mendukung, sektor pertanian dan peternakan di Bengkulu Utara memiliki peluang yang baik untuk berkembang lebih jauh dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Tulisan ini menyoal kondisi emik masyarakat di lokasi pendataan Sensus Pertanian 2023, dengan fokus pada petani pekebun yang mempunyai ternak di Bengkulu Utara. Integrasi peternakan dan perkebunan berpotensi berkembang melalui simbiosis timbal balik.

Naskah ini merupakan narasi empiris dari Sensus Pertanian 2023 yang menyajikan data dan analisis komprehensif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kedua sektor ini dapat berkolaborasi untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Di banyak daerah di Indonesia, termasuk Bengkulu Utara, pertanian dan peternakan merupakan dua penopang perekonomian. Namun, keduanya beroperasi secara independen satu sama lain dan tidak terdapat integrasi yang harmonis. Dengan data sensus ini, kami ingin menggali lebih dalam peluang dan tantangan yang ada dalam upaya mengintegrasikan sektor peternakan dan perkebunan. Kami juga menampilkan cerita serta pengalaman dari para petani dan peternak lokal yang menjadi tulang punggung bidang ini.

Naskah ini didukung data dan analisis, bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan situasi saat ini, tetapi juga memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Hasil sensus ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya sinergi yang menguntungkan antara sektor peternakan dan perkebunan.

A. Setangkap Empiris Euforia Sensus Pertanian

BPS Kabupaten Bengkulu Utara merupakan instansi yang bertugas melakukan pendataan Sensus Pertanian Tahun 2023. Kabupaten Bengkulu Utara luasnya kurang lebih 3.977 kilometer persegi dan terbagi menjadi 19 kecamatan, 5 kelurahan, dan 215 desa (Gambar 7.1).



Sumber: Badan Informasi Geospasial (2015)

Gambar 7.1 Peta Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

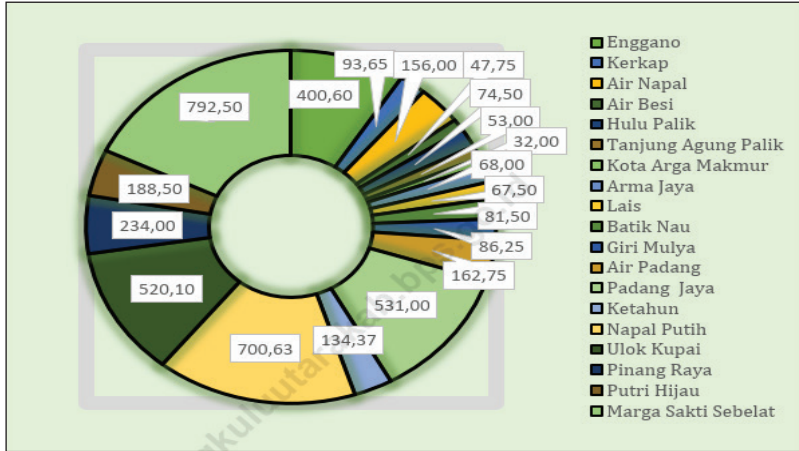
Secara geografis, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Di sepanjang jalan dari Bengkulu menuju Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat perkebunan kelapa sawit dan beberapa perkebunan karet.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagian besar wilayahnya masih tertutup hutan tropis yang tumbuh dengan keanekaragaman hayatinya. Menurut Hendri (koordinasi pertanian provinsi), yang mendampingi peneliti dalam perjalanan dari Bengkulu ke Bengkulu Utara, sebagian besar warga bekerja sebagai petani, nelayan, dan buruh lapangan. Sebagian besar penduduknya adalah suku Rejang, suku asli yang tinggal di daerah ini, sedangkan sebagian lagi adalah suku Jawa dan suku lainnya.

Pada tahun 2023, tercatat luas perkebunan kelapa sawit 90.504 ha dengan produksi 490.706,4 ton/tahun. Sementara itu, luas perkebunan karet 27.663 ha dengan produksi 1.929,12 ton/tahun. Tanah yang subur memungkinkan penanaman padi, kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan sayuran. Luas perkebunan rakyat 208.158 ha dengan produksi 735.766 ton; perkebunan besar swasta 61.612 ha dengan produksi 357.109 ton; dan perkebunan negara 587 ha dengan produksi 11.942 ton. Kelapa sawit yang dihasilkan dapat diolah menjadi dua jenis minyak. Minyak yang bersumber dari daging buah kelapa sawit disebut *crude palm oil* (CPO), sedangkan yang bersumber dari inti kelapa sawit disebut *palm kernel oil* (PKO). Kelapa sawit juga dapat diolah untuk menghasilkan bahan makanan (*oleofood*), bahan non-makanan (*oleochemical*), dan bahan farmasi serta kosmetik (Syarwan et al., 2021). Di Bengkulu Utara, konsesi perkebunan besar didominasi oleh komoditas kelapa sawit dan karet yang dikelola oleh perusahaan besar dengan teknologi canggih. Perkebunan menengah dan kecil memiliki skala yang lebih kecil serta sering kali menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan akses pasar. *Smallholders* atau petani kecil memainkan peran penting dalam pengelolaan lahan pertanian dengan berbagai tantangan, terutama terkait dengan akses ke teknologi, modal, dan pasar.

Tujuan sensus pertanian adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan pertanian yang meliputi budi daya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan jasa pertanian. Kabupaten Bengkulu Utara yang beribukota di Kota Argo Makmur ini luasnya 4.424,60 kilometer persegi seperti terlihat pada Gambar 7.2 (BPS Bengkulu Utara, 2023).



Sumber: BPS Bengkulu Utara (2023)

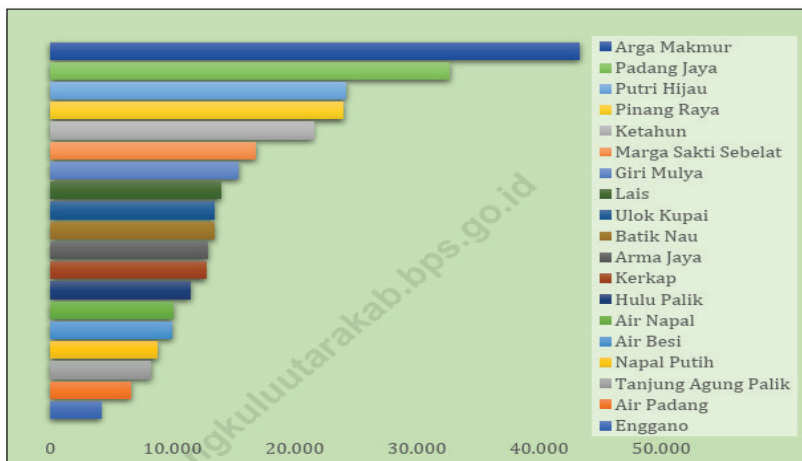
Gambar 7.2 Luas Daerah Bengkulu Utara menurut Kecamatan

BPS Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Sensus Pertanian 2023 selama dua bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.

Berdasarkan hasil proyeksi data Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 302.833 jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara meningkat sebesar 1,21% dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022. Kepadatan penduduk di 19 kecamatan tersebut cukup berbeda (Gambar 7.3). Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Arga Makmur sebesar 1.351,97 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Enggano sebesar 10,29 jiwa/km² (BPS Bengkulu Utara, 2023).

Jumlah penduduk Kecamatan Arga Makmur sebanyak 42.705 jiwa atau 14,26 persen, sedangkan jumlah penduduk terkecil tinggal di Kecamatan Enggano sebanyak 4.179 jiwa atau 1,40 persen (BPS Bengkulu Utara, 2023). Konsentrasi persebaran penduduk di Kota Arga Makmur sangat erat kaitannya dengan posisinya sebagai ibu kota kabupaten, pusat penyelenggaraan negara, kegiatan usaha, dan pendidikan di Wilayah Administrasi Bengkulu Utara.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: BPS Bengkulu Utara (2023)

Gambar 7.3 Sebaran Penduduk di Bengkulu Utara

Menurut Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Utara, proses bisnis pendataan sensus pertanian dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Tema Sensus Pertanian 2023 adalah “Pendataan Pertanian Indonesia untuk Memajukan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Diharapkan dapat dihasilkan data berkualitas tinggi yang memberikan dasar yang valid untuk formulasi pertanian (Hakim et al., 2021). Informasi yang dikumpulkan melalui Sensus Pertanian 2023 meliputi jenis tanaman, luas lahan, teknik budi daya, dan profil petani berdasarkan nama dan alamat. Siaran televisi pada Senin, 15 Juni 2023 memberitakan bahwa Presiden RI menekankan pentingnya menghasilkan data yang akurat dalam pernyataan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Kebijakan yang tepat di bidang pertanian, pemutakhiran informasi diperlukan untuk mendukung kebijakan pertanian pemerintah, seperti distribusi pupuk bersubsidi. Informasi terkini, akurat, dan terpercaya sangat penting karena pertanian merupakan sektor strategis perekonomian Indonesia.

Sensus Pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor-

sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional. Potensi yang ada harus terus dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan produktivitas serta menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayah ini. Letak geografis serta potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten ini menjadikannya memiliki peluang besar untuk mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Bengkulu Utara juga dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit dan karet utama di Bengkulu. Hasil perkebunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga berperan dalam ekspor, yang berkontribusi pada devisa negara. Perkebunan kelapa sawit juga menyerap tenaga kerja yang signifikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perkebunan.

Bengkulu Utara memiliki potensi dalam pengembangan peternakan sapi, kambing, dan unggas. Peternakan ini memberikan kontribusi pada pasokan daging serta produk hewani di wilayah Sumatra dan sekitarnya. Peternakan yang berkembang baik juga mendukung perekonomian masyarakat perdesaan dengan memberikan sumber penghasilan tambahan bagi petani. Apabila dikembangkan teknologi dan manajemen peternakan modern, produksi peternakan di Bengkulu Utara dapat terus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan menghasilkan produk berkualitas, yang pada gilirannya dapat mendukung program swasembada pangan hewani nasional.

Potensi pengembangan agroindustri di Bengkulu Utara sangat besar. Dengan mendirikan pabrik pengolahan produk-produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak sawit, karet olahan, serta produk pangan, kabupaten ini bisa meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil tersebut sebelum dipasarkan, baik secara lokal maupun

untuk ekspor. Dengan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kualitas produk, kontribusi kabupaten ini terhadap ekspor nasional dapat terus meningkat. Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional melalui sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu, potensi alam yang dimiliki harus bisa dimaksimalkan serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan manajemen produksi.

Peran BPS sebagai badan pelaksana Sensus Pertanian 2023 sangat tepat dan bermanfaat karena beberapa faktor berikut ini.

1. Memiliki personel dengan koordinator sensus di tingkat pusat, kabupaten, kabupaten/kota, regional, dan kecamatan (koseka) yang berkoordinasi dengan mitra pendataan setempat untuk memastikan mekanisme dan prosedur kerja pendataan dilaksanakan secara terpadu.
2. Memiliki pengalaman dalam sensus dan survei rutin, seperti sensus, survei petani, survei sosial ekonomi nasional dan survei data sosial ekonomi (PSE), pendataan program perlindungan sosial (PPLS), dan lain-lain.
3. Intervensi berbagai pihak cukup sulit ketika pendataan dilakukan oleh BPS. BPS merupakan instansi vertikal yang menangani daerah, tetapi pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan intervensi.
4. Perekrutan dan pelatihan PPL dan PML dilakukan oleh BPS kabupaten, serta PPL dan PML berasal dari daerah untuk menghemat biaya operasional dalam pendataan. BPS hanya memberikan remunerasi dan tunjangan kepada BPJS sebagai bagian dari kontrak kerja. Namun, BPS tidak menyediakan kegiatan seperti akomodasi dan transportasi karena PPL dan PML adalah warga setempat.

Penerjemahan Sensus Pertanian Bengkulu Utara merupakan upaya penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi berguna yang dapat dipahami oleh berbagai pihak. Proses ini member-

dayakan pemangku kepentingan untuk memahami dan menggunakan data sensus untuk membuat keputusan tentang yang berhubungan dengan sektor pertanian di Bengkulu Utara.

B. Menjejak Bentang Alam Pertanian dan Peternakan di Bengkulu Utara

Bengkulu Utara memiliki potensi alam yang subur dan beragam sehingga cocok untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Tanah yang subur dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di wilayah tersebut. Tanaman umum yang ditanam di Bengkulu Utara meliputi beras, jagung, singkong, kacang tanah, kopi, kakao, dan kelapa sawit.

Padi merupakan salah satu komoditas yang sangat penting di wilayah ini, terutama di wilayah Kemumu. Budi daya padi di Bengkulu Utara didukung oleh irigasi dari sungai Batanghari dan Musi. Selain itu, terdapat pula perkebunan kopi dan kakao di dataran tinggi yang menghasilkan kopi robusta dan kakao berkualitas tinggi. Kelapa sawit juga merupakan komoditas penting di Bengkulu Utara dan perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh wilayah.

Bengkulu Utara juga menawarkan peluang yang baik untuk pengembangan peternakan. Adanya areal hijau yang luas dan kondisi iklim yang mendukung menjadikan peternakan sapi sebagai salah satu sektor utama. Jenis ternak yang dikembangkan di Bengkulu Utara meliputi peternakan sapi, kambing, dan ayam. Peternakan sapi di Bengkulu Utara berfokus pada pengembangan sapi potong. Sapi indukan adalah sapi bali dan sapi limosine. Selain itu, ada juga kambing yang merupakan salah satu bahan baku terpenting untuk beternak. Peternakan ayam juga cukup berkembang di daerah ini, baik ayam kampung maupun ayam petelur. Pemerintah daerah juga bekerja untuk mengembangkan sistem peternakan modern, seperti peternakan sapi perah besar dan ayam petelur. Selain itu, reproduksi dan pengembangan bibit sapi juga menjadi perhatian dalam upaya peningkatan produktivitas ternak di Bengkulu Utara.



Foto: Siti (2023)

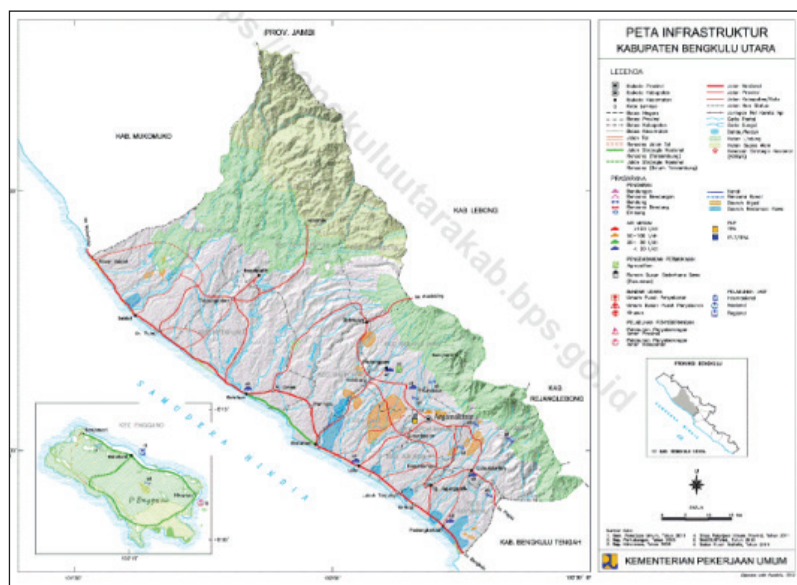
Gambar 7.4 Hutan Tropis Berjajar Sepanjang Jalan ke Bengkulu Utara

Berkat potensi alam yang subur dan kondisi iklim yang mendukung, sektor pertanian dan peternakan di Bengkulu Utara memiliki peluang yang baik untuk berkembang lebih jauh dan meningkatkan perekonomian daerah serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Namun, beberapa daerah di Kabupaten Bengkulu Utara justru menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan karena kondisi geografis ini. Beberapa bentang alam yang paling menantang di Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar tertutup oleh pegunungan dan hutan tropis (Gambar 7.4). Dikarenakan medan yang terjal dan berkelok-kelok serta jalan yang tidak memadai, sering kali kawasan ini sulit diakses. Untuk memetakan dan mengidentifikasi wilayah-wilayah tersebut, masih diperlukan pendataan wilayah khusus. Selain itu, wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal sebagian besar masyarakat pesisir dan nelayan sering kali rawan terhadap bencana alam, seperti banjir, pasang surut, dan erosi pantai.

Pengumpulan data di wilayah tertentu merupakan upaya penting untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi geografis, sosial ekonomi, dan ekologi di wilayah yang sulit diakses atau memiliki tantangan khusus. Informasi yang diperoleh dari pendataan ini membantu pemerintah untuk merencanakan kebijakan, alokasi sumber

daya, dan program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai contoh, pendataan kawasan khusus tahun 2022 di wilayah administrasi Bengkulu Utara menunjukkan bahwa daerah pegunungan memiliki medan yang terjal dan konektivitas jalan yang terbatas, sehingga berdampak pada mobilitas penduduk dan perkembangan pertanian atau perkebunan (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, 2021).

Bentang alam yang menjadi tantangan pendataan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bengkulu Utara adalah menjangkau penduduk yang berada di pegunungan dan beberapa wilayah yang infrastruktur jalannya jelek (Gambar 7.5). Wilayah ini sering kali sulit diakses karena medan yang terjal dan berliku, serta jalan-jalan yang belum memadai. Apalagi bila cuaca hujan akan lebih parah kondisinya dan perlu perjuangan untuk bisa menjangkau responden.



Sumber: BPS Bengkulu Utara (2023)

Gambar 7.5 Peta Infrastruktur Kabupaten Bengkulu Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keterkaitan pembagian wilayah administrasi dengan bentang alam Kabupaten Bengkulu Utara menjadi tantangan dalam pendataan Sensus Pertanian tahun 2023. Menurut Kepala BPS Bengkulu Utara, bentang alam bukan satu-satunya yang menjadi tantangan dalam pendataan Sensus Pertanian tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun, proses pendataan juga terkendala di beberapa tempat disebabkan oleh sulitnya petugas menemukan penduduk yang didata. Di daerah perkebunan dan pertanian pada pagi hingga sore hari pada saat jam kerja, penduduk tidak ada di rumah dan berada di tempat kerja seperti di sawah dan kebun.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian

Penggalan latar belakang, historis, dan perspektif sosial budaya masyarakat petani terhadap proses pendataan menjadi sangat penting untuk pemaknaan data yang ada. Keadaan ekonomi dan sosial budaya petani yang berada dibalik proses pendataan merupakan informasi penting untuk memperkuat hasil pendataan.

Berdasarkan data dan informasi petani yang bersinggungan dengan kuesioner BPS, setidaknya diperoleh informasi data bahwa bagi petani Bengkulu Utara, baik itu dari masyarakat asli atau pendatang (eks transmigrasi), lahan (pertanian/perkebunan) dan peternakan merupakan tumpuan penghidupan mereka. Pada umumnya, lahan yang dimiliki adalah warisan yang diturunkan dari orang tua mereka. Pada awal kedatangan orang tua masyarakat eks transmigrasi melalui program transmigrasi mendapat pembagian lahan tapak rumah dan pekarangan seluas 1 ha dan lahan pertanian seluas 2 ha. Awal mula kedatangan mereka pada sekitar tahun 1970 adalah melalui Program Transmigrasi Tanaman Pangan. Seiring berjalannya waktu, tanaman pangan dirasa kurang memberikan hasil yang optimal sehingga secara berangsur lahan mereka beralih ditanami tanaman perkebunan, seperti sawit atau karet. Sementara itu, masyarakat lokal memperoleh lahannya secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan umumnya kepemilikan lahannya lebih luas, yaitu sekitar 1–5 ha per KK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, saat ini terdapat indikasi bahwa kaum muda setempat kurang tertarik pada dunia pertanian. Sebagian dari anak-anak mereka sudah sekolah ke jenjang yang tinggi dibanding orang tua mereka sehingga sebagian dari anak muda ini bekerja sebagai guru, PNS, ataupun keluar daerah sebagai pekerja pabrik atau pekerja jasa di perkotaan. Tinggallah orang tua mereka yang merawat kebun atau ternak mereka. Biasanya, lahan pekarangan oleh sebagian masyarakat ditanami dengan aneka sayuran, kemudian di lahan pekarangan belakang rumah untuk memelihara ternak mereka, seperti sapi, kambing, dan ayam, sedangkan kebun sawit mereka ada pada lahan belakang. Sementara itu, masyarakat lokal biasanya memiliki lahan kebun yang terpisah dengan rumah tinggal, berjarak sekitar 1–2 km.

Terbatasnya pengetahuan dan modal menjadikan masyarakat mengelola lahan pertanian/perkebunan mereka dengan sangat tradisional tanpa pemupukan yang optimal dan pemeliharaan sapi/kambing dengan pakan rumput yang ada di sekitar rumah mereka. Kotoran sapi/kambing sesekali dijadikan pupuk tanaman mereka, tetapi perkebunan dan ternak belum diintegrasikan sebagai pemacu peningkatan produksi hasil perkebunan/pertanian dan peternakan.

Petani umumnya memperoleh informasi harga sawit dari pedagang pengumpul dan mereka menerima begitu saja harga yang diberikan, tidak ada posisi tawar sedikit pun. Akibatnya, hasil yang diterima petani sangat rendah dan tidak cukup untuk membeli pupuk atau membiayai perawatan kebun. Begitu juga dengan penjualan ternak, dijual kepada pedagang pengumpul yang ada di sekitar desa. Para petani membawa ternak ke pasar dengan harapan dapat nilai jual lebih tinggi, tetapi urung dilakukan mengingat biaya angkut ke pasar ternak cukup mahal. Harga jual ternak biasanya bagus ketika menjelang Idul Adha. Dapat dijelaskan saluran pemasaran yang terjadi untuk hasil kebun sebagai berikut: petani – pedagang pengumpul – pedagang besar – pabrik; sedangkan untuk ternak: petani – pedagang pengumpul – pasar.

Di Bengkulu Utara, peneliti langsung bertemu dengan Kepala BPS untuk melakukan koordinasi, hadir bersama Ketua Tim Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Bengkulu Utara, Ketua Tim Manajemen Lapangan, 3 personil PML, dan anggota tim lainnya. Dalam diskusi, didapatkan informasi tentang proses perekrutan PPL/PML sampai dengan pendataan di lapangan. Informasi yang disampaikan BPS, pengumuman perekrutan petugas PPL dan PML dilakukan melalui website BPS Bengkulu Utara, begitu juga dengan hasil seleksi.

Menurut penjelasan Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Utara, proses rekrutmen serta pelatihan PPL dan PML dilakukan sendiri oleh BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Personil PPL dan PML yang lolos berasal dari daerah setempat dan menghemat biaya operasional. BPS hanya menyediakan honor dan premi iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kontrak kerja (satu s.d. dua bulan). Sementara itu, operasional seperti penginapan dan transportasi tidak disediakan oleh BPS karena PPL maupun PML merupakan masyarakat setempat.

Jumlah pendaftar untuk posisi PPL dan PML pada Sensus Pertanian 2023 mencapai sekitar 800 orang, dengan berbagai latar belakang peserta, seperti mahasiswa, S1 *fresh graduate*, lulusan SLA, ataupun mitra dan pekerja paruh waktu. Dari hasil seleksi, yang berhasil lulus sebanyak 322 orang. Sebelum melaksanakan tugas, PPL dan PML mendapatkan pelatihan mengenai mekanisme dan prosedur pendataan selama 3 hari efektif. PPL yang direkrut lebih banyak berasal dari yang berpengalaman (mitra) atau sebagian yang belum berpengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan BPS. Sementara itu, PML sebagian besar berasal dari PML yang berpengalaman (mitra) atau pernah terlibat sebagai PPL dalam kegiatan BPS.

Menurut penjelasan dari Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Utara, sebelum melaksanakan tugasnya, petugas Sensus Pertanian mendapatkan pelatihan secara berjenjang. Pelatihan berjenjang yang dimaksud adalah instruktur utama melakukan pelatihan instruktur nasional. Instruktur nasional melaksanakan pelatihan kepada instruktur daerah, Instruktur daerah melaksanakan pelatihan kepada petugas dan sudah disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pelatihan untuk PPL dan

PML dilaksanakan oleh instruktur daerah dan beberapa instruktur menjadi Koseka, khususnya Koseka yang berasal dari pegawai BPS Kabupaten Bengkulu Utara pada saat pelaksanaan pendataan Sensus Pertanian Tahun 2023. Pada saat pelatihan melibatkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai peserta pelatihan *sit in*. Pelibatan peserta dari OPD dimaksudkan untuk memberikan masukan sekaligus meminta dukungan dalam pelaksanaan pendataan Sensus Pertanian 2023. Koseka merupakan unsur penting dalam pengkoordinasian lapangan kegiatan Pendataan Sensus Pertanian Tahun 2023.

Proses pengumpulan data dilakukan PPL, yang dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh PML. PPL maupun PML direkrut oleh BPS berasal dari masyarakat setempat agar memudahkan dalam proses pengumpulan data karena mereka mengetahui kondisi wilayahnya, mengenal banyak masyarakat di wilayah tersebut, dan mengenal kondisi sosial masyarakatnya.

Dalam Sensus Pertanian 2023, Kabupaten Bengkulu Utara menurunkan 322 PPL dan PML, serta 19 Koseka (berasal dari organik BPS). Sasaran Sensus Pertanian 2023 tidak hanya unit pertanian perorangan (UPP), tetapi juga unit pertanian berbadan hukum (UPB), misal pertanian yang dilakukan perusahaan, dan unit pertanian lainnya (UTL), misalnya kegiatan pertanian yang dilakukan di pesantren.

Tabel 7.1 Sebaran PPL dan PML per Kecamatan di Bengkulu Utara

No.	Kecamatan	PML		PPL	PML dan PPL	Koseka	
		Organik	Mitra			Organik	Mitra
1.	Enggano		1	4	5	1	1
2.	Kerkap		2	12	14	1	
3.	Air Napal		2	9	11	1	
4.	Air Besi		2	10	12	1	
5.	Hulu Palik		2	11	13	1	
6.	Tap		1	8	9	1	
7.	Arga Makmur	2	3	34	39	1	
8.	Arma Jaya		2	11	13	1	
9.	Lais		2	12	14	1	

No.	Kecamatan	PML		PPL	PML dan PPL	Kosekta	
		Organik	Mitra			Organik	Mitra
10.	Batik Nau		2	12	14	1	
11.	Giri Mulya		2	14	16	1	
12.	Air Padang		1	6	7	1	
13.	Padang Jaya	1	4	29	34	1	
14.	Ketahun		4	22	26	1	
15.	Napal Putih		2	12	14	1	
16.	Ulok Kupai		2	11	13	1	
17.	Pinang Raya		4	22	26	1	
18.	Putri Hijau		3	20	23	1	
19.	Marga Sakti Sebelat		3	16	19	1	
JUMLAH		3	44	275	322	18	1

Keterangan: Jumlah PML dan PML di Bengkulu Utara 322 orang dan Kosekta 19 orang.

Sumber: Diolah dari BPS Bengkulu Utara 2023

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan Sensus Pertanian 2023 pada 19 kecamatan, BPS Kabupaten Bengkulu Utara menugaskan sebanyak 19 Kosekta. Dari 19 Kosekta tersebut, sebanyak 18 berasal dari pegawai BPS Kabupaten Bengkulu Utara dan 1 berasal dari mitra BPS (lihat Tabel 7.1). Mitra BPS yang dapat menjadi Kosekta adalah mitra BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah berpengalaman dalam mengikuti berbagai kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Kosekta tersebut sudah berpengalaman menjadi PPL dan PML sehingga diharapkan Kosekta ini dapat mengkoordinasikan PPL dan PML dalam pengumpulan data. Seorang PML dapat membawahi tujuh PPL (bisa sekitar 6-8 desa), dan setiap PPL harus menyelesaikan pendataan sebanyak 120 KK.

Menurut informasi dari Kepala BPS Bengkulu Utara, pelaksanaan pendataan Sensus Pertanian menggunakan moda *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI) atau menggunakan kertas sebagai pencatat hasil dari wawancara dengan penduduk. Penggunaan kuesioner tercetak merupakan pilihan yang terbaik dalam pendataan Sensus Pertanian 2023, mengingat jaringan internet yang sering tidak stabil. Pengisian kuesioner tercetak tidak memerlukan aplikasi dan perangkat

tertentu, serta tidak tergantung dengan koneksi internet. Pendataan dengan menggunakan metode *paperless* lewat aplikasi memang lebih efisien, karena secara pembiayaan relatif lebih murah dan lebih cepat dalam pengolahan data. Akan tetapi, metode pengumpulan data secara aplikasi banyak mengalami kendala, antara lain diperlukan perangkat pengumpul data berupa HP, tablet, maupun laptop yang bisa dibawa pada saat di lapangan. Hal ini tentunya akan memberatkan PPL. Selain itu, diperlukan koneksi internet ketika pengumpulan data di lapangan, sedangkan belum semua tempat terjangkau internet. Lalu, diperlukan pula server yang memadai untuk menerima data yang dikirim oleh pengumpul data secara bersamaan, bila tidak memadai maka menghambat proses pengiriman data dan juga pengumpulan data di lapangan.

D. Selisik Sensus Pertanian: Tantangan dan Dinamika Mendata Pertanian

PPL dalam Sensus Pertanian 2023 adalah Petugas Pendataan Lapangan Sensus dan PML adalah Pemeriksa Lapangan Sensus atau bisa juga disebut pemeriksa atau pengawas pendataan. PML mendampingi PPL saat melakukan pendataan di lapangan dan memberi solusi apabila PPL menemui masalah dalam pelaksanaan di lapangan (lihat Gambar 7.6).



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.6 PPL dan PML sedang melakukan Sensus Pertanian 2023.

Koseka yaitu anggota organik BPS yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan sensus pertanian di masing-masing kecamatan. Informasi yang diperoleh dari BPS Bengkulu Utara, bahwa Sensus Pertanian 2023 mencakup tujuh sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Beberapa kali peneliti mengikuti PPL melakukan pendataan; selesai wawancara selalu dilakukan *geo-tagging* dan gambar melalui aplikasi *Wilkerstat* BPS. *Wilkerstat* digunakan sebagai petunjuk PPL dalam melaksanakan pengumpulan data. Pada aplikasi tersebut, terdapat peta yang menunjukkan kedudukan penduduk pada GPS. Pada pendataan Sensus Pertanian 2023, pengumpul data melakukan *geo-tagging* untuk semua keluarga termasuk pada keluarga petani. Penentuan keluarga petani tersebut berdasarkan hasil konsultasi petugas dengan perangkat desa setempat atau pengurus RT dan RW (SLS).

Pada pendataan Sensus Pertanian 2023, pemerintah daerah mempunyai kepentingan terhadap hasilnya untuk bisa mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian serta mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin. Data tersebut juga diharapkan dapat membuat subsidi pemerintah, khususnya subsidi pupuk, tepat sasaran sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat utamanya petani.

Namun, dari pengamatan empiris lapangan, peneliti mendapatkan cerita pilu para PPL dan PML, suka duka petugas ketika ada di lapangan, serta permasalahan yang dihadapi. Suka duka petugas PPL ketika pengumpulan data, antara lain sulitnya menemui responden mengingat sebagian besar mereka pada pagi sampai dengan sore hari ada di kebun, sehingga harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Kondisi alam yang sulit diprediksi sering tiba-tiba turun hujan, sehingga pengumpulan data yang seharusnya bisa dilaksanakan menjadi tertunda. Begitu juga kondisi bentang alam Bengkulu Utara yang sebagian hutan, sungai, medan yang naik turun, dan jalanan yang rusak sulit dilalui, terkadang menyebabkan para peneliti dan petugas

terpeleset atau terjatuh. Perlu perjuangan ekstra untuk bisa sampai ke rumah responden, hal ini menjadi kendala target pengumpulan responden yang harus dicacah (Gambar 7.7).



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.7 Kondisi Bentang Lahan Infrastruktur Jalan yang Rusak

Selain permasalahan terkait kondisi bentang lahan, ada permasalahan penting lainnya dalam pendataan Sensus Pertanian 2023 yang perlu mendapat perhatian pihak BPS, karena dikhawatirkan bila tidak menjadi perhatian akan berpengaruh pada keakuratan data hasil pencacahan, yang akan berakibat pada ketidaktepatan bila digunakan sebagai data penting, apalagi bila digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting, yaitu disamakannya lama pelatihan pembekalan antara PPL baru dengan PPL mitra, yaitu sama selama tiga hari. Pengalaman empiris di lapangan memperlihatkan PPL baru masih canggung, dan belum lancar dalam menyampaikan substansi maupun dalam menggali informasi responden. Mereka kurang bisa melakukan ‘*probing*’ penelusuran dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

klarifikasi jawaban responden yang tidak jelas, tidak wajar, atau tidak sesuai pertanyaan. Walaupun terkadang ada PML yang mendampingi untuk membantu menjelaskan maksud pertanyaan di kuesioner, tetapi PML sendiri jumlahnya terbatas tidak bisa selalu mendampingi PPL di lapangan.

E. Menelisik Empiris Integrasi Peternakan dan Perkebunan di Bumi Raflesia Bengkulu Utara

Suara deru truk besar hilir mudik sepanjang jalan dari Bengkulu ke Bengkulu Utara. Suasana ramai ini dapat ditemukan setiap hari, memperlambat laju kendaraan lainnya. Dengan gagah perkasa truk-truk tersebut menguasai jalanan, kendaraan lain tidak bisa berharap untuk melaju mendahului, yang ada ialah bahaya yang mengancam diri. Semakin lengkap perjalanan dengan adanya kondisi jalan yang berkelok, naik turun, serta jalan bergelombang dan rusak semakin memperlambat perjalanan yang berjarak sekitar 60 km. Semestinya bisa ditempuh sekitar satu jam menjadi dua jam. Setiap hari truk-truk besar tersebut mengangkut sawit dari pengepul di desa-desa sekitar



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.8 Jalan Sepanjang Jalan Bengkulu menuju Bengkulu Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk dibawa ke perusahaan, sedangkan batu bara dibawa dari lokasi penambangan yang ada di desa untuk selanjutnya dibawa ke pabrik (Gambar 7.8).

Sepanjang perjalanan, di sisi kanan-kiri berjajar kebun sawit dan karet menghiasi pemandangan, berselang seling dengan masih luasnya hutan tropis menjadikan jalanan terasa sempit (Gambar 7.9).



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.9 Kebun Sawit dan Karet Sepanjang Jalan ke Bengkulu Utara

Masyarakat Bumi Raflesia kini menjadikan sawit sebagai primadona, dan ternak sapi sebagai pengaman kehidupan keluarga. Beberapa lahan yang dulunya persawahan, tanaman palawija secara berangsur kini menjadi kebun sawit. Banyak juga ditemui tanaman karet yang masih berproduksi, tetapi harga yang terus merosot sampai dengan Rp 6.000,- menjadikan mereka enggan untuk meneruskannya. Sebetulnya, tanaman sawit yang sudah berproduksi atau tanaman karet yang berproduksi telah ditanam belasan tahun yang lalu diturunkan orang tua mereka untuk dilanjutkan sebagai penopang kehidupan anak-anaknya atau penerusnya. Sebagai petani penerus, mereka tinggal menikmati hasil dengan setiap sebulan dua kali bisa

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.10 Hasil Panen Sawit di Pinggir Jalan yang Diambil Pengumpul

ndodos untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Hasilnya disetor di pengumpul dengan harga yang berlaku saat itu. Kebanyakan dari petani karet tidak mengetahui harga pasar yang berlaku, mereka menerima saja harga yang diberikan pengumpul (Gambar 7.10).

Persoalannya, kebanyakan petani pekebun tidak memelihara dan mengelola kebun sawit mereka dengan baik, mereka membiarkannya tumbuh tanpa ada pemupukan berkala atau pembersihan rumput-rumput di sekitar kebun mereka sehingga kebanyakan dari kebun sawit yang begitu luas ditumbuhi tanaman-tanaman liar (Gambar 7.11). Alasan yang hampir sama bila ditanyakan petani, yaitu tidak adanya biaya untuk membeli pupuk dan tenaga untuk membersihkan serta mempertahankan kualitas kesuburan tanah kebun mereka. Petani tidak menyadari apabila tanah perkebunan mereka tidak dikelola dengan baik, maka akan menurunkan kualitas tanah yang berakibat turunnya produksi bahkan rusaknya ekologis tanah. Sebagian petani menyengaja melepaskan sapi mereka di kebun sawit atau kebun karet mereka dengan harapan kotoran sapi cukuplah sebagai pupuk kebun tanpa mereka repot untuk memupuk serta menghemat biaya dan tenaga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.11 Kebun Sawit tanpa Pengelolaan

Hampir semua rumah tangga petani mempunyai ternak, seperti sapi, kambing, ayam, dan itik. Namun, kebanyakan belum mengelola dengan baik kotoran ternak mereka (Gambar 7.12). Kotoran ternak mereka dibiarkan menumpuk di kandang bila sudah dirasa cukup banyak diambil langsung digunakan untuk memupuk tanaman sayuran mereka yang banyak diusahakan oleh petani di lahan pekarangan sekitar rumah. Sisa pupuk biasanya ditaruh begitu saja untuk



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.12 Kandang Sapi dengan Kotoran yang Belum Dikelola

pemupukan berikutnya. Sapi sebagai hewan peliharaan primadona dijadikan sebagai tabungan dan pengaman bila dibutuhkan, dijual bila dibutuhkan untuk biaya sekolah, perkawinan, atau membangun rumah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, petani mengan-dalkan hasil tanaman sayuran mereka yang ditanam di kebun, se-bagian untuk konsumsi keluarga bila berlebih sebagian dijual (lihat Gambar 7.13). Tanaman sawit digunakan untuk kebutuhan mingguan atau bulanan karena sawit bisa dipanen dua minggu sekali. Sebagian dari petani mempunyai hasil tambahan penghasilan dengan menjadi buruh tani, jualan/warung, ojek, tukang, pembuat makanan, dan ART, dari penghasilan tambahan tersebut biasanya mereka kumpulkan untuk beli sapi.

Ada yang menarik dari pengalaman emik terkait pemeliharaan sapi. Pada masyarakat desa eks-transmigrasi (asal Jawa Tengah dan Jawa Barat), seperti yang ada di Desa Sido Urip dan Desa Tambak Rejo, sebagian besar mereka memelihara hewan ternak sapi atau kambing dengan dibuatkan kandang di belakang rumah, mereka memberi makan tiga kali sehari (Gambar 7.14). Setiap hari mereka mencari rumput, atau dikenal dengan istilah *ngarit*, di kebun sekitar desa untuk memenuhi kebutuhan makan ternaknya.



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.13 Tanaman Sayuran di Pekarangan Rumah



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.14 Pemeliharaan Ternak Dikandangan

Sementara itu pada masyarakat lokal etnis Rajang, seperti petani di Desa Pematang Balam, hampir semua ternak sapi mereka dibiarkan lepas merumput di bawah pohon-pohon sawit atau karet mereka yang jarak dari rumah tempat tinggal petani cukup jauh, sekitar 200 meter sampai dengan 1 km (Gambar 7.15). Selama ini aman, tidak pernah tersiar kabar sapi-sapi itu hilang.

Kearifan lokal dari masyarakat Desa Pematang Balam ini untuk memanggil sapi-sapi mereka yang mengelana di kebun, cukup dengan “*membakar sisa-sisa ranting maka sapi-sapi tersebut akan berdatangan berkumpul di area sekitar pembakaran api tersebut*”. Kehilangan ternak sapi atau yang tidak kembali belum pernah terjadi, menurut info dari Ibu Rasinah menceritakan pengalaman berdampingan dengan etnis asli menjelaskan bahwa sapi-sapi tersebut pasti akan kembali



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.15 Pemeliharaan Ternak Sapi Diumbar di Kebun Sawit atau Kebun Karet

Buku ini tidak diperjualbelikan.

walau telah berjalan jauh dari areal kebun mereka. Kearifan lokal yang diyakini turun temurun, yaitu bahwa ternak sapi mereka walau berjalan jauh untuk cari rumput atau untuk cari pasangan kawin, pasti kembali ke areal kebun mereka. Masyarakat mempunyai kepercayaan “*sapi yang sudah diberi minum perasaan keringat pemiliknya yang dicampur terlebih dahulu dengan air di ember, akan membuat sapi-sapi tersebut tidak akan bisa jauh-jauh meninggalkan sang pemilik dan pasti kembali*”.

Integrasi peternakan dan pertanian belum terjadi dengan baik, belum mendukung keberlanjutan kehidupan peternakan maupun perkebunan serta meningkatkan produksi apalagi penggunaan teknologi belum ada sama sekali. Usaha pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan belum terstruktur, masing-masing dikerjakan parsial belum saling mendukung.

F. Problematik Hulu dan Hilir Integrasi Peternakan dan Perkebunan

Teori integrasi peternakan dan perkebunan yang dikemukakan H.S. Onwuka (1999) menggabungkan kegiatan perkebunan dengan peternakan dalam satu sistem produksi terpadu. Teori ini membahas manfaat integrasi antara tanaman perkebunan dan ternak, seperti penggunaan jerami sebagai pakan ternak, penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk untuk perkebunan, atau pemangkasan tanaman perkebunan yang digunakan sebagai pakan ternak. Senada dengan Onwuka, Dissanayaka et al. (2023) menjelaskan bahwa peternakan dan pertanian menekankan pentingnya menggabungkan kegiatan peternakan dan pertanian dalam suatu wilayah terintegrasi. Teori ini berfokus pada manfaat sinergi antara peternakan dan perkebunan, seperti penggunaan pupuk organik dari limbah peternakan untuk memupuk tanaman perkebunan atau penggunaan limbah sawit untuk pakan ternak. Begitu juga teori yang dikemukakan oleh Purnomo (2010) yang menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya secara efisien, seperti menggunakan limbah pertanian sebagai pakan ternak atau menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk organik.

Integrasi peternakan dan perkebunan mendapat dukungan secara sah dari pemerintah seperti tertuang dalam Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Permentan No. 105 Tahun 2014 yang mengatur usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha sapi potong (turunan dari Perpres No. 48 Tahun 2013).

1. Permasalahan Hulu Integrasi Peternakan dan Perkebunan

Permasalahan hulu dan hilir integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara dapat melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi hubungan antara sektor peternakan dan perkebunan di daerah tersebut. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan peternakan dengan perkebunan, seperti jalan dan jaringan transportasi. Keterbatasan ini dapat menyulitkan distribusi pakan ternak, limbah ternak, dan produk pertanian dari perkebunan ke peternakan, serta memengaruhi ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi peternakan.

Salah satu permasalahan di tingkat hulu yang sering terjadi adalah keterbatasan pasokan pakan ternak yang berkualitas. Kebanyakan masyarakat mendapatkan rumput yang tumbuh di sekitar kebun mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya produksi pakan ternak di daerah tersebut atau sulitnya distribusi pakan dari luar daerah. Keterbatasan pasokan pakan dapat memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan hewan ternak, serta menghambat perkembangan peternakan di Bengkulu Utara. Begitu juga ketersediaan air untuk peternakan penting, selain untuk minum juga untuk membersihkan kotoran sapi. Sebagai contoh, di Desa Pematang Balam, semua penduduk menggunakan air PAM untuk kebutuhan sehari-hari karena kualitas air tanah yang buruk di wilayah tersebut. Kualitas air merupakan faktor penting dalam kegiatan peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara, sedangkan air PAM tidak sesuai untuk minum ternak, tanaman perkebunan atau pertanian karena ada tambahan bahan kimia di dalamnya. Air yang tercemar dapat berdampak negatif pada kesehatan ternak dan tanaman, serta mengurangi produktivitas peternakan dan perkebunan.

Kurangnya infrastruktur pengairan yang memadai menjadi hambatan dalam integrasi peternakan dan perkebunan. Sistem irigasi yang tidak memadai atau tidak merata dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketersediaan air bagi tanaman dan ternak. Hal ini dapat mengganggu produksi dan produktivitas sektor peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara. Tidak adanya petugas penyuluh peternakan di desa-desa yang peneliti kunjungi juga belum adanya pelatihan-pelatihan terkait integrasi peternakan dan perkebunan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya ancaman serius dalam integrasi peternakan dan perkebunan. Kondisi lingkungan yang tidak terjaga dan kurangnya sistem pengendalian penyakit yang efektif dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang merugikan peternakan dan perkebunan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan menurunkan produksi secara keseluruhan.

Dari hasil empiris di desa-desa yang peneliti kunjungi, tidak berkembangnya integrasi peternakan dan perkebunan lebih pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dan petani. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dan petani dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan integrasi antara peternakan dan perkebunan (Nur et al., 2018). Pengetahuan yang terbatas mengenai manajemen peternakan dan teknik pertanian yang modern dapat menghambat peningkatan produksi dan efisiensi di sektor ini.

Untuk mengatasi permasalahan hulu integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara, langkah-langkah yang dapat diambil oleh dinas terkait antara lain melakukan penyuluhan bagaimana meningkatkan produksi pakan ternak lokal, memperbaiki kualitas air melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan infrastruktur pengairan, memperkuat sistem pengendalian penyakit hewan dan tanaman, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dan petani melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan.

2. Permasalahan Hilir

Permasalahan hilir integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara, yaitu kurangnya fasilitas pengolahan dan pemrosesan. Salah

satu permasalahan yang umum terjadi adalah kurangnya fasilitas pengolahan dan pemrosesan yang memadai untuk produk peternakan dan perkebunan. Keterbatasan fasilitas ini dapat menghambat pengolahan, pengawetan, dan peningkatan nilai tambah produk sehingga memengaruhi pemasaran dan daya saing produk peternakan dan perkebunan. Begitu juga keterbatasan akses pasar dan distribusi, salah satu kendala penting dalam integrasi hulu dan hilir adalah keterbatasan akses pasar dan distribusi yang efisien. Kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai dan jaringan distribusi yang efektif dapat menyulitkan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini dapat membatasi peluang ekspansi serta meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan di pasar.

Belum lagi masalah standar kualitas dan keamanan produk. Ketika produk perkebunan dan peternakan diintegrasikan dalam rantai pasokan hilir, permasalahan terkait standar kualitas dan keamanan menjadi kritis. Kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap standar tersebut dapat menghambat akses ke pasar yang lebih ketat dalam hal persyaratan kualitas dan keamanan produk. Penanganan yang tidak tepat terhadap produk yang dihasilkan dapat mengurangi kepercayaan konsumen serta membahayakan reputasi sektor peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara.

Selanjutnya, pengolahan limbah dan dampak lingkungan. Integrasi peternakan dan perkebunan juga menghadapi tantangan terkait pengolahan limbah dan dampak lingkungan. Limbah dari peternakan dan pengolahan pertanian/perkebunan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air tanah dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk yang tidak tepat juga dapat berdampak negatif pada lingkungan. Perlindungan lingkungan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan ekosistem serta mengancam keberlanjutan sektor peternakan dan perkebunan di daerah tersebut.

Tidak kalah penting, ketergantungan pada perantara. Ketergantungan yang tinggi pada perantara dalam rantai pasokan juga menjadi permasalahan. Petani dan peternak sering kali bergantung

pada perantara untuk memasarkan produk mereka. Keterlibatan perantara ini dapat menyebabkan penurunan harga jual produk dan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh petani dan peternak.

Untuk mengatasi permasalahan hilir integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan investasi dalam fasilitas pengolahan dan pemrosesan, memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar kualitas, memperkuat pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan akses langsung ke pasar bagi petani dan peternak dengan mengurangi ketergantungan pada perantara.

3. Bergerak tanpa Maju

Di tingkat masyarakat belum terjadi integrasi yang signifikan antara peternakan dan perkebunan. Perkebunan sawit, karet, kopi, dan sebagainya yang diusahakan dibiarkan tumbuh sendiri tanpa pengelolaan yang berarti, begitu juga usaha tani lainnya, seperti tanaman hortikultura (buah-buahan dan sayuran), belum terstruktur dengan baik, baik tanaman perkebunan atau pertanian masih spasial. Demikian juga sektor peternakan belum dikelola dengan baik, pakan didapatkan dari rumput yang tumbuh liar di sekitar tempat mereka tinggal untuk ternak (sapi, kambing), bahkan sebagian masyarakat melepas saja ternak mereka di kebun sawit atau karet dengan makan rumput seadanya yang tumbuh di sekitar kebun tersebut. Kotorannya ditumpuk di kandang bila menurut mereka sudah cukup banyak maka langsung ditaruh saja di kebun mereka tanpa pencampuran dengan bahan atau proses lain. Sebagian petani ada yang melepaskan begitu saja ternak sapi mereka di kebun karet atau kebun sapi untuk mencari makan sendiri (rumput-rumput yang tumbuh liar), mereka dengan keyakinan kultur turun temurun bahwa kotoran sapi tersebut cukuplah sebagai pupuk kebun mereka.

Tidak terjadinya integrasi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sektor peternakan dan perkebunan dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan integrasi yang efektif di

tengah masyarakat. Keterbatasan ini dapat menghambat pertukaran informasi, kesepakatan kerja sama, dan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sektor. Masyarakat belum mempunyai pengetahuan penanganan limbah ternak dan penggunaan limbah perkebunan sebagai sumber nutrisi untuk peternakan sering kali belum optimal. Masalah ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan hewan, serta memengaruhi keberlanjutan produksi pertanian dan peternakan.

Dalam integrasi peternakan dan perkebunan, optimalisasi penggunaan lahan menjadi penting. Namun, yang terjadi pada masyarakat di Bengkulu Utara terjadi persaingan lahan antara kedua sektor ini. Sebagai contoh, bahwa penggunaan lahan yang tidak efisien (tidak dikelola) dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan, serta berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi di daerah tersebut.

Persoalan lain, yaitu kurangnya akses ke pasar yang luas dan berkualitas merupakan masalah serius yang dihadapi oleh peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara. Penjualan hasil kebun maupun ternak dilakukan di pengumpul tanpa bisa tawar menawar harga, sehingga sering mereka yang dirugikan karena harga yang menentukan pengumpul. Terbatasnya akses ke pasar dapat menghambat pemasaran produk pertanian dan peternakan secara efektif, sehingga memengaruhi pendapatan petani dan peternak.

Untuk mengatasi permasalahan hulu dan hilir ini, pihak yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah, antara lain meningkatkan investasi dalam infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi, mendorong kerja sama antara peternakan dan perkebunan melalui dialog dan koordinasi yang lebih baik, mendorong pengelolaan limbah yang berkelanjutan, mempromosikan penggunaan lahan yang efisien, serta meningkatkan akses ke pasar melalui pelatihan dan dukungan dalam pemasaran produk.

G. Kegagalan Petani Mengintegrasikan Peternakan dan Perkebunan

Integrasi peternakan dan perkebunan adalah pendekatan yang menggabungkan kegiatan peternakan dengan kegiatan perkebunan dalam satu sistem yang saling terkait dan saling menguntungkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara produksi tanaman dan hewan, memaksimalkan penggunaan lahan, dan meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan (Martin et al., 2016).

Integrasi peternakan dan perkebunan umum adalah penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk organik dalam perkebunan. Kotoran hewan mengandung nutrisi yang dapat memberikan pupuk alami untuk tanaman, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, hewan yang dipelihara di dekat perkebunan dapat membantu dalam pengendalian hama dan gulma dengan memakan serangga atau rumput yang merugikan tanaman.

Integrasi peternakan dan perkebunan juga dapat melibatkan pemanfaatan limbah atau sisa-sisa tanaman perkebunan sebagai pakan ternak. Misalnya, limbah sisa tanaman kelapa sawit dapat diolah menjadi pakan hijauan atau pakan konsentrat untuk ternak sapi. Hal ini membantu mengurangi limbah perkebunan dan memberikan nilai tambah kepada petani ternak (Jose & Dollinger, 2019).

Integrasi antara peternakan dan perkebunan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memanfaatkan sinergi antara dua sektor tersebut, dengan tujuan meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan lahan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun integrasi peternakan dan perkebunan memiliki potensi manfaat yang signifikan, terdapat beberapa permasalahan di lapangan di lokasi pendataan yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, kondisi di lapangan kebun sawit atau kebun karet terletak di tempat yang berbeda dengan usaha peternakan. Kalau pun peternakan dan perkebunan terletak dalam satu tempat yang sama, tidak terjadi integrasi. Peternakan

memerlukan lahan untuk padang rumput atau ladang pakan ternak, sedangkan perkebunan memerlukan lahan untuk menanam tanaman komersial. Konflik semacam ini dapat menyulitkan upaya integrasi yang efektif. Umumnya, pengelolaan peternakan dan perkebunan belum terstruktur dengan baik, dilakukan spasial tidak ada kegiatan antara peternakan dan perkebunan yang saling terkait.

Masyarakat di sekitar Bengkulu Utara belum mempunyai pengetahuan tentang penggunaan pupuk dan pestisida di perkebunan yang dapat mencemari air dan tanah yang digunakan untuk peternakan. Pengelolaan yang tidak tepat dari dampak-dampak ini dapat merusak ekosistem lokal dan kualitas lingkungan.

Sulitnya mengintegrasikan peternakan dan perkebunan juga karena ada perbedaan dalam aspek manajemen untuk diintegrasikan, misalnya sistem manajemen peternakan biasanya melibatkan aspek kesehatan hewan, nutrisi, dan kebutuhan habitat, sementara perkebunan lebih berfokus pada pengelolaan tanaman dan faktor iklim. Perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan dalam merancang sistem integrasi yang efektif. Tanpa ada penyuluhan dan pendampingan mustahil terjadi integrasi tersebut (Bussoni et al., 2019).

Masalah lain lagi ialah integrasi peternakan dan perkebunan memerlukan sumber daya yang cukup besar, termasuk lahan, air, dan tenaga kerja. Di Bengkulu Utara, ketersediaan sumber daya ini mungkin terbatas. Misalnya, luas lahan, SDM, dan pengetahuan terbatas, sehingga sulit untuk melaksanakan integrasi secara optimal. Selain itu, alokasi sumber daya yang tidak seimbang antara peternakan dan perkebunan juga dapat menjadi kendala dalam integrasi.

Pada umumnya, kegagalan petani di dalam merespons kebijakan dan program pertanian berkelanjutan disebabkan karena petani tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebijakan dan program pertanian berkelanjutan yang telah diimplementasikan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaktahuan mereka tentang manfaat dan langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk mematuhi kebijakan tersebut. Petani sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti lahan, air, benih, dan pupuk. Kebijakan pertanian berkelanjutan yang

menuntut penggunaan sumber daya secara efisien mungkin sulit dilaksanakan oleh petani yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Petani sering kali beroperasi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, yakni ketika terjadi fluktuasi harga jual komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan serta biaya produksi yang tinggi. Ditambah lagi akses yang terbatas ke pasar dapat menghambat kemampuan mereka untuk merespons kebijakan dan program pertanian berkelanjutan. Masih banyak petani memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi modern dan pengetahuan tentang praktik pertanian berkelanjutan. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Menerapkan kebijakan dan program pertanian berkelanjutan sering kali memerlukan perubahan pola pikir dan pendekatan baru dalam mengelola lahan dan sumber daya. Petani yang telah terbiasa dengan praktik-praktik konvensional mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Berbagai permasalahan akan muncul apabila petani gagap dalam merespons kebijakan dan program pertanian berkelanjutan. Kecenderungan yang terjadi ialah petani akan tetap bergantung pada praktik pertanian konvensional yang mungkin tidak ramah lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, penurunan kualitas tanah, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Kebijakan dan program pertanian berkelanjutan sering kali dirancang untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, kekeringan, atau banjir. Jika petani tidak mampu merespons kebijakan ini, mereka mungkin tidak siap menghadapi perubahan iklim tersebut, yang dapat mengakibatkan kerugian hasil panen dan ketidakstabilan ekonomi.

Kebijakan dan program pertanian berkelanjutan biasanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam jangka panjang dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Jika petani tidak menerapkan langkah-langkah yang sesuai, mereka mungkin mengalami penurunan produktivitas dan kesulitan dalam menjaga usaha pertanian mereka secara berkelanjutan.

Banyak kebijakan dan program pertanian berkelanjutan juga berfokus pada meningkatkan akses petani ke pasar yang adil dan berkelanjutan. Jika petani tidak merespons kebijakan ini, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka atau bersaing dengan petani lain yang telah menerapkan praktik berkelanjutan. Kebijakan dan program pertanian berkelanjutan sering kali memberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat tambahan, seperti akses ke pendidikan, pelatihan, subsidi, atau bantuan teknis. Jika petani tidak merespons kebijakan ini, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka, mendapatkan dukungan finansial, atau memperoleh pengetahuan baru. Penting bagi petani untuk dapat merespons dengan baik kebijakan dan program pertanian berkelanjutan agar mereka dapat memanfaatkan peluang, menghadapi tantangan, dan mencapai keberlanjutan dalam usaha pertanian mereka.

H. Utopia Integrasi Peternakan dan Perkebunan: Mengurai Jejak Keterbatasan Petani

Utopia integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara seharusnya menggambarkan sebuah visi ideal di mana sektor peternakan dan perkebunan bekerja secara sinergis untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara produksi pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah utopia, seharusnya peternakan dan perkebunan diintegrasikan melalui praktik agroforestri. Pohon-pohon ditanam secara strategis di antara lahan pertanian/perkebunan dan peternakan untuk menciptakan keanekaragaman hayati, menjaga kesuburan tanah, dan memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan.

Pohon-pohon yang ditanam di sekitar lahan pertanian dan peternakan dapat memberikan naungan bagi ternak, mengurangi tekanan panas, serta memberikan tempat perlindungan bagi hewan dan serangga yang menguntungkan. Selain itu, pohon juga membantu dalam penyerapan karbon dioksida dan menjaga kualitas udara. Dalam Utopia ini, limbah organik dari peternakan digunakan secara efektif

sebagai pupuk organik untuk perkebunan. Kotoran ternak dan limbah pertanian lainnya diolah menjadi pupuk kompos yang diterapkan pada tanaman di perkebunan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, menjaga keseimbangan nutrisi tanah, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Dalam Utopia di Bengkulu Utara, seharusnya terdapat diversifikasi tanaman dan ternak. Selain komoditas utama, seperti kelapa sawit, kopi, dan coklat, sebaiknya perkebunan juga mengintegrasikan tanaman pangan, seperti jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Diversifikasi tanaman ini membantu dalam menjaga keanekaragaman pangan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperluas pasar untuk petani.

Dalam hal peternakan, diversifikasi ternak juga menjadi prioritas. Selain sapi potong dan kambing, peternakan juga melibatkan pemeliharaan ayam, bebek, atau ternak lainnya. Seharusnya diversifikasi ternak ini dapat memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi peternak, serta memperkaya aspek pangan dan gizi di daerah tersebut. Dalam Utopia, masyarakat petani peternak, teknologi tepat guna belum diterapkan dalam sektor peternakan dan perkebunan. Apalagi teknologi canggih seperti penggunaan sensor untuk pemantauan dan pengendalian hama serta penyakit pada tanaman, atau sistem otomatisasi dalam manajemen peternakan, yang bisa membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi belum dikenal oleh masyarakat umumnya.

Utopia integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara semestinya memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat. Pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang relevan diberikan kepada petani dan peternak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Koperasi petani dan peternak seharusnya didirikan untuk mendorong kolaborasi, pertukaran informasi, dan peningkatan keuntungan bersama.

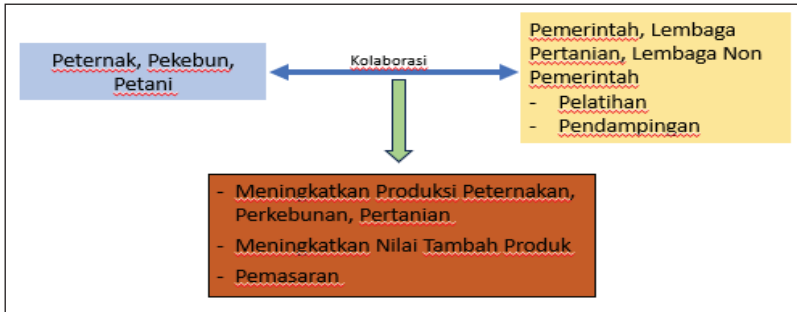
Melalui utopia integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara, diharapkan tercapai keselarasan antara produksi pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Mengurai Jejak Keterbatasan Petani

Di Bengkulu Utara, produksi, mata rantai, dan pengelolaan pascapanen merupakan aspek penting dalam sektor pertanian maupun perkebunan. Petani di Bengkulu Utara berupaya meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan mereka meskipun menghadapi beberapa tantangan. Mereka menggunakan teknik pertanian tradisional untuk mengoptimalkan lahan yang terbatas. Petani melakukan pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim di daerah ini. Mereka juga berusaha mengatasi permasalahan, seperti serangan hama, penyakit tanaman, dan fluktuasi cuaca yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

Mata rantai pertanian dan perkebunan di Bengkulu Utara melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani hingga konsumen akhir. Setelah panen, produk pertanian atau perkebunan dijual melalui jalur distribusi yang melibatkan pengepul, pedagang, dan pasar lokal. Namun, akses petani ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional, masih terbatas. Kendala seperti infrastruktur yang kurang memadai dan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan dalam memasarkan produk pertanian secara efektif dan efisien. Dalam menghadapi tantangan tersebut, sebaiknya pemerintah, lembaga pertanian, dan organisasi non-pemerintah di Bengkulu Utara bekerja sama memberikan dukungan kepada petani, dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan teknik modern, pengolahan pasca panen, serta peningkatan akses pasar. Kolaborasi ini (Gambar 7.16) bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, meningkatkan nilai tambah produk, dan membantu petani dalam memasarkan hasil mereka dengan lebih efektif.

Meskipun masih terdapat tantangan dalam produksi, mata rantai, dan pengelolaan pascapanen, petani di Bengkulu Utara tetap gigih dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Dengan dukungan yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan sektor pertanian di Bengkulu Utara dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dan masyarakat setempat.



Gambar 7.16 Mata Rantai Peternakan, Perkebunan, dan Pertanian

Di Bengkulu Utara, sektor peternakan memainkan peran penting dalam perekonomian dan pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Peternakan di Bengkulu Utara mencakup berbagai jenis ternak, seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan itik. Peternakan ini memberikan kontribusi penting dalam penyediaan daging, susu, telur, dan produk olahan lainnya. Namun, petani peternakan di Bengkulu Utara belum berusaha meningkatkan produktivitas ternak mereka, apabila dilakukan penerapan manajemen yang baik, pakan yang berkualitas, dan perawatan yang optimal tentunya akan meningkatkan produktivitas ternak. Mata rantai produk peternakan di Bengkulu Utara dilakukan dengan tahapan, petani peternakan menjual ternak mereka kepada pengepul atau pedagang hewan hidup. Selanjutnya didistribusikan ke pasar lokal atau dijual melalui pengecer dan pasar tradisional.

Pengelolaan pasca-panen dalam sektor peternakan di Bengkulu Utara belum ada kerja sama dengan lembaga terkait seperti dinas peternakan dan badan pengawas pangan diperlukan untuk memastikan standar pengelolaan pasca-panen yang baik.

Meskipun ada upaya dalam meningkatkan sektor peternakan di Bengkulu Utara, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi termasuk infrastruktur yang terbatas, akses pakan yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan teknis dalam pengelolaan peternakan yang modern. Dukungan

pemerintah dan lembaga terkait dalam penyediaan pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses pasar menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam hal mata rantai, kolaborasi antara peternak/petani, pengepul, pengolahan, dan pasar sangat penting. Kolaborasi ini akan membantu dalam memperkuat mata rantai produk peternakan atau perkebunan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani maupun peternak dan masyarakat di Bengkulu Utara.

Dengan pengelolaan pasca-panen yang baik, produk peternakan dan perkebunan dari Bengkulu Utara dapat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk memasuki pasar yang lebih luas. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk peternakan dan perkebunan lokal serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani dan pelaku usaha di sektor peternakan maupun perkebunan di Bengkulu Utara.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Bumi Raflesia Berjuang Tanpa Batas

Perjalanan keluarga petani di Bumi Raflesia merupakan kisah yang kaya akan pengalaman, perjuangan, dan dedikasi dalam menjalankan profesi pertanian yang diwariskan dari generasi ke generasi (Gambar 7.17). Bengkulu Utara menyimpan kisah nyata perjalanan keluarga petani Jawa yang didatangkan ke Bengkulu Utara sebagai transmigrasi kolonisasi. Mereka kini adalah generasi kedua, ketiga, bahkan keempat yang masih tinggal di Kecamatan Arga Makmur, Padang Jaya, dan Atma Jaya.

Menurut penuturan kakeknya, yang disampaikan ke orang tuanya dan dituturkan ceritanya ke Bapak Paiman (cucunya), mereka dahulu ikut program transmigrasi kolonisasi pada tahun 1930-an, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Begitu juga awal kisah kehidupan para transmigran pertama di Bengkulu Utara harus memulai hidup baru di daerah yang tidak mereka kenal, pada jaman dahulu hidup sebagai transmigran bukan hal yang menyenangkan. Para transmigran per-



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.17 Petani dan Peternak Generasi Ketiga Eks-Trans di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur

tama di Bengkulu Utara didatangkan dari Pulau Jawa. Pada masa itu, Belanda sangat berkuasa penuh atas rakyat Indonesia. Sebanyak 1.403 jiwa masyarakat Kebumen dan Banyumas Provinsi Jawa Tengah dikumpulkan menjadi satu kelompok, untuk dibawa bertransmigrasi di suatu tempat yang dulunya masih hutan belukar, dan kini dikenal dengan sebutan Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Transmigran pertama yang datang di Kabupaten Bengkulu Utara menyeberang dari Pulau Jawa melalui jalur darat, kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda diberi modal untuk bercocok tanam. Pada jaman penjajahan, para transmigran dikenal sebagai trans-kolonialisasi. Dengan memakan waktu sehari-hari bahkan diperkirakan hingga satu pekan lebih, para kepala keluarga (KK) transmigran yang diangkut menggunakan mobil truk akhirnya tiba di Bengkulu. Setelah itu, masing-masing KK diberi 0,25 hektare lahan pekarangan dan mendirikan rumah, serta 0,75 hektare lahan untuk mengembangkan persawahan. Mereka harus mengolah lahan yang telah diberikan secara mandiri. Hari-hari pun berlalu, masa-masa kelam yang silih-berganti menyelimuti kehidupan pun mulai ditinggalkan dan dilupakan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Generasi yang ada sekarang, yakni keturunan warga eks-trans, merasakan bahwa Bengkulu Utara adalah tempat leluhur mereka, tanah kelahiran mereka dan sudah berharmoni dengan alam lingkungannya (penuturan Bapak Saidi, warga Desa Sido Urip, lihat Gambar 7.18). Keluarga petani memulai perjalanan mereka di tanah leluhur dengan menjalankan praktik pertanian yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka mengenal lahan pertanian secara mendalam, mengetahui kondisi tanah, dan memahami siklus alam serta pola tanam yang sesuai dengan lingkungan setempat. Mereka menjaga tradisi dan kearifan lokal dalam praktik pertanian mereka, menghormati nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Selama bertahun-tahun, keluarga petani terus menghadapi tantangan dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Mereka berjuang menghadapi perubahan iklim, bencana alam, dan fluktuasi harga pasar. Namun, mereka terus melanjutkan usaha mereka dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi untuk bertahan dengan usaha sampingan selain bertani (Gambar 7.18).



Foto: Siti (2023)

Gambar 7.18 Keluarga Bapak Saidi di Desa Sido Urip Sudah Berharmoni dengan Lingkungannya.

Perjalanan keluarga petani juga melibatkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas dengan komunitas sekitar. Mereka saling membantu dalam kegiatan pertanian, berbagi pengetahuan, dan bergotong royong dalam menghadapi tantangan bersama. Mereka juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Kini, warga desa eks-transmigrasi sudah turun menurun melanjutkan kehidupan keluarga mereka, sebagian kecil masih melanjutkan pertanian sebagian besar lainnya sudah mengubah lahan pertanian mereka menjadi kebun sawit atau karet. Sebagian lainnya bahkan sudah tidak hanya menopang kehidupan mereka dengan memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan saja, tetapi sudah banyak generasi muda yang telah memilih kehidupannya, bekerja di bidang lain selain pertanian. Sekarang masyarakat kita hidup tidak hanya memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan, karena sudah banyak generasi muda yang memilih bekerja di perkantoran, ada juga yang menjadi guru.

Peningkatan perekonomian terlihat dari tidak lagi ditemui rumah kayu seperti dulu, kini semua rumah sudah berdinding tembok, dan lantai keramik atau ubin (Gambar 7.19). Hampir setiap rumah memiliki ternak sapi atau ternak kambing juga ayam dan itik. Ternak sapi



Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi investasi bagi hampir semua penduduk karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang mudah diuangkan bila ada kebutuhan.

Perjalanan keluarga petani tidak hanya menggambarkan sejarah dan pengalaman mereka, tetapi juga mengilustrasikan keberlanjutan pertanian, perjuangan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka adalah penjaga kearifan lokal dan penjaga sumber daya alam.

“Bukan Sebuah Akhir Perjuangan Integrasi Peternakan dan Perkebunan di Bengkulu Utara” adalah ungkapan yang menggambarkan semangat dan tekad yang kuat yang harus didengarkan para pelaku usaha peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara untuk terus melanjutkan perjuangan mereka dalam mengintegrasikan kedua sektor tersebut. Meskipun mungkin menghadapi tantangan dan rintangan, mereka tetap harus berkomitmen untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan dalam praktik integrasi tersebut.

Pelaku usaha peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara harus terus berjuang untuk mengintegrasikan kedua sektor ini secara harmonis. Mereka harus berusaha menciptakan sistem yang saling mendukung, di mana keberadaan peternakan memberikan manfaat bagi perkebunan dan sebaliknya. Misalnya, limbah organik dari peternakan digunakan sebagai pupuk untuk perkebunan, sementara pakan ternak dapat dihasilkan dari sisa-sisa pertanian.

Integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara harus bisa mendorong diversifikasi usaha dan keterpaduan antara berbagai komoditas. Peternakan tidak hanya terbatas pada satu jenis ternak, tetapi juga melibatkan variasi hewan ternak yang melengkapi kebutuhan perkebunan. Begitu pula, perkebunan tidak hanya berfokus pada satu jenis tanaman, tetapi juga mencakup tanaman pakan untuk hewan ternak. Kejuangan integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara harus melibatkan pemanfaatan lahan secara optimal. Lahan pertanian dan perkebunan digunakan secara efisien dan dikombinasikan dengan baik, memaksimalkan hasil produksi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya,

peternakan dapat ditempatkan di antara lahan perkebunan untuk memanfaatkan area yang tersedia dengan lebih efektif.

Pelaku usaha peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara sebaiknya terus berjuang untuk meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Mereka bekerja sama dalam kelompok tani, koperasi, atau asosiasi untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan mengembangkan praktik terbaik dalam integrasi peternakan dan perkebunan. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian juga penting dalam mendukung upaya ini.

Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat: Kejuangan integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara tidak hanya bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sektor tersebut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan produksi dan pendapatan, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada petani, peternak, dan masyarakat setempat secara keseluruhan. Melalui semangat dan ketekunan dalam integrasi peternakan dan perkebunan, kejuangan ini tidak akan pernah berakhir. Pelaku usaha terus beradaptasi, mengembangkan strategi inovatif, serta bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik dan keberlanjutan yang berkelanjutan di Bengkulu Utara.

J. Penutup: Pemastian Data Sensus Pertanian Akurat untuk Perencanaan dan Pengembangan Berkelanjutan

Kilas balik pendataan dalam sensus pertanian di Bengkulu Utara mencerminkan upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif tentang sektor pertanian di wilayah tersebut. Hasil pengumpulan data dan informasi bahwa ketersediaan pakan sapi melalui sinergi dengan kebun sawit dan hasil samping proses pengolahan hasil kebun, serta pemanfaatan kotoran sapi secara maksimal, belum dilaksanakan oleh sebagian besar petani kecil, mereka mengelola perkebunan dan peternakan secara spasial, dan sistem ini yang dipraktikkan secara alami dan turun-temurun oleh petani setempat. Penyuluh pertanian/peternakan tidak pernah hadir

untuk memberikan informasi bagaimana mengintegrasikan hasil perkebunan dan peternakan agar mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

Petani cenderung tidak mengelola ternak dan perkebunan secara terpadu, padahal hasil perkebunan merupakan sumber pendapatan utama mereka dan peternakan merupakan keputusan investasi utama mereka untuk menunjang kehidupan keluarga. Peternakan dan perkebunan bila diintegrasikan akan meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Hasil pendalaman emik sensus pertanian menunjukkan bahwa peternakan dan perkebunan tidak dikelola terstruktur, dikelola secara spasial. Peran pemerintah, lembaga pertanian, atau lembaga non-pertanian sangat penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan dalam integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara agar petani dapat mencapai produksi yang optimal, meningkatkan pendapatan mereka sekaligus menjaga lingkungan.

Petani peternak membutuhkan pengetahuan teknologi integrasi tanaman-ternak agar meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak, mengurangi pencemaran lingkungan, memperbaiki kesuburan lahan secara berkelanjutan dengan biaya murah, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kegiatan usaha tani secara efisien. Sistem integrasi ternak dan tanaman perkebunan dapat menjadi andalan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman kebun, ternak, selain melestarikan kesuburan tanah dengan adanya pupuk organik. Karena itu, sistem ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani-peternak.

Secara teknis, petugas sensus harus mempunyai strategi tersendiri menurut wilayah atau desanya. Hasil pengamatan dan informasi dari petugas terdapat persoalan penting yang diduga berpengaruh terhadap hasil pencacahan, yaitu petani pada umumnya pada pagi hari ke ladang dan baru kembali sore hari, sehingga pentingnya pengaturan waktu pendataan agar suasana wawancara nyaman bagi petani dan diperoleh data yang lebih akurat. Waktu wawancara petani biasanya sebelum pukul 9 pagi dan setelah pukul 7 malam menyebabkan target

5–7 petani per hari merupakan perjuangan tersendiri bagi PPL dan PML pada desa-desa tertentu.

Hasil pengamatan mengikuti pendataan dilapangan, terdapat perbedaan kemampuan wawancara antara PPL hasil *open recruitment* dengan mitra BPS yang mendapat pembelajaran dengan waktu dan materi yang sama, dengan pengalaman mendata yang berbeda. Pada tahap awal, PPL menghadapi kesulitan melakukan wawancara sesuai substansi yang terdapat dalam kuesioner. Kesulitan pada *recall* input dan produksi pertanian terjadi karena petani umumnya tidak mencatat proses usaha tani dengan teratur. Jumlah dan jenis input maupun output yang tidak tercatat berpeluang menjadi salah.

Pendataan dalam sensus pertanian memiliki peran yang penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani, dan merencanakan program pembangunan pertanian (Supendi & Purwoko. 2022). Data-data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi pertanian yang perlu ditingkatkan, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan sektor pertanian di Bengkulu Utara. Dalam sensus pertanian berikutnya, diharapkan adanya peningkatan dalam metode pendataan, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, serta partisipasi yang lebih luas dari petani. Hal ini akan memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan kondisi aktual sektor pertanian di Bengkulu Utara dan dapat digunakan secara efektif untuk perencanaan serta pengembangan berkelanjutan. Tantangan dalam pendataan agar menjadi perhatian serius BPS antara lain sering kali masyarakat yang didata mengaitkan dengan akan adanya bantuan. Sebagian dari petani mempertanyakan mengapa sering dilakukan pendataan tetapi tidak memperoleh bantuan, sehingga ada keengganan untuk diwawancara. Permasalahan pendataan pada lokasi/desa terpencil atau sulit dijangkau, membutuhkan usaha yang cukup besar bagi petugas, belum lagi kesadaran petani untuk berpartisipasi dalam pendataan yang kurang. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dalam memulai pendataan dengan pandai-pandai menjelas-

kan dan melakukan pendekatan walau membutuhkan waktu lebih lama. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa pendataan dilakukan secara komprehensif dan representatif, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan yang akurat untuk perencanaan dan pengembangan sektor pertanian di Bengkulu Utara.

Kilas balik pendataan dalam sensus pertanian di Bengkulu Utara juga menggambarkan upaya penting yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang sektor pertanian di daerah tersebut. Pendataan dalam sensus pertanian di Bengkulu Utara memberikan gambaran yang komprehensif tentang sektor pertanian di wilayah tersebut. Data dan informasi yang diperoleh dari sensus ini penting dalam mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan peluang pengembangan sektor pertanian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sektor pertanian, pemerintah, dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan serta program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan pertanian secara berkelanjutan di Bengkulu Utara.

Dalam kilas balik sensus pertanian di Bengkulu Utara, beberapa tantangan juga muncul agar menjadi perhatian serius BPS. Tantangan tersebut meliputi akses ke daerah terpencil atau sulit dijangkau, kesadaran petani untuk berpartisipasi dalam pendataan, serta disamakan-nya lama pelatihan pembekalan antara PPL baru dengan PPL mitra, yaitu sama selama 3 (tiga) hari yang bisa berpengaruh pada kefasihan PPL menggali data yang akurat. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa pendataan dilakukan secara komprehensif dan representatif, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan yang akurat untuk perencanaan dan pengembangan sektor pertanian di Bengkulu Utara.

Daftar Pustaka

- Badan Informasi Geospasial. (2015). *Peta wilayah Provinsi Bengkulu*. <https://big.go.id/assets/download/Atlas-Administrasi/07-Peta-Wilayah-Prov-Bengkulu.pdf>
- BPS Bengkulu Utara. (2023). *Kabupaten Bengkulu Utara dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Bengkulu Utara.

- Bussoni, A., Alvarez, J., Cubbage, F., Ferreira, G., & Picasso, V. (2019). Diverse strategies for integration of forestry and livestock production. *Agroforestry Systems*, 93, 333–344.
- Dissanayaka, N. S., Udumann, S. S., Nuwarapaksha, T. D., & Atapattu, A. J. (2023). Agroforestry: An avenue for resilient and productive farming through integrated crops and livestock production. In *Transitioning to zero hunger*. MDPI.
- Hakim, D. N., Ramadan, F., & Cahyono, Y. I. (2021). Studi pemanfaatan big data dalam perumusan kebijakan publik pada sektor kesehatan. *Specta Journal of Technology*, 5(3).
- Jose, S., & Dollinger, J. (2019). Silvopasture: A sustainable livestock production system. *Agroforestry systems*, 93, 1–9.
- Martin, G., Moraine, M., Ryschawy, J., Magne, M. A., Asai, M., Sarthou, J. P., ... & Therond, O. (2016). Crop–livestock integration beyond the farm level: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 36(3), 53.
- Nur, T. M., Fadli, C., & Satriawan, H. (2018). Analisis potensi integrasi kelapa sawit – ternak sapi di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(2), 69–80.
- Onwuka, H. S. (1999). *Integration of livestock with tree crop system in West Africa: Proceedings of an international workshop*. International Institute of Tropical Agriculture (IITA).
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. (2021). *Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020*. <https://bengkuluutarakab.go.id/wp-content/uploads/LKJiP-Pemkab-BU-Tahun-2020.pdf>
- Peraturan Menteri Pertanian No. 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.
- Purnomo, S. H. (2010). *Integrasi agropeternakan: Konsep dan implementasinya*. Gadjah Mada University Press.
- Supendi, S., & Puwoko, D. (2022). Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan pertanian nasional melalui Sensus Pertanian 2023 menjawab tantangan global. *Lensa*, 16(2). <https://doi.org/10.58872/lensa.v16i2.93>
- Syarwan, et al. (2021). *Kajian fiskal regional triwulan III 2021*. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Bab VIII

Mengungkapkan Potensi Agraria melalui Sensus Pertanian di Kabupaten Ogan Ilir

Tedi Gunawan

Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci yang menjadi tumpuan bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Namun, sektor ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Sensus Pertanian 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi langkah penting dalam memahami kondisi terkini sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan yang dialami oleh para petani. Bab ini berfokus pada peme-taan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir melalui hasil Sensus Pertanian 2023. Dengan mengadopsi pendekatan studi kualitatif eksploratori, penulis berupaya menggali pandangan internal dari para petani, yang merupakan aktor utama dalam sektor ini.

T. Gunawan

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: tedi003@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Gunawan, T. (2025). Mengungkapkan potensi agraria melalui sensus pertanian di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 239–307). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.934.c944 E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Hasil dari studi ini mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh petani skala kecil, mulai dari keterbatasan lahan, risiko gagal panen, alih fungsi lahan, hingga ketergantungan pada kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, masalah lingkungan, kepemilikan lahan, dampak perubahan iklim, serta hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak turut menjadi tantangan yang memengaruhi keberlanjutan sektor pertanian di daerah ini. Bab ini menekankan pentingnya dukungan dan perlindungan dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani skala kecil di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan solusi yang holistik dapat diimplementasikan. Pembangunan institusi pasar, pendorongan koperasi petani, pelatihan dan pendidikan, serta peningkatan akses modal dan infrastruktur pertanian menjadi langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh. Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Ogan Ilir bukan hanya sekadar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga sebuah upaya untuk memberikan solusi nyata bagi peningkatan sektor pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi modern, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat setempat.

Bab ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta semua pihak yang memiliki perhatian terhadap masa depan pertanian di Indonesia. Selain itu, bab ini juga dapat memberikan wawasan baru dan mendorong tindakan nyata dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir.

A. Pengantar: Menerjemahkan Sensus pertanian di Tingkat Lokal

Pada Juni–Juli 2023, BPS melaksanakan Sensus Pertanian sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam memetakan sektor pertanian di Indonesia. Kegiatan ini memiliki tujuan penting untuk

menyediakan gambaran yang akurat dan terkini mengenai kondisi pertanian di negara ini. Melalui data yang terkumpul, diharapkan pemerintah dapat melakukan pengambilan keputusan strategis, perencanaan pembangunan, dan pengembangan kebijakan yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan petani serta kelompok usaha di sektor pertanian. Selain itu, diharapkan pertanian Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga petani dan kelompok usaha di sektor pertanian lainnya akan mengalami peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Salah satu wilayah yang menjadi lokus dalam pelaksanaan pencacahan ini adalah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Sebagai persiapan awal, BPS Kabupaten Ogan Ilir, telah melakukan persiapan yang begitu teliti guna menjamin kelancaran proses pencacahan tersebut. Mereka dengan tekun mengumpulkan segala dokumen dan data yang diperlukan sebelum pelaksanaan berlangsung, demi memastikan data dan informasi yang akan diperoleh paling akurat dan terkini. Upaya mereka tidak hanya berhenti di tahap tersebut. Dengan semangat yang membara, BPS Kabupaten Ogan Ilir juga melakukan publisitas dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Mereka menggunakan segala sarana yang ada, seperti media sosial dan sosialisasi secara langsung kepada warga. Melalui berbagai media tersebut, mereka berusaha dengan keras meningkatkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kegiatan pencacahan ini bagi sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung wilayah.

Untuk mencapai kesuksesan Sensus Pertanian 2023 di Ogan Ilir, diperlukan upaya dari berbagai pihak yang berperan penting dalam kegiatan ini. Salah satu faktor yang dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan semua struktur administratifnya, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Bupati Ogan Ilir memberikan dukungan yang kuat dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, camat, dan lurah/kepala desa untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Tindakan ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam

mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, tim Sensus Pertanian 2023 dapat melaksanakan tugas dengan lancar. Para camat dan lurah/kepala desa juga memainkan peran penting dalam Sensus Pertanian 2023. Mereka membantu mendukung dan mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Melalui keterlibatan mereka, kegiatan ini dapat lebih terjangkau dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Partisipasi aktif dari tingkat administrasi terkecil ini memiliki dampak yang besar dalam mencapai tujuan kegiatan Sensus Pertanian 2023.

Dalam hal teknis, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir memegang peran sebagai koordinator. Mereka juga turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 berjalan dengan baik. Dengan peran ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Sensus Pertanian 2023 dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan substansi pertanian, serta tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik dari dinas menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui pencacahan. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir juga berkontribusi dalam mendukung publisitas Sensus Pertanian 2023. Dinas tersebut bertugas menyebarkan informasi tentang kegiatan Sensus Pertanian 2023 agar dapat mencapai sebanyak mungkin responden. Dengan demikian, masyarakat luas dapat memahami manfaat dan tujuan dari Sensus Pertanian 2023 serta terlibat secara aktif dalam kegiatan ini.

Kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Ogan Ilir sendiri tidak hanya sekadar mengumpulkan data tentang struktur pertanian dan jumlah petani gurem, tetapi juga melibatkan studi komprehensif tentang berbagai aspek yang relevan. BPS mengumpulkan informasi tentang luas lahan yang digunakan, jenis tanaman yang ditanam, teknik budidaya yang digunakan, dan teknologi yang diterapkan dalam proses pertanian. Data tersebut sangat penting dan relevan

sebagai langkah awal dalam memahami kondisi sektor pertanian saat ini. Selain itu, kegiatan Sensus Pertanian 2023 juga fokus pada indikator-indikator yang terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam sektor pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi dan kemajuan yang telah dicapai serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami secara holistik tentang kontribusi sektor pertanian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian, terutama sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir dengan salah satu indikator penting yang diungkapkan adalah ketahanan pangan.

Selain itu, hasil lain dari Sensus Pertanian 2023 nantinya adalah identifikasi dan pencatatan jumlah petani skala kecil yang sesuai dengan standar FAO. Dari penelusuran penulis, kelompok petani ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah Ogan Ilir. Data yang dikumpulkan mencakup luas lahan yang mereka kelola, jenis tanaman yang mereka tanam, produksi pertanian yang dihasilkan, serta akses mereka terhadap sumber daya dan pasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan petani skala kecil ini, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat merancang kebijakan dan program yang sesuai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Sensus Pertanian 2023 juga menggunakan teknologi geospasial untuk memetakan sebaran lahan pertanian, penggunaan lahan, dan potensi pertanian, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Data geospasial ini memberikan informasi berharga dalam perencanaan pengembangan pertanian, termasuk identifikasi potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Informasi spasial ini juga mendukung pemangku kepentingan dalam pemetaan infrastruktur pertanian, distribusi pupuk, dan pengaturan irigasi yang efisien kelak di kemudian hari. Akhirnya, Sensus Pertanian 2023 juga mengumpulkan data tentang

kelembagaan pertanian di Kabupaten Ogan Ilir dan tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh para petani di daerah ini. Data ini memberikan gambaran tentang efektivitas kelembagaan pertanian dalam menyediakan layanan dan dukungan kepada petani, serta tingkat keterlibatan petani dalam pemanfaatan teknologi modern. Berdasarkan data temuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kelembagaan pertanian melalui *policy based on research* yang ada dan mendorong adopsi TIK agar pertanian di Kabupaten Ogan Ilir menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

B. Bentang Alam Pertanian: Mengenal Awal Lingkungan Sensus

Kabupaten Ogan Ilir, yang terletak sekitar 35 km dari pusat kota Palembang, menghadirkan kontras menarik di antara gemerlapnya kehidupan perkotaan dan keberlanjutan pertanian tradisional yang kuat. Meskipun terletak di dekat pusat kegiatan urban, daerah ini masih tetap mempertahankan akar budaya pertanian tradisionalnya yang mendalam. Sejak terbentuknya kabupaten ini pada tahun 2003, Ogan Ilir telah mengembangkan potensi agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan lokal, serta menciptakan harapan dan prospek masa depan yang cerah bagi penduduk sekitar. Dengan luas wilayah mencapai 2.666,07 km² atau setara dengan 266.607 hektare, Kabupaten Ogan Ilir menawarkan keanekaragaman geografis dan kondisi tanah yang menguntungkan bagi sektor pertanian (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022). Daerah ini terletak di dataran rendah yang subur dan dialiri oleh sungai-sungai yang melintasi wilayahnya. Kondisi topografi ini menciptakan lahan yang cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan.

Kabupaten Ogan Ilir memiliki potensi pertanian yang besar dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Para petani di Ogan Ilir umumnya menggarap lahan dengan menggunakan metode tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mengandalkan pengetahuan lokal dan pengalaman yang telah dilakoni selama

bertahun-tahun untuk bercocok tanam. Padi merupakan salah satu komoditas utama dalam sektor pertanian di Ogan Ilir. Banyak petani yang mengolah lahan sawah secara tradisional dan menerapkan pola tanam bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Selain padi, tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, dan kedelai juga ditanam secara luas di daerah ini. Pertanian sayur-sayuran seperti bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, dan kacang merah juga menjadi sumber pendapatan bagi petani lokal (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Selain pertanian, sektor perkebunan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Ogan Ilir. Daerah ini dikenal dengan perkebunan kelapa sawit yang melimpah. Kelapa sawit tumbuh subur di tanah-tanah gambut yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Petani kelapa sawit di daerah ini mengandalkan pengetahuan dan keahlian khusus dalam merawat tanaman kelapa sawit agar dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Selain kelapa sawit, perkebunan kelapa dan karet juga cukup populer di Ogan Ilir (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022). Banyak petani lokal yang mengandalkan penghasilan dari perkebunan kelapa dan karet sebagai sumber utama pendapatan mereka. Untuk budidaya karet, para petani membutuhkan perawatan yang teliti dan keterampilan khusus dalam mengolah getah karet yang dihasilkan.

Namun, keberagaman topografi Kabupaten Ogan Ilir (lihat Gambar 8.1 dan Gambar 8.2) tidak terbatas pada dataran rendah saja. Beberapa kecamatan seperti Tanjung Batu, Muara Kuang, dan Rambang Kuang memiliki ketinggian yang relatif lebih tinggi, mencapai sekitar sepuluh meter di atas permukaan laut (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir, 2022). Ketinggian ini menciptakan kondisi yang ideal untuk mengembangkan produksi tanaman hias (BPS Kabupaten Ogan ilir, 2022). Tanaman hias tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian tertentu, suhu yang moderat, dan curah hujan yang cukup. Keberadaan ketinggian relatif tinggi di kecamatan-kecamatan ini menjadi keunggulan bagi petani

tanaman hias di Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, keberagaman topografi ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal di Kabupaten Ogan Ilir. Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat secara langsung dipengaruhi oleh karakteristik geografis daerah tersebut. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah cenderung lebih mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama, selain sebagai nelayan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah dengan ketinggian relatif tinggi lebih condong menjadi petani tanaman hias atau kelapa. Pada akhirnya, keberagaman topografi di Kabupaten Ogan Ilir ini berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakatnya.

Kabupaten Ogan Ilir terletak di bagian selatan Pulau Sumatra, yang secara geografis terletak di antara 104°20'–104°148' Bujur Timur dan 3°02'–3°48' Lintang Selatan (Utomo et al., 2022). Wilayah ini terdiri dari 16 kecamatan yang tersebar di seluruh area tersebut. Wilayah tersebut terdiri dari dua jenis lahan utama, yaitu dataran yang mencakup sekitar 65% wilayah dan rawa yang mencakup 35% sisanya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir, 2022). Kehadiran rawa di Kabupaten Ogan Ilir dapat ditemui di beberapa kecamatan, meskipun terdapat perbedaan dalam ukuran dan luasnya antara kecamatan-kecamatan tersebut, seperti Tanjung Batu, Payaraman, dan Rambang Kuang. Keberagaman kondisi lahan di Kabupaten Ogan Ilir menjadi bukti nyata akan potensi yang kaya dalam kegiatan pertanian rawa dan perkebunan. Dalam konteks pertanian, komoditas utama yang mendominasi wilayah ini adalah padi yang berasal dari sawah rawa lebak. Komoditas pangan ini, yang tersebar luas di seluruh Indonesia telah menjadi makanan pokok yang tak tergantikan bagi masyarakat, tak terkecuali di daerah setempat.

Salah satu keunggulan padi terletak pada toleransinya terhadap berbagai kondisi iklim dan tanah (Shantiawan & Suwardike, 2020). Hal ini memungkinkan padi dapat dibudidayakan secara luas oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun kebanyakan daerah di Indonesia memiliki jenis tanah yang berbeda-beda, tetapi keunikan

Kabupaten Ogan Ilir adalah adanya potensi yang terkait dengan lahan rawa lebak. Lahan ini memungkinkan para petani untuk mengembangkan usaha pertanian mereka, khususnya dalam budidaya padi. Budidaya padi di lahan rawa lebak membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lingkungan dan teknik bercocok tanam yang tepat. Para petani di Kabupaten Ogan Ilir telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengelola lahan rawa lebak. Mereka telah belajar bagaimana memanfaatkan kelebihan dan mengatasi tantangan yang ada untuk mengoptimalkan hasil panen. Proses bercocok tanam, di mulai dari persiapan lahan hingga panen, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga. Aktivitas ini tidak hanya memberikan penghidupan bagi petani, tetapi juga mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Oleh karena itu, Kabupaten Ogan Ilir menjadi tempat yang menarik untuk melakukan kajian mengenai lahan rawa lebak. Kabupaten ini dikenal memiliki luas lahan rawa lebak yang sangat luas, yakni mencapai 65.240 hektar (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir, 2022). Rawa lebak, yang terdiri dari lebak dangkal, lebak tengahan, dan lebak dalam, memainkan peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut, terutama dalam budidaya padi. Lahan rawa lebak di Kabupaten Ogan Ilir ditandai dengan keunikan topografi yang meliputi cekungan yang dibatasi oleh satu atau dua tanggul sungai, atau terletak di antara dataran tinggi dengan tanggul sungai. Secara periodik, lahan ini mengalami genangan air selama minimal satu bulan (Saleh, 2019; Sari & Febriyansyah, 2019). Pola genangan air dipengaruhi oleh curah hujan lokal maupun daerah sekitar. Tinggi genangan air cenderung menurun seiring menjauh dari sungai atau tanggul, membentuk kondisi yang beragam di dalam lahan rawa lebak.

Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan rawa lebak ini pun turut terkait erat dengan keberadaan dan

karakteristik lahan tersebut. Masyarakat di sekitar lahan rawa lebak telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam memanfaatkan lahan ini untuk pertanian. Mereka telah mempelajari dan mewariskan pengetahuan tradisional mengenai waktu penanaman yang tepat, penggunaan pupuk, serta cara mengatur irigasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman padi di kondisi rawa lebak yang unik. Selain pertanian, masyarakat juga memanfaatkan lahan rawa lebak untuk kegiatan lainnya, yakni perikanan (Muhadjir & Nasution, 2020). Air yang melimpah dalam genangan rawa lebak memberikan habitat yang subur bagi berbagai jenis ikan dan biota air lainnya. Masyarakat setempat masih mengambil manfaat dari keberlimpahan sumber daya alam ini dengan cara tradisional, seperti menggunakan jaring atau peralatan sederhana lainnya.

Namun, perkembangan zaman dan perubahan lingkungan membawa tantangan baru bagi masyarakat yang hidup di sekitar lahan rawa lebak. Urbanisasi dan modernisasi mempengaruhi pola hidup tradisional sehingga berdampak pada keberlanjutan ekosistem pertanian rawa lebak. Pencemaran, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan degradasi lingkungan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara serius agar keberadaan lahan rawa lebak dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Pemahaman mendalam mengenai kehidupan masyarakat di sekitar lahan rawa lebak di Kabupaten Ogan Ilir menjadi penting sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan menjaga kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang ada, serta mengintegrasikan dengan pengetahuan modern dalam pengelolaan lahan rawa lebak, diharapkan keberadaan lahan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati yang ada. Sementara itu, potensi lahan sawah di Kabupaten Ogan Ilir menjadi strategis untuk menunjang kesejahteraan masyarakat (lihat Tabel 8.1).

Tabel 8.1 Potensi Lahan Sawah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022

No.	Kecamatan	Tadah Hujan (Ha)	Rawa Lebak (Ha)	Jumlah lahan Sawah Pertanian (Ha)
1	2	3	4	5
1.	Muara Kuang	627	11.219	11.846
2.	Rambang Kuang	358	358	
3.	Lubuk Keliat	1.175	4.953	6.125
4.	Tanjung Batu	0	4.933	4.933
5.	Payaraman	0	0	-
6.	Rantau Alai	0	4.110	4.110
7.	Kandis	150	2.732	2.882
8.	Tanjung Raja	0	4.138	4.138
9.	Rantau Panjang	0	3.612	3.612
10.	Sungai Pinang	0	3.036	3.036
11.	Pemulutan	0	10.866	10.866
12.	Pemulutan Selatan	0	5.000	5.000
13.	Pemulutan Barat	0	3.925	3.925
14.	Indralaya	0	5.361	5.361
15.	Indralaya Utara	0	557	557
16.	Indralaya Selatan	0	1.890	1.434
	Jumlah	2.310	65.240	69.702

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir (2022)

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian versi Lokal

Sensus Pertanian 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2023 di Kabupaten Ogan Ilir merupakan suatu kegiatan yang memiliki signifikansi penting dalam mengumpulkan data terkait kehidupan dan aktivitas masyarakat pertanian di wilayah tersebut. BPS Kabupaten Ogan Ilir sebagai pelaksana kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor penunjang kegiatan ekonomi utama di kabupaten tersebut. Pelaksanaan sensus ini juga melibatkan kolaborasi dari berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat. Pegawai dari BPS Kabupaten Ogan Ilir bekerja sama dengan beberapa dinas terkait, tokoh masyarakat, dan

petugas atau mitra lapangan dari tingkat desa hingga kecamatan untuk melaksanakan pengumpulan data secara menyeluruh. Para petugas secara umum melakukan tugasnya dengan mengunjungi rumah-rumah petani dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif.

Babak baru dalam kegiatan epik ini dimulai ketika rekrutmen petugas pencacahan dan pengolahan dilakukan. BPS Kabupaten Ogan Ilir berusaha keras merekrut tenaga ahli yang berkualitas. Mereka menginginkan para petugas dapat memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan yang tajam dalam metode dan instrumen pencacahan. Seperti melibas medan yang berliku, BPS Kabupaten Ogan Ilir melangkah maju, menjalani proses seleksi yang tak kenal lelah, untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kompetensi yang berhak terlibat dalam kegiatan pencacahan. Dalam rentang waktu Februari hingga Maret 2023, BPS melaksanakan proses seleksi ini berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor: B-359/02100/PR.120/03/2023 tentang Permintaan Nominasi Mitra Statistik BPS. Pada tanggal 27 Februari hingga 27 Maret 2023, BPS melaksanakan kegiatan rekrutmen petugas ST2023 melalui Aplikasi SOBAT BPS. Para peserta wajib mendaftarkan dirinya melalui aplikasi ini terlebih dahulu yang dapat diunduh di *Play Store*. Setelah melalui serangkaian seleksi yang ketat, pengumuman akhir petugas lapangan yang dinyatakan diterima dilaksanakan secara serentak pada tanggal 31 Maret 2023 oleh seluruh BPS Kabupaten/Kota di Indonesia (lihat Tabel 8.2).

Tabel 8.2 Jumlah Petugas yang Lolos Seleksi (Sesuai Tahapan)

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran	1.388 Orang	berdasarkan respon dokumen yang di <i>upload</i> para pelamar
2.	Lulus Seleksi Administrasi	525 Orang	
3.	Mengikuti Uji <i>e-Learning</i>	525 Orang	
4.	Tidak mengikuti Uji <i>e-Learning</i>	57 Orang	
5.	Mengikuti Uji Kompetensi Susulan	163 Orang	
6.	Mengikuti Wawancara <i>offline</i>	455 Orang	

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
7.	Mengikuti Wawancara <i>online</i>	47 Orang	
8.	Tidak Hadir Wawancara	23 Orang	
9.	Lulus Tahap Akhir (Utama)	397 Orang	
10.	Lulus Tahap Akhir (Cadangan)	53 Orang	

Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir (2023)

Dalam proses rekrutmen tersebut, BPS Kabupaten Ogan Ilir berhasil merekrut 414 petugas lapangan untuk bulan Juni, diikuti oleh 210 petugas untuk bulan Juli. Diketahui terjadi pengurangan jumlah petugas di bulan Juli dikarenakan masalah anggaran dan juga berkurangnya beban kerja di lapangan. Untuk lebih detailnya, jumlah petugas yang telah berhasil direkrut terbagi menjadi 340 orang Petugas Pendataan Lapangan (PPL), 57 orang Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), dan 17 orang Koordinator Sensus Kecamatan (koseka), dengan total 414 petugas untuk bulan Juni. Sementara untuk bulan Juli, terdapat 167 PPL, 32 PML, dan 11 koseka, dengan total 210 petugas yang akan bertugas.

Namun, perjalanan epik ini tidak berakhir pada tahap rekrutmen petugas saja. BPS Kabupaten Ogan Ilir sadar akan pentingnya mempersiapkan para petugas dengan baik sebelum mereka menapaki jalan pencacahan yang berat. Seperti pahlawan yang menjalani latihan yang melelahkan sebelum berperang, para petugas menjalani pelatihan intensif yang tiada henti. Setiap detail metode dan instrumen pencacahan mereka teliti dan diserap dengan penuh ketekunan. Mereka dilatih untuk menghadapi tantangan terbesar, sehingga ketika saatnya tiba, mereka siap untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Pelatihan intensif tersebut serentak dilakukan di beberapa lokasi di Palembang selama empat hari.

Kepastian akan kualitas data yang terkumpul juga menjadi harapan BPS Kabupaten Ogan Ilir. Mereka berusaha keras untuk menjaga keakuratan di setiap langkah pencacahan. Seperti pemandu yang menuntun para penjelajah melintasi lautan tak terjangkau, para petugas ini diharapkan mampu menjaga integritas data yang terkumpul, tiada cela, maupun kekeliruan. Dalam gelap ataupun

terang, tantangan dan kesulitan, petugas-petugas ini melangkah maju. Mereka adalah pahlawan yang tak dikenal, yang menyumbangkan karya dan ketekunan mereka untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan ini. Dengan persiapan yang matang, rekrutmen yang cermat, dan pelatihan yang intensif, BPS Kabupaten Ogan Ilir yakin bahwa pelaksanaan pencacahan di Kabupaten ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memetakan potret pertanian di wilayah tersebut, serta dapat mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan sektor pertanian. Selain itu, tidak kalah pentingnya mereka diharapkan juga mampu menjaga keutuhan dan keakuratan data yang terkumpul (lihat Gambar 8.3 dan Gambar 8.4).

Pada dasarnya, pencacahan Sensus Pertanian 2023 di Ogan Ilir merupakan kegiatan yang terdiri dari dua bagian utama untuk memperoleh data yang komprehensif tentang sektor pertanian di wilayah tersebut. Bagian pertama melibatkan pemutakhiran data Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) yang diperoleh melalui *updating* Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL)



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.3 Bersama PPL, PML, dan Koseka Kecamatan Palumutan Barat



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.4 Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Ogan Ilir

tahun 2022. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengumpulkan informasi terbaru mengenai perusahaan pertanian yang berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat tentang sektor ini.

Bagian kedua, pelaksanaan pencacahan melibatkan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) yang menggunakan moda *Paper Assisted Personal Interview* (PAPI). Dalam pelaksanaannya, terdapat dua mekanisme pengumpulan data yang diterapkan, yaitu *door to door* dan *snowball*. Mekanisme *door to door* dilakukan dengan cara mengunjungi seluruh unit observasi di setiap wilayah kerja statistik (*wilkerstat*). Total terdapat 1.126 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau Sub Satuan Lingkungan Setempat (SubSLS) konsentrasi pertanian yang menjadi target pencacahan dengan metode ini. Para petugas BPS mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha pertanian. Sementara itu, mekanisme *snowball* digunakan untuk mengumpulkan data pada 423 SLS/SubSLS non konsentrasi pertanian. Pada metode ini, petugas BPS hanya mengunjungi unit observasi yang teridentifikasi sebagai unit observasi yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk dicacah. Pencacahan dilakukan

dengan cara mengumpulkan informasi dari unit observasi tersebut serta mendapatkan referensi untuk mengunjungi unit observasi lain yang memiliki kriteria yang sama.

Selain UTP, BPS Ogan Ilir juga melakukan pencacahan pada UPB dan UTL menggunakan metode *Computer Assisted Web Interview* (CAWI) atau *Computer Assisted Personal Interview* (CAPI). Dalam ST2023, di wilayah ini tercatat ada 7 perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) serta 7 usaha pertanian lainnya (UTL) yang menjadi sasaran pencacahan. Untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan, BPS menjalankan Monitoring Kualitas (MK) sebagai instrumen penjaminan kualitas yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam ST2023. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu lokasi yang dipilih sebagai sampel kegiatan MK BPS Provinsi Sumatra Selatan, yang akan dilakukan untuk memantau pelaksanaan pencacahan serta mengidentifikasi potensi kesalahan dan kekurangan dalam proses pengumpulan data.

Dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, tim petugas pencacahan menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah kondisi geografis di beberapa wilayah. Sebagai contoh, ketika beberapa petugas ditempatkan di daerah Rantau Alai, Kandis, Payaraman, Muara Kuang, dan Rambang Kuang, mereka segera menyadari ketika turun di lapangan banyak jalan rusak akibat hujan. Jalan-jalan berlumpur dan berlubang membuat perjalanan mereka menjadi sulit dan melelahkan. Beberapa petugas bahkan harus berjalan kaki beberapa kilometer menyusuri jalan yang sulit dilalui untuk mencapai lokasi. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Diketahui, beberapa wilayah di sekitar sungai atau daerah rawa hanya bisa diakses menggunakan perahu. Sayangnya, banyak petugas lapangan yang sulit untuk menemukan perahu yang tersedia untuk disewa. Tim pencacahan terkadang harus menunggu berjam-jam hanya untuk bisa menyeberangi sungai dan mencapai rumah responden. Kondisi geografis yang sulit ini benar-benar menguji ketahanan dan ketekunan tim pencacahan.

Tantangan lainnya adalah menemui responden yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan musim tanam sedang berlangsung di beberapa tempat, dan para petani sibuk bekerja di sawah sepanjang hari. Di beberapa kecamatan seperti Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Rantau Panjang, dan Rantau Alai, petugas pencacah yang tinggal di luar domisili menghadapi kesulitan besar untuk dapat mengunjungi para responden. Mereka harus menunggu sampai responden memiliki waktu luang untuk datang, bahkan dengan mendatangi responden ke sawah mereka. Tim pencacahan tidak menyerah dengan tantangan ini. Dari pantauan BPS Ogan Ilir, para petugas lapangan telah berusaha dengan gigih untuk mencapai setiap responden, menghadapi medan sulit, dan kondisi cuaca yang tidak ramah. Mereka menempuh perjalanan jauh, berjalan melintasi jalan berlumpur, menyusuri sungai, dan menyeberangi rawa untuk mencapai rumah-rumah atau lokasi yang terpencil.

BPS Kabupaten Ogan Ilir menyadari tantangan yang dihadapi oleh tim pencacahan Sensus Pertanian 2023 . Oleh karena itu, mereka mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala selama pencacahan berlangsung. Salah satu solusi utama yang mereka ajukan adalah dengan mencari alternatif waktu pencacahan. Mengingat banyaknya responden yang sibuk di sawah selama pagi hingga sore, pencacahan dapat dilakukan pada sore atau malam hari. Dengan demikian, petugas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertemu dengan responden yang sedang berada di rumah setelah pulang dari sawah. Penyesuaian waktu ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencacahan. Secara keseluruhan, langkah-langkah solutif yang diusulkan oleh BPS Kabupaten Ogan Ilir merupakan upaya nyata untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pencacahan Sensus Pertanian 2023 . Melalui pembentukan tim pencacahan dan penyesuaian waktu pencacahan, diharapkan kendala-kendala geografis dan jadwal responden yang sibuk dapat teratasi.

Berdasarkan hasil Monitoring Kualitas (MK) yang dilakukan pada minggu ke dua pelaksanaan lapangan ST2023, ditemukan bahwa terdapat tingkat kesalahan yang relatif kecil, yakni sebesar 6,04

persen. Meskipun kesalahan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, namun dapat disimpulkan bahwa kualitas hasil Sensus Pertanian 2023 di Ogan Ilir secara umum tetap terjaga dengan baik sejauh ini. Namun demikian, beberapa kesalahan yang diidentifikasi perlu menjadi perhatian serius dalam rangka meningkatkan akurasi dan kualitas data yang dihasilkan. Salah satu kesalahan yang ditemukan adalah kurangnya *probing* oleh petugas terkait hasil produksi dan nilai produksi komoditas tanaman tahunan. *Probing* yang tidak memadai dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang akurat terkait produksi tanaman tahunan, yang pada waktunya dapat memengaruhi perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertanian di masa mendatang. Selain itu, ditemukan pula adanya data anomali pada jumlah jasa pertanian di beberapa SLS. Jumlah kesalahan yang relatif banyak pada jumlah jasa pertanian ini menunjukkan adanya kurangnya pemahaman petugas terhadap konsep jasa pertanian. Pemahaman yang tidak memadai terkait jasa pertanian dapat mengganggu validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, sehingga perlu dilakukan upaya penyuluhan dan pelatihan kepada petugas terkait untuk memastikan pemahaman yang tepat dan sama terkait konsep jasa pertanian.

Dalam rangka memastikan keakuratan dan keandalan data yang terkumpul, dilakukan sejumlah mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berjenjang. Hal ini dilakukan guna meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data Sensus Pertanian 2023 yang sedang dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain PML, Koseka, dan tim supervisor yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja petugas lapangan sangat penting untuk memastikan kelancaran proses sensus. Di Provinsi Sumatra Selatan, BPS telah mengembangkan aplikasi Monster (Monitoring Sensus Pertanian 2023 Terpadu) sebagai alat pemantauan, selain menggunakan *dashboard* nasional. BPS Provinsi Sumatra Selatan bekerja sama dengan Koseka dan Tim Supervisor BPS Kabupaten dalam melakukan monitoring secara harian. Mereka memastikan bahwa petugas lapangan mencapai target yang telah

ditetapkan dan memberikan peringatan kepada petugas yang belum mencapai target. Selain itu, setiap hari Kamis diadakan pertemuan rutin yang melibatkan PPL, PML, Koseka, dan Supervisor BPS Kabupaten. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan membahas berbagai hal terkait pelaksanaan Sensus Pertanian 2023.

Pada pertemuan tersebut, seluruh petugas yang terlibat dalam sensus berkumpul untuk membahas temuan dan hasil monitoring kualitas yang dilakukan oleh BPS, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Dalam pertemuan ini, kesalahan atau ketidakakuratan yang ditemukan dapat diidentifikasi dan diperbaiki agar tidak terulang pada tahap pendataan berikutnya. Tanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan hasil monitoring kualitas berada pada PML dan Koseka. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya perbaikan dan memastikan kesalahan yang ditemukan diperbaiki dengan baik. Hal ini dilakukan agar data yang terkumpul menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 sebelum terjun ke lapangan. Di pertemuan ini, dilakukan pembagian kelengkapan dokumen lapangan, pembagian wilayah tugas PPL dan PML, menentukan target SLS yang akan dikerjakan pada bulan pertama dan bulan kedua (Juni-Juli), serta membahas strategi pendataan lapangan.

Pada pertemuan selanjutnya, tanggal 8 Juni 2023, dilakukan evaluasi progres lapangan terkait pemahaman konsep definisi dan teknik *probing* yang dilakukan oleh petugas lapangan. Dokumen seperti Peta Wilayah Sampel (WS), ST2023-L1, dan ST2023-L2 juga diperiksa. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaporan progres lapangan melalui aplikasi Monster, Repo, dan *Quality Tools*. Kendala yang dihadapi di lapangan juga dibahas dalam pertemuan ini. Pada tanggal 15, 22, dan 29 Juni 2023, pertemuan rutin terus dilanjutkan dengan agenda yang serupa. Evaluasi progres lapangan, pemeriksaan dokumen ST2023-L1 dan ST2023-L2, serta evaluasi pelaporan progres lapangan dilakukan secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai kendala yang dihadapi di lapangan terus dilakukan untuk mencari solusi

yang tepat. Pada pertemuan terakhir bertepatan dengan saat laporan ini ditulis, yaitu tanggal 29 Juni 2023, selain evaluasi progres lapangan dan evaluasi pelaporan progres lapangan, juga dilakukan finalisasi dokumen Peta WS, ST2023-L1, dan ST2023-L2. Strategi pendataan untuk Bulan Kedua, yakni bulan Juli, juga dibahas dalam pertemuan ini. Dokumen yang telah selesai per SLS dikumpulkan dan diserahkan ke BPS Kabupaten.

Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan kinerja petugas lapangan dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dapat terus ditingkatkan. Pertemuan rutin ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala-kendala yang muncul di lapangan dengan lebih efektif. Melalui proses ini, petugas lapangan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya, termasuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemantauan yang rutin, petugas lapangan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang mungkin timbul, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk proses pengolahan data Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Ogan Ilir sendiri dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan yang terstruktur. Tahapan pertama adalah *Receiving-Batching*, di mana data yang terkumpul diterima dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya. Tahap ini penting untuk mempermudah pengolahan data selanjutnya. Tahap berikutnya adalah *Editing-Coding*, di mana data yang telah dikelompokkan tadi akan diperiksa dan disunting agar sesuai dengan format yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengkodean data agar dapat diolah dengan lebih efisien. Tahapan terakhir adalah *Data Entry*, di mana data yang telah melalui tahap-tahap sebelumnya dimasukkan ke dalam sistem komputer. Proses pengolahan data akan berlangsung mulai bulan Juli hingga September 2023 di BPS Kabupaten Ogan Ilir. Dalam keseluruhan

proses ini, pengawasan dan evaluasi memegang peranan penting. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang berjenjang dan evaluasi yang teratur, diharapkan kesalahan dan ketidakakuratan data dapat diminimalkan. Hal ini akan menjamin keakuratan dan kualitas data yang dihasilkan oleh Sensus Pertanian, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait sektor pertanian di wilayah setempat.

Kunci sukses sejauh ini yang diraih BPS Ogan Ilir dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 tidak lepas dari peran pegawai BPS dan mitra di lapangan (PPL, PML, koseka). Dengan semangat juang yang menggebu-gebu, mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam sensus ini berjalan lancar dan sukses. Dalam pelaksanaan ST2023, semua pegawai BPS terlibat secara aktif. Mereka mengerahkan segala kemampuan teknis dan administratif untuk memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Tim pegawai BPS yang terlibat memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari statistisi ahli pertama, statistisi pelaksana, dan pelaksana. Sedangkan ASN dengan jabatan fungsional statistisi ahli Muda dan Pranata komputer muda ditugaskan sebagai Supervisor tingkat kabupaten.

Namun sejatinya, dari penelusuran di lapangan diperoleh fakta bahwa kekuatan BPS Ogan Ilir terletak pada kekompakan dan kerja sama serta komunikasi di antara petugas mereka. Mereka membentuk grup WhatsApp sebagai alat komunikasi utama. Setiap kecamatan memiliki grupnya sendiri, yang dihuni oleh PPL, PML, koseka, dan supervisor BPS Kabupaten. Grup ini menjadi pusat informasi dan hasil monitoring/evaluasi dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten, yang dengan mudah disampaikan kepada semua petugas lapangan. Peran kunci Supervisor BPS Kabupaten begitu vital dalam menjembatani antara BPS Kabupaten dengan tim Koseka. Mereka menjaga jalur komunikasi tetap terbuka melalui berbagai cara, baik melalui pertemuan tatap muka, panggilan telepon, maupun pesan dalam grup WhatsApp. Rapat evaluasi rutin diadakan di BPS Kabupaten, di mana semua anggota Koseka hadir untuk membahas progres dan mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan Sensus Pertanian.

Semua upaya ini untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tim pencacah selaras dengan tujuan besar Sensus Pertanian 2023. Inilah semangat dan dedikasi para pahlawan Sensus Pertanian 2023. Dalam kerumitan tugas, mereka bergerak sebagai satu tim yang tangguh. Mereka mengatasi tantangan dan melampaui batasan dengan kekompakan dan kolaborasi yang luar biasa. Dalam perjalanan mereka, mereka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menginspirasi dengan semangatnya yang membara. Cerita para pahlawan Sensus Pertanian 2023 adalah cerita tentang keberanian, keuletan, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Mereka adalah pahlawan di balik layar yang menciptakan keberhasilan Sensus Pertanian 2023 sejauh ini di Ogan Ilir dengan cinta dan dedikasi yang tak terbatas.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Di sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, terhampar kisah inspiratif seorang wanita bernama Siskawati, yang akrab dipanggil Siska oleh warga desa. Dalam usia 27 tahun, Siska menjalani perannya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan penuh dedikasi, ia memiliki seorang putra kecil yang menjadi sumber keceriaan dalam hidupnya. Namun, di balik rutinitas sehari-hari yang biasa-biasa saja, tersembunyi semangat juang yang luar biasa dan keyakinan kuat dari dalam diri Siska untuk mengubah nasibnya. Meskipun hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA, Siska tidak pernah membiarkan dirinya terperangkap dalam keterbatasan yang ada. Ia merasa bahwa potensi yang dimilikinya jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi tugas domestik rumah tangga. Siska bermimpi, di kemudian hari ia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya. Baginya, hidup bukanlah sekadar menjalani peran tradisional sebagai seorang ibu rumah tangga, melainkan juga tentang mengejar impian dan menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitarnya.

Namun, di Desa Kamal (lihat Gambar 8.6), di mana Siska tinggal, kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik sangatlah terbatas, terutama bagi wanita. Ia menyadari bahwa masih ada tantangan

yang berat yang harus dihadapi oleh kaum wanita dalam mencari pekerjaan yang layak. Kurangnya akses pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta peran tradisional yang mengharuskan mereka bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, telah menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi desa (Chaurasia, 2020; Sikarwar et al., 2022). Meskipun demikian, semangat Siska tidak pernah padam. Ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa ia dapat mencapai lebih dari yang diharapkan. Suatu hari, kabar tentang pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 sampai ke telinganya. Ia melihat ini sebagai kesempatan langka untuk mewujudkan impian dan memberikan dampak positif pada masyarakat pertanian di Kabupaten Ogan Ilir. Tanpa ragu, Siska mengambil keputusan berani untuk mendaftar sebagai petugas PPL ST2023 (lihat Gambar 8.5).

Proses seleksi yang ketat tidak pernah meruntuhkan semangatnya. Ia dengan tekun mempersiapkan diri, mempelajari metode dan instrumen pencacahan, serta melatih keterampilan yang diperlukan untuk tugas yang akan datang. Bagi Siska, menjadi petugas lapangan dalam Sensus Pertanian bukan sekadar pekerjaan, melainkan peluang untuk membuktikan kemampuannya dan menginspirasi orang lain



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.5 Siskawati dan Seorang PPL yang Sedang Melakukan Pencacahan Sensus Pertanian 2023



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.6 Lahan Sawah Rawa Milik Seorang Warga Desa Kamal

di sekitarnya. Melalui perjuangannya, Siska berhasil meraih posisi sebagai salah satu petugas lapangan yang terpilih. Hatinya dipenuhi kebahagiaan dan harapan baru. Bulan Juni tiba, dan Siska memulai perjalanan epiknya sebagai petugas PPL. Ia ditugaskan untuk mengumpulkan data-data penting tentang kehidupan dan aktivitas masyarakat pertanian di desa tempat dia tinggal, yakni Desa Kamal di Kabupaten Ogan Ilir. Siska sadar bahwa tanggung jawabnya tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menjadi jembatan antara BPS dan masyarakat yang akan diwawancarai. Ketika di lapangan, dengan penuh rasa hormat dan kesantunan, Siska menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat Desa Kamal.

Setiap hari, Siska melangkah ke desa yang menjadi fokus penguasannya. Dengan semangat dan keberanian, dia mengunjungi rumah-rumah warga yang berprofesi sebagai petani untuk melakukan wawancara. Dalam setiap pertemuan, dia dengan sopan memperkenalkan diri sebagai PPL dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Tugas Siska bukanlah pekerjaan yang mudah karena satu kali wawancara bisa menghabiskan waktu sekitar satu hingga dua jam dengan jarak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

antar rumah responden yang tidak dekat. Meskipun kadang dilanda kelelahan fisik dan mental, dia tetap bersemangat dan tidak kenal lelah. Melalui wawancara, dia mencatat dengan teliti setiap informasi yang diperlukan untuk Sensus Pertanian 2023. Beberapa warga desa mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya sensus pertanian atau bahkan merasa curiga terhadap niatnya. Namun, dengan kepiawaian dan keterampilan wawancara yang telah dipelajarinya, Siska dapat membangun hubungan yang baik dengan warga desa (responden). Dia dengan sabar menjelaskan tujuan dan manfaat dari sensus pertanian ini. Siska menyadari bahwa kegiatan ini adalah langkah penting untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk kebijakan pertanian yang lebih baik di masa depan. Hasil pencacahan ini akan membantu pemerintah dan pengambil kebijakan dalam merencanakan strategi pengembangan pertanian yang efektif, memperbaiki kebijakan distribusi sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa depan, terutama para petani di desanya.

Meskipun tugasnya penuh tantangan, Siska merasa bangga dan berharga sebagai seorang petugas PPL di desanya sendiri. Peran yang dia mainkan dalam mengumpulkan data ini memberinya kesempatan untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pada pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dia berharap bahwa hasil pendataan yang dia kumpulkan akan membawa perubahan positif bagi desanya di masa depan. Dalam perjalanan pulang, seiring dengan matahari terbenam, Siska selalu merasa lega dan puas. Setiap wawancara yang dilakukannya, setiap langkah yang diambilnya, semuanya memiliki makna yang besar. Dia tahu bahwa pekerjaannya sebagai petugas lapangan bukan hanya sekadar pekerjaan rutin, tetapi merupakan sebuah perjalanan yang memberikan arti dan dampak nyata dalam upaya membangun sektor pertanian yang lebih baik.

Siska menjalani perannya sebagai petugas PPL dengan semangat dan tekad yang tak tergoyahkan karena tahu dia tidak berjuang sendirian. Dia mendapatkan dukungan yang kuat dari keluarganya, terutama ayahnya yang merupakan seorang petani tradisional sawah

rawa lebak. Siska tumbuh dan besar di tengah-tengah lingkungan pertanian. Dari kecil, Siska sudah sering melihat ayahnya bekerja keras di ladang, berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Wajah lelah dan keringat yang mengalir di wajah sang ayah menjadi saksi bisu atas perjuangan seorang petani kecil. Setiap hari, ayahnya pergi ke sawah dengan punggung yang semakin bungkuk dan langkah yang semakin lesu karena dimakan usia. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ayah Siska selalu berusaha tersenyum dan bersyukur ketika melihat hasil panen yang tidak seberapa.

Melihat ayahnya yang berjuang tanpa henti, Siska merasa ter-panggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin melihat senyum yang tulus dan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ia melihat betapa petani di desanya terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit mereka pecahkan. Harga hasil panen yang tidak stabil, biaya produksi yang terus meningkat, dan akses terbatas terhadap teknologi pertanian modern dan pemasaran, semuanya menjadi beban berat bagi para petani kecil. Dorongan dan semangat untuk mengubah keadaan itulah yang mendorong Siska untuk menjadi bagian dari Sensus Pertanian 2023. Ia ingin memberikan kontribusi nyata bagi petani dan masyarakat desanya. Dalam pandangan Siska, sensus pertanian bukan sekadar tugas rutin, tetapi kesempatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desanya.

Selama pelaksanaan pekerjaan pengumpulan data di lapangan, Siska beberapa kali mengalami hambatan dalam mengumpulkan data dari berbagai Unit Usaha Pertanian (UTP) di Desa Kamal. Misalnya, Sebagai Petugas PPL, Siska memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan fitur *geotagging* pada ponsel setiap kali selesai melakukan wawancara. Tujuan dari fitur ini adalah untuk menciptakan peta Geospasial statistik pertanian yang akurat. Namun, dengan koneksi internet yang tidak stabil di daerah pedesaan, Siska sering menghadapi kesulitan dalam mengirimkan data yang telah dikumpulkannya. Selain itu, dia juga memiliki target harian yang harus dicapai. Dia ditugaskan untuk mengumpulkan data dari sepuluh Unit Usaha Pertanian (UTP) setiap harinya, dengan total 140 UTP yang harus dia jangkau di Desa

Kamal. Meskipun dia telah bekerja keras, hingga saat ini, Siska baru berhasil mencatat data dari 120 UTP karena beberapa kendala yang dihadapinya. Dia tetap optimis bisa merampungkan tugasnya dengan baik karena masih ada waktu tersisa yang cukup banyak, yakni sekitar seminggu. Ia bertekad untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dia menyadari betapa pentingnya data yang akurat dan lengkap dalam pelaksanaan proyek ini, dan dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan hal yang terbaik.

Sebagai seorang Petugas PPL, Siska sering menghadapi situasi yang sulit yang membutuhkan pemikiran kreatif. Salah satu contoh ketika Siska berhadapan dengan seorang petani yang merasa kesulitan menjawab pertanyaan sensus tentang jumlah tanaman dan jenis komoditi yang dimilikinya. Siska sendiri merasa bingung dan kesulitan menentukan kode untuk jenis tanaman yang dimiliki petani tersebut. Namun, sebagai petugas yang berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ia tidak menyerah begitu saja. Siska selalu menghubungi PML untuk mencari solusi dalam mengatasi kesulitan tersebut. Ia menjelaskan secara detail masalah yang dihadapi petani, termasuk keterbatasan pengetahuan dan kesulitan teknis dalam menjawab pertanyaan. PML merespons dengan cepat dan merekomendasikan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan petani tersebut dan melakukan pendampingan ketika wawancara.

Dalam perjalanannya sebagai PPL, Siska juga sering menemui beberapa permasalahan teknis, yakni kesulitan dalam menggunakan aplikasi pencatatan dan pelaporan data seperti *repo* dan *quality tools* yang seharusnya membantu pekerjaannya. Menurut pengalamannya, aplikasi tersebut sering *error*. Untuk mengatasi masalah ini, dia selalu mencari bantuan dari rekan kerjanya yang lebih berpengalaman, seperti PML dan Koseka. Mereka sejauh ini selalu membantu dalam mengatasi kesulitan dan memberikan panduan yang berharga dalam menjalankan tugasnya sebagai PPL. Dukungan tim yang solid dan semangat kerja yang tinggi memotivasi Siska untuk terus maju dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Meski menghadapi kendala, seperti keterbatasan koneksi internet dan cuaca yang tidak

selalu bersahabat, Siska tetap teguh dan tak kenal lelah dalam mengumpulkan data. Dia menyadari bahwa setiap informasi yang dikumpulkannya memiliki nilai yang penting.

Saat melakukan pendataan Sensus Pertanian 2023, Siska mengalami salah satu pengalaman yang tak terlupakan dalam hidupnya. Pengalaman itu terjadi ketika ia tiba di sebuah rumah di pinggir lahan pertanian. Tanpa diduga, seekor anjing besar dengan nafsu yang liar keluar dari rumah dengan kecepatan yang memukau. Seketika itu pula, anjing itu mulai mengejar Siska, memperlihatkan gigi tajamnya yang menakutkan. Ketakutan dan kepanikan seketika melanda Siska. Ia berusaha melarikan diri, berlari semampunya menjauh dari anjing tersebut. Namun, anjing itu tetap mengejar dengan keganasan yang semakin meningkat. Siska merasa terjebak dan bingung tentang apa yang harus dilakukan di situasi yang genting ini. Saat itu, Siska merasakan takdirnya berada dalam genggaman anjing yang marah. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Sang pemilik anjing keluar dari rumah pada saat yang tepat dan dapat menenangkan anjingnya.

Siska menyadari bahwa pengalaman ini telah memberikan pembelajaran berharga baginya. Ia harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena setiap saat bisa membawa situasi yang tak terduga. Pada akhirnya, pengalaman itu menjadi bagian dari kisah perjuangan Siska dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas PPL. Ia terus melangkah maju dan menyadari bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Pengalaman dikejar anjing itu juga menjadi pengingat baginya bahwa dalam setiap perjalanan, terdapat kejutan dan rintangan yang harus dihadapi dan diselesaikan.

Meskipun ada beberapa tantangan dan kejadian tidak terduga, Siska merasa puas dengan pekerjaannya karena dia dan tim dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Setelah menyelesaikan tugas sehari-hari di lapangan, dia dan para petugas lapangan lainnya melaporkan hasil pekerjaan mereka melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi pendukung lainnya yang ada di ponsel mereka. Komunikasi ini mempermudah mereka untuk berbagi informasi dan mendapatkan arahan baru untuk tugas berikutnya. Selain rasa puas yang diperoleh

dari melaksanakan tugasnya dengan baik, Siska juga mendapatkan beberapa fasilitas dan tunjangan. Sebagai PPL, dia menerima fasilitas berupa topi, tas, pensil, penghapus, dan buku. Selain kepuasan pribadi yang diperoleh dari melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, Siska dan timnya juga mendapatkan tunjangan. Sebagai petugas PPL Sensus Pertanian 2023, mereka mendapat gaji sesuai dengan UMR Ogan Ilir, yang pada saat ini sekitar 3.404.177 juta rupiah. Gaji tersebut akan dibayarkan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, Siska juga mendapatkan perlindungan BPJS untuk keamanan mereka selama menjalankan tugas. Hal ini memberikan mereka rasa aman dan jaminan keselamatan. Lebih lanjut, para petugas lapangan juga menerima uang bensin sebesar sepuluh ribu rupiah per hari dari kantor, yang membantu mereka dalam perjalanan ke lokasi yang berbeda setiap hari.

Melalui kegigihannya sebagai PPL, Siska tidak hanya berhasil mengumpulkan data dengan baik, tetapi juga mendapatkan penghargaan dari masyarakat setempat. Mereka mengakui zdedikasinya dalam membantu pengumpulan data dan sedikit demi sedikit menyadari pentingnya peran yang Siska lakukan untuk kemajuan desa mereka. Penghargaan dan apresiasi tersebut memberikan semangat baru bagi Siska untuk terus melangkah maju dan menghadapi tantangan baru. Kesungguhan Siska dalam membantu mengumpulkan data sebagai PPL tidak hanya memberikan kontribusi yang nyata dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga membawa perubahan positif dalam kehidupan keluarganya. Dengan penghasilan tambahan yang didapatkan dari pekerjaannya sebagai PPL, Siska berhasil membantu kondisi ekonomi keluarganya. Dia dapat membantu suaminya yang saat ini merantau di Bangka untuk bekerja di tambang timah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi putra semata wayangnya.

Siska adalah contoh nyata kegigihan seorang wanita dalam membantu ekonomi keluarganya. Kisah perjuangan Siska mengajarkan kita tentang arti pentingnya ketekunan, semangat, dan keyakinan dalam meraih impian serta mengatasi segala rintangan yang menghadang. Perkembangan zaman yang telah terjadi di Indonesia juga telah

membawa perubahan signifikan terhadap peran perempuan di desa. Secara historis, perempuan di desa sering kali terikat dengan tradisi dan norma yang membatasi peran mereka hanya pada tugas domestik dan pengasuhan anak (Guampe & Kayupa, 2022). Namun, dengan kemajuan zaman, akses yang semakin mudah terhadap pendidikan dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender telah membuka peluang baru bagi perempuan di desa untuk memperluas keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Sebagai seorang wanita desa, Siska memiliki tekad kuat untuk membantu keluarganya dan mengubah kehidupan di desanya melalui partisipasinya sebagai petugas PPL Sensus Pertanian 2023. Melalui semangat yang tak tergoyahkan dan kesempatan yang diambarnya, dia berhasil menciptakan perubahan positif dalam hidupnya dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya.

E. Petani di Tengah Impitan Luasan Lahan

Pertanian skala kecil memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, menyediakan mata pencaharian bagi jutaan petani dan memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan domestik. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh petani skala kecil tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk mengatasi tantangan ini, Sensus Pertanian 2023 akan memperbarui sistem pengumpulan dan penyimpulan data petani skala kecil yang ada sebelumnya. Dalam sensus kali ini, petani skala kecil (lihat Gambar 8.7), juga dikenal sebagai petani gurem, akan diidentifikasi berdasarkan kriteria yang lebih komprehensif, termasuk luas lahan, kepemilikan aset, dan pendapatan bulanan. Sebelumnya, petani skala kecil hanya diukur berdasarkan luas lahan kurang dari 0,5 hektar (lihat Gambar 8.8). Namun, dalam sensus terbaru ini, pendekatan baru digunakan untuk menghitung kepemilikan lahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Hal ini memungkinkan pengakuan yang lebih luas terhadap petani skala kecil yang mungkin memiliki luas lahan yang lebih besar, tetapi tetap menghadapi tantangan dan penghasilan yang serupa dengan petani gurem. Dengan menggunakan kriteria yang lebih komprehensif, termasuk luas lahan

yang disesuaikan, kepemilikan aset, dan pendapatan petani per bulan, sensus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang petani skala kecil.



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.7 Wawancara dengan Salah Seorang Petani Sawah Rawa



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.8 Contoh Lahan Sawah Rawa Lebak yang akan Ditanami

Pertanian skala kecil merupakan bentuk yang mendominasi di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian pedesaan dan bahkan terkadang memainkan peranan yang krusial dalam upaya pelestarian alam. Wilayah Ogan Ilir juga tidak terkecuali, di mana petani-petani kecil hidup berdampingan dengan lingkungan yang rentan dan terancam. Meskipun demikian, hingga saat ini, informasi yang tersedia mengenai lokasi dan karakteristik pertanian skala kecil di daerah maupun di tingkat nasional masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan upaya untuk mengestimasi jumlah petani serta merancang kebijakan pertanian, pembangunan, dan penggunaan lahan yang efektif. Dalam upaya untuk mengatasi kekurangan informasi tersebut, kegiatan Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kritis yang ada. Peningkatan pemahaman tentang prevalensi dan distribusi pertanian skala kecil menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan strategis seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan menjalankan agenda konservasi di Indonesia.

Di tengah semangat tinggi untuk menjalankan usaha pertanian, para petani kecil di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, dihadapkan pada tantangan serius yang menghambat keberlanjutan usaha mereka. Mayoritas petani di daerah ini mengandalkan lahan yang relatif sempit dengan sumber daya terbatas. Salah satu contoh nyata kesulitan yang dihadapi oleh petani tradisional yaitu Bapak Manan dan Ibu Masnah, pasangan petani berusia uzur di Desa Kamal. Dengan usia mereka yang sudah mencapai 60-an tahun, Bapak Manan dan Ibu Masnah masih terus berjuang dalam pertanian dengan semangat dan keyakinan yang kuat. Mereka menggantungkan harapan pada hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Jika ditilik ke belakang, pasangan ini memiliki latar belakang sejarah pertanian yang panjang, dimulai sejak mereka masih kecil hingga mewarisi usaha pertanian keluarga. Mereka kemudian meneruskan tradisi keluarga dan memulai usaha pertanian mereka sendiri

sejak tahun 1983. Setelah menikah, mereka berhasil memiliki lahan pertanian yang tak pernah tergusur oleh waktu. Meskipun sering kali ada tawaran untuk menjual lahan mereka, mereka teguh untuk tetap mempertahankannya. Lahan pertanian yang mereka miliki sebenarnya terbilang cukup luas, lebih besar daripada kebanyakan petani di sekitar mereka, sekitar 0,9 hektar. Selain lahan tersebut, mereka juga menyewa lahan tambahan dengan sistem bagi hasil.

Bapak Manan dan Ibu Masnah adalah pasangan petani skala kecil yang hidup sederhana, namun tetap mampu menjalani kehidupan dengan cukup baik. Meskipun pendapatan mereka sangatlah kecil, sekitar 3 juta rupiah per panen yang hanya terjadi sekali dalam setahun, namun mereka tetap menganggap pertanian sebagai penopang utama kehidupan mereka. Pendapatan tersebut merupakan hasil bersih yang sudah dikurangi beban biaya operasional dan juga membayar hutang untuk modal bercocok tanam ke tengkulak. Mereka meminjam modal dari tengkulak atau pabrik saat akan memulai proses menanam. Pembayaran atas modal tersebut dilakukan dengan sistem ijon, mengurangi keuntungan hasil panen. Biaya bercocok tanam yang besar tentu saja perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan menjadi tantangan utama dalam pertanian skala kecil, terutama di Ogan ilir. Penghasilan sejumlah 3 juta tersebut tentu saja jauh dari kata mencukupi untuk biaya hidup mereka dalam setahun, jadi mereka harus mencari tambahan penghasilan lain dan tak jarang meminjam dari sanak saudara.

Sebagai gambaran penghasilan, hasil panen dijual sebesar rata-rata 47 ribu per kaleng (1 kaleng = 10 kilogram) atau 4.700 rupiah per kilogram. Selanjutnya, setelah diproses penggilingan, hasil panen dijual dalam bentuk gabah. Namun, sekitar 10 persen dari hasil panen, yaitu sekitar 40 kilogram, akan disimpan untuk kebutuhan sendiri. Jumlah total panen setiap kali panen berkisar antara 400 hingga 500 kilogram, tergantung cuaca. Gabah kemudian dijual kepada tengkulak sebelum dikirim ke pabrik besar. Namun, terdapat resiko yang muncul saat pengiriman ke pabrik kecil. Risiko tersebut adalah kemungkinan

bahwa kualitas gabah yang telah dipanen buruk karena beberapa faktor, seperti kebanjiran atau serangan hama. Akibatnya, harga gabah tersebut kadang-kadang lebih rendah dibandingkan dengan gabah mentah lainnya. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa nilai jual gabah sangat rendah untuk hasil kerja keras para petani. Harga yang rendah inilah yang dapat mengancam keberlanjutan hidup dan kesejahteraan para petani.

Lahan yang terbatas menjadi kendala serius. Lahan pertanian yang relatif sempit membatasi kemampuan para petani gurem dan kecil untuk memperluas usaha mereka (Eka Putra & Ismail, 2017). Ditambah lagi dengan beberapa kasus alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi petani kecil dan mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia. Alih fungsi lahan pertanian ini menjadi masalah serius bagi petani kecil di Kabupaten Ogan Ilir. Lahan-lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam dan menyokong mata pencaharian mereka, kini berubah menjadi jalan tol, perumahan, perkantoran, maupun tempat usaha. Hal ini menyebabkan petani kehilangan akses terhadap lahan pertanian yang dulu mereka miliki dan mengancam masa depan mereka.

Tantangan bagi para petani kecil di Ogan Ilir tidak hanya sebatas pada lahan yang sempit. Sebagai petani tradisional, mereka sangat tergantung pada kondisi cuaca yang tidak dapat mereka kendalikan sepenuhnya. Musim hujan yang tidak terduga atau kekeringan yang melanda daerah mereka dapat berdampak negatif pada hasil panen mereka. Ketidakpastian cuaca ini menjadikan pendapatan mereka tidak stabil. Dalam situasi sulit seperti ini, Bapak Manan dan Ibu Masnah berusaha mencari alternatif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mereka mulai menanam tanaman lain sebagai langkah diversifikasi usaha pertanian mereka, salah satunya adalah tanaman cabai di lahan yang mereka sewa. Meskipun memiliki pengetahuan yang terbatas dalam menanam tanaman non-padi, pasangan petani ini tetap berusaha untuk mempelajari dan menerapkan teknik baru guna mengoptimalkan hasil panen. Dengan sistem bagi hasil, setiap

tahun mereka bisa panen cabai sebesar rata-rata 300 kg, 50 kg untuk pemilik lahan dan sisanya 250 kg untuk mereka. Dari situlah mereka dapat menutup kebutuhan hidup sepanjang tahun. Selain itu, mereka juga memelihara kerbau untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan mendesak.

Keberlanjutan pertanian dan eksistensi petani kecil di Kabupaten Ogan Ilir menjadi taruhan dalam menghadapi tantangan ini. Diperlukan tindakan nyata dari pemerintah setempat untuk melindungi lahan pertanian dan pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan dan memberikan dukungan kepada petani kecil dalam menghadapi perubahan iklim serta lingkungan dengan kondisi yang sulit. Langkah-langkah seperti penyediaan pelatihan, permodalan yang terjangkau, dan akses ke pasar yang adil dapat membantu petani kecil mempertahankan mata pencaharian mereka serta mengurangi ketergantungan pada lahan pertanian yang terus berkurang.

Sebagai informasi, di Desa Kamal dan sekitarnya, jenis sawah yang ada adalah sawah rawa lebak dangkal. Bapak Manan dan istrinya juga memiliki sawah dengan jenis yang sama. Sawah-sawah ini pada umumnya memiliki kelembaban yang tinggi dan kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan sawah biasa (Yunindyawati et al., 2014). Namun, ironisnya, daerah Ogan Ilir yang seharusnya kaya akan sungai dan rawa, tidak jarang mereka mengalami masalah kekeringan, terutama pada jenis sawah rawa lebak dangkal yang dimiliki oleh Bapak Manan dan istrinya. Dan jika curah hujan terlalu tinggi, ada ancaman banjir yang tinggi juga. Kondisi ini membawa resiko gagal panen yang besar, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Selain itu, Sebagian besar para petani kecil di Ogan Ilir masih menggunakan metode bertani secara tradisional dengan alat sederhana seperti cangkul kecil. Tanah yang ada di sawah rawa dangkal ini relatif keras, sehingga hanya dengan menggunakan tangan saja tidak cukup untuk melakukan proses penanaman seperti yang umumnya dilakukan di sawah jenis lainnya.

F. Bergerak Tanpa Maju: Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Pertanian

Pertanian telah lama menjadi sektor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di tengah kemajuan zaman, sektor pertanian sering kali tertinggal dalam hal inovasi dan perkembangan. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar dalam sektor pertanian adalah Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten ini memiliki populasi yang sekitar 65% di antaranya adalah petani dan nelayan. Dengan luas wilayah mencapai 266 ribu kilometer persegi, daerah ini pada umumnya memiliki tiga jenis lahan rawa yang berbeda, yaitu lebak dalam, lebak tengah, dan rawa dangkal (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir, 2022). Setiap jenis rawa memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada bulan penanaman. Misalnya, di lebak dalam, air turun lebih lambat pada bulan Agustus hingga September, sementara di lebak tengah, bulan Mei hingga Juni menjadi waktu ketika air turun dengan lambat. Sedangkan di rawa dangkal, risiko banjir meningkat saat terjadi hujan, terutama pada bulan Februari hingga April.

Dari penjelasan di atas, wilayah ini memiliki potensi pertanian rawa lebak yang melimpah. Namun, masih banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir terus menghambat pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan di Ogan Ilir. Dalam subbab ini, kita akan menjelajahi berbagai masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari faktor lingkungan hingga permasalahan kepemilikan lahan. Curah hujan yang tidak menentu, kekeringan, perubahan iklim, dan genangan air saat musim hujan menjadi tantangan nyata bagi para petani. Selain itu, masalah alih fungsi lahan, pencaplokan lahan oleh perusahaan besar, pemasaran hasil pertanian, ketersediaan sumur bor, regenerasi petani, dan keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi produktivitas dan pendapatan petani kecil.

Di Kabupaten Ogan Ilir, petani harus menghadapi tantangan yang serius dalam menjalankan usaha pertanian mereka, terutama para petani kecil. Perubahan iklim dan ketidakpastian musim telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan pertanian di

wilayah ini. Pada musim kemarau, mereka dihadapkan pada kondisi kekeringan yang disertai meningkatnya risiko terjadinya kebakaran. Tanah yang kering dan sulit untuk mendapatkan air irigasi yang cukup menjadi ancaman bagi pertumbuhan tanaman mereka. Para petani harus berjuang keras untuk melindungi tanaman mereka dari ancaman kebakaran yang bisa menghancurkan hasil panen mereka. Namun, permasalahan tidak berakhir di situ. Saat musim penghujan tiba, giliran banjir yang menjadi momok yang tak terhindarkan bagi petani di Kabupaten Ogan Ilir. Hampir setiap tahun, banjir melanda daerah ini, menggenangi sawah-sawah mereka dan merusak tanaman yang telah ditanam dengan susah payah. Petani yang mayoritas adalah petani tradisional harus mengeluarkan dana besar untuk melawan kekeringan maupun banjir ini. Upaya yang dilakukan adalah penyiraman secara manual. Ketika terjadi kekeringan dan membangun tanggul sebagai benteng pertahanan untuk mencegah banjir merusak lahan pertanian mereka.

Upaya pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk membangun tanggul permanen di beberapa titik sawah rawa di Kabupaten Ogan Ilir masih menghadapi beberapa kendala yang serius. Proses pembangunan tanggul sulit dilaksanakan karena masalah kepemilikan lahan. Hal ini menjadi masalah karena persyaratan program pembangunan tanggul dari pemerintah menuntut bahwa lahan tersebut harus terdaftar atas nama milik pribadi. Hal ini tentu saja menimbulkan hambatan untuk petani dalam memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan dari pemerintah. Selain itu, kendala kepemilikan lahan juga mempersulit proses sosialisasi dan mencapai kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat pada program ini. Kepemilikan lahan yang beragam, seperti status lahan sewa atau status lahan dimiliki oleh keluarga atau orang tua, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pembangunan tanggul dan infrastruktur pertanian secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa di Kabupaten Ogan Ilir, banyak lahan sawah yang masih didaftarkan atas nama orang tua petani karena kebanyakan lahan merupakan warisan dari leluhur.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, baik petani kecil dan tradisional, di Kabupaten Ogan Ilir menghadapi risiko banjir dan kekeringan yang selalu mengintai setiap tahunnya, serta menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem irigasi yang efektif. Sayangnya, upaya mitigasi bencana belum sepenuhnya dimiliki oleh petani tradisional, sehingga mereka terus berjuang untuk melindungi hasil pertanian mereka dari berbagai ancaman bencana yang datang. Wilayah Ogan Ilir, seperti yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sering kali menghadapi dampak negatif dari bencana alam, terutama banjir dan kekeringan. Kejadian-kejadian ini secara signifikan mempengaruhi produksi pertanian di daerah tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi bencana alam dan menerapkan program pencegahan serta mitigasi di wilayah yang berfokus pada sektor pertanian (Guo et al., 2019). Hal ini dianggap sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan lokal di Ogan Ilir. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya strategi yang komprehensif dalam program pencegahan dan mitigasi bencana. Langkah-langkah yang diambil harus mencakup identifikasi resiko bencana yang spesifik, pemetaan wilayah rentan, serta peningkatan pemahaman terhadap pola dan penyebab bencana alam di wilayah tersebut (Nemine, 2015; Rozaki et al., 2021). Di sisi lain, pemerintah setempat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup guna meningkatkan sektor pertanian di wilayah ini belum mampu berbuat banyak. Petani tradisional perlu didukung dengan pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang memadai untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh petani kecil maupun pelaku pertanian di daerah ini adalah masalah alih fungsi lahan, di mana lahan pertanian berpotensi dialihkan menjadi lahan non-pertanian seperti jalan tol, perkantoran, dan pemukiman. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, dampak dari alih fungsi lahan sangat merugikan para petani kecil, karena mengurangi luas lahan yang tersedia bagi mereka untuk bercocok tanam dan mengancam

mata pencaharian mereka. Alih fungsi lahan merupakan masalah yang dihadapi tidak hanya oleh petani di Kabupaten Ogan Ilir, tetapi juga di banyak daerah pertanian lainnya di Indonesia. Dorongan untuk mengembangkan infrastruktur dan perkembangan kota sering kali mengabaikan pentingnya menjaga lahan pertanian yang produktif (Eka Putra & Ismail, 2017). Hasilnya, lahan yang dulunya subur dan diolah oleh petani dengan kerja keras, berubah menjadi pemukiman atau fasilitas non-pertanian lainnya. Para petani kecil di Kabupaten Ogan Ilir merasakan dampak negatif dari alih fungsi lahan ini. Luas lahan pertanian yang semakin menyusut membuat mereka kesulitan untuk menjalankan usaha pertanian secara efisien. Mata pencaharian yang mereka andalkan selama ini semakin terancam, meningkatkan resiko kemiskinan dan ketergantungan pada sektor lain yang tidak menjamin keberlanjutan pendapatan yang mereka terima.

Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi para petani adalah terkait status kepemilikan lahan yang kompleks dan membingungkan. Seperti yang juga telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar lahan pertanian di daerah ini adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada pewarisnya. Hal ini menyebabkan masalah dalam pengelolaan lahan yang sulit dan rumit, terutama dalam hal memperoleh modal usaha. Kredit usaha tani dari pemerintah mensyaratkan petani memiliki kepemilikan lahan atas nama mereka sendiri. Selain itu, kepemilikan lahan yang belum terbagi-bagi membuat petani kecil menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan mereka secara efisien dan produktif karena mereka tidak dapat secara bebas memilih jenis tanaman yang akan ditanam dan rentan terhadap konflik keluarga. Secara keseluruhan, ketidakjelasan status kepemilikan lahan berdampak pada akses petani kecil terhadap sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan. Tanpa status kepemilikan lahan yang jelas, mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke program pemerintah, pembiayaan, dan pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Lebih lanjut lagi, para petani skala kecil di Kabupaten Ogan Ilir tengah menghadapi tantangan serius yang bukan hanya berasal dari

alih fungsi lahan dan status kepemilikan, namun juga dari praktek korporasi pertanian yang merugikan mereka. Keadaan ini semakin memperburuk situasi yang mereka hadapi. Pada penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan bahwa banyak lahan sawah yang telah dijual kepada sebuah perusahaan pertanian besar di Sumatra Selatan. Konsekuensinya, petani kecil kehilangan akses ke mata pencaharian yang dulu menjadi sumber penghidupan mereka. Mereka terjebak dalam keadaan di mana peluang mencari penghasilan baru sangat terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau akses ke sektor pekerjaan lainnya. Lahan persawahan yang sebelumnya mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kini sudah beralih ke tangan perusahaan tersebut.

Dalam penelusuran ini juga terungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan bahwa perusahaan tersebut ternyata terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang merugikan pemerintah dan masyarakat secara tidak langsung. Praktik ini dilakukan dengan cara perusahaan tidak melakukan pengalihan kepemilikan lahan setelah membelinya (tidak melakukan balik nama). Dengan cara ini, mereka dapat membayar pajak yang lebih rendah daripada seharusnya. Sebagai gambaran, lahan persawahan milik perusahaan ini yang seharusnya memiliki luas 4.000 hektar berdasar data dari Dinas Pertanian, tetapi hanya diklaim sebesar 2.500 hektar saja karena beberapa lahan yang sudah dibeli masih atas nama pemilik lama.

Dalam laporan tahun 2022, perusahaan tersebut hanya membayar pajak untuk lahan yang jauh di bawah seharusnya. Tercatat bahwa pada tahun tersebut, perusahaan ini hanya membayar pajak untuk jumlah lahan sebesar 2000-an ha saja. Praktik penghindaran pajak semacam ini memiliki konsekuensi serius yang merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah menjadi tidak dapat mengumpulkan pajak yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan sektor pertanian. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga terhambat. Keadaan ini semakin memperparah ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi di wilayah Ogan Ilir.

Melalui penelusuran penulis juga, di Kabupaten Ogan Ilir, petani kecil seakan-akan menghadapi tantangan bertubi-tubi yang tak kunjung henti. Selain berjuang dengan masalah-masalah yang telah disebutkan, mereka juga harus mengatasi keterbatasan sumber daya yang menjadi penghalang dalam usaha pertanian mereka. Sulitnya akses terhadap pupuk, benih unggul, dan alat pertanian modern berdampak buruk pada produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Namun, tidak semua petani harus menghadapi tantangan ini seorang diri. Beberapa di antara mereka telah bergabung dalam kelompok tani, sebuah inisiatif yang membantu mereka mengatasi masalah bersama. Melalui kelompok tani, para petani kecil mendapatkan manfaat dari kartu tani. Kartu ini memungkinkan mereka mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau melalui subsidi. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, petani harus mengisi saldo kartu tani terlebih dahulu, kemudian membeli pupuk dari toko yang biasanya dimiliki oleh kepala desa.

Perlu diketahui bahwa bantuan pupuk ini hanya tersedia melalui kelompok tani. Sayangnya, tidak semua kelompok tani di Ogan Ilir mendapatkan bantuan ini karena jumlah bantuan yang juga terbatas. Meskipun beberapa kelompok tani telah aktif selama bertahun-tahun, mereka belum mendapat jatah subsidi pupuk dari pemerintah hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena untuk beberapa tahun terakhir, dana subsidi dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan berupa pemenuhan pupuk dan benih yang memadai, serta modernisasi alat pertanian guna membantu petani meningkatkan hasil produksi mereka. Kolaborasi antara petani dalam kelompok tani dan dukungan pemerintah sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kecil di Ogan Ilir. Melalui kelompok tani, petani dapat berbagi pengetahuan, belajar bersama, dan mencari solusi bersama untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Para petani tradisional di Kabupaten Ogan Ilir juga berjuang melawan tantangan dari segi ekonomi. Harga jual yang fluktuatif dan

rendah sering kali membuat para petani tidak dapat memperoleh pendapatan yang layak. Karena itu, perlindungan harga dan peningkatan akses pasar menjadi hal yang krusial bagi petani. Pemerintah daerah dan jajarannya perlu berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga serta memberikan akses yang lebih mudah bagi petani untuk menjual hasil panen mereka. Sebelumnya, petani di Ogan Ilir memiliki kebiasaan menyimpan stok gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pola ini berubah. Banyak petani skala kecil yang sekarang menjual gabah mereka kepada tengkulak atau pabrik penggilingan padi yang berafiliasi dengan perusahaan tani yang telah disebutkan sebelumnya, dengan tujuan memperoleh profit. Namun, realitasnya, meskipun sudah menjual hasil panen, banyak petani yang masih hidup dalam kondisi garis kemiskinan karena keuntungan yang diraih dari penjualan hasil panen sangat sedikit sehingga terpaksa harus meminjam modal dari tengkulak untuk dapat menanam padi dan melanjutkan hidup dengan sistem ijon.

Sistem ijon, di mana petani harus membayar hutang modal usaha dengan hasil panen mereka, masih marak ditemui di Ogan Ilir. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebenarnya telah melakukan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan petani pada sistem ijon dari tengkulak yang memberatkan mereka. Upaya untuk memperluas akses petani ke sumber pembiayaan yang lebih terjangkau, seperti melalui program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun penetrasinya di masyarakat masih rendah karena terhalang masalah status kepemilikan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, ke depannya, pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani tentang hak-hak mereka dalam transaksi bisnis, serta memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi mereka.

Masalah infrastruktur dan akses terhadap sumur bor juga menjadi salah satu masalah pertanian di Ogan Ilir. Bagaimana petani-petani ini

bisa meningkatkan produktivitas pertanian mereka di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti air dan lahan? Jawabannya terletak pada infrastruktur yang memadai. Wilayah Ogan Ilir dikenal sejak lama dengan produktivitas pertanian rawa lebaknya yang berkisar antara 5–7 ton per hektar. Namun, musim kemarau yang belakangan sering melanda telah menyebabkan kekeringan di lahan-lahan pertanian mereka. Mereka menyadari bahwa solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memiliki sumur bor. Tetapi, biaya pembuatan sumur tersebut menjadi hambatan besar bagi para petani kecil yang banyak tidak mampu menanggungnya. Di Ogan ilir, tercatat beberapa petani sudah memiliki sumur bor sehingga dapat menekan ongkos produksi. Sementara itu, mereka yang belum memiliki sumur bor harus mengeluarkan biaya sebesar 500 ribu rupiah setiap kali melakukan penyiraman. Jelaslah bahwa memiliki sumur bor sendiri akan sangat mengurangi biaya operasional dan membuat pengeluaran mereka lebih terkendali.

Mereka menyadari betapa pentingnya infrastruktur yang baik dan akses terhadap sumur bor sebagai investasi jangka panjang. Manfaat infrastruktur yang memadai tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga memberikan kepastian dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, petani hanya perlu membeli minyak sebagai bahan bakar untuk menggerakkan sumur bor, yang tentu saja sangat jelas lebih terjangkau daripada biaya harian untuk membayar jasa penyiraman. Dengan infrastruktur yang memadai, para petani kecil akan dapat mengatasi tantangan musim kemarau dan memastikan keberlanjutan pertanian mereka.

Permasalahan terakhir yang ditemui di Ogan Ilir adalah terkait dengan regenerasi petani. Mayoritas petani yang masih aktif adalah generasi tua yang semakin menua dan melemah, sementara generasi muda kurang tertarik terjun ke dalam dunia pertanian. Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah setempat meluncurkan sebuah program yang dikenal dengan sebutan “Program Petani Milenial”. Program tersebut menurut penuturan dari Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir bertujuan untuk menarik minat generasi muda dan memperkuat keterlibatan mereka dalam pertanian. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memasukkan materi pertanian ke dalam kurikulum pendidikan. Mereka percaya bahwa dengan memperkenalkan dunia pertanian kepada siswa sejak usia dini, minat mereka akan tumbuh dan mereka akan lebih memahami betapa pentingnya pertanian bagi keberlanjutan masyarakat.

Namun, program ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani skala kecil. Salah satu masalah utama yang terjadi dalam seretnya regenerasi petani di Indonesia adalah karena generasi muda memiliki persepsi terhadap kemiskinan yang dialami oleh para petani. Bagaimana mungkin generasi milenial akan tertarik terjun ke dalam dunia pertanian jika mereka sendiri melihat petani hidup dalam kondisi yang sulit dan tidak sejahtera? Mereka tentu saja tidak ingin hidup seperti itu. Pemerintah Ogan Ilir sepertinya belum menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan petani skala kecil merupakan langkah penting dalam memikat minat generasi muda untuk terjun menjadi petani.

Sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir adalah tulang punggung kehidupan masyarakat setempat. Petani skala kecil yang menjalankan usaha pertanian menjadi tumpuan sektor ini, namun mereka justru menghadapi tantangan yang serius dalam upaya mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung petani kecil dan pertanian secara keseluruhan. Dukungan ini meliputi peningkatan pengetahuan petani melalui pelatihan dan program pendidikan, pembiayaan yang terjangkau untuk membeli alat pertanian, perlindungan hukum terhadap hak-hak petani, serta kolaborasi dalam kelompok tani untuk saling berbagi pengetahuan dan sumber daya. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan akses yang lebih mudah bagi petani kecil untuk menjual hasil panen mereka. Selain itu, pemerintah juga harus menginvestasikan sumber daya dalam membangun infrastruktur seperti tanggul untuk menghadang

banjir yang memadai dan meningkatkan akses petani kecil terhadap sumur bor, sehingga mereka dapat mengatasi masalah kekurangan air dengan lebih efisien. Dengan dukungan yang komprehensif ini, petani kecil di Kabupaten Ogan Ilir dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik.

G. Kegagalan Petani dalam Merespons Kebijakan & Program Pertanian Berkelanjutan

Di daerah Ogan Ilir, masih banyak ditemui petani yang masih mengandalkan alat-alat tradisional sekaligus menerapkan metode bertani secara tradisional. Di daerah ini, keterbatasan modal menjadi salah satu tantangan utama dalam kebijakan pertanian berkelanjutan. Petani pada umumnya memiliki tingkat pendapatan yang rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses informasi pasar, membeli peralatan serta mesin pertanian yang diperlukan untuk menunjang produktivitas. Petani sering kali terjebak dalam siklus praktik tradisional yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja manual. Mereka masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, sabit, dan keranjang untuk kegiatan penanaman, penyiangan, dan panen. Hal ini memerlukan banyak waktu dan tenaga serta memiliki produktivitas yang terbatas. Selain itu, umumnya para petani secara patungan menyewa mesin penggilingan beras karena biaya operasional dan perawatan mesin pertanian tersebut masih menjadi kendala. Biaya-biaya ini seringkali melebihi kemampuan finansial petani, sehingga acap kali mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan alat-alat tradisional yang lebih terjangkau.

Selain keterbatasan modal, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan pertanian berkelanjutan di Ogan Ilir. Daerah ini tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyediakan akses ke teknologi pertanian. Terbatasnya jaringan komunikasi, kurangnya pusat pelatihan atau lembaga riset pertanian, serta minimnya pendampingan teknis menyebabkan petani sulit mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru terkait penggunaan mesin pertanian. Petani sering

kali memerlukan bimbingan dan dukungan teknis dalam mengadopsi teknologi baru. Namun, di Ogan Ilir, kekurangan tenaga ahli atau penyedia layanan teknis yang memadai menghambat petani dalam mempelajari dan mengoperasikan mesin pertanian dengan benar. Pendampingan teknis yang kurang tentu saja berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi pertanian oleh petani.

Namun perlu digarisbawahi, untuk mencapai keberlanjutan dalam sistem pertanian tidak hanya berfokus pada implementasi teknologi, tetapi juga mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Tilman et al., 2011). Dari sisi ekonomi, keberlanjutan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani, diversifikasi sumber pendapatan, dan akses yang lebih baik ke pasar. Sebuah sistem pertanian yang berkelanjutan harus mampu memberikan penghidupan yang layak bagi petaninya (Barrios et al., 2020). Diversifikasi pendapatan, seperti melalui integrasi peternakan atau agrowisata, dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan stabilitas pendapatan petani. Dalam aspek sosial, pertanian berkelanjutan harus mendukung kesejahteraan sosial yang lebih luas. Ini termasuk memastikan bahwa praktik-praktik pertanian tidak merugikan masyarakat setempat dan mempromosikan inklusi sosial, seperti kesetaraan gender dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Gorjian et al., 2022). Keberlanjutan sosial juga berarti bahwa petani memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan hak asasi manusia yang dasar. Sementara itu, dari sudut pandang lingkungan, keberlanjutan berarti menjaga kesuburan tanah, kualitas air, dan keanekaragaman hayati (Çakmakçı et al., 2023). Penggunaan pestisida dan pupuk sintetis, meskipun dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek, sering kali membawa dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti pertanian organik, rotasi tanaman, dan konservasi tanah menjadi bagian integral dari pertanian berkelanjutan.

Dalam hal ini, pertanian tradisional sering kali dianggap sebagai model yang lebih dekat dengan konsep keberlanjutan, terutama

karena minimnya penggunaan input kimia seperti pestisida dan pupuk sintetis. Namun, apakah ini berarti pertanian tradisional sudah sepenuhnya berkelanjutan? Jawabannya tidak selalu. Di satu sisi, pertanian tradisional memiliki banyak keunggulan. Minimnya penggunaan bahan kimia membantu melestarikan kualitas tanah dan air serta melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, petani tradisional biasanya memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang ekosistem tempat mereka tinggal, yang memungkinkan mereka untuk mengelola lahan dengan cara yang adaptif dan berkelanjutan. Namun, pertanian tradisional sering kali menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas dan kesejahteraan ekonomi petani (aspek ekonomi). Produktivitas yang rendah dapat menyebabkan pendapatan petani yang juga rendah, yang pada akhirnya dapat memicu siklus kemiskinan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pasar, teknologi, dan dukungan finansial sering kali membuat petani tradisional kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Untuk menjadikan pertanian tradisional lebih berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Peningkatan teknologi yang tepat guna dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa harus mengorbankan lingkungan. Teknologi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti alat-alat yang dirancang untuk menghemat air atau energi, dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, petani perlu didukung dengan peningkatan akses terhadap pasar dan permodalan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih adil dan berinvestasi dalam praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi inovasi yang ramah lingkungan.

Akses menuju pasar yang terbatas merupakan salah satu hambatan utama dalam kebijakan pertanian berkelanjutan di Ogan Ilir. Hal ini disebabkan oleh hubungan patron-klien dengan tengkulak yang merupakan masalah serius dalam kebijakan pertanian berkelanjutan di Ogan Ilir. Hubungan patron-klien ini umumnya terbentuk ketika petani bergantung pada tengkulak sebagai perantara dalam menjual

produk pertanian mereka. Tengkulak memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat dan sering kali memanfaatkan posisi dominannya untuk membeli produk pertanian dengan harga yang rendah dari petani. Dalam beberapa kasus, tengkulak telah melakukan kerja sama dengan korporasi atau perusahaan tani besar. Hal ini mengakibatkan petani tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih menguntungkan. Mereka terkungkung dalam pola perdagangan yang tidak adil, di mana mereka harus menjual produk pertanian mereka kepada tengkulak dengan harga rendah dan tengkulak kemudian menjualnya ke korporasi tani atau perusahaan tani dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dalam hubungan ini, petani sering kali tidak memiliki informasi tentang harga pasar sebenarnya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

Selain itu, kurangnya informasi tentang permintaan pasar juga menjadi kendala. Petani seringkali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan peluang bisnis yang ada. Kurangnya informasi ini dapat menghambat petani dalam membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan produksi dan penjualan produk pertanian mereka. Tanpa pemahaman yang memadai tentang pasar, petani enggan berinvestasi dalam kebijakan pertanian berkelanjutan berupa teknologi yang tepat guna karena mereka tidak yakin akan permintaan dan prospek penjualan yang memadai. Ditambah lagi, ketidakpastian pasar juga menjadi kekhawatiran utama bagi petani. Fluktuasi harga dan permintaan yang tidak stabil dapat mengakibatkan ketidakpastian finansial bagi petani jika mereka telah berinvestasi dalam teknologi yang tepat guna pertanian. Petani mungkin khawatir bahwa hasil panen mereka tidak akan dapat dijual dengan harga yang menguntungkan atau bahwa mereka akan kesulitan menemukan pasar yang stabil untuk produk pertanian mereka. Ketidakpastian ini dapat membuat petani enggan mengambil resiko dengan mengadopsi teknologi yang tepat guna dan lebih memilih mempertahankan praktek pertanian tradisional yang mereka kenal.

Tantangan lingkungan dan topografi yang dihadapi oleh petani sawah rawa lebak di Ogan Ilir merupakan faktor berikutnya yang mempengaruhi kebijakan pertanian berkelanjutan di daerah tersebut. Karakteristik lingkungan seperti kelembaban tinggi dan kondisi tanah yang berbeda-beda membutuhkan penyesuaian dalam pemilihan dan penggunaan teknologi yang tepat guna. Kelembaban tinggi yang umumnya ada di daerah rawa lebak dapat mempengaruhi performa mesin pertanian yang umumnya dirancang untuk kondisi lingkungan yang lebih kering. Tingginya kadar air dapat menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan mesin yang tidak tahan terhadap kondisi basah atau bisa menyebabkan kerusakan pada mesin tersebut. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian atau pengembangan mesin pertanian yang lebih tahan air atau dilengkapi dengan fitur yang dapat menghadapi kelembaban yang tinggi (Hasbi & Tunggal, 2019). Saat ini masih sangat jarang ditemui alat pertanian yang seperti itu di Ogan Ilir.

Pengelolaan sumber daya alam yang bijak merupakan elemen penting dalam mencapai pertanian berkelanjutan. Pendekatan konservasi, seperti agroforestri dan rotasi tanaman, harus diperkenalkan dan didorong agar kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati dapat terus terjaga. Pada akhirnya, pertanian berkelanjutan bukanlah konsep yang direduksi menjadi penggunaan teknologi modern semata. Ini adalah pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Meskipun pertanian tradisional memiliki banyak keunggulan dari segi lingkungan, produktivitas dan kesejahteraan sosial juga harus menjadi perhatian utama. Untuk mencapai pertanian yang benar-benar berkelanjutan, diperlukan kombinasi antara teknologi yang tepat guna, akses ke pasar, pendidikan yang memadai, dan pengelolaan sumber daya yang bijak. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pertanian tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, kebijakan pertanian berkelanjutan bukan hanya tentang meningkatkan hasil panen, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang adil bagi petani dan menjaga

keberlanjutan sumber daya alam yang sangat penting bagi masa depan pertanian. Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan pertanian berkelanjutan dan mekanisasi pertanian akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam sektor pertanian dan lingkungan secara keseluruhan.

H. Produk, Mata Rantai, dan Pengelolaan Pasca Panen: Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Para petani sawah rawa lebak di Kabupaten Ogan Ilir menghadapi masalah serius terkait ketergantungan mereka pada tengkulak dalam rantai pasok. Tengkulak ini berperan sebagai perantara antara petani dan pasar, namun sering kali mereka bekerja dalam jaringan korporasi besar yang mengontrol pasar. Korporasi ini memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan harga jual hasil panen petani (Fuad et al., 2015; Imaniar & Brata, 2020). Di Ogan Ilir, terdapat sebuah perusahaan besar yang menguasai sektor pertanian di wilayah tersebut. Monopoli pasar yang dilakukan oleh korporasi ini sangat merugikan petani. Tengkulak yang terkait dengan korporasi tersebut cenderung membeli hasil panen petani dengan harga yang sangat rendah, karena mereka tahu bahwa petani tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka. Dengan harga jual yang rendah, berkisar 4.000–4.700 rupiah per kilogram, petani kehilangan potensi keuntungan yang semestinya mereka dapatkan dari usaha keras mereka selama bercocok tanam.

Ketergantungan kepada tengkulak dan korporasi ini membuat petani terperangkap dalam siklus yang sulit diputuskan, layaknya lingkaran setan karena mereka tidak memiliki akses langsung ke pasar, sehingga petani terpaksa bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka (Arofah & Setiawan, 2021). Hal ini mengurangi kemampuan negosiasi dan kebebasan petani dalam menentukan harga jual yang adil untuk produk pertanian mereka. Petani seringkali merasa bahwa mereka sangat tergantung pada tengkulak karena para tengkulak ini dinilai sebagai penyedia modal kepada petani di kala kesulitan uang. Ketergantungan ini terjadi karena beberapa alasan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

termasuk keterbatasan modal dan sumber daya yang dimiliki oleh petani skala kecil di Ogan Ilir. Ketergantungan yang berlangsung bertahun-tahun ini semakin memperburuk kesenjangan ekonomi antara petani dan tengkulak. Petani terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan, sementara para tengkulak semakin kaya dengan memanfaatkan situasi tersebut.

Dalam realitas kehidupan petani sawah rawa lebak di Kabupaten Ogan Ilir, hubungan yang terjalin antara petani kecil dan para tengkulak dapat dikategorikan sebagai hubungan patron-klien. Konsep ini menggambarkan tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai perantara mereka dalam memasarkan hasil panen. Di dalam hubungan ini, tengkulak berperan sebagai patron yang memberikan modal dan membeli hasil panen petani, sedangkan petani berperan sebagai klien yang bergantung pada dukungan dan pembelian tengkulak (Vellanda et al., 2021). Namun, seperti yang telah dijelaskan dalam realitas yang ada hubungan patron-klien ini seringkali tidak seimbang dan cenderung merugikan petani. Tengkulak yang terhubung dengan korporasi besar memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat dalam menentukan harga jual hasil panen petani. Akibatnya, petani seringkali terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen mereka dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak.

Selain masalah hubungan patron-klien yang merugikan petani, sistem distribusi atau pemasaran komoditas padi di Kabupaten Ogan Ilir juga menghadapi tantangan lainnya. Meskipun produksi padi tinggi, pendapatan petani tidak selalu sebanding. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi dalam rantai pasok padi (Purbaningsih et al., 2021). Rantai pasok adalah serangkaian proses yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu produk. Untuk memastikan kelancaran distribusi atau pemasaran padi, aliran produk (padi), aliran uang (transaksi pembayaran), dan aliran informasi (data tentang harga, permintaan, dan penawaran) harus bekerja secara efisien.

Meskipun konsep rantai pasok penting untuk memastikan kelancaran pemasaran padi, konsep yang ada saat ini masih jauh dari optimal. Salah satu kendala utama dalam pemasaran padi di Kabupaten Ogan Ilir adalah fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Para tengkulak, yang memiliki kekuasaan dalam menentukan harga, dapat memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sementara petani seringkali tidak mendapatkan harga yang adil. Fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi ini membuat petani sulit untuk merencanakan kegiatan pertanian mereka secara efektif. Dalam sistem yang tidak teratur dan tidak terorganisir, harga padi sulit diprediksi dan seringkali merugikan petani. Selain itu, sistem rantai pasok komoditas padi di Kabupaten Ogan Ilir juga terhambat oleh ketidakteraturan dan ketidakterorganisasian. Keterlibatan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, seperti petani, tengkulak, dan pelaku usaha, membuat koordinasi dan pengawasan menjadi sulit. Tanpa adanya koordinasi yang baik, pemasaran padi menjadi tidak efisien dan rentan terhadap praktek yang merugikan petani.

Ketidakhadiran pemerintah dalam rantai pasok pemasaran hasil panen di Ogan Ilir telah memperkuat dominasi tengkulak dan korporasi besar dalam mengendalikan harga pasar pertanian. Peran pemerintah sangat penting dalam melindungi petani, memastikan akses yang adil ke pasar, dan mengatur kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan petani. Namun, di Ogan Ilir, kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah ini bisa dibilang masih sangat rendah. Salah satu masalah utama yang dihadapi petani adalah kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Modal sangat penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Namun, banyak petani tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena kendala kepemilikan lahan, seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Keterbatasan akses kredit membuat petani sering kali terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak, meskipun tengkulak

menawarkan modal dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh KUR, para petani tidak memiliki pilihan lainnya. Hal ini membuat petani semakin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan yang sulit diputuskan. Dalam kondisi ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi yang memadai, seperti memberikan akses yang lebih mudah ke KUR atau menyediakan alternatif lain untuk mendapatkan modal usaha yang terjangkau tanpa agunan bagi para petani skala kecil.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memutus ketergantungan petani pada tengkulak dan korporasi besar, kita dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, dengan pengembangan sistem fair trade dan community-supported agriculture (CSA) menawarkan solusi potensial. Fair Trade Agriculture sendiri adalah sistem perdagangan yang bertujuan untuk memberikan harga yang adil dan memastikan bahwa petani mendapatkan imbalan yang layak untuk produk yang mereka hasilkan (Parvathi & Waibel, 2013). Sistem ini berfokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Community-Supported Agriculture (CSA) adalah model pertanian di mana konsumen secara langsung mendukung pertanian lokal dengan membeli "keanggotaan" atau "bagian" dari hasil panen di awal musim tanam (Hvitsand, 2016). Sebagai imbalannya, mereka menerima pasokan produk pertanian secara reguler sepanjang musim.

Namun, penerapan kedua sistem ini di Ogan Ilir menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama dalam penerapan *fair trade* dan CSA adalah keterbatasan pengetahuan dan akses. Banyak petani di Ogan Ilir belum familiar dengan konsep *fair trade*, yang berfokus pada memberikan harga yang adil dan memastikan praktik perdagangan yang berkelanjutan, atau CSA, yang melibatkan konsumen dalam mendukung pertanian lokal dan berbagi risiko serta hasil produksi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang manfaat dan implementasi model ini, petani mungkin enggan untuk mengadopsi praktik baru. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan jaringan juga menjadi kendala besar. Infrastruktur

yang kurang memadai, seperti akses pasar dan transportasi, menghambat penerapan sistem ini. *Fair trade* dan CSA memerlukan jaringan distribusi yang efisien dan infrastruktur yang mendukung untuk dapat berfungsi dengan baik (Hanson et al., 2019; Vagneron & Roquigny, 2011). Namun, di Ogan Ilir, infrastruktur yang diperlukan mungkin belum memadai, sehingga menyulitkan pelaksanaan sistem ini secara efektif.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pendidikan dan pelatihan bagi petani tentang keuntungan dan implementasi *fair trade* dan CSA sangat penting. Program pelatihan harus mencakup aspek praktis dan manfaat jangka panjang untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi model ini oleh petani. Pengembangan infrastruktur juga perlu diprioritaskan. Investasi dalam infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi harus dilakukan untuk mendukung penerapan *fair trade* dan CSA. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam membangun fasilitas yang diperlukan. Dukungan finansial dan insentif juga dapat membantu mengatasi biaya implementasi. Menyediakan subsidi, pinjaman tanpa bunga, atau bantuan untuk sertifikasi *fair trade* dapat mempermudah petani dalam mengatasi biaya awal. Program insentif tersebut dapat mempercepat adopsi model ini di Ogan Ilir. Kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta juga penting untuk mendukung inisiatif *fair trade* dan CSA. Mengembangkan kemitraan ini dapat membantu mengatasi keterbatasan dukungan dan memperluas jaringan distribusi (Kang & Indra-payoong, 2019). Terakhir, penyesuaian budaya dan praktik lokal harus dipertimbangkan. Melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan implementasi dapat membantu menyesuaikan model *fair trade* dan CSA dengan kultur dan praktik lokal. Dialog dan kolaborasi dengan komunitas dapat memfasilitasi perubahan yang lebih diterima.

Secara umum, pemerintah perlu terlibat aktif dalam memperkuat rantai pasok pemasaran hasil panen agar tercapai sistem pertanian yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun lembaga pasar yang efisien: Pemerintah harus mendirikan lembaga pasar yang transparan, efisien, dan adil. Lembaga pasar ini harus mengatur harga jual yang menguntungkan bagi petani dan mencegah praktek monopoli yang dilakukan oleh tengkulak atau korporasi besar.
- 2) Mendorong koperasi petani: Pemerintah dapat mendorong pembentukan koperasi petani sebagai wadah untuk meningkatkan kekuatan tawar petani. Dengan bergabung dalam koperasi, petani dapat memperoleh akses kolektif ke pasar dan negosiasi harga yang lebih baik.
- 3) Memberdayakan petani melalui pelatihan dan pendidikan: Pemerintah harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada petani, termasuk dalam manajemen usaha, teknik pertanian modern, dan strategi pemasaran. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mereka dapat lebih mandiri dan dapat mengatasi tantangan dalam rantai pasok pemasaran.
- 4) Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat: Pemerintah harus mengawasi aktivitas tengkulak dan korporasi besar dalam rantai pasok pemasaran. Tindakan ilegal, seperti penawaran harga yang tidak adil atau monopoli pasar, harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5) Peningkatan akses modal usaha: Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan dan program yang memberikan akses modal usaha yang lebih mudah bagi petani. Ini dapat dilakukan melalui pendanaan yang terjangkau, subsidi, atau kemitraan dengan lembaga keuangan.
- 6) Pengembangan infrastruktur pertanian: Pemerintah perlu memperhatikan pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang memadai, jalan yang baik, dan akses transportasi yang lancar. Infrastruktur yang memadai akan membantu petani dalam mengoptimalkan produksi dan memasarkan hasil panen mereka.

Untuk mengatasi ketidakhadiran pemerintah dalam rantai pasok pemasaran hasil panen di Ogan Ilir, diperlukan kerja sama antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak terkait. Hanya dengan upaya bersama yang melibatkan semua pihak yang terlibat, masalah ini dapat diatasi, dan petani dapat meraih keuntungan yang adil dari usaha pertanian mereka.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Tanah Leluhur

Desa Pulau Negara, yang terletak di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir menjadi saksi dari perjuangan dua pasang petani sawah rawa setempat, Ahmad dan Sudar. Sepasang suami istri (lihat Gambar 8.9) yang berprofesi sebagai petani ini harus menghadapi berbagai kesulitan dalam upaya mereka untuk mengembangkan usaha pertanian yang mereka miliki. Kisah dua pasang sejoli sebagai petani ini dimulai ketika mereka mendapat warisan lahan rawa padi yang saat ini menjadi lahan sawah rawa lebak garapannya. Lahan tersebut cukup luas, sekitar 2.780 m², namun status kepemilikannya masih tercatat



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.9 Pasangan Petani Sawah Rawa Lebak, Ahmad dan Sudar

atas nama orang tua mereka yang telah meninggal dan alhasil pengelolaannya dilakukan oleh bersama keluarga besar. Menurut penuturan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir, kondisi seperti ini merupakan hal yang sering ditemui.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Ahmad dan Sudar (lihat Gambar 8.9) sebagai petani dengan kondisi yang demikian adalah aksesibilitas terhadap pendanaan atau modal. Karena lahan tersebut tidak secara resmi menjadi milik mereka, mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan modal dari lembaga keuangan atau perbankan. Kebanyakan bank membutuhkan jaminan kepemilikan lahan sebagai syarat untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada petani. Kondisi ini memaksa Ahmad dan Sudar mengandalkan sumber daya terbatas yang mereka miliki untuk mengelola lahan tersebut. Mereka harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa dukungan modal yang memadai. Terlebih lagi, mereka juga harus menghadapi risiko dan kerugian yang lebih besar jika terjadi bencana alam atau kerusakan lahan lainnya karena hama.

Setiap musim panen, Ahmad dan Sudar selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang berlimpah. Namun, harapan itu sering kali terasa hampa karena hasil panen yang mereka peroleh dari lahan sawah mereka hanya sekitar 200 kilogram padi per tahun. Hasil panen tersebut tidak pernah mereka jual. Mereka sadar bahwa menjualnya tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan, sehingga lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mereka dan keluarga. Sayangnya, beras dari hasil panen itu hanya cukup untuk bertahan selama dua bulan saja. Sisanya, mereka harus membeli dari pasar dengan uang yang terbatas. Penghasilan dari pertanian sawah tersebut tidaklah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka yang semakin meningkat.

Tahun ini, keadaan semakin buruk bagi Ahmad dan Sudar ketika lahan pertaniannya diketahui mengalami kerusakan parah akibat banjir yang melanda. Selain itu, serangan hama tikus yang tak terkendali membuat tanaman padi yang mereka tanam menjadi gagal panen.

Mereka berjuang keras untuk memulihkan lahan yang terdampak dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh banjir dan serangan hama. Ahmad dan Sudar terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang melebihi pendapatan yang mereka peroleh dari hasil bekerja. Ahmad dan Sudar bukanlah satu-satunya petani yang mengalami masalah ini. Beberapa petani lain yang penulis temui juga berbagi cerita kesulitan yang sama terkait dengan gagal panen. Mereka semua terjebak dalam sistem pertanian tradisional yang memiliki resiliensi rendah terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan hama.

Kisah hidup sepasang petani suami istri, Ahmad dan Sudar, serta petani lainnya yang berjuang melawan kesulitan ini, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia. Perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan ketahanan petani terhadap bencana alam, mengimplementasikan strategi mitigasi yang efektif, serta melibatkan pemerintah dan swasta dalam memberikan dukungan yang lebih besar kepada sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan petani, terutama para petani tradisional di desa-desa dapat ditingkatkan dan negara diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

Karena sulitnya bertahan hidup hanya dari pertanian, banyak dari mereka terpaksa mencari sumber penghidupan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti halnya yang dilakukan Ahmad dan Sudar. Terjebak dalam keterbatasan ekonomi, Ahmad dan Sudar terpaksa mencari penghasilan tambahan. Terlihat pada Gambar 8.10 rawa tersebut terkenal sebagai habitat buaya yang tentu saja sangat berbahaya. Setiap kali Ahmad berangkat, Sudar selalu mendoakan keselamatannya. Sementara Ahmad berjuang melawan bahaya dan menghadapi tantangan di rawa, Sudar tidak tinggal diam. Dia menunjukkan keterampilannya dalam membuat kerajinan tenun yang indah dan berkualitas tinggi. Hasil karyanya dijual di pasar, dengan harapan dapat menarik minat pembeli dan memberikan penghasilan tambahan bagi mereka berdua. Namun semenjak pandemi, kain tenunnya jarang laku.



Foto: Tedi (2023)

Gambar 8.10 Seorang Petani yang sedang Mencari Ikan di Sebuah Rawa

Tidak hanya itu, Sudar juga memanfaatkan keahliannya dalam membuat pekasam, makanan khas dari masyarakat Sumatra Selatan. Meskipun proses pembuatannya membutuhkan waktu dan kesabaran, Sudar yakin bahwa menjual pekasam bisa menjadi salah satu kegiatan andalan yang dapat membantu meningkatkan penghasilan mereka. Ia menjual pekasam dengan harapan dapat menarik pelanggan yang mencintai cita rasa khas dari hasil fermentasi ikan air tawar yang masam itu. Namun, meskipun Ahmad dan Sudar telah berusaha keras mencari penghasilan tambahan, mereka masih merasakan tekanan ekonomi yang terus meningkat. Penghasilan tambahan yang mereka peroleh ternyata tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup mereka yang semakin melonjak.

Kisah Ahmad dan Sudar sebagai sepasang petani sungguh penuh tantangan. Tahun ini saja mereka menghadapi bencana banjir yang menghancurkan hasil panen mereka. Segala usaha keras yang mereka lakukan untuk menanam padi sirna begitu saja. Malangnya, ketika mereka sedang berusaha bangkit dari kejadian itu, nasib buruk menimpa Sudar. Sang istri terjatuh dari tangga dan mengalami cedera serius. Sudar terbaring lemah, tidak mampu membantu suaminya

mencari nafkah. Ahmad merasa bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Ia berjuang setiap hari, pergi ke rawa di sekitar desa untuk menangkap ikan dengan risiko dimakan buaya. Ia berharap bisa menjual ikan-ikan tersebut dan mendapatkan penghasilan tambahan. Jika dihitung, rata-rata dia mendapat sekitar 20 ribu rupiah per hari. Meskipun hasilnya tidak seberapa, Ahmad tetap gigih dalam usahanya. Ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara dia sebagai kepala keluarga bekerja untuk memberikan makan kepada keluarganya. Setiap hari, mereka hidup dalam perjuangan melawan kemiskinan.

Tapi ada sedikit harapan yang menyinari kehidupan keluarga ini. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Ahmad dan Sudar menerima bantuan sebesar 600 ribu rupiah setiap tiga bulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan, dengan memberikan bantuan tunai secara berkala. Meskipun jumlah bantuan ini mungkin terbatas, tetap memberikan sedikit bantuan finansial yang sangat dibutuhkan bagi keluarga ini. Selain bantuan tunai dari PKH, mereka juga menerima beras melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan beras secara rutin sebagai bantuan tambahan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini, Ahmad dan Sudar dapat mengurangi beban pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Meskipun bantuan dari PKH dan BPNT memberikan sedikit harapan dalam menghadapi keterbatasan finansial, Ahmad dan Sudar tidak mengandalkan sepenuhnya pada bantuan tersebut. Mereka terus bekerja keras dan berjuang untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki peluang yang sama seperti anak yang lain. Meskipun hidup dalam kondisi sulit, mereka memiliki keyakinan kuat bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dari tiga anak yang dimiliki oleh pasangan petani yang gigih ini, anak tertua baru-baru ini mendapat pekerjaan setelah bertahun-tahun menganggur. Meskipun hanya lulusan SMA, anaknya

berhasil diterima bekerja di Palembang sebagai operator mesin. Anak kedua dari pasangan ini, saat ini masih bersekolah di tingkat SMP. Sementara itu, anak ketiga masih berada di jenjang pendidikan dasar. Ahmad dan Sudar berharap anak-anaknya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun tantangan finansial masih ada menghantui, pasangan ini tidak menyerah dan terus berjuang agar anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Ahmad juga menyadari bahwa kondisi menjadi petani tidaklah menyenangkan. Ia tidak ingin anak-anaknya terjebak dalam siklus kesulitan finansial dan keterbatasan hidup yang ia hadapi sebagai petani. Oleh karena itu, ia berharap agar anak-anaknya kelak tidak menjadi petani seperti dirinya.

Sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, peran petani seharusnya menjadi senjata utama untuk menggerakkan ekonomi skala nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di desa. Namun, sangat ironis melihat bahwa banyak petani skala kecil justru terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Kisah Ahmad dan Sudar sebagai petani sawah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita tragis tentang kemiskinan petani di Indonesia. Mereka adalah bagian dari banyak petani yang hidup di bawah garis kemiskinan, bergantung pada pertanian sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Kendala ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terus menghantui kehidupan mereka membuat mereka terjebak dalam kepahtan dan ketidakadilan hidup. Kisah Ahmad dan Sudar juga mengungkap ketidakadilan dalam sistem sosial dan ekonomi yang mengurung orang-orang seperti mereka dalam lingkaran kemiskinan yang berkepanjangan.

Para petani skala kecil di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan pendapatan. Salah satu kendala utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan modal (Kamara et al., 2019). Tanpa akses yang memadai terhadap sumber daya finansial dan teknologi modern, para petani skala kecil kesulitan dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Selain

itu, kurangnya akses terhadap pasar yang stabil dan harga yang adil membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya dukungan pemerintah dan investasi publik dalam pertanian skala kecil. Meskipun peran petani kecil penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga keseimbangan ekosistem, dana yang dialokasikan untuk sektor pertanian sering kali tidak mencukupi atau terfokus pada pertanian skala besar yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Akibatnya, petani skala kecil terabaikan dan sulit untuk berkembang.

Pasangan petani yang sudah berusia lanjut ini berharap agar pemerintah dapat memberikan program dukungan yang konkret, seperti pembiayaan yang terjangkau dan akses yang lebih mudah terhadap teknologi pertanian modern. Dengan adanya bantuan seperti itu, petani tradisional akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha pertanian mereka. Selain itu, program-program ini juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masa depan kehidupan pertanian, menghasilkan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui nilai dan kontribusi yang tak ternilai dari petani tradisional, serta berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan masa depan yang cerah bagi pertanian di Indonesia.

J. Penutup: Sebuah Kesimpulan Pendataan Sensus Pertanian

Sensus Pertanian 2023 yang dilaksanakan oleh BPS telah menjadi tonggak penting dalam pemetaan sektor pertanian di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Dengan melibatkan ratusan petugas lapangan yang berdedikasi, sensus ini tidak hanya berhasil dalam pengumpulan data dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh petani skala kecil. Bab ini menyoroti berbagai kendala yang dihadapi oleh para

petani, termasuk keterbatasan lahan, risiko gagal panen, alih fungsi lahan, ketergantungan pada cuaca, serta masalah regenerasi petani dan dampak negatif dari praktik korporasi pertanian. Khususnya, bab ini juga berfokus pada ketergantungan petani sawah rawa lebak pada tengkulak dan korporasi besar dalam rantai pasok hasil panen mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bagi mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk membangun lembaga pasar yang efisien, mendorong koperasi petani, dan memberdayakan petani melalui pelatihan, pendidikan, serta peningkatan akses modal dan infrastruktur pertanian.

Secara keseluruhan, Sensus Pertanian 2023 tidak hanya sebagai proses pendataan, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Di Kabupaten Ogan Ilir, sensus ini telah membantu mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan petani skala kecil, serta menekankan perlunya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2023, BPS Indonesia tengah melakukan pencacahan untuk memetakan sektor pertanian di seluruh wilayah di Indonesia melalui kegiatan Sensus Pertanian 2023, tidak terkecuali di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Melalui kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini, BPS ingin memahami kondisi pertanian di Indonesia dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para petani. Dalam pelaksanaannya, terdapat 414 petugas lapangan yang direkrut untuk bulan Juni dan 210 petugas di bulan Juli. Mereka terbagi sebagai PPL, PML, dan koseka. Berdasarkan hasil Monitoring Kualitas (MK) yang dilakukan pada minggu ke dua pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian 2023, ditemukan bahwa terdapat tingkat kesalahan yang relatif kecil, yakni sebesar 6,04 persen, sehingga sejauh ini sensus dapat dikatakan berjalan sukses. Peran penting dari tim petugas lapangan dalam keberhasilan sensus ini tidak bisa diabaikan. Salah satu contoh petugas lapangan yang menginspirasi adalah Siska, seorang ibu rumah tangga di desa Kamal. Dengan semangat dan keyakinan kuat, Siska berhasil

mengubah nasibnya dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengatasi kesulitan ekonomi keluarganya serta data pertanian di desanya melalui perannya sebagai petugas PPL dalam Sensus Pertanian 2023. Selama menjalankan tugasnya, Siska menghadapi berbagai tantangan, namun juga mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya. Secara keseluruhan, sejauh ini Sensus Pertanian 2023 di Ogan Ilir berjalan sukses.

Dalam tulisan ini, penulis juga menemukan berbagai kendala yang dihadapi para petani skala kecil di Ogan Ilir, seperti lahan yang terbatas, risiko gagal panen, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada cuaca yang tidak stabil. Selain itu, sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir juga menghadapi masalah regenerasi petani, dan dampak negatif dari praktik korporasi pertanian. Untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, petani skala kecil memerlukan perlindungan dan dukungan pemerintah. Langkah-langkah untuk melindungi petani kecil termasuk pengetahuan, pembiayaan, perlindungan hukum, dan pengembangan infrastruktur.

Dari penelusuran penulis, salah satu masalah penting yang perlu diatasi adalah ketergantungan petani sawah rawa lebak di Kabupaten Ogan Ilir pada tengkulak dan korporasi besar dalam rantai pasok hasil panen. Ketergantungan dan hubungan patron-klien ini mengakibatkan petani menghadapi harga jual rendah dan kesenjangan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah seperti pembangunan lembaga pasar yang efisien, mendorong koperasi petani, memberdayakan petani melalui pelatihan dan pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, peningkatan akses modal usaha, dan pengembangan infrastruktur pertanian harus dilakukan dengan kerja sama semua pihak terkait.

Dalam artikel ini, penulis memberikan gambaran kehidupan petani skala kecil melalui kisah petani sawah rawa seperti Ahmad dan Sudar, yang mewakili perjuangan petani dalam menghadapi kesulitan akses pendanaan, hasil panen rendah, kerusakan lahan, dan tekanan ekonomi. Meskipun telah mencari penghasilan tambahan, mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan yang

mereka terima dari Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai adalah langkah awal yang baik, tetapi mereka berharap ada dukungan lebih konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tradisional.

Secara keseluruhan, kegiatan pencacahan Sensus Pertanian 2023 merupakan langkah penting dalam proses pendataan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Di Kabupaten Ogan Ilir, sensus ini telah membantu mengidentifikasi petani skala kecil, mengungkapkan tantangan yang dihadapi, dan menyoroti perlunya dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan pemanfaatan teknologi modern dan adopsi TIK, serta kerja sama yang kuat, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Arofah, S. N., & Setiawan, A. H. (2021). Analisis determinan penawaran tembakau (studi kasus: Fenomena patron-klien antara petani tembakau dan tengkulak di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung). *Business Economic Entrepreneurship*, 4(2).
- Barrios, E., Gemmill-Herren, B., Bicksler, A., Siliprandi, E., Brathwaite, R., Moller, S., Batello, C., & Tittonell, P. (2020). The 10 elements of agroecology: enabling transitions towards sustainable agriculture and food systems through visual narratives. *Ecosystems and People*, 16(1), 230–247. <https://doi.org/10.1080/26395916.2020.1808705>
- BPS Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Kabupaten Ogan Ilir dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Ogan Ilir.
- Çakmakçı, R., Salık, M. A., & Çakmakçı, S. (2023). Assessment and principles of environmentally sustainable food and agriculture systems. *Agriculture (Switzerland)*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/agriculture13051073>
- Chaurasia, A. R. (2020). Female work participation in villages. In *Population and sustainable development in India*. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9212-3_10

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022*.
- Eka Putra, D., & Ismail, A. M. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 19(2).
- Fuad, I. Z., Aenurofik, A., & Rosyid, A. (2015). Belunggu tengkulak atas petani pembudidaya lele: Relasi patron-klien budidaya lele di Wonotunggal Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.488>
- Gorjian, S., Fakhraei, O., Gorjian, A., Sharafkhani, A., & Aziznejad, A. (2022). Sustainable food and agriculture: Employment of renewable energy technologies. *Current Robotics Reports*, 3(3). <https://doi.org/10.1007/s43154-022-00080-x>
- Guampe, F. A., & Kayupa, O. O. (2022). The role of woman workers in oil palm plantation on family's economy. *Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo*, 24(1). <https://doi.org/10.37149/bpsosek.v24i1.24483>
- Guo, J., Mao, K., Zhao, Y., Lu, Z., & Xiaoping, L. (2019). Impact of climate on food security in mainland China: A new perspective based on characteristics of major agricultural natural disasters and grain loss. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/su11030869>
- Hanson, K. L., Volpe, L. C., Kolodinsky, J., Hwang, G., Wang, W., Jilcott Pitts, S. B., Sitaker, M., Timeon, E., Ammerman, A. S., & Seguin, R. A. (2019). Knowledge, attitudes, beliefs and behaviors regarding fruits and vegetables among cost-offset community-supported agriculture (csa) applicants, purchasers, and a comparison sample. *Nutrients*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/nu11061320>
- Hasbi, & Tunggal, T. (2019). Adopsi traktor, mesin tanam padi, dan pompa air di sawah pasang surut dan rawa lebak. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal, "Smart Farming Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Petani"*, 4(5).
- Hvitsand, C. (2016). Community supported agriculture (CSA) as a transformational act—distinct values and multiple motivations among farmers and consumers. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 40(4). <https://doi.org/10.1080/21683565.2015.1136720>
- Imaniar, A., & Brata, N. T. (2020). Relasi patron-klien di antara tengkulak dan petani salak dengan dampak sosialnya di Banjarnegara. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1).

- Kamara, A., Conteh, A., Rhodes, E. R., & Cooke, R. A. (2019). The relevance of smallholder farming to african agricultural growth and development. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 19(1). <https://doi.org/10.18697/AJFAND.84.BLFB1010>
- Kang, P., & Indra-payoong, N. (2019). A framework of blockchain smart contract in fair trade agriculture. In ... of the PIM 9th national and 2nd ... (Issue July).
- Muhadjir, M., & Nasution, Z. (2020). Strategi pengembangan sentra perikanan perairan umum daratan sebagai kawasan minapolitan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2(1). <https://doi.org/10.15578/jksekp.v2i1.9260>
- Nemine, E. L. (2015). Flood disasters in Nigeria: Farmers and governments' mitigation efforts. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 5(14).
- Parvathi, P., & Waibel, H. (2013). Fair trade and organic agriculture in developing countries: A review. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 25(4). <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.736043>
- Purbaningsih, Y., Bahari, B., & Taridala, S. A. A. (2021). Rantai pasok usaha penggilingan padi studi kasus: Ud. Putra Tunggal Kabupaten Kolaka Timur. *AGRIMOR*, 6(4). <https://doi.org/10.32938/ag.v6i4.1421>
- Rozaki, Z., Wijaya, O., Rahmawati, N., & Rahayu, L. (2021). Farmers' disaster mitigation strategies in Indonesia. *Reviews in Agricultural Science*, 9. https://doi.org/10.7831/ras.9.0_178
- Saleh, E. (2019). Adaptasi pola genangan air rawa lebak dengan budidaya tanaman padi mengambang di Desa Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, 7(1). <https://doi.org/10.37061/jps.v7i1.7543>
- Sari, K., & Febriyansyah, A. (2019). Produktivitas dan luas lahan minimal petani padi sawah lebak di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Lahan Suboptimal*, 7(2). <https://doi.org/10.33230/jlso.7.2.2018.354>
- Shantiawan, P., & Suwardike, P. (2020). Adaptasi padi sawah (*Oryza Sativa* L.) terhadap peningkatan kelebihan air sebagai dampak pemanasan global. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.37637/ab.v2i2.415>
- Sikarwar, A., Chattopadhyay, A., Jaiswal, A. K., & Rani, R. (2022). Devaluation of female work participation with urbanization: a case of peri-urban Ahmedabad. *GeoJournal*, 87(1). <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10258-5>

- Tilman, D., Balzer, C., Hill, J., & Befort, B. L. (2011). Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(50). <https://doi.org/10.1073/pnas.1116437108>
- Utomo, B., Yusmiono, B. A., Prasetya, A. P., Julita, M., & Putri, M. K. (2022). Analisis tingkat bahaya karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/jwl.10.1.30-41>
- Vagneron, I., & Roquigny, S. (2011). Value distribution in conventional, organic and fair trade banana chains in the Dominican Republic. *Canadian Journal of Development Studies*, 32(3). <https://doi.org/10.1080/02255189.2011.622619>
- Vellanda, O., Ibrahim, I., & Sujadmi, S. (2021). Nelayan dan bos lokal (analisis mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat). *Jurnal Sosial Sains*, 1(4). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i4.67>
- Yunindyawati, Y., Sumarti, T., Adiwibowo, S., Vitayala, A., & Hardinsyah, H. (2014). Sejarah pertanian sawah lebak, peran perempuan dan pangan keluarga di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v24i2.3124>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab IX

Kegagalan Petani pada *Food Estate* Padi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Yanter Hutapea

Data dan informasi pembangunan pertanian yang benar diperlukan untuk menyusun strategi dan rencana pembangunan pertanian. Berbagai program sudah dilaksanakan di bidang pertanian, salah satunya *food estate* padi yang dilakukan dengan pendekatan kawasan berbasis korporasi petani untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Melalui Sensus Pertanian, kondisi terkini dengan segala permasalahannya diharapkan dapat diperoleh dengan benar. Upaya itu dilakukan dengan keterlibatan bukan saja petugas yang sudah dilatih secara berjenjang, namun juga berbagai pendekatan ke petani untuk mempermudah memperolehnya. Fakta menunjukkan petani masih diperhadapkan dengan kurang jelasnya pelaksanaan suatu program akibat lemahnya diseminasi yang dilakukan. Bahkan pelaksanaan program tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan.

Y. Hutapea

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: yant015@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Hutapea, Y. (2025). Kegagalan petani pada *food estate* padi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 309–365). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c945
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bukan saja akibat kemampuan SDM pelaksanaannya yang terbatas, melainkan juga kondisi sumber daya alam yang muncul sebagai penghambatnya dan keterbatasan infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, keberlanjutan suatu program bukan hanya untuk memperluas capaian dampaknya, namun yang penting juga adalah untuk mewujudkan apa yang belum dicapai. Terjadinya perubahan-perubahan sebagai akibat kondisi yang dinamis baik internal maupun eksternal bidang pertanian, mendorong diperlukannya informasi yang tepat melalui pelaksanaan Sensus Pertanian, yang menjadi kunci untuk membuka kondisi yang sebenarnya,

A. Menerjemahkan Sensus Pertanian di Tingkat Lokal: Sebuah Pengantar

Kehidupan masyarakat memang bersifat dinamis, yang artinya mengalami perubahan dan tidak stagnan. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan kecil hingga besar yang tentu membawa dampak besar pula. Perubahan yang terjadi merupakan suatu konsekuensi, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya penemuan baru di berbagai sektor. Perubahan pun tidak selalu tentang kemajuan, bisa juga tentang kemunduran. Perubahan di sektor pertanian, misalnya bisa dipandang hanya dari satu sisi saja. Sebab satu perubahan bisa mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lainnya.

Untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait kondisi sektor pertanian, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan data/informasi dari petani sebagai pelaku usaha melalui sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data dari seluruh elemen populasi yang diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau sering juga disebut parameter. Sensus pertanian memberikan data sebenarnya tentang keadaan pertanian.

Kegiatan sensus pertanian menjadi penting karena data pertanian dan pesertanya selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga harus diperbarui secara berkala. Terlebih, data statistik pertanian penting

bagi negara untuk menyusun perencanaan pembangunan pertanian, kebijakan, hingga evaluasinya. Sebagai contoh, upaya penggabungan data hasil sensus dengan survei menjadi unit data geografis administratif telah dilakukan di tujuh negara mediterania untuk mengkarakterisasi dinamika praktik pertanian, keanekaragaman spesies dan sistem pangannya (Villani et al., 2019). Bahkan penggunaan data hasil sensus pertanian dan survei rumah tangga di 55 negara digunakan untuk mengukur produksi tanaman yang mencakup 154 spesies tanaman dan 11 kelas luas lahan (Ricciardi et al., 2018). Oleh karena itu, ketepatan data dan informasi yang dikumpulkan akan mempengaruhi perencanaan, sehingga sejak awal perlu ditentukan informasi apa saja yang harus digali.

Bagi pelaku usaha pertanian, data sensus akan membantu memprediksi potensi bisnis di masa depan sekaligus mendeteksi risiko yang mungkin timbul. Misalnya, temuan hasil sensus pertanian di Bangladesh menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan pasar terhadap layanan jasa pengolahan lahan, irigasi, dan pasca panen karena penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) terbukti dapat meningkatkan produktivitas lahan, meskipun investasi modal untuk peralatan tersebut masih menjadi kendala kepemilikan pada petani kecil (Mottaleb et al., 2016).

Sensus Pertanian di Indonesia dilakukan tiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Sensus Pertanian 2023 merupakan sensus pertanian ketujuh yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak dimulainya yang pertama tahun 1963. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini juga mengacu pada program Badan Pangan Dunia yaitu *World Programme for the Census of Agriculture 2020*.

Salah satu program strategis nasional 2020–2024 adalah *food estate* (FE). Secara harfiah, FE berarti perusahaan pertanian pangan. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program ini. Konsep dasar FE diletakkan atas asas keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem rantai nilai produksi pangan yang berskala luas di dalam suatu kawasan (Kementerian

Pertanian RI, 2020; 2019). Petani yang terlibat pada program ini termasuk petani yang disensus pada tahun 2023 ini yakni di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, dan Kecamatan Jejawi.

Tujuan utama Sensus Pertanian 2023 adalah untuk mendapatkan data pertanian yang berkualitas. Ini artinya hasil sensus yang didapatkan dapat mengungkap fenomena sosial budaya dan ekonomi sebagai latar belakang kehidupan masyarakat petani yang dihadapkan pada lingkungan sekitar, sumber daya alam, serta kebijakan dan program pemerintah yang ada. Sebagai upaya mengawal pelaksanaan pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 dan memotivasi petugas di lapangan, maka dilakukan: 1) pendampingan, monitoring dan evaluasi secara eksternal terhadap pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI, dan 2) penggalan perspektif, latar belakang dan realitas ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat petani yang didata secara emik, untuk menjadi penguat dan pelengkap dari proses pendataan kuantitatif, terfokus pada petani padi yang masuk dalam wilayah program FE di Kabupaten OKI.

Cara yang dilakukan ini juga sebagai upaya perbaikan dalam mendesain suatu kebijakan pembangunan pertanian. Seperti yang telah dilakukan di Jepang, yakni data deret waktu sensus pertanian sebelumnya (alokasi penggunaan lahan, gaya manajemen, dan partisipasi dalam lingkungan pertanian) telah digunakan untuk memperbaiki persepsi berbasis tipologi petani (Guillem et al., 2012).

B. Bentang Alam Pertanian: Mengenal Awal Lingkungan Sensus

Sebagai salah satu dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten OKI berada pada posisi 2°30'–4°15' Lintang Selatan, dan 104°20'–106°00' Bujur Timur. Wilayah kabupaten ini luasnya 19.023,47 km². Secara administrasi, kabupaten ini memiliki 18 kecamatan dengan 327 desa/kelurahan. Tulung Selapan dengan luas 5 363,65 km² merupakan kecamatan yang paling luas, sedangkan Sirah Pulau Padang dengan luas 102,08 km² merupakan wilayah yang terkecil. Kecamatan yang paling dekat posisinya dengan Kota Kayu

Kecamatan Air Sugihan yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter dpl (BPS OKI, 2023).

Berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), Kabupaten OKI dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu DAS Musi, Bulurinding, dan Mesuji. Selain tiga sistem DAS tersebut, di kawasan ini juga terdapat danau, yang terbesar di antaranya adalah Danau Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam, Danau Air Nilang di Kecamatan Pedamaran, dan Danau Teluk Gelam yang kini sudah menjadi tujuan wisata, terutama wisatawan lokal. Demikian juga dengan Danau Teloko di Kota Kayu Agung. Selain sungai dan danau, dalam sistem hidrologi Kabupaten OKI juga terdapat rawa lebak yang volume airnya sebagian besar bersifat musiman. Pada musim kemarau, airnya mengering dan di musim hujan tergenang dikenal dengan lebak pematang atau lebak dangkal. Di wilayah lebak dalam terdapat cekungan yang airnya tidak pernah kering. Oleh masyarakat OKI disebut dengan lebak lebung. Kawasan lebak lebung ini memiliki sumber daya perikanan yang besar dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan air tawar.

Penduduk di Kabupaten OKI pada tahun 2021 berjumlah 772.742 jiwa, yang termasuk ke dalam 208.172 kepala keluarga (KK). Sebagian besar (61,10%) terkategori dalam keluarga sejahtera I, sedangkan yang terkategori dalam keluarga prasejahtera sebanyak 12,72% (Badan Pusat Statistik Sumsel, 2022).

Menurut lapangan usahanya, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 62,07%. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten OKI sebanyak 433.315 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun tingkat pengangguran di Kabupaten OKI pada tahun 2021 sebesar 3,01%, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya 3,29 %.

Sebagai salah satu wilayah di Sumatra Selatan yang dikembangkan sebagai *food estate* (FE) padi, data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten OKI memiliki luas tanam padi di sawah irigasi 7.385 ha, sawah tadah hujan 37.173 ha, sawah pasang surut 31.898 ha,

sawah lebak 44.810 ha, dan ladang/huma seluas 1.752 ha. Secara keseluruhan, jumlah luas tanam padi di Kabupaten OKI tahun 2021 tersebut adalah 123.017 ha. Tentunya luas tanam ini melebihi luas lahan sawah yang ada karena penanaman yang lebih dari satu kali di sawah irigasi, tadah hujan, sebagian pasang surut dan lebak. Kabupaten OKI menyediakan lahan seluas 59.118 ha untuk mendukung program FE dengan beragam komoditas yang berada di 17 kecamatan. Sementara itu, terdapat lima kecamatan yang dijadikan lokus supervisi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI (Tabel 9.1)

Tabel 9.1 Lokasi Supervisi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI

No.	Kecamatan	Desa	Dusun	RT	Etnis dominan	Tanggal
1.	Lempuing	Tugu Mulyo	5	01	Jawa	13 Juni 2023
2.	Lempuing	Tugu Agung	2	04	Jawa	13 Juni 2023
3.	Lempuing Jaya	Sungai Belida	3	03	Jawa	14 Juni 2023
4.	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	4	08	Jawa	14 Juni 2023
5	Jejawi	Tanjung Aur	2	05	Melayu	15 Juni 2023

Sumber: BPS OKI (2023)

Wilayah yang sudah terwujud sebagai kawasan FE berbasis komoditi padi adalah di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Sementara itu, tiga kecamatan lain yang juga sudah mendapatkan rencana yang sama, yaitu Sungai Menang seluas 7.885 ha, Pampangan 6.271 ha, dan Jejawi seluas 6.041 ha, sampai saat ini belum terwujud klaster apalagi kawasannya. Pelaksanaan supervisi Sensus Pertanian 2023 dilakukan di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya sebagai wilayah yang sudah terwujud kawasan FE, sedangkan Kecamatan Jejawi sebagai wilayah yang direncanakan tetapi belum terwujud kawasan FE.

Pusat Desa Tugumulyo berada di tepi jalan Lintas Timur Kecamatan Lempuing OKI, sehingga aksesibilitas ke wilayah desa ini terkategori lancar, dengan sinyal telepon seluler sangat kuat. Desa Tugumulyo berjarak 76 km dari Kota Kayu Agung. Desa ini luasnya 15,10 km², dengan topografi wilayah yang cenderung datar. Umumnya

desa-desa di Kecamatan Lempuing berada pada ketinggian 10 m dpl. Penduduk Desa Tugumulyo berjumlah 12.468 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.330 KK yang berada di 5 dusun dan 22 RT dengan etnis dominan adalah Jawa. Sebagian besar (80%) mata pencaharian penduduknya adalah petani, sisanya pedagang dan PNS.

Wilayah desa ini tidak dilalui sungai sehingga persawahan penduduk hanya mengandalkan air hujan dan sumur bor. Luas sawah di desa ini 957 ha. Pada saat kemarau basah seperti tahun lalu, sebanyak 65% petani sudah menanam dengan pola padi-padi-padi. Pola ini dikenal juga dengan istilah IP padi 300. Sebanyak 20% petani menanam dengan pola padi-padi, dan dilanjutkan dengan palawija atau sayuran untuk pertanaman ketiganya. Sementara itu, 15% petani lainnya menanam dengan pola padi-padi. Penanaman padi dengan sistem tanam legowo dominan dilakukan di Kecamatan Lempuing.

Untuk menunjang sektor pertanian, di wilayah desa ini, terdapat tujuh unit bank pemerintah dan tiga unit bank swasta. Terdapat dua unit pasar yang melayani kebutuhan hidup masyarakatnya. Untuk memperoleh sarana produksi pertanian, di desa ini juga terdapat enam unit kios saprodi. Sebanyak 20 unit penggilingan padi berada di wilayah desa ini, meskipun kapasitas produksinya sudah jauh menurun karena petani saat ini menjual langsung gabah kering panen (GKP). Beroperasinya penggilingan padi tersebut bertujuan untuk menggiling beras yang akan dikonsumsi rumah tangga saja. Hal ini terjadi umumnya pada penggilingan padi di Kecamatan Lempuing. Namun, diakui masih ada beberapa penggilingan yang menjual beras ke pengepul, agen, dan pedagang grosir. Terdapat satu orang pedagang pengumpul karet yang biasa melayani penampungan karet di desa ini, tetapi belum ada unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (UPPB). Para petani juga tergabung dalam 23 kelompok tani, tiga kelompok wanita tani, dan satu gabungan kelompok tani (gapoktan). Untuk melayani kebutuhan alat dan mesin pertanian, selain dikelola secara pribadi, di desa ini juga terdapat dua unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA). Terhadap peralatan dan mesin-mesin yang rusak, dapat dilayani oleh perbengkelan yang ada. Namun, dari

12 unit bengkel tersebut tidak semuanya dapat melayani perbaikan alsintan.

Masih di wilayah Kecamatan Lempuing, Desa Tugu Agung dengan luas wilayah 8,08 km², berpenduduk 4.203 jiwa yang masuk dalam 1.330 KK, menyebar pada lima dusun dan 14 RT. Desa Tugu Agung, yang berjarak 79 km dari kota Kayu Agung, juga memiliki aksesibilitas yang lancar untuk dilalui kendaraan roda empat, dengan sinyal telepon seluler terkategori kuat. Kekuatan sinyal telepon ini menjadi penting, karena saat ini banyak petani yang menerima informasi termasuk informasi pertanian dari sesama teman atau penyuluh menggunakan telepon seluler. Mata pencaharian utama penduduk adalah di bidang pertanian yang melibatkan 90% KK, sisanya mereka terkategori pedagang dan PNS.

Luas sawah di Desa Tugu Agung mencapai 550 ha dengan pola tanam padi-padi-padi dan padi-padi. Selain air hujan dan sumur bor (Gambar 9.2), sumber air juga didapatkan dari air sungai yang mengalir di wilayah desa ini. Terdapat lembaga yang mendukung berkembangnya sektor pertanian, seperti kelompok tani sebanyak



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.2 Penggunaan Alsintan Mendukung Peningkatan IP Padi di Lahan Tadah Hujan



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.3 Pengolahan Lahan Menggunakan Traktor Roda Dua

tujuh kelompok dan satu gapoktan, kios saprodi dua unit, penggilingan padi 22 unit, UPJA satu unit, dan adanya perbengkelan meskipun masih bersifat umum yang dapat juga memperbaiki mesin pertanian. Untuk perawatan alsintan (lihat Gambar 9.3), beberapa teknisi bengkel dapat dipanggil untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, ada juga satu pedagang pengumpul karet dan tiga pedagang pengumpul beras/padi. Petani yang memiliki pohon karet di wilayah Kecamatan Lempuing terpaksa memasarkan bahan olah karet (BOKAR) melalui satu orang pedagang pengumpul. Hal ini karena UPPB terdekat, yaitu UPPB Sumber Rezeki, berada di desa tetangga, yaitu Desa Kepahyang, Lempuing. Meskipun di desa ini tidak ada lembaga perbankan, tetapi lembaga tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena posisinya yang dekat di desa tetangga (Desa Tugumulyo).

Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya berjarak 63 km dari Kota Kayu Agung, sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat. Jumlah penduduk di desa ini ada 4.788 jiwa yang masuk dalam 2.089 KK. Mereka tersebar ke dalam lima dusun dan 15 RT. Umumnya, desa-desa di Kecamatan Lempuing Jaya berada pada ketinggian 10 m dpl. Luas wilayah desa ini 15,86 km², di dalamnya terdapat 1.085 ha sawah tadah hujan yang ditanami dengan pola

padi-padi. Sumber airnya selain berasal dari air hujan dan air sungai. Musim rendeng penanaman padi antara bulan November–April, dilanjutkan kembali musim gadu sampai dengan bulan Juli/Agustus. Namun, ada juga petani yang melanjutkan penanaman jagung setelah panen padi penanaman kedua.

Untuk mendukung pengembangan pertanian di wilayah ini, terdapat satu unit pasar desa dan lima unit kios saprodi, selain beberapa orang petugas atau formulator dari perusahaan pestisida. Pembinaan petani juga dilakukan penyuluh melalui 24 kelompok yang ada, dan seluruh kelompok ini juga disatukan dalam 1 gapoktan. Untuk penyediaan alat dan mesin pertanian, selain dimiliki secara pribadi yang dapat disewa, juga terdapat satu unit UPJA. Kerusakan terhadap alsintan dapat diperbaiki oleh operator bengkel lokal ataupun luar desa, walaupun masih berupa bengkel umum. Saat ini hasil panen padi dengan mudah dipasarkan dalam bentuk GKP sehingga 17 pabrik penggilingan padi yang ada menurun aktivitasnya. Di desa ini juga terdapat tiga pedagang pengumpul sayur yang mengumpulkan sayuran, hasil tanam di pekarangan, pematang sawah atau ladang, dan satu pedagang pengumpul karet. Pembinaan terhadap petani karet dilakukan oleh penyuluh. Layanan UPPB di Kecamatan Lempuing Jaya ada di dua desa, yaitu UPPB Mitra Tani di Desa Sukajaya dan UPPB Lambang Sari di Desa Tanjung Sari II. Namun, kedua UPPB tersebut melayani di desa masing-masing saja. Oleh karena itu, petani karet di desa yang tidak ada UPPB, hanya menjual BOKAR ke pedagang pengumpul saja.

Di Desa Lubuk Makmur (masih di Kecamatan Lempuing Jaya) jumlah penduduknya 5.444 jiwa yang termasuk ke dalam 2.127 KK, bermukim di enam dusun pada 21 RT yang ada. Untuk berkomunikasi dengan telepon seluler tidaklah sulit karena sinyal di desa ini terkategori kuat. Jarak desa ini dengan kota Kayu Agung sejauh 62 km, dengan aksesibilitas wilayah yang lancar karena dapat dilalui kendaraan roda empat. Sebanyak 90% dari kepala keluarga yang ada disana menggantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian di sektor pertanian. Seluas 2.000 ha sawah tadah hujan terdapat di desa ini yang sumber airnya dari sumur bor, sungai, bahkan air hujan. Selain

pola tanam padi-padi yang dominan, sistem tanam padi di Kecamatan Lempuing Jaya juga banyak dilakukan dengan sistem legowo.

Pengembangan sektor pertanian didukung dengan tersedianya kelompok tani dan gapoktan, lima kios saprodi, 13 pabrik penggilingan padi, satu UPJA dan didukung dengan perbengkelannya. Selain dikelola UPJA, secara pribadi banyak juga pemilik traktor roda dua, tetapi traktor besar roda empat dirasakan masih kurang ketersediaannya terutama jika dikaitkan dengan percepatan tanam. Penggilingan padi di desa ini umumnya sudah dilengkapi dengan *bed dryer* yang bahan bakarnya dari kayu. Terdapat empat orang pedagang pengumpul sayur dan sepuluh orang pengumpul BOKAR yang biasa beraktifitas. Meskipun di dalam desa belum ada bank, tetapi untuk urusan simpan pinjam bukanlah masalah karena di Desa Lubuk Seberuk yang posisinya di sebelah desa ini terdapat tiga unit bank umum pemerintah dan tersedia juga dua unit pasar.

Desa Tanjung Aur luasnya 23,27 km² yang merupakan desa terluas di Kecamatan Jejawi, berjarak 69 km dari kota Kayu Agung, dengan ketinggian berada hanya 8 m dpl. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.048 jiwa terdiri dari 370 KK. Meskipun penduduknya memiliki profesi yang beragam, tetapi diyakini sumber mata pencaharian kepala keluarga semuanya dari sektor pertanian. Akses ke wilayah desa ini dikategorikan lancar, dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Untuk berkomunikasi, juga didukung dengan sinyal telepon seluler yang kuat.

Topografi wilayah desa tersebut adalah landai dan sebagian kecil bergelombang. Luas sawahnya 832 ha dengan jenis sawah lebak yang dipengaruhi oleh air sungai. Hanya 15% persen sawah tersebut yang diusahakan padi dengan pola padi-padi yang keberadaannya di lebak pematang. Sementara itu di lebak tengahan, apalagi lebak dalam, hanya ditanam padi satu kali dalam satu tahun. Sistem tanam padi bermacam-macam, ada yang sistem hambur benih, ada juga yang tanam pindah, Di hamparan sawah dari lebak pematang ke lebak tengahan terdapat saluran air irigasi, tanggul penangkis yang dikombinasikan dengan pintu air dari saluran ke muara sungai. Paling tidak sudah ada empat pintu air di persawahan.

Pemilik sapi disinyalir hanya 5% dari KK yang ada, tetapi keberadaan ternak tersebut cukup menarik perhatian begitu memasuki wilayah pemukiman. Hal ini dikarenakan kandangnya dalam ukuran besar berada justru di tepi jalan dan dekat dengan rumah penduduk. Saat ini terdapat kurang lebih 800 ekor sapi di desa tersebut, tetapi tidak banyak petani yang menggunakannya kotoran ternak untuk pupuk organik tanamannya. Kalaupun digunakan, kotoran hewan yang sudah lama tersebut langsung saja digunakan tanpa proses pengolahan.

Beberapa kelembagaan pendukung pertanian yang ada seperti keberadaan 11 kelompok tani dan satu gapoktan, dua pengumpul karet dan satu belantik sapi. Saat ini, keberadaan penggilingan padi tetap eksis karena hanya ada satu unit, diperlukan petani untuk menggiling gabahnya, meskipun masyarakat juga sudah menjual GKP ke pedagang besar. Sementara itu, desa ini belum memiliki lembaga penunjang lainnya, seperti pasar desa, kios saprodi, dan UPJA. Hal ini menggambarkan keterbatasan perkembangan pertanian di wilayah desa ini. Kedekatan dan kemudahan memperolehnya di Palembang dijadikan sebagai alasannya.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian versi Lokal

Pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas petani dilakukan dengan metode kualitatif melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu 1) wawancara mendalam terhadap para pelaku kegiatan sensus pertanian, khususnya dari sisi pendata dan masyarakat petani yang didata (lihat Gambar 9.4–9.6); dan 2) observasi atas proses pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023. Pertanyaan pada Sensus Pertanian 2023 tersedia dan digunakan untuk mencacah di seantero Indonesia.

Dikaitkan dengan pertanyaan mendalam tentang kondisi pertanian di tengah gelanggang FE padi, maka secara lokal terdapat variabel sensus yang spesifik sifatnya, yang dapat saja terdapat kesamaan variabel melalui pertanyaan PPL pada Sensus Pertanian 2023 tersebut. Jika dielaborasi dengan pertanyaan Sensus Pertanian



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.4 Wawancara Petani di Kec. Lempuing



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.5 Wawancara Petani di Kec. Lempuing Jaya



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.6 Wawancara Petani di Kec. Jejaw

2023 yang tersedia, maka variabel versi lokal yang diliput terdiri dari beberapa poin berikut ini.

- 1) Domisili petani, mencakup alamat tempat tinggal (RT, dusun, desa, dan kecamatan), jarak desa ke ibukota kabupaten, luas desa, topografi desa, dan aksesibilitas ke desa.
- 2) Karakteristik petani dan keluarga, mencakup nama, umur, pekerjaan, pendidikan, asal dan etnis petani, jumlah anggota keluarga, anggota keluarga yang terlibat pada usaha pertanian, status pernikahan, pekerjaan pokok dan pekerjaan luar pertanian, keanggotaan pada lembaga/organisasi, motivasi, aktivitas yang dilakukan di bidang pertanian dan keberhasilan yang dicapai.
- 3) Pemilikan aset:
 - a) Lahan sawah (tadah hujan, lebak), meliputi jenis, luas dan peruntukan lahan, peluang memiliki lahan sawah di dalam atau di luar desa.
 - b) Lahan kebun di dalam dan luar desa.
 - c) Tanaman semusim dan tahunan yang diusahakan; nama tanaman, luas tanam.

- d) Ternak (besar, kecil dan unggas) yang dipelihara; jenis dan jumlah ternak, luas kandang ternak.
 - e) Rumah domisili, meliputi ukuran dan kondisi rumah.
 - f) Kendaraan, meliputi jenis dan jumlah kendaraan roda dua dan empat.
 - g) Alat dan mesin pertanian, meliputi jumlah dan jenis pemilikan alat dan mesin pertanian.
- 4) Inovasi pertanian, mencakup pola tanam berbasis padi di lahan sawah, penerapan teknologi budi daya pada FE (persiapan lahan, sumber pengairan: sungai, sumur bor, hujan), saluran irigasi, varietas, perlakuan benih, jumlah benih, sistem dan jarak tanam, pemupukan (jenis, dosis, cara dan waktu, hama dan penyakit dominan dan penanggulangannya, gulma, panen, pasca panen), kemudahan mengakses inovasi pertanian.
 - 5) Permasalahan dalam penyediaan dan aplikasi saprodi (lahan, pupuk, pestisida, alsintan, tenaga kerja keluarga dan upahan), pelaksanaan panen dan pasca panen, diversifikasi dan pemasaran produk utama (padi).
 - 6) Kelembagaan pertanian dan pendukungnya, mencakup keberadaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, jumlah pedagang pengumpul berdasarkan jenis komoditi, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPIA), bengkel lokal, penggilingan padi, unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (UPPB), kios sarana produksi pertanian, koperasi, pasar desa, dan perbankan.
 - 7) Proses pembentukan FE, mencakup keterlibatan petani sejak awal pada program, data dan kelengkapan administrasi yang diperlukan, sosialisasi yang dilakukan, pemahaman petani terhadap program, keterkaitan sub sektor/instansi terkait pada pelaksanaan FE (pembuatan jalan, pembuatan saluran irigasi, pintu air, dan pengerukan saluran).
 - 8) Unit-unit usaha atau kelembagaan pendukung pertanian pada tingkat petani, klaster dan kawasan di lokasi FE padi. Pada tingkat petani, bagaimana aspek budidaya dan pasca panen,

dan perubahan pada petani terkait program FE. Pada tingkat klaster meliputi (keberadaan BUMS, UPJA dengan peralatan modern, usaha pengadaan saprodi, RMU yang aktif, pengolahan hasil primer, lembaga pemasaran (pedagang hasil). Pada tingkat kawasan (terbentuknya korporasi petani dengan dukungan dana dari petani/swasta, usaha penyediaan saprodi, pengolahan/diversifikasi lanjut (beras premium), hasil samping, usaha jasa keuangan, maupun unit pemasaran/*off taker*)

- 9) Pemasaran produk utama dan ikutan padi (gabah, sekam, dedak) dan aktivitas pasca panen padi, apa keunggulan dan kelemahan petani dalam mata rantai produk tersebut.

Selain informasi tersebut, diperoleh juga data sekunder yang bersumber dari BPS dan dari dinas/instansi terkait lainnya. Upaya pengumpulan data sekunder ini dilakukan untuk melengkapi data wilayah atau desa yang lebih tepat diperoleh melalui cara ini akibat keterbatasan informasi yang diperoleh dari petani. Hal ini akan membantu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu wilayah tertentu. Data sekunder ini meliputi jumlah penduduk dan mata pencaharian, batas wilayah, ketinggian tempat dari permukaan laut, topografi wilayah, hidrologi, luas tanam padi di berbagai agroekosistem, jumlah dusun dan RT, aksesibilitas dan jarak desa ke ibukota kabupaten, serta kelembagaan penunjang sektor pertanian. Selain dari tingkat desa, data tersebut juga menggambarkan keadaan kecamatan dan kabupaten.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Seperti halnya di kabupaten lain, Sensus Pertanian 2023 juga dilaksanakan di Kabupaten OKI Sumatra Selatan. Dalam mekanisme pelaksanaannya, Kepala BPS Kabupaten OKI bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI yang dibantu oleh Bidang Administrasi, Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Risiko; Bidang Teknis Pendataan dan Manajemen Lapangan; Bidang Pengolahan, Teknologi Informasi, dan Diseminasi; Bidang Analisis dan Kualitas Data; Bidang Integrasi Data

Statistik Sosial dan Statistik Pertanian; Bidang Integrasi Data Statistik Distribusi dan Jasa dan Statistik Pertanian dalam menyusun strategi dan rencana kerja sesuai bidangnya masing-masing.

Dikaitkan dengan wilayah pengembangan FE padi, pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya dan Jejawi Kab. OKI pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), pencacahannya dilakukan menggunakan metode *door to door*. Alat (moda) yang digunakan untuk pencacahan adalah lembaran kuesioner/*paper assisted personal interviewing* (PAPI).

Petugas lapangan UTP terdiri dari Koordinator kecamatan (koseka), pemeriksa lapangan sensus (PML), dan petugas lapangan sensus (PPL) (lihat Gambar 9.7). Seorang PPL bertugas untuk melakukan pencacahan usaha pertanian perorangan. Seorang PML bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa. Seorang koseka juga bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa (lihat Gambar 9.8). Baik seorang koseka, PML, maupun PPL wajib mengikuti pelatihan sebelum pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Organisasi lapangan Sensus Pertanian 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Di tingkat kecamatan, terdapat 1–2 orang Koseka. Satu orang koseka bertanggung jawab mengawasi kurang lebih 10 PML di wilayah tugasnya. Koseka diutamakan pegawai organik BPS yang ditugaskan menangani kecamatan.
- 2) Satu orang PML membawahi sekitar enam orang PPL. Tenaga PML diutamakan organik BPS atau mitra yang berpengalaman dalam kegiatan sensus/survei.
- 3) Satu orang PPL melakukan pencacahan sekitar 200–300 KK di wilayah SLS konsentrasi (metode *door to door*).

Pada tingkat lapangan, baik koseka, PML, maupun PPL memiliki tugas secara perorangan maupun bersama-sama. Seorang koseka memiliki tugas dan tanggung jawab membantu BPS Kabupaten OKI dalam mengalokasikan wilayah kerja PML dan PPL. Koseka bersama dengan PML, berkoordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setempat dan menginformasikan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pelaksanaan Sensus Per-

tanian 2023. Dia juga melakukan pendampingan terhadap PPL yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam hal melakukan wawancara, mencatat, bahkan dalam bersikap. Selanjutnya data hasil pencatatan



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.7 Koordinasi di BPS Kab. OKI



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.8 Pengumpulan Data di BPS Kab. OKI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PPL yang dikumpulkan oleh PML, diperiksa oleh koseka. Apabila terdapat kesalahan hasil pencacahan sampel oleh PPL, maka koseka menolaknya dengan menuliskan catatan kesalahannya. Jika tidak ada ditemui kesalahan pencacahan lengkap oleh PPL, maka koseka menyetujuinya. Pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini, jika wilayah tugasnya terpilih menjadi sampel monitoring kualitas, maka koseka berkoordinasi dengan petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023. Koseka bersama dengan PML dan PPL menindaklanjuti hasil temuan petugas monitoring yang diberikan BPS Kabupaten OKI dan memperbaikinya jika ditemui kesalahan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan tindak lanjut temuan monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023 dilaporkan koseka ke BPS Kabupaten OKI.

Seorang PML memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengenali batas-batas blok sensus bersama PPL pada wilayah tugasnya dan melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah, ketua SLS untuk menginformasikan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Jika terjadi perubahan wilayah SLS dari PPL, maka PML meneruskannya kepada koseka untuk dilakukan penetapan wilayah baru. PML melakukan pendampingan terhadap PPL yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam hal melakukan wawancara, mencatat, bahkan dalam bersikap. Selanjutnya, PML memeriksa data yang dikumpulkan dan dikirim oleh PPL. Jika terdapat kesalahan pencacahan oleh PPL, maka PML menolaknya dengan membuat catatan kesalahan untuk diperbaiki, dan menyetujui hasil pencacahan PPL bila tidak ditemukan lagi kesalahan. PML berkoordinasi dengan koseka dan petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023 apabila wilayah tugasnya menjadi sampel monitoring kualitas, untuk mempersiapkan instrumen pendukungnya. Selanjutnya, PML bersama PPL dan Koseka memperbaiki kesalahan yang ditemukan oleh petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023 dan menyusun laporan hasil perbaikannya sebagai tindak lanjut dari instruksi temuan monitoring kualitas tersebut.

Seorang PPL memiliki tugas dan wewenang bersama PML untuk melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua SLS setem-

pat guna menginformasikan kegiatan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pelaksanaan ST2023 ini. PPL melakukan penandaan lokasi (*geotagging*) dengan aplikasi Wilkerstat untuk bangunan rumah tangga pertanian di wilayah PAPI. Melakukan pencacahan lapangan dengan menggunakan formulir atau kuesioner yang sudah dipersiapkan sesuai wilayah tugasnya dan mengirim data yang sudah diinput ke PML. Jika hasil pencacahan tersebut ditolak PML akibat ditemukan kesalahan, maka PPL wajib memperbaikinya, termasuk melakukan konfirmasi kembali ke petani sampai diperoleh data yang benar. Apabila wilayahnya menjadi lokasi sampel monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023, maka PPL bersama dengan petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023, koseka, dan PML melakukan pemeriksaan ulang, konfirmasi, dan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kesalahan.

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini di tingkat lapangan diwarnai berbagai dinamika (lihat Gambar 9.9 dan 9.10). Diakui terdapat kesulitan juga dalam pencacahan oleh PPL ini karena beberapa faktor kondisi berikut ini.

- 1) Di tengah kesibukan petani, adakalanya muncul anggapan tak ada manfaat Sensus Pertanian 2023 bagi mereka. Muncul pertanyaan pada petani, seperti apa pentingnya sensus ini bagi mereka?.
- 2) Di balik pertanyaan yang mereka jawab, muncul kekhawatiran pada petani akan naiknya pajak rumah tangga akibat sensus ini.
- 3) Curiga terhadap petugas pun terjadi. Tidak berlebihan jika belajar dari pengalaman sebelumnya, beberapa di antara petani turut diperiksa oleh yang berwajib akibat pelaksanaan kegiatan yang diswakelolakan pada petani.

Perlu adanya pendekatan dan penjelasan di awal terhadap pemangku adat atau tokoh masyarakat, agar tidak timbul persepsi yang keliru pada saat petugas pencacah datang menemui petani, apalagi menduga akan adanya bantuan. Data dan informasi yang dikumpulkan demikian penting dan Sensus Pertanian 2023 merupakan milik



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.9 Diskusi antara Koseka dengan PPM dan PPL di Kec. Lempuing Jaya



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.10 Berbagai Upaya PPL Mencacah di Kec. Teluk Gelam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bersama yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Para tokoh inilah yang diharapkan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada warga akan pentingnya Sensus Pertanian 2023, termasuk apa saja yang akan ditanyakan petugas dan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan.

Awalnya PPL didampingi PML karena ada rasa khawatir. Adakalanya PPL grogi karena mereka baru direkrut dengan melamar jadi petugas PPL secara *online*, walaupun telah dilakukan pelatihan. Setelah mencacah 3–5 rumah, biasanya PPL sudah mulai lancar mencacah, tidak canggung lagi. Kondisi cuaca yang panas mengakibatkan PPL juga mengalami kelelahan fisik, mereka mencacah bahkan sampai larut malam dan bahkan sering harus tidur di lokasi petani. Latar belakang pendidikan petani memang beragam. Adakalanya kurang paham dengan apa yang ditanya, sedangkan petani lain dengan mudah dapat menjawabnya. Untuk hal seperti ini, PPL pun harus mengulang pertanyaan dan berupaya menjelaskan maksudnya agar mudah dipahami oleh responden. Terdengar juga ada PPL yang mengalami gangguan dengan kendaraan roda duanya, walaupun memang segera bisa diatasi dan dapat aktif kembali.

E. Petani Ditengah Impitan Luasan Lahan

Di Kecamatan Lempuing, terdapat empat desa transmigrasi, yaitu Desa Dabuk Rejo, Sumber Mulyo, Bumi Harjo, dan Bumi Harjo Makmur. Di desa tersebut tidak ada lahan sawahnya. Namun, sebagai peserta transmigrasi mereka awalnya memiliki kebun karet 2 ha, yang saat ini berkisar 1–2 ha. Jika mereka memiliki sawah, maka lokasinya terdapat di luar desa dengan cara menyewa atau membeli.

Sebanyak 15 desa lainnya terdiri dari 12 desa transmigrasi lokal (translok) dan tiga desa yang lain, yaitu Desa Kepahyang, Cahya Bumi, dan Kuta Pandan yang awalnya adalah desa dengan penduduk asli. Transmigrasi lokal ini umumnya berasal dari Belitang, Ogan Komering Ulu Timur yang dimulai pada tahun 1971. Pemilikan lahan sawah di desa translok ini relatif sempit (0,25–0,5 ha) karena mereka adalah pembeli lahan. Begitu juga luas kebun karetnya berkisar 0,5–1 ha. Tidak seluas kebun karet di empat desa transmigrasi.

Adapun di Kecamatan Lempuing Jaya, untuk desa transmigrasinya seperti Desa Lempuing Indah, Tania Makmur, Sukajaya dan Sukamaju penduduknya adalah transmigran dari Pulau Jawa. Namun bukan dengan komoditi karet, melainkan kelapa sawit. Pemilikan kebun sawit petani kini berkisar 1–2 ha. Sementara itu, 13 desa lainnya sebagian besar adalah desa transmigrasi lokal. Di dalamnya ada tiga desa dengan penduduk asli yaitu Lubuk Seberuk, Sungai Belida, dan Rantau Durian 1, meskipun saat ini di tiga desa tersebut sudah campur baur dengan transmigrasi lokal melalui pembelian lahan dan pernikahan. Jika desa transmigrasi kebunnya ditanami dengan sawit, maka desa translok kebunnya ditanami dengan karet. Namun, saat ini luas kebun karet hanya 0,25–1 ha saja, tidak seluas kebun sawit yang merupakan jatah transmigrasi.

Baik desa transmigrasi dan translok memang diperhadapkan dengan menciutnya lahan akibat sistem waris, yakni orang tua mewariskan lahan tersebut dan dibagi-bagikan ke anaknya. Di kedua kecamatan tersebut relatif hanya 25% yang merupakan desa transmigrasi, sedangkan sisanya 75% adalah desa translok (dominan) serta desa yang awalnya dengan penduduk asli (sebagian kecil). Desa Tugu Agung dan Desa Tugumulyo (Kecamatan Lempuing), serta di Desa Lubuk Makmur dan Sungai Belida (Kecamatan Lempuing Jaya) merupakan desa yang masuk dalam program FE. Luas lahan sawah di keempat desa ini umumnya hanya 0,25–0,5 ha/KK, meskipun terdapat juga sebagian kecil lebih dari itu. Sempitnya kepemilikan lahan ini tergambar juga dengan nilai jualnya, yaitu untuk lahan 0,25 ha yang sudah jadi sawah (istilahnya sawah jadi) berkisar Rp 125–170 juta, itu pun jika ada yang menjual. Sempit dan tingginya nilai sawah di dalam desa pada dua kecamatan tersebut juga mendorong petani mengakses lahan sawah di wilayah kecamatan lain seperti Desa Tanjung Lubuk (Kecamatan Tanjung Lubuk) dan Desa Kandis (Kecamatan Pampangan), dengan nilai sekitar Rp 25 juta untuk luas lahan 0,25 ha, tetapi masih dalam kondisi semak belukar. Bahkan, terdapat petani yang mengakses lahan hingga ke Kecamatan Pedamaran Timur.

Semakin sempitnya pemilikan lahan juga disebabkan karena alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan di luar pertanian. Ini jelas

terlihat di tepi jalan utama (Lintas Timur Trans Sumatra) yang umumnya sudah berubah dari sawah menjadi pertokoan, rumah makan, penginapan, dan usaha-usaha lain (kesehatan, pendidikan, keuangan, hingga kecantikan). Kondisi seperti ini dapat menjadi konflik jika perubahan lahan tersebut dimiliki oleh orang-orang yang tidak ada keterkaitan dengan pertanian, yaitu menyebabkan semakin terpojoknya petani. Sumber konflik bisa disebabkan terputusnya saluran air ke persawahan atau tertutupnya akses jalan ke lahan garapan yang mengakibatkan petani harus memutar lebih jauh lagi.

Semakin terimpitnya luasan lahan ini juga mendorong beberapa petani dari Desa Sungai Belida dan dari Kabupaten OKU Timur membuka lahan baru seluas 800 ha di pinggiran hutan yang berlokasi di Desa Juk Dadak, Kec. Tanjung Lubuk, OKI kemudian Desa Kertabayang dan Sukananti, Kec. Rantau Alai, Ogan Ilir (lihat Gambar 9.11 dan Gambar 9.12). Beberapa KK tani juga mengantisipasi sempitnya luas lahan sawah ini dengan kerja serabutan, seperti buruh tanam padi



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.11 Penanaman Padi Sistem Legowo di Sawah Tadah Hujan



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.12 Pertanaman Padi Berlatar Belakang Kebun Karet di Sawah Tadah Hujan

dan buruh bangunan. Bahkan beberapa menjadi buruh di Perkebunan Kelapa Sawit swasta seperti PT. Tania Selatan di Desa Tania Makmur, Lempuing Jaya. Buruh tanam padi memang diperlukan terutama jika akan dilakukan tanam yang relatif serentak. Demikian juga dengan buruh bangunan, ketika banyaknya pembangunan ruko-ruko di tepi jalan lintas Sumatra atau pembangunan rumah penduduk di berbagai desa. Ada juga petani yang berusaha untuk membeli lahan dan dijadikan sawah di desa lain meskipun relatif jauh lahannya, seperti di Rantau Durian II. Juga membuka lahan untuk dijadikan kebun karet atau sawit di luar desa.

Sebenarnya di tengah impitan luasan lahan yang sempit ini, cara yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan peningkatan indeks pertanaman (IP) yang pada umumnya sudah menanam padi dengan IP 200 (dua kali tanam padi dalam satu tahun). Namun, alangkah

baiknya jika ditingkatkan lagi dengan tiga kali penanaman. Pada penanaman ketiga, dilihat terlebih dahulu potensi airnya, sehingga dapat dipilih apakah menanam padi kembali atau menanam yang lain seperti cabai, jagung, atau kacang-kacangan. Beberapa petani sudah ada yang menerapkan IP 300 dengan pola padi-padi-jagung atau padi-padi-cabai yang nilai hasilnya lebih meyakinkan dibanding menanam IP padi 300. Di Kecamatan Lempuing bahkan ada juga petani yang menanam lahan kebun dan pematang sawahnya dengan sayuran seperti kangkung, petsai, bayam, dan timun.

Sempitnya lahan memang membawa dampak pada minimnya penghasilan keluarga, yang jika tidak diatasi akan membawa mereka terjerembap di jurang kemiskinan. Kiprah ibu rumah tangga tidak kalah pentingnya dalam mengatasi sempitnya lahan ini. Terdapat contoh yang mereka lakukan seperti menanam lahan pekarangan dengan sayuran, bahkan melakukan diversifikasi usaha seperti berjualan dengan membuka warung di rumah, menjual jajanan dan makanan untuk sarapan pagi di rumah, serta membuat usaha olahan pangan seperti keripik pisang dan ubi atau makanan lain. Produk ibu rumah tangga ini dapat dijual dengan menitipkannya di kios-kios. Hal lain yang dilakukan adalah menjual ternak peliharaannya seperti ayam, itik, bahkan sapi. Ternak-ternak ini memang berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Pembuatan *krey/tirai* dari pelepah sawit juga dilakukan beberapa rumah tangga terlihat di Kecamatan Lempuing Jaya. Apabila tidak ada lagi daya upaya yang dapat mereka lakukan maka jalan terakhir adalah mereka lari ke pelepas uang. Untungnya, orang-orang yang siap membantu itu tersedia di lingkungan desa mereka.

Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya memiliki luas persawahan yang sempit walaupun telah ditetapkan sebagai lokasi FE. Berbeda dengan di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi yang juga masuk dalam program FE, tetapi pemilikan sawahnya relatif masih luas. Kondisi ini merupakan gambaran beberapa desa lainnya di Kecamatan Jejawi. Hal ini disebabkan memang wilayahnya cukup luas dibanding dengan jumlah penghuninya. Di Desa Tanjung Aur,

kepemilikan lahan sawah rata-rata seluas 2 ha, bahkan ada juga petani yang memiliki sampai 30 ha. Luas lahan karetnya rata-rata 1,5 ha dengan 30% KK memilikinya. Masih terbuka peluang besar untuk memiliki lahan sawah dan memperluasnya di dalam desa. Saat ini harga beli sawah di lebak Desa Tanjung Aur senilai Rp 25–30 juta/ha.

Meskipun pemilikan lahan masih relatif luas, tetapi produktivitas GKP masih cukup rendah, yaitu 3–3,5 t/ha. Hal ini menjadi pendorong bagi petani untuk menanam dua kali dalam satu tahun di sawah lebak pematang dan tengahan. Akan lebih baik jika produktivitas ini dapat ditingkatkan, karena dengan meningkatkan produktivitas maka dapat memperkecil risiko kegagalan baik akibat serangan hama/penyakit, banjir, ataupun kekeringan pada penanaman berikutnya. Peningkatan produktivitas padi menjadi salah satu yang dapat dilakukan dengan penggunaan varietas unggul baru. Akibat kondisi terjadinya genangan air, terutama di lebak dalam menjadi tidak efektif melakukan pemupukan. Kecuali, jika air dalam kondisi *macak-macak*. Oleh karena itu, banyak juga petani yang tidak menerapkan pemupukan, tetapi ada juga yang menggunakan pupuk cair yang disemprotkan ke daun.

Bila dilihat dari kondisi lahan sawah yang di Desa Tanjung Aur, diperkirakan sawah lebak pematang dan lebak tengahan masing-masing 40% dari luas sawah dan sisanya 20% lebak dalam. Kesulitan yang dihadapi petani adalah kondisi genangan air yang sulit diprediksi secara tepat, terutama mengenai kapan mulainya, berapa tinggi genangannya, kapan mulai air surut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Kondisi yang senantiasa tergenang air di lebak tengahan dan lebak dalam, serta terbatasnya lahan di lebak pematang, mendorong petani menggunakan persemaian terapung (Gambar 9.13). Teknologi ini merupakan kearifan lokal yang sudah berlangsung turun-temurun. Terbuat dari rumput rawa dikenal dengan nama brondong (*Scleria poaeformis*) yang dianyam dengan ukuran bervariasi lebih kurang 1,5 x 3 m atau 1,5 x 2 m untuk satu persemaian. Sebagai media tumbuh benihnya digunakan ganggang air tawar (reamon) yang banyak terdapat di rawa lebak atau dikombinasikan dengan lumpur rawa



Foto: Yanter (2021)

Gambar 9.13 Persemaian Terapung di Agroekosistem Lebak

yang diletakkan di atas anyaman tadi. Persemaian ditambatkan di tonggak kayu agar tidak terbawa arus air. Persemaian terapung selalu basah sehingga persemaian tidak perlu disiram. Setelah berumur 14 hari, bibit persemaian ini dipindah ke darat sampai dengan air surut di sawah. Setelah air di persawahan surut, segera bibit tersebut ditanamkan. Sebagai akibat perkembangan wilayah pemukiman dan pertanian, keberadaan rumput berondong saat ini semakin terbatas di sekitar pemukiman, sehingga petani harus mencari ke tempat yang cukup jauh ke arah hutan untuk mendapatkannya.

Selain persemaian terapung itu, dikenal juga persemaian ber-tingkat. Ini dilakukan jika petani memiliki cukup lahan (tanah tidak tergenang) untuk membuat persemaian. Persemaian pertama selama 14 hari dan jika kondisi air di sawah lebak masih tinggi, maka dipindah ke persemaian kedua yang bisa mencapai 30 hari. Jika air sudah surut dan memungkinkan bibit dipindah, maka bibit ditanam di sawah (Gambar 9.14).



Foto: Yanter (2021)

Gambar 9.14 Pertanaman Padi di Lebak Tengahan

F. Bergerak Tanpa Maju (Mengenal Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Pertanian)

Keberadaan petani sebagai anggota kelompok mempermudah mereka saling tukar-menukar informasi dan berbagi cara untuk mempermudah melakukan usaha tani terutama dalam pengadaan saprodi. Ketersediaan saprodi seperti pupuk urea dan phonska diperoleh melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk maksimal 2 ha lahan. Apabila petani memiliki lahan 1 ha, maka dia hanya dapat jatah untuk 1 ha. Permasalahannya, kedatangan pupuk subsidi ini sering kali terlambat dan dialokasikan sesuai kemampuan anggaran pemerintah, sehingga belum tentu usulan yang tertuang dalam RDKK bisa direalisasikan semua. Akibatnya, petani berbagi pupuk jika tidak sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat petani yang sengaja menyimpan pupuk yang diterima saat ini untuk digunakan pada musim tanam berikutnya agar pemupukan tepat waktu pada musim mendatang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ditinjau dari kondisi lahannya, maka lahan sawah tadah hujan termasuk ke dalam lahan suboptimal, yakni tanah dengan kandungan pH yang rendah, umumnya rendah juga kandungan haranya. Terabai-kannya pengembalian bahan organik ke tanah dan intensifnya penggunaan pupuk kimia menyebabkan mutu fisik dan kimia tanah menurun. Permasalahan yang terjadi adalah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Jika jatah pupuk subsidi tidak mencukupi, maka mereka akan menambahkan sendiri dengan pembelian kontan ataupun *yarnen* (bayar setelah panen). Hal ini, jika tidak diimbangi dengan penggunaan bahan organik, justru akan merusak tanah itu. Oleh karena itu, diperlukan aktivitas yang tepat pada pengelolaan lahannya agar terjadi keberlanjutan penggunaan lahan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mempertahankan atau meningkatkan kesuburan lahan dengan penggunaan bahan organik. Penggunaan pupuk kandang dan pengembalian jerami padi ke lahan yang relatif saat ini berlangsung secara merata akibat cara panen yang menggunakan *combine harvester*. Penggunaan pupuk kandang menjadi kendala bagi petani karena banyak petani tidak memiliki ternak sapi. Hal tersebut yang mengakibatkan ketergantungan dengan pupuk kimia semakin tinggi.

Sesuai dengan namanya, sawah tadah hujan mengandalkan hujan sebagai sumber airnya, atau bisa juga dari sungai yang dinaikkan melalui saluran atau dari sumur bor. Penggunaan sumur bor untuk sumber air sawah di musim kemarau haruslah bergiliran antar petani karena debit air tanah yang tidak mencukupi. Hal ini tentu dapat menimbulkan permasalahan bahkan konflik dalam penggunaan air, jika seseorang merasa kebutuhan air di sawahnya belum mencukupi, sementara yang lain sudah tiba gilirannya untuk menyedot air. Di sisi lain, pada saat musim hujan, apalagi jika hujan lebat dan berhari-hari, besar kemungkinan sawah di beberapa desa (Lubuk Makmur dan Sungai Belida) di Kecamatan Lempuing Jaya akan mengalami kebanjiran karena adanya kerusakan tanggul penahan air. Hal ini sudah sering terjadi dan menyebabkan kerusakan tanaman padi bahkan ada yang mengalami gagal panen. Kondisi ini seharusnya

lebih dahulu dibenahi apalagi jika dikaitkan dengan adanya perbaikan infrastruktur melalui program FE.

Pemanfaatan lahan rawa lebak sebagai lahan pertanian memang sangat menjanjikan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan lahan rawa yang sudah ada. Demikian pula pH tanah rawa lebak, umumnya bersifat masam sampai agak masam (pH tanah 4–5). Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi tersebut, penggunaan pembenah tanah seperti pengapuran terutama di lebak pematang dan penggunaan bahan organik seperti pengembalian jerami ke lahan, hingga penggunaan pupuk kandang dapat diterapkan sampai di lebak tengahan saat kemarau. Berdasarkan hidrotopografinya, lahan lebak dibedakan berdasarkan lama dan kedalaman genangan (Tejoyuwono, 2022), yaitu: 1) lebak pematang atau dangkal, yaitu bila lama genangannya kurang dari tiga bulan dan dalamnya kurang dari 50 cm; 2) lebak tengahan, yaitu bila lama genangannya antara 3–6 bulan dengan kedalaman 50–100 cm; dan 3) lebak dalam, yaitu bila lama genangannya lebih dari 6 bulan dan dalamnya lebih dari 100 cm. Penanaman padi biasanya dilakukan setelah air di rawa lebak pematang mulai menyusut dan selanjutnya diikuti oleh lebak tengahan dan lebak dalam.

Menurut kebiasaan, pada bulan-bulan tertentu dimulai aktivitas budidaya padi. Di lebak pematang, meskipun dapat ditanami padi dua kali, maka pada saat musim kemarau (MK) diperlukan pompanisasi. Pada MK, padi ditanam menjelang akhir musim hujan bulan Februari/Maret dengan mengharapkan sisa-sisa air hujan atau hujan yang masih turun sehingga padi dipanen bulan Juni (MK). Kemudian, pada musim hujan (MH) bulan Oktober, padi ditanam sehingga panen dilakukan pada bulan Februari. Pada saat MK, bisa saja terjadi kekurangan air di lebak pematang, maka dapat digunakan pompanisasi, jika tidak ingin mengalami kegagalan panen. Ada di antara petani yang juga menanam sayuran dan palawija di lebak pematang saat kemarau dengan pompanisasi antara bulan Juli- Oktober.

Di lebak tengahan pada MK, padi ditanam bulan Mei saat air mulai surut agar bibit tidak tenggelam sehingga dapat dipanen bulan

Agustus. Apabila pada masa penanaman atau menjelang panen bulan Juli/Agustus terjadi kekurangan air, maka saat itulah diperlukan pompanisasi. Selanjutnya, padi kembali ditanam pada bulan September saat mulai MH dan dipanen pada bulan Januari dengan kondisi air relatif tinggi sehingga panen dilakukan dengan menggunakan perahu untuk meletakkan gabahnya supaya tidak basah. Kondisi inilah yang menyebabkan petani juga enggan menanam dua kali di lebak tengahan, apalagi jika merasa panen sebelumnya sudah cukup atau lebih baik mencari pekerjaan lain. Kondisi ini pula yang menyebabkan perlunya dibuat tanggul penangkis. Sedangkan, di lebak dalam dengan kondisi air yang dalam, sawah hanya dapat ditanami padi sekali dalam satu tahun, yaitu pada saat MK. Dimulai penanaman dalam bulan Juli dan panen ketika mendekati akhir bulan Oktober.

Penggunaan saluran irigasi adalah hal yang dapat dilakukan di lebak pematang sampai lebak tengahan. Diperlukan tanggul penangkis air dan dikombinasikan dengan pintu-pintu air di muara sungai. Tanggul ini untuk memperlambat air keluar saat kemarau dan penahan air masuk dari sungai saat banjir dalam kondisi air yang masih dapat dikendalikan. Permasalahan terjadi saat MH dengan kondisi banjir besar akibat curah hujan yang tinggi dan sehari-hari, maka biasanya air juga akan memasuki sawah melampaui tingginya tanggul. Di Jejawi, sudah tiga tahun terakhir ini sering banjir, akibatnya petani juga mencari tambahan pendapatan dan beralih profesi sebagai buruh di kebun sawit.

Untuk pengolahan lahan di sawah tadah hujan, sudah relatif lebih cepat dibanding sebelumnya, namun keberadaan traktor roda empat dirasakan masih belum cukup, terutama jika dikaitkan dengan per-tanaman serempak. Di lahan lebak pematang dapat digunakan traktor roda dua, sedangkan di lebak tengahan harus melihat kondisi air. Pada kondisi air yang dalam, lebih mudah bagi petani hanya dengan membalik rumput saja, apalagi di lebak dalam.

Penggunaan benih unggul padi di antara petani selama ini ketersediaanya tidak mencukupi. Meskipun di wilayah Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya bahkan di Kecamatan Jejawi tidak

begitu jauh dari Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang juga memiliki kelompok penangkar benih padi. Usaha penangkaran benih tersebut tentunya dilakukan secara komersial. Banyak hal yang menjadi dasar pemilihan varietas unggul oleh petani, seperti produktivitas yang tinggi, ketahanan terhadap hama/penyakit, umur panen, ketahanan terhadap rebah, ketahanan terhadap rendaman, ketahanan terhadap kekeringan, kesesuaian terhadap agroekosistem, harga jual berasnya, dan juga rasa nasi. Tidak cukupnya ketersediaan benih padi, biasanya mendorong petani melakukan seleksi dari hasil panen sebelumnya untuk dijadikan benih dan dipertukarkan dengan petani lain. Dengan demikian, masih sangat banyak petani yang menggunakan benih yang tidak bersertifikat padahal benih adalah faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produktivitas tanaman.

Penanggulangan hama dan penyakit (H/P) tanaman, memang menjadi bermasalah jika padi dipaksakan dengan IP 300. Bahkan di persemaian pun sudah mengalami langganan serangan sundep yang cukup berat, begitu juga di pertanaman. Saat pengisian malai terjadi, serangan beluk dengan tingkat serangan sedang hingga berat. Tidak ada pilihan lain bagi petani kecuali mengatasinya dengan penggunaan insektisida. Selain itu, hama tikus pun menjadi merajalela. Pergiliran tanaman merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di samping menanam varietas yang tahan serangan hama ini. Memang sebaiknya petani diberikan kebebasan untuk memilih tanaman pada MK. Menjadi keputusan bijak untuk tidak menanam padi tiga kali, sehingga petani dapat menyelangnya dengan sayuran atau palawija. Hal ini untuk memutus siklus hama/penyakit. Penggunaan pestisida untuk penanggulangan H/P memerlukan biaya yang tidak sedikit. Penanggulangan dengan menggunakan pestisida nabati, bahkan yang dicampur dengan urine sapi adalah cara yang dapat dilakukan. Sumber informasinya dapat dengan mudah dicari melalui petugas pertanian ataupun internet. Namun, petani merasa tidak cukup waktu untuk membuatnya karena dirasakan kurang praktis. Selain itu, penanaman juga hendaknya dilakukan dalam skala yang luas, bukan hanya spot-spot saja. Memang diperlukan kekompakan petani dalam penanaman, jika hanya dilakukan spot-spot saja sedangkan

disekitarnya tidak ada, maka akan menjadi serangan hama/penyakit, apalagi jika musimnya tidak tepat.

Produksi GKP juga sering kali tidak memuaskan petani akibat gabah hampa. Hal ini dapat disebabkan serangan hama seperti walang sangit, penggerek batang, dan serangan penyakit busuk pelepah karena serangan jamur *Rhizoctonia solani* dan penyakit patah leher akibat berkembangnya jamur *Pyricularia grisea*. Cara yang paling efisien bagi petani untuk menanggulangnya adalah penggunaan insektisida/fungisida, tetapi yang menjadi permasalahan adalah petani sering kali mencampur beberapa jenis bahan kimia tersebut bahkan sampai tiga jenis, tanpa mengetahui adanya kontradiksi antara beberapa jenis bahan sehingga bisa saja menjadi tidak berguna.

Pelaksanaan panen saat ini dapat dipercepat dengan adanya *combine harvester*, petani di sawah tadah hujan tertolong dengan kecepatan alat ini dibanding harus dengan menggunakan regu panen. Di lahan lebak dengan kondisi air di lebak tengahan dan dalam, tidak mungkin dilakukan panen dengan *combine harvester* yang saat ini masih menggunakan regu panen. Petani merasa tertolong dengan tidak adanya kendala pemasaran GKP karena para pedagang besar dengan pabrik-pabrik yang di sepanjang aliran anak Sungai Musi siap menampungnya. Di satu sisi, jatuhnya harga beras saat musim panen tiba mendorong petani lebih tertarik menjual GKP karena tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya penjemuran dan penggilingan. Seperti yang terjadi, saat harga GKP Rp5.000/kg ternyata harga beras hanya Rp 8.200/kg, hal tersebut tidak ada petani yang tertarik untuk mengolahnya menjadi beras. Namun, di sisi lain hal yang tidak diperhitungkan petani adalah nilai sekam dan dedak yang tidak menjadi milik petani, melainkan milik pedagang besar. Praktik penjualan langsung GKP ke pedagang besar ini menjadikan berkurangnya secara drastis aktivitas pabrik penggilingan beras di desa. Pabrik hanya menerima beras yang digiling untuk makan sehari-hari saja. Selain itu, kualitas beras yang dihasilkan oleh beberapa pabrik di dalam desa dengan mesin yang sudah tua tidak begitu baik dibanding dengan pabrik besar dengan mesin yang relatif modern dan lengkap. Belum lagi jika dilengkapi perhitungan biaya penjemuran oleh petani dan rendahnya

harga jual beras. Apalagi jika petani harus segera mengolah lahan sawahnya untuk ditanami ulang, sehingga lebih praktis bagi petani yang menjual GKP.

Dikaitkan dengan usaha tani padi, aktivitas pasca panen (hilirisasi) di tingkat petani saat ini sangat terbatas. Pengolahan gabah menjadi berbagai macam kualitas beras dilakukan di tingkat pabrik besar, begitu juga dengan pembuatan tepung beras. Di tingkat petani yang dapat dibuat adalah pengolahan sekam menjadi arang sekam dan pembuatan pelet makanan ikan dari dedak. Namun, saat ini yang tersisa di petani hanya gabah untuk beras konsumsi saja. Artinya, bahan bakunya minim sekali.

Seperti pada umumnya petani kecil, dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif rendah, diperlukan aktivitas penyuluhan untuk mendiseminasikan inovasi teknologi, bahkan memerlukan upaya pendampingan agar dilakukan dengan benar dan berlanjut. Di beberapa lokasi memang sudah pernah dilakukan sekolah lapang, baik sekolah lapang penanggulangan hama penyakit terpadu, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu padi. Namun, tentu sangat terbatas pada peserta dan pelaksanaannya. Mungkin juga informasi yang mereka terima tidak didiseminasikan ke petani lain.

Modal menjadi salah satu masalah yang pelik bagi petani untuk dapat menerapkan teknologi baru, karena teknologi baru umumnya diikuti persyaratan yang lebih berat. Hal ini juga berlaku di sektor pertanian seperti penggunaan varietas unggul dan perlakuan benihnya, persyaratan pengolahan tanah, pemupukan, dan ditambah lagi penyiangan serta penanggulangan H/P yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Konsekuensinya adalah adanya tambahan modal yang cukup besar dan modal merupakan salah satu masalah pokok yang belum terpecahkan oleh sebagian besar petani.

Dahulu di saat harga karet melambung tinggi, sedangkan petani menanam padi hanya satu kali dalam satu tahun, tidak sedikit sawah tadah hujan dialihfungsikan menjadi kebun karet. Padahal, lahan tersebut memang sengaja dicetak menjadi sawah. Hal yang tidak

dipertimbangkan oleh petani betapa biaya yang tidak kecil untuk mencetak sawah itu beralih ke penggunaan lain. Memang padi masih bisa juga ditanam di sela-selanya sampai dengan dua tahun per-tanaman karet, namun tentu hasilnya yang berbeda dibanding pada hamparan terbuka. Saat ini, ketika pertanaman di lahan sawah tadah hujan dapat ditanami tiga kali dalam satu tahun dengan berbagai pola tanamnya dan harga karet terpuruk, tidak sedikit juga petani yang menebang karetnya dan mengembalikan lahannya ke fungsi semula sebagai sawah tadah hujan.

G. Kegagalan Petani dalam Merespons Kebijakan dan Program Pertanian Berkelanjutan

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menghentikan penyebar-an wabah COVID-19 berakibat terganggunya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan dalam kondisi menjadi terbatas atau berhenti. Kondisi akses dan ketersediaan bahan pangan yang terganggu ini dapat menimbulkan gejolak, bukan saja di bidang kese-hatan, tetapi juga bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengembangkan program FE.

Sebagai suatu usaha pertanian skala luas, konsep pengembangan FE adalah: 1) peningkatan infrastruktur; 2) peningkatan produksi, produktivitas, dan indeks pertanaman; 3) diversifikasi produksi (multi-komoditas); 4) hilirisasi produk pertanian; 5) integrasi hulu-hilir; 6) teknologi modern dan sistem digitalisasi; dan 7) korporasi petani. (Kementerian Pertanian. 2020). Dalam Pengembangan FE tersebut dilakukan pendekatan: 1) pengembangan klaster; 2) integrasi sektor dan sub sektor; 3) pemberdayaan masyarakat; dan 4) lingkungan berkelanjutan.

Sebagai wujud dari program pertanian berkelanjutan, FE diarah-kan untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat, saat ini dan mendatang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dari kegiatan pertanian pangan. Dengan demikian kepastian produksi pangan berkelanjutan dalam jangka panjang menjadi pertim-

bangun utama. Program FE ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, seperti program intensifikasi pada kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan program ekstensifikasi pada kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH). Program ini pun diharapkan tetap berkelanjutan walaupun dengan penyempurnaannya ke depan. Melalui program SERASI, secara ringkas ada dua target yang akan dicapai, yaitu peningkatan indeks pertanaman (IP Padi 200–300%) dan pengembangan korporasi dengan pendekatan kawasan. Adapun melalui kegiatan OPLAH dilakukan upaya peningkatan IP padi dan produktivitas dengan kegiatan berupa perbaikan tanggul, saluran irigasi, pintu air, pompanisasi dan pembuatan/perbaikan jembatan.

Sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, jelas terjadi keterlibatan sektor seperti perbaikan pintu air, saluran irigasi, pembuatan/perbaikan jalan dan jembatan. Keterkaitan subsektor pada program FE terlihat dengan adanya multikomoditas yang diusahakan. Meskipun di suatu kawasan dengan basis komoditi misalnya padi, maka ada beberapa komoditas pendukungnya (hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

Satu Kawasan FE luasnya 10.000 ha, yang terdiri dari 2–5 klaster (1 klaster berkisar 2.000–5.000 ha). Secara berjenjang, di tingkat desa petani melakukan aktivitas budi daya sampai dengan panen/pascapanen dengan menerapkan inovasi teknologi secara berkelanjutan. Di tingkat klaster seharusnya sudah ada usaha bersama gapoktan dalam wujud Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang didalamnya mengintegrasikan UPJA, layanan saprodi, unit pemasaran dan RMU (jika padi). Selanjutnya, pada tingkat kawasan, maka korporasi (dalam bentuk PT) mengkoordinir usaha penyediaan saprodi, pengolahan hasil (diversifikasi), dan unit keuangan.

Gaung program ini didengar oleh ketua-ketua kelompok tani dan petugas yang ikut saat pertemuan, tetapi memang kurang tersosialisasi ke anggota kelompoknya. Seperti beberapa anggota yang merasa tidak mengerti apa bentuk kegiatannya dan mengatakan bahwa semuanya ditentukan dari atas, bahkan ada yang belum pernah mendengar tentang FE tersebut. Beraktivitas di sawah sudah

merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Peningkatan IP sudah terjadi berkat upaya yang dilakukan dan ketersediaan sarana prasarana di samping memang merupakan tuntutan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dari tahun ke tahun peningkatan produktivitas diupayakan melalui intensifikasi di lahan yang sudah ada dan sebagian lagi melakukan budidaya di lahan sawah bukaan baru.

Petani biasanya akan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan jika disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan keberpihakan pada petani. Menjangkau dan merealisasikan program baru adalah hal yang benar, tetapi untuk kelancarannya maka akar masalahnya harus diatasi dan diselesaikan dahulu. Membentuk korporasi untuk mengkonsolidasikan usaha tani perorangan tersebut sebagai upaya mengatasi sempitnya lahan adalah upaya yang mulia tetapi tidak gampang.

Beranjak dari fakta potensi lahan, air dan iklim, kondisi infrastruktur, kondisi eksisting bisnis di lokasi petani saat ini, kondisi sosial dan budayanya, bukanlah hal mudah untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan kawasan 10.000 ha tersebut, hanya di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya yang sudah terwujud karena adanya keseragaman agroekosistem setempat (tadah hujan). Meskipun baru sebagian yang menanam padi tiga kali dalam satu tahun, tetapi pada dasarnya menyelingi padi dengan pilihan tanaman hortikultura, jagung atau palawija lainnya adalah lebih baik, selain mengurangi serangan H/P padi, juga mewujudkan diversifikasi komoditas, karena di FE selain komoditas utama, dikenal juga komoditas pendukung.

Di wilayah lain terutama rawa lebak dalam akan sulit mewujudkannya karena kendala sumber daya alam terutama air (banjir), yang hanya dapat ditanami padi satu kali dalam satu tahun jika kemarau tiba. Sementara itu, di lebak pematang meskipun dapat ditanami padi dua kali dalam satu tahun akan membutuhkan pengairan (pompa) saat kemarau, begitu juga di lebak tengahan yang dapat ditanami padi dua kali dalam satu tahun. Surutnya air akan dimulai dari lebak pematang, berlanjut ke lebak tengahan dan akhirnya ke lebak dalam. Oleh karena itu, penanaman padi tidak mungkin bisa serentak di kawasan

lebak. Sangat besar kemungkinan pada satu kawasan seluas 10.000 ha tersebut didapati tiga tipologi lebak. Oleh karena itu, wujud kawasan lebak yang seragam sulit didapat. Inilah yang terjadi untuk wilayah Kecamatan Jejaw dan Pampangan. Sementara itu, pada FE harus ada keberlanjutan supaya ada aktifitas dan terjadi efisiensi penggunaan alsintan (tidak *idle*).

Di tingkat klaster sudah ada penggilingan beras yang dapat mengolah sampai beras medium, terdapat kios saprodi, dan pedagang pengumpul hasil. Beberapa petani memiliki alat pengolahan lahan seperti traktor roda dua, bahkan roda empat, dan alat panen *combine harvester*. Penggunaan alsintan ini memang berkembang, didukung dengan ketersediaan bengkel, meskipun bukan bengkel khusus alsintan, bahkan dapat memanggil teknisi jika ada kerusakan alat. Dengan kewenangan dan keleluasaannya sendiri dalam mengelola asetnya dan dapat menikmati hasil dari jerih payahnya, tentu juga melibatkan orang lain untuk bekerja sebagai operator, akan tidak mudah bagi petani menginvestasikan alatnya, mengintegrasikan dalam suatu BUMP kecuali jika ada keuntungan yang lebih besar.

Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan berakibat banyak bidang pelayanan tidak dapat ditangani pemerintah secara maksimal, sehingga sektor swasta/privat ikut dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Di sektor pertanian, salah satunya melalui upaya pembentukan korporasi petani di program FE padi ini. Korporasi petani dibuat oleh petani dari petani dan untuk petani. Sehingga, modalnya sebagian besar (>50% adalah milik petani). Mereka keberatan jika harus mengalokasikan simpanan dari kelompok atau gapoktan untuk pendanaan korporasi karena simpanan masing-masing kelompok/gapoktan berbeda-beda, kecuali jika ditentukan nilai simpanan tiap ha sama, jadi simpanan petani tergantung dari besar kecil lahan saja. Menjadi permasalahan selanjutnya tentang bagaimana kemampuan petani dengan pemilikan lahan yang hanya 0,25–0,5 ha tersebut. Untuk modal usaha saja mereka harus meminjam, ditambah lagi untuk biaya hidup sehari-hari. Untuk

mewujudkan dana dari petani yang > 50% saja sulit dilakukan petani dengan kepemilikan lahan yang sempit itu. Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya selain menghimpun dana dari masing-masing petani berdasarkan luas lahannya adalah suntikan dana dari pemerintah agar tersedia dana yang > 50% dan sisanya dipenuhi oleh investor swasta/privat.

Aktivitas pemasaran GKP tidaklah mengalami kesulitan saat ini, karena *off taker* seperti pedagang besar dengan pabrik besar lengkap dengan peralatan modern tersedia. Aktivitas diversifikasi produk bisa dilakukan oleh perusahaan swasta perorangan tersebut yang keberadaannya di luar kawasan FE. Tentu ini bukanlah konsep FE. Pada konsep FE, perusahaan korporasi adalah milik bersama petani (bisa perpaduan dari beberapa gapoktan), dan berada di kawasan FE dengan aktivitas melakukan usaha saprodi/alsintan, diversifikasi produk olahan, serta dilengkapi dengan layanan unit keuangan.

H. Produk, Mata Rantai dan Pengelolaan Pasca Panen: Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Hasil utama dari padi yang paling dihargai adalah gabah yang diolah menjadi beras, dengan hasil samping tanaman padi seperti jerami, sekam, dedak, dan ikutan lain seperti bekatul dan menir. Jerami padi biasanya dikembalikan ke lahan sebagai pelengkap bahan organik tanah dan juga dijadikan pakan ternak sapi bagi yang memilikinya. Baik dalam bentuk segar, layu, atau sudah difermentasi. Sekam dapat digunakan untuk bahan pencampur media tanam setelah terlebih dahulu diarangkan. Beberapa penggilingan yang memiliki mesin pengering, juga memanfaatkan sekam untuk bahan bakarnya, arang sekamnya dikembalikan ke lahan sebagai bahan pembenah tanah yang dapat meningkatkan pH tanah. Penjual tanaman hias mencampurnya tanpa diarangkan untuk media tanam. Dedak dijual untuk makanan unggas, ternak kecil, dan besar. Sedangkan, bekatul dan menir diuangkan oleh pabrik besar karena dapat diproses lagi untuk dijadikan bahan makanan yang bergizi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penjemuran gabah (Gambar 9.15) dan penggilingan beras (Gambar 9.16) di desa umumnya menghasilkan beras asalan, meskipun ada beberapa yang mampu menghasilkan beras kualitas medium karena mereka dapat menyetel mesin pemoles untuk mendapatkan beras medium. Dari mesin pemecah akan keluar beras pecah kulit yang selanjutnya dimasukkan ke mesin pemoles untuk menghasilkan beras dan hasil samping dedak. Untuk mendistribusikan beras kualitas medium ini mereka juga melakukan *packing* sendiri agar terasa nilai tambahnya. Melalui proses ini maka sekam dan dedak masih tinggal sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga desa.

Beras asalan lebih suka dibeli pabrik beras besar dari penggilingan di desa dengan harga yang dibuat tidak begitu beda selisihnya dengan beras medium yang belum dikemas. Ini dilakukan agar penggilingan di desa lebih tertarik menjual beras asalan dan mereka juga tidak perlu memproses lebih lanjut mengeringkannya, menyetel alat. Oleh pedagang beras besar di pabriknya, maka beras asalan tersebut dipro-



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.15 Penjemuran Gabah untuk Konsumsi di Agroekosistem Lebak



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.16 Penggilingan dengan Hasil Beras Medium di Kec. Lempuing Jaya

ses lagi. Beras asalan sendiri dengan klasifikasi dari yang terburuk adalah beras batik, sinar, dan beras putih masing-masing jenis tersebut ada juga beras utuh dan pecahnya. Beras asalan ini dimasukkan ke mesin pemoles menjadi beras putih dan produk sampingannya adalah bekatul dan menir.

Pedagang besar/pabrik besar beras, bahkan lebih senang lagi membeli GKP dari sawah karena dengan fasilitas yang dimiliki mereka yang berada di aliran anak Sungai Musi tersebut dapat mengeringkan kembali dengan menjemur atau menggunakan *bed dryer/vertical dryer*. Selain tentunya mereka juga memiliki mesin pemoles (*polisher*). Beras putih diayak (*grading*) untuk memisahkan beras kepala dan pecah, bahkan ada juga mesin pemisah warna (*color shortage*) berupa pendeteksi warna oleh sensor sehingga beras yang sudah dipoles dan berwarna mendekati seragam yaitu putih bening tadi dapat terpisah dari butiran warna lain. Cara yang dilakukan ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

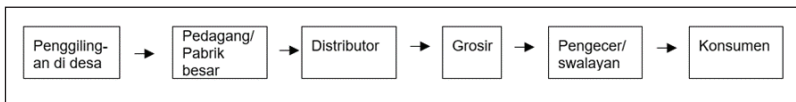
dapat menghasilkan beras dengan beberapa kualitas dari medium sampai dengan premium. Beras dikemas dengan pilihan berbagai karung plastik dengan berbagai macam merk yang dilengkapi dengan keterangan derajat sosoh, kadar air, dan butir patahnya. Pabrik/pedagang beras besar inipun mendapat sekam, dedak, bekatul, dan menir sebagai hasil ikutan dari pembelian GKP petani.

Meskipun dalam jumlah kecil karena GKP sebagian besar sudah diambil oleh pedagang besar/pabrik, namun saat musim panen masih terjadi distribusi beras dari penggilingan di desa ke konsumen akhir dengan rantai terpendek adalah dari penggilingan di desa. Beras medium tersebut dibawa oleh distributor untuk dipasarkan ke konsumen yang ada di wilayah kecamatan/desa lain, terutama ke para pekebun yang tidak memiliki sawah (Gambar 9.17).



Gambar 9.17 Rantai Terpendek Distribusi Beras

Adapun yang merupakan pemasaran terpanjang (Gambar 9.18) adalah dari penggilingan di desa, beras asalan dibeli oleh pedagang atau pabrik besar dari Palembang untuk diolah kembali menjadi beras medium atau premium, kemudian dibawa distributor untuk dijual ke grosir, selanjutnya dari grosir ke pengecer/swalayan sebelum dibeli konsumen.



Gambar 9.18 Rantai Terpanjang Distribusi Beras

Beras-beras hasil penggilingan di wilayah Lempuing dan Lempuing Jaya ada juga yang dipasarkan ke luar provinsi yaitu ke Provinsi Lampung, karena kedekatan wilayahnya. Inovasi teknologi untuk mengolah jerami menjadi pakan ternak, membuat arang sekam, dan membuat pakan ikan dari dedak, informasi cara pembuatannya juga tersedia, demikian juga alsintan untuk pembuatannya. Namun, aktivitas yang terjadi di tingkat petani pada umumnya sekam digunakan untuk membakar batu bata, dedak digunakan untuk pakan ternak baik ternak besar maupun unggas. Ada beberapa petani yang sudah membuat fermentasi pakan ternak menggunakan dedak, rumput alam, dan jerami.

Untuk menghasilkan beras berkualitas dengan pengisian bulir penuh, pemasakan maksimal, kadar air memenuhi standar, mengkilap, dan bersih maka perbaikan manajemen produksi harus dimulai dari tingkat petani. Penggunaan benih yang baik dengan aspek budidaya yang benar, tentu harus didukung dengan ketersediaan input. Dilanjutkan dengan fasilitas penggilingan yang mampu untuk memprosesnya sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk melakukan budidaya yang benar di tingkat *on farm*, jelas petani sebagai orang yang sudah turun temurun membudidayakannya dapat melakukannya dengan baik, asalkan fasilitas seperti infrastruktur pengairan diperbaiki dan ketersediaan input terpenuhi. Apalagi didukung dengan kemudahan memperoleh inovasi teknologinya, baik melalui pertemuan dalam kelompok tani, petugas, dan lembaga pertanian. Namun, yang dirasakan menjadi kelemahan dan keterbatasan yang melekat pada petani adalah kepemilikan lahan yang sempit, menyebabkan penggunaan input produksi itu menjadi tidak efisien. Adanya tuntutan IP padi 300 juga sulit memutus siklus H/P meskipun didukung dengan ketersediaan pestisida. Selain cara tersebut tidak sesuai dengan konsep pengendalian H/P terpadu yang menganjurkan upaya pergiliran tanaman.

Peningkatan menjadi IP padi 200 tidaklah terjadi serentak, di wilayah Lempuing/Lempuing Jaya mulai terjadi di tahun 2010. Pada 3 tahun belakangan ini diperkirakan 85% petani sudah menerapkan

pola IP 300, di antaranya 65% justru menerapkan IP padi 300 dan sisa 20% menanam tanaman hortikultura atau palawija setelah padi untuk menjadi IP 300. Fenomena yang terjadi sejak dahulu sampai sekarang, di saat tibanya musim panen maka harga beras jatuh. Dahulu, mau tidak mau petani menjual beras karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membayar hutang. Gabah hasil penjemuran yang disimpan hanya untuk beras konsumsi saja.

Sejak tahun 2015 mulai marak penjualan GKP ke pedagang/pabrik beras besar melalui orang-orangnya yang datang sampai ke sawah untuk mengangkut gabah. Hal ini disambut baik petani karena dalam hitungan mereka ternyata menjual GKP lebih menguntungkan dibanding menjual beras. Pemasaran GKP inipun tanpa kendala, meskipun mereka menyadari bahwa dengan menjual GKP maka sekam dan dedak menjadi bagian keuntungan pedagang/pabrik besar. Namun, disisi lain jika mereka menggilingkannya menjadi beras, harganya tidak menarik bagi petani dan harus mengeluarkan biaya lagi untuk proses penjemurannya. Penjemuran (lihat Gambar 14) ini tentu memakan waktu, sementara mereka harus segera melakukan persiapan lahan untuk penanaman berikutnya.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Tanah Leluhur

Pak Sutoyo adalah sekretaris Kelompok Tani Cipta Makmur, anak ketujuh dari delapan bersaudara ini berusia 38 tahun. Beliau lahir di Belitang, OKU Timur dan berpendidikan SMP. Kedua orang tuanya berasal dari Pulau Jawa. Bapakny dari Pati dan ibunya asal Kebumen yang bertransmigrasi ke OKU (Belitang) pada tahun 1965. Istri Pak Sutoyo bernama Nur Aisyah, juga dari etnis Jawa, yang sudah lahir di Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing pada tahun 1992. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini masih duduk dibangku sekolah dasar. Di Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing ini, mereka tinggal di rumah berukuran relatif besar, berukuran 7 x 18 m yang permanen untuk tiga penghuninya, bahkan rumah ini sudah berlantai

granit. Ternyata, Pak Sutoyo mulai serius menggeluti bidang pertanian sejak berkeluarga 10 tahun lalu. Menjadi petani terutama petani padi adalah pilihannya karena lingkungan tempat tinggalnya yang sesuai.

Bersama-sama dengan istrinya, berdua mereka mengelola lahan sawah yang luasnya satu ha dan dapat ditanami dua kali dalam satu tahun. Sawah tersebut terakhir ditanami padi varietas Ciliwung, yang memberikan hasil panen GKP sebanyak 6 ton/ha. Selain ditanami padi, lahan sawah tersebut juga ditanami dengan cabai dan sayuran di pematangannya, meskipun hanya dikonsumsi sendiri. Mereka juga memelihara sapi tiga ekor, ayam 15 ekor, dan itik empat ekor. Ternak yang diusahakan ini merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual. Namun, diakui dari apa yang diusahakan tersebut hasil dari padi tetaplah lebih besar. Selain itu, jika hanya menggantungkan hidup di sektor pertanian saja, maka apa yang diperoleh tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Oleh karena itu, dia juga memiliki pekerjaan serabutan lainnya, seperti menjadi buruh tani, operator traktor roda dua dan roda empat, serta *ngomben* (istilah untuk operator *combine harvester*). Bahkan di saat akan dimintai keterangannya, ternyata Pak Sutoyo baru saja pulang dari aktivitasnya sebagai buruh bangunan. Di rumahnya selain tersimpan kendaraan bermotor roda dua, juga traktor tangan satu unit. Dia mengungkapkan bahwa jika tidak memiliki pekerjaan serabutan lainnya itu, maka tidak akan bisa juga pendapatan dari sawah menutupi kebutuhan hidup keluarganya.

Meskipun mereka tinggal di perdesaan, Bu Nur Aisyah ternyata tidak turut aktif terjun ke sawah. “Sebenarnya saya ingin juga membantu ke sawah,” ungkapnya. Namun, suaminya meminta agar ia fokus saja mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain kebutuhan keluarga. Bahkan suaminya juga kerap membantu Nur menyelesaikan pekerjaan rumah tangga jika ada beberapa yang belum kelar saat dia tiba di rumah.

Pak Rusman Nadi, seorang petani padi di Desa Tugu Mulyo, Lempuing. Pria yang lahir di Belitang OKU Timur ini, kini berusia 35 tahun. Anak ketiga dari empat bersaudara ini berhasil menyelesaikan

pendidikan sarjana pertaniannya di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang tahun 2016 yang lalu. Kedua orang tuanya berasal dari Pulau Jawa, ayahnya dari Malang dan ibunya asal Yogyakarta yang ikut bertransmigrasi bersama orang tua mereka masing-masing ke OKU pada tahun 1965. Istri Pak Rusman saat ini berusia 33 tahun, lahir di Tugu Mulyo, Lempuing. Orang tuanya juga berasal dari Jawa. Sebagai ibu rumah tangga, dia senantiasa mendukung usaha suaminya bekerja di bidang pertanian. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki yang besar sudah duduk di kelas dua madrasah tsanawiyah (SMP), sedangkan anak keduanya belum bersekolah. Sejak berkeluarga pada tahun 2009, dia sudah terjun ke sawah. Salah satu alasannya adalah karena ia merasa memiliki kemampuan di bidang pertanian, sekaligus juga melanjutkan usaha orang tuanya. Selain menjadi anggota kelompok tani, dia juga merupakan tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang wilayah binaannya di Tugu Mulyo, Lempuing. Sebelumnya dia juga pernah berjualan pestisida dan juga jualan sayur di pasar.

Selain memiliki sawah 1 ha, mereka juga memiliki lahan sawah 0,5 ha di Kabupaten Banyuasin yang disewa orang, kebun karet di OKU Timur seluas 1,5 ha. Bahkan ada juga lahan milik mereka yang belum dibuka seluas 0,75 ha di pinggiran kawasan hutan. Keluarga Pak Rusman pun memiliki dua ekor sapi, 30 ekor ayam, dan lima ekor itik. Aktivitas memelihara ternak ini merupakan kegiatan yang menyenangkannya.

Di rumahnya yang permanen berukuran 7 x 23 m tersebut dia memiliki kendaraan dua unit kendaraan roda dua dan 1 unit traktor tangan. Seperti yang diungkapkannya, dari 1 ha lahan sawah tersebut dengan ditanami padi MR 219 hanya menghasilkan GKP 6,5 t/ha. Padahal potensi hasilnya dapat mencapai 13 t/ha dengan rata-rata produktivitas 9 t/ha. Senjang hasil ini disebabkan adanya serangan sundep.

Bu Sulastri menambahkan bahwa kiprah suaminya bidang pertanian ini tergolong luar biasa, karena sebagai seorang petani dia pernah mengajak petani lain untuk bertanam dua kali dalam satu

tahun. Walaupun tidak mudah, dia nekat tetap menanamnya meski dengan risiko yang sudah diyakini akan habis terserang tikus karena dia berani tampil sendiri yang ditanam pada tahun 2009 waktu itu. Sengaja bertanam dengan sistem hambur benih saja agar tidak keluar biaya terlalu besar. Kenyataan kegagalan itu memang terjadi. Namun, dia tidak berputus asa dan tetap berupaya mengajak petani lain pada tahun-tahun berikutnya untuk bertanam padi dua kali satu tahun agar hidup layak. Saat ini semua petani di wilayahnya semua sudah bertanam padi dua kali dalam satu tahun dan banyak juga yang menerapkan sistem tanam legowo, ungkap Bu Sulastri.

Dari Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya, ada juga cerita menarik dari Pak Amrin yang saat ini berusia 55 tahun, dia bukan lahir di Lempuing Jaya, melainkan lahir di Desa Sumber Harjo Belitang, yang sekarang sudah menjadi Kabupaten OKU Timur. Anak ketiga dari empat bersaudara ini pendidikan terakhirnya SMA. Orang tuanya adalah transmigran dari Jawa Tengah ke Belitang pada tahun 1957. Bapaknya asli Cilacap, sedangkan ibunya Keroya, Jawa Tengah. Istri Pak Amrin bernama Bu Amintri, juga lahir di Desa Sumber Harjo Belitang. Hanya beda RT saja rumah mereka. Saat ini Bu Amintri berusia 42 tahun. Mereka berumah tangga pada tahun 1989 lalu, dan memiliki satu orang anak laki-laki sebagai anak pertamanya dan yang kedua adalah perempuan. Anak laki-lakinya lahir pada tahun 1990 dan sudah berkeluarga. Dari anak laki-laki ini, dia sudah dikaruniai seorang cucu laki-laki. Anak perempuannya masih bersekolah di madrasah aliyah (SMA). Anaknya yang berkeluarga itu sudah tinggal di rumah sendiri, yang dulu dibangun Pak Amrin di samping rumahnya.

Sejak menikah tahun 1989, Pak Amrin sudah jadi petani. Namun, saat itu dia masih menyewa lahan saja dan merangkap menjadi buruh tani. Pada tahun 1993 keluarga ini pindah dari Desa Sumber Harjo Belitang OKU Timur ke Desa Lubuk Makmur Lempuing OKI. Pada tahun 2000 mereka baru memiliki lahan pribadi seluas 0,5 ha yang saat itu dibeli dengan harga Rp 2,5 juta, namun waktu itu masih belum dicetak menjadi sawah. Lahan itulah yang dipertahankan untuk ditanami sampai saat ini.

Saat ini, sehari-hari dia juga sebagai ketua Kelompok Tani Makmur Sentosa dan sekretaris Gapoktan Mukti Makmur. Dahulu bahkan pernah menjadi kepala urusan umum di kantor desa, sekarang tidak lagi dan sudah diganti dengan tenaga muda yang lebih gesit ungkapinya. Ternyata Pak Amrin pun adalah mitra BPS, yang pada tahun 2010 ikut mencacah pada sensus penduduk, tahun 2013 dalam sensus pertanian, tahun 2016 ikut juga mencacah di sensus ekonomi. Tidak heran jika anak pertamanya juga mengikuti jejaknya menjadi mitra BPS sebagai petugas pencacah lapangan (PPL) pada ST2023 ini. Jika dahulu banyak aktivitasnya di pemerintahan, tetapi saat ini murni dia menyibukkan dirinya sebagai petani dan mengurus petani dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Di lahan sawah, dia juga mengusahakan kacang hijau, yang ditanamnya di tepi siring air hanya untuk konsumsi keluarga saja. Selain itu, dia juga memiliki lima ekor sapi, 15 ekor ayam, delapan ekor mentok, dan sembilan ekor bebek. Namun, diakuinya dalam hitungan satu tahun tetap saja penghasilan dari padi lebih besar dibanding sumber lainnya. Di rumahnya yang berukuran 6 x 10 m yang dibangunnya permanen itu dia juga memiliki 1 unit kendaraan roda dua. “Sebagai seorang istri, saya mendukung suami dengan turut aktif ke sawah, bahkan di pekarangan rumahpun kami tetap bercocok tanam,” ungkap Bu Amintri.

Agar menjadi perhatian pemerintah, Pak Amrin berkisah bahwa dahulu pernah terjadi gagal panen akibat banjir di areal persawahan Desa Lubuk Makmur ini. Tanggul yang ada jebol dan Sungai Lempuing meluap. Sampai saat ini tanggul tersebut belum diperbaiki. Tidak heran jika lahan sawah di desa ini sering mengalami kebanjiran. Memang diperlukan dana yang tidak kecil, “bahkan akan mencapai milyaran untuk memperbaikinya,” ungkapinya. Dia sudah menyampaikan hal ini kepada aparat di kecamatan bahkan kabupaten pada saat pertemuan-pertemuan. Akibat gagal panen waktu itu karena banjir Pak Amrin terpaksa harus menjual dua ekor sapi untuk menyambung hidup keluarganya.

Dari Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya ada seorang petani yang visioner. Dia bernama Ruwiyo, berusia 46 tahun. Asalnya dari Kebumen Jawa Tengah. Saat berumur empat tahun, dia dibawa orang tuanya ke Belitang, OKU Timur. Anak kedua dari lima bersaudara ini mengaku hanya tamat SMP, walaupun kemudian dia juga ikut ujian persamaan paket C sehingga memiliki ijazah SMA. Istrinya juga dari etnis Jawa, bernama Siti Rohima yang lahir di Belitang 38 tahun lalu. Mereka berkeluarga pada tahun 2001. Saat ini, mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Anak pertama kuliah di Kota Kediri, Jawa Timur dan yang kedua masih duduk di kelas 5 SD. Saat ini, ayahnya tinggal bersama mereka.

Pengalamannya sebagai petani dimulai sejak menikah. Alasannya ingin jadi petani karena paling tenang jadi petani itu, yang penting punya lahan sawah saja, tetapi paling tidak harus 2 ha. Artinya, Pak Ruwiyo sudah memiliki hitung-hitungan bahwa jika hanya memiliki sawah, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, minimal harus memiliki 2 ha lahan sawah. Saat ini, statusnya masih juga sebagai ketua Gapoktan Sumber Rejeki, walaupun dia sudah mengingini untuk diganti karena kesibukannya dalam memperluas usahanya di lokasi lain. Bahkan dia juga pernah menjadi Kepala Dusun 2.

Dulu mereka pernah memiliki kebun karet seluas 2,25 ha, tetapi kebun tersebut sudah dijualnya. Menurut pengakuan Bu Siti, kebun tersebut dijual karena merasa sering dibohongi oleh tukang sadapnya. Di dalam desa ini dia memiliki sawah seluas 2,5 ha yang sejak tahun 2013 ditanami dengan pola padi-cabai-padi. Hasil dari cabai sangat memuaskannya, sehingga pola itu terus dia pertahankan. Selain mengusahakan padi di Desa Sungai Belida seluas 2,5 ha, di luar desa yaitu Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten OKI dia memiliki sawah seluas 10 ha yang ditanami padi dua kali dalam satu tahun. Walaupun tidak banyak, dia juga memelihara 10 ekor ayam dan 11 ekor bebek, tambah Bu Siti.

Pak Ruwiyo memiliki pabrik beras dengan mesin lama Agrindo *double pass*. Penggilingannya juga dilengkapi dengan mesin pemoles

(*polisher*), *color shortage*, dan mesin jahit karung. Tidak heran jika dia mampu menjual beras medium. Kelompoknya juga mendapat bantuan mesin *vertical dryer* tahun 2013 dari pemerintah yang berkapasitas 4 t GKP dikeringkan selama 12 jam. Juga *bed dryer* berbahan bakar kayu dengan kapasitas GKP 10 t dengan waktu pengeringan 24 jam.

Di rumahnya yang berukuran 12 x 6 m, dia memiliki dua unit kendaraan roda dua, dan satu unit mobil L 300. Pak Ruwiyo juga memiliki traktor roda empat (merk *John Deere*). Dari lahan sawahnya di Desa Sungai Belida tersebut hasil padi Inpari 23 yang ditanam pada MH menghasilkan GKP 8 t/ha, sementara pada MK 6 t/ha.

Menariknya, sejak tahun 2015 lalu dia bersama kelompoknya yang berjumlah 100 KK yang berasal dari Sungai Belida dan Belitang (OKU Timur) membuka lahan seluas 800 ha untuk pertanaman padi yang merupakan hamparan mencakup dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten OKI dan Ogan Ilir (OI). Lokasinya di Desa Juk Dadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, OKI, kemudian Desa Kertabayang dan Sukananti, Kecamatan Rantau Alai, OI. Diinformasikan oleh pak Ruwiyo bahwa saat ini kawasan seluas 800 ha tersebut sudah ditanam padi dengan IP 200.

Pak Ruwiyo juga pernah mengelola penangkaran benih padi, tetapi tidak berlanjut karena pembayarannya macet, bahkan macetnya sampai satu tahun. Oleh karena itu, dia menjalankan usaha pabrik beras saja. Saat ini, di musim panen, pabriknya masih mengolah GKP 10 t/hari paling tidak selama 1,5 bulan. Sementara itu di luar musim panen, dalam satu minggu masih dapat diolah GKP 10 t. Beras dijual ke pedagang di Palembang dan juga BULOG. Pabrik beras yang dikelolanya ini dipercaya mengisi gudang BULOG sebanyak 900 t beras pada tahun 2020 dan tahun 2023 ini hanya 300 ton beras saja.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia dapat merasakan kesulitan yang dirasakan petani lainnya terutama dalam mengelola keuangan. “Keluhan kami sebagai petani cukup banyak Pak” kata Bu Siti Rohima. “Di antaranya untuk mengolah lahan kami memerlukan bahan bakar, tetapi kami tidak boleh membelinya menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal kendaraan

truk banyak yang mengantre untuk mendapatkannya, sehingga kami harus membeli dengan harga yang lebih mahal di pengecer-pengecer” sambungnya. Anehnya pengecer tersebut membelinya di SPBU ada juga menggunakan jeriken. Harusnya orang-orang seperti Siti inilah yang dibantu dalam membuka lahan sawah, karena apa yang mereka wujudkan adalah wilayah-wilayah baru sebagai lumbung pangan.

Ketika disinggung mengenai mekanisme penjualan, yang saat ini cenderung dimonopoli pihak tertentu (monopsoni) dengan membeli GKP, di mana bukan hanya beras yang diperolehnya melainkan juga sekam dan dedak, Pak Ruwiyo pun menanggapi, “Kalau tidak ada *B....g*, justru petani itu akan mengalami kesulitan dalam menjual padinya. Itu pendapat saya pribadi pak.” Jawaban tersebut memang beralasan karena petani perlu segera mengolah lahannya untuk tanam kembali, belum lagi dia harus menjemur jika akan menjual dalam bentuk beras. Dalam hitungan petani, mereka akan mengalami kerugian menjual beras karena harganya yang rendah terutama saat panen, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk penjemuran dan penggilingan. Sementara itu, jika menyimpan beras dan menunggu harga beras tinggi, sulit dilakukan karena hutang harus segera dilunasi dan kebutuhan hidup harus dipenuhi, jelas Pak Ruwiyo. Dia menambahkan bahwa sebaiknya subsidi pupuk itu diganti saja dengan subsidi harga jual karena jatah subsidi pupuk maksimal hanya untuk 2 ha lahan, faktanya banyak petani yang memiliki sawah lebih dari 2 ha. Jadi, dengan subsidi harga jual gabah maka petani merasa adil, efeknya juga petani akan berupaya meningkatkan produksi sawahnya. Sebagai seorang istri, Siti senantiasa mendukung aktivitas suami. Ia senantiasa turut menanam padi dan merumput. Namun, yang ia rasakan semakin lama semakin sedikit saja kaum wanita yang turun ke sawah. Saat ini umumnya hanya yang berusia 40–60 tahun saja, dan bisa jadi di masa yang akan datang semakin berkurang minat wanita untuk turun ke sawah karena dianggap kegiatan yang kasar.

Pak Muhammad adalah seseorang yang dengan banyak profesi dari Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi. Sulung dari tujuh bersaudara ini berusia 57 tahun, adalah Sarjana Pendidikan dari Universitas

Sjakhyakirti Palembang, yang tamat pada tahun 2016. Orang tuanya juga berasal dari Tanjung Aur, begitu juga dengan Ningimah istrinya yang saat ini berusia 54 tahun. Mereka asli Sumatra Selatan dari etnis Melayu. Memiliki tiga orang anak laki-laki dan tiga perempuan. Dua orang anak laki-lakinya sudah berumah tangga. Yang pertama tinggal di desa tetangga yaitu Desa Pulau Karang, Kecamatan Rambutan. Meskipun tidak begitu jauh lokasinya, kecamatan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Anak yang kedua, rumahnya di belakang rumah Pak Muhammad, yang dibangun oleh Pak Muhammad. Kedua anaknya yang sudah berumah tangga ini memiliki warung, tetapi dia terkadang juga masih mendukung biaya untuk anak-anaknya. “Maklumlah mereka masih baru bergerak, sehingga masih perlu dibantu,” kata Pak Muhammad. “Mereka juga adalah aset kita yang akan merawat kita kelak,” timpal istrinya.

Pengalamannya sebagai petani padi baru dimulai sejak tahun 2014 karena sesungguhnya pencetakan sawah baru dimulai di desa ini pada tahun 2012 seluas 100 ha. Kalaupun sebelumnya para petani sudah ada yang bertanam padi, penanaman padi itu adalah padi ladang yang ditanam pada pembukaan lahan kebun karet. Artinya, ditanam sebelum penanaman karet atau di antara karet yang masih memungkinkan ditanami padi.

Alasannya menjadi petani padi, selain karena faktor lingkungan alamnya juga untuk menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa seorang guru seperti dia juga masih bisa jadi petani. Kecintaannya terhadap profesi petani ditunjukkan juga dengan menjadi ketua kelompok tani Sinar Desa dan ketua Gapoktan Tani Mandiri. Dia juga pernah merangkap sebagai ketua Badan Pengawas Desa (BPD) 3 periode dan pernah juga menjadi ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di desanya saat pemilu. Guru dengan golongan III/b ini mengajar di SD Negeri 1 Tanjung Aur, juga berprofesi sebagai pengepul ikan dan menyewa satu lokasi tangkapan ikan seluas 200 ha.

Selain sebagai ibu rumah tangga, Bu Ningimah juga aktif di bidang pertanian. Mereka memiliki 20 ekor ternak sapi, mereka sebut

sapi lokal yang dipelihara dalam kandang ukuran 5 x 8 m, walaupun terkadang dilepas, untkannya. Diakuinya, dari semua sumber pendapatan itu, tanaman padi yang luasnya 18 ha adalah sumber yang terbesar, namun hasil di sawah lebak tersebut yang ditanami padi Inpari 32 hanya menghasilkan GKP 3 t/ha.

Usahanya di bidang perikanan sebagai pengepul ikan, biasanya ramai mendapat ikan pada bulan Desember–Juni. Pada bulan tersebut, dalam satu hari minimal lima orang menyeter ikan dan bisa juga mencapai 15 orang, mulai subuh hingga sore hari. Ikan yang diperoleh adalah ikan sungai seperti gabus, sepat, dan lele. Sementara itu, di luar musim (Juli–November) tetap juga ada yang menyeter ikannya, dalam satu minggu berkisar 1–2 orang saja. Tiap kali menjual ke Pak Muhammad, setiap orang pada musim ikan biasanya rata-rata menjual 5 kg/orang/hari. Jika di luar musim, hanya mereka yang punya stok simpanan saja yang menjual, karena menjualnya paling-paling satu kali dalam satu minggu mereka dapat menjual 50–100 kg/orang. Simpanan ikan tersebut diperoleh dari lebung yang ada di lebak dalam.

Seperti warga pada umumnya, rumah keluarga ini juga berupa rumah panggung berukuran 5 x 8 m dan di bagian bawahnya juga menjadi ruangan yang dapat ditempati. Dengan penghuni rumah yang relatif banyak, dia memiliki lima unit kendaraan roda dua, kendaraan roda empat sebanyak tiga unit (dua mobil *pick up* dan satu *minibus*). Selain itu, dia juga mendapat titipan dari kelompoknya untuk menyimpan traktor besar roda empat, yang merupakan bantuan pemerintah.

Pada tahun 2022 lalu ada hal yang menyakitkan baginya, di mana dia juga menjadi kontraktor yang mengadakan tenaga kerja di PT. Sinar Mas (lokasi Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, OKI). Tenaga kerja yang dikelolanya untuk penanaman dan perawatan tanaman akasia minggat dari lokasi kerjanya, sehingga Pak Muhammad menderita kerugian mencapai Rp110 juta. “*Yah* apa boleh buat, itu risiko berusaha. Saya bersyukur masih memiliki sumber penghasilan lain,” tambahnya.

J. Penutup: Kilas Balik Membaca Pertanian Food Estate (FE)

Sensus Pertanian 2023, dilakukan sebagai upaya mendapatkan data dan informasi pertanian sebenar-benarnya yang bermanfaat untuk perencanaan di bidang pertanian. Sensus Pertanian 2023 juga dilakukan di lokasi FE padi di Kabupaten OKI. Disadari pencacahan yang dilakukan terhadap pelaku usaha pertanian perorangan ini penuh dengan dinamika, seperti pemahaman yang berbeda dari petani terhadap makna sensus yang diselingi juga dengan adanya antipati dari beberapa petani. Kurang lancarnya pencacahan pada saat baru memulai di tahap awal, terutama pada pencacah sebagai pendatang baru pada pelaksana sensus, akhirnya menjadi lancar setelah mewawancarai beberapa petani.

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dengan pengawasan berjenjang tentu semakin memberikan jaminan terhadap kebenaran output yang diperoleh. Dengan mempelajari secara mendalam salah satu program pemerintah yaitu FE padi yang juga menjadi lokasi pelaksanaan ST2023, memberikan gambaran, betapa perencanaan suatu program tidak dipahami oleh sebagian besar petani yang turut menjadi bagian dari FE padi tersebut. Pelibatan yang terbatas pada ketua-ketua kelompok yang merupakan keterwakilan petani dapat dipahami untuk lebih efisien dan terfokusnya pembahasan suatu program. Namun, diseminasi kegiatan ke anggota lain ternyata tidak berlangsung lancar, terbukti adanya petani yang merasa belum pernah mendengar istilah FE tersebut, apalagi untuk memahaminya, walaupun program ini juga merupakan keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran betapa pentingnya partisipasi semua lapisan petani dan pihak lain yang terkait pelaksanaannya agar program berjalan dengan lancar. Pembelajaran mendalam yang diperoleh dari petani terkait FE padi sebagai peserta Sensus Pertanian 2023 juga sebagai evaluasi terhadap perlunya studi yang mendalam di mana suatu program dapat terlaksana dengan baik tentu dengan mengevaluasi sumberdaya alam, sosial ekonomi petani, dan kelembagaan pendukungnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sensus Pertanian 2023. Pencacahan lengkap, pedoman petugas lapang, 2A2*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2023). *Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka 2023*. BPS Kabupaten OKI.
- Badan Pusat Statistik Sumsel. (2022). *Sumatera Selatan dalam angka 2022*. BPS Sumsel.
- Guillem, E. E., Barnes, A. P., Rounsevell, M. D. A., & Renwick, A. (2012). Refining perception-based farmer typologies with the analysis of past census data. *Journal of Environmental Management*, *110*, 226–235. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.06.020>
- Kementerian Pertanian RI. (2019). *Grand design pengembangan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan pertanian untuk kesejahteraan petani*.
- Kementerian Pertanian RI. (2020). *Grand design pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Mottaleb, K. A., Krupnik, T. J., & Erenstein, O. (2016). Factors associated with small-scale agricultural machinery adoption in Bangladesh: Census findings. *Journal of Rural Studies*, *46*, 155–168. <https://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.012>
- Ricciardi, V., Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Jarvis, L., & Chookolingo, B. (2018). An open-access dataset of crop production by farm size from agricultural censuses and surveys. *Data in Brief*, *19*, 1970–1988. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.06.057>
- Tejoyuwono. (2022). *Pengembangan lahan basah rawa & gambut: Masalah & mudarat*. Penerbit Andi.
- Villani, R., Sabbatini, T., Perez, O. M., Guiomar, N., & Debolini, M. (2019). An open dataset about georeferenced harmonized national agricultural censuses and surveys of seven mediterranean countries. *Data in Brief*, *27*, 104774. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104774>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab X

Telisik Data Terong Belanda: Antara Potensi dan Fakta

Iwan Setiajie Anugrah

Terong belanda (*solanum betaceum*) merupakan salah satu jenis komoditas eksotis dan pernah menjadi produk unggulan yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Solok. Komoditas terong belanda pada masa kejayaannya sangat populer serta banyak dibudidayakan para petani di wilayah ini hingga menjadi sentra produksi bagi Provinsi Sumatra Barat pada jamannya, bersama-sama dengan kejayaan komoditas markisa yang juga pernah menjadi ciri khas komoditas buah dari daerah ini. Potensi produk dan komoditas pertanian lainnya seperti berbagai jenis sayuran, buah, serta beragam hasil komoditas perkebunan, dan peternakan. Jenis komoditas pangan padi dan palawija juga menjadi basis perekonomian utama bagi sebagian besar masyarakat petani di wilayah Kabupaten Solok.

I. S. Anugrah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: iwan035@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Anugrah, I. S. (2025). Telisik data terong belanda: Antara potensi dan fakta. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 367–422). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c946 E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Dinamika pembangunan ekonomi daerah yang begitu cepat, kemudian mendorong program pembangunan pertanian berbasis komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, telah mengubah tatanan usaha pertanian yang berorientasi ke arah pola usaha tani yang lebih bersifat komersial, investasi tinggi dan padat modal serta diusahakan secara masif. Orientasi dan perubahan sistem usaha tani tersebut telah menggeser produk komoditas pertanian lain, termasuk terong belanda dengan komoditas yang lebih kompetitif atas kebutuhan produk serta terhadap tuntutan pasar komoditas hingga kemudian mendorong pola ekstensifikasi. Skala pengusahaan lahan yang luas, diperlukan untuk komoditas bawang merah, misalnya kentang, dan beberapa jenis sayuran utama berproses begitu cepat, telah mendominasi kegiatan usaha pertanian dataran tinggi di wilayah ini hingga menjadi sentra produksi pertanian sayuran potensial, terutama untuk komoditas bawang merah di tingkat provinsi hingga nasional.

Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023 menjadi momentum penting dalam proses penyediaan data terbaru bagi perumusan perencanaan dan pembangunan pertanian nasional berkelanjutan. Tidak hanya informasi tentang dinamika kegiatan usaha pertanian yang diperoleh, tetapi juga mendapatkan informasi yang terkait dengan dinamika keberadaan komoditas pertanian berikut perkembangannya selama periode sepuluh tahun hingga sensus ini dilaksanakan. Validitas dan keakuratan data hasil sensus pertanian ini menjadi harapan besar dari seluruh masyarakat pengguna data selain menuju satu data pertanian nasional. Akurasi data hasil sensus pertanian sangat diperlukan untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat terutama dalam pembangunan sektor pertanian sebagaimana ditegaskan pimpinan negara ini.

Proses pelaksanaan sensus telah dijalankan oleh BPS sebagai lembaga kompeten yang ditetapkan secara nasional. BPS Kabupaten Solok sebagai pelaksana sensus pertanian di wilayah kabupaten telah melakukan kegiatan dengan mengacu standar SOP Sensus Pertanian 2023 secara nasional. Proses rekrutmen petugas, pemenuhan materi sensus, dan bimbingan teknis sebagai strategi serta upaya penyamaan

persepsi dan pemahaman materi pencacahan sudah dilakukan secara berjenjang. Harapannya, keragaman latar belakang pendidikan serta pengalaman para petugas lapangan atas pengetahuan dan pemahaman materi sensus pertanian setidaknya dapat mendukung keakuratan data yang diperoleh dari pelaksanaan sensus pertanian di wilayah Kabupaten Solok.

Dinamika berbagai potensi, kondisi, hingga permasalahan yang selama sepuluh tahun terjadi di masing-masing pelaku usaha kegiatan pertanian, setidaknya bisa tergali melalui kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini, hingga menjadi informasi penting bagi program pembangunan pertanian di Kabupaten Solok. Akumulasi data dan informasi tentang usaha pertanian komoditas terong belanda tentunya bukan menjadi salah satu prioritas hasil sensus karena relatif terbatas bahkan tidak tercatat dalam data utama dibandingkan bukti sejarah dan potensinya. Namun, secara sinergis hasil kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dan informasi yang lebih komprehensif bagi bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, termasuk pengembangan beberapa komoditas pertanian utama dan potensial diusahakan di wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat ataupun secara nasional.

Bagian tulisan ini merupakan sebagian kecil informasi dan data tentang kondisi kegiatan usaha pertanian komoditas terong belanda, dari seluruh substansi materi sensus pada kegiatan besar Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan BPS di wilayah Kabupaten Solok. Tulisan ini disampaikan secara deskriptif-kualitatif tentang proses pelaksanaan kegiatan sensus pertanian Sensus Pertanian 2023 itu sendiri, serta informasi yang terkait potensi dan data informasi tentang usaha pertanian terong belanda yang diperoleh secara langsung dari beberapa petani responden yang selama ini masih tetap bertahan melakukan usaha budi daya komoditas terong belanda di tengah gencarnya investasi usaha pertanian komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi dan padat modal dilakukan secara masif di wilayah Kabupaten Solok.

A. Menerjemahkan Sensus Pertanian di Tingkat Lokal

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Senin, 15 Mei 2023. Presiden menegaskan bahwa data yang akurat sangat diperlukan untuk memutuskan sebuah kebijakan yang tepat, salah satunya dalam pembangunan sektor pertanian (BPMP Setpres, 2023). Pelaksanaan sensus pertanian yang selama ini digelar setiap sepuluh tahun sekali, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO (Natalia, 2023).

Sensus Pertanian 2023, memiliki tujuan utama menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai dengan wilayah terkecil. Sementara itu, tema yang diusung dalam Sensus Pertanian 2023 adalah “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Tema ini mengandung makna bahwa data hasil sensus pertanian 2023 diharapkan dapat menjadi landasan yang *valid* dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian. Sensus pertanian 2023 memiliki tujuan utama menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai dengan wilayah terkecil (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).

Pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 dimulai sejak tanggal 1 Juni hingga 30 Juli 2023, mencakup tujuh subsektor, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Diperkirakan lebih dari 190 ribu petugas dikerahkan untuk mendata seluruh responden Sensus Pertanian 2023, selama kurun waktu dua bulan tersebut. Responden yang akan didata meliputi usaha pertanian perseorangan atau petani, usaha pertanian berbadan hukum atau perusahaan, dan usaha pertanian lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Ada sejumlah hal yang termasuk dalam Sensus Pertanian 2023. *Pertama*, data pelaku usaha pertanian secara *by name and by address*

(lengkap nama dan alamat), sehingga dapat digunakan sebagai acuan program pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian dan potensi pertanian serta *urban farming*. *Kedua*, struktur demografi petani termasuk petani milenial. *Ketiga*, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi. Berikutnya, penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian.

Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga kompeten dalam pelaksanaan kegiatan sensus, Sensus Pertanian 2023 hadir untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan berkualitas. Sensus Pertanian 2023 diharapkan menjadi momentum terwujudnya satu data pertanian yang mampu memberikan basis data menyeluruh hingga level terkecil, sehingga pemangku kebijakan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk pertanian di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Solok, serta lokasi pendampingan di Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti, telah berjalan dengan keterlibatan SDM pelaksana di tingkat PPL, PML, serta para petani dan pelaku usaha pertanian lainnya sebagai responden utama. Supervisi dari koseka, dan aparat BPS (pusat dan provinsi), serta dukungan sarana. Berikut sinergi kegiatan dengan Tim Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Solok menjadi modal dasar, bagaimana kegiatan Sensus Pertanian 2023 di wilayah Kabupaten Solok bisa terlaksana sesuai dengan SOP Sensus Pertanian 2023 yang sudah ditetapkan secara nasional.

Keterlibatan teknis maupun substansi para aparat dan petugas serta lembaga yang selama ini menangani kegiatan sektor pertanian di kecamatan (Penyuluh Pertanian Lapangan dan Balai Penyuluhan Pertanian), sekaligus sebagai pembina para petani berikut kelompok taninya di masing-masing lokasi Sensus Pertanian 2023 masih sangat diperlukan. Langkah ini bisa sebagai mitra diskusi dan verifikasi data hasil pencacahan yang sudah dilakukan petugas PPL, PML, hingga koseka khususnya tentang kondisi petani/rumah tangga petani. Selain untuk meminimalisasi keterbatasan pengetahuan dan latar belakang pendidikan (non-pertanian) para petugas Sensus Pertanian 2023 tersebut, sekaligus sebagai upaya positif memperoleh informasi dan data

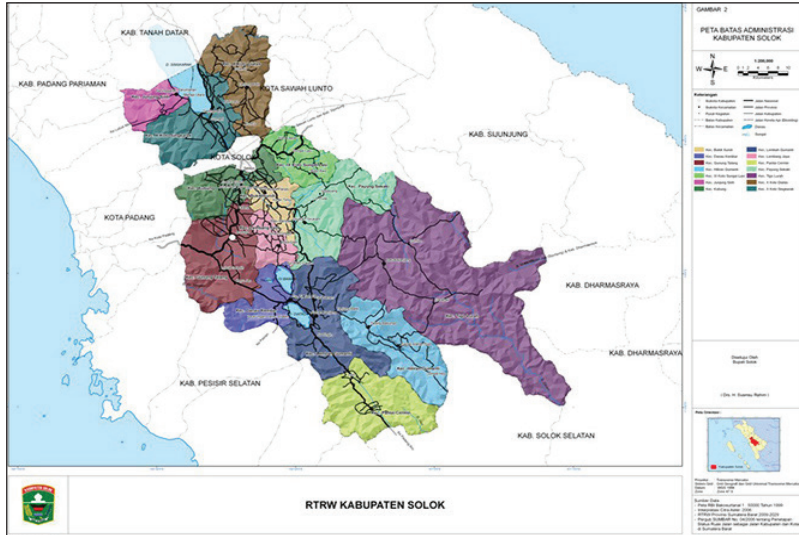
yang lebih akurat atas realitas kehidupan petani, pengelolaan usaha tani, serta kondisi rumah tangga mereka melalui hasil wawancara yang diperoleh dari responden pencacahan.

Proses pencacahan terhadap komoditas terong belanda pada dasarnya merupakan bagian materi dari rangkaian substansi Sensus Pertanian 2023 yang sudah ditetapkan. Data informasi tentang komoditas ini akan tercatat pada responden petani atau pedagang serta pengelola produk dari komoditas terong belanda. Hal ini mengingat tidak semua pelaku usaha pertanian yang menjadi obyek sensus mengusahakan komoditas ini, dan faktanya memang hanya terbatas pada beberapa petani dengan sistem pengusahaan yang juga sangat terbatas. Sekalipun demikian, potensi pasar produk dari usaha pertanian komoditas ini masih terbuka untuk dikembangkan dalam skala rumah tangga, baik di lahan pekarangan sekitar rumah maupun di lokasi lahan tidak produktif.

B. Bentang Alam Pertanian: Mengenal Awal Lingkungan Sensus Letak Geografis, Iklim, dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang berada di dataran tinggi Pulau Sumatra bagian barat, dengan luas wilayah mencapai 3.738 km² dan pada ketinggian 284–1.458 m di atas permukaan laut. Secara astronomis, Kabupaten Solok terletak di antara 00°32′–01°46′ Lintang selatan dan antara 100°25′–101°41′ Bujur Timur. Sementara itu, berdasarkan geografisnya, Kabupaten Solok mempunyai batas wilayah di sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Datar; sebelah selatan dengan Kabupaten Solok Selatan; sebelah barat dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan; serta sebelah timur dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung (lihat Gambar 10.1).

Beberapa wilayah Kabupaten Solok memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, di mana jumlah hari hujan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hari kering. Jumlah hari hujan di Kabupaten

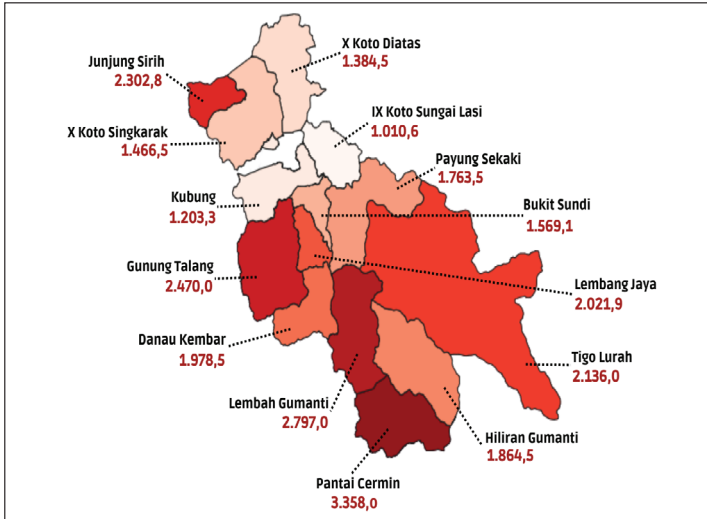


Sumber: BPS Kabupaten Solok (2023)

Gambar 10.1 Peta Lokasi Administratif Kabupaten Solok

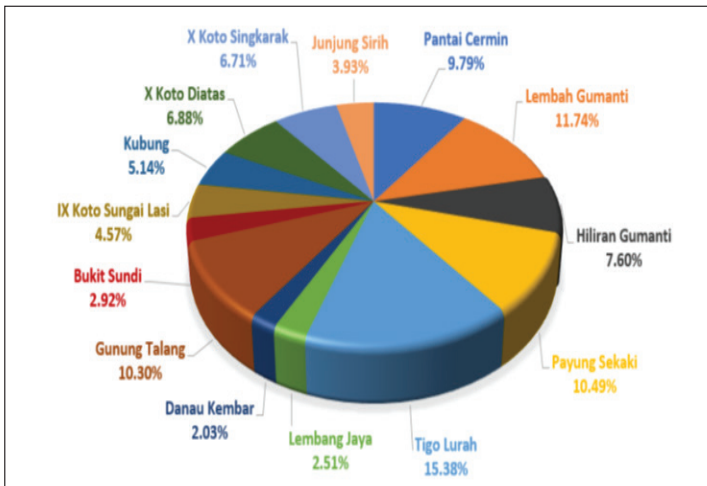
Solok pada tahun 2022 mencapai 169 hari. Dengan kondisi ini, maka sebagian wilayah di Kabupaten Solok merupakan daerah yang mendapatkan intensitas curah hujan cukup tinggi. Jumlah curah hujan di Kabupaten Solok selama tahun 2022 mencapai 1951,9 mm. Jumlah curah hujan di berbagai lokasi wilayah Kabupaten Solok seperti pada Gambar 10.2.

Setelah mengalami pemekaran wilayah administrasi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, pusat pemerintahan Kabupaten Solok saat ini berada di Arosuka sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Solok. Luas wilayah Kabupaten Solok secara keseluruhan mencapai 373.800 hektar. Empat kecamatan masing-masing dengan wilayah yang relatif cukup luas dibandingkan beberapa kecamatan lainnya, meliputi Kecamatan Tigo Lurah (15,38 %); Lembah Gumanti (11,74 %); Payung Sekaki (10,49 %) dan Kecamatan Gunung Talang (10,30 %) (Gambar 10.3 dan Tabel 10.1).



Sumber: BPS Kabupaten Solok (2022)

Gambar 10.2 Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Solok (mm/bulan), 2022



Sumber: Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode Data dan Tata Wilayah

Gambar 10.3 Diagram Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Solok, 2022

Berdasarkan pembagian wilayah administratif, Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan dengan 74 nagari atau setingkat Kelurahan/Desa dan 414 jorong atau setingkat RW. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas memiliki nagari terbanyak, masing-masing memiliki sembilan nagari. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki dua nagari (Tabel 10.1).

Tabel 10.1 Sebaran Luas Wilayah, Jumlah Nagari dan Jumlah Jorong di Kabupaten Solok (2022)

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	(%)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Pantai Cermin	36.600	9,79	2	28
2.	Lembah Gumanti	43.900	11,74	4	39
3.	Hiliran Gumanti	28.400	7,6	3	20
4.	Payung Sekaki	39.200	10,49	3	11
5.	Tigo Lurah	57.500	15,38	5	20
6.	Lembang Jaya	9.400	2,51	6	43
7.	Danau Kembar	7.600	2,03	2	19
8.	Gunung Talang	38.500	10,3	8	40
9.	Bukit Sundi	10.900	2,92	5	20
10.	IX Koto Sungai Lasi	17.100	4,57	9	28
11.	Kubung	19.200	5,14	8	37
12.	X Koto Diatas	25.700	6,88	9	52
13.	X Koto Singkarak	25.113	6,72	8	46
14.	Junjung Sirih	14.687	3,93	2	11
Total Kabupaten Solok		373.800	100.00	74	414

Sumber: BPS Kabupaten Solok (2023)

Jumlah penduduk Kabupaten Solok berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2022 mencapai 397.829 jiwa, terdiri dari 200.218 laki-laki dan 197.611 perempuan. Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja di pertanian pada tahun 2022 mencapai 115.701 jiwa, 64.383 jiwa di antaranya laki-laki dan 51.318 jiwa lainnya perempuan.

Berdasarkan topografi, Kabupaten Solok memiliki wilayah ketinggian yang sangat bervariasi antara dataran, lembah, dan daerah berbukit-bukit, dengan ketinggian antara 329–1.458 meter di atas permukaan laut. Ketinggian wilayah di Kabupaten Solok ini dapat diklasifikasikan dalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

- 1) ketinggian antara 100–500 m di atas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X Koto Singkarak, Junjung Sirih, IX Koto Sungai Lasi, Kubung, dan Bukit Sundi;
- 2) ketinggian antara 500–1.000 m di atas permukaan laut, tersebar di bagian utara, yaitu Kecamatan Tigo Lurah, Gunung Talang, Kecamatan X Koto Diatas, dan Kecamatan Payung Sekaki;
- 3) ketinggian 1.000–1.500 m di atas permukaan laut, tersebar di Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, Lembang Jaya, dan Kecamatan Danau Kembar.

Dengan tiga zona ketinggian ini, maka topografi serta lingkungan kegiatan pertanian maupun komoditas yang diusahakan oleh para petani di masing-masing wilayah agroekosistem sangat beragam.

1. Potensi Pertanian dan Kegiatan Agrowisata

Sektor pertanian masih menjadi sumber perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Solok, sekaligus memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap struktur dan total PDRB Kabupaten Solok berdasarkan sub sektor kegiatan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Solok selama tahun 2018–2022 berdasarkan harga konstan, antara 35,9–36,7% dari nilai antara Rp9.430,32–10.553,07 (milyar) dan antara 33,31–36,29% dari nilai antara Rp12.653,86–15.781,14 (milyar), berdasarkan harga berlaku (Tabel 10.2).

Tabel 10.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok (2018–2022) berdasarkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Total PDRB atas Harga Berlaku dan Konstan 2010

	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Harga Konstan					
	Tahun 2010 (Rp Milyar)	3.461,73	3.553,90	3.595,06	3.704,54	3.829,23
	Persentase (%)	36,70	35,90	36,70	36,60	36,30
	Harga Berlaku (Rp Milyar)	4.591,98	4.728,17	4.755,52	4.830,14	5.257,08
	Persentase (%)	36,29	34,82	35,01	34,07	33,31
Total PDRB Kabupaten Solok	Harga Konstan					
	Tahun 2010 (Rp Milyar)	9.430,22	9.905,6	9.792,92	10.116,58	10.553,07
	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Harga Berlaku (Rp Milyar)	12.653,86	13.580,51	13.581,97	14.178,06	15.781,14
	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: Harga Konstan Tahun 2021 = Angka Sementara; Tahun 2022 = Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka (BPS Kabupaten Solok, 2023)

Kondisi topografi dari setiap wilayah geografis Kabupaten Solok sangat potensial untuk mendukung kegiatan berbagai usaha pertanian, di mana dari setiap lokasi memberikan kekhasan komoditas sebagai pembeda produk dari masing-masing wilayah. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Solok sangat beragam, meliputi tanaman pangan, (tegal, kebun, ladang, dan huma), tanaman hortikultura, perkebunan, biofarmaka, serta beberapa komoditas pertanian lainnya. Secara umum wilayah Kabupaten Solok menjadi sumber utama penghasil berbagai produk pertanian baik dari kegiatan pertanian subsektor tanaman pangan, seperti untuk padi dan palawija, hortikultura sayuran dan buah termasuk tanaman hias, subsektor perkebunan berikut komoditas biofarmaka, subsektor peternakan hingga hasil kegiatan sektor perikanan dari empat danau air tawar yang ada di wilayah Kabupaten Solok.

Sejalan dengan semakin terbukanya informasi dan kegiatan destinasi wisata alam pegunungan, tiga danau vulkanik serta keindahan alam lainnya di wilayah dataran tinggi Kabupaten Solok. Sebagian besar wilayah Kabupaten Solok juga lebih dikenal sebagai lokasi wisata agro, karena sebagian besar wilayahnya merupakan sentra utama penghasil berbagai jenis sayuran dataran tinggi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan wilayah Sumatra Barat serta beberapa provinsi lainnya. Produk pertanian pangan, perkebunan serta hortikultura jenis sayuran dataran tinggi yang banyak diusahakan/dihasilkan dari wilayah Kabupaten Solok. Hasil pertanian tanaman pangan adalah padi, beras, dan beberapa jenis palawija. Teh dan kopi merupakan produk perkebunan yang terkenal dari Solok.

Sementara itu, beberapa komoditas sayuran potensial dan terutama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produksi Provinsi Sumatra Barat (Gambar 10.4) bawang merah, kol atau kubis,

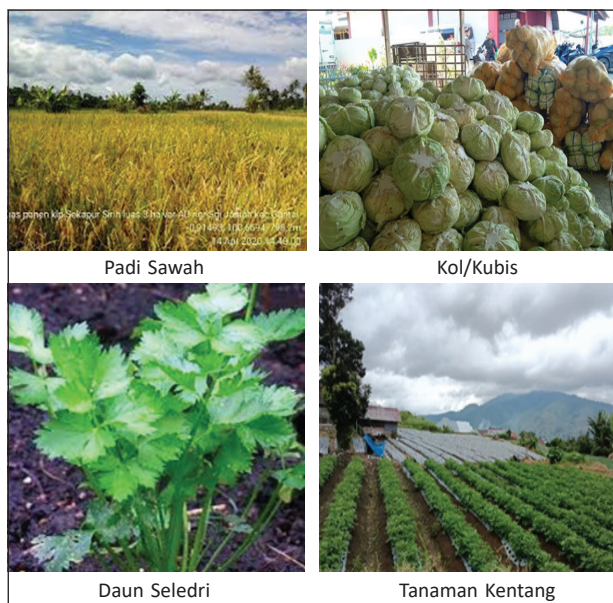


Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.4 Sebagian produk komoditas pertanian potensial dari Kabupaten Solok

kentang, tomat, wortel, selain produksi cabai keriting, cabai rawit, bawang daun, petsai, seledri, serta usaha pertanian untuk beberapa jenis sayuran lainnya (Tabel 10.3).

Tabel 10.3 Komoditas Utama Kabupaten Solok dan Persentase Kontribusi bagi Produksi Provinsi Sumatra Barat, 2022 (%)

	Kabupaten Solok		Sumatra Barat		
	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produksi (ton)	(%)
2022	Padi	32.901,89	179.316,1	1.373.532,19	13,1
	Beras		103.828,1	795.306,36	13,1
	Bawang Merah	11.875	188.515,6	209.100,2	90,2
	Kentang	956	19.219	25.134	76,5
	Kubis	4.072	143.889,7	164.654,3	87,4
	Tomat	2.366	84.086,6	120.416,4	69,8
	Wortel	576	14.623	25.281,6	57,8
	Teh	522,0	980,08	980,08	100,0

Sumber: BPS Provinsi Sumatra Barat, (2023)

Di antara jenis komoditas unggulan dari wilayah Kabupaten Solok tersebut, terdapat komoditas yang pernah menjadi primadona masyarakat di Sumatra Barat pada umumnya. Komoditas dimaksud adalah terong belanda dan markisa solok yang hingga saat ini tidak lagi banyak diusahakan para petani di wilayah Solok, dibandingkan dengan beberapa jenis komoditas sayuran dataran tinggi lainnya. Sekalipun potensi budi daya masih sangat mendukung, namun skala usaha dan ketersediaan lahan secara luas sangat terbatas untuk usaha pertanaman komoditas ini, bersaing dengan dominasi kebutuhan lahan untuk pengembangan komoditas bawang merah yang masif maupun jenis komoditas sayuran lainnya. Tanaman terong belanda pada akhirnya hanya menjadi tanaman pekarangan dan pagar. Terbatasnya ruang untuk budi daya, serta perhatian para petani terhadap usaha dan produksi komoditas terong belanda, menyebabkan komoditas ini luput dari publikasi karena tidak tercatat secara statistik dalam data pertanian di Kabupaten Solok.

Besarnya potensi sumber daya pertanian di wilayah Kabupaten Solok, tentunya selain menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di masing-masing wilayahnya, juga sekaligus diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, wilayah, dan daerah hingga pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian secara luas.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian versi Lokal

Sensus pertanian adalah satu dari tiga sensus yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, dua sensus lainnya adalah sensus penduduk dan sensus ekonomi. Sensus Pertanian 2023 akan menjadi gelaran ke-7 sensus pertanian sepanjang sejarah Indonesia. Sensus Pertanian 2023 mencakup tiga jenis usaha pertanian. Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Lainnya (UTL), dan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB). Ketiganya merupakan representasi dari pelaku usaha pertanian di Indonesia dari yang skalanya kecil hingga besar dari yang mengusahakan tanaman pangan hingga jasa pertanian (Kamal, 2023).

UTP adalah unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. UTP merupakan petani pada umumnya yang kita kenal yang mengusahakan pertanian di mana hasilnya sebagian atau seluruhnya untuk dijual atau ditukar. Sementara itu, UTL merupakan usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial/ekonomi/sumber daya, dan keakraban. UTL dapat berupa kelompok tani, pondok pesantren, kantor pemerintah, dan sejenisnya yang mengelola usaha pertanian bersama pada satu lahan yang sama, yang hasilnya sebagian atau seluruhnya untuk dijual atau ditukar. Sementara itu, UPB adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan

tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaannya dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota. UPB pada umumnya perusahaan besar yang bergerak dibidang pertanian.

Pelaksanaan pencacahan Sensus Pertanian 2023 di lokasi pendampingan sudah berjalan hampir 13 hari sejak dicanangkan kegiatan Sensus Pertanian 2023, mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Juli 2023. Kegiatan Sensus Pertanian 2023, meliputi tujuh subsektor kegiatan pertanian secara luas, subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Banyak variabel yang harus dipenuhi melalui penggalan informasi yang kemudian diharapkan menjadi data dasar untuk sebuah gambaran tentang kondisi dari kehidupan para petani dan rumah tangganya dalam kegiatan pengelolaan usaha tani sekaligus sebagai sumber kehidupannya. Materi pencacahan untuk di lokasi kegiatan pendampingan Sensus Pertanian 2023 sangat berkaitan dengan kondisi usaha pertanian hortikultura, meliputi berbagai ragam komoditas sayuran dataran tinggi dan diusahakan di berbagai lahan usaha petani. Kondisi ini sangat memerlukan pemahaman dan penguasaan materi sensus pertanian dari PPL maupun PML dalam proses pencacahan, terutama terkait satuan, karakteristik komoditas, meliputi teknis budidaya, proses panen, pasca panen, dan satuan produk yang dihasilkan berikut variasi harga jual dari masing-masing komoditas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan pemahaman petugas atas substansi variabel dan kondisi petani melalui penggalan informasi maupun data sangat diperlukan. Namun, diperoleh informasi yang terkait dengan kendala teknis pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 terkait dengan beberapa substansi pada formulir pencatatan L1 yang tidak sesuai dengan sistem, aturan, atau satuan yang digunakan di beberapa wilayah pertanian Kabupaten Solok. Beberapa satuan untuk produk dari beberapa komoditas yang ada dan dilakukan dengan materi substansi yang sudah dibuat pada formulir isian Sensus Pertanian 2023. Di antara ketidaksesuaian terdapat pada satuan luas lahan untuk kegiatan pertanaman komoditas sayuran di lokasi sentra sayuran di

wilayah Kabupaten Solok yang menggunakan satuan bedeng mulsa dengan ukuran ”sukat” atau ”bal plastik” dengan ukuran tertentu yang masing-masing berbeda antar lokasi kegiatan.

Begitu pun untuk pengukuran satuan produk komoditas, seperti kelapa satuan di lokasi pencacahan biasanya dihitung dalam jumlah butir/buah, sementara pada formulir kuesioner pencacahan satuan yang digunakan kilogram. Begitu pula untuk satuan ternak yang dipelihara para petani, di lokasi petani satuannya ekor tetapi pada formulir pencacahan dalam kilogram. Hasil produksi nira dari tanaman aren biasanya dihitung dalam satuan liter di tingkat petani, tetapi di formulir Sensus Pertanian 2023 dengan satuan kilogram.

Untuk satuan produksi padi di Sensus Pertanian dalam bentuk satuan GKP, sementara di tingkat petani dalam bentuk satuan GKG. Ukuran untuk hasil panen gabah juga dengan satuan lokal dinamakan sukat, ukuran kaleng biskuit besar atau kecil, bukan satuan kilogram seperti pada formulir Sensus Pertanian 2023. Sebaliknya untuk satuan produksi cengkeh di tingkat petani biasanya dihitung dalam bentuk basah, sedangkan di Sensus Pertanian 2023 dihitung dalam bentuk kering. Senada dengan itu, hasil produksi bawang merah petani di wilayah kabupaten Solok biasanya dihitung dalam bentuk bawang basah atau bersih tanpa ikat, tetapi di Sensus Pertanian 2023 dalam bentuk bawang ikat kering.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Secara umum proses pencacahan di sebagian besar wilayah Provinsi Sumatra Barat dilakukan dengan pengisian formulir kuesioner manual. Hanya untuk wilayah Kota Padang, proses pencacahan sudah menggunakan metode aplikasi CAPI. Keterbatasan sinyal dan jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para petugas lapangan di beberapa lokasi pencacahan. Hal ini karena secara teknis penggunaan aplikasi sangat bergantung pada akses sinyal dan jaringan internet dalam proses pemasukan/input data hingga pengiriman data ke server (yang sudah disiapkan) secara langsung. Proses mendata pada Sensus Pertanian 2023 melewati beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Model dan Metode Pencacahan

Kegiatan pencacahan dilakukan oleh PPL, selain juga melibatkan PML serta koseka. Alat bantu kuesioner dengan cara pengisian manual dilakukan untuk pelaksanaan pencacahan, mengingat hampir 50% terkendala dengan internet jika menggunakan *paper assisted personal interview* (PAPI) atau *computer assisted personal interviewing* (CAPI). Dilengkapi dengan peta manual, serta dilakukan dengan pola *door to door* ke setiap lokasi rumah/rumah tangga petani berdasarkan peta semua lokasi petani dalam Wilkerstat dan sistem *tagging* untuk penetapan lokasi rumah petani yang akan menjadi responden pencacahan. Metode lain yang dilakukan dengan sistem *snowballing prekasi* informasi dari satu petani ke petani lainnya, sehingga dengan pola informasi yang diperoleh secara *snowball* ini dapat diperoleh gambaran lokasi dan petani lainnya.

Pola sensus dilakukan untuk seluruh petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam satuan lokasi pencacahan. Lokasi pencacahan di wilayah Kabupaten Solok atau Sumatra Barat pada umumnya, bisa di satu nagari (kelurahan/desa) juga dilakukan dalam lingkup jorong (RT/RW/dusun). Unit pencacahan adalah rumah tangga petani sebagai satuan jumlah responden dimana kriteria petani responden adalah yang melakukan kegiatan usaha pertanian khususnya untuk tanaman semusim sejak 1 Mei sampai dengan 30 April 2023 serta keberlanjutannya. Dengan demikian, lokasi pencacahan dan rumah tangga petani yang telah terdokumentasi data ST2023.

2. Organisasi Petugas Pelaksana

Kegiatan Sensus Pertanian 2023 dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa petugas sesuai dengan tingkatan dan SOP tugas masing-masing dalam sensus ini. Organisasi Lapangan UTP meliputi petugas lapangan UTP, PML sebagai petugas pemeriksaan hasil pencacahan lapangan sensus, serta PPL sebagai petugas lapangan sensus. Kemudian di atas PML, ada koseka atau pemeriksa lapangan sensus hasil dari verifikasi yang dilakukan PML.

Koseka bertanggungjawab mengawasi seluruh PML di wilayah tugasnya, petugas koseka diutamakan pegawai organik BPS yang ditugaskan menangani kecamatan (Gambar 10.5). Setiap petugas koseka membawahi sekitar 10 PML dan setiap PML membawahi sekitar 6 orang PPL yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk PML diutamakan mitra yang berpengalaman dalam kegiatan sensus/survei. Setiap PPL akan bertugas di sejumlah satuan lingkungan setempat (SLS), ada nagari juga jorong yang terkonsentrasi dan non konsentrasi atau gabungan keduanya, dengan pertimbangan jumlah KK pertanian dan kedekatan lokasi sekelompok SLS, sub SLS, atau non SLS yang menjadi tugasnya. Setiap PPL akan mendata sekitar 320–480 KK atau 240 KK tani dalam periode 2 bulan pencacahan (Juni–Juli 2023). Selanjutnya sistem pelaporan data dari PPL à PML à Koseka à Tim BPS Kabupaten/Tim Teknis. Secara keseluruhan, jumlah perangkat petugas yang terlibat dalam ST2023 mencapai 388 orang, meliputi 316 PPL, 58 PML, dan 14 KOSEKA.



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.5 Kegiatan diskusi substansi sensus dengan PPL, PML, dan Koseka

3. Pelaksanaan Kegiatan Sensus di Lokasi Kecamatan Danau Kembar

Informasi dan pengalaman Petugas Pencacah Lapangan (PPL) yang menjadi pelaksana kegiatan pencacahan di lokasi kegiatan Kecamatan Danau Kembar, berlatar belakang pendidikan lulusan D4 Ilmu Kependidikan Universitas Negeri Padang. Rekrutmen tenaga PPL, selain jenjang pendidikan terakhir, juga berdasarkan pengalaman dan keikutsertaan dalam kegiatan sensus, seperti pernah menjadi petugas

sensus pada kegiatan Regsosek tahun 2022, serta survei pendapatan secara *online*.

Setelah lolos seleksi PPL, kemudian disertakan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan dalam dua gelombang oleh kantor BPS Kabupaten Solok. Masing-masing selama empat hari tiga malam di Padang dan dibagi dalam satuan kelas pelatihan/pembelajaran, terdiri dari 25–26 orang peserta per kelasnya. Materi pelatihan yang diberikan oleh instruktur dari BPS Kabupaten Solok, yaitu cara pengisian kuesioner, penjelasan teknis lapangan, administrasi, tugas dan kewajiban, materi praktik serta pelatihan melakukan sensus. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lapangan (terkait kondisi wilayah Kabupaten Solok).

Jika para PPL mengalami kesulitan, biasanya mereka akan meminta penjelasan kepada PML atau petugas lain. Dalam kegiatan sensus, pengisian data, dan kriteria terong belanda dimasukkan pada klasifikasi kelompok komoditas hortikultura tahunan. Strategi wawancara menjadi mutlak diperlukan. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 terkait dengan ketersediaan waktu responden petani, di mana hanya bisa dilakukan wawancara pada waktu siang menjelang sore hingga malam hari sesudah para petani bekerja di ladangnya pada pagi hingga siang/sore hari, selain terkendala cuaca terkait hujan dan kabut. Sejak pelaksanaan pencacahan, dari tanggal 2–15 petugas PPL1 sudah menyelesaikan pencacahan terhadap 72 petani responden dan PPL2 sebanyak 62 responden.

Secara rata-rata jumlah kegiatan pencacahan di lokasi SLS yang mereka berdua bisa dilakukan sebatas terhadap 20 responden. Beberapa hal yang menjadi catatan mereka terkait satuan lahan atas persil yang dimiliki oleh para petani responden, di mana masih menggunakan satuan lokal bal yaitu hanya mencapai 5 bal (1 bal = 500 m²), artinya sebagian besar tidak memiliki lahan yang luas. Tahapan kegiatan yang menjadi tugas PPL adalah melakukan pencacahan, mengedit bersih, kemudian kuesioner hasil edit bersih disetorkan ke PML untuk diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut, atas hasil pengisian data hasil pencacahan yang diisikan di kuesioner.

Jika masih terdapat ketidaksesuaian dikonfirmasi dapat dilakukan telaah ulang atau jika sudah benar, bisa lolos dari verifikasi PML. Dari pengalaman kegiatan pencacahan terkait substansi materi kuesioner dengan kesesuaian kondisi di wilayah pencacahannya hanya terjadi ketidaksesuaiannya sekitar 10% saja. Dari pengalaman wawancara dengan responden, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu orang responden 15–20 menit, relatif tergantung pada respon dan kelancaran jawaban/pemahaman responden terhadap materi yang dipertanyakan, serta proses mengingat responden terhadap kegiatan usaha pertaniannya. Masukan yang disampaikan dari kegiatan pencacahan terkait dengan penggunaan jenis pupuk kandang dalam satuan karung beras, berikut jenisnya tidak masuk dalam substansi kuesioner, padahal diperhitungkan nilainya sebagai indikator pengeluaran.

Riwayat hidup koseka yang diwawancarai, sebagai petugas statistik sejak 2008, kemudian menjadi koseka tahun 2023 terkait dengan kegiatan Sensus Pertanian 2023. Lokasi wilayah kegiatan sebagai koseka di Kecamatan Danau Kembar sejak bulan April 2022. Dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang dimulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 15 Juni 2023, tidak ditemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Hanya saja, fasilitas berkaitan akomodasi dan kelengkapan pendukung berbeda dibandingkan dengan kegiatan sensus sebelumnya.

Tugas koseka dalam kaitan kegiatan Sensus Pertanian 2023, sebagai pengawas dokumen kelengkapan atau pemeriksa dokumen hasil pencacah, serta kebutuhan administrasi. Beberapa laporan terkait kendala kegiatan Sensus Pertanian 2023 di wilayah Kecamatan Danau Datar, secara teknis pada saat kegiatan pencacahan adalah terkait dengan kesusahan waktu untuk menemui para petani karena hanya bisa dilakukan pada sore hingga malam hari, selepas mereka bekerja seharian di ladang/kebun. Selanjutnya, terkendala cuaca, di mana daerah Danau Kembar ini mempunyai tingkat curah hujan yang cukup tinggi dan berada di topografi dataran tinggi. Alur kegiatan Sensus Pertanian 2023 secara teknis dilakukan dengan pola berjenjang sebagai berikut:

PPL → kegiatan pencacahan (mitra → PML (verifikasi/pemeriksaan, *upload-input* 2 dokumen 1 SLS) → kecamatan (*entry* 1 dokumen 1 SLS), 1 koseka membawahi 5 PML di Danau Kembar hanya 3 PML → Tata Usaha → Tim Resifit Bassing → Tim Teknis → Tim Coding → Tim Entry Data → Tim Pengolahan → Data Base dan langsung ke Pusat.

Selanjutnya, informasi hasil wawancara dengan para petugas PML disampaikan bahwa tugas PML adalah memeriksa/validasi hasil kerja pencacahan PPL atau hasil PPL di lapangan (Gambar 10.6), meliputi pengisian formulir/modul L1 dan L2. Pengisian L1 menjadi tugas PPL dan ada catatan tentang variabel sensus untuk satu kepala keluarga dalam satu rumah tangga. Luas lahan terinci, tetapi dengan catatan karena satuan yang ada di masyarakat berbeda dengan yang ditetapkan dalam formulir isian L2, sehingga hasil pendataan masih perlu diverifikasi. Hasil-hasil pertanian dan yang bersifat etnik ada di kode komoditi. Jika tidak ditemukan, maka dibuatkan joga dengan catatan, seperti untuk komoditas lokal/etnik yang tidak



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.6 Pelaksanaan Sensus dan wawancara petugas PPL dan Petani Terong Belanda

masuk pendataan jenis cabai rawit "lado krambo" ataupun terong belanda. Kemudian, dalam pelaksanaan pencacahan ditingkat petani ada yang respons dan tidak, lalu lokasi petani yang akan dicacah BPS berdasarkan peta. Akan tetapi bagi petani yang tinggal diperbatasan sering kali bergeser, sehingga berdasarkan buku administrasi bisa berbeda. Permasalahan yang ditemui di lapangan juga terkait dengan proses *upload* data sering kali ada gangguan sinyal. Fasilitas yang diterima pelaksana lapangan, meliputi topi, tas plastik, dan ATK (pensil, penghapus), pulsa tidak termasuk.

Selama proses pengumpulan data usaha pertanian, Sensus Pertanian 2023 dilakukan terhadap rumah tangga petani dalam satuan keluarga maupun masing-masing individu sebagai bagian dari rumah tangga petani. Dengan pola sensus ini, tentunya semua anggota keluarga, baik kepala keluarga, istri, maupun anggota keluarga lainnya (laki-laki dan perempuan) menjadi responden untuk memberikan data informasi kepada petugas sensus. Begitu pun dalam keterkaitan proses untuk mendapatkan data dan informasi tentang komoditas terong belanda. Berikut kegiatan pengelolaan usaha taninya diperoleh dari responden baik dari kepala keluarga, istri, serta anggota keluarga lainnya dalam satu kegiatan wawancara di masing-masing lokasi tempat tinggal petani yang masih mengusahakan terong belanda hingga Sensus Pertanian 2023 dilaksanakan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sensus di Lokasi Kecamatan Lembah Gumanti

Hasil wawancara dengan para petugas PPL dan PML di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, diperoleh gambaran bahwa pada tahap awal kegiatan sensus didahului tugas PML dengan melakukan kegiatan verifikasi terhadap lokasi SLS untuk data kepastian petani di wilayah SLS. Dilakukan bersama dengan ketua jorong dalam satu nagari, termasuk untuk kesiapan pelaksanaan sensus. Selain itu, tugas PML mengawasi dan menemani PPL dalam proses ke lapangan, menunjukkan lokasi responden yang akan dilakukan pencacahan oleh masing-masing PPL di lokasi yang sudah ditetapkan melalui

pembagian tugas dan lokasi kerja/kegiatan PPL. Selanjutnya, memastikan proses wawancara berjalan lancar. Melakukan verifikasi hasil pencatatan PPL, termasuk keabsahan data yang diperoleh. PML di lokasi ini membawahi enam orang PPL, yaitu nagari Sungan Nanam dua orang dan di Nagari Alahan Panjang empat orang. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan ke koseka.

Diperoleh informasi bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan sensus 2–16 Juni 2023.

- 1) Terkait dengan permasalahan lahan, terutama yang terkait dengan satuan real di lapangan dengan satuan yang tertulis di formulir isian modul.
- 2) Kendala dan permasalahan input komoditas, misalkan untuk memasukan komoditas asparagus sebagai tanaman langka, dimasukkan ke dalam komoditas tanaman semusim, padahal panennannya tahunan.
- 3) Tanaman bondang sejenis talas umbi bahan pembuatan keripik, di dalam isian koding tidak ada. Tanaman bondang diusahakan secara tumpangsari dengan tanaman terong belanda.
- 4) Masih terjadi kekeliruan terkait dengan proses pencatatan data dari responden.

Namun, secara umum pelaksanaan sensus sampai hari terakhir (16 Juni 2023) di lokasi Kecamatan Alahan Panjang berjalan lancar. Sekalipun harus menyesuaikan waktu untuk wawancara dengan kesiediaan waktu petani, selain terkendala dengan cuaca. Hal lain yang ditemukan pada responden petani yang respons dan yang tidak, disamping dibutuhkan kejujuran responden dalam menjawab atau memberikan data yang ditanyakan untuk diisikan dalam modul yang disiapkan PPL. Syarat menjadi PPL ataupun PML yang menjadi responden, di antaranya sudah pernah mengikuti kegiatan survei atau sensus BPS sebelumnya (Perdagangan, Regsosek, Susenas, dsb). Pada Sensus Pertanian 2023 kendala yang disampaikan PPL di antaranya kelengkapan tas dan ATK.

Setelah seleksi dan diterima, para petugas mendapatkan pelatihan tentang Sensus Pertanian 2023. Beberapa materi yang mereka dapatkan di antaranya pembahasan dokumen Sensus Pertanian 2023 dan pemahaman isian L1 dan L2 selama empat hari oleh Tim Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Solok di Padang. Pemahaman para petugas bahwa yang menjadi tugas PML adalah membagi wilayah kerja PPL, penelusuran wilayah, mendampingi PPL untuk kegiatan wawancara, pemeriksaan hasil pencacahan L1 dan L2, kemudian melakukan input data melalui aplikasi. PML di lokasi ini, membawahi lima orang PPL. Beberapa kendala yang dihadapi selama menjadi mitra PPL, dihadapkan pada banyaknya jenis komoditas dan bidang lahan yang diusahakan para petani di wilayah kerja PPL dan PML. Kemudian, waktu untuk melakukan wawancara dengan para petani. Masing-masing petugas mewawancarai responden kurang lebih selama 20 menit. Secara teknis target responden untuk setiap PPL antara 350–370 responden selama dua bulan periode kegiatan sensus.

Sarana untuk mendapatkan penjelasan terkait satu rumah tangga petani terdapat 2–3 orang petani, sehingga sistem wawancara menjadi terbagi. Sarana berkaitan dengan sarana pendukung, misalnya tas dan ATK, kemudian pelaksanaan kegiatan sensus bisa lebih panjang karena banyak membutuhkan waktu pencacahan kepada petani, dan terkadang terjadi perubahan-perubahan, atau sebagai alternatif ke depan agar jumlah waktunya bisa tercapai, maka jumlah petugas per lokasi ditetapkan menjadi lebih banyak lagi jumlahnya. Khususnya, seperti di lokasi pencacahan yang sebagian besar tanaman yang diusahakan adalah berbagai jenis sayuran dataran tinggi, seperti bawang merah, cabai merah keriting, tomat, kubis, kentang, seledri, bawang daun, pakcoy, buncis, dan jenis tanaman sayuran lainnya.

Informasi secara umum, bahwa kegiatan Sensus Pertanian 2023 berjalan lancar, hanya saja harus tetap menyesuaikan dengan waktu para petani di rumah selepas melakukan kegiatan bertani. Terkait dengan komoditas terong belanda, hingga saat ini belum diusahakan sebagai tanaman pokok dan komersial, tetapi masih merupakan tanaman pagar dan tanaman pekarangan. Jumlah tanaman yang

ditanam juga masih terbatas di halaman rumah maupun pagar kebun atau di batas lahan dan batas rumah. Sekalipun demikian, terong belanda dapat dijadikan tambahan sumber pendapatan petani yang mengusahakannya, walau dengan jumlah nominal pendapatan hasil penjualannya yang relatif masih kecil.

Selama mengikuti kegiatan supervisi di lapangan (kasus di lokasi Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Lembah Gumanti) diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan ST2023 sudah terorganisir dengan baik, dinamis, dan solid. Data hasil pencacahan selama periode 2–15 Juni secara umum sudah dilaporkan serta tervalidasi dengan baik dan akurat, mengikuti alur proses berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan BPS, secara berjenjang dari sejak kegiatan di tingkat PPL → PML → Koseka → Tata Usaha → Tim Resifil Bassing → Tim Teknis → Tim Coding → Tim Entry Data → Tim Pengolahan/input data → hingga dilaporkan ke pusat dan data base sebagai outputnya.

Hasil wawancara dan pendalaman materi substansi Sensus Pertanian 2023, berikut proses pelaksanaan penggalian dan pencatatan data rumah tangga petani (responden sensus) yang diperoleh dari pengalaman masing-masing petugas lapangan. Secara umum telah berjalan dengan lancar, pelaporan data hasil pengisian dilakukan tepat waktu, diverifikasi oleh PML, dan koseka. Jika mengalami kendala teknis dan substansi dibahas pada pertemuan berkala tim Sensus (PPL) seminggu dua kali termasuk dengan PML atau bahkan dilaporkan kepada koseka dan tim ST2023 lainnya melalui grup WA. Grup WA yang sudah dibuat mereka dan BPS Kabupaten Solok menjadi media untuk memudahkan proses komunikasi yang terkait berbagai informasi kegiatan di antara Tim Sensus Pertanian 2023 kabupaten Solok.

Informasi dari PPL dan PML bahwa proses pelaksanaan pencacahan yang sudah berjalan selama dua minggu relatif cukup lancar, sekalipun di awal kegiatan hingga beberapa hari masih berjalan agak lambat. Dengan kondisi ini, maka para petugas pencacah harus mempelajari materi substansi lebih intensif dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi para petani responden yang diwawancarai. Para

petugas baik PPL maupun PML mengemukakan bahwa, kendala pelaksanaan pencacahan yang selama ini dilaksanakan di dua wilayah kecamatan sentra sayuran dataran tinggi ini, terkait dengan cuaca (hujan dan berkabut) serta kesesuaian waktu petani untuk diwawancara.

Intensitas dan kegiatan para petani di lokasi pertanaman sayuran dataran tinggi pada umumnya cukup tinggi/sibuk. Kegiatan pengolahan lahan, persiapan tanam, pemasangan mulsa, penanaman komoditas, pemupukan dan semprot, pemeliharaan, hingga proses kegiatan panen, pengelolaan hasil pasca panen, dan pemasaran hasil produksi/panen biasanya akan cukup banyak membutuhkan perhatian dan waktu bekerja di ladang/kebun. Para petani baru pulang dari ladang/kebun dan bisa ditemui di rumahnya selepas salat dhuhur, ashar atau kegiatan wawancara petani bisa dilakukan mulai dari jam empat sore hingga magrib, bahkan malam hari.

Dari beberapa petugas lapangan juga diperoleh informasi tentang kendala keselarasan beberapa materi terutama yang terkait dengan substansi dan satuan pengukuran luasan lahan yang dimiliki/digarap dan diusahakan maupun hasil produksi pertanian yang sudah dibuat/disusun pada modul L1 dan L2. Kebiasaan penggunaan satuan pengukuran yang berlaku/disepakati/ digunakan para petani dan pelaku usaha pertanian di lapangan atau di masing-masing lokasi pencacahan. Selain kendala tersebut, hasil pencacahan petugas lapangan juga ditemukan beberapa komoditas spesifik lokasi/daerah yang belum termasuk dalam daftar nama komoditas, serta pemberian *coding*-nya. Upaya yang dilakukan para petugas untuk menyikapi ketidaksesuaian substansi dan kendala teknis kegiatan pencacahan dengan petani serta berbagai hal yang terkait proses pencacahan, dilakukan konsultasi di antara para petugas PPL, bisa dengan PML atau koseka, serta petugas lainnya dalam Tim Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Solok. Ada ketentuan lain yang disepakati berdasarkan SOP, yaitu dengan menuliskan beberapa hal dan temuan tersebut pada ruang catatan khusus dan dilaporkan untuk segera diperoleh solusi atau pencatatan khusus oleh petugas Sensus Pertanian 2023 yang kompeten dengan temuan tersebut.

Para petugas lapang yang terlibat dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023, baik PPL, PML dan koseka mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup beragam, bahkan latar belakang pendidikan pertanian yang berkaitan/sejalan dengan lokus utama kegiatan Sensus Pertanian 2023 (Sensus Pertanian Nasional) relatif terbatas, berbanding dengan keragaman latar pendidikan petugas secara keseluruhan. Namun, dengan proses seleksi yang baik, kemudian hasil rekrutmen ditindak lanjuti dengan bimtek dan pelatihan terkait kegiatan Sensus Pertanian 2023, penyiapan materi tutorial dalam bentuk modul buku, video, dan brosur yang bisa dengan mudah dipelajari, sangat membantu para petugas. Terutama yang tidak memiliki latar belakang ilmu dan pengetahuan yang terkait bidang pertanian, untuk dapat memahami substansi materi tentang pertanian secara cepat.

Pengalaman keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan berbagai survei dan sensus yang dilaksanakan BPS sebelumnya, seperti Regsosek, FKP, SUSENAS, Survei Ekonomi, serta kegiatan serupa yang diselenggarakan dengan berbagai institusi/kementerian/lembaga, menjadi pengalaman yang sangat membantu para petugas sensus melaksanakan tugasnya di lapangan. Beberapa petugas PPL maupun PML serta koseka, juga di antaranya merupakan putra-putri kelahiran daerah setempat di lokasi kegiatannya, berlatar belakang keluarga petani atau bahkan sebagai pelaku usaha pertanian di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, sangat mudah membantu memahami situasi dan kondisi serta materi yang menjadi substansi kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini (lihat Gambar 10.7).

Tidak kalah pentingnya, bahwa besarnya perhatian serta dukungan dan kesiapan akomodasi yang disiapkan/dikelola manajemen BPS Kabupaten Solok melalui kebijakan pimpinan/Kepala BPS dan Tim Sensus Pertanian 2023, menjadi salah satu modal untuk pencapaian pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang lebih baik, solid, dan sukses di Kabupaten Solok. Sinergisitas, kesepahaman, dan kebersamaan visi yang terbangun setidaknya harus terkoordinasikan dengan baik antar institusi secara vertikal lingkup BPS Kabupaten, BPS Provinsi, dan BPS Pusat dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, berikut



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.7 Pelaksanaan Sensus dan wawancara petugas PPL dan PML dan Petani Terong Belanda

dukungan dari berbagai institusi, K/L, masyarakat petani, serta pelaku usaha pertanian secara umum menjadi kunci keberhasilan untuk pencapaian menuju ”satu data pertanian nasional”.

E. Petani di Tengah Impitan Luasan Lahan

Lima belas tahun yang lalu, masyarakat di wilayah Kabupaten Solok telah mengenal budi daya terong belanda dan pernah menjadi komoditas potensial bersama komoditas markisa, yang dianggap sebagai saudara kembarnya. Terong belanda atau lebih dikenal dengan terong virus di masyarakat Solok bersama buah markisa, menjadi pelengkap berbagai komoditas sayuran dan buah yang sangat dominan diusahakan. Topografi dan lingkungan agroekosistem dataran tinggi Solok sangat mendukung untuk pengembangan usaha tani berbagai jenis sayuran dataran tinggi, sekaligus memenuhi berbagai pasar konsumen yang ada di sekitar Provinsi Sumatra Barat terutama Kota Padang,

maupun beberapa tujuan pemasaran lainnya, seperti ke Batam, Riau, bahkan hingga ke Singapura.

Keindahan alam dan potensi pengembangan produksi hortikultura (lihat Gambar 10.8), perkebunan teh didukung dengan tiga danau yang menghiasi wilayah Kabupaten Solok, memungkinkan menjadi aset destinasi wisata yang cukup menjanjikan sebagai ikon Kabupaten Solok, bahkan Sumatra Barat pada umumnya. Namun demikian, pengembangan pariwisata belum nyata dilakukan oleh para pelaku masyarakat, investor, maupun program pembangunan pemerintah daerah setempat. Keseriusan masyarakat untuk bertani sayuran, seperti bawang merah, kol/kubis, kentang, seledri, cabai, serta jenis sayuran lainnya menjadi penopang utama sumber kehidupan yang diandalkan para petani.

Di tengah pengusahaan komoditas sayuran ”berisiko tinggi”, seperti bawang merah, cabai, kentang, serta berbagai jenis sayuran lainnya, kerusakan lingkungan alam juga tidak bisa tertahankan.



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.8 Potensi pertanian sayuran dataran tinggi di sekitar Danau Kembar dan Perkebunan Teh

Banyak lokasi usaha tani sayuran yang terus merambah lahan yang seharusnya menjadi penyangga sumber-sumber mata air, keseimbangan habitat sekaligus ketahanan fungsi hutan yang bisa mengurangi risiko bencana longsor, banjir, serta gangguan lam lainnya. Kebutuhan lahan dan tuntutan bisnis sayuran berisiko tinggi menjadi salah satu alasan bahwa kebutuhan lahan usaha pertanian bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Solok mendorong lokasi kegiatan usaha tani hingga ke puncak bukit, lereng gunung, hingga kawasan perhutanan. Perkembangan prasarana dan pendukung akomodasi pariwisata juga mulai mengancam potensi lahan-lahan pertanian yang kemudian menjelma menjadi resort, hotel, *homestay*, vila, serta fasilitas lainnya yang justru berkembang di lahan pertanian potensial yang mengejar "pemandangan alam" sebagai nilai jual kepada calon wisatawan sasaran pengelola.

Di antara hingar-bingar perusahaan berbagai jenis komoditas sayuran bernilai tinggi dan bermodal besar, ada satu potensi terpendam yang bisa didorong menjadi sumber penghasilan keluarga petani dan menjanjikan, seperti komoditas terong belanda atau masyarakat Solok menyebutnya sebagai terong virus. Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa terong belanda pernah melalui masa keemasan pada jamannya bersama komoditas markisa solok (Gambar 10.9), sebagai dua komoditas khas Kabupaten Solok atas buah tangan yang bisa dibawa para perantau atau pelancong yang sempat berkunjung ke lokasi wilayah Solok. Walaupun masih bisa ditemui di beberapa gerai pinggir jalan, produksi markisa solok sudah berkurang kualitas buah yang dihasilkannya.

Senasib dengan saudara kembarnya ini, terong belanda (lihat Gambar 10.9) juga hilang tertelan perkembangan jaman. Keberadaan dan penampilan terong belanda untuk beberapa waktu, tidak terbatas hanya sebagai tanaman pagar petani bahkan seolah para petani sudah melupakannya. Akhirnya, jumlah produksi, perhatian, dan pengusahaannya juga lambat laun terabaikan petani juga konsumen, sekalipun kondisi alam dan agroekosistem habitatnya masih sangat mendukung. Persaingan nilai keuntungan dan orientasi usaha



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.9 Terong Belanda dan Markisa Solok

terhadap beberapa komoditas sayuran bernilai tinggi, menjadikan komoditas terong belanda tersisih dari lahan utama menjadi tanaman pagar atau tumbuh 2–3 pohon sebagai penghias halaman pekarangan rumah. Nilai ekonomi lahan untuk tanaman terong belanda pada akhirnya tergantikan untuk tanaman sayuran monokultur bawang merah sekaligus telah menjadi ikon baru dataran tinggi Solok di sektor produksi pertanian hingga tersalurkan di berbagai pasar domestik hingga antar pulau.

Penantian panjang komoditas terong belanda untuk mendapatkan perhatian petani dan masyarakat Solok terkuak pada saat Sensus Pertanian 2023 dilakukan, sekalipun tidak mudah untuk mendapatkan data dan informasi penting yang menggiring peminat informasi memahami dan tertarik dengan komoditas ini. Tidak ada data tercatat dalam statistik nasional, lokal, hingga data lokasi paling bawah sekalipun. Solok dalam angka berbagai tahun juga tidak memberikan pembimbingan untuk memperoleh data dan keberadaan terong belanda, termasuk data yang seharusnya bisa diperoleh dari lembaga terkait kegiatan pertanian, petani berikut dengan komoditas yang diusahakannya. Keterbatasan informasi dan data ini rupanya menjadikan keberadaan komoditas ini menjadi tambah tenggelam dari tabel-tabel statistik komoditas prioritas daerah yang dimunculkan secara statis.

Perhatian terhadap nasib dan keberadaan komoditas terong belanda di wilayah kabupaten Solok menjadi terbuka bagi lembaga pencacah, pelaku pencacah, hingga orang awam terhadap komoditas eksotis terong belanda ini. Gestur dan rasa kaget terlihat dari sikap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

orang yang baru mengetahui dan mengenal komoditas ini setelah digali dengan kegiatan penugasan KSDK dan Sensus Pertanian 2023 ini. Banyak pertanyaan dan rasa penasaran yang terlontarkan untuk mengetahui lebih banyak jati diri komoditas terong belanda ini dan menuntut dilakukan elaborasi komprehensif tentang profil dengan kemasan yang jauh bisa lebih menarik. Langkah ini untuk memperkenalkan sekaligus mendorong bangkitnya perhatian masyarakat petani khususnya untuk membuktikan eksistensi terong belanda yang selama ini terabaikan ”antara ada dan tiada karena tersekat dengan data”. Sensus Pertanian 2023 menjadi momentum untuk mengawali pemunculan data dan penyediaannya, berikut narasinya yang menarik untuk konsumsi para pembaca dan pemerhati komoditas ini hingga tindak lanjut dan langkah pengembangannya. Lebih dari itu menjadi alternatif penyokong sumber penghasilan para petani dan masyarakat yang mengusahakannya tatkala usaha komoditas sayuran ”bermodal besar” mengalami fluktuasi harga, hingga memberikan kerugian nyata besarnya bagi para petani dan masyarakat yang mengusahakannya.

F. Bergerak Tanpa Maju : Mengenal Permasalahan Hulu-Hilir Sektor Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi andalan dan sumber mata pencaharian masyarakat perdesaan di wilayah Kabupaten Solok. Potensi pertanian wilayah Kabupaten Solok yang begitu besar juga telah menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan perekonomian daerah dan telah memberikan kontribusi cukup besar bagi penguatan struktur perekonomian masyarakat maupun terhadap total PDRB pemerintah Kabupaten Solok. Selama tahun 2018 hingga 2022, tercatat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Solok berdasarkan harga berlaku, rata-rata mencapai antara 33,31–36,29 persen dan 35,9–36,7 persen berdasarkan harga konstan.

Berdasarkan potensinya, kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Solok meliputi berbagai subsektor kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura buah dan sayur, serta subsektor

peternakan. Selain kegiatan usaha pertanian, masyarakat di wilayah ini juga melakukan usaha pada pengelolaan perikanan danau serta kegiatan usaha lainnya. Kegiatan masyarakat dalam usaha tani hortikultura cukup dominan bagi masyarakat di wilayah Danau Kembar maupun Lembah Gumanti. Berbagai jenis sayuran seperti bawang merah, kol atau kubis, cabai, kentang, wortel, serta beberapa jenis sayuran dataran tinggi lainnya diusahakan para petani di wilayah ini. Sementara itu, untuk komoditas buah, terdapat markisa, alpukat, terong belanda, serta beberapa jenis buah lainnya.

Terdapat beberapa komoditas sayuran yang selama ini menjadi prioritas diusahakan masyarakat petani di wilayah ini. Komoditas sayuran dataran tinggi yang juga termasuk kelompok bernilai tinggi, meliputi bawang merah, cabai, kol, serta kentang. Selain bernilai tinggi, bawang merah, kol, serta cabai juga merupakan komoditas yang memiliki risiko tinggi, baik pada proses produksi maupun saat terjadinya fluktuasi harga hingga harga ekstrim rendah.

Berkembangnya usaha tani bawang merah beberapa tahun terakhir menjadikan Kabupaten Solok, terutama Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Lembah Gumanti sebagai sentra pertanian bawang merah yang cukup luas dibandingkan lokasi lainnya (Nofirman, 2019). Bawang merah telah menggantikan beberapa komoditas sayuran lainnya yang juga menjadi potensi sumber pendapatan yang cukup bernilai ekonomi tinggi, seperti kol/kubis, kentang, maupun cabai keriting. Intensitas pertanaman bawang merah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan dominan diusahakan sehingga dibutuhkan ketersediaan lahan untuk ekstensifikasi usaha tani yang lebih luas, mendukung semangat petani menanam bawang merah.

Pengusahaan bawang merah (Gambar 10.10) kian masif dan memberikan kontribusi besar bagi identitas kabupaten Solok, berikut dua kecamatan sentra tersebut sebagai penghasil bawang merah terbesar di provinsi Sumatra Barat. Tidak hanya itu, pengusahaan bawang merah secara masif dilakukan para petani bermodal besar telah menyebabkan persaingan terhadap luas penggunaan lahan dengan komoditas sayuran, serta komoditas lainnya yang juga po-



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.10 Pengusahaan Komoditas Bawang Merah

tensial diusahakan. Pada akhirnya, beberapa kegiatan usaha tani komoditas lain mulai tersingkirkan, dan kemudian komoditas bawang merah menjadi ikon atau simbol keberhasilan pertanian dataran tinggi Kabupaten Solok secara nasional.

Dinamika usaha tani komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi tidak hanya menjanjikan keuntungan bagi para pelaku usaha taninya, namun dibalik itu juga telah menyisakan ”bom waktu” untuk keberlanjutan usaha pertanian secara lebih luas. Dampak usaha tani bawang merah secara intensif telah menyebabkan persaingan penggunaan lahan yang cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan luas lahan usaha tani bawang merah, para petani, dan pelaku usaha pertanian membuka lahan-lahan di lereng gunung hingga mencapai puncak bukit. Masuk kawasan resapan dan sumber mata air, serta hutan yang ada di sekitar wilayahnya untuk diusahakan komoditas sayuran dataran tinggi, khususnya untuk menanam bawang merah (Gambar 10.11).

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.11 Produksi Komoditas Bawang Merah Kabupaten Solok

Kemudian, intensitas pemeliharaan bawang merah juga telah menggunakan pupuk kimia serta berbagai jenis pestisida, insektisida, fungisida, dan obat-obatan lain secara intensif, bahkan masif dengan dosis yang cukup tinggi. Penggunaan pupuk kimia maupun pestisida yang masif telah berdampak pada tingginya residu lahan maupun kebersihan udara di lingkungan kebun maupun terhadap kesehatan warga di sekitar pengusaha tanaman bawang merah. Lambat laun tingkat penggunaan pestisida dan kondisi ini juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat serta jaminan keamanan dan kesehatan produk bawang yang dihasilkan, jika penerapan GAP dilaksanakan dengan ketat sebagai persyaratan pemasaran hingga konsumsi produk bawang merah.

Tidak hanya menimbulkan permasalahan di hulu, produksi, dan hasil produksi bawang merah juga sangat rentan dengan perubahan cuaca/iklim. Tingkat curah hujan yang tinggi akan berdampak pada pertumbuhan dan produksi bawang merah yang dihasilkan. Tidak jarang para petani bawang merah mengalami kerugian akibat

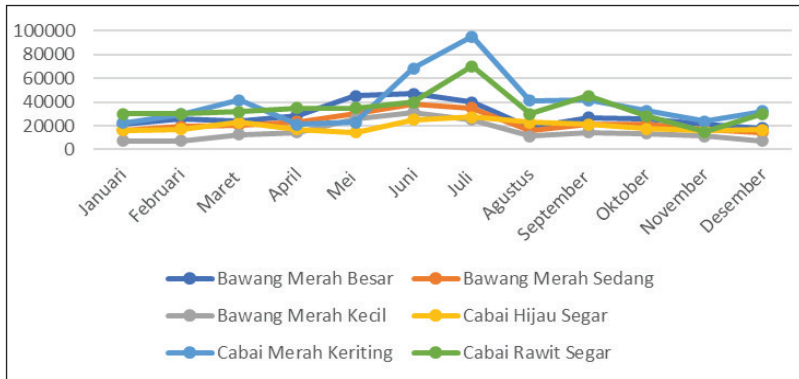
perubahan iklim ini. Kerugian petani bawang merah tidak hanya berdasarkan pada jumlah dan kualitas produk, akan tetapi juga dihadapkan pada permasalahan terjadinya fluktuasi harga jual bawang merah di pasaran, baik di pasar lokal maupun pasar di tujuan akhir penjualan. Dinamika fluktuasi harga jual bawang merah termasuk komoditas sayuran lainnya menjadi permasalahan di hilir bahkan terjadi hingga ekstrem rendah, sehingga merugikan para petani, terutama pada saat terjadi panen raya. Dengan demikian, komoditas sayuran bernilai tinggi juga mempunyai risiko cukup tinggi dibalik hitungan keuntungan yang besar diperoleh petaninya. Dinamika dan fluktuasi harga komoditas sayuran utama dari Kabupaten Solok pada tahun 2022 digambarkan seperti pada Gambar 10.12 dan pada Tabel 10.4.

Sementara itu, di antara perlombaan membuka lahan garapan baru dan menanam komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi ini, terdapat beberapa petani yang secara senyap dan terbatas mengusahakan komoditas terong belanda di sebagian lahan usaha tani, di pe-

Tabel 10.4 Rata-rata harga Bulanan Beberapa Komoditas Sayuran per Kg di Tingkat Produsen di Kabupaten Solok 2022

Komoditas	Bawang Merah Besar	Bawang Merah Sedang	Bawang Merah Kecil	Cabai Hijau Segar	Cabai Merah Keriting	Cabai Rawit Segar
Januari	21.381,42	16.120,44	7230,43	16.118,55	22.595,03	30.000
Februari	25.858,66	19.117,48	7368,06	17.137,20	29.579,41	30.000
Maret	23.967,82	20.790,24	12.493,33	22.837,17	41.406,60	32.000
April	28.651,81	23.482,69	14.244,02	16.870,24	21.229,80	35.000
Mei	45.302,49	30.480,37	26.011,83	14.564,75	23.010,61	35.000
Juni	47.010,40	38.505,28	31.521,53	25.226,89	68.163,25	40.000
Juli	39.993,75	34.756,84	25.000,00	27.108,06	94.947,31	70.000
Agustus	18.986,83	16.010,31	11.057,55	23.074,82	40.932,95	30.000
September	26.832,82	21.141,94	14.301,29	21.094,36	41.529,32	45.000
Oktober	25.815,61	21.090,76	13.325,13	17.656,99	32.737,21	28.000
November	21.020,14	16.533,58	11.052,09	15.552,10	23.853,16	15.000
Desember	18.150,37	14.596,52	7.230,43	16.630,88	32.141,59	30.000

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2023 (BPS Kabupaten Solok, 2023)



Sumber: BPS Kabupaten Solok (2023)

Gambar 10.12 Dinamika Harga beberapa Komoditas Sayuran Utama Kabupaten Solok, 2022

karangan rumah, di pagar batas lahan maupun di lahan yang tidak terolah lainnya. Komoditas terong belanda belum diusahakan secara intensif sebagai sumber pendapatan utama keluarga petani, seperti komoditas sayuran lainnya. Hanya beberapa petani yang menanam terong belanda sebagai alternatif kegiatan dan pemanfaatan lahan yang dimiliki petani.

Potensi usaha tani terong belanda didukung dengan kondisi agroekologi dan kesesuaian wilayah sebagai habitat pertanaman terong belanda dan secara periodik memberikan keuntungan bagi pendapatan keluarga petani yang mengusahakannya. Bibit terong belanda tersedia di penangkar benih/bibit atau bisa menggunakan bibit sendiri dengan cara stek atau membuat persemaian sendiri. Pola pertanaman, kondisi lahan berikut pemeliharaan tanaman tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan biaya input yang besar/tinggi. Sementara masa waktu panen dan pemetikan buah, rata-rata dapat dilakukan setiap 15 hari sekali dan bisa langsung dijual ke pedagang pengepul, dengan harga yang cukup sesuai dan menjanjikan serta dengan pembayaran secara kontan.

Proses pemetikan hingga pemasaran juga relatif mudah. Selama ini kegiatan penanaman komoditas terong belanda juga tidak ada ken-

dala. Hanya saja belum banyak para petani yang tertarik mengusahakannya dalam skala ekonomi dan intensif seperti komoditas sayuran lainnya. Hal ini karena nilai ekonomi lahan lebih difokuskan untuk pertanaman bawang merah, kol/kubis, kentang, cabai, serta usaha tani jenis sayuran lainnya dibandingkan untuk penanaman terong belanda. Perhitungan nilai komersial serta keuntungan dari komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi menjadi pilihan para petani untuk mengusahakannya.

Dari kasus komoditas sayuran utama yang diuraikan di atas, berikut ini secara umum kondisi pertanian di wilayah Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti, maupun permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Solok berdasarkan permasalahan di hulu.

- 1) Persaingan penggunaan lahan pertanian untuk usaha penanaman komoditas sayur bernilai ekonomi tinggi.
- 2) Ekstensifikasi penggunaan lahan di lokasi resapan air dan lingkungan hutan yang selama ini menjadi sumber mata air, menjaga erosi secara perlahan akan menimbulkan terjadinya kerusakan sumber daya alam dan hutan.
- 3) Biaya input usaha tani tinggi.
- 4) Rentan terhadap ancaman perubahan iklim/cuaca dan OPT.
- 5) Usaha monokultur komoditas menimbulkan peningkatan serangan hama dan OPT.
- 6) Risiko gagal panen.
- 7) Penggunaan pupuk kimia dan intensitas penyemprotan pestisida (herbisida, insektisida, fungisida, dan obat-obatan lainnya) secara masif, menyebabkan pencemaran lahan, residu lahan, dan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- 8) Permasalahan terbatasnya tenaga kerja tanam hingga panen, terutama pada saat menjelang panen raya menyebabkan waktu panen terganggu, kerusakan produksi serta biaya tinggi.
- 9) Permasalahan permodalan.
- 10) Terbatasnya inovasi terkait usaha komoditas pertanian.

Sementara itu, permasalahan di hilir terhadap usaha pertanian, khususnya komoditas hortikultura sayuran, terkait dengan 1) proses pascapanen dan pengelolaan produk; 2) fluktuasi produksi dan pasokan; 3) dinamika dan fluktuasi harga penjualan produk hingga terjadi harga ekstrim rendah; 4) persaingan pasar tujuan akibat terjadinya panen raya komoditas yang sama; 5) kerusakan produk akibat penanganan pascapanen, pengangkutan, dan distribusi maupun tidak tahan dalam waktu simpan produk terlalu lama.

G. Kegagalan Petani dalam Merespon Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian di Kabupaten Solok selain di dominasi perusahaan komoditas hortikultura sayuran dataran tinggi, juga berdasarkan geografis wilayah terdapat komunitas petani yang juga mengusahakan tanaman pangan lainnya, seperti padi, palawija, serta jenis tanaman lainnya. Sebagian masyarakat juga menanam buah-buahan, selain terdapat perkebunan teh rakyat serta potensi hutan. Usaha di bidang perikanan juga dikembangkan, didukung potensi daerah dengan adanya 3–4 danau vulkanik yang terdapat di wilayah Kabupaten Solok, khususnya berada di wilayah sentra usaha tani sayuran kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti. Potensi danau digunakan untuk kegiatan perikanan selain terdapat beberapa usaha perikanan kolam masyarakat. Kondisi geografis, topografi, dan keindahan alam pegunungan, dilengkapi danau kembar di atas dan di bawah, serta satu danau lainnya menjadi sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, agrowisata edukasi di wilayah Kabupaten Solok dengan dukungan potensi sumber daya alam yang menjanjikan keindahan.

Berawal dari potensi sumber daya alam, kegiatan masyarakat kemudian penyusunan perencanaan pembangunan daerah terhadap dukungan program pembangunan di wilayah kabupaten Solok, pembangunan sektor pertanian mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah kabupaten setempat, dinas instansi, hingga kementerian terkait. Dukungan pengembangan komoditas kentang, pengelolaan

produk dan pemasaran komoditas teh, pengembangan usaha tani bawang merah, perbaikan lingkungan usaha tani, perbenihan, penyediaan sarana produksi dan pembiayaan, dan kerja sama pemasaran hasil telah diinisiasi serta dilakukan pemerintah pengembangan pariwisata agro secara bertahap, ditata pengembangannya menjadi program daerah.

Penyediaan modal usaha tani melalui program KUR dan jasa perlindungan petani melalui program asuransi pertanian (AUTP/AUTS) serta program lainnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Program Kementan disalurkan di beberapa sentra produksi pertanian di wilayah Kabupaten Solok, dengan harapan pengembangan sektor pertanian tetap terjaga dan berkelanjutan. Program yang sedang difokuskan Kementerian Pertanian mendukung program pertanian Kabupaten Solok, adalah dengan peningkatan potensi dan pengembangan sentra komoditas bawang merah. Hal ini mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah daerah, regional Sumatra, hingga nasional. Hal ini karena produksi bawang merah di wilayah sentra kabupaten Solok tidak terkendala dengan musim dan bisa diusahakan hingga 3–4 kali tanam dalam setahun. Dengan potensi ini, wilayah Kabupaten Solok menjadi sumber produksi bawang merah andalan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat, jika kondisi sentra bawang merah di lokasi lain mengalami gagal panen dan produksi terbatas.

Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mengkorporasikan industri pertanian. Hal ini telah diperkuat dari terbitnya Permentan No. 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani. Lokasi korporasi khususnya untuk komoditas bawang merah yang didorong dan fokus di tahun 2019 adalah Solok dan Malang. Kawasan aneka bawang di Solok sangat prospektif dikembangkan menjadi kawasan yang berbasis korporasi (Agustinus & Sutianto, 2018). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sangat mendukung penuh kawasan pengembangan bawang merah di Solok yang luas panennya mencapai 8.000 hektar. Kebijakan lain memperkuat hilirisasi dengan mendorong industri pengolahan pascapanen seperti

industri pasta, minyak bawang merah, dan bawang goreng yang konsisten secara ketat mengawal manajemen tanam sehingga stabilisasi pasokan dan harga aman. Lebih jauh terkait program menjadikan Solok sebagai lumbung bawang merah dan bawang putih se-Sumatra, tentunya juga akan diimplementasikan dengan pendekatan kawasan yang berbasis korporasi.

Sementara itu, program-program yang berkaitan dengan pengembangan komoditas terong belanda tidak ada sampai saat ini. Petani dengan pengalaman dan kemampuan sendiri mengusahakan komoditas ini sebagai alternatif tambahan sumber pendapatan bagi keluarga petani. Dengan demikian, sekalipun komoditas terong belanda mempunyai potensi pasar dan kesesuaian geografis di wilayah ini, tetapi faktanya tidak termasuk komoditas yang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya. Pertanaman komoditas terong belanda hanya diusahakan pada lahan terbatas, di pekarangan rumah ataupun dipagar pembatas lahan pertanian dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, swasta, dan para pihak untuk pengembangan usaha tani terong belanda lebih lanjut, seperti pengembangan sentra terong belanda yang dilakukan di daerah lain.

H. Produk, Mata Rantai, dan Pengelolaan Pasca Panen: Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Hasil penggalian dan pencatatan data dan informasi dari petani responden yang mengusahakan komoditas terong belanda di wilayah Kecamatan Danau Kembar, bahwa jumlah petani di lokasi kegiatan pendampingan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Solok meliputi kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumati yang mengusahakan terong belanda jumlahnya masih sangat terbatas. Pengusahaan komoditas ini masih dilakukan di lahan terbatas dengan jumlah pohon yang ditanam juga relatif sedikit. Tiga responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman dan informasi yang menarik. Dari ketiganya diperoleh gambaran bahwa responden pertama telah mengusahakan terong belanda di tiga lokasi lahan pertanian secara penuh, dan meng-



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.13 Kebun Terong Belanda Responden 1

gantikan beberapa komoditas sayuran yang diusahakan sebelumnya (Gambar 10.13).

Dasar pemikiran awal petani melakukan penanaman terong belanda, terkait dengan upaya menghindari penggunaan pupuk kimia maupun obat/pestisida kimia pabrikan. Menurut petani responden, penggunaan pestisida dan pupuk kimia buatan pabrikan sudah melebihi ambang batas residu di sebagian besar lahan para petani. Dengan usaha pertanaman terong belanda, selain menjadi alternatif tanaman sumber pendapatan keluarga juga diharapkan dapat mengurangi residu tanah dari penggunaan obat dan pupuk kimia dan tanah supaya tidak beracun.

Tanaman terong belanda di tiga lokasi kebun petani rata-rata sudah mencapai umur satu tahun. Jumlah tanaman terong belanda yang diusahakan di tiga lokasi mencapai 1.400 pohon dengan jarak tanam rata-rata 1,5 meter. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tanaman sudah berbuah sekalipun jumlah buah dan pertumbuhannya berbeda di antara pohon yang ada. Artinya, ada yang sudah berbuah (dalam jumlah banyak dan sedikit), selain masih ada pohon yang belum berbuah atau masih berbunga.

Pembelian bibit dilakukan dalam bentuk bibit yang sudah jadi di *polybag* dengan harga Rp2.500 untuk setiap *polybag*. Pembelian dilakukan dari petani yang selama ini telah menanam terong belanda dan menyediakan bibit untuk dijual ke masyarakat, pasca-penanaman, kemudian masuk pada tahapan proses pemeliharaan. Pemeliharaan

tanaman terong belanda tidak terlalu rumit, begitu pun untuk perbanyakkan tanaman bisa dilakukan dengan semai biji sendiri atau dengan cara stek batang, kemudian ditanam lalu tumbuh.

Pemupukan tanaman dilakukan dengan lebih menggunakan pupuk kandang/berak dan pupuk hijau. Penggunaan pupuk diberikan pada tanaman memasuki umur lima bulan dari sejak penanaman bibit. Pemupukan dilakukan dua kali, masing-masing setiap pemupukan menggunakan tiga karung pupuk kandang berukuran berat 50 kg untuk setiap karung dengan biaya Rp140.000 untuk satu kali pemupukan. Proses persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen tidak menggunakan tenaga kerja upahan, tetapi dilakukan oleh petani dan keluarganya.

Frekuensi panen dari tanaman yang berumur 1 tahun dan sudah berbuah dilakukan antara setiap 15–20 hari berdasarkan siklus kematangan buah dengan warna merah. Produksi pada setiap kali panen rata-rata mencapai 50 kg. Diperkirakan dengan perkembangan umur tanaman dan proses peningkatan bunga hingga buah, dalam satu tahun bisa mencapai 100–300 kg dari dua lokasi/tempat kebun. Berdasarkan perhitungan pada dua lokasi kebun yang umur tanaman relatif lama atau lebih setahun terdapat 1.200 pohon bisa mencapai produksi 300 kg.

Pemasaran produksi terong belanda sangat mudah karena di wilayah ini sudah ada tauke yang menampung hasil produksi terong belanda dan selanjutnya hasil pembelian dari petani oleh tauke besar dikirim/dipasarkan ke Pekanbaru serta Batam. Harga pembelian dari tauke/pedagang pengumpul kepada petani, antara Rp8.000–9.000 per kg. Tauke membeli produksi buah dari petani dilakukan secara kas/kontan.

Selanjutnya, informasi awal dari petani responden kedua, bahwa di daerah Alahan Panjang juga baru satu orang petani yang menanam terong belanda. Petani responden menanam terong belanda merupakan "reinkarnasi" dari pengalaman keluarga yang sebelumnya/

beberapa tahun yang lalu juga pernah mengusahakan komoditas terong belanda. Menurut responden, riwayat penanaman terong belanda merupakan penerus dari orang tua yang kurang lebih 15 tahun yang lalu pernah menanam komoditas ini.

Responden telah mengusahakan menanam terong belanda dengan sistem kebun pada luas lahan terbatas di belakang rumah tempat tinggal responden, berbatasan dengan pemukiman penduduk. Terong belanda di tanam secara monokultur dengan perawatan seadanya dengan pemberian input produksi yang sangat terbatas. Proses pengolahan lahan hanya sekali pada saat akan melakukan penanaman, dilakukan dengan tenaga sendiri dan tidak diupahkan. Kemudian, kegiatan tanam juga dilakukan sendiri disertai dengan kegiatan pemupukan tanaman. Pemupukan dilakukan seadanya, belum mengikuti kebutuhan tanaman yang direkomendasikan dalam aturan pemupukan biasanya. Pupuk yang digunakan NPK 15 kg, urea 3 kg, serta pupuk kandang. Biaya untuk pembelian pupuk NPK dan urea hanya Rp50.000 dan untuk pupuk kandang sebanyak tiga karung, masing-masing seharga Rp18.000 per karung. Sangat minimalis dan terbatas dalam proses pemeliharaan/pemupukan yang dilakukan petani, sehingga pertumbuhan sebagian tanaman mengalami keterlambatan, bahkan tidak berkembang dengan baik dan terlihat sebagian tanaman menuju kematian.

Tanaman terong belanda yang diusahakan sekitar 100 batang/pohon dengan jarak tanam 1 meter dan 1/3 pohon atau sekitar 25 pohon sudah berumur 1 tahun dan sudah berbuah. Pemenuhan bibit diperoleh dari biji serta distek. Meskipun demikian, untuk kebutuhan bibit di sekitar responden juga terdapat penjual benih terong belanda. Jika bibit diperoleh dari pembelian harganya sekitar Rp200 per pohon. Dari beberapa pohon yang sudah berbuah terakhir, pada sehari sebelum wawancara diperoleh hasil 12 kg dan dijual ke tauke/pedagang pengumpul setempat dengan harga Rp8.000 per kg. Jika dihitung rata-rata panen dalam waktu sebulan sekali, bisa diperoleh sekitar 30 kg dan harga penjualan tertinggi Rp9.000/kg. Penjualan terong belanda lebih mudah karena ada pedagang pengumpul yang menampung hasil

panen terong belanda di sekitar responden untuk dikirim hingga ke Batam. Jika di rata-rata produksi dari satu pohon yang sudah berbuah baru mencapai dua kg per pohon, terutama yang relatif lebat/banyak buahnya hanya pada beberapa pohon induknya saja.

Responden menjelaskan bahwa tanaman terong belanda sudah ada sejak dulu, tetapi dalam perkembangannya tidak lagi banyak diusahakan/ditanam oleh para petani di Alahan Panjang (lihat Gambar 10.14). Beberapa alasan terkait dengan hilangnya produk terong belanda dari daerah ini karena keterbatasan lahan untuk mengusahakannya dalam skala kebun. Lahan-lahan petani lebih dominan diusahakan untuk komoditas sayuran potensial yang bernilai tinggi dan bermodal besar. Di lokasi Alahan Panjang, komoditas sayuran yang menjadi primadona dan banyak diusahakan di antaranya bawang merah, kentang, cabai keriting, kol/kubis, wortel, seledri, selada, dan caisim, serta beberapa jenis sayuran dataran tinggi lainnya. Dengan kondisi ini, masyarakat petani sayuran luput untuk mengusahakan komoditas terong belanda dalam satu hamparan kebun. Keterbatasan ini mengingat tanaman terong belanda termasuk pada kelompok tanaman buah tahunan, kemudian diusahakan secara monokultur, sehingga tidak bisa dimanfaatkan bersamaan dengan jenis tanaman sayuran lain secara tumpang sari.

Secara ekonomis, para petani sudah berhitung untung dan rugi hingga mengambil keputusan untuk memanfaatkan lahan pertaniannya dengan berbagai jenis sayuran dibandingkan dengan terong belanda. Masyarakat setempat dihadapkan pada keterbatasan lahan dan pilihan komoditas yang lebih komersial dan sudah lama diusaha-



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.14 Kebun Terong Belanda Responden 2

kan petani di wilayah ini. Pada intinya responden menjelaskan bahwa penanaman terong belanda tidak menjadi prioritas petani karena tanaman terong belanda diusahakan secara monokultur dan sebagai tanaman tahunan, sehingga tidak bisa ditanam bersamaan dengan komoditas sayuran lainnya. Hal ini menjadi pilihan rasional petani untuk mengusahakan berbagai jenis sayuran terkait dengan hasil produksi dan pendapatan yang diperoleh petani/rumah tangga tani, jauh lebih besar dibandingkan dengan mengusahakan terong belanda.

Secara khusus pemasaran produk terong belanda di wilayah ini termasuk sangat mudah karena ada tauke/pengumpul/penampung yang membeli/menerima hasil produksi terong belanda. Harga terong belanda diterima tauke Rp8.000 sampai dengan Rp9.000 per kg. Dengan demikian, prospek pemasaran untuk komoditas terong belanda sangat terbuka luas, sementara produksinya yang ada sampai saat ini sangat terbatas. Termasuk jumlah petani yang tertarik dan mengusahakan komoditas terong belanda di wilayah responden masih terbatas hanya pada satu orang. Selain menanam terong belanda, responden juga mengusahakan tanaman kentang, wortel, dan bawang merah.

Responden berikutnya menjelaskan bahwa tanaman terong belanda (Gambar 10.15) hanya ditanam di sela-sela pinggir lahan, pematang pembatas dengan kebun, serta di sebagian lahan yang dekat rumah kebun/saung atau kandang ternak. Sebagian lagi ditanam di sekitar pekarangan rumah dan sebagai tanaman pagar. Jumlah tanaman yang tumbuh di sekitar kandang ternak kira-kira mencapai 15–20 pohon. Pertumbuhan tanaman yang berlokasi di samping kandang ternak dan lahan sisa dekat saung semuanya cukup bagus dan sangat subur karena senantiasa mendapatkan pemupukan dari kotoran ternak. Sekalipun umur tanaman terong belanda baru mencapai sembilan bulan tetapi sudah hampir 10 kali dipanen. Tanaman terong belanda responden pada umur lima bulan sudah pernah dipanen. Jumlah pohon terong belanda yang ditanam saat ini mencapai 100 pohon, 50 pohon di antaranya sudah berbuah dan sudah 10 kali petik



Foto: Iwan (2023)

Gambar 10.15 Kebun Terong Belanda Responden 3

dengan rata-rata sekali petik mencapai 12 kg atau rata-rata mencapai produksi 5 kg/batang atau per pohon. Jarak waktu pemetikan atau panen berselang setiap 15–20 hari dan biasanya sudah siap petik.

Sistem dan pemasaran hasil panen terong belanda relatif mudah karena sudah ada pedagang pengumpul/tauke yang menampung atau sebagai pembeli hasil panen petani terong belanda dengan harga Rp7.000 per kg, untuk selanjutnya terong belanda dari tauke dikirimkan ke Padang. Selain dijual ke tauke, petani juga bisa menjual hasil petikan terong belanda ke pasar setempat di Alahan Panjang atau pasar kecamatan yang ada. Harga penjualan terong belanda ke pasar antara Rp9.000–10.000 per kg, relatif lebih tinggi dari harga yang diterima dari penjualan ke tauke. Biasanya mata rantai pembelian dari pasar kemudian di jual oleh pedagang eceran ke konsumen seharga Rp12.000–20.000 per kg.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hanya saja, jumlah produksi terong belanda dari daerah ini masih sedikit dan terbatas jumlahnya. Responden juga pernah mengajak petani lain untuk secara bersama-sama mengusahakan komoditas ini agar menjadi satu sumber usaha bersama para petani disekitarnya. Namun, kendala lahan yang ada sangat terbatas dan bersaing dengan pertanaman aneka komoditas sayuran yang beragam/heterokultur dan bernilai komersial tinggi dibandingkan dengan terong belanda yang hanya ditanam dengan pola monokultur, dan tidak bisa ditanam dengan sisipan tanaman sayuran lainnya. Sehingga, secara ekonomis para petani di daerah ini masih mengutamakan usaha tani komoditas sayuran utama seperti bawang merah, cabai keriting, kentang, seledri, bawang daun, dan jenis sayuran lainnya, sekalipun berisiko besar dan juga diperlukan modal yang cukup besar pada setiap pengusahaannya. Responden juga membudidayakan buah alpukat, stroberi, dan tanaman sayuran lainnya sebagai tanaman pokok yang diusahakan.

Berdasarkan informasi responden yang masih melakukan proses budi daya dan pengelolaan usaha pertanian komoditas terong belanda, diperoleh gambaran bahwa selama kegiatan usaha tani berlangsung relatif tidak membutuhkan perlakuan khusus dan spesifik. Secara teknis, usaha tani komoditas terong belanda relatif sangat mudah dibandingkan dengan usaha tani jenis sayuran lainnya. Di samping skala lahan usaha terbatas, jumlah pertanaman serta pemeliharaan juga sangat terbatas, sehingga tidak banyak melibatkan aktivitas anggota rumah tangga petani secara intensif. Secara spesifik keterlibatan petani khususnya kepala keluarga, ada pada proses pengolahan lahan dan penanaman bibit terong belanda. Namun, terkadang juga dibantu istri atau anak-anaknya, jika tanam benih terong belanda yang diusahakan relatif banyak jumlahnya. Proses pemeliharaan tanaman awal hingga berbuah juga dilakukan bersama, atau hanya oleh kepala keluarga disela-sela waktu mereka mengusahakan jenis komoditas sayuran utama lainnya. Tidak terlihat secara spesifik peran perempuan dalam usaha tani komoditas terong belanda dengan skala usaha yang terbatas, namun pada saat panen dan penjualan ke tauke atau pasar biasanya/cenderung dilakukan oleh kaum perempuan. Sementara

itu, kepala keluarga dan anak laki-lakinya yang dewasa mengerjakan kegiatan usaha pertanian di lahan komoditas pertanian lainnya.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Tanah Leluhur

Petani komoditas sayuran dataran tinggi di Kabupaten Solok tersekat di antara berbagai periode masa kejayaan. Dinamika kegiatan pertanian dan komoditas yang diusahakan, berada di antara para petani yang mengelola kegiatan usaha pertanian dan lainnya yang dilakukan sebatas kemampuan sebagai buruh usaha tani atau penyewa lahan usaha tani. Kepemilikan lahan untuk pengusahaan kegiatan pertanian dari masing-masing keluarga petani, tampaknya terus mengalami degradasi terhadap luasan lahan per keluarga petani maupun kualitas tanah. Selama ini, ketersediaan lahan yang subur menjadi unsur penting mendukung mata pencaharian utama keluarga tani dan sumber penghidupan bagi sebagian besar petani serta masyarakat Solok secara luas.

Dalam tulisan "Mengembalikan Kejayaan Kentang Kabupaten Solok", (Andries, 2021) tersirat sejarah bahwa Kabupaten Solok pernah menjadi sentra penghasil kentang unggulan di Sumatra Barat. Produksinya yang melimpah mampu dijual hingga ke tanah Jawa. Tetapi itu terjadi beberapa tahun lalu. Kini produksi kentang meredup dan tidak banyak petani yang bertanam kentang, dengan alasan harga jual rendah hingga kelangkaan benih. Hikayat komoditas kentang yang sejak awal menjadi komoditas unggulan dan memberikan banyak dukungan bagi perkembangan ekonomi masyarakat petani di wilayah Kabupaten Solok. Lambat laun kejayaan komoditas kentang di Solok telah terkikis dengan pertanaman komoditas bawang merah yang secara cepat menjelma dan menjadi perhatian masyarakat petani di wilayah ini. Kemudian, secara masif berkembang menjadi kekuatan usaha tani komoditas baru sekaligus menjadi sumber kegiatan pokok para petani untuk mengusahakannya, mulai dari skala kecil-menengah hingga skala usaha yang lebih luas. Selain komoditas kentang, nasib komoditas teh sebagai penghasil produk dan sumber kehidupan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagian petani yang mengusahakannya juga terus mengalami penurunan, dan secara perlahan terabaikan (Riani, 2023). Para petani yang mengusahakan komoditas teh kemudian bersama sebagian besar petani lainnya beralih dengan mengusahakan bawang merah. Usaha tani yang baru ini, diharapkan menjadi penopang dan sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Keragaman usaha tani komoditas sayuran dataran tinggi juga menjadi motivasi para petani di wilayah Kabupaten Solok. Selain sebagai sumber keragaman penghasilan rumah tangga juga diharapkan menjadi penyangga jika salah satu komoditas sayuran lainnya yang diusahakan mengalami kerugian. Para petani di wilayah potensial usaha komoditas sayuran, selain mengusahakan komoditas bawang merah sebagai komoditas utama juga diimbangi dengan mengusahakan komoditas sayuran lainnya, seperti cabai merah keriting, kol/kubis, wortel, bawang daun, seledri, serta ragam komoditas sayuran lainnya.

Di antara para petani yang mengusahakan komoditas sayuran dataran tinggi ini, ada tiga responden yang mengusahakan komoditas terong belanda (terong virus), sekalipun masih dalam skala luasan tanam yang terbatas. Pertanaman terong belanda belum sepenuhnya diusahakan menjadi tanaman pokok komersial, sekalipun potensi pasar dan kesesuaian geografis sangat mendukung. Terong belanda diusahakan sebatas tanaman pekarangan atau diusahakan dalam luasan kebun tertentu secara monokultur dengan jumlah pohon terbatas. Keterbatasan masyarakat atau petani mengusahakan terong belanda di lahan yang lebih luas, lebih kepada prioritas pengusahaan komoditas. Terong belanda tidak dapat diusahakan secara tumpang sari atau ditanam dengan tanaman lain, tetapi dilakukan secara monokultur dan termasuk tanaman tahunan. Dengan demikian, petani hanya memperoleh hasil hanya dari produk terong belanda saja, tidak ada pendapatan lain dari luas lahan yang diusahakan untuk pertanaman terong belanda.

Para petani juga akan lebih memilih mengusahakan komoditas sayuran yang bernilai tinggi, seperti bawang merah, kol, atau cabai pada lahan utamanya dibandingkan dengan terong belanda. Frekuensi

tanam dan umur panen komoditas bawang merah dan sayuran lainnya relatif lebih singkat, sehingga dalam satu tahun petani bisa mengusahakannya antara 2–3 kali tanam. Pemasaran hasil, nilai dan harga jual produksi bawang merah dan jenis sayuran dataran tinggi lainnya relatif cukup bagus, sehingga menjadi daya tarik bagi para petani untuk mengusahakannya secara intensif dan dalam skala luas.

Terong belanda, sekalipun masih terbatas dalam skala dan jumlah pengusahaannya di wilayah ini, namun berdasarkan informasi responden komoditas ini cukup membantu untuk mendapatkan hasil dan sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga petani. Tersedianya pedagang pengumpul sebagai pembeli sekaligus penampung produksi buah hasil terong belanda, memberikan kemudahan kepada petani dalam pemasaran hasil panennya. Pemeliharaan tanaman terong belanda juga relatif ringan dan biaya yang cukup rendah. Masa panen juga cukup panjang dan berbuah sepanjang musim bersinambung dan tidak berhenti. Potensi ekonomi buah terong belanda relatif cukup menjanjikan karena harga jual buah masih cukup bagus untuk ukuran kualitas buah yang dihasilkan di wilayah ini.

Hanya saja karena ditanam dengan cara monokultur dan umur tanaman relatif lama, maka secara ekonomi kebutuhan dan penggunaan lahan menjadi masalah. Bagi para petani sayuran di wilayah ini, efektivitas penggunaan lahan akan dipertimbangkan untuk mengusahakannya dengan jenis tanaman lain yang bernilai tinggi dan memberikan keuntungan yang besar dibandingkan dengan pertanaman terong belanda. Keputusan ini seperti yang telah dilakukan oleh sebagian besar petani di wilayah ini dengan dominasi tanaman bawang merah yang banyak diusahakan, selain terdapat tanaman kol, wortel, serta sebagian dengan tanam kentang. Beberapa motivasi dan alasan petani untuk melakukan kegiatan usaha tani dan budi daya bawang merah, di antaranya 1) tradisi atau kebiasaan; 2) gambaran pendapatan dengan budi daya bawang merah lebih jelas; 3) biaya produksi bisa lebih ditekan seiring dengan kontinuitas kegiatan budidaya yang dilakukan; 4) perputaran modal cepat; 5) umur bawang merah tidak lama; 6) harga bawang merah lebih

stabil; 7) keunggulan geografis wilayah Danau Kembar dan Lembah Gumanti (Ananda, 2021).

J. Penutup: Kilas Balik Pendataan dalam Sensus Pertanian

Hasil kerja besar dari kegiatan Sensus Pertanian Nasional yang dilakukan oleh BPS sebagai lembaga yang kompeten sekaligus menjadi barometer data nasional, sangat diharapkan dan ditunggu oleh para pengguna data dan para pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan berbagai kebijakan terutama yang terkait dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan pertanian nasional.

Pendataan melalui kegiatan Sensus Pertanian 2023 akan memberikan manfaat dan sekaligus menjadi acuan data yang tepat, jika akurasi hasil pendataan khususnya dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 dilakukan dengan benar dan valid, diverifikasi dengan cermat, hingga proses input data yang terpantau ketat.

Proses menghasilkan data yang akurat, tidak terlepas dari kemampuan penguasaan dan pemahaman petugas terhadap materi tentang bidang pertanian. Dasar ini seharusnya menjadi latar belakang pada saat awal rekrutmen petugas, sekalipun pada tahapan berikutnya juga diberikan pembekalan serta penguasaan materi termasuk pemahaman substansi, metode pelaksanaan, penguasaan lingkungan sensus, serta cara dan strategi untuk bertanya/wawancara. Semua proses ini menjadi bagian yang sangat penting dalam satu paket perencanaan, pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023, tahap verifikasi dan validasi hingga dilakukan evaluasi atas perolehan data pencacahan.

Setidaknya para pelaksana kegiatan Sensus Pertanian 2023 juga harus melaksanakan langkah dan strategi sensus dalam hal berikut ini.

- 1) Memahami konteks lokal, termasuk keunikan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya wilayah tersebut. Ini membantu dalam mengidentifikasi isu-isu khusus yang relevan dengan sektor pertanian di tingkat lokal dan memastikan bahwa pertanyaan dalam sensus pertanian mencakup hal-hal yang relevan dan penting bagi masyarakat setempat.

- 2) Pertanyaan yang ada dalam kuesioner sensus pertanian mungkin perlu diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan pertanian khas wilayah, jenis tanaman yang dominan, metode yang umum digunakan, atau isu-isu pertanian spesifik lainnya. Selain itu, instrumen pendataan seperti kuesioner, peta, atau perangkat elektronik juga perlu disesuaikan agar dapat digunakan dengan efektif di tingkat lokal.
- 3) Petugas sensus lokal yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data di tingkat lokal harus dilatih dengan baik. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang pertanyaan dan instrumen yang telah diadaptasi, teknik pengumpulan data, dan etika serta kerahasiaan data. Mereka juga harus memahami konteks dan isu-isu khusus yang relevan dengan sektor pertanian atau perikanan di wilayah tersebut.
- 4) Kolaborasi dengan komunitas lokal sangat penting dalam menerjemahkan sensus pertanian ke tingkat lokal. Melibatkan pemangku kepentingan, seperti petani, pemilik lahan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sensus pertanian, sehingga dapat membantu memastikan pengumpulan data yang akurat dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi komunitas tersebut. Mitra lain yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi atas akurasi data petani adalah Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di tingkat kecamatan yang selama ini menjadi mitra petani dan kelompok tani.
- 5) Setelah data dikumpulkan di tingkat lokal, proses validasi, dan verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kebenaran data yang dikumpulkan. Hal ini melibatkan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, perbandingan dengan sumber data lainnya, dan verifikasi lapangan jika diperlukan.
- 6) Data yang dikumpulkan di tingkat lokal dianalisis dan disajikan dalam format yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat

setempat. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, kelompok petani, lembaga penelitian, atau pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan pertanian yang lebih efektif di tingkat lokal.

Dengan proses dan langkah yang dilakukan di atas, maka sensus pertanian menjadi instrumen penting dalam proses mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk data perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi di sektor pertanian. Data yang akurat sangat diperlukan untuk memutuskan sebuah kebijakan yang tepat dalam pembangunan sektor pertanian dengan mengacu pada satu data pertanian nasional yang dapat dipercaya.

Sekalipun memiliki potensi besar atas kejayaan komoditas ini di masa lalu, faktanya komoditas terong belanda luput dari perhatian dan publikasi pemerintah setempat karena tidak tercatat dalam data publikasi instansi yang kompeten. Melalui proses Sensus Pertanian 2023 setidaknya data dan informasi tentang komoditas terong belanda telah diperoleh dan tercatat di BPS Kabupaten Solok. Data dan informasi ini selain untuk memperkuat fakta di lapangan, sekaligus menjadi potensi dasar sebagai data dukung pengembangan komoditas terong belanda di wilayah usaha pertanian potensial Kabupaten Solok, jika suatu saat diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan data dan informasi tersebut.

K. Daftar Pustaka

- Agustinus, M., & Sutianto, F. D. (2018). *Kementan dorong Solok menjadi kawasan bawang merah berbasis korporasi*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementan-dorong-solok-menjadi-kawasan-bawang-merah-berbasis-korporasi-1538299021644553482/full>
- Ananda, G. (2021). *Fenomena bawang merah dalam memotivasi petani di Alahan Panjang*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/gusdeaananda3748/5ff9961fd541df31da38fa32/fenomena-bawang-merah-dalam-memotivasi-petani-di-alahan-panjang>

- Andries. (2021). *Mengembalikan kejayaan kentang Kabupaten Solok*. Hantaran.co. <https://www.hantaran.co/mengembalikan-kejayaan-kentang-kabupaten-solok/>
- BPMI Setpres. (2023). *Canangkan Sensus Pertanian 2023, Presiden tegaskan pentingnya akurasi data sektor pertanian*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/canangkan-sensus-pertanian-2023-presiden-tegaskan-pentingnya-akurasi-data-sektor-pertanian/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2017). *Kabupaten Solok dalam angka tahun 2017*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2018). *Kabupaten Solok dalam angka tahun 2018*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2019). *Kabupaten Solok dalam angka tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2020). *Kabupaten Solok dalam angka tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2022). *Kabupaten Solok dalam angka tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2023). *Kabupaten Solok dalam angka tahun 2023*.
- Kabupaten Solok. (2020). *Statistik daerah Kabupaten Solok tahun 2020*. https://solokkab.go.id/download/file/Statistik_Daerah_Kabupaten_Solok_Tahun_2020.pdf
- Kamal, M. F. N. (2023). *Apa saja yang dicatat dalam Sensus Pertanian 2023?* <https://kumparan.com/muhammad-faishal-nur-kamal/apa-saja-yang-dicatat-dalam-sensus-pertanian-2023-20003sK9JLF/full>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *BPS mulai melaksanakan Sensus Pertanian 2023*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49374/bps-mulai-laksanakan-sensus-pertanian-2023/0/artikel_gpr
- Natalia, D. L. (2023). *Jokowi: Sensus Pertanian 2023 demi akurasi kebijakan*. <https://www.antaranews.com/berita/3538923/jokowi-sensus-pertanian-2023-demi-akurasi-kebijakan>
- Nofirman. (2019). Studi keunggulan wilayah dan komoditi hortikultura di Daerah Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *Jurnal Georafflesia*, 4(1), 73–88.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode Data dan Tata Wilayah. (2011). <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-66-tahun-2011>

Riani, U. C. (2023). Perkembangan agribisnis teh perkebunan rakyat pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Solok. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 11(1), 29–39.

Bab XI

Ketidakterdayaan Petani: Menelisik Persoalan Hulu dan Hilir Pertanian Ubi Kayu

Tri Bastuti Purwantini

Komoditas ubi kayu selama ini masih dianggap sebagai komoditas inferior, sehingga program pembangunan pertanian kurang menjamah petani ubi kayu. Program pupuk subsidi tidak menasar pada petani ubi kayu, sehingga petani ubi kayu harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya relatif mahal. Solusi yang telah dilakukan oleh petani ubi kayu antara lain dengan menyiasati jatah pupuk subsidi untuk tanaman jagung (bila petani menanam jagung) lalu sebagian jatah pupuk digunakan untuk pertanaman ubi kayu. Untuk mengimbangi kebutuhan pupuk, petani lebih banyak menggunakan pupuk kandang. Petani di lokus penelitian umumnya sudah responsif dalam inovasi teknologi pertanian ubi kayu, terutama dalam penggunaan bibit dan pupuk. Sumber inovasi teknologi tersebut umumnya diperoleh dari sesama petani, baik di dalam desa maupun di luar desa, contohnya

T. B. Purwantini

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: trib005@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Purwantini, T. B. (2025). Ketidakterdayaan petani: Menelisik persoalan hulu dan hilir pertanian ubi kayu. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 423–458). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c947
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bibit ubi kayu baru varietas “Garuda” yang beberapa waktu belakangan sedang tren. Selain produktivitas tinggi, jenis ubi kayu tersebut tidak pahit, sehingga bila harga ubi kayu di pabrik tapioka merosot, ubi kayu tersebut dapat dipasarkan ke pabrik pengolah ubi kayu (kripek ubi kayu) yang cukup menjanjikan.

Bukti ketidakberpihakan pemerintah, contohnya penyuluh pertanian yang kurang memperhatikan pertanian ubi kayu. Pemasaran ubi kayu dominan ditujukan ke pabrik tapioka yang berlokasi di Kecamatan Abung Selatan. Dalam penentuan harga jual hasil produksi ubi kayu, biasanya ditentukan sepihak oleh pabrik, petani tidak mempunyai posisi tawar, sehingga petani pasrah dengan kondisi yang ada. Demikian halnya untuk potongan harga (rafraksi) yang besarnya bervariasi antarvarietas, nilai refraksi didasarkan pada kandungan pati dari ubi kayu tersebut, selain itu juga kadar kotoran ikutan dan tingkat kematangan ubi kayu. Harga ubi kayu yang diterima petani relatif berfluktuasi. Informasi harga jual ubi kayu biasanya diperoleh dari sopir truk yang biasa mengangkut ubi kayu mereka ke pabrik. Seakan-akan sopir tersebut bertindak sebagai pemegang *delivery order* (D) atau sebagai mediator bagi petani dalam memasarkan produk ubi kayunya. Fakta ini berulang-ulang dilakukan, kepercayaan menjadi modal utama kedua belah pihak. Petani ubi kayu perlu membentuk perkumpulan kelompok tani atau asosiasi agar mereka mempunyai posisi tawar. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi dari pemerintah untuk merealisasikannya. Tulisan ini merupakan catatan emik yang dilakukan bersamaan dengan Sensus Pertanian 2023, dengan penekanan pada persoalan pertanian ubi kayu, antara lain mengurai kendala dan permasalahan pertanian ubi kayu dari hulu sampai hilir di Kabupaten Lampung Utara. Pendataan sensus pertanian adalah penyedia data pertanian dari berbagai sisi, baik data struktur pertanian, agregat wilayah maupun untuk unit-unit terkecil, dengan demikian output dari sensus pertanian dapat digunakan sebagai basis data untuk menjawab isu strategis di sektor pertanian, khususnya persoalan pertanian ubi kayu.

A. Sensus Pertanian: Fakta dan Harapan Sektor Pertanian di Kabupaten Lampung Utara

Beberapa tujuan pendataan Sensus Pertanian 2023 diantaranya adalah menyediakan data pertanian dari berbagai sisi, baik data struktur pertanian, agregat wilayah maupun untuk unit-unit paling kecil. Kegiatan Sensus Pertanian 2023 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, selain itu diharapkan bisa menjawab isu strategis di sektor pertanian. Dengan demikian, data dan informasi dari Sensus Pertanian 2023 dapat dijadikan basis untuk membantu arah kebijakan terutama kebijakan yang terkait dengan pertanian. Oleh karena itu, akurasi data menjadi penting dan harus dijaga, karena data yang salah bila dijadikan acuan untuk kebijakan maka akan menghasilkan kebijakan yang salah juga. Sehubungan dengan itu, maka perlu ditekankan pada para pengumpul data khususnya para PPL dan PML agar berhati-hati, cermat, tekun, dan ulet serta teliti dalam menggali data di lapang.

Sensus Pertanian 2023 juga menggali berbagai aktivitas sektor pertanian dimulai dari jumlah petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap, juga petani milenial akan dicatat data tersebut, terutama untuk mendukung kedaulatan dan kesejahteraan petani. Berbagai data tren komoditas pertanian, pola tanam, sebaran ketersediaan pupuk, penggunaan obat-obatan, dan sebagainya dapat dijadikan dasar evaluasi dan kebijakan dalam rangka menciptakan model usaha pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sensus Pertanian 2023 juga memberikan informasi terkait tingkat mekanisasi, efisiensi, dan kemajuan teknologi di sektor pertanian. Berbagai data dan informasi terkait sektor pertanian hasil Sensus Pertanian 2023 bila dibandingkan dengan data sensus pertanian sebelumnya, maka akan diperoleh dinamika berbagai variabel sensus yang digunakan. Implikasi dari data dan perubahan atau dinamika variabel penting dari sektor pertanian perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan tentunya pelaksanaan kegiatan/program akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait, walaupun dalam hal ini merupakan dominasi

Kementerian Pertanian, namun perlu kolaborasi untuk menyikapi data yang dihasilkan dari Sensus Pertanian 2023.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni 2019, merupakan peraturan terkait dengan penyediaan data pemerintah berbagai indikator, baik pertanian maupun data lainnya. Peraturan tersebut mengamanahkan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data tersebut juga mudah diakses dengan prinsip bagi pakai antara instansi pusat dan instansi daerah, sehingga tidak ada kekisruhan yang memicu polemik antar instansi dan di masyarakat pada umumnya. Demikian halnya untuk data Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Lampung Utara, data hasil Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat menyajikan data akurat, khususnya data terkait sektor pertanian. Output data tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan memajukan sektor pertanian di Lampung Utara, basis data tersebut selain untuk kebijakan pemerintah juga sebagai acuan bila swasta akan berinvestasi di sektor tersebut.

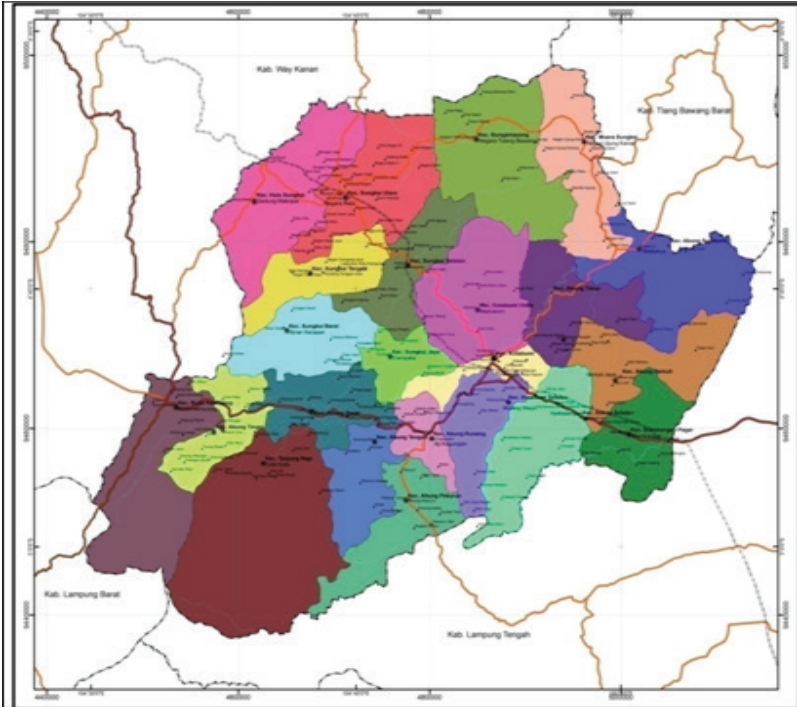
B. Bentang Alam Pertanian: Mengenal Awal Lingkungan Sensus

1. Eksisting Geografi dan Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Secara geopolitik menjadi batas Pulau Sumatra di bagian utara, sedangkan secara geografis terletak pada 104°40–105°08 Bujur Timur dan 4°34–5°06 Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.725,63 km². Secara geografis juga mempunyai potensi alam yang kaya, yang dapat diolah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari pemanfaatan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kondisi eksisting dan sumber daya alam dapat menjadi kerangka dasar dan pertimbangan dalam perencanaan serta pengembangan potensi pada setiap lokus di Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Lampung Utara merupakan induk wilayah kabupaten yang telah mengalami pemekaran yang dalam perkembangannya, telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² berkurang menjadi 2.725,63 km² atau sekitar 14% dari luas awal. Pemekaran wilayah pertama terjadi pada tahun 1991 dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat (UU No. 6 tahun 1991). Pemekaran kedua terjadi pada tahun 1997 yakni berdasarkan UU No. 2 tahun 1997, dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UU No. 12 tahun 1999. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka diikuti juga dengan terjadinya pemekaran kecamatan hingga saat ini jumlah kecamatan di Lampung Utara terdiri dari 16 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sementara itu, terdapat 15 kelurahan dan 232 desa. Dengan terjadinya pemekaran wilayah tentunya akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan wilayah masing-masing.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah timur dengan Kabupaten Tulang Bawang, dan sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Barat (Gambar 11.1). Bentangan alam Kabupaten Lampung Utara dinaungi tiga gunung (Gunung Haji, Gunung Ulu Sabuk, dan Bukit Kemuning) dan mencakup 15 sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Lampung Utara. Salah satu daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Way Rarem yang sudah mengalami degradasi, hasil kajian Hartawan et al. (2021) menunjukkan bahwa rata-rata laju erosi cukup tinggi, sehingga kekritisan lahan mengancam keberlanjutan usaha pertanian. Mengingat DAS Way Rarem merupakan kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya usaha konservasi, oleh karena itu salah satu alternatif solusi untuk mengurangi degradasi lahan adalah dengan pengendalian sedimen di daerah hulu.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung (2023)

Gambar 11.1 Peta Wilayah Kabupaten Lampung Utara

Alam merekam jejak ekologis (Watubun, 2022), dengan demikian jejak ekologis kegiatan manusia direkam oleh habitat alam. Dalam hal ini, termasuk dalam penggunaan lahan atau tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan material dasar dari situs, kondisi ini terkait dengan sejumlah karakteristik alami, diantaranya: iklim, geologi, tanah, topografi, hidrografi, hidrologi, dan biologi. Tanah merupakan pusat vegetasi yang sangat strategis dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global serta penyediaan kebutuhan pangan dan energi (Watubun, 2022).

2. Potensi Pertanian dan Dinamika Komoditas Pertanian di Kabupaten Lampung Utara

Penggunaan lahan pada suatu wilayah mempunyai bentuk tertentu serta pola perkembangannya bisa diestimasi. Sehubungan dengan itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara merencanakan beberapa kegiatan dalam Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan SDA. Potensi SDA yang berpengaruh terhadap potensi pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara antara lain: Potensi SDA berpengaruh terhadap potensi pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara, antara lain: 1) potensi pengembangan wilayah perkebunan, 2) potensi pengembangan komoditas unggulan pertanian, dan 3) potensi pengembangan perikanan (Bappeda Kabupaten Lampung Utara, 2023). Dalam pengembangan dan pembangunan pertanian di kabupaten ini, diharapkan juga mampu melestarikan sumber daya alam, artinya usaha pertanian semaksimal mungkin tidak merusak lingkungan sekitar.

Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi pertanian yang sangat luas dari sisi lahan, baik berupa lahan sawah (irigasi dan tadah hujan) dan lahan kering. Dari sisi luasan lahan, maka dominasi lahan pertanian adalah berupa lahan kering. Lahan kering tersebut digunakan untuk usaha tani tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura, selain itu juga dimanfaatkan untuk usaha peternakan. Komoditas ubi kayu merupakan tanaman pangan yang dominan diusahakan di lahan kering dan sekaligus juga sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Utara.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian versi Lokal

Pada dasarnya pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 bertujuan menggali dan mencatat data pertanian yang muara tujuannya adalah untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani (BPS, 2023). Responden yang disasar diantaranya adalah perusahaan pertanian perorangan (rumah tangga tani), perusahaan pertanian berbadan hukum, dan

perusahaan pertanian lainnya. Dalam hal ini adalah usaha variabel sensus dalam analisis disini khususnya untuk pemutakhiran data usaha pertanian perorangan/rumah tangga, baik melalui *door to door* maupun dengan menggunakan *snowball*.

Beberapa pertanyaan dasar mengenai karakteristik rumah tangga tani, dalam hal ini ditanya juga tentang aset produktif berupa lahan pertanian baik milik maupun nonmilik/garapan. Selain menggali data dasar yang dimutakhirkan, juga menggali dan mencatat data usaha pertanian perorangan. Kuesioner yang digunakan mencakup beberapa pertanyaan dari: subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Data karakteristik rumah tangga sudah tersedia dari database yang selalu dibawa. Waktu wawancara PPL selalu mengonfirmasi keberadaan dan kecocokan data tersebut. Beberapa data dasar kadang responden tidak memahami akurasi data tersebut, seperti data umur kadang petani, terutama kelompok lansia, mereka tidak tahu persis umur anggota keluarganya, sehingga diperlukan data pendukung kartu KK. Begitu pula aset lahan, jadi memprediksi luas dengan perkiraan mereka seperti dengan menggunakan pendekatan jumlah benih/bibit, contohnya untuk luasan tanam ubi kayu, patokannya luasan 5 rante (setara dengan 2.000 m²) memerlukan 2 kantong (plastik isi 5 kg) benih padi, apabila petani mengungkapkan dengan menggunakan 2 kantong benih, berarti PPL harus mengkonversi luas lahan tersebut, berarti luasan lahan yang ditanam padi 10 rante atau sekitar 0,4 hektar dst. Apabila memungkinkan, bisa minta diperlihatkan sertifikat lahannya, bila demikian lebih akurat. Hal yang konsisten untuk pendekatan biaya pengolahan tanah dengan traktor, responden menyebutkan bahwa biaya per rante Rp40.000, apabila petani membayar Rp200.000 artinya luas lahan yang digarap dengan perhitungan jumlah yang dibayar dibagi dengan tarif olah tanah per rante atau sama dengan 5 rante.

Analisis data sensus di lokus penelitian lebih banyak mengkaji tentang kinerja pertanian komoditas ubi kayu, baik dilihat dari petani sebagai pelaku, dinamika pemilikan, dan pengusaha lahan tentang

budi daya tanaman ubi kayu, juga kinerja usaha tani ubi kayu sampai pemasarannya. Secara umum, petani sudah memahami luasan lahan dengan satuan hektar, namun beberapa petani juga menggunakan satuan setempat dengan istilah “rante”, satuan tersebut lebih banyak digunakan satuan luas lahan pekarangan. Konversi standar dari “rante” adalah $20 \times 20 \text{ m}^2$ atau satu rante sekitar 400 m^2 . Oleh karena itu, dalam menggali data lahan dengan satuan tersebut harus dihitung terdahulu menggunakan satuan standar m^2 atau hektar.

Dalam penggalan data produksi ubi kayu harus diperhatikan aturan main dalam pemasaran tersebut baik produksi maupun harga produk. Produksi yang dicatat adalah produksi kotor sebelum dikurangi refraksi serta potongan biaya-biaya mulai cabut hingga sampai ke pabrik.

Beberapa kajian (Anggraini et al 2013; Prasmatiwi, 2022, Irawan et al., 2021) menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu menguntungkan. Namun, perlu dicermati keuntungan tersebut tidak serta merta memberikan pendapatan yang layak bagi petani pengelolanya. Memang usaha tani ubi kayu menguntungkan bagi petani di lokus kajian, namun keuntungan tersebut tidak menjamin untuk menopang kehidupan yang layak. Oleh karena itu, usaha tani ubi kayu tidak bisa dijadikan sumber pendapatan tunggal, seperti penuturan Bapak Priant, “Usaha tani singkong, *ora* perlu tenaga kerja *sing akeh, mulo kulo biso ono wektu kanggo* buruh, buruh tani *utowo* buruh *srabutan...*” (wawancara penulis tanggal 14 juni 2023).

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu tidak padat tenaga kerja, artinya masih ada waktu untuk bekerja sebagai buruh tani atau buruh serabutan. Hal yang sama ditemukan pada petani ubi kayu lainnya di Kecamatan Abung Selatan, terutama di lokus kajian di Desa Trimodadi, Desa Kali Balangan, dan Desa Abung Rajo. Bisa jadi bagi yang luas lahan yang diusahakan relatif luas akan signifikan pendapatannya.

Hal yang menarik bahwa petani ubi kayu di Lampung Utara banyak beralih menanam jagung karena keuntungan usaha tani jagung yang diperoleh relatif lebih tinggi dibandingkan dengan usaha tani

ubi kayu. Walaupun demikian, ubi kayu merupakan komoditas lokal yang tetap eksis, hal ini karena pengelolaan dalam budi daya ubi kayu tidak rumit, apalagi dengan inovasi teknologi penggunaan herbisida untuk penyiangan membuat penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Walaupun, di lain pihak penggunaan herbisida menimbulkan polusi, tetapi hal ini kurang disadari oleh petani ubi kayu, dalam benaknya lebih praktis dan efisien dalam merawat tanaman ubi kayunya.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Perhelatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Lampung Utara melibatkan 480 PPL (petugas pencacah lapangan), 80 PML (petugas pemeriksa lapangan), dan 23 koseka (petugas kecamatan). Koseka terdiri dari 18 petugas organik BPS dan lima orang dari mitra. Karena terbatasnya jumlah petugas organik BPS, maka diangkatlah koseka dari mitra BPS yang sudah berpengalaman. PPL, PML, dan koseka merupakan ujung tombak dalam pencatatan data sensus di lapangan. Oleh karena itu, pembekalan dalam teknis dan penguasaan materi harus kuat sebelum terjun ke lapang. Sehubungan dengan itu, pembekalan dalam teknis dan penguasaan materi harus kuat sebelum terjun ke lapang. Selain itu, strategi dalam komunikasi untuk menanyakan sesuatu hal yang ada di kuesioner diperlukan pengetahuan lokal. PPL dan PML merupakan penduduk lokal dimana mereka bertugas, walaupun demikian diperlukan komunikasi dan interaksi antara petugas tersebut dengan masyarakat agar harmoni dalam pencatatan data sensus dapat lebih lancar.

Eks petugas Regsosek yang baik diutamakan untuk direkrut kembali sebagai petugas PPL maupun PML. Alasan sensus dilakukan dua bulan sekali ialah terkait efisiensi. Bila pelaksanaannya setiap bulan, maka jumlah SDM yang diperlukan membengkak dua kali lipat, yakni PPL yang diperlukan 960 orang dan 160 PML. Himbauan untuk rekrutmen secara terbuka, menurut Kepala BPS Lampung Utara, nantinya akan diperoleh petugas yang berdomisili disekitar Kotabumi, padahal petugas sensus diharapkan adalah yang tinggal di wilayah setempat, di mana kegiatan sensus tersebut dilakukan. Oleh

karena itu, perpaduan sistem terbuka dan tertutup (dari *database* petugas) atau disebutnya semi-terbuka hasilnya lebih baik. Kepala BPS Lampung Utara (2023) mengungkapkan

“... Harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa perekrutan petugas dengan sistem semi terbuka hasilnya akan lebih baik karena tujuannya untuk memperoleh petugas yang berkualitas di masing-masing lokasi setempat, lokus pendataan. Pengalaman perekrutan dengan sistem terbuka pada kegiatan Revisit 2016, dilakukan perekrutan petugas secara terbuka hasilnya kurang bagus...” (wawancara penulis 13 Juni 2023).

Mengutip saran dari Kepala BPS Lampung Utara, perlunya merekrut pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tugasnya mendata atau mencacah untuk kegiatan rutin maupun kegiatan insidental yang dilakukan oleh BPS. Syaratnya petugas tersebut juga tinggal di wilayah setempat pendataan, sehingga ada jaminan petugas pencacah yang berdedikasi dan berkualitas. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa seperti pendataan Susenas yang merupakan ibunya survei, maka diperlukan petugas yang sudah berpengalaman dan amanah karena rumitnya kuesioner kegiatan tersebut. BPS Kabupaten Lampung Utara mempunyai *database* para petugas mitra tersebut, sehingga bila BPS memerlukan petugas pencacahan maka akan mengutamakan dari mereka. Mitra tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pendataan rutin kecil-kecil selain untuk kegiatan pendataan survei besar. Mengingat frekuensi pendataan yang dilakukan oleh BPS relatif sering, sehingga kerja sama dengan mitra yang sudah terjalin lama akan menghasilkan output yang lebih akurat.

Sementara itu, pendataan yang besar, seperti sensus pertanian, seharusnya memberikan pelatihan yang dilakukan untuk petugas baru (belum berpengalaman) dengan petugas lama yang sudah berpengalaman dibedakan. Artinya, petugas baru harus lebih intensif dalam mengikuti pelatihan begitu halnya dengan praktik wawancara responden. Perpaduan antara PPL baru dan lama dapat dipasangkan di suatu tempat yang sama dengan tujuan petugas baru bisa belajar dari petugas lama. Paling tidak mereka dapat diskusi bila ada masalah

dalam proses wawancara. Dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023, tidak melibatkan penyuluh pertanian, selain karena belum berpengalaman untuk wawancara kegiatan BPS, dikawatirkan akan mengganggu tugas utamanya sebagai penyuluh pertanian.

Penggalian data sensus pertanian yang dilakukan oleh PPL adalah wawancara langsung ke responden (rumah tangga pertanian) (lihat Gambar 11.2). Metode dalam penggalian data secara konvensional menggunakan kuesioner terstruktur berbasis kertas. Wilayah atau obyek yang dituju oleh PPL mengacu pada pembagian Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Di lokus kajian (Kecamatan Abung Selatan) SLS berdasarkan wilayah RT (Rukun Tetangga). Kasus di Desa Trimodadi, satu PPL mendata 7–9 SLS, pembagian jumlah SLS tiap PPL bisa bervariasi, jumlah tersebut tergantung muatan lokal masing-masing SLS. Proses diawali dengan pendataan rumah tangga tani untuk menentukan muatan masing-masing SLS. Setelah diketahui kapasitas muatan setiap SLS, selanjutnya secara proporsional didistribusikan ke PPL. Kasus PML (Bapak Sugiman, tinggal di Desa Trimodadi) membawahi 4 PPL yang meliputi 3 desa yaitu: 1) Desa Trimodadi (2 PPL), 2) Kemalo Abung (1 PPL), dan 3) Kali Balangan (1 PPL).



Foto: Tri (2023)

Gambar 11.2 Proses Pendataan Sensus Pertanian oleh PPL (Ratih) di Desa Trimodadi dan PPL (Nurul) di Desa Abung Jayo

Sebelum mendata sensus PML memberikan pengarahan terkait kondisi wilayah dan kondisi pertanian setempat terkait variabel sensus pertanian. Sebagai gambaran wilayah Desa Trimodadi, terdiri dari enam dusun, masing-masing dusun dengan dominasi usaha pertanian yang beragam. Keragaman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dusun I, pertaniannya didominasi dengan usaha tani padi dan sebagian kecil ladang ubi kayu.
- 2) Dusun II, kondisinya mirip dengan dusun I, pertaniannya didominasi dengan usaha tani padi dan sebagian kecil ladang ubi kayu.
- 3) Dusun III dominasi pertanian ubi kayu.
- 4) Dusun IV dan V kondisi sama, yaitu dominasi pertanian ubi kayu dan kebun karet.
- 5) Dusun VI, pertaniannya didominasi dengan usaha tani padi dan sebagian kecil ladang ubi kayu.

Informasi tersebut akan membantu dalam melancarkan proses penggalan data sensus pertanian. Strategi ini melengkapi SOP (standar operasional proyek) yang sudah dibekali dari BPS melalui pelatihan.

Petugas sensus pertanian dari provinsi, melakukan monitoring dan pendataan menggunakan kuesioner berbasis IT (teknologi informasi) dengan aplikasi *Computed Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Sasaran responden yang dituju adalah Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Kelebihan menggunakan CAPI antara lain data langsung tersedia tanpa perlu mengentri. Pada sistem CAPI dapat disetting untuk validasi dan konsistensi data. Dengan CAPI tentunya durasi lebih cepat tersaji datanya. Sementara itu, dengan menggunakan kuesioner konvensional terstruktur berbasis kertas, proses validasi data bisa dilakukan setelah proses entri data, sehingga diperlukan waktu lebih lama. Untuk itu, pendataan sejenis sensus yang akan datang, perlu mempertimbangkan penggalan data dengan menggunakan inovasi metode CAPI, namun diperlukan persiapan yang matang mengingat

kualitas SDM PPL yang tinggal di daerah beragam, sedangkan menggunakan CAPI memerlukan kemampuan tertentu terutama dalam penguasaan IT.

Data PPL dan PML yang pernah menjadi mitra BPS, dirangkum dalam *database* oleh BPS. Dengan demikian, apabila BPS memerlukan petugas untuk mendata kegiatan BPS baik yang rutin atau insidental bisa menghubungi mereka. Oleh karena itu, dedikasi dan keseriusan PPL dan PML menjadi bagian dari indikator kualitas petugas, sehingga petugas yang baik dan berkualitas akan dijadikan mitra yang bisa berkelanjutan. Ini juga terbukti dengan PPL dan PML yang berkualitas dari kegiatan Regsosek sebagian besar digunakan lagi, bahkan diantara petugas ada yang naik tingkat dari PPL menjadi PML.

Hasil wawancara dengan PPL dan PML, dapat dirangkum bahwa tingkat kesulitan sensus pertanian dan Regsosek berbeda. Dari sisi materi sensus pertanian lebih mudah dibandingkan Regsosek, namun volume materinya lebih banyak pada sensus pertanian. Target jumlah SLS untuk kegiatan Regsosek lebih banyak, rata-rata satu hari menangani 12 responden, sedangkan pada kegiatan sensus pertanian 7–9 responden per hari per PPL.

Secara umum, pendataan sensus di lokus kajian (Kecamatan Abung Selatan) wilayahnya tergolong mudah diakses. Pemukiman yang berkelompok memudahkan dalam menemui responden, kendalanya hanya waktu menemui mereka biasanya terbatas di luar waktu kerja mereka, biasanya sore atau malam. Namun, bila beruntung PPL dapat buat janji terlebih dahulu agar mereka menyisihkan waktu. Dalam pendataan sensus pertanian, PPL mengalami berbagai kendala diantaranya dalam mendata luas lahan, banyak petani yang tidak mengerti luas lahan persisnya yang digarap. Untuk memudahkan beberapa petani cermat meresponnya dengan memperlihatkan sertifikat lahan mereka. Kendala lain belum lagi kalau responden petani yang diwawancara lansia, perlu kesabaran dan berkomunikasi dengan pengetahuan lokal.

E. Petani di Tengah Impitan Luasan Lahan

Lahan ubi kayu semakin terdesak dengan berkembangnya usaha tani jagung. Namun, persaingan lahan ini justru menguntungkan petani ubi kayu karena ubi kayu masih bisa eksis di antara tanaman jagung. Untuk itu, mereka mengatur pola tanam agar bisa mengakomodir usaha tani ubi kayu dan jagung. Pengakuan beberapa petani tersebut mengungkapkan bahwa tanam jagung lebih menguntungkan dibanding menanam ubi kayu, walaupun usaha tani jagung memerlukan biaya yang lebih tinggi dan intensif. Sementara itu, walaupun pendapatan usaha tani ubi kayu relatif lebih rendah dibanding usaha tani jagung, tetapi usaha tani ubi kayu relatif mudah perawatannya dan biaya relatif lebih rendah dibandingkan jagung.

Areal pertanaman untuk jagung dan ubi kayu (Gambar 11.3) adalah lahan kering, maka ubi kayu akan lebih tahan kekeringan dibandingkan dengan tanaman jagung. Oleh karena itu, pola tanam yang banyak diterapkan adalah: 1) jagung-ubi kayu, 2) jagung-jagung/ubi kayu. Dengan pola tanam tersebut, maka petani menanam ubi kayu yang umurnya relatif pendek, sekitar 6–7 bulan. Pada kondisi normal biasanya petani menanam jagung pada bulan Oktober–November, dengan demikian panen jagung pada bulan Januari–Februari. Jika masih ada cukup hujan dilanjut tanam jagung, tetapi sebelum panen idealnya sekitar umur tanaman jagung 80 hari, maka disisipkan tanam bibit ubi kayu, sehingga diharapkan sekitar bulan September–Oktober ubi kayu bisa dipanen.



Foto: Tri (2023)

Gambar 11.3 Hamparan pertanaman jagung (kiri) dan pertanaman ubi kayu (kiri) di Desa Abung Rajo, Kecamatan Abung Selatan

Pola tanam lainnya yaitu jagung-ubi kayu, pada pola tanam tersebut, tanaman ubi kayu ditanam setelah jagung dipanen dan dilakukan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor. Biasanya hasil produksi ubi kayu dengan pola ini lebih baik dari pada yang menerapkan dua kali jagung. Walaupun semakin marak petani menanam jagung, tetapi tanaman ubi kayu masih eksis. Kondisi ini juga didukung dengan adanya ubi kayu genjah varietas Thailand (UJ-3) menurut petani yang usia panennya 6–7 bulan, sementara itu karakteristik ubi varietas tersebut optimalnya dipanen pada umur 8–10 bulan (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2008). Varietas baru umur genjah Garuda (nama lokal) menurut petani produktivitas potensial bisa mencapai >50 ton/hektar. Sebelum kedua varietas tersebut berkembang, jenis varietas ubi kayu yang populer adalah varietas Cassesart (UJ-5), varietas ini produktivitas juga relatif tinggi dibanding jenis Thailand, namun umur panen lebih lama (10-12 bulan). Selain itu, biaya produksi untuk jagung relatif lebih mahal, sehingga petani harus menyediakan modal lebih besar, walaupun pendapatannya juga lebih besar, jadi terkesan bahwa ubi kayu ditanam di musim kedua atau musim kemarau karena ubi kayu lebih tahan kekeringan. Kasus pada tahun 2021, karena curah hujan dan hari hujan relatif tinggi petani bisa menanam jagung tiga kali setahun.

Yang menarik adalah kasus konversi lahan kebun karet menjadi lahan tanaman pangan (jagung dan ubi kayu). Pada tahap awal setelah penebangan karet lahan ditanami ubi kayu, tahun kedua, dan seterusnya bisa mengikuti pola tanam jagung-ubi kayu. Kasus yang ditemukan pada responden petani Ibu Winarti, petani dari Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, karena sudah lelah mengurus kebun karetnya, sementara harga karet tidak beranjak naik. Oleh karena itu, keluarga tani tersebut memutuskan untuk membongkar kebun karetnya. Pada bulan Desember 2022, kebun karet seluas 0,75 hektar dibongkar, dan kayunya dijual ke pemilik *somil* setempat. *Somil* menurut penduduk Lampung adalah mesin belah dan potong kayu rakitan, namun mereka juga mengartikan bahwa *somil* adalah usaha penggergajian kayu (Gambar 11.4).



Foto: Tri (2023)

Gambar 11.4 Somil, tempat penggergajian kayu di Desa Abung Jayo

Banyaknya kebun karet yang dibongkar turut meramaikan kegiatan usaha *somil* setempat. Menurut pengakuan responden Ibu Winarti, batang pohon karet miliknya dijual laku Rp15 juta, responden terima bersih karena yang memotong dan menggergaji serta angkut sudah diperhitungkan oleh pihak *somil*. Setelah lahan dibersihkan dan dilakukan pengolahan tanah, selanjutnya dimanfaatkan untuk usaha tani ubi kayu. Fenomena harga karet yang menurun sudah lebih 10 tahun belakangan ini, petani sering merugi (imbangan curahan tenaga kerja dan pendapatan karet tidak seimbang), sehingga memicu pekebun karet untuk mengkonversi lahannya.

F. Dinamika Ekspor dan Impor Ubi Kayu Nasional di Kabupaten Lampung Utara

Permintaan ubi kayu diprediksi terus meningkat dengan bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya industri berbahan baku ubi kayu (Saleh & Widodo, 2007). Selain itu, komoditas ubi kayu juga berpeluang untuk diekspor, mengingat permintaan pasar luar

negeri terutama dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) cukup besar. Namun, daya saing produk ubi kayu di Indonesia masih rendah dibanding Thailand sebagai produsen utama dunia untuk ubi kayu. Untuk bisa bersaing, maka pertanian ubi kayu harus berkembang dan harus bisa mengatasi kendala dan masalah teknis maupun nonteknis.

1. Kendala dan Permasalahan Usaha Tani Ubi Kayu di Kabupaten Lampung Utara

Usaha tani dapat dikatakan layak apabila rasio $R/C > 1$, bila rasio penerimaan usaha tani terhadap biaya usaha tani tidak kurang dari 1, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa usaha tani ubi kayu layak untuk diusahakan (Thamrin et al., 2013; Prasmatiwi, 2022; Irawan et al., 2021). Berbeda cerita bila bicara masalah pendapatan usaha tani, bisa saja usaha tani tersebut layak tapi usaha tani tersebut memberikan pendapatnya yang kurang layak bagi petani yang mengusahakan. Terkait dengan pengelolaan usaha tani ubi kayu, diperlukan yang manajemen baik. Dalam pengelolaan sistem usaha tani dikenal panca usaha tani. Penerapan panca usaha tani terdiri dari: 1) pengolahan lahan; 2) penggunaan bibit unggul; 3) aplikasi pemupukan; 4) irigasi atau pengairan; dan 5) penggunaan obat-obatan atau pestisida.

Dalam pengolahan lahan merupakan persiapan awal dalam usaha tani. Untuk kasus usaha tani ubi kayu di lokus kajian, pada pola tanam tumpang sisp dengan jagung, maka bibit ubi kayu ditanam diantara tanaman jagung sebelum dipanen, sehingga kasus ini tidak dilakukan olah tanah (TOT=tanpa olah tanah). Dalam kasus tersebut, pengolahan tanah dilakukan saat akan menanam jagung. Agar tanah pertanaman ubi kayu tersebut gembur, maka dilakukan pembumbunan. Biasanya pada saat pemupukan ubi kayu pertama sekitar umur tanaman satu bulan, tanaman tersebut dilakukan pembumbunan atau *dangir*. Berbeda dengan bibit ubi kayu yang ditanam awal sebelumnya, maka dilakukan pengolahan tanah terlebih dahulu, kadang sebelum bibit ditanam dilakukan pemupukan dasar baik berupa pupuk organik maupun pupuk kimia. Permasalahannya karena akses pupuk kimia agak susah, sehingga banyak petani melakukan pemupukan dengan

pupuk organik atau pupuk kandang. Di satu sisi, keterbatasan penyediaan traktor di wilayah setempat menyebabkan petani harus pesan dan menunggu antrian mendapatkan giliran. Di sisi lain, pengolahan tanah dengan traktor lebih cepat dibandingkan dengan manual, dengan cara mencangkul.

Pada umumnya, lebih dari 95% di lokus kajian menggunakan bibit unggul. Namun, biasanya petani lebih mengenalnya dengan nama daerah, seperti Thailand nama rilisnya adalah UJ.5, sedangkan Cassesart nama rilisnya adalah Uj.3. Sementara itu, yang sedang populer digunakan petani pada musim tanam 2023 adalah dengan nama daerahnya varietas Garuda. Kelebihan dan kekurangan masing-masing varietas antara lain dapat dilihat dari umur panen optimal, potensi hasil produksi dan kandungan pati (terutama bila dijual ke pabrik). Paling tidak petani akan mempertimbangkan ketiga indikator tersebut dalam manajemen usaha taninya. Berdasarkan acuan dari laporan Iswanto et al., (2016), masing-masing varietas yang sering digunakan oleh petani di Kecamatan Abung Selatan tertuang pada Tabel 11.1.

Tabel 11.1 Beberapa jenis varietas ubi kayu menurut umur optimal, potensi hasil, kandungan pati dan jarak tanam yang di terapkan

Varietas	Umur optimal panen (bulan)	Potensi hasil (ton/hektar)	Kandungan pati (%)	Rekomendasi Jarak tanam
Thailand (UJ-3)	8 – 10	35-40	25 – 30%	rapat (70x80 cm)
Cassesart (UJ-5)	10 – 12	45 – 60	30 - 36%	Double row atau jarak ganda
Garuda	7 – 10	70*		

Sumber: Iswanto et al., (2016)

Keterangan: *) informasi dari masyarakat setempat

Pada tahun 2022, varietas Thailand dominan ditanam petani di lokus kajian, walaupun rata-rata produksi relatif lebih rendah dibanding Cassesart, tetapi sisi umur panen lebih unggul, bahkan petani setempat rata-rata memanen pada umur sekitar 7 bulan. Pertimbangan petani agar bisa mengejar tanam jagung 2 kali setahun, sedangkan bila

menanam varietas Cassesart maka tidak terkejar panen ubi kayu pada bulan Oktober/November. Sementara itu, jagung pertama (rendengan) ditanam sekitar bulan Oktober–November. Selain itu, ubi kayu jenis Cassesart, menurut mereka kurang bagus bila ditanam setelah jagung, karena tanah subur (bekas jagung) biasanya menyebabkan tanaman ubi kayu subur yang berdampak pada pertumbuhan vegetatif yang cepat dan batang besar. Dengan kondisi ini, umbi yang dihasilkan dari tanaman tersebut kurang bagus atau umbinya relatif lebih kecil sehingga akan berpengaruh terhadap produksi. Sebaliknya, untuk varietas Thailand, semakin besar batang ubi kayu maka umbi yang dihasilkan juga besar.

Pemupukan pada tanaman ubi kayu selain menggunakan pupuk organik juga pupuk anorganik. Pupuk organik yang banyak digunakan adalah kotoran ayam, menurut mereka kotoran ayam lebih cepat diserap tanaman dari pada kotoran kambing atau sapi. Kotoran ayam bisa langsung diaplikasikan, sedangkan kotoran ternak kambing dan sapi sebaiknya difermentasikan terlebih dahulu, agar dalam aplikasi pupuk tersebut tidak menyebabkan tanah menjadi panas yang mengganggu pertanaman ubi kayu.

Pada umumnya, tanaman ubi kayu tahan terhadap kekeringan, namun untuk awal pertumbuhannya diperlukan kondisi basah. Oleh karena itu, biasanya petani menanam ubi kayu pada saat musim hujan atau masih ada hujan dengan curah hujan sedang. Namun demikian, pertanaman ubi kayu tidak baik bila tanahnya terlalu becek, tanah yang becek membuat struktur tanah rusak, oleh karena itu petani biasanya membuat bumbun di sekitar pohon agar air tidak menggenang.

Hama dan penyakit tanaman ubi kayu tergolong rendah, beberapa penyakit yang menyerang antara lain adalah jamur dan karat daun, namun demikian biasanya dengan serangan ringan. Oleh karena itu, petani biasanya tidak melakukan penyemprotan dengan pestisida. Penggunaan pupuk kandang dari kotoran kambing dan kotoran sapi yang tidak difermentasi memicu tumbuhnya jamur yang berdampak pada penyakit jamur pada tanaman ubi kayu. Bahkan menurut petani

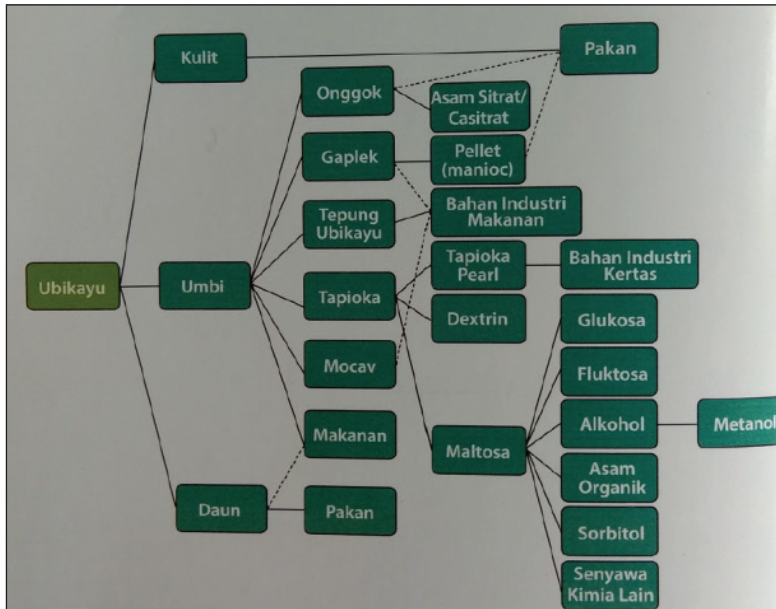
setempat kadang walaupun sudah difermentasi dengan menggunakan starter EM4 masih juga tumbuh jamur tersebut.

2. Kinerja Industri Berbasis Ubi Kayu

Petani ubi kayu pada umumnya di Kabupaten Lampung Utara menjual hasil produksinya dalam bentuk umbi segar, dengan demikian petani tidak mendapatkan nilai tambah dari pengolahan ubi kayu. Sementara itu, ubi kayu segar termasuk komoditas yang cepat rusak bila dibiarkan lama pada suhu kamar. Dengan demikian, untuk mengurangi resiko, biasanya petani menjual produk ubi kayu segera setelah panen.

Ubi kayu (*Manihot esculenta*) atau disebut singkong, pada dasarnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan, seperti yang disajikan pada Gambar 11.5. Mengacu pada gambar pohon produksi komoditas ubi kayu tersebut, tampak bahwa pemanfaatan produk utama (ubi kayu) dan produk sampingan adalah kulit umbi dan daun. Umbi dapat diolah menjadi enam produk (Saleh et al., 2016), yaitu: onggok, gapplek, tepung ubi kayu, tapioka, dan mocaf (*modified cassava flour*). Dari beberapa jenis produk tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi produk turunannya.

- 1) Onggok atau sering disebut sebagai ampas ubi kayu, yang merupakan hasil produk samping pengolahan ubi kayu menjadi tapioka, produk turunannya adalah untuk pakan ternak dan asam sitrat (casitrat).
- 2) Gapplek, digunakan untuk pellet (*manioc*) dan sebagai bahan baku makanan.
- 3) Tepung tapioka, dapat diolah menjadi: tapioka *pearl* (sebagai bahan kertas), dextrin, dan maltosa. Lebih lanjut maltosa dapat dijadikan: glukosa, fruktosa, alkohol/metanol, asam organik, sorbitol, dan senyawa kimia lain.
- 4) Mocaf, merupakan bahan baku untuk industri makanan.
- 5) Makanan, berbagai ragam makanan dari ubi kayu (dikukus, digoreng, atau diolah menjadi makanan camilan seperti: keripik singkong dsb).
- 6) Pakan ternak.



Sumber: Agrikan (2020)

Gambar 11.5 Pohon industri tanaman ubi kayu

Pemanfaatan ubi kayu tersebut juga tergantung jenis/varietas yang diproduksi. Untuk ubi kayu jenis tertentu yang rasanya pahit seperti Cassesart dan Thailand, maka cocok diolah sebagai bahan baku industri, karena kandungan HCn yang tinggi dapat hilang selama proses pengolahan. Sebaliknya, bila ubi kayu sebagai bahan makanan atau akan diolah menjadi berbagai produk makanan, maka jenis varietas ubi kayu yang cocok antara lain Adira 1, Mentega, Lanting, Betawi, dan Garuda. Hasil dari ubi kayu bisa pada dasarnya diolah dengan beragam produk, prinsipnya semua itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ubi kayu. Sementara batang kayunya bisa digunakan untuk bibit, selain itu juga dapat dijadikan kayu bakar. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pengolah ubi kayu skala pabrik, memerlukan modal besar, sehingga sulit dilakukan secara individu petani maupun kelompok, kecuali untuk produk tertentu

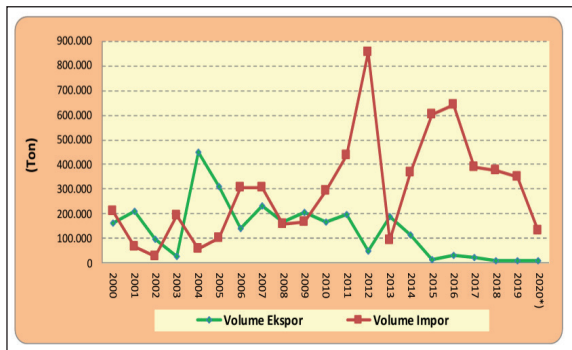
Buku ini tidak diperjualbelikan.

seperti makanan ringan, ini pun memerlukan jenis varietas ubi kayu tertentu. Peluang hilirisasi pada produk ubi kayu relatif kecil bagi petani skala kecil.

3. Dinamika Ekspor dan Impor Produk Ubi Kayu

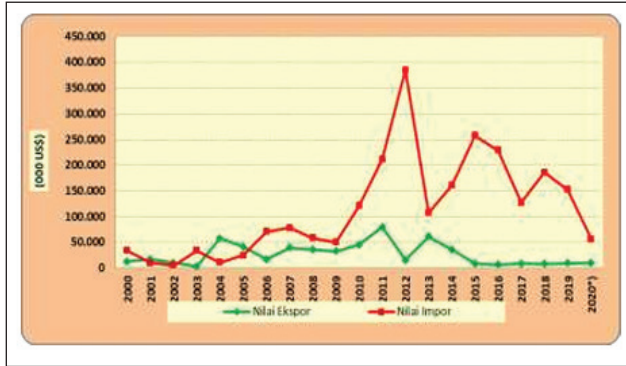
Di satu sisi, ubi kayu di Indonesia belum ditempatkan sebagai komoditas strategis, bahkan terkesan sebagai komoditas inferior. Padahal nilai ekspor ubi kayu menduduki urutan pertama tertinggi di antara ekspor subsektor tanaman pangan. Di sisi lain, walaupun nilai ekspor tinggi ternyata nilai impor ubi kayu juga relatif tinggi. Kinerja yang searah dengan itu juga volume ekspor dan impor ubi kayu. Dilema ini merupakan bumerang bagi pemerintah dengan nilai impor yang tinggi tentunya akan menguras devisa negara, sementara potensi lahan untuk pengembangan ubi kayu di Indonesia cukup luas. Sebagai gambaran, volume dan nilai ekspor dan impor ubi kayu disajikan pada Gambar 11.6 dan 11.7.

Ekspor ubi kayu umumnya berbentuk ubi kayu basah dan kering, namun yang dominan diperdagangkan adalah ubi kayu kering (Pusdatin Kementan, 2020). Perkembangan volume ekspor (Gambar 11.6) tampak pada awal tahun 2000–2002 dan 2004 menunjukkan bahwa volume ekspor rata-rata lebih tinggi dibandingkan volume im-



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2020)

Gambar 11.6 Perkembangan volume ekspor dan impor ubi kayu Indonesia, 2000–2020



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2020)

Gambar 11.7 Perkembangan nilai ekspor dan impor ubi kayu Indonesia, 2000–2020

por. Sementara itu, nilai impor (Gambar 11.7) pada periode tersebut nilai ekspor dan nilai impor relatif berimpit, ini menunjukkan harga ubi kayu ekspor hampir sama dengan harga impor.

Dalam kurun waktu 2009–2020 menunjukkan bahwa baik volume maupun nilai impor jauh lebih tinggi dibanding volume dan nilai ekspor, begitu pula laju pertumbuhannya cukup tinggi walaupun fluktuatif dalam periode tersebut. Bila tidak ada campur tangan pemerintah dikawatirkan akan cenderung meningkat volume ekspor tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa permintaan dan kebutuhan konsumsi ubi kayu masih banyak diperoleh dari impor, terutama dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2020). Selama ini mungkin tidak disadari oleh pemerintah, komoditas yang dianggap inferior ini ternyata berpeluang menguras devisa negara. Pesan yang disampaikan pada fenomena di atas, untuk menginspirasi bagi Indonesia agar bisa memproduksi lebih tinggi lagi, bila diperlukan digenjut dengan program upaya khusus untuk meningkatkan kinerja pertanian ubi kayu.

G. Kegagalan Petani dalam Merespon Kebijakan Pupuk Subsidi

Komoditas ubi kayu masih dianggap sebagai komoditas inferior, sehingga perhatian pemerintah dalam memajukan pertanian ubi kayu kurang diperhatikan. Salah satu bukti ketidakberpihakan terhadap pertanian ubi kayu diantaranya adalah pemerintah tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi pada petani ubi kayu, sehingga petani ubi kayu harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya relatif mahal. Selain itu, program pembangunan pertanian kurang menysasar pada petani ubi kayu.

Ubi kayu merupakan komoditas legendaris yang sudah sejak lama dibudidayakan di Provinsi Lampung, tak terlepas juga di Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya inovasi jenis ubi kayu yang berumur genjah (umur 7–8 bulan) dan inovasi komoditas jagung hibrida, maka petani ubi kayu banyak beralih fokus ke komoditas jagung. Namun, ubi kayu masih diusahakan dengan melakukan rekayasa pola tanam. Pola tanam dominan adalah jagung-ubi kayu, dengan pengetahuan lokal mereka bila curah hujan cukup maka dapat menerapkan pola tanam jagung-jagung/singkong. Pola tanam kedua, ubi kayu ditanam dengan cara tumpang sisip atau tumpang gilir, di mana jagung kedua sebelum panen (idealnya umur jagung 80–90 hari) ubi kayu tersebut ditanam di antara tanaman jagung.

Kasus yang dialami oleh salah satu petani, Bapak Prianto, dari luasan lahan 0,75 hektar dihasilkan ubi kayu sebanyak 14,5 ton, sedangkan harga yang diterima dari pabrik Rp1.085/kg. Menurut perhitungan Bapak Prianto, biaya panen dan pascapanen hingga di pabrik mencapai Rp485/kg. Apabila diperhitungkan biaya prapanen, maka nilai bersih ubi kayu hanya sekitar Rp400/kg, bila umur tanaman sampai panen enam bulan, maka dengan luasan 0,75 hektar, pendapat bersih yang diterima hanya sekitar Rp1.000.000/bulan, sedangkan jumlah anggota keluarga empat orang. Jika diperhitungkan per kapita maka pendapatan usaha tani ubi kayu masih jauh di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung (2021) garis kemiskinan Kabupaten Lampung Utara tahun 2020, sebesar

Rp475.290/kapita/bulan. Namun, responden tidak nelangsa walau pendapatan kecil dari usaha tani ubi kayu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prianto berikut:

“...usaha tani ubi kayu luwih ringan dibandingke jagung, pola tanem yang kulo terapke adalah jagung-ubi kayu utowo jagung-jagung/ubi kayu, kebutuhan pupuk kanggo ubi kayu kulo atur soko jatah jagung sing asale soko kelompok tani ...” (wawancara penulis tanggal 14 juni 2023).

Pesan yang disampaikan Pak Prianto, bahwa ketidakberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan pupuk subsidi untuk komoditas ubi kayu membuat petani harus berpikir untuk mengatasi masalah tersebut. Petani harus menyiasati penggunaan pupuk dalam usaha tani yang selama ini digeluti. Rupanya dengan tidak ada alokasi pupuk subsidi, harus membeli pupuk dengan harga yang relatif mahal, padahal petani ubi kayu sebagian besar adalah petani rakyat dengan skala usaha relatif kecil (< 1 hektar). Selain itu, petani juga berpikir akan beralih ke pupuk organik atau pupuk kandang sebagai pengganti pupuk anorganik atau pupuk kimia, namun hal ini tidak instan sehingga perlu proses untuk mengolah pupuk kandang.

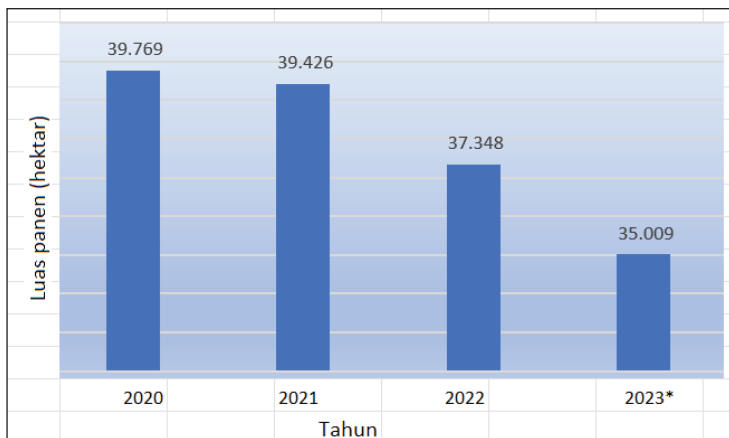
Mengingat pengembangan ubi kayu bukan prioritas unggulan di tingkat pusat, hal ini juga ditemukan pada kegiatan penyuluhan pertanian. Contohnya, penyuluh pertanian juga kurang memperhatikan pertanian ubi kayu di lokus kajian. Kondisi tersebut merupakan salah satu bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap kemajuan dan berkembangnya pertanian ubi kayu.

H. Produk dan Mata Rantai Pemasaran Ubi Kayu

1. Perkembangan Produksi Ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara

Data BPS menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan sentra produksi ubi kayu utama nomor satu di Indonesia. Sementara itu, Lampung Utara merupakan sentra produksi ubi kayu utama

nomor dua setelah Kabupaten Lampung Tengah. Pertanaman ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara, terbentang luas menyebar di 23 kecamatan, tetapi sentra produksi ubi kayu utama dominan di Kecamatan Abung Surakarta, Abung Timur, Abung Selatan, Sungkai Utara, Kotabumi Selatan, dan Kotabumi Utara. Ubi kayu merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Utara, luas lahan untuk pertanaman ubi kayu relatif stagnan (Gambar 11.8).



Sumber: diolah dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara

Gambar 11.8 Perkembangan luas areal panen ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara (2020–2022) dari data dasar Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara.

Lahan pertanian dan produksi tanaman yang dihasilkan merupakan bagian dari indikator pertanian, sehingga peningkatan kedua variabel tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan produksi pertanian. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 seluas 39.769 hektar menurun menjadi 39.426 hektare, relatif kecil (sekitar -0,9%) pada tahun 2021. Sementara realisasi areal tahun 2022, menurun menjadi 37.348 hektar (-5,8%). Bila dibandingkan dengan target yang dicanangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melalui SK No. 821.1/1815/KDS/2022

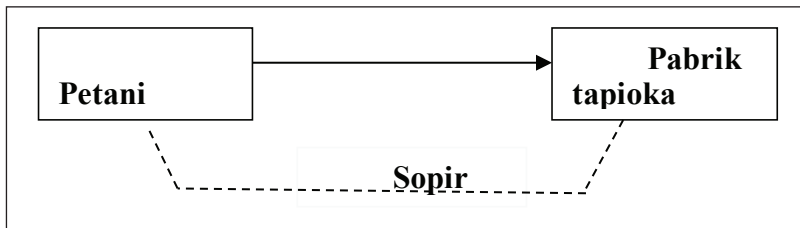
mengamanatkan sasaran areal tanam ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara sebesar 35.009 hektar, target tersebut menurun cukup besar (-6,3%) dibandingkan dengan realisasi luas panen ubi kayu tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bukti pemerintah kurang berpihak terhadap pengembangan ubi kayu di wilayahnya.

Hasil produksi berdasarkan data hasil survei Ubinan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 rata-rata 274,6 kuintal/hektar. Produktivitas tersebut relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi ubi kayu yang dihasilkan petani di Kecamatan Abung Selatan, untuk varietas Thailand rata-rata bisa mencapai >30 ton/hektar. Sementara itu, varietas Garuda menurut hasil diskusi dengan PPL dan PML setempat, bahkan potensi produksi bisa mencapai 70 ton/hektar. Pada tahun 2022, varietas Garuda masih relatif sedikit petani yang menggunakan. Menurut pengamatan responden, tahun 2023 sebagian besar petani (>50%) pertanaman ubi kayu di Lampung Utara dan sekitarnya. Ini membuktikan bahwa cepatnya petani mengadopsi inovasi bibit ubi kayu tersebut, walaupun informasi tersebut diperoleh dari sumber informal bahkan dari mulut ke mulut. Petani realistis, logikanya bila inovasi tersebut baik dan akan menguntungkan petani dengan mudahnya dan cepat mereka mengadopsi teknologi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian kurang menyentuh pada petani ubi kayu, secara mandiri petani ubi kayu mencari informasi untuk kemajuan usaha tani mereka.

Di tingkat lokal Kabupaten Lampung Utara, prospek pengembangan komoditas relatif bagus, di dalam RPD pengembangan ubi kayu merupakan komoditas unggulan, secara implisit belum ada aksi dalam program maupun fasilitasi terkait usaha tani ubi kayu. Direktorat Jendral Tanaman Pangan pernah mengadakan kegiatan terkait pengembangan ubi kayu pada tahun 2016, yaitu kegiatan intensifikasi pertanian ubi kayu dan perluasan areal tanam (PAT), namun jumlah petani yang disasar relatif terbatas, sehingga dampaknya kurang terasa bagi petani ubi kayu. Program *top down* ini tidak berlanjut, sehingga intensifikasi ubi kayu tidak lagi diimplementasikan

1. Mata Rantai Pemasaran Ubi Kayu, Kasus di Kecamatan Abung Selatan

Pada umumnya, petani ubi kayu di Kecamatan Abung Selatan rantai pemasaran ubi kayu relatif pendek dan sederhana, petani di Kecamatan Abung Selatan memasarkan produk ubi kayunya ke pabrik tapioka, 90% ditujukan ke PT Kilau Mas Mandiri yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal maupun lokasi lahan kisaran radius 3–5 km. Sisanya 10% menjualnya ke Pabrik Tapioka Sinar Laut, yang lokasinya lebih jauh, menurut penuturan responden kadang-kadang memberikan harga lebih tinggi atau potongan rafaksi lebih rendah, namun ongkos angkutnya lebih tinggi, sehingga secara agregat hampir sama. Dalam pemasaran ubi kayu petani, awalnya menghubungi sopir kalau mau menjual hasil ubi kayunya atau juga bisa sebaliknya, sopir yang menawarkan jasa kepada petani. Atas dasar kepercayaan tersebut petani merasa aman untuk memasarkan melalui sopir yang bersangkutan (Gambar 11.9).



Gambar 11.9 Rantai pemasaran ubi kayu di Kecamatan Abung Selatan

Kadang-kadang sopir bisa bernegosiasi dengan pabrik, terutama masalah potongan nilai rafaksi, bila dirasa nilai tersebut terlalu tinggi dibanding rata-rata rafaksi petani lain. Sopir juga menjaga hubungan baik dengan petani langganan agar mereka tetap menggunakan jasa angkut dari sopir tersebut. Justifikasi ini karena untuk penentuan nilai potongan rafaksi adalah dengan sistem sampel, petugas pabrik, jadi dari pihak pabrik mengambil beberapa umbi untuk dites. Bisa saja sampel yang diambil kebetulan yang kurang bagus, tetapi menentukan penilaian seluruh produk ubi kayu di truk tersebut.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Kecamatan Abung Selatan

Penduduk yang tinggal di Kecamatan Abung Selatan pada umumnya adalah etnis Jawa yang sudah sejak lama penduduk Jawa pindah sebagai transmigran. Transmigrasi penduduk Jawa dimulai sejak penjajahan Kolonial Belanda, waktu itu ke daerah Lampung Selatan dan bagian Tengah (Metro), waktu Lampung Utara belum dijamah (Budianto et al., 2021). Transmigrasi ke Lampung Utara sejak masa Orde Baru, bahkan banyak penduduk Jawa yang pindah ke Lampung, sehingga penduduk asli Lampung mulai terdesak, maka terjadilah transmigrasi lokal Lampung yang mulai menuju wilayah Lampung Utara yakni sekitar tahun 1970-an. Sementara itu, generasi yang tinggal sampai saat ini sebagian besar adalah keturunan Jawa yang lahir di bumi Lampung Utara. Oleh karena itu, bahasa komunikasi yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa.

Sebagai transmigran yang harus menyesuaikan kondisi alam Lampung, maka harus beradaptasi dengan pertanian lahan kering setempat. Para transmigran tersebut diberikan lahan pertanian berupa ladang/lahan kering seluas 0,75 hektar dan lahan pekarangan seluas 0,25 hektar. Pada saat itu komoditas yang banyak diusahakan adalah komoditas perkebunan terutama karet dan lada. Sementara itu, untuk tanaman pangan saat itu yang cocok dengan alam setempat adalah usaha tani ubi kayu. Pada saat itu ubi kayu diolah dan dijadikan sebagai makanan pokok seperti di daerah asalnya (Jawa), ubi kayu diolah menjadi oyek atau tiwul. Karena langkanya padi di wilayah tersebut maka pertanian ubi kayu menjadi andalan. Waktu itu jenis ubi kayu yang ditanam umumnya umur panen 10–12 bulan, sehingga petani harus mempunyai stok pangan dari ubi kayu, yang disimpan umumnya dalam bentuk gaplek atau tepung gaplek.

Dalam perkembangannya pertanian ubi kayu semakin maju, yakni dengan hadirnya perusahaan swasta yang memproduksi tepung tapioka. Disisi lain konsumsi pangan pokok berbasis ubi kayu/gaplek semakin lama semakin tidak tampak. Hal ini karena semakin mudah-

nya untuk memperoleh beras yang masaknyanya tidak terlalu ribet bila dibandingkan dengan cara memasak tiwul. Saat ini, konsumsi tiwul masih ditemui di kalangan penduduk setempat, namun bukan lagi sebagai makanan pokok, tiwul merupakan makanan camilan.

Dalam perencanaan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lampung Utara, disebutkan bahwa ubi kayu menjadi salah satu komoditas unggulan. Namun, usaha tani ubi kayu tidak dapat dijadikan sebagai andalan pokok dalam perolehan pendapatan. Oleh karena itu, petani harus mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti yang dilakukan responden petani Bapak Prianto, dengan luas garapan 0,75 hektar, memberikan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan usaha tani jagung. Andalan komoditas pertanian belakangan ini adalah jagung, selain mudah dijual, harga juga relatif baik. Namun demikian, ubi kayu ditanam setelah tanam jagung, saat ini andalan pendapatan usaha tani yang cukup menjanjikan adalah jagung, walaupun modal biaya lebih tinggi, namun jaminan harga dan pendapatan cukup menjanjikan. Selain ubi kayu dan jagung, petani lahan kering juga memelihara ternak kambing, namun kasus ditemui di responden Bu Paini, yang mengutarakan kasusnya seperti berikut ini.

“... setahun wingi ngingu Wedus, nanging saiki wis cures, soale manak mati, nganti ping loro akhiri wedus induke loro-loronen meriang terus susune panas dadi anake mati akhire tak dol yo payu murah, pengine ngingu maneh tapi modale durung ono ... saiki kandange kosong ...” (wawancara penulis 13 Juni 2023).

Pesan dari kasus tersebut adalah petani tidak tahu harus berbuat apa, sehingga peliharaan kambingnya sudah *cures* atau punah. Akibatnya, petani tersebut menanggung kerugian cukup besar. Ternak kambing selama ini merupakan andalan sebagai tabungan yang sewaktu waktu dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Sebenarnya ingin mengambil pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas. Tahun yang lalu pinjam uang melalui skema KUR di BRI setempat sebesar Rp500.000, mengangsurnya sesuai

kondisi keuangan petani, terutama dari hasil menyadap karet, sebagai jaminan pendapatan rutin yang diterima petani. Hasil karet responden diperoleh setiap hari bila tidak hujan, namun dijualnya seminggu sekali. Dalam seminggu biasanya dapat menyadap karet sekitar 25–30 kg, harga karet berfluktuasi saat ini Rp7.000/kg, dari menjual karet tersebut rata-rata perolehan uang dari hasil karet tersebut berkisar Rp150.000–200.000 ribu per minggu. Perolehan rutin uang inilah sebagai harapan petani. Pendapatan dari pertanian, baik karet maupun ubi kayu belum bisa diandalkan untuk menopang biaya kehidupannya. Oleh karena itu, untuk menambah pendapatan, baik Bu Paini maupun anaknya, Priyadi, berburuh pertanian di sekitar desa. Dari kisah tersebut maka peranan perempuan dalam kegiatan pertanian sangat signifikan, tidak hanya dalam usaha tani ubi kayu tetapi juga sub sektor lainnya seperti usaha tanaman perkebunan dan juga usaha ternak (khususnya kambing dan ayam kampung).

Hasil pendataan sensus pertanian dan wawancara responden di Desa Trimodadi dan Desa Abung Jayo, ditemukan bahwa perempuan terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan budidaya ubi kayu, termasuk persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Dalam tahap penanaman, perempuan sering kali bertanggung jawab atas penentuan pola tanam, penggunaan bibit, dan pengendalian hama secara alami. Pengetahuan tradisional perempuan mengenai pola tanam dan penggunaan pestisida alami membantu menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Dalam hal ini, perempuan tidak hanya bekerja sebagai tenaga kerja dalam keluarga, tetapi juga sering kali menjadi pengambil keputusan dalam hal pemilihan varietas ubi kayu dan penggunaan input pertanian.

Setelah proses panen, perempuan juga berperan penting dalam pengolahan hasil ubi kayu. Dalam kasus ini, perempuan melakukan, dalam terlibat dalam pengolahan ubi kayu menjadi produk bernilai tambah, seperti tepung tapioka dan keripik ubi kayu maupun olahan makanan lainnya. Perempuan sering kali juga terlibat dalam pengelolaan keuangan hasil penjualan ubi kayu, yang berperan penting

dalam mendukung ekonomi rumah tangga. Untuk memaksimalkan kontribusi mereka, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender yang memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang pelatihan. Dengan demikian, potensi perempuan dalam pertanian ubi kayu dapat lebih dioptimalkan, mendukung kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi lokal.

Berbeda dengan kisah petani milenial yang bernama Nariman, usia 39 tahun dan tinggal di Desa Kali Balangan, Kecamatan Abung Selatan. Nariman dengan tingkat pendidikan D3 akuntansi adalah seorang petani ubi kayu sekaligus juga peternak ayam broiler yang berhasil dalam usahanya. Semula ia bekerja sebagai *salesman* suatu perusahaan distributor rokok dan produk sembako di kota tak jauh dari kampungnya, namun dampak pandemi Covid-19 membuat dia kehilangan pekerjaannya. Akhirnya, ia kembali ke kampung, di benak harapannya bisa bekerja untuk menghidupi istri dan seorang anaknya. Mau berusaha di pertanian tetapi tidak punya lahan. Dengan modal seadanya dari sisa tabungannya dari bekerja sebelumnya, seorang Nariman bertekad untuk mengusahakan ayam broiler dan bermitra dengan perusahaan Swasta Broiler Makmur Tangguh (BROMAT) di Metro. Hal ini diilhami dari kandang ayam yang kosong milik peternak yang sudah berhenti usaha di desa tempat tinggalnya.

Nariman memulai usahanya dengan menyewa kandang, sementara input produksi berupa DOC, pakan, dan obat-obatan diperoleh dari mitra, dengan catatan hasil dari produksi ayamnya dijual ke mitra dengan kontrak harga ditentukan pada saat awal. Untuk mendukung usaha tersebut, Nariman memperkerjakan dua orang anak kandang yang membantu mengelola di kandang dengan imbalan upah bagi hasil (borongan). Umur panen ayam awal pada umur 25 hari, yaitu penjarangan dengan menyirtir ayam yang kecil, 4-5 hari kemudian dipanen seluruhnya. Nariman memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp15 juta per siklus, setahun paling tidak minimal empat kali siklus.

Untuk meningkatkan pendapatannya, Nariman tertarik juga mengusahakan budi daya ubi kayu, walaupun sebelumnya sudah mengusahakan ubi kayu milik orang tuanya. Maka dengan menyewa

lahan seluas 0,75 ha mulailah ia mengusahakan ubi kayu secara mandiri. Harapannya usaha pertanian akan terus berkembang dan juga dapat memperkerjakan para pemuda sekitar. Dengan keberhasilannya, Nariman juga berusaha mendorong para pemuda untuk memanfaatkan peluang usaha di desa mereka, sampai saat ini usaha pertanian masih menjanjikan.

J. Penutup: Sebuah Kesimpulan Sensus Pertanian di Lampung Utara

Data sensus pertanian merupakan dasar data yang dapat dijadikan basis kebijakan dalam pembangunan pertanian mendatang. Mengingat pentingnya peran sektor pertanian di Indonesia baik dalam kehidupan, pembangunan, dan perekonomian. Pertanian di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh pertanian lahan kering. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan peluang, potensi lahan, dan sumber daya pendukung lainnya. Dengan luasan lahan kering yang reatif sempit ($<0,5$ hektar), maka usaha tani ubi kayu tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga petani. Bagi petani kreatif akan memanfaatkan peluang yang ada, kasus sukses petani milenial sehingga dapat memberi manfaat ekonomi dan juga dapat memperkerjakan tenaga upahan untuk mendukung usahanya. Kasus tersebut dapat dijadikan inspirasi bagi petani milenial lainnya atau petani pada umumnya.

Narasi emik yang didasarkan dari penggalian data dan informasi berdasarkan pendalaman fakta dan makna dari angka statistik yang dikemukakan secara rasional menurut petani dapat memperjelas jawaban dari angka-angka statistik dari sensus pertanian. Hasil penggalian informasi menunjukkan masih ada permasalahan usaha tani ubi kayu baik pada masa pra panen maupun panen dan pasca panen. Masalah prapanen yang dirasakan petani adalah harga pupuk yang mahal karena tidak adanya subsidi pemerintah, sedangkan permasalahan hulu dalam pemasaran ubi kayu, petani tidak berdaya dalam posisi tawar harga output juga tingginya potongan refraksi.

K. Daftar Pustaka

- Anggraini, N., Hasyim, A. I., & Situmorang, S. (2013). Analisis efisiensi pemasaran ubi kayu di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 1(1), 80–86. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/135/139>
- Agrikan. (2020). *Pohon industri dan varietas unggul ubi kayu*. Agrikan: Kabar Pangan dan Agri Bisnis. <https://agrikan.id/pohon-industri-dan-varietas-unggul-ubi-kayu/>
- Bappeda Kabupaten Lampung Utara. (2023). *Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara, Buku 2 (Bab 5–7)*. Bappeda Kabupaten Lampung Utara.
- Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. (2008). *Teknologi budidaya ubi kayu*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- BPS. (2020). *Indikator pertanian 2020*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Lampung Utara. (2023). *Kabupaten Lampung Utara dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara.
- BPS Provinsi Lampung. (2021). *Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung, 2020*. <https://lampung.beta.bps.go.id/id/statistics-table/3ZG1oc2JVcHZhVkpSVDfscmQxTTVTMWxqT1hwMFVUMDkjMw==/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-lampung.html?year=2020>
- Budianto, A., Mustofa, M. B., & Hasanah, U. (2021). Transmigrasi lokal di Lampung: Varian kebijakan perpindahan penduduk di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i1.3661>
- Elfianis, R. (2020). *Jenis pupuk, tahapan dan cara pemupukan tanaman singkong*. <https://agrotek.id/cara-pemupukan-tanaman-singkong/>
- Hartawan, M. B., Suhartanto, E., & Wahyuni, S. (2021). Sedimentasi berbasis sistem informasi geografis (SIG) pada bagian hulu DAS Way Rarem Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air*, 1(2), 612–621. DOI:10.21776/ub.jtresda.2021.001.02.23
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan rumah tangga di pedesaan Jawa Timur. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 39–52.

- Irawan, P.P., Sriyoto, & Sumantri, B. (2021). *Analisis Efisiensi usahatani ubi kayu pada strata luas lahan yang berbeda: Studi kasus desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur* [Skripsi, Universitas Bengkulu]. Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. <https://repository.unib.ac.id/id/eprint/14634>
- Iswara, R. (2021). *Efisiensi teknis dan ekonomi usaha tani ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah* [Tesis S2]. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
- Iswanto, D. R., Noerwijati, K., Dian Adi Anggraeni, E., Sulisty Dwi Setyorini, S., & Musaddad, I. A. (2016). *Hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi*. <https://balitkabi-litbang-ppid.pertanian.go.id/doc/108/laptun-2015.pdf>
- Prasmatiwi, F. E., Murniati, K., & Iswara, R. (2022). Efisiensi teknis dan ekonomis usaha tani ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah. *Mimbar Agribisnis*, 8(1), 118–131.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2020). *Outlook ubi kayu, komoditas pertanian subsektor tanaman pangan*.
- Saleh, N., & Widodo, Y. (2007). Profil dan peluang pengembangan ubi kayu di Indonesia. *Buletin Palawija*, 14, 69–78.
- Thamrin, M., Mardiyah, A., & Marpaung, S. E. (2013). Analisis usaha tani ubi kayu (Manihot utilissima). *Jurnal Agrium*, 18(1), 343–409.
- Watubun, K. (2022). *Kebijakan tata guna lahan harus sesuai karakter per daerah*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/14/095259565/kebijakan-tata-guna-lahan-harus-sesuai-karakter-per-daerah?page=2>

Bab XII

Pasang Surut Pertanian Lada Putih di Kabupaten Bangka Tengah

Husmiati

Pertanian lada putih memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Namun, keberlanjutan sektor pertanian ini dihadapkan pada tantangan akibat perubahan pasang surut lingkungan dan faktor sosial-ekonomi. Laporan ini disusun bersamaan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Data tentang pertanian lada putih dikumpulkan dari responden petani yang menjadi responden Sensus Pertanian 2023. Faktor sosial-ekonomi, seperti akses terhadap pasar, teknologi, dan pendidikan berpengaruh terhadap keberlanjutan pertanian. Petani dengan akses terbatas terhadap teknologi modern dan informasi pasar memiliki kesulitan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka. Untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian lada putih, langkah-langkah

Husmiati

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: husm001@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Husmiati. (2025). Pasang surut pertanian lada putih di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 459–488). Penerbit BRIN. Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c948
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

adaptasi dan mitigasi perlu diimplementasikan agar dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan hasil panen. Adanya sensus pertanian berguna untuk memberikan wawasan penting tentang tantangan dan peluang dalam menjaga keberlanjutan pertanian lada putih di Kabupaten Bangka Tengah. Implementasi tindakan yang tepat akan memungkinkan pertanian lada putih tetap menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

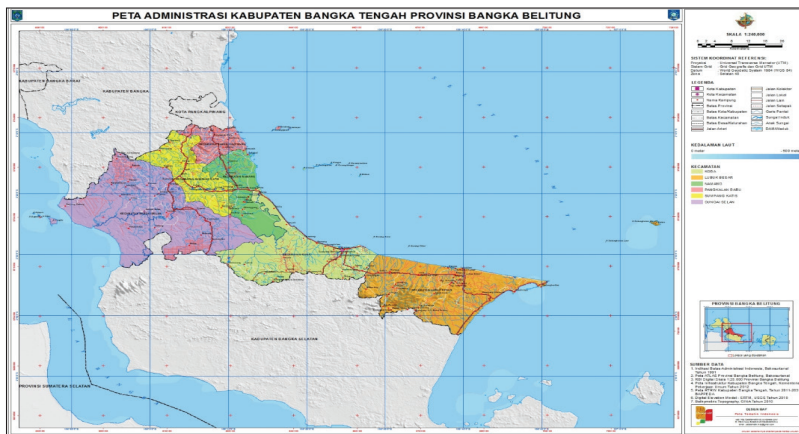
A. Sensus Pertanian Di Kabupaten Bangka Tengah

Pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali melakukan sensus pertanian. Sensus pertanian memiliki dampak besar pada kehidupan banyak orang, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang akurat dan kebijakan yang akurat memerlukan data yang akurat pula (Qosim, 2023). Data dari Sensus Pertanian 2023 yang akurat akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi pertanian di seluruh Indonesia. Sensus Pertanian 2023 adalah sensus pertanian ke-7 di Indonesia sejak 1963 yang diadakan pada bulan Juni–Juli. Sensus ini mencakup rumah tangga usaha pertanian, non-rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian. Tidak kurang dari 350 ribu petugas terlibat di seluruh Indonesia. Sensus Pertanian 2023 akan mengalami sedikit perbedaan dibandingkan dengan sensus sebelumnya. Terdapat empat tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyediakan data mengenai struktur pertanian dan indikator SDGs pertanian, petani milineal, geospasial pertanian, dan manajemen pertanian.

Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 134 petugas lapangan sensus (PLS) untuk enam kecamatan. Sementara itu, petugas yang memeriksa hasil lapangan (PML) sebanyak 23 orang yang merupakan pemeriksa pekerjaan PLS, didampingi oleh enam koordinator sensus kecamatan (Koseka). Di Kabupaten Bangka Tengah, satu PLS diberi tugas sebanyak 120 responden usaha perorangan (keluarga) dan 130 usaha pertanian. Seluruh tugas tersebut harus diselesaikan dalam waktu dua bulan. Kemudian, data yang telah

didapat oleh PLS diserahkan kepada PML untuk diverifikasi semua dokumen dari lapangan, Jika dokumen lengkap dan data valid, maka dokumen sensus diserahkan ke koseka untuk proses selanjutnya di BPS Kabupaten Bangka Tengah. Sensus Pertanian 2023, melakukan inovasi metode pendataan dengan menggunakan multimode pendataan *paper assisted personal interviewing* (PAPI), *computed assisted personal interviewing* (CAPI), dan *computer assisted web interviewing* (CAWI) (BPS, 2023a). Penggunaan teknologi yang lebih canggih ini karena Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional sesuai panduan dari FAO, serta dapat menghasilkan akurasi data yang lebih baik dari sensus sebelumnya. Selain itu, yang membedakan Sensus Pertanian 2023 dengan sensus sebelumnya adalah mengangkat isu strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan juga pendapatan petani sebagai *proxy* kesejahteraan petani (BPS, 2023a). Gambar 12.1 adalah peta administrasi Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi wilayah Sensus Pertanian 2023 yang terdiri dari enam kecamatan dengan tujuh kelurahan dan 56 desa.

Dilaksanakannya sensus pertanian di Kabupaten Bangka Tengah menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya bagi petani lada.



Sumber: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (2018)

Gambar 12.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan

Walaupun instrumen sensus tidak menyebutkan secara gamblang tentang pertanian lada, setidaknya dapat diketahui kondisi pertanian yang ada di Bangka Tengah termasuk pertanian lada saat ini. Informasi mengenai luas lahan pertanian lada, teknik budi daya yang digunakan, serta profil petani dapat membantu pelaku usaha pertanian lada dalam merencanakan strategi yang efektif. Petani lada dapat mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi kelemahan dan potensi yang dapat dioptimalkan, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Idealnya, petani lada di Bangka Tengah dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menghadapi risiko gagal panen. Sensus Pertanian 2023 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil, serta dasar penyusunan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan pembangunan pertanian di Indonesia, khususnya kabupaten Bangka Tengah. Sesuai dengan tema Sensus Pertanian 2023 yaitu “Mencatat Pertanian dan Perikanan Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

B. Bentang Alam Pertanian di Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah dan lembah, serta sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan hamparan pantai yang indah serta penghasil timah utama di Indonesia. Secara geografis, letak provinsi ini juga menguntungkan karena berada pada poros tengah jalur lalu lintas Pulau Sumatra dan Selat Karimata yang merupakan jalur perdagangan internasional. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Posisi geografis provinsi ini adalah $1^{\circ}50' - 3^{\circ}10' \text{ LS}$ dan $105^{\circ} - 108^{\circ} \text{ BT}$. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah

dan kerukunan antaretnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: sebelah utara dengan Laut Natuna; sebelah timur dengan Selat Karimata; sebelah selatan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat dengan Selat Bangka. Di samping timah, adapun sumber daya alam yang ada di Bangka Belitung berasal dari beberapa komoditas lain sektor pertambangan, seperti granit, pasir kuarsa, kaolin, bijih besi, tanah liat, dan tanah urug. Sementara itu, untuk sektor pertanian ada lada, sawit, karet, dan tanaman holtikultura lainnya.

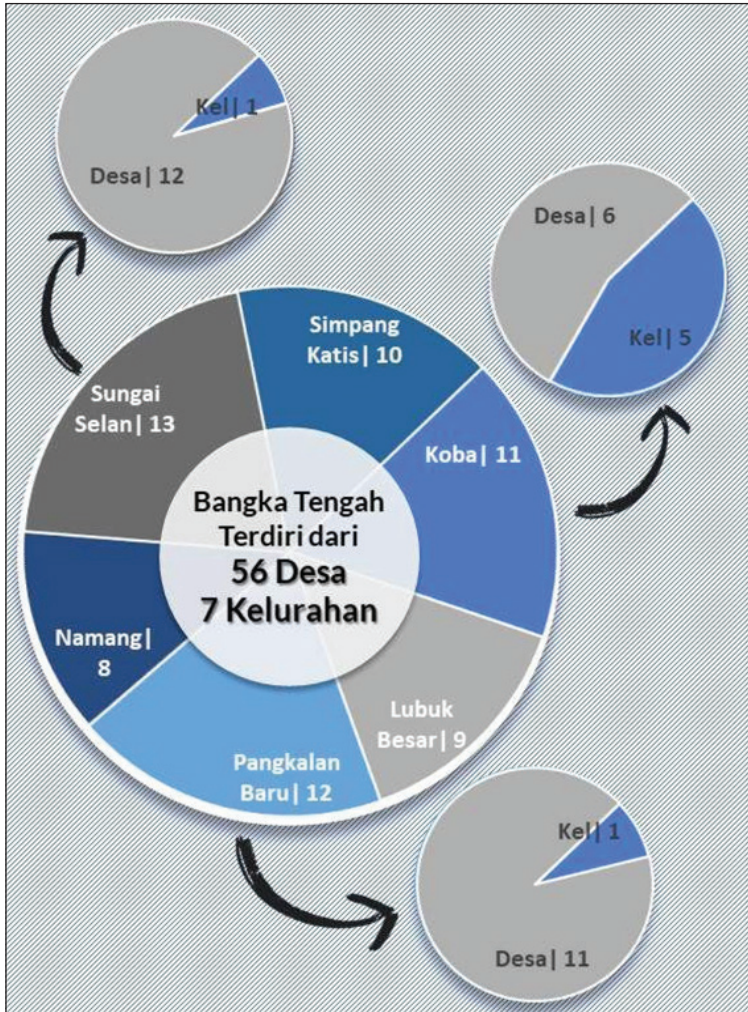
Salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung adalah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah ada di Pulau Bangka dengan ibukotanya adalah Koba. Kabupaten Bangka Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Secara administratif, kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah sebesar 198.946 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2021). Tabel 12.1 menunjukkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 12.1 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju pertumbuhan penduduk per Tahun (%) 2010–2020
Koba	42.929	2,05
Lubuk Besar	31.153	3,11
Pangkalan Baru	46.027	2,01
Namang	16.837	1,86
Sungai Selan	36.073	1,78
Simpang Katis	25 927	1,48
Kabupaten Bangka Tengah	198 946	2,06

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah (2021)

Secara geografis, Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari enam kecamatan dengan tujuh kelurahan dan 56 desa. Gambar 12.2 menunjukkan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah (2021)

Gambar 12.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus memperkuat sektor pertanian untuk memulihkan perekonomian warga yang sempat terpuruk dilanda pandemi COVID-19 lalu (Antara, 2022). Salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan sebagai sumber devisa negara, di samping komoditas perkebunan lainnya adalah lada putih. Pada periode 2014–2016, Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu daerah produsen lada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tahun 2014 dari Maryadi et al. (2016) menunjukkan bahwa dari total 19.278 hektar perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Tengah, sekitar 2.613 hektar (13%) ditanami lada, sedangkan sisanya berupa karet, kelapa sawit, dan tanaman perkebunan lain. Permasalahan yang ada dalam pengembangan perkebunan lada rakyat di Kabupaten Bangka Tengah adalah rendahnya produktivitas lada, belum efisiennya sistem pemasaran komoditi lada putih di tingkat petani, keterbatasan modal untuk memperoleh bibit unggul dan sarana produksi lainnya. Belum berkembangnya peningkatan nilai tambah berupa produk olahan juga menyebabkan rendahnya pendapatan petani. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Nurllah dan Iswari (2019), lemahnya persaingan lada di pasar dunia tidak hanya berdampak kepada devisa negara, tetapi juga sangat berdampak kepada para petani lada itu sendiri.

Hasil penelitian Daras dan Pranowo (2009), menyimpulkan bahwa penurunan luas areal pertanaman lada disebabkan oleh faktor fluktuasi harga lada, gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), dampak penambangan timah ilegal, dan introduksi tanaman perkebunan lainnya. Masih berdasarkan hasil penelitian Maryadi et al. (2016), Bangka Tengah sesuai untuk tanaman lada yaitu sebesar 99,74% dari lahan yang ada. Asumsinya, produksi tanaman lada mulai berproduksi pada umur tiga tahun setelah tanam dan mengalami produksi maksimal pada empat tahun setelah tanam dan akan terus menurun hingga umur enam tahun. Di pasar internasional, lada Indonesia mempunyai kekuatan dan daya jual tersendiri karena cita rasanya yang khas. Lada Indonesia dikenal dengan nama *muntok white pepper* untuk lada putih dan *lampong black pepper* untuk lada hitam (Yuhono, 2005).



Foto: Husmiati (2023)

Gambar 12.3 Perkebunan Lada Putih di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

Penurunan harga lada putih yang cukup drastis di tingkat petani menjadi persoalan sosial dalam bidang ekonomi yang berimplikasi kepada persoalan penurunan produktivitas. Ditambah karakteristik dari petani lada ini rata-rata hanya memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta pengetahuan bercocok tanamnya yang hanya didapatkan dari hasil pengalaman turun-temurun membuat para petani tidak lagi fokus untuk perawatan dalam mengurus tanaman lada mereka, dan yang paling parah semakin meningkatnya jumlah petani lada untuk beralih profesi (Nurllah & Iswari, 2019; Yulia & Bahtera, 2020). Tampak kondisi perkebunan lada putih (lihat Gambar 12.3) di Desa Tanjung Gunung yang geliat produksinya terancam menyusut.

Dengan memahami kondisi lingkungan sensus di Kabupaten Bangka Tengah secara menyeluruh, akan membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi sektor pertanian. Data yang dikumpulkan dari sensus ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan

pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertanian, khususnya pertanian lada putih yang menjadi fokus dari artikel ini.

C. Menelidik Ragam Variabel Sensus Pertanian di Kabupaten Bangka Tengah

Sensus Pertanian 2023 merupakan sensus sepuluh tahun sekali yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Sensus Pertanian 2023, terdapat beberapa perbedaan dari sensus sebelumnya, yaitu penggunaan tiga multimode pendataan, yaitu *paper assisted personal interviewing* (PAPI), *computed assisted personal interviewing* (CAPI), dan *computer assisted web interviewing* (CAWI). Selain itu, terdapat penambahan variabel baru yang tidak ada pada Sensus Pertanian 2013, antara lain *urban farming*, petani milenial, modernisasi pertanian, serta pendapatan petani yang digunakan sebagai *proxy* kesejahteraan petani.

Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bangka Tengah dimulai sesuai jadwal, yaitu awal bulan Juni dan diakhiri pada 31 Juli 2023. Seperti sensus pertanian sebelumnya, responden Sensus Pertanian 2023 adalah masyarakat dengan dibagi dua kategori, yaitu responden keluarga dan responden usaha pertanian. Adapun isi instrumen yang digunakan tidak secara langsung menyasar petani tertentu. Misalnya, petani lada putih yang menjadi lokus penelitian kali ini. Sebanyak 193 petugas Sensus Pertanian 2023 di Bangka Tengah melaksanakan pengambilan data dengan sistem *door to door* di wilayah konsentrasi. Sementara itu, untuk daerah yang tidak termasuk wilayah konsentrasi, pengambilan data menggunakan sistem *snowball*. Petugas sensus yang terpilih diupayakan adalah penduduk setempat sehingga memudahkan mereka melakukan tugasnya, serta memudahkan menjangkau responden karena mereka telah mengenal lokasi sensus serta telah paham kondisi masyarakat di Bangka Tengah.

Ragam variabel dalam instrumen yang digunakan dalam sensus pertanian dikumpulkan untuk memahami sektor pertanian di wilayah ini. Berikut ini adalah beberapa contoh ragam variabel yang umumnya dimasukkan dalam sensus pertanian.

- 1) Jumlah lahan pertanian: data tentang luas total lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut, baik lahan yang aktif digunakan maupun lahan yang tidak aktif.
- 2) Klasifikasi lahan: informasi tentang jenis lahan, seperti lahan sawah, ladang, kebun, perkebunan, atau hutan tanaman.
- 3) Penggunaan lahan: data tentang penggunaan lahan, termasuk jenis tanaman yang ditanam dan metode budidaya yang digunakan.
- 4) Produksi tanaman: informasi tentang produksi tanaman tertentu, seperti jumlah produksi dalam satuan tertentu (ton, kilogram, dll.), dan nilai ekonomi produksi. Hal ini termasuk informasi mengenai tanaman tahunan dan tanaman semusim.
- 5) Populasi ternak: data tentang jumlah ternak yang dipelihara di wilayah tersebut, seperti sapi, kambing, babi, atau ayam, termasuk informasi tentang produksi susu, daging, atau telur.
- 6) Penggunaan teknologi pertanian: informasi tentang penggunaan teknologi pertanian, seperti penggunaan pupuk, pestisida, irigasi, dan peralatan pertanian.
- 7) Profil petani: menjadi variabel dalam sensus pertanian untuk mendapatkan data demografis tentang petani, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat keterlibatan dalam pertanian.
- 8) Tenaga kerja pertanian: informasi tentang jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian di wilayah tersebut.
- 9) Akses ke sumber daya: data tentang akses petani terhadap sumber daya seperti pemilikan lahan, akses ke air irigasi, akses ke pasar, dan akses ke layanan pertanian.
- 10) Keuangan pertanian: informasi tentang pendapatan dan pengeluaran petani, termasuk sumber pendapatan, biaya produksi, dan profitabilitas usaha pertanian.

Pengumpulan data di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dari tanggal 13–16 Juni 2023, bersamaan masuknya minggu ke-2 pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Sebelum mendatangi lokasi sensus, diadakan diskusi singkat terkait pelaksanaan Sensus Pertanian 2023

bersama Kepala BPS Bangka Tengah dan jajarannya di kantor BPS Kabupaten Bangka Tengah. Beberapa informasi didapat dari diskusi singkat ini, di antaranya persiapan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang telah dilakukan mulai dari pengumuman seleksi petugas pencacah dan petugas pemeriksa lapangan, sampai proses seleksi selesai. Sebelum memulai tugasnya, petugas terpilih melalui serangkaian kegiatan pelatihan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, petugas sensus menggunakan kertas untuk mencatat hasil wawancara dengan responden. Adapun aplikasi yang dipakai melalui moda *smartphone* untuk menyampaikan kompilasi data di lapangan. Penggunaan metode *paperless* tidak bisa sepenuhnya diterapkan di lapangan karena banyak kendala yang ditemui, misalnya tidak adanya koneksi internet, jaringan/server tidak mendukung, atau alat yang dimiliki petugas tidak mendukung. Walaupun penggunaan kertas juga tidak efisien karena cukup memakan waktu, tetapi alternatif ini dipandang lebih mendukung kelancaran tugas.

Petugas pencacah yang terpilih sebagian adalah putra daerah atau penduduk Bangka Tengah. Tentunya dengan alasan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang akan diadakannya sensus pertanian juga dilakukan. Mengingat sebelumnya ada beberapa survei yang pelaksanaannya berdekatan. Saat peneliti ada di lokasi, beberapa hasil pencacahan sudah masuk di PML dan selanjutnya sedang dilakukan pemeriksaan. Tabel 12.2 berikut adalah sebaran petugas Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 12.2 Sebaran petugas Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

No.	Kecamatan	Pemeriksa Lapangan Sensus (KOSEKA)	Pemeriksa Lapangan Sensus (PML)	Petugas Lapangan Sensus (PLS)
1.	Koba	1	4	21
2.	Lubuk Besar	1	5	28
3.	Pangkalan Baru	1	2	12
4.	Namang	1	3	16
5.	Sungai Selang	1	4	28
6.	Simpang Katis	1	5	29
7.		6	23	124

Sumber: BPS Kab. Bangka Tengah (2023)

Walaupun peneliti hanya berkesempatan mendatangi dua lokasi, yaitu Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar dan Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, cukup banyak informasi yang didapat baik dari hasil wawancara maupun pengamatan. Berhubung isu yang jadi lokus dari penelitian kali ini adalah menelisik petani lada putih dalam lingkaran Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Bangka Tengah, maka peneliti fokuskan mewawancarai petani lada yang ada di kedua desa ini.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Saat survei pertama kali dilakukan, banyak PLS merasakan kesulitan karena berbagai faktor, termasuk perbedaan ukuran yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah dengan ukuran standar SNI. Namun, dengan seringnya melakukan pendataan di lapangan, mereka akhirnya menjadi terampil dalam mengonversikannya. Lamanya pendataan sensus juga dipengaruhi oleh banyaknya jenis usaha yang dilakukan oleh petani. Misalnya, jika responden memiliki pertanian lada dan lahan pertanian lainnya yang menghasilkan seperti kebun, tanaman hortikultura, dan terutama jika dijual secara periodik, serta memiliki ternak yang dijual dalam kurun waktu satu tahun di subsektor peternakan. Oleh karena itu, PLS sering kali kesulitan dalam mengonversi satuan-satuan produksi dan menentukan nilai atau harga penjualannya karena mayoritas masyarakat cenderung tidak memiliki pembukuan. Pengelolaan keuangan juga sering digabungkan dengan kebutuhan sehari-hari, yang membuatnya membingungkan PLS ketika usaha pertanian dilakukan bersama anak yang sudah berkeluarga, namun tinggal bersama orang tua. Meskipun kuesioner dari BPS membedakan antara kepala keluarga dan kepala rumah tangga (BPS, 2023b), tetapi ketika satu usaha memiliki dua pengelolaan usaha pertanian, maka kesulitan pendataan semakin bertambah. Kondisi ini menjadi topik diskusi antara PLS, PML, dan Koseka.

Awalnya, pelaksanaan sensus pertanian di lapangan cukup menantang bagi petugas lapangan (PLS). Perhitungan-perhitungan yang harus dimasukkan ke dalam pendataan sensus memerlukan konversi

yang banyak. Salah satu PML menyatakan bahwa sensus pertanian ini mengandung banyak data terutama ketika responden terlibat dalam berbagai kegiatan di sektor pertanian. Menurut PML, hanya sedikit responden yang memiliki berbagai aktivitas di sektor pertanian. Ketika responden memiliki berbagai aktivitas pertanian, maka PLS memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pendataan.

Menurut PML, instrumen pada Sensus Pertanian 2023 cukup kompleks. Dalam sensus ini, pertanyaannya memerlukan kecermatan pemeriksaan ekstra dari PML. Dalam satu hari, PML harus menyelesaikan pemeriksaan 10 hingga 20 responden untuk mencapai target penyelesaian. Seorang PLS ditugaskan untuk mengumpulkan data dari empat hingga lima responden per hari. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden. Jika responden tidak ada di rumah, PLS akan kembali mengunjungi rumah mereka sesuai kesediaan waktu. Jika ada isian yang belum lengkap, PML akan menghubungi responden melalui telepon untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Untuk mencapai akurasi data yang tinggi, PML melakukan pemeriksaan dengan logika. Gambar 12.4 berikut ini adalah salah satu potret saat petugas sensus (PLS) melakukan wawancara dengan responden disaksikan oleh petugas supervisi dari BPS pusat.



Foto: Husmiati (2023)

Gambar 12.4 Proses PLS melakukan Wawancara dengan Responden

Para petugas sensus pertanian (PLS) mengalami berbagai suka duka dalam menjalankan tugas mereka. Di satu sisi, mereka merasa senang dan puas karena dapat berkontribusi dalam pengumpulan data yang penting untuk sektor pertanian. Tugas mereka memiliki arti strategis dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan kebijakan pertanian dan pengembangan sektor tersebut. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Beberapa kesulitan yang mereka hadapi termasuk perbedaan ukuran yang digunakan oleh masyarakat lokal dengan ukuran standar yang digunakan dalam sensus, serta masalah mengonversi data yang terkadang rumit. Pendataan juga bisa memakan waktu yang lama, terutama jika responden memiliki banyak jenis usaha pertanian dan kegiatan yang berbeda. Terlebih jika responden tidak dapat ditemui, tidak ada di rumah karena ke kebun, atau nelayan yang sedang melaut, maka PLS akan kembali lagi menemui untuk mendapatkan data. Dalam buku petunjuk, menurut PLS responden yang ada dalam daftar petugas akan datang lagi bila responden belum ditemui, tetapi untuk responden yang ditemui dengan teknik *snowball* cukup satu kali kunjungan.

Petugas lapangan sensus (PLS) menyatakan respons masyarakat bagus untuk Sensus Pertanian 2023 ini, walaupun banyak yang bertanya mengapa ada sensus lagi. Hal ini karena ada beberapa survei yang masuk sebelum Sensus Pertanian 2023, seperti Regsosek yang jarak waktunya cukup berdekatan. Ditambah lagi akan ada pemilu, sehingga awalnya masyarakat tidak tahu maksud kedatangan PLS. Kendala lain yang cukup mengganggu adalah masyarakat tidak mau jujur memberikan informasi karena takut dikaitkan dengan pajak. PLS mempunyai peran untuk dapat meyakinkan masyarakat tujuan Sensus Pertanian 2023 ini. Selain itu, penerimaan masyarakat pada PLS dipengaruhi juga dengan atribut yang selalu dipakai saat bertugas seperti baju, topi, dan tanda pengenal Sensus Pertanian 2023. Yang tak kalah pentingnya karena PLS sebagian besar adalah putra daerah, sehingga memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Terkadang ada

masyarakat yang ogah-ogahan menemui PLS karena kesibukan atau karena terlalu sering didatangi petugas survei. Teknik yang dilakukan PLS, masyarakat diajak berbincang topik lain agar didapat suasana yang mendukung untuk masuk ke tujuan sensus. PLS mengharapkan pelatihan sensus bisa lebih diperjelas lagi secara rinci untuk materinya, karena ada beberapa yang berubah jika sudah turun ke lapangan.

Responden yang tidak memiliki catatan atau pembukuan terkait usahanya menyebabkan petugas harus mengandalkan perkiraan untuk mendapatkan data yang akurat. Misalnya, harga ikan yang selalu berubah-ubah tetapi harus didapatkan estimasi harga per kilogram. Kepiawaian PLS berperan untuk menghitung dan menentukan estimasi volume serta hasil produksi. Misalnya, untuk nelayan bila air pasang harga berapa, bila air laut sedang tenangapatan ikan berapa, sehingga bisa didapat estimasi harga ikan. Sebab, apabila asal mengisi, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam hasil pengumpulan data. Meskipun PLS mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, dedikasi dan ketekunan mereka dalam melaksanakan tugasnya sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan kredibel untuk kepentingan pertanian dan masyarakat luas.

Petugas pemeriksa lapangan (PML) menyatakan Sensus Pertanian 2023 berbeda konsep dengan Sensus Pertanian 2013. Untuk itu, perlu dilakukan diskusi antara PML dan PPL dalam menyinkronkan konsep pendataan Sensus Pertanian 2023 (lihat Gambar 12.5). Saat ini, hal tersebut dimudahkan dengan adanya aplikasi Sensus Pertanian 2023, sehingga petugas tidak akan salah memasukkan komunitas regu. Aplikasi data yang dimasukkan telah di ada rumahnya masing-masing, petugas tinggal mengisi. Kendalanya ialah masih ada PLS yang belum memahami proses pengisian aplikasi. Proses kerja mengisi aplikasi setelah PLS menyelesaikan tugasnya, yaitu mendata lebih kurang lima responden. Ketika PLS melakukan rekap ulang dan pengisian di aplikasi, sering ditemukan ada yang terlupa sehingga ada kesalahan dalam menginput data di aplikasi. Proses yang dilakukan PML kemudian yaitu mengkroscek tugas PLS.



Foto: Husmiati (2023)

Gambar 12.5 Kegiatan Diskusi di Balai Desa Tanjung Gunung

Satu hal lagi yang menjadi kendala ialah di aplikasi tidak ada konversi, sehingga petugas harus melakukan penghitungan secara manual yang tentunya akan menyita waktu. Seperti tandan pisang di Bangka Tengah, tetapi di aplikasi dihitung per kilogram, dan lain-lain. Khusus untuk pertanian lada, saat dilakukan wawancara PLS belum menemukan responden dengan usaha utamanya sebagai petani lada sehingga pada instrumen dimasukkan sebagai pilihan “lainnya”. Petani lada yang ada umumnya juga menjadi petani sawit, ataupun tanaman hortikultura lainnya.

E. Petani Lada Dan Pasang Surut Pertanian Lada

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menjadi kontributor utama dalam produksi lada putih nasional dengan andil mencapai 40 persen. Namun, sayangnya, produksi rempah-rempah unggulan yang terkenal di pasar dunia dengan sebutan *muntok white*

pepper tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data terbaru yang dirilis oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel menunjukkan bahwa produksi lada putih pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Jumlah produksi lada putih pada tahun 2022 mencapai 26.408 ton, menurun sekitar 757 ton dari tahun sebelumnya yang mencapai 27.166 ton (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2022). Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi industri rempah-rempah di wilayah tersebut, yang berusaha untuk mempertahankan kualitas dan daya saing produk lada putih Muntok di pasar global.

Minat para petani untuk bercocok tanam lada mengalami penurunan karena menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah harga lada yang terus menurun, membuat potensi keuntungan menjadi rendah. Selain itu, biaya perawatan tanaman lada yang tinggi juga menjadi hambatan serius bagi para petani. Terkait dengan hal itu, banyak tanaman lada yang terkena penyakit, yang menyebabkan kerugian produksi dan menyulitkan upaya petani dalam meningkatkan hasil panen. Kombinasi dari masalah-masalah ini telah menyebabkan beberapa petani enggan untuk terus menanam lada dan mencari alternatif lain dalam kegiatan pertanian mereka.

Seiring berjalannya waktu, petani lada mengalami pasang surut. Masa kejayaan butir-butir cantik, sensitif, dan hangat ini menguji kesabaran dan kesetiaan pemiliknya. Awal menanam lada harus melalui proses yang panjang dari mulai menyiapkan media tanam, menanam bibit, memberi pupuk sampai menunggu panen, yang memerlukan waktu dua tahun. Perlakuan pada tanaman lada harus cukup hati-hati, tiap tahap perkembangan perlu perlakuan yang berbeda. Tidak jarang menjelang panen malah mati karena pohon kena sakit kuning, penyakit yang sejak dahulu belum ada solusinya. Cukup lama dan memerlukan kesabaran serta semangat untuk mendapatkan kesempatan memetik tangkai-tangkai biji lada. Sampai di sini, masih ada proses panjang; dimulai dengan merendam selama satu-dua minggu guna menghancurkan kulit kemudian dilanjutkan dengan pengeringan di bawah sinar matahari. Proses ini sering kali tidak signifikan dengan harga di pasaran sehingga banyak petani lada menyimpannya me-

nunggu sampai harga tinggi. Menyimpan lada (Gambar 12.6 dan 12.7) dalam waktu lama tidak merusak kualitas lada, sebaliknya lada semakin bagus kualitasnya. Akibatnya, jumlah lada di pasaran tidak sebanyak dulu.



Foto: Husmiati (2023)

Gambar 12.6 Contoh Lada yang Berbuah Tidak Sempurna



Foto: Husmiati (2023)

Gambar 12.7 Contoh Lada yang Berbuah Sempurna Siap Panen

Alasan rasional yang didapat di lapangan kenapa petani lada terpaksa harus mengalihkan usaha taninya karena menanam sawit lebih mudah dan harga di pasaran cukup tinggi. Selain itu, menjadi pekerja tambang timah juga menjanjikan lebih cepat mendapatkan uang. Fenomena ini menjadi hal yang biasa pada petani lada di Bangka. Tuntutan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya membuat mereka harus mencari celah, tidak hanya menggantungkan pada hasil lada yang mereka tanam.

Dikarenakan peran Provinsi Bangka Belitung yang signifikan dalam perladanaan nasional dan internasional, penurunan areal tanam dan produksi lada akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi petani lada, terutama dalam perladanaan nasional secara keseluruhan. Penurunan areal tanam dan produksi lada di Bangka Belitung diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) fluktuasi harga lada, 2) gangguan dari OPT, 3) dampak penambangan timah ilegal, dan 4) pengembangan komoditas perkebunan lainnya (Daras & Pranowo, 2009).

Fluktuasi harga lada di pasar internasional memiliki dampak langsung pada harga lada di dalam negeri. Mengingat lada merupakan komoditas ekspor, maka ketika harga lada turun, banyak petani lada menjadi tidak mampu untuk melakukan perawatan tanaman secara optimal. Akibatnya, produktivitas menurun, bahkan ada yang berhenti menanam lada sehingga mereka mengurangi luas area tanam lada dan beralih ke usaha tani komoditas lain (Manohara et al. 2003; Vietnam Pepper Association, 2006 [dalam Daras & Pranowo, 2009; Irawati et al., 2009]).

OPT pada pertanian lada juga menjadi masalah yang dapat menimbulkan kerugian. OPT dapat berupa hama maupun penyakit tanaman lada yang biasanya disebut dengan penyakit kuning. Tumbuhan lada yang terkena penyakit kuning akan terhambat pertumbuhannya, dan perlahan lahan akan mati serta menularkan pada pohon yang ada di dekatnya.

Dampak penambangan timah ilegal juga mempengaruhi pertanian lada. Tahun 1997–1998 pada masa reformasi, pemerintah

pusat dan daerah telah mengendurkan peraturan atau ketentuan terkait penambangan timah. Kondisi ini mendorong masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya untuk beralih ke penambangan timah secara tradisional. Alasannya, mereka akan mendapatkan uang dengan cepat tidak seperti menanam lada yang harus menunggu beberapa tahun untuk panen. Akibat banyak petani lada yang beralih profesi, pertanian lada hanya menjadi usaha sampingan dan tidak lagi menjadi prioritas utama. Tentunya kondisi ini berdampak negatif pada produksi dan produktivitas lada yang mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pengembangan komoditas lain seperti sawit, karet, dan tanaman hortikultura lainnya. Beralihnya sebagian besar petani lada menjadi petani sawit menyebabkan penghasilan lada di Bangka Belitung menjadi berkurang. Diharapkan ada peran pemerintah setidaknya ada kebijakan yang mengalihkan perkebunan sawit agar tidak berdekatan dengan tanaman lada sehingga lada tidak musnah secara perlahan. Mengingat Kepulauan Bangka terkenal dipenjuru dunia dengan *muntok white pepper*. Jangan sampai kebanggaan kita terhadap rempah ini menjadi pudar.

F. Peran Gender dalam Pertanian Lada Putih

Dalam sektor pertanian lada putih di Bangka Tengah, perempuan dan laki-laki menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi keterlibatan dan kontribusi mereka. Salah satu hambatan yang dihadapi perempuan adalah konstruksi sosial yang menempatkan mereka dalam posisi kelas kedua, yang mengharuskan mereka untuk bergantung secara ekonomi pada laki-laki (Yani & Indrayani, 2021). Meskipun demikian, perempuan di Bangka Tengah semakin menyadari pentingnya kesetaraan gender dan berupaya untuk turut serta dalam mencari nafkah tanpa meninggalkan tanggung jawab mereka. Namun, laki-laki cenderung memiliki kualifikasi yang lebih tinggi daripada perempuan dalam hal keterampilan dan keahlian, yang dapat berdampak pada pendapatan perempuan yang lebih rendah dan kontribusi ekonomi yang lebih terbatas (Setiawan, 2023).

Disparitas ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi proses pembangunan secara keseluruhan. Perubahan peran perempuan dalam sektor pertanian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana banyak laki-laki beralih profesi dan terjadi perubahan dalam permintaan tenaga kerja (Amalia et al., 2022). Hal ini menunjukkan dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian lada putih di Bangka Tengah. Selain itu, faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam keputusan perempuan dalam berwirausaha di sektor pertanian (Setiawan, 2023).

Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan bagi perempuan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang pertanian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan kontribusi ekonomi mereka.

Dalam konteks penyuluhan pertanian, Penyuluh memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan pertanian di Indonesia ini. Penyuluh dapat dikatakan sebagai penentu dalam keberhasilan program pemerintah jika di kelolah dengan baik. Peran penyuluh dalam membangun pertanian berkelanjutan adalah sebagai edukator, motivator, komunikator, organisator, fasilitator, dinamisator, dan inovator dengan selalu mengedepankan peningkatan kinerja penyuluh semakin meningkat (Dea et al., 2024). Penyuluhan pertanian dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi petani dan keluarganya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik pertanian yang baik. Selain itu, kesenjangan produktivitas antara petani perempuan dan laki-laki juga dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik individu, seperti tingkat pendidikan dan adopsi mekanisme (Kadir & Prasetyo, 2023). Hal ini, menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan teknologi pertanian guna mengurangi disparitas dalam produktivitas antara kedua kelompok ini.

Pemasaran hasil panen lada biasa ditunggu sampai harga membaik. Kebanyakan petani lada menyimpan di rumah masing-masing. Menurut mereka lada akan tahan disimpan bertahun-tahun



Gambar 12.8 Petani Lada menunjukkan Pohon Lada yang Menguning

asal tempat penyimpanannya memenuhi kriteria syarat untuk lada. Masih menurut mereka, lada yang disimpan semakin lama semakin bagus kualitasnya. Upaya lainnya telah dibentuk kelompok usaha lada milenial baru diharapkan menjadi wadah petani lada dalam berkoordinasi, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan lain-lain walaupun anggotanya belum banyak.

Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah, lembaga pertanian, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyediakan pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif kepada petani mengenai teknik budi daya lada yang efisien dan ramah lingkungan. Dukungan penelitian dan pengembangan juga harus ditingkatkan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi perubahan iklim dan ancaman penyakit. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik dan penguatan akses pasar juga menjadi kunci dalam meningkatkan keberlanjutan pertanian lada. Melalui kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan pertanian lada dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat petani dan negara secara keseluruhan.

Kegagalan petani dalam merespons kebijakan dan program pertanian berkelanjutan dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor termasuk tingkat pendidikan, akses ke sumber daya, keberlanjutan program tersebut, dan dukungan pemerintah. Implementasi kebijakan dan program pertanian berkelanjutan mungkin memerlukan investasi awal yang tinggi, seperti pengenalan teknologi baru, alat, atau infrastruktur. Jika petani menghadapi keterbatasan finansial, mereka mungkin tidak mampu merespons kebijakan atau program tersebut. Jika kebijakan pertanian berkelanjutan sering berubah atau tidak konsisten, petani mungkin enggan untuk melibatkan diri dalam penerapan program tersebut. Ketidakpastian dapat menciptakan ketidakpercayaan dan menghambat partisipasi petani.

Selain itu, pengembangan tanaman lada mempunyai potensi untuk dikembangkan bersama-sama dengan tanaman keras lain atau dengan tanaman keras untuk penghijauan atau juga dapat disandingkan dengan tanaman hortikultura lainnya seperti sayur-sayuran, tomat, cabai, dan lain-lain. Mengusahakan tanaman lada dalam kegiatan penghijauan tersebut akan lebih mempunyai arti penting dalam rangka perbaikan ekonomi petani (Yusuf, 2018).

G. Mengurai Jejak Kejayaan Dan Keterbatasan Petani Lada

Petani lada memiliki jejak kejayaan dan keterbatasan yang menarik untuk dianalisis. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan dari jejak kejayaan petani lada.

- a. **Potensi Pasar.** Lada merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat dicari dan digunakan di seluruh dunia sebagai bumbu masakan dan untuk keperluan obat-obatan. Permintaan yang tinggi membuat pasar lada potensial untuk petani yang mampu memproduksi lada dengan kualitas tinggi.
- b. **Sumber Pendapatan.** Pertanian lada menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani di daerah-daerah yang cocok untuk budidaya lada. Keberhasilan dalam mengelola perkebunan lada dapat meningkatkan taraf hidup dan membantu mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah.

- c. **Peluang Ekspor.** Beberapa negara memiliki iklim yang cocok untuk budidaya lada, dan ini memberikan peluang ekspor bagi petani. Dengan ekspor, petani dapat menjangkau pasar internasional yang lebih luas, meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi negaranya.
- d. **Diversifikasi Usaha.** Selain memanen lada, petani juga dapat memanfaatkan daun, akar, dan minyak lada sebagai produk sampingan, sehingga memungkinkan diversifikasi usaha dan meningkatkan keuntungan.

Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan petani lada di antaranya sebagai berikut.

- 1) **Iklim dan Lingkungan.** Lada memerlukan iklim tropis atau subtropis yang lembap dan tidak terlalu kering untuk tumbuh dengan baik. Petani di daerah lahan yang tidak cocok untuk lada harus berhadapan dengan kesulitan dalam budidaya, dan mereka mungkin harus mencari alternatif tanaman lain.
- 2) **Pengelolaan Hama dan Penyakit.** Lada rentan terhadap serangan hama dan penyakit, seperti kutu daun dan penyakit layu. Pengendalian hama dan penyakit yang efektif memerlukan biaya dan usaha ekstra, yang dapat menambah beban bagi petani.
- 3) **Perubahan Harga.** Harga lada dapat bervariasi secara signifikan akibat fluktuasi pasar, termasuk perubahan permintaan dan penawaran. Petani yang tidak dapat mengelola risiko harga mungkin menghadapi kesulitan keuangan saat harga lada menurun.
- 4) **Persaingan Global.** Seiring dengan pasar yang potensial, pertanian lada juga menghadapi persaingan global. Negara-negara lain dengan kondisi iklim yang cocok juga dapat memproduksi lada, sehingga mempengaruhi harga dan persaingan di pasar internasional.
- 5) **Keterbatasan Teknologi.** Petani dengan akses terbatas pada teknologi pertanian modern mungkin mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas lada mereka.

- 6) **Perubahan Iklim.** Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi lada dengan berbagai cara, termasuk pola hujan yang tidak stabil, peningkatan suhu, dan cuaca ekstrem. Hal ini dapat mengganggu pola budi daya dan mengancam hasil panen.

Melalui pemahaman akan jejak kejayaan dan keterbatasan ini, petani lada dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi keberhasilan dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam usaha pertanian mereka. Diversifikasi tanaman, mengadopsi teknologi pertanian yang tepat, dan berpartisipasi dalam program dukungan pemerintah dapat membantu petani lada mengatasi hambatan dan mencapai keberhasilan dalam usaha mereka.

Terdapat beberapa faktor yang memainkan peranan kunci dalam menentukan keberhasilan dan keterbatasan para petani di antaranya produksi, yang merujuk pada proses tumbuhnya tanaman lada. Kemudian, mata rantai yang merujuk pada serangkaian langkah yang terlibat dalam menghubungkan produksi petani dengan konsumen akhir. Terakhir, pengelolaan pascapanen dengan tujuan melibatkan tindakan untuk mempertahankan kualitas dan nilai komoditas pertanian setelah panen agar petani lada tidak mengalami kerugian.

Dalam mengatasi keterbatasan ini, penting untuk memberikan dukungan kepada petani melalui pelatihan, akses ke teknologi yang sesuai, pengembangan infrastruktur pedesaan, dan akses ke pasar yang adil. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pertanian, dan sektor swasta juga dapat berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan petani dalam produksi, mata rantai, dan pengelolaan pasca panen.

H. *Life Story*: Petani Lada di Kepulauan Bangka Belitung

Awalnya lada ditanam di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan berasal dari Lampung pada periode 300–400 tahun yang lalu. Terindikasi dengan nama varietas lampung daun lebar (LDL), lampung daun kecil (LDK), dan jambi. Pengembangannya didorong upaya

Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah dunia. Lada dikenal sebagai *The King of Spice*. Awalnya lada atau “sahang” ditanam di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus, Bangka Barat. Seiring berjalannya waktu, lada diserang penyakit kuning sehingga Muntok dan Jebus tidak dikenal lagi sebagai penghasil lada. Walaupun di dunia internasional masih dikenal sebagai *muntok white pepper*.

Sejarah awal tanaman lada dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang tinggal di Bangka. Perkebunan lada berdampingan dengan tambang timah mereka sehingga kuli-kuli tambang saat waktu istirahat bisa menanam dan merawat tanaman lada. Awal abad ke-20, petani pribumi Melayu mulai tertarik untuk menanam lada karena melihat keberhasilan orang Tionghoa menanam ladanya. Melihat antusias petani Melayu, pemerintah Hindia Belanda menyokong para petani ini dengan memberikan kemudahan dalam menanam lada. Kemudahan yang dimaksud berupa intensif dan tidak perlu ijin seperti yang dikenakan pada orang Tionghoa. Petani Melayu juga tidak dikenakan pajak penanaman lada. Tujuan pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan ini supaya orang Tionghoa tidak berbondong-bondong pindah menjadi petani lada, sedangkan tenaga mereka yang ulet lebih cocok sebagai penambang timah.

Selanjutnya, pada tahun 1920-an perkebunan lada semakin mencapai masa kesuksesan, yang mengenalkan Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil lada terbesar dan terbaik di dunia. Tidak mengherankan, ekspor lada dari Kepulauan Bangka mendominasi ekspor lada Hindia Belanda. Kemudian terjadilah Perang Dunia II yang menyebabkan perekonomian dunia memburuk. Perkebunan lada pun ikut hancur. Selesai Perang Dunia II, penanaman lada kembali digembar-gemborkan, sampai pada tahun 1980-an, lada kembali mencapai masa jayanya. Banyak masyarakat Bangka yang kaya mendadak dan berlomba-lomba membeli barang-barang mewah pada masa itu.

Harga lada kembali anjlok pada tahun 1990-an. Akibatnya, masyarakat tidak mau mengolah kebun ladanya. Mereka berbondong-bondong meninggalkan kebun ladanya menjadi terbelengkalai. Tahun 1995, harga lada kembali membaik. Petani lada kembali bersemangat

mengolah kebunnya. Pasang surut pertanian lada menjadi suatu masalah tersendiri. Banyak faktor yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Kendala menanam lada di antaranya biaya investasi yang tinggi, sebagai contoh penyediaan tiang panjat mati untuk merambatkan pohon lada dan tiang ini hanya berumur kurang lebih tiga tahun karena mudah lapuk. Faktor lainnya adalah penggunaan bibit lada, di mana kebanyakan petani menggunakan bibit tujuh ruas padahal seharusnya cukup satu ruas dengan biaya relatif lebih murah.

Kisah petani lada mencerminkan gambaran umum yang dapat ditemui dalam perjalanan kehidupan banyak keluarga petani di seluruh dunia. Namun, harap diingat bahwa kisah setiap keluarga petani khususnya petani lada putih adalah unik dan dapat berbeda berdasarkan wilayah, budaya, dan lingkungan lokal. Keluarga petani adalah sebuah keluarga yang telah lama hidup dan bermukim di sebuah desa di pedesaan. Mereka adalah keluarga petani dari generasi ke generasi dan telah menjalani kehidupan mereka di tanah leluhur mereka selama bertahun-tahun. Inilah kisah perjalanan keluarga petani lada.

I. Penutup: Kilas Balik Pendataan dalam Sensus Pertanian di Bangka Tengah

Sensus pertanian adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang sektor pertanian di suatu negara atau wilayah tertentu. Pendataan dalam sensus pertanian dilakukan secara periodik, biasanya setiap beberapa tahun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang keadaan pertanian di negara tersebut. Pendataan dalam sensus pertanian melibatkan pengumpulan informasi mengenai berbagai aspek pertanian, seperti luas lahan pertanian, jenis tanaman yang ditanam, produksi tanaman dan ternak, teknik budidaya, penggunaan pupuk dan pestisida, jumlah petani, dan data sosial ekonomi terkait pertanian.

Proses pendataan dalam Sensus Pertanian biasanya melibatkan petugas sensus atau enumerator yang mengunjungi petani atau rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Petugas sensus akan

mengisi formulir atau kuesioner dengan pertanyaan yang relevan, dan data yang terkumpul akan dianalisis untuk menghasilkan informasi statistik yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertanian. Dengan memiliki data yang lengkap dan akurat melalui sensus pertanian, pemerintah dapat mengidentifikasi tren, mengukur produktivitas, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, serta merancang kebijakan yang sesuai untuk mendukung pertanian dan petani. Data dari sensus pertanian juga digunakan oleh berbagai pihak, termasuk peneliti, akademisi, dan lembaga swasta untuk melakukan analisis dan studi terkait sektor pertanian.

Pendataan dalam sensus pertanian merupakan proses penting untuk memahami dan mengelola sektor pertanian dengan lebih efektif. Dengan pembaruan data yang teratur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memantau perubahan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan produktif.

J. Daftar Pustaka

- Antara. (2022). *Pemkab Bangka Tengah perkuat sektor pertanian guna pulihkan ekonomi warga*. Antara. <https://babel.antaranews.com/>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2022). *Outlook komoditas perkebunan: Lada 2022*. Kementerian Pertanian. <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/362>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. (2021). *Kabupaten Bangka Tengah dalam angka*. BPS Kabupaten Bangka Tengah. <https://bangkatengahkab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *BPS mulai melaksanakan Sensus Pertanian*. <https://www.bps.go.id/news/2023/06/01/532/bps-mulai-laksanakan-sensus-pertanian-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Mencatat pertanian Indonesia*. <https://www.bps.go.id/>
- Bangka Pos. (2023). *Luas lahan lada di Bangka Belitung terus menurun*. <https://bangka.tribunnews.com/2023/05/16/luas-lahan-lada-di-bangka-belitung-terus-menurun>

- Daras, U., & Pranowo, D. (2009). Kondisi kritis lada putih Bangka Belitung dan alternatif pemulihannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 28(1), 1–6.
- Dea, A. Y., Kaleka, M. U., & Ngaku, M. A. (2024). Peran penyuluh pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Agribis*, 17(1), 2280–2290. <https://doi.org/10.36085/agribis.v17i1.5950>
- Erianto, D. (2023). *Jalur rempah Nusantara: Pasang surut lada Bangka Belitung*. Kompas.id. <https://jelajah.kompas.id/jalur-rempah/baca/pasang-surut-lada-bangka-belitung/>
- Irawati, A. F. C., Wirasti, C. A., Herwan, Issukindarsyah, & Panggabean, M. T. L. (2009). *Pengembangan teknologi budi daya lada ramah lingkungan di Provinsi Bangka Belitung* [Makalah Seminar Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi]. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Kadir, K., & Prasetyo, O. (2023). Yield Gap by Gender among Paddy Farmers in Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 139-150. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1889>
- Manohara, D., Suprpto, & Laba, I. W. (2003). *Analisis status penelitian dan pengembangan PHT pada pertanaman lada*. Bagian Proyek PHT Tanaman Perkebunan.
- Maryadi, M., Sutandi, A., & Agusta, I. (2016). Analisis usaha tani lada dan arahan pengembangannya di Kabupaten Bangka Tengah. *TATALOKA*, 18(2), 76–84. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/681>
- Nurllah, I., & Iswari, J. (2019). Pengaruh perubahan harga lada putih terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2), 224–234.
- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. (2018). *Peta administrasi Kabupaten Bangka Tengah*. <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/administrasi>
- Qosim, N. (2023). *Mewujudkan Sensus Pertanian 2023 yang berkualitas untuk Indonesia*. Mata Banua.
- Sudalmi, S. E. (2010). Pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 9(2), 16–29.
- Yuhono, J. T. (2005). Harga pokok pembuatan bibit lada. *Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri*, 11, 25–2.

- Yulia, & Bahtera, N. I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis lada putih di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Hexagro*, 4(1), 29–38.
- Yusuf, S. (2018). *Aktivitas perkebunan tanaman lada dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Bab XIII

Penutup: Bukan Sebuah Kesimpulan

Badrun Susantyo & Reza Amarta Prayoga

Sensus Pertanian di Indonesia dilaksanakan secara periodik, per sepuluh tahunan, oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian Tahun 2023 ini merupakan Sensus Pertanian yang ketujuh dilaksanakan. Pemerintah Indonesia melaksanakan sensus pertanian untuk pertama kalinya, yaitu tahun 1963. Buku Seri 1 ini memuat informasi dari sebelas lokus sensus pertanian di wilayah Sumatra. Kesebelas lokus ini merupakan bagian dari proses pendataan Sensus Pertanian pada tahun 2023 dari sekitar 72.000 desa yang diadakan sensus di Indonesia. Oleh karena itu, sensus ini diharapkan menghasilkan data dari setiap indikator pertanian. Seluruhnya telah disajikan dalam data Hasil Sensus Pertanian 2023 yang telah diterbitkan dan diluncurkan oleh BPS pada akhir tahun 2023 lalu. Penutup ini mencoba untuk mengestraksikan seluruh temuan amatan dari kesebelas lokus, tanpa membuat kesimpulan.

B. Susantyo* & R. A. Prayoga

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: badr004@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Susantyo, B., & Prayoga, R. A. (2025). Penutup: Bukan sebuah kesimpulan. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 489–497). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c949
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diawali dengan tulisan dari Kabupaten Aceh Besar, tentang tanaman pinang. Tanaman ini mudah dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Besar (Nasution, 2020). Tanaman pinang dapat tumbuh subur di berbagai lahan, mulai lahan datar sampai lahan berbentuk lereng. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Aceh Besar menanam pinang di kebun atau pekarangan rumah sebagai tanaman pagar atau pembatas. Tanaman ini cukup potensial dikembangkan untuk pemenuhan permintaan pasar dunia yang cukup besar, biasanya untuk kebutuhan farmasi dan industri (Mustika et al., 2010). Sayangnya, potensi pasar dunia yang tersedia belum berdampak positif terhadap peningkatan daya tawar petani pinang (Qurniati & Kaskoyo, 2019). Diperlukan upaya serius untuk memperkuat lembaga tani agar petani pinang lebih berdaya dalam mengelola kegiatan mereka sendiri. Hasil pendalaman sensus pertanian ini memotret bahwa pinang merupakan tanaman yang memiliki nilai kultur tertentu yang sangat melekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Tetapi, potensi pinang tersebut belum menjadi pendongkrak utama perekonomian keluarga petani. Fenomena ini disebabkan oleh jalur-jalur perniagaan yang masih dikuasai oleh para pemodal. Penguasaan jalur perniagaan menjadikan harga pinang sangat fluktuatif. Realitas ini mengesankan bahwa peran lembaga tani tidak berfungsi dengan baik dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan daya tawar petani pinang di Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya, tentang komoditas jeruk di wilayah Karo, Sumatra Utara. Penulis telah mencoba untuk mengurai persoalan terpuruknya petani jeruk di Dataran Tinggi Karo. Mengingat, berhasilnya komoditas ini menjadi komoditas unggulan dan menduduki posisi strategis dalam perdagangan jeruk lokal, nasional, maupun global. Buah jeruk medan pernah menggairahkan semangat berusaha petani menerapkan teknologi dan kebijakan pertanian untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga petani maupun ekonomi wilayah (Hendrita & Supriyanti, 2023). Pendalaman kasus petani jeruk ini dilakukan di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, dan Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte. Kajian ini menunjukkan bahwa sekalipun per-

soalan lalat buah pada jeruk belum teratasi, tetapi dengan upaya disiplin, perawatan intensif, dan strategi saling-silang modal antar komoditas dan antar lahan, usaha tani jeruk masih menguntungkan dan potensial untuk dikembangkan lebih luas.

Sayur-mayur juga mendapat perhatian dalam kajian emik ini, di mana penulis mengambil lokus amatan di Kecamatan Teluk Lobam, Pulau Bintan, yang merupakan sentra perkebunan sayur-mayur skala rumah tangga, yang tersebar di beberapa desa berbasis ekonomi dalam pembangunan desa. Menariknya adalah telah dimanfaatkannya metode pertanian sayur dengan cara baru, sistem “*urban farming*” yang biasanya banyak ditemui di wilayah perkotaan. Dalam hal ini, para petani menggunakan sistem *hidroponik* yang biasa diterapkan di lahan sempit di perkotaan (Waluyo et al., 2021). Sistem usaha tani yang banyak dilakukan oleh para wanita ini terbukti bisa meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Selanjutnya, bidang peternakan rakyat pada kenyataannya dapat menopang kecukupan kebutuhan daging nasional, khususnya peternakan sapi. Dalam studi emik ini, penulis mencoba menelisik usaha yang masih sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu ternak sapi di tengah perkebunan kelapa sawit (Saputra, 2021). Karena sapi dan kelapa sawit bila diintegrasikan akan menjadi dua komoditas yang saling menguatkan, sapi juga dapat membantu perkebunan sawit dalam mengendalikan gulma dan sekaligus sebagai alat transportasi kelapa sawit. Di samping itu, limbah hasil ikutan kelapa sawit dapat diolah menjadi pakan sapi yang bergizi dan tahan lama (Bun, 2019). Dari amatan yang dilakukan, didapati bahwa luasan kebun kelapa sawit rakyat maupun perusahaan di Kabupaten Pelalawan merupakan potensi besar untuk dapat didorong menjadi lumbung sapi nasional, apabila pemeliharaan sapi dapat diimplementasikan pada perkebunan kelapa sawit.

Kemudian menginjak ke komoditas karet. Realitas degradasi produksi karet dari petani di perkebunan rakyat menimbulkan berbagai gejala. Salah satunya, adalah sawitisasi sebagai gerakan masif petani yang mengkonversi komoditas dari karet menjadi sawit

(Wulansari, 2017). Persoalan sawitisasi dari sisi ekologi dan sosial ekonomi menjadi dua sisi kausalitas yang berkelindan dalam kesu-raman karet rakyat di Kabupaten Batang Hari. Petani yang bertahan dengan karet dan petani karet yang telah berpindah ke sawit menjadi dua sumber data dalam penggalan emik ini. Hasil pendalaman emik ini mengungkapkan fenomena karet di tengah himpitan sawit, menjadi penyebab kelangkaan produksi karet di perkebunan rakyat. *Stresor* dari para *tauke* sebagai pengendali harga karet di tingkat petani disinyalir turut serta menjadi pemicu anjloknya harga karet. Selain itu, kelompok tani yang semestinya bisa berfungsi dalam memproteksi harga, namun pada kenyataannya pun tidak bisa berbuat banyak.

Di tempat lain, Bengkulu Utara memiliki potensi alam yang subur dan beragam, sehingga cocok untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Berkat potensi alam yang subur dan kondisi iklim yang mendukung, sektor pertanian dan peternakan di Bengkulu Utara memiliki peluang yang baik untuk berkembang lebih jauh dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat (Susilo et al., 2021). Integrasi peternakan dan perkebunan berpotensi berkembang melalui simbiosis timbal balik. Petani cenderung tidak mengelola ternak dan perkebunan secara terpadu. Padahal, hasil perkebunan merupakan sumber pendapatan utama mereka, dan peternakan merupakan keputusan investasi utama mereka untuk menunjang kehidupan keluarga. Peternakan dan perkebunan bila dintegrasikan akan meningkatkan produksi dan meingkatkan pendapatan. Hasil pendalaman emik sensus pertanian menunjukkan bahwa peternakan dan perkebunan tidak dikelola secara terstruktur, dan pengelolaannya masih secara spasial. Peran pemerintah, lembaga pertanian, dan lembaga non-pertanian sangat penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan dalam integrasi peternakan dan perkebunan di Bengkulu Utara ini agar petani dapat mencapai tingkat produksi yang optimal, meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga lingkungan.

Situasi dan kondisi “dunia pertanian” di Kabupaten Ogan Ilir juga tidak luput dari amatan studi emik ini. Petani skala kecil membu-

tuhkan dukungan dan perlindungan pemerintah melalui berbagai pengetahuan, pembiayaan, perlindungan hukum, dan pengembangan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan. Studi ini mengungkapkan kendala petani skala kecil, seperti keterbatasan lahan, risiko gagal panen, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada cuaca yang tidak dapat diprediksi (Sukarniati, 2013). Masalah lainnya di sektor pertanian Ogan Ilir termasuk masalah lingkungan, kepemilikan lahan, dampak perubahan iklim, infrastruktur yang tidak memadai, dan hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak, serta rantai pasok yang amburadul. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif seperti pembangunan institusi pasar, pendorongan koperasi petani, pelatihan dan pendidikan petani, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, peningkatan akses modal, dan pengembangan infrastruktur pertanian. Di Kabupaten Ogan Ilir, sensus ini telah membantu mengidentifikasi petani skala kecil, mengungkap tantangan yang mereka hadapi dan menekankan perlunya dukungan pemerintah dan partisipasi pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan teknologi modern, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kerja sama yang kuat, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir dapat tumbuh secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat setempat.

Tidak ketinggalan, rumah tangga petani berada pada kawasan pengembangan *Food Estate* (FE) padi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya di Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Jejawi. Penggalan informasi secara mendalam pada lokasi *Food Estate* Padi di Kabupaten OKI ini memberikan gambaran, betapa perencanaan suatu program tidak dipahami oleh sebagian besar petani yang turut menjadi bagian dari program tersebut (Cahyana et al., 2022). Diseminasi kegiatan dari ketua kelompok tani ke anggotanya ternyata tidak berjalan lancar, terbukti adanya petani yang merasa belum pernah mendengar istilah *Food Estate* tersebut, apalagi untuk memahaminya, walaupun program ini juga merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya. Pembelajaran mendalam yang diperoleh dari petani terkait *Food Estate* Padi ini menunjukkan betapa pentingnya studi

yang mendalam dimana suatu program dapat terlaksana dengan baik tentu perlu didahului dengan mengevaluasi sumberdaya alam, sosial ekonomi petani dan juga lembaga dan kelembagaan pendukungnya.

Ada satu kisah menarik dari amatan emik ini, yaitu telisik data tanaman terong belanda di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Dari amatan emik dan telusur kisah petani setempat diketahui bahwa Kabupaten Solok, yang terkenal penghasil buah markisa, juga merupakan salah satu penghasil terong belanda (Erina, 2021). Namun, tampaknya saat ini komoditas terong belanda yang sempat menjadi komoditas primadona di Kabupaten Solok, lambat laun bergeser. Hal demikian sangat disayangkan. Mengingat terong (khususnya terong belanda) di kalangan masyarakat Minang merupakan menu masakan yang hampir selalu hadir dalam sajian makanan khas Minang.

Selanjutnya, komoditas ubi kayu selama ini masih dianggap sebagai komoditas bukan unggulan (*inferior*), sehingga program pemerintah terkait pengembangan ubi kayu kurang menjamah petani ubi kayu (Zulkarnain et al., 2021). Sebagai contoh, Program Pupuk Bersubsidi tidak menysasar pada petani ubi kayu, sehingga petani ubi kayu harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang relatif mahal. Beberapa petani ubi kayu telah mencari solusi antara lain dengan “mengakali” jatah pupuk subsidi untuk tanaman jagung (bila petani menanam jagung), sebagian jatah pupuk digunakan untuk pertanaman ubi kayu. Beberapa temuan amatan emik lainnya misalnya adalah ketidakberdayaan petani dalam mengurai persoalan hulu dan hilir pertanian ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengimbangi kebutuhan pupuk, petani lebih banyak menggunakan pupuk kandang. Petani di lokus studi umumnya sudah responsif dalam inovasi teknologi pertanian ubi kayu, terutama dalam penggunaan bibit dan pupuk. Sumber inovasi teknologi tersebut diperoleh dari sesama petani baik, di dalam desa maupun di luar desa, contohnya bibit ubi kayu baru varietas “Garuda” yang saat ini sedang *tren*. Kemudian, didapati bukti lain kurangnya keberpihakan Pemerintah kepada petani ubi kayu, seperti para penyuluh pertanian yang juga kurang memperhatikan pertanian ubi kayu tersebut. Pemasaran ubi kayu,

dominan ditujukan ke pabrik tapioka yang berlokasi di Kecamatan Abung Selatan. Dalam penentuan harga jual hasil produksi ubi kayu, biasanya ditentukan sepihak oleh pabrik, petani tidak mempunyai *bargaining position*, sehingga petani pasrah dengan kondisi yang ada.

Akhirnya, seri ini ditutup dengan cerita tentang lada putih yang pernah menjadi ratu sekaligus primadona rempah Nusantara, yang banyak dibudidayakan di daerah Bangka Belitung. Karena memang budi daya lada putih ini tampaknya menempati posisi yang sangat strategis dalam dunia komoditas pertanian di Bangka Belitung. Namun, terlihat bahwa keberlanjutan keprimadonaan komoditas lada putih ini dihadapkan pada tantangan akibat pasang surutnya isu lingkungan dan faktor sosial-ekonomi. Faktor sosial-ekonomi, seperti akses pasar, teknologi, dan penyuluhan berpengaruh terhadap keberlanjutan komoditas ini (Maryadi & Agusta, 2016). Keterbatasan terhadap teknologi modern dan akses informasi tentang pasar terbukti menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing. Daya saing inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pemacu dan pemicu, bahkan penentu dalam keberlanjutan pertanian lada putih. Amatan di lokus studi menemukan akan pentingnya langkah-langkah adaptasi dan juga mitigasi untuk membantu mengurangi dampak negatif dan juga meningkatkan produksi/hasil panen. Dengan adanya Sensus Pertanian ini dapat memberikan wawasan informasi yang akurat tentang tantangan dan peluang dalam menjaga keberlanjutan pertanian lada putih di Kabupaten Bangka Tengah.

Daftar Pustaka

- Bun, P. (2019). Potensi hijauan di areal perkebunan kelapa sawit perusahaan, kelompok tani dan perkebunan rakyat sebagai tanaman pakan sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. *Journal of Tropical Animal Science and Technology*, 1(1), 1–10. <https://core.ac.uk/download/pdf/230833612.pdf>
- Cahyana, D., Sarwani, M., & Noor, M. (2022). *Trivia rawa: serba serbi sumber daya lahan rawa*. UGM PRESS.

- Erina, F. (2021). *Analisa dan perancangan manajemen layanan IT pembayaran tiket masuk wisata pada Alahan Panjang Resort berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL*. Universitas Putra Indonesia YPTK. <http://repository.upiypkt.ac.id/5323/>
- Hendrita, V., & Supriyanti, J. (2023). Strategi pengembangan usahatani jeruk siam di Kabupaten Sijunjung. *UNES Journal of Agricultural Scienties*, 7(1), 1–9. <https://agriculture.faperta.ekasakti.org/index.php/UJAS/article/view/134>
- Maryadi, A. S., & Agusta, I. (2016). Analisis usaha tani lada dan arahan pengembangannya di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Tata Loka*, 18(2), 78–84.
- Mustika, S., Fathurrahman, F., Mahfudz, M., & Saleh, M. S. (2010). Perkecambahan benih pinang pada berbagai cara penanganan benih dan cahaya. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 17(2). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AGROLAND/article/view/290>
- Nasution, A. (2020). Pengembangan pinang sebagai tanaman alternatif dan pendukung pendapatan petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Bisnis Tani*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.35308/jbt.v5i1.1656>
- Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2019). Kontribusi tanaman agroforestri terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani (Contribution of agroforestry plants to farmers' income and welfare). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 118–127. <https://doi.org/10.23960/jsl17118-127>
- Saputra, H. (2021). Produksi hijauan dan kapasitas tampung ternak di lahan sawit di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Animal Center (JAC)*, 3(2), 69–77. <https://doi.org/10.36378/jac.v3i2.1363>
- Sukarniati, L. (2013). Determinan ketahanan pangan di Indonesia (studi kasus komoditi beras tahun 1980–2010). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 11(1), 69–80. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/163>
- Susilo, E., Novita, D., Warman, I., & Parwito, P. (2021). Pemanfaatan limbah pertanian untuk membuat pupuk organik di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. *Pakdemas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.58222/pakdemas.v1i1.10>

- Waluyo, M. R., Nurfaejriah, N., Mariati, F. R. I., & Rohman, Q. A. H. H. (2021). Pemanfaatan hidroponik sebagai sarana pemanfaatan lahan terbatas bagi Karang Taruna Desa Limo. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(1), 61–64. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/881/669>
- Wulansari, I. (2017). Industrialisasi minyak sawit di Indonesia: Resistensi warga dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah terhadap industri sawit. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 15. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1321708&val=223&title=Indonesias%20Palm%20Oil%20Industrialization%20The%20Resistance%20of%20Tanjung%20Pusaka%20Villagers%20Central%20Kalimantan%20Against%20Palm%20Oil%20Industry>
- Zulkarnain, Z., Zakaria, W. A., Haryono, D., & Murniati, K. (2021). Daya saing komoditas ubi kayu dengan internalisasi biaya transaksi di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.37637/ab.v4i2.712>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Glosarium

<i>Door-to-door</i>	: mendatangi rumah-rumah responden
<i>Geotagging</i>	: menambahkan informasi lokasi pada sesuatu, seperti gambar digital
<i>Geospasial</i>	: terdiri dari, berasal dari, atau berhubungan dengan data yang secara langsung terkait dengan lokasi geografis spesifik
Lebak	: daerah yang tergenang air dan mengandung lumpur dalam jumlah banyak
<i>Computer Assisted Web Interview (CAWI)</i> atau <i>Computer Assisted Personal Interview (CAPI)</i>	: teknik wawancara di mana responden atau pewawancara menggunakan komputer sebagai alat bantu

Patron	: seseorang yang menggunakan kekayaan atau pengaruhnya untuk membantu individu, institusi, atau tujuan tertentu. Dalam konteks buku ini, istilah 'patron' kerap dihubungkan dengan 'klien', yakni istilah untuk pihak yang berada di bawah perlindungan atau bergantung pada patron (relasi patron-klien).
<i>Paper Assisted Personal Interview</i> (PAPI)	: wawancara langsung secara personal menggunakan kuesioner sebagai alat bantu
<i>Probing</i>	: menyelidiki atau mengeksplorasi secara mendalam; menjalani investigasi yang mendalam
Rantai pasok	: serangkaian proses, bisnis, dan sebagainya yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan suatu barang; perusahaan, bahan, dan sistem yang terlibat dalam manufaktur dan pengiriman barang
<i>Snowball</i>	: teknik pengambilan sampel nonprobabilitas yang didasarkan pada referensi atau rekomendasi dari partisipan awal
Topografi	: kondisi muka bumi di suatu kawasan atau daerah

Indeks

Aceh, 1, 2, 3, 5, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 39,
40, 42, 49, 51, 54, 55, 127

akurasi, 368

anak, 300, 355, 357, 359, 362

Bengkulu, 3, 7, 27, 193, 194, 195,
196, 198, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 208, 210, 211,
217, 218, 219, 220, 221, 223,
225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 233, 234, 236, 237

Bireun, 26

BPS, 2, 19, 21, 24, 31, 34, 35, 36, 38,
61, 66, 69, 70, 74, 75, 98, 108,
110, 120, 126, 131, 132, 149,
150, 161, 162, 195, 196, 198,
202, 204, 205, 206, 208, 209,
236, 237, 240, 241, 242, 244,

245, 250, 251, 252, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 263,
302, 311, 314, 325, 326, 327,
358, 371, 373, 375, 379, 384,
385, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 418, 428, 429, 432, 433,
434, 435, 436, 460, 461, 463,
464, 468, 469, 470, 471, 505

Camat, 241

data, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 55, 58, 60,
61, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 78,
89, 98, 100, 102, 105, 107,
108, 109, 111, 117, 118, 120,
126, 129, 131, 132, 133, 144,
145, 149, 150, 151, 152, 153,
155, 161, 162, 163, 164, 165,

- 182, 183, 191, 192, 193, 195,
196, 198, 199, 200, 202, 205,
206, 207, 208, 209, 234, 235,
236, 237, 238, 240, 241, 242,
244, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 257, 258, 259, 260, 261,
263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 279, 290, 301, 303, 310,
311, 312, 314, 321, 324, 325,
327, 328, 329, 364, 365, 368,
369, 370, 371, 372, 379, 381,
382, 383, 384, 385, 388, 389,
390, 391, 394, 397, 398, 407,
418, 419, 420, 421, 424, 425,
426, 429, 430, 431, 432, 434,
435, 447, 449, 450, 456, 459,
460, 461, 467, 468, 469, 471,
472, 473, 485, 486, 489, 492,
494, 499
- Desa, 5, 29, 72, 73, 79, 90, 119, 120,
127, 142, 143, 144, 163, 169,
180, 214, 215, 217, 230, 231,
232, 241, 261, 263, 265, 271,
274, 295, 315, 317, 318, 319,
320, 331, 332, 333, 335, 336,
354, 355, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 375, 431, 434, 435,
437, 438, 439, 455, 466, 470,
474, 504, 506, 507, 508, 509
- Ekonomi, 34, 356, 393, 440, 505,
506, 507, 508, 509
- Elaborasi, 7
- Emik, 10, 12
- Empiris, 193, 210
- Fenomena, 66, 112, 354, 439, 477
- Gapoktan, 120, 358, 359
- Gelombang, 98
- Harga, 9, 51, 68, 112, 141, 160, 179,
180, 265, 273, 280, 403, 409,
412, 413, 417, 482, 484
- Hidroponik, 102
- hortikultura, 123, 463, 474, 481
- Indeks, 345
- Indonesia, 1, 2, 11, 13, 19, 21, 24,
27, 45, 47, 54, 55, 60, 61, 62,
70, 79, 85, 105, 109, 110,
116, 120, 126, 127, 131, 135,
136, 143, 150, 162, 179, 182,
183, 192, 196, 230, 247, 248,
251, 268, 269, 271, 275, 278,
283, 297, 300, 302, 304, 311,
370, 371, 380, 426, 440, 445,
446, 460, 462, 465, 505
- Informasi, 24, 141, 192, 196, 200,
204, 208, 243, 325, 384, 390,
391, 420, 435, 462, 468
- investasi, 7, 28, 46, 123, 185, 220,
221, 233, 235, 282, 301, 311,
368, 369, 481, 484, 492
- Jasa, 326
- Jenis, 83, 199, 463
- Jeruk, 60, 64, 79, 80, 91, 94
- jual, 34, 45, 50, 51, 68, 69, 100, 112,
140, 141, 156, 161, 167, 171,
174, 203, 220, 224, 273, 280,
289, 290, 294, 296, 303, 342,
344, 361, 381, 396, 402, 413,
415, 417, 424, 465, 495
- jumlah, 23, 26, 37, 38, 67, 72, 73,
75, 81, 88, 89, 102, 112, 113,
114, 126, 131, 142, 143, 144,
145, 164, 184, 192, 195, 242,
243, 252, 257, 266, 271, 279,

- 280, 299, 314, 315, 316, 319,
320, 323, 324, 325, 335, 352,
372, 375, 382, 383, 384, 385,
390, 391, 396, 402, 407, 408,
412, 414, 416, 417, 425, 427,
430, 432, 434, 436, 447, 450,
457, 463, 464, 466, 468, 476,
485, 499
- Kesejahteraan, 120, 196, 234, 370,
504, 506, 507, 508, 509
- Kominfo, 19
- Komoditas, 5, 38, 79, 85, 99, 151,
156, 174, 379, 399, 403, 429
- Koseka, 23, 31, 33, 34, 35, 70, 74,
126, 131, 132, 205, 206, 208,
252, 253, 257, 258, 260, 266,
302, 326, 328, 329, 330, 383,
384, 386, 391, 392, 393, 432,
460
- KSDK, 120, 398, 508, 509
- kualitatif, 3, 10, 12, 13, 15, 121, 182,
183, 239, 321, 369
- Lahan, 37, 39, 66, 76, 77, 92, 110,
116, 119, 133, 142, 209, 233,
246, 248, 250, 263, 269, 272,
273, 279, 295, 323, 331, 346,
357, 394, 411, 429, 437, 467,
468
- Lampung, 1, 2, 3, 9, 133, 353, 425,
426, 427, 428, 429, 431, 432,
433, 438, 440, 443, 452, 453,
483
- Lingkungan, 62, 99, 244, 254, 312,
326, 372, 426, 434, 482
- Lokasi, 315, 373, 383, 384, 386, 388,
406
- Masyarakat, 23, 67, 76, 84, 86, 114,
211, 216, 220, 221, 223, 234,
249, 325, 411, 440, 506, 507,
509
- Milenial, 282
- Modal, 39, 68, 344
- Monitoring, 255, 256, 257, 302
- Montasik, 29, 39
- Nagari, 375, 389
- Nama, 27, 133
- Negeri, 117, 362, 384, 504
- Pasar, 69, 83, 481
- Perkebunan, 7, 24, 26, 27, 28, 40,
100, 108, 111, 119, 128, 154,
210, 216, 217, 220, 222, 225,
226, 233, 334, 429, 466, 484,
505
- Petani, 31, 37, 42, 43, 44, 48, 52, 68,
74, 75, 76, 81, 82, 83, 88, 91,
92, 110, 113, 115, 118, 149,
150, 151, 152, 156, 159, 163,
165, 166, 167, 169, 170, 171,
173, 174, 178, 179, 180, 181,
196, 203, 208, 212, 219, 222,
223, 224, 225, 227, 228, 230,
235, 243, 245, 269, 276, 277,
282, 283, 284, 289, 312, 331,
343, 345, 346, 347, 349, 370,
394, 405, 406, 407, 409, 415,
437, 443, 462, 468, 474, 480,
481, 482, 483, 484, 485
- Produksi, 69, 94, 134, 139, 151, 343,
379, 409, 431, 468
- Provinsi, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 21, 24, 26,
28, 37, 42, 54, 63, 99, 102,
107, 114, 133, 150, 153, 158,

- 159, 179, 230, 255, 257, 260,
312, 353, 378, 379, 382, 393,
394, 406, 426, 462, 463, 465,
474, 477
- Pupuk, 80, 410, 442
- Regsosek, 35, 389, 432, 436, 472
- Resiliensi, 158
- Rezeki, 144, 318
- risiko, 7, 43, 60, 86, 87, 91, 147, 173,
177, 178, 180, 240, 275, 276,
277, 285, 292, 296, 297, 299,
302, 303, 311, 336, 357, 363,
396, 399, 402, 462, 482, 493
- Sawah, 250, 274, 355
- Sawit, 2, 128, 133, 134, 139, 140,
142, 166, 211, 212, 213, 215,
334
- Sejahtera, 72
- Sejarah, 1, 2, 484
- Sensus, 2, 6, 10, 11, 13, 19, 21, 22,
30, 34, 35, 55, 60, 61, 62, 66,
69, 70, 72, 73, 75, 93, 94, 98,
99, 103, 105, 106, 108, 109,
116, 120, 126, 131, 149, 150,
151, 161, 163, 180, 182, 183,
192, 193, 195, 196, 198, 201,
202, 204, 205, 206, 207, 208,
240, 241, 242, 243, 244, 250,
252, 260, 262, 264, 265, 267,
268, 269, 271, 302, 310, 311,
312, 315, 321, 326, 364, 370,
371, 372, 380, 384, 388, 391,
393, 418, 425, 426, 429, 432,
433, 435, 460, 461, 467, 469,
471, 485, 486
- Sipil, 1
- Solok, 3, 8, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 385, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 415, 416
- Sosial, 34, 110, 120, 325, 504, 506,
507, 508, 509
- Sumatra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 27, 59, 60, 62, 63, 64,
70, 78, 82, 85, 100, 105, 112,
144, 153, 197, 241, 247, 255,
257, 271, 279, 298, 301, 302,
312, 313, 325, 333, 334, 362,
367, 369, 372, 378, 379, 382,
383, 394, 395, 399, 406, 407,
415, 426, 462, 489, 490, 494
- Tanah, 63, 80, 84, 90, 105, 194, 199,
274, 276, 295, 354, 372, 415,
428
- Tani, 103, 110, 120, 142, 175, 177,
280, 319, 354, 358, 362, 440
- Teknik, 81, 90, 472, 473
- Teknologi, 87, 89, 119, 325, 336,
468, 482, 508
- Tengkulak, 43
- Ubi, 439, 440, 443, 445
- Undang-undang, 19, 311, 373
- Uraian, 128
- Usaha, 38, 42, 51, 67, 68, 131, 132,
192, 216, 253, 254, 265, 281,
342, 346, 380, 405, 431, 435,
440, 482, 507
- Utara, 3, 5, 7, 9, 26, 27, 60, 62, 63,
64, 70, 78, 82, 85, 105, 108,
111, 112, 144, 193, 194, 195,

196, 198, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 208, 210, 217,
218, 219, 220, 221, 223, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231,
233, 234, 236, 237, 250, 425,
426, 427, 428, 429, 431, 432,
433, 440, 443, 452, 453, 506

variabel-variabel, 108

Wawancara, 74, 89, 252, 254, 270,
321, 322, 323, 433, 453

Wilayah, 23, 27, 128, 132, 153, 195,
201, 247, 258, 271, 277, 282,
312, 314, 315, 316, 372, 375,
429, 434

wisata, 57, 95, 106, 119, 122, 123,
314, 378, 395, 496

Yayasan, 506

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tentang Editor

Reza Amarta Prayoga



Reza Amarta Prayoga merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia memperoleh gelar Sarjana Sosiologi tahun 2011 di Universitas Andalas, dan Master of Art Sosiologi tahun 2013 di Universitas Gadjah Mada. Saat ini (tahun 2024) penulis sedang menyelesaikan studi Doktorat Sosiologi dengan fokus Mitigasi Bencana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fokus riset dan publikasi ilmiahnya berpusar pada isu-isu sosial, kesejahteraan, ketimpangan sosial, dan budaya yang diterbitkan oleh berbagai penerbit buku baik Nasional dan Internasional. Ia dapat dihubungi melalui reza010@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Badrun Susantyo



Badrun Susantyo, lahir pada 20 Agustus 1967, di Sragen, Jawa Tengah, adalah Periset pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) untuk bidang Ilmu Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Pendidikan Magister diperoleh dari

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB. Menyelesaikan pendidikan doktor (Ph.D) pada bidang keilmuan *Social Development/ Social Work* pada *School of Social Science* Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia. Sebelum menekuni dunia “riset” sebagai seorang peneliti, BRIN, penulis adalah Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Juga sempat menjadi Staf Pengajar di STKS Bandung dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD). Beberapa publikasi baik berupa buku, hasil penelitian maupun artikel telah ditulis.

Ratna Rizki Amalia



Ratna Rizki Amalia merupakan Statistisi Ahli Muda di Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS). Ratna memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2013) dan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan di Universitas Indonesia (2021). Di BPS, Ratna aktif terlibat di berbagai survei dan sensus pertanian, dan telah menghasilkan

beberapa publikasi, jurnal, dan prosiding, terutama di bidang Statistik Pertanian. Ratna juga terlibat sebagai Tim Penilai Badan yang bertugas melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Sejak tahun 2022, Ratna juga aktif sebagai asisten pengajar pada Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia. Ratna dapat dihubungi melalui ratna.amalia@bps.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tentang Penulis

Eki Karsani Apriliyadi



Eki Karsani Apriliyadi merupakan seorang peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (PR-KSDK) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia memperoleh gelar sarjana dari Jurusan Antropologi, Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2002, memperoleh gelar magister dari jurusan yang sama di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan BRIN, pernah bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2002. Bidang riset yang digeluti berada di sekitar tema pemanfaatan teknologi, pengetahuan lokal, dan lingkungan. Kontak email: ekik001@brin.go.id dan eki.karsani@gmail.com

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Herlina Tarigan



Herlina Tarigan, lahir di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 29 Juni 1967. Pendidikan S-1 di Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian lulus tahun 1990. Tahun 1999 melanjutkan S-2 di Fakultas Pascasarjana IPB, program Studi Sosiologi Pedesaan. Gelar Doktor diperoleh dari Program Studi dan institusi yang sama pada tahun 2015 dengan disertasi berjudul "Peluruhan Kelembagaan Lokal Subak: Analisis Konflik Kepentingan Sosial Ekonomi di Kabupaten Tabanan, Bali." Tahun 1991, sempat bekerja di Yayasan Penebar Swadaya sebagai reporter Majalah Trubus. Tahun 1992, bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, di Bogor. Bidang penelitian yang banyak ditekuni terkait kebijakan sumber daya lahan pertanian, dinamika sosial ekonomi petani kecil, kelembagaan pertanian, dan kemiskinan. Tahun 2022 sampai sekarang, bergabung di Badan Riset Inovasi Nasional, sebagai periset di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.

Abdul Mutholib



Abdul Mutholib, lahir di Jakarta pada 15 Maret 1961. Setelah menamatkan Pendidikan di Universitas Jaya Raya Jakarta dengan Gelar Sarjana Ekonomi tahun 1987, berkarir di perusahaan swasta bekerja selama 4 tahun sebagai staf *purchasing*, satu tahun kemudian diangkat menjadi *Accounting manager* pada PT RFC (Perusahaan Rekanan Hankam di Bidang Perlengkapan Komunikasi TNI),

pada tahun 1993 mendaftar untuk seleksi pegawai di Kementerian Perhubungan, lulus ditempatkan di badan Litbang sampai sejak 1993–2021. Tahun 2021 dilantik menjadi Pegawai BRIN pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas OR TKPEKM BRIN dengan Jabatan Fungsional Ahli Peneliti Madya dengan Kepekaran di Bidang Transportasi. *E-mail: raziv.btw@gmail.com*

Khairiah



Khairiah lahir di Indrapura pada 7 Agustus 1962. Peneliti Madya di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Diangkat sebagai pegawai Fungsional Peneliti Pada Departemen Pertanian dengan kepekaran sistem usaha pertanian. *E-mail khairiah@brin.go.id* Orcid id: <http://orcid.org/0000-0003-2552-8699>

Siti Fatimah



Siti Fatimah lahir di Semarang pada 26 Maret 1961. Menyelesaikan S-1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN R.I) pada tahun 1994. Menjadi Peneliti Madya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009 dengan Bidang Studi Pengembangan Masyarakat. Saat ini bekerja pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Organisasi Riset Tata

Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial, Pengembangan Masyarakat, dan Ekonomi Lokal. Beberapa tahun terakhir menulis beberapa buku KTI dan Jurnal Nasional terkait Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan masyarakat.

Tedi Gunawan



Tedi Gunawan, seorang peneliti yang bekerja di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR-KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan spesialisasi dalam bidang Politik dan Pemerintahan. Ia lahir di Bantul pada 27 Juli 1988 dan lulus dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Tedi Gunawan

berhasil menyelesaikan dua program master secara bersamaan di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University (2020), dan Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada (2021). Mimpinya adalah menjadi seorang peneliti yang handal dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam buku ini, penulis berusaha untuk menceritakan kisah sebuah daerah pedesaan yang terlupakan oleh kegiatan sensus pertanian tahun 2023 (ST2023) dan mengungkapkan situasi mereka.

Yanter Hutapea



Yanter Hutapea, menamatkan pendidikan S-1 dari program studi Pembangunan Pertanian Universitas Sriwijaya tahun 1986 dan S-2 dari jurusan Agribisnis Universitas Sriwijaya tahun 2002. Saat ini sebagai Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, BRIN. Sebelumnya, peneliti di Kebun Percobaan Makariki-Maluku Tengah dari Balai Penelitian Kelapa (1987–1995), di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ambon (1995–1999) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel (1999–2022).

Iwan Setiajie Anugrah



Iwan Setiajie Anugrah, lahir di Sumedang pada 27 Februari 1966. Jabatan saat ini sebagai Peneliti Ahli Madya, Pendidikan S-2 Sosial Ekonomi Pertanian/Ekonomi Pembangunan Pertanian, Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD). Pendidikan terakhir Sekolah Pasca Sarjana S-3, Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Institut Pertanian Bogor (IPB)

Tri Bastuti Purwantini



Tri Bastuti Purwantini, seorang peneliti ahli madya pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR-KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai April tahun 2022. Sebelumnya (tahun 1989–2022) bekerja pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, sebagai peneliti sosial ekonomi pertanian. Menamatkan Pendidikan Sarjana pada Jurusan Gizi

Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1986.

Husmiati



Husmiati lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 9 Oktober 1967. Peneliti ahli madya Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pekerjaan Sosial (Dra) di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 1991. Pendidikan pasca sarjana di Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia dan meraih gelar Master of

Social Science (M.Soc.Sc) pada tahun 2004, serta Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada tahun 2011 pada universitas yang sama. Pernah bertugas di Kementerian Sosial RI dari tahun 1993–2021. *E-mail*: husmiati@brin.go.id. Id Scopus: 58142956700, Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=06tg9_AAAAAJ&hl=en

Buku *Mencari Suara Petani hingga Pelosok Nusantara: Catatan Emik dari Sumatra Jilid 1* menawarkan pendalaman kualitatif atas data kuantitatif Sensus Pertanian 2023. Melalui pendekatan emik, buku ini menyingkap realitas sosiokultural dan ekonomi masyarakat agraris di sebelas lokus di Sumatra yang kerap tidak terakomodasi dalam statistik makro.

Para penulis menguraikan dinamika komoditas strategis—mulai dari fluktuasi harga pinang di Aceh, tantangan hortikultura di Karo, hingga desakan ekspansi sawit terhadap perkebunan karet rakyat di Jambi. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan proses pendataan, tetapi juga mengekstraksi narasi autentik petani mengenai hambatan struktural dan strategi penghidupan mereka. Sebagai hasil kolaborasi BPS dan BRIN, karya ini menjadi referensi krusial bagi pemangku kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian yang holistik, berbasis bukti, dan berorientasi pada kesejahteraan petani serta kedaulatan pangan nasional.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.934



ISBN 978-602-6303-90-5



: 7 8 6 0 2 6 3 0 3 9 0 5

Buku ini tidak diperjualbelikan.